



PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

RPD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 2023 - 2026

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Batang
2022



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan daerah merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai dasar keberlanjutan dalam melaksanakan pembangunan daerah agar sesuai dengan tujuan, sasaran, visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batang akan berakhir pada bulan Mei Tahun 2022, maka perlu menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026;

c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pembangunan daerah dan sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026, maka perlu mengatur dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Seri E Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Mengingat : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023-2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 2

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- b. pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2036.
- c. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum;
 - c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV Pemasalahan dan Isu Strategis;
 - e. BAB V Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas;
 - g. BABVII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Darah;
 - i. BAB IX Penutup.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daeah Tahun 2023-2026 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

Pasal 6

- (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional dan/atau masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, kondisi darurat, keadaan luar biasa, pemekaran daerah, perubahan kebijakan nasional, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI BATANG,
ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 18 Maret 2022

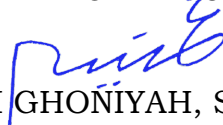
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19690207 199303 2 008

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	9
1.3.1 Hubungan RPD dan RPJPD.....	9
1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJMN.....	10
1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).....	11
1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Batang.....	11
1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektoral Lainnya.....	12
1.4 Maksud dan Tujuan.....	13
1.4.1 Maksud.....	13
1.4.2 Tujuan.....	13
1.5 Sistematika RPD Tahun 2023-2026.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi	1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	32
2.1.3 Aspek Daya Saing	89
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum	103
2.1.5 Capaian Pemulihan Ekonomi Daerah	215
2.1.6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	217
2.2 HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	227
2.3 KINERJA RPJMD 2017 – 2022	251

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1 Kinerja Keuangan Daerah	3
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	5
3.2 Analisis Keuangan Daerah	23
3.2.1 Analisis Rasio Keuangan	23
3.2.2 Neraca Daerah	26
3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	31
3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	31
3.3.2 Analisis Pembiayaan	33
3.4 Kerangka Pendanaan	38
3.4.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023-2026	38
3.5 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	46
3.5.1. Kerangka Pendanaan	46
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	1
4.2 Isu Strategis	10
4.2.1 Isu Strategis Internasional	10
4.2.2 Isu Nasional	14
4.2.3 Isu Strategis RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026	16
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	1
5.1 Telaah RPJMN Tahun 2020-2024	1
5.2 Telaah RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023	3
5.3 Telaah RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025 Visi Misi RPJPD 2005-2025	6
5.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2023-2026	10
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
6.1 Strategi Pembangunan Daerah	1
6.2 ARAH KEBIJAKAN.....	17
6.2.1 Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2023-2026.....	24

6.2.2 Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)...	77
6.2.3 Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19.....	83
6.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.....	87
6.2.5 Arah Kebijakan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang.....	96
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS.....	
7.1 Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	
8.1 Indikator Kinerja Utama.....	1
8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	2
8.3 Indikator Kinerja Daerah.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Antar Dokumen.....	9
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kabupaten Batang.....	1
Gambar 2. 2	Posisi Kabupaten Batang.....	4
Gambar 2. 3	Peta Morfologi Kabupaten Batang.....	5
Gambar 2. 4	Peta 5 Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang.....	6
Gambar 2. 5	Peta Geologi Kabupaten Batang.....	8
Gambar 2. 6	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Batang.....	9
Gambar 2. 7	Peta Curah Hujan Kabupaten Batang.....	11
Gambar 2. 8	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2020.....	13
Gambar 2. 9	Peta Rawan Bencana Di Kabupaten Batang.....	15
Gambar 2. 10	Piramida Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2021	28
Gambar 2. 11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	33
Gambar 2. 12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2021.....	43
Gambar 2. 13	Pdrb Per Kapita Adhk Kabupaten Batang.....	44
Gambar 2. 14	Pdrb Per Kapita Adhb Kabupaten Batang.....	45
Gambar 2. 15	Laju Inflasi Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021 (Persen).....	46
Gambar 2. 16	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah Dan Nasional (2017-2021).....	48
Gambar 2. 17	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan Kabupaten/Kota Sekitar Dan Provinsi Jawa Tengah.....	49
Gambar 2. 18	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa).....	50
Gambar 2. 19	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2021 (Ribuan Jiwa).....	51
Gambar 2. 20	Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	51

Gambar 2. 21	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	53
Gambar 2. 22	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang (P2) Tahun 2017-2021.....	54
Gambar 2. 23	Ipm Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	55
Gambar 2. 24	Ipm Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2021.....	56
Gambar 2. 25	Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	58
Gambar 2. 26	Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	59
Gambar 2. 27	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	61
Gambar 2. 28	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	61
Gambar 2. 29	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	63
Gambar 2. 30	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021.....	64
Gambar 2. 31	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	65
Gambar 2. 32	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	65

Gambar 2. 33	Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	67
Gambar 2. 34	Indeks Pembangunan Gender (Ipg) Kabupaten Batang Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2021.....	68
Gambar 2. 35	Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2016-2020.....	69
Gambar 2. 36	Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (Idg) Kabupaten Batang Tahun 2020.....	69
Gambar 2. 37	Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang (Per 100.000 Kh).....	71
Gambar 2. 38	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kh Kabupaten Batang.....	72
Gambar 2. 39	Angka Kematian Balita Per 1000 Kh Kabupaten Batang.....	72
Gambar 2. 40	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Batang.....	73
Gambar 2. 41	Persentase Kasus Stunting Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	75
Gambar 2. 42	Pmks Diluar Panti Yang Ditangani Kabupaten Batang.....	80
Gambar 2. 43	Persentase Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Batang...	81
Gambar 2. 44	Pmks Yang Diberdayakan Di Kabupaten Batang (Per 1000).....	82
Gambar 2. 45	Perkembangan Tpt (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021.....	83
Gambar 2. 46	Perkembangan Tpt (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Batang Dibandingkan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017- 2021.....	84
Gambar 2. 47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Batang..	85
Gambar 2. 48	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	86
Gambar 2. 49	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Batang.....	87
Gambar 2. 50	Nilai Pemeringkatan Mandiri Reformasi Birokrasi (Pmprb)..	87

Gambar 2. 51	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Batang Dibandingkan Dengan Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun).....	90
Gambar 2. 52	Panjang Jalan Kondisi Baik Kewenangan Kabupaten Batang.....	92
Gambar 2. 53	Panjang Jalan Kondisi Rusak Sedang Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	92
Gambar 2. 54	Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	93
Gambar 2. 55	Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat.....	93
Gambar 2. 56	Persentase Cakupan Layanan Akses Air Minum Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	95
Gambar 2. 57	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	95
Gambar 2. 58	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Non Perpipaan Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	96
Gambar 2. 59	Cakupan Layanan Akses Sanitasi Kabupaten Batang.....	97
Gambar 2. 60	Perkembangan Persentase Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	98
Gambar 2. 61	Angka Kriminalitas Di Kabupaten Batang.....	100
Gambar 2. 62	Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Batang.....	103
Gambar 2. 63	Angka Melek Huruf Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	104
Gambar 2. 64	Angka Partisipasi Kasar Per Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	105
Gambar 2. 65	Angka Partisipasi Murni Per Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	106
Gambar 2. 66	Angka Partisipasi Paud Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	107
Gambar 2. 67	Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang.....	110
Gambar 2. 68	Angka Kematian Bayi Per 1000 Kh Kabupaten Batang.....	111
Gambar 2. 69	Angka Kematian Balita Per 1000 Kh Kabupaten Batang..	112

Gambar 2. 70	Prevalensi Balita Gizi Buruk (%).....	113
Gambar 2. 71	Persentase Kasus Stunting.....	114
Gambar 2. 72	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	115
Gambar 2. 73	Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	116
Gambar 2. 74	Luas Drainase Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	116
Gambar 2. 75	Cakupan Layanan Akses Air Minum Kabupaten Batang (%).....	117
Gambar 2. 76	Cakupan Layanan Akses Sanitasi Kabupaten Batang.....	118
Gambar 2. 77	Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	119
Gambar 2. 78	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Batang (%).....	119
Gambar 2. 79	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Batang.....	120
Gambar 2. 80	Pmks Yang Tertangani Kabupaten Batang.....	122
Gambar 2. 81	Persentase Pmks Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Batang.....	123
Gambar 2. 82	Pmks Yang Diberdayakan Di Kabupaten Batang.....	124
Gambar 2. 83	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	124
Gambar 2. 84	Kerugian/Kerusakan Akibat Bencana Tahun 2017-2021..	126
Gambar 2. 85	Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Di Kabupaten Batang (Orang) Tahun 2017-2021.....	131
Gambar 2. 86	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (Orang).....	133
Gambar 2. 87	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Batang (Ton).....	135
Gambar 2. 88	Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Batang (Ton).....	136
Gambar 2. 89	Ketersediaan Energi Per Kapita (Kal) Dan Protein Per Kapita (G).....	137
Gambar 2. 90	Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah Dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	137

Gambar 2. 91	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Di Kabupaten Batang.....	138
Gambar 2. 92	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang.....	139
Gambar 2. 93	Indeks Kualitas Air Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	139
Gambar 2. 94	Indeks Kualitas Udara Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	140
Gambar 2. 95	Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Batang (%).....	141
Gambar 2. 96	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Batang.....	142
Gambar 2. 97	Cakupan Area Pelayanan Penanganan Sampah Kabupaten Batang Tahun 2016-2020.....	142
Gambar 2. 98	Rasio Penduduk Ber Ktp Elektronik Kabupaten Batang (%).....	143
Gambar 2. 99	Rasio Bayi Berakta Kelahiran Kabupaten Batang (%).....	144
Gambar 2. 100	Rasio Akta Kematian Kabupaten Batang	144
Gambar 2. 101	Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Batang (%)...	145
Gambar 2. 102	Persentase Pkk Aktif Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	146
Gambar 2. 103	Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	146
Gambar 2. 104	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa.....	147
Gambar 2. 105	Cakupan Pus Yang Menjadi Peserta Kb Aktif Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	148
Gambar 2. 106	Rasio Akseptor Kb Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	148
Gambar 2. 107	Unmetneed Kb (%) Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	149
Gambar 2. 108	Jaringan Jalan Rel Kereta Api Di Jawa Tengah.....	150
Gambar 2. 109	Persebaran Terminal Tipe B, Terminal Tipe C Dan Pangkalan Truk.....	154
Gambar 2. 110	Rasio Ijin Trayek Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	160

Gambar 2. 111	Peta Jaringan Trayek Kabupaten Batang.....	160
Gambar 2. 112	Koridor Pelayanan Angkutan Umum Berbasis Jalan.....	161
Gambar 2. 113	Pemasangan Rambu-Rambu Di Kabupaten Batang.....	163
Gambar 2. 114	Fasilitas Perlengkapan Jalan (Lpju) Terpasang Di Kabupaten Batang.....	165
Gambar 2. 115	Titik Pju Di Kabupaten Batang Pada Jalan Provinisi.....	166
Gambar 2. 116	Titik Pju Di Kabupaten Batang Pada Jalan Nasional.....	166
Gambar 2. 117	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Di Kabupaten Batang..	168
Gambar 2. 118	Peta Jaringan Jalan Lokasi Kawasan Industri.....	169
Gambar 2. 119	Prosentase Koperasi Aktif Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	173
Gambar 2. 120	Prosentase Koperasi Sehat Terhadap Ksp Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	174
Gambar 2. 121	Jumlah Produk Ovop Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	175
Gambar 2. 122	Jumlah Wirausaha Baru Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	176
Gambar 2. 123	Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	177
Gambar 2. 124	Jumlah Perusahaan Baru Yang Berinvestasi Di Kabupaten Batang.....	178
Gambar 2. 125	Jumlah Ijin Usaha Yang Diterbitkan Tahun 2017-2021.	178
Gambar 2. 126	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina Di Kabupaten Batang.....	179
Gambar 2. 127	Jumlah Organisasi Olahraga Yang Dibina Di Kabupaten Batang.....	180
Gambar 2. 128	Jumlah Kejuaraan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Batang Di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021.....	181
Gambar 2. 129	Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Tahun 2017-2021.....	184
Gambar 2. 130	Jumlah Festival Dan Peristiwa Budaya Yang Diselenggarakan.....	185

Gambar 2. 131	Jumlah Grup Kesenian Yang Dibina (Grup) Tahun 2017-2021.....	186
Gambar 2. 132	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (%).....	187
Gambar 2. 133	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%) Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	188
Gambar 2. 134	Penyelamatan Arsip/Dokumen Yang Mempunyai Nilai Guna Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	189
Gambar 2. 135	Produksi Perikanan Tangkap.....	190
Gambar 2. 136	Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Kabupaten Batang..	191
Gambar 2. 137	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Th) Kabupaten Batang.....	191
Gambar 2. 138	Kunjungan Wisata Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	193
Gambar 2. 139	Pad Sektor Pariwisata Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	194
Gambar 2. 140	Produktivitas Padi Sawah Dan Jagung (Ton/Ha) Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	195
Gambar 2. 141	Jumlah Kelompok Tani Binaan Kabupaten Batang.....	197
Gambar 2. 142	Jumlah Usaha Perdagangan Kecil Yang Memiliki Siup Di Kabupaten Batang, Tahun 2016 - 2020 (Unit).....	200
Gambar 2. 143	Revitalisasi Pasar Rakyat Kabupaten Batang.....	201
Gambar 2. 144	Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	202
Gambar 2. 145	Ekspor Bersih Perdagangan (Us \$) Kabupaten Batang....	202
Gambar 2. 146	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap Pdrb (Adhb) Dan Adhk.....	203
Gambar 2. 147	Pertumbuhan Industri Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	204
Gambar 2. 148	Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Pdrb (Adhb) Dan Adhk Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	205
Gambar 2. 149	Persentase Opd Inovatif Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	210

Gambar 2. 150	Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	211
Gambar 3. 1	Sumber Pendapatan.....	12
Gambar 3. 2	Pendapatan Asli Daerah.....	13
Gambar 3. 3	Pendapatan Transfer.....	14
Gambar 3. 4	Lainlain Pendapatan Yang Sah.....	15
Gambar 3. 5	Realisasi Belanja 2017-2021.....	16
Gambar 3. 6	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja.....	17
Gambar 3. 7	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja.....	17
Gambar 3. 8	Rasio Belanja Tak Terduga Terhadap Total Belanja.....	18
Gambar 3. 9	Belanja Transfer.....	20
Gambar 3. 10	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan.....	21
Gambar 3. 11	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan.....	22
Gambar 5. 1	Misi Rpjmn 2020-2024.....	1
Gambar 5. 2	Arahan Presiden.....	2
Gambar 5. 3	Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024.....	3
Gambar 6. 1	Skema Strategi Pencapaian Tujuan 1.....	12
Gambar 6. 2	Skema Strategi Pencapaian Tujuan 2.....	14
Gambar 6. 3	Skema Strategi Pencapaian Tujuan 2.....	15
Gambar 6. 4	Tema Pembangunan Tahunan Rpd 2023-2026.....	25
Gambar 6. 5	Kabupaten Batang Berdasarkan Kondisi Fisiografis Dan Kemampuan Lahan.....	88
Gambar 6. 6	Peta Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Batang.....	2
Tabel 2. 2	Rata-Rata Hari Hujan Dan Curah Hujan Di Kabupaten Batang Tahun 2021.....	10
Tabel 2. 3	Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2021.....	12
Tabel 2. 4	Potensi Bencana Di Kabupaten Batang.....	14
Tabel 2. 5	Jumlah Kejadian Bencana Di Kabupaten Batang.....	16
Tabel 2. 6	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Batang (Ha).....	25
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin.....	27
Tabel 2. 8	Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2021.....	28
Tabel 2. 9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2021.....	30
Tabel 2. 10	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin.....	30
Tabel 2. 11	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Batang.....	31
Tabel 2. 12	Pdrb Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	34
Tabel 2. 13	Pdrb Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	36
Tabel 2. 14	Laju Pertumbuhan Pdrb Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021.....	37
Tabel 2. 15	Distribusi Persentase Pdrb Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaham Tahun 2017-2021.....	38
Tabel 2. 16	Pdrb Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	41
Tabel 2. 17	Pdrb Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021.....	42
Tabel 2. 18	Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Batang Tahun 2017-2020.....	47

Tabel 2. 19 Indikator Pembentuk Ipm Kabupaten Batang 2017-2021.....	57
Tabel 2. 20 Persebaran Desa Odf Kabupaten Batang Tahun 2021.....	76
Tabel 2. 21 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Dan Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021.....	78
Tabel 2. 22 Jumlah Ppid Pembantu (Pd) Yang Melapor Ke Ppid.....	88
Tabel 2. 23 Nilai Sakip Kabupaten Batang Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 2. 24 Kondisi Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten.....	91
Tabel 2. 25 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2017-2021.....	94
Tabel 2. 26 Rasio Ekspor Terhadap Pdrb Adhk Kabupaten Batang.....	99
Tabel 2. 27 Jumlah Pos Kamling Di Kabupaten Batang.....	101
Tabel 2. 28 Data Angka Putus Sekolah Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	106
Tabel 2. 29 Kondisi Sarpras Pendidikan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	107
Tabel 2. 30 Angka Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2017-2021.....	108
Tabel 2. 31 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi Tahun 2017-2021.....	109
Tabel 2. 32 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Dan Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Tahun 2017-2021.....	114
Tabel 2. 33 Rasio Rth Dan Ketaatan Terhadap Rtrw Kabupaten Batang (%)......	117
Tabel 2. 34 Prosentase Penambahan Perumahan Formal Dan Prosentase Rumah Sehat Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	120
Tabel 2. 35 Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani Di Kabupaten Batang.....	125
Tabel 2. 36 Jumlah Kejadian Bencana Di Kabupaten Batang.....	126
Tabel 2. 37 Potensi Bencana Di Kabupaten Batang.....	127
Tabel 2. 38 Jumlah Korban Bencana (Jiwa) Di Kabupaten Batang.....	128
Tabel 2. 39 Jumlah Angkatan Kerja Di Kabupaten Batang (Orang).....	129
Tabel 2. 40 Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%) Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	130
Tabel 2. 41 Jumlah Pencari Kerja Dibandingkan Lowongan Kerja Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	130

Tabel 2. 42	Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan, Swasta Dan Legislatif Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	132
Tabel 2. 43	Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	134
Tabel 2. 44	Persebaran Perlindungan Jalan Kabupaten Batang.....	150
Tabel 2. 45	Persebaran Terminal Tipe B, C, Dan Pangkalan Truk Di Kabupaten Batang Tahun 2022.....	152
Tabel 2. 46	Data Jumlah Trayek Dan Jumlah Penumpang Per Hari.....	154
Tabel 2. 47	Data Persandingan Antara Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas.....	155
Tabel 2. 48	Kondisi Terminal Tipe C Di Kabupaten Batang.....	156
Tabel 2. 49	Rekapitulasi Data Parkir Per Wilayah Di Kabupaten Batang.....	159
Tabel 2. 50	Fasilitas Perlengkapan Jalan (Lpju) Terpasang Di Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021.....	163
Tabel 2. 51	Fasilitas Perlengkapan Jalan (Lpju) Terpasang Berdasar Ruas Jalan Di Kabupaten Batang.....	164
Tabel 2. 52	Indikator Kinerja Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	172
Tabel 2. 53	Persentase Pemuda Berwirausaha (%) Di Kabupaten Batang.....	180
Tabel 2. 54	Jumlah Perolehan Medali Pada Event Olahraga Nasional Dan Internasional Atlet Kabupaten Batang Tahun 2021.....	181
Tabel 2. 55	Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Batang Tahun 2017-2021	183
Tabel 2. 56	Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	184
Tabel 2. 57	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, Dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat Di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	187
Tabel 2. 58	Data Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	195
Tabel 2. 59	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pdrb Tahun 2017-2021.....	198

Tabel 2. 60	Produksi Peternakan Tahun 2017-2021.....	199
Tabel 2. 61	Jumlah Industri Dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri Di Kabupaten Batang Tahun 2016-2020.....	203
Tabel 2. 62	Jumlah Kk Yang Mengikuti Transmigrasi Tahun 2017-2021.....	206
Tabel 2. 63	Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Tahun 2017- 2021.....	206
Tabel 2. 64	Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2017- 2021.....	207
Tabel 2. 65	Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Tahun 2017- 2021.....	209
Tabel 2. 66	Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan Tahun 2017-2021.....	212
Tabel 2. 67	Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021.....	213
Tabel 2. 68	Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Dprd Tahun 2017-2021.....	214
Tabel 2. 69	Capaian Kinerja Spm Bidang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	217
Tabel 2. 70	Capaian Kinerja Spm Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021.....	221
Tabel 2. 71	Capaian Spm Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum..	225
Tabel 2. 73	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	227
Tabel 2. 74	Evaluasi Capaian Misi 1 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	251
Tabel 2. 75	Evaluasi Capaian Misi 2 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	255
Tabel 2. 76	Evaluasi Capaian Misi 3 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	258
Tabel 2. 77	Evaluasi Capaian Misi 4 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	262
Tabel 3. 1	Persandingan Struktur Pendapatan Daerah Pada Apbd.....	4

Tabel 3. 2	Persandingan Struktur Belanja Daerah Dalam Apbd.....	5
Tabel 3. 3	Realisasi Apbd Kabupaten Batang Tahun 2017-2021*).....	7
Tabel 3. 4	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	23
Tabel 3. 5	Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah.....	24
Tabel 3. 6	Rasio Kemandirian Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	24
Tabel 3. 7	Rasio Ketergantungan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021..	24
Tabel 3. 8	Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	25
Tabel 3. 9	Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal.....	26
Tabel 3. 10	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupeten Batang Tahun 2017-2021.....	26
Tabel 3. 11	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	27
Tabel 3. 12	Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	30
Tabel 3. 13	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Tahun 2017-2021.....	32
Tabel 3. 14	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Batang Tahun 2017-2022.....	33
Tabel 3. 15	Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang 2017-2021..	35
Tabel 3. 16	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang 2017-2021.....	35
Tabel 3. 17	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Batang 2017-2021.....	37
Tabel 3. 18	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026...	41
Tabel 3. 19	Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026.....	44
Tabel 3. 20	Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026.....	45
Tabel 3. 21	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Batang Tahun 2017-2021.....	47
Tabel 3. 22	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	47
Tabel 3. 23	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	48

Tabel 5. 1 Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (Rpd) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	14
Tabel 6. 1 Analisis Faktor Internal Dan Faktor Eksternal.....	3
Tabel 6. 2 Hasil Analisis Swot Dalam Penetapan Strategi Pembangunan Daerah.....	4
Tabel 6. 3 Tujuan, Sasaran Dan Strategi Rpd Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	15
Tabel 6. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Rpd Kabupaten Batang 2023-2026.....	18
Tabel 6. 5 Program Prioritas Yang Disertai Pagu Indikatif Rpd Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	50
Tabel 6. 6 Program Pelayanan Dasar Rpd Dalam Pemenuhan Spm Tahun 2023-2026.....	78
Tabel 7. 1 Proyeksi Apbd Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	2
Tabel 7. 2 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Batang.....	88
Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	1
Tabel 8. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.....	1
Tabel 8. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang.....	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan Daerah yang mana merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan menggunakan perencanaan yang komprehensif maka diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah harus menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berazaskan keadilan demi kemakmuran rakyat diperlukan instrumen formulasi kebijakan yang tepat dengan mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, terdapat pengaturan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2017 dan 2018 menjabat hingga 2022 dan 2023. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kekosongan dokumen RPJMD bagi Daerah-Daerah tersebut hingga 2024.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten, dengan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Paska Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Lebih lanjut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 atau 2023 diinstruksikan bahwa bagi Provinsi/Kabupaten/Kota yang masa jabatan Bupati/Walikota berakhir pada tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Mempedomani pada aturan dan ketentuan yang berlaku, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 menggunakan pendekatan teknokratis. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Secara substansi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, arahan kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang tahun 2025-2025, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis yang berkembang serta kebijakan nasional.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa arah kebijakan pembangunan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022-2026 dirumuskan secara transparan, *responsive*, efisien, efektif, akuntabel dan berkelanjutan serta merupakan dokumen perencanaan kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal–Semarang–Salatiga–Demak–Grobogan, Kawasan Purworejo–Wonosobo–Magelang–Temanggung, dan Kawasan Brebes–Tegal–Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025.

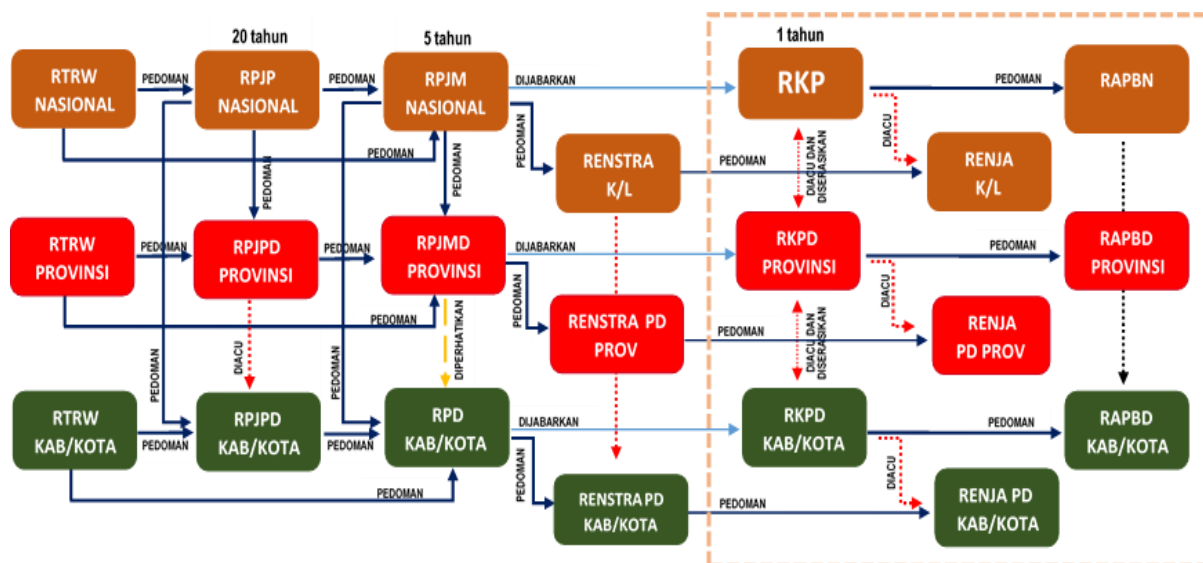
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019–2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 11);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023–2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 dimana tahapan dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Batang berada di RPJMD IV (2022-2026) serta untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan antara Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen



1.3.1 Hubungan RPD dan RPJPD

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023–2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

Pada gambar di atas terlihat bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 diarahkan untuk menuntaskan pencapaian visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025.

Berlandaskan pada pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan tahap sebelumnya, serta sebagai bentuk keberlanjutan dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, maka pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 akan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan, didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

1.3.2 Hubungan Antara RPD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional karena keberhasilan pembangunan di Daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Batang dalam merancang pembangunan di Daerah sesuai kondisi Daerah.

Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dimana Visi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Visi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

1.3.3 Hubungan Antara RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)

RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 4 (empat) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang disusun oleh semua Perangkat Daerah.

Renstra PD sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengemukakan tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.4 Hubungan Antara RPD dengan RKPD Kabupaten Batang

Pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara

berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batang tentang RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026.

1.3.5 Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Sektorial Lainnya

Penyusunan RPD Kabupaten Batang juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain : 1) Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) Grand Design Reformasi Birokrasi, 5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, 6) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, 7) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, 8) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 9) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, 10) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan 11) Aksi Penanganan Konflik Sosial. Dan dalam proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPD Kabupaten Batang Tahun 2023–2026 adalah :

- a) Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah, baik Pemerintah Daerah, kalangan dunia usaha dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Batang periode tahun 2023-2026;
- b) Memberikan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah maupun Renja Perangkat Daerah berupa program beserta target dan pagu indikatif sebagai dasar/pedoman dalam penyusunan RAPBD;
- c) Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPD Kabupaten Batang Tahun 2023–2026 antara lain sebagai berikut :

- a) Menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan
- b) Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Batang selama kurun waktu 2023-2026;
- d) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan, berupa program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan pagu anggaran yang bersifat indikatif sebagai bahan/rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RAPBD;

- e) Menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra maupun Renja Perangkat Daerah, dan sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja tahunan.
- f) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- g) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika RPD Tahun 2023-2026

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPD.

Bab II Gambaran Umum

Memberikan gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing Daerah sebagai dasar pengembangan rencana Pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat analisis kinerja keuangan periode sebelumnya, dan kebijakan pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan Daerah tahun 2023-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini memuat permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Daerah.

Bab V Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas

Bab ini menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang ada. Selain itu juga disampaikan arah pengembangan wilayah yang terdiri dari strategi dan arah kebijakan yang menyesuaikan rencana pembangunan Daerah yang bersifat strategis.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program**Perangkat Daerah**

Bab ini menguraikan tentang kebijakan pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Renstra PD dan menjadi prioritas dalam mencapai sasaran pembangunan RPD, selanjutnya menjadi dasar penentuan indikasi rencana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berkenaan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pada bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah pada akhir periode RPD.

Bab IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan Daerah setelah periode RPD berakhir.

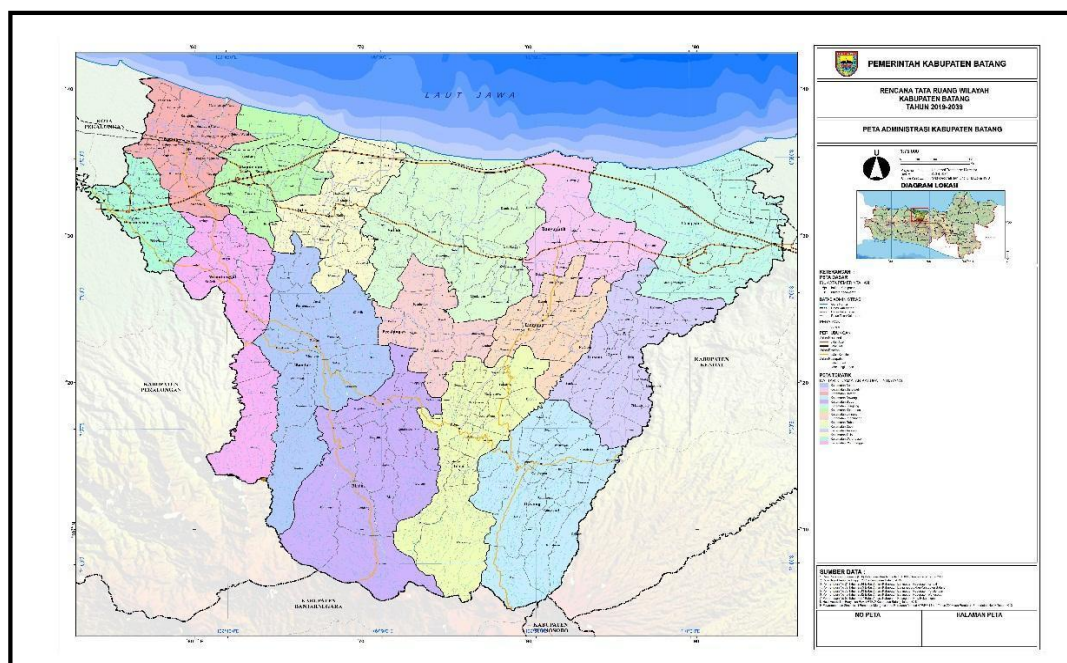
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Luas wilayah Kabupaten Batang mencapai 85.721 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu) hektar dengan batas-batas wilayah Kabupaten Batang secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kendal
- Sebelah Selatan : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Batang



Sumber : RTRW Kabupaten Batang 2019-2039

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7

Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006, secara administratif wilayah Kabupaten Batang terbagi dalam 15 (lima belas) kecamatan yang terdiri dari 239 desa dan 9 kelurahan.

Kecamatan Batang terdiri dari 12 desa 9 kelurahan; Kecamatan Wonotunggal terdiri dari 15 desa; Kecamatan Warungasem terdiri dari 18 desa; Kecamatan Bandar terdiri dari 17 desa; Kecamatan Blado terdiri dari 18 desa; Kecamatan Reban terdiri dari 19 desa; Kecamatan Tulis terdiri dari 17 desa; Kecamatan Subah terdiri dari 17 desa; Kecamatan Limpung terdiri dari 17 desa; Kecamatan Gringsing terdiri dari 15 desa; Kecamatan Bawang terdiri dari 20 desa; Kecamatan Tersono terdiri dari 20 desa; Kecamatan Kandeman terdiri dari 13 desa; Kecamatan Pecalungan terdiri dari 10 desa, serta Kecamatan Banyuputih terdiri dari 11 desa.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Batang

Kecamatan	Luas (Ha)	Desa/Kel	Dukuh	RT	RW
01. Wonotunggal	5.565,54	15	71	197	61
02. Bandar	7.936,76	17	79	351	71
03. Blado	9.644,78	18	74	234	68
04. Reban	6.947,07	19	67	248	68
05. Bawang	7.696,92	20	88	354	104
06. Tersono	5.135,60	20	79	263	73
07. Gringsing	7.989,29	15	89	313	83
08. Limpung	3.271,72	17	80	233	70
09. Banyuputih	4.242,36	11	49	175	47
10. Subah	9.166,67	17	68	287	72
11. Pecalungan	3.342,14	10	56	182	54
12. Tulis	4.419,15	17	52	173	52
13. Kandeman	4.060,20	13	62	231	59
14. Batang	3.931,44	21	114	493	111
15. Warungasem	2.445,61	18	68	221	73
Jumlah	85.721	248	1.096	3.955	1.066

Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Wilayah geografis Kabupaten Batang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Secara astronomis daerah ini terletak antara $6^{\circ} 51' 46''$ sampai $7^{\circ} 11' 47''$ Lintang Selatan dan antara $109^{\circ} 40' 19''$ sampai $110^{\circ} 03' 06''$ Bujur Timur. Posisi tersebut menempatkan wilayah Kabupaten Batang, utamanya Ibu Kota Pemerintahannya pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara. Arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa transit dan transportasi.

Kabupaten Batang berada di tengah-tengah pulau jawa, dan merupakan koridor jalan pantura yang merupakan koridor pertumbuhan Pulau Jawa. Jarak ibu kota Kabupaten Batang dengan ibu kota daerah-daerah lain adalah sebagai berikut:

1.	Pekalongan	:	9 km
2.	Pemalang	:	43 km
3.	Tegal	:	72 km
4.	Brebes	:	85 km
5.	Cirebon	:	144 km
6.	Jakarta	:	392 km
7.	Kendal	:	64 km
8.	Semarang	:	93 km
9.	Surabaya	:	480 km

Gambar 2. 2 Posisi Kabupaten Batang



Sumber: Bapelitbang Kab. Batang, 2021

Kondisi wilayah Kabupaten Batang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan. Dengan kondisi ini Kabupaten Batang mempunyai potensi yang sangat besar untuk agroindustri, agrowisata dan agrobisnis.

Secara Morfologi, wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi 3, yaitu wilayah bagian utara, wilayah bagian tengah dan wilayah bagian selatan.

Morfologi wilayah bagian utara, mencakup Kecamatan Gringsing, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Subah, Kecamatan Tulis, Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Batang, yaitu:

- Bagian Barat dan bagian timur terbentuk sedimentasi, wilayah bagian tengah terjadi karena pengangkatan parsial dan sedimentasi setempat.
- Dilalui jalan arteri Primer Pantura, jalan Tol, KA
- Direncanakan pelabuhan pengumpul.
- Berkembang perkotaan dan Industri

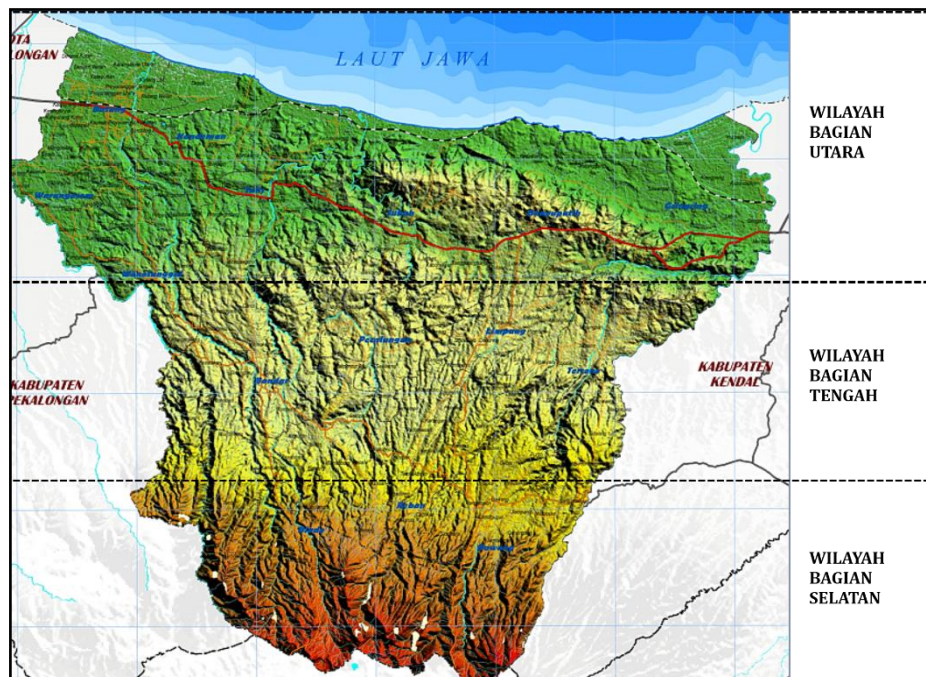
Morfologi wilayah bagian tengah, mencakup Kecamatan Tersono, Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, dan Kecamatan Warungasem, yaitu:

- Terbentuk karena pelapukan batuan gunung (sebagian besar jenis tanah Latosol)
- Dilalui jalan Provinsi (JKP-1)
- Sebagian besar dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan hutan rakyat

Morfologi wilayah bagian selatan, yang mencakup Kecamatan Bawang, Kecamatan Reban, Kecamatan Blado, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Wonotunggal, yaitu:

- Merupakan bagian dari puncak Pegunungan Dieng dan Rogojembangan.
- Merupakan daerah rawan bencana tanah longsor dan gunung berapi.
- Sebagian tanah diluar kawasan hutan digunakan untuk budidaya sayur-sayuran

Gambar 2. 3
Peta Morfologi Kabupaten Batang



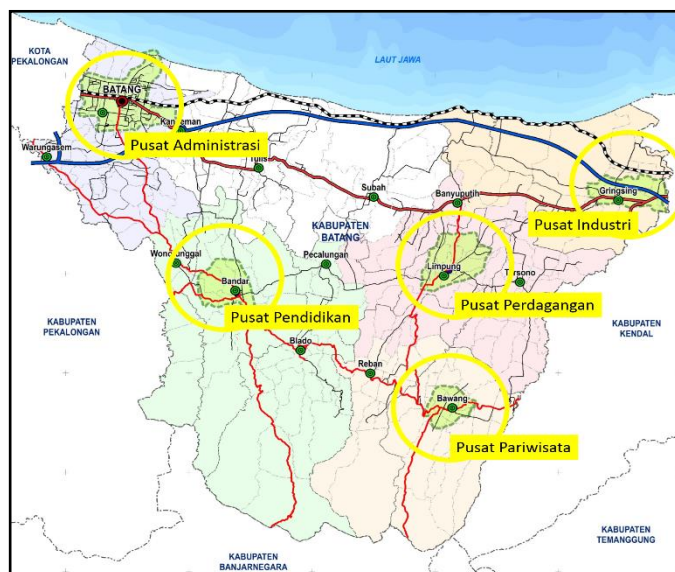
Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Dari karakteristik morfologi, menghasilkan beberapa lokasi pusat pertumbuhan yang berbeda-beda. selain dari morfologi fisiknya, juga dipengaruhi oleh faktor lainnya sehingga menghasilkan beberapa lokasi pusat pertumbuhan. Kabupaten Batang memiliki lima pusat pertumbuhan yaitu Kota Batang, Kota Bawang, Kota Bandar, Kota Limpung, dan Kota Gringsing.

Pusat pertumbuhan tersebut memiliki sistem pelayanan yang berbeda. Kota Batang melayani Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Warungasem, dan Kecamatan Wonotunggal; Kota Bawang melayani Kecamatan Bawang dan Kecamatan Reban; Kota Bandar melayani Kecamatan Bandar, Kecamatan Blado, Kecamatan Pecalungan, dan Kecamatan Wonotunggal; Kota Limpung melayani Kecamatan Limpung, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Tersono, dan Kecamatan Reban; Kota Gringsing melayani Kecamatan Gringsing dan Kecamatan Banyuputih.

Pusat pertumbuhan Kabupaten Batang memiliki tematik yang berbeda-beda. Tematik pusat pertumbuhan Kabupaten Batang tersebut sudah mulai terbentuk yaitu Kota Batang diarahkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan, Kota Bandar diarahkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, Kota Bawang diarahkan sebagai pusat kegiatan pariwisata, Kota Limpung diarahkan sebagai pusat kegiatan perdagangan, dan Kota Gringsing diarahkan sebagai pusat kegiatan industri.

Gambar 2. 4
Peta 5 Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang



Sumber : Master Development Plan 5 Kota Pusat Pertumbuhan Kabupaten Batang Tahun 2018

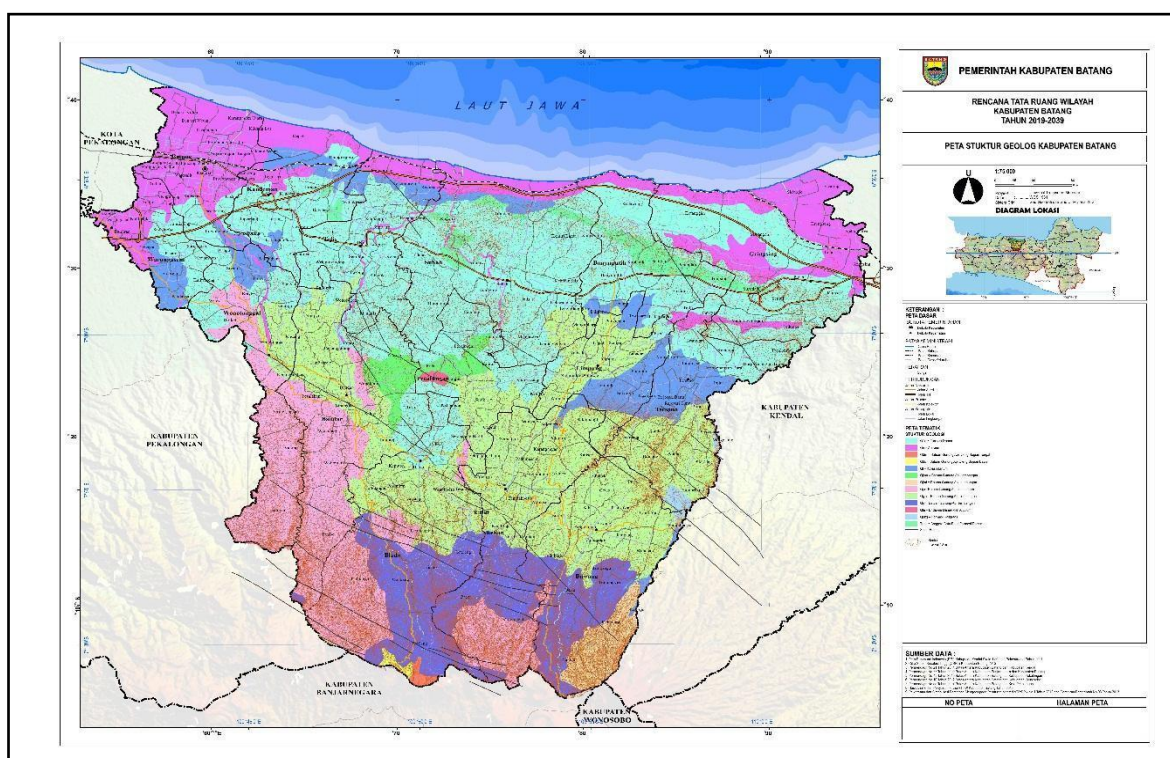
Keadaan topografi wilayah Kabupaten Batang terbagi atas tiga bagian yaitu pantai, dataran rendah dan wilayah pegunungan. Ada lima gunung dengan ketinggian rata-rata diatas 2.000 m, yaitu:

a. Gunung Prau	: tinggi 2.565 mdpl
b. Gunung Sipandu	: tinggi 2.241 mdpl
c. Gunung Gajah Mungkur	: tinggi 2.101 mdpl
d. Gunung Alang	: tinggi 2.239 mdpl
e. Gunung Butak	: tinggi 2.222 mdpl

Kondisi wilayah yang merupakan kombinasi antara daerah pantai, dataran rendah dan pegunungan di Kabupaten Batang merupakan potensi yang amat besar untuk dikembangkan pembangunan daerah bercirikan agroindustri, agrowisata dan agrobisnis. Wilayah Kabupaten Batang sebelah selatan yang bercorak pegunungan misalnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah pembangunan berbasis agroindustri dan agrowisata. Basis agroindustri ini mengacu pada berbagai macam hasil tanaman perkebunan seperti: teh, kopi, coklat dan sayuran. Selain itu juga memiliki potensi wisata alam.

Dari kondisi geologi wilayah Kabupaten Batang sebagian besar adalah pegunungan dengan geologi sebagai berikut: Aluvial 13,08%; aluvial dan endapan danau 0,11%; anggota batupasir 1,74%, Batuan gunung api Dieng 0,29%, Batuan gunungapi Jembangan 46,38%, Formasi Damar 32,00%, Formasi Kaligetas 0,31% dan Kipas Aluvial 6,10%. Susunan geologi tersebut mempengaruhi pemanfaatan tanah yang sebagian besar ditujukan untuk budidaya hutan, perkebunan dan pertanian. Adapun penguasaan hutan dan perkebunan mayoritas di tangan negara. Sedangkan pertanian baik kering maupun basah (irigasi sederhana dan irigasi teknis) dilakukan oleh warga setempat.

Gambar 2. 5
Peta Geologi Kabupaten Batang

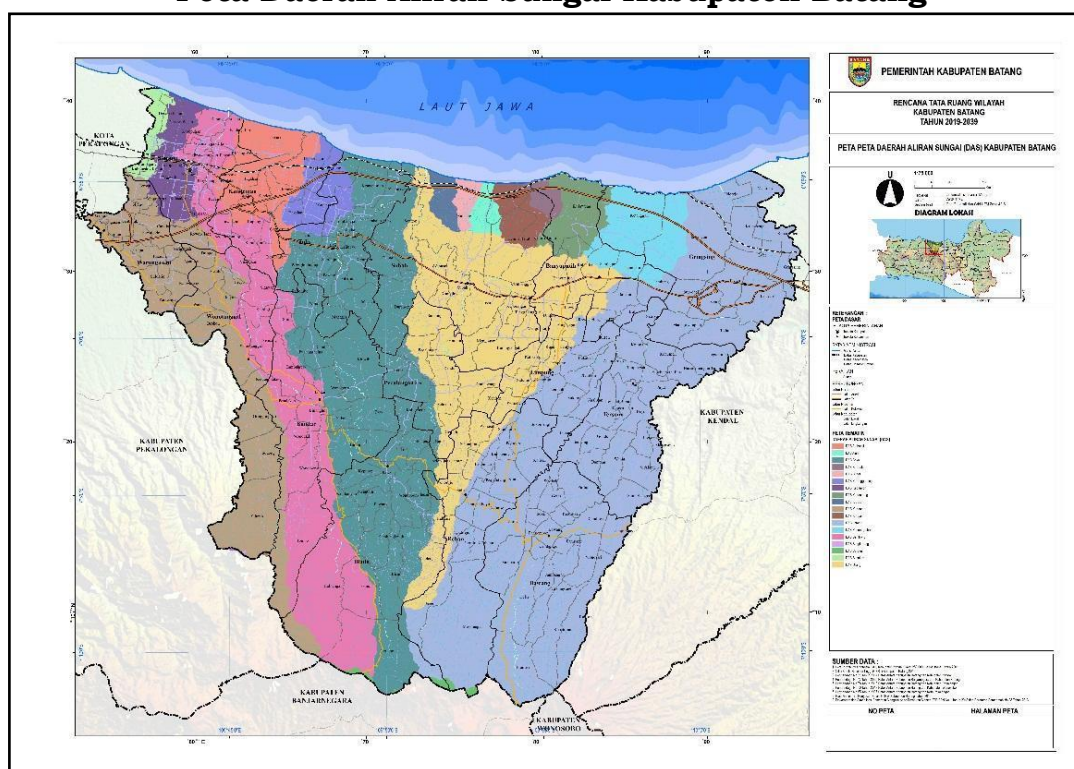


Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Selanjutnya dari kondisi hidrologi Kabupaten Batang memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak, dengan 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Ambobiji, DAS Asin, DAS Boyo, DAS Brontak, DAS Bugel, DAS Karanggeneng, DAS

Kebanyon, DAS Kedondong, DAS Kretek, DAS Kupang, DAS Kuripan, DAS Lampir, DAS Pesanggrahan, DAS Sambong, DAS Sengkarang, DAS Serayu, DAS Susukan dan DAS Urang. Demikian juga dengan sungai yang merupakan komponen penting dalam distribusi sumberdaya air, dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya air akan mengandalkan sungai agar dapat mencapai tujuan pemanfaatannya. Berikut ini data sungai yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten Batang, meliputi : Kupang, Gabus, Lojahan, Sambong, Sono, Karanggeneng, Tinap, Kitiran, Boyo, Urang, Langsean, Dung Uling, Petung, Arus, Terju, Belo, Kuto, dan Lampir.

Gambar 2. 6
Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Dari aspek klimatologi, diketahui bahwa suhu udara rata-rata di Kabupaten Batang berkisar berkisar antara 25°C-32°C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 55 persen sampai dengan 91 persen. Sedangkan untuk curah hujan, menurut data pengukuran tinggi curah hujan yang tersebar di

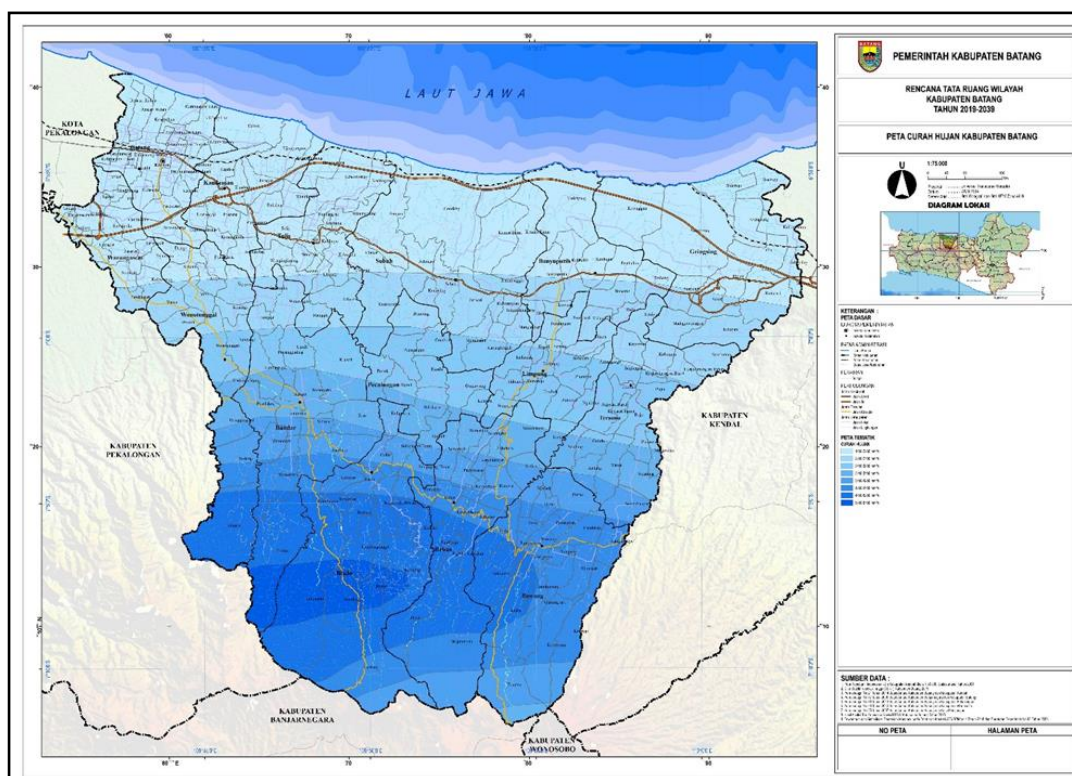
beberapa kecamatan, selama tahun 2021 rata-rata hari hujan terbanyak berada pada bulan Februari dengan jumlah hari hujan 23,20 hari. Rata-rata curah hujan tertinggi juga terjadi pada bulan Februari yaitu 970,07 mm.

Tabel 2. 2
Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Batang
Tahun 2021

No	Bulan	Rata-rata Hari Hujan Bulanan (Hari)	Rata-rata Curah Hujan Bulanan (mm)
1	Januari	21,67	636,00
2	Februari	23,20	970,07
3	Maret	15,93	335,40
4	April	10,27	202,27
5	Mei	8,67	171,40
6	Juni	7,60	141,93
7	Juli	3,50	58,33
8	Agustus	7,27	120,40
9	September	8,27	174,80
10	Oktober	9,93	183,00
11	November	20,07	305,53
12	Desember	16,00	296,73
Rata rata 2021		12,70	299,66
Rata rata 2020		11,83	304,58
Rata rata 2019		11,16	177,35
Rata rata 2018		11,79	197,10

Sumber : Kabupaten Batang Dalam Angka, BPS 2022

Gambar 2. 7
Peta Curah Hujan Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kab. Batang Tahun 2019-2039

Kabupaten Batang yang terbagi menjadi 15 kecamatan memiliki luas total yaitu 85.721 Ha. Berdasarkan hasil digitasi tutupan lahan pada tahun 2021, luas Kabupaten Batang terdiri dari 13.532 Ha atau 15,8% adalah lahan terbangun dan 72.189 Ha atau 84,2% adalah lahan tidak terbangun.

Dari lahan terbangun tersebut terdapat industri seluas 5.028 Ha (5,9%), permukiman seluas 8.036 Ha (9,4%), PLTU seluas 219 Ha (0,3%), dan jalan seluas seluas 250 Ha (0,3%). Sedangkan dari lahan tidak terbangun terdapat cagar alam seluas 82 Ha (0,1%), hutan seluas 17.987 Ha (21,0%), perkebunan seluas 2.773 Ha (3,2%), Sawah seluas 17.386 Ha (20,3%), tegalan seluas 32.380 Ha (37,8%), dan tubuh perairan seluas 1.580 Ha (1,8%)..

Penggunaan lahan sawah di Kabupaten Batang terdapat beberapa perubahan pada beberapa tahun terakhir. pada berdasarkan hasil digitasi, pada tahun 2016 lahan sawah di Kabupaten Batang seluas 17.487 Ha, kemudian pada tahun 2018

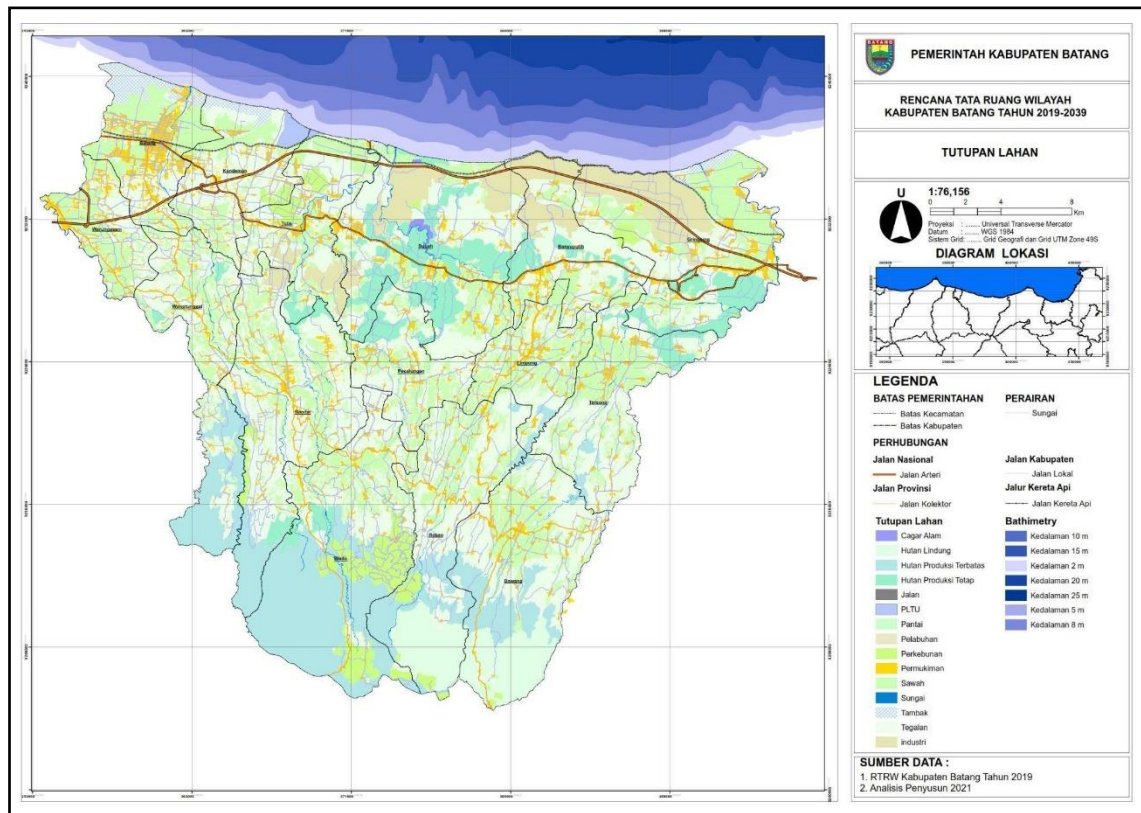
terdapat sedikit pengurangan luasan sebesar 0,03% menjadi 17.481 Ha, dan data terakhir menunjukkan pada tahun 2020 terdapat pengurangan lahan sebesar 0,54% sawah menjadi 17.386 Ha. Pengurangan lahan sawah memang berkaitan erat dengan dinamika perekonomian, walaupun begitu lahan sawah harus dilindungi untuk menjamin ketahanan pangan di masa depan. Kemudian dari adanya perubahan penggunaan lahan sawah ini, terdapat kenaikan pada penggunaan lahan bukan sawah, khususnya menjadi lahan terbangun. Lahan bukan sawah pada tahun 2015 adalah 68.235 Ha menjadi 68.240 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 68.335 Ha pada tahun 2020.

Tabel 2. 3
Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2021

No.	Tutupan Lahan	Luah (Ha)
1	Cagar Alam	82
2	Hutan Lindung	2.930
3	Hutan Produksi Terbatas	9.442
4	Hutan Produksi Tetap	5.615
5	Industri	5.028
6	Jalan	250
7	Pantai	33
8	Perkebunan	2.773
9	Permukiman	8.036
10	PLTU	219
11	Sawah	17.386
12	Sungai	596
13	Tambak	952
14	Tegalan	32.380
Jumlah Luas		85.721

Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang 2021

Gambar 2. 8
Peta Tutupan Lahan Kabupaten Batang Tahun 2020



Sumber: Digitasi citra satelit 2020

Dengan berbagai macam kondisi tersebut menggambarkan juga bahwa wilayah Kabupaten Batang berpotensi rawan bencana alam. Melihat potensi luasan wilayah bencana di Kabupaten Batang, setidaknya terdapat 24.202 ha merupakan daerah rawan banjir meskipun dengan tingkat bahaya yang berbeda, yaitu 4.555 ha bahaya rendah, 5.713 ha bahaya sedang dan 13.934 ha bahaya tinggi. Sekitar 35.821 ha merupakan daerah rawan tanah longsor, dengan tingkat bahaya rendah seluas 5.158 ha, bahaya sedang seluas 19.483 ha, dan tingkat bahaya tinggi seluas 11.179 ha . Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Batang seluas 718 ha juga berpotensi terkena abrasi.

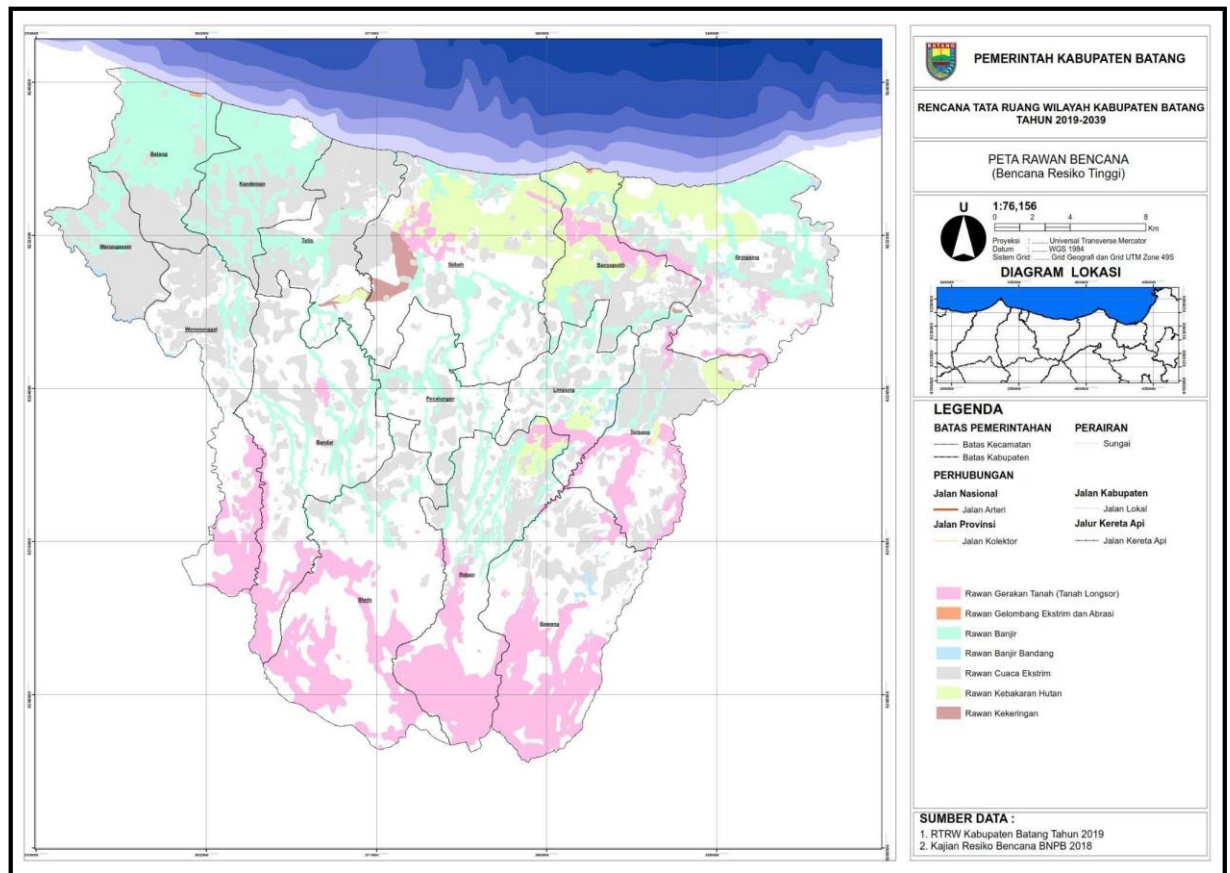
Tabel 2. 4
Potensi Bencana di Kabupaten Batang

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	4.555	5.713	13.934	24.202	Tinggi
2	Banjir Bandang	268	756	1.498	2.523	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	-	49.138	19	49.157	Sedang
4	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	-	283	436	718	Tinggi
5	Gempa Bumi	85.426	-	-	85.426	Rendah
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	24.111	16.298	-	40.409	Sedang
7	Kekeringan	-	85.426	-	85.426	Sedang
8	Letusan Gunungapi Dieng	135	454	27	616	Sedang
9	Tanah Longsor	5.158	19.483	11.179	35.821	Tinggi

Sumber: Kajian Rawan Bencana BNPB 2018

Mendasarkan perkembangan data kejadian bencana di Kabupaten Batang yang sering terjadi antara lain angin topan, banjir, kebakaran dan tanah longsor. Jenis bencana alam yang intensitasnya tinggi sejak beberapa tahun terakhir perlu terus diantisipasi melalui mitigasi dan penanganan pasca bencana dan kesiapan dimasa mendatang untuk antisipasi jika sewaktu waktu kejadian tersebut terulang kembali, sehingga dampak bencana baik korban jiwa maupun materiil dapat diminimalisir.

Gambar 2. 9
Peta Rawan Bencana Di Kabupaten Batang



Sumber: RTRW Kabupaten Batang 2019-2039 dan KRB BNPB 2018

Peta diatas hanya menampilkan risiko bencana tinggi yang termuat dalam dokumen Kajian Rawan Bencana tahun 2018 yang disusun oleh BNPB yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019-2039.

Sampai dengan tahun 2021, terjadi 60 kejadian bencana di Kabupaten Batang dengan jenis bencana antara lain angin topan, banjir, kebakaran, dan tanah longsor. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 66 bencana, kejadian bencana di tahun 2019 lebih tinggi tercatat 100 bencana. Dilihat dari kondisi kejadian bencana pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kabupaten Batang kedepan masih perlu kewaspadaan yang ekstra khususnya dampak dari anomali cuaca seperti tanah longsor dan angin topan walaupun secara data tercatat sudah mengalami penurunan bencana dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 2. 5
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Batang

No	Tahun	Kejadian Bencana						Jumlah
		Kebakaran	Angin Topan	Tanah Longsor	Laka Laut	Jembatan Ambrol	Banjir	
1	2017	11	6	11	0		2	30
2	2018	46	5	8	0		2	61
3	2019	39	12	14	0		35	100
4	2020	35	5	18	0		8	66
5	2021	8	19	22	3	1	7	60

Sumber: BPBD Kabupaten Batang 2022

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Batang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Batang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian sekaligus mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam.

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya selain itu juga diarahkan pada 5 (lima) satuan wilayah pengembangan (SWP). Arah kebijakan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya sebagai berikut.

1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung diarahkan pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi,

dan kawasan ekosistem *mangrove*.

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air. Kawasan hutan lindung terdapat di Kecamatan Bawang, Blado dan Reban seluas kurang lebih 2.937 ha. Kawasan resapan air dengan kriteria memiliki kelereng di atas 40% tersebar di Kecamatan Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Reban, Subah, Tersono, Tulis dan Wonotunggal seluas 1.880 ha.
- b. Kawasan perlindungan setempat meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar embung, dan ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan.
Sempadan pantai diatur sepanjang 100 meter dari garis pantai yang ditentukan berada di Kecamatan Banyuputih, Batang, Gringsing, Kandeman, Subah dan Tulis seluas kurang lebih 134 ha. Sempadan sungai meliputi sungai tidak bertanggul di dalam dan luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul di dalam dan luar kawasan perkotaan serta sungai yang terpengaruh pasang surut tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan sekitar embung atau waduk ditentukan 50 meter dari tepi muka air tertinggi. Kemudian untuk RTH di perkotaan meliputi seluruh wilayah kawasan perkotaan di Kabupaten Batang dengan luas 2.508 ha terdiri dari 1.672 ha RTH publik dan 836 ha RTH privat.
- c. Kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam (cagar alam) berada di Kecamatan Subah seluas 103,65 ha yang terdiri dari Cagar Alam Peson Subah I seluas 9,68 ha, Cagar Alam Peson Subah II seluas 10,61 ha dan Cagar Alam Ulolanang Kecubung seluas 83,36 ha.
- d. Kawasan cagar budaya berupa kawasan kota pusaka di Kecamatan Batang, Wonotunggal dan Blado, serta peninggalan bersejarah berupa aset pusaka alam, aset pusaka budaya ragawi, aset pusaka budaya tak ragawi dan aset pusaka

saujana yang tersebar di seluruh kecamatan.

- e. Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, puting beliung, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi dan letusan gunung api, kebakaran, kekeringan dan gerakan tanah. Dengan area sebagai berikut :
 1. Kawasan rawan bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi meliputi seluruh kecamatan
 2. Kawasan rawan bencana banjir bandang dengan kelas bahaya tinggi seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Banyuputih dengan kelas bahaya sedang dan Kecamatan Pecalungan yang tidak rawan bencana banjir bandang.
 3. Kawasan rawan bencana angin puting beliung dengan kelas bahaya sedang meliputi seluruh kecamatan.
 4. Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi dengan kelas bahaya tinggi meliputi Kecamatan Batang, Gringsing, Kandeman, Subah dan Tulis.
 5. Kawasan rawan bencana gempa bumi dan kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan kelas bahaya sedang meliputi Kecamatan Blado, Bawang dan Reban.
 6. Kawasan rawan bencana kebakaran dengan kelas bahaya sedang terdiri dari kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan meliputi Kecamatan Bandar, Banyuputih, Gringsing, Kandeman, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono dan Tulis. Kawasan rawan kebakaran permukiman perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Batang, Kawasan Perkotaan Limpung dan Kawasan Perkotaan Bandar.
 7. Kawasan rawan bencana kekeringan dengan kelas bahaya sedang meliputi seluruh kecamatan.
 8. Kawasan rawan bencana gerakan tanah dengan kelas bahaya tinggi dengan luas kurang lebih 3.993 ha meliputi Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado,

Gringsing, Limpung, Reban, Subah, Tersono dan Wonotunggal.

9. Kawasan lindung geologi berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi kawasan imbuhan yaitu Cekungan Air Tanah (CAT) Pekalongan-Pemalang dan CAT Subah serta sempadan mata air yang ditetapkan paling sedikit dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air meliputi mata air Bismo, Siu dan Sigintung di Kecamatan Blado, mata air Watulumbang di Kecamatan Reban, mata air Ngreco, Sikidang dan Kuntulan di Kecamatan Bawang, mata air Klesem di Kecamatan Wonotunggal.
10. Kawasan ekosistem mangrove berupa kawasan pantai berhutan mangrove dengan luas kurang lebih 122 ha meliputi Kecamatan Banyuputih dengan luas 18 ha, Batang dengan luas 21 ha, Gringsing dengan luas 24 ha, Kandeman dengan luas 37 ha, Subah dengan luas 7 ha dan Tulis dengan luas 15 ha.

2. Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan peruntukan budidaya diarahkan untuk pengembangan kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

- a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan produksi tetap. Kawasan hutan produksi terbatas seluas 8.705,53 ha meliputi Kecamatan Bandar, Blado, Reban dan Wonotunggal. Kawasan hutan produksi tetap seluas 6.634,57 ha meliputi Kecamatan Bandar, Banyuputih, Bawang, Blado, Gringsing, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, Wonotunggal.
- b. Kawasan hutan rakyat seluas 1.134 ha meliputi Kecamatan

Bandar, Bawang, Blado, Limpung, Pecalungan, Reban, Subah, Tersono, Tulis, Wonotunggal.

- c. Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.
 1. Kawasan tanaman pangan berupa Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam rangka penyediaan bahan pangan pokok di Kabupaten Batang dengan luas kurang lebih 26.394 ha yang meliputi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas 16.675 ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dengan luas 9.719 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 2. Kawasan hortikultura dengan luas 10.807 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 3. Kawasan perkebunan berupa perkebunan rakyat dengan luas 4.009 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 4. Kawasan peternakan berupa pengembangan kegiatan budi daya ternak unggas, hewan kecil, dan hewan besar berada di seluruh kecamatan.
- d. Kawasan perikanan meliputi kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budi daya dan kawasan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang.
 1. Kawasan perikanan tangkap meliputi seluruh wilayah pesisir dan laut.
 2. Kawasan perikanan budidaya berupa budi daya tambak seluas 283 ha di Kecamatan Batang, Gringsing dan Subah, dan budidaya air tawar yang tersebar di seluruh kecamatan.
 3. Kawasan perikanan yang dilengkapi dengan sarana penunjang berupa pelabuhan perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut meliputi Pelabuhan Perikanan Klidang Lor berada di Kecamatan Batang, Pelabuhan Perikanan Roban

berada di Kecamatan Subah dan Pelabuhan Perikanan Celong berada di Kecamatan Banyuputih.

- e. Kawasan pertambangan dan energi meliputi kawasan pertambangan mineral logam dan batuan di Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Subah, Banyuputih Gringsing, Wonotunggal, Bandar dan Blado. Kawasan panas bumi di Kecamatan Bawang dan kawasan pembangkitan tenaga listrik PLTU di Kecamatan Kandeman dan Tulis, PLTP di Kecamatan Bawang dan PLTMH di seluruh kecamatan.
- f. Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.310 ha berada di Kecamatan Bandar, Banyuputih, Batang, Blado, Gringsing, Kandeman, Reban, Tulis, dan Wonotunggal. Luasan kawasan peruntukan industri tersebut belum termasuk pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dari 450 ha menjadi 4.300 ha.
- g. Kawasan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya dan pariwisata buatan. Pariwisata alam meliputi wisata pantai di Kecamatan Batang, Kandeman, Banyuputih, Gringsing. Kemudian agrowisata berada di Kecamatan Blado dan wisata alam lainnya. Pariwisata budaya meliputi wisata sejarah berada di Reban, Wonotunggal, Gringsing. Wisata kampung batik di Kecamatan Batang serta wisata religi di Kecamatan Kandeman dan Blado. Pariwisata buatan wisata air dan kawasan wisata lainnya dikembangkan di seluruh kecamatan. Destinasi wisata unggulan meliputi Pantai Sigandu sebagai ikon destinasi wisata pantai berada di Kecamatan Batang, agrowisata Sikembang sebagai ikon destinasi wisata pegunungan, wisata alam Bukit Sikuping sebagai ikon destinasi wisata petualangan dan wisata budaya Silurah sebagai ikon destinasi wisata budaya.
- h. Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman

perkotaan seluas 8.358 ha dan kawasan permukiman perdesaan seluas 8.875 ha.

Sedangkan arahan kebijakan kawasan strategis didasarkan atas fungsi kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi yaitu:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 - a. Kawasan Koridor Perkotaan Batang-Kandeman;
 - b. Kawasan Pelabuhan Batang;
 - c. Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegoro dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
 - b. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan;
 - c. Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan;
 - d. Pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah;
 - e. Pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegoro dan Pagilaran;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan;
 - b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas di lokasi PLTU Jawa Tengah
 3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan;
- b. Pengaturan pemanfaatan ruang.

Selanjutnya dengan memperhatikan kondisi wilayah secara geografis dan administrasi maka potensi pengembangan wilayah dikelompokkan berdasarkan potensi dan sumber daya untuk pengembangannya menjadi 5 (lima) Satuan Wilayah Pengembangan sebagai berikut:

- a. Satuan Wilayah Pengembangan Batang dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Batang meliputi:

1. Kecamatan Batang;
2. Kecamatan Kandeman; dan
3. Kecamatan Warungasem.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini perdagangan dan jasa; pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan; perikanan; industri perikanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri dan jasa; peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri; pengolahan hasil perikanan; pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegoro dan Pagilaran serta pengembangan komoditas pertanian perkebunan.

- b. Satuan Wilayah Pengembangan Bandar dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Bandar meliputi:

1. Kecamatan Wonotunggal;
2. Kecamatan Pecalungan;
3. Kecamatan Bandar; dan
4. Kecamatan Blado.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; agroindustri; perdagangan dan jasa; perikanan darat; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: peningkatan produktivitas komoditas hortikultura dan pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen, pengembangan destinasi wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegoro dan Pagilaran, pelestarian kawasan hutan lindung, percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung, serta peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan pertambangan.

- c. Satuan Wilayah Pengembangan Subah dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Subah meliputi:
 - 1. Kecamatan Subah; dan
 - 2. Kecamatan Tulis.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah industri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan pertambangan; perikanan; perdagangan dan jasa; transit perjalanan; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri; peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan industri; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); pengembangan komoditas pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen serta peningkatan produktivitas komoditas hortikultura.

- d. Satuan Wilayah Pengembangan Gringsing dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gringsing meliputi:

1. Kecamatan Gringsing; dan
2. Kecamatan Banyuputih.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah industri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; pertambangan; perikanan; perdagangan dan jasa; transit perjalanan; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri, peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan industri; pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan komoditas pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen.

- e. Satuan Wilayah Pengembangan Limpung dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Limpung meliputi:
 1. Kecamatan Limpung;
 2. Kecamatan Tersono;
 3. Kecamatan Reban; dan
 4. Kecamatan Bawang.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perdagangan dan jasa; agroindustri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; pertambangan; perikanan darat; kehutanan; dan pariwisata.

Guna mendukung pengembangan sektor-sektor tersebut dilakukan dengan strategi: pengembangan agroindustri, peningkatan produktivitas komoditas hortikultura; pemulihan kerusakan lahan dan pengembangan komoditas pertanian perkebunan serta peningkatan sarana produksi dan penanganan pascapanen, pelestarian kawasan hutan lindung, percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung serta peningkatan dan pembangunan jalan khusus dari dan menuju kawasan

pertambahan.

Tabel 2. 6 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Batang (Ha)

No.	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kawasan Hutan Rakyat
1	Bandar	-	829,06	265,95	304,88
2	Banyuputih	-	-	531,64	-
3	Batang	-	-	-	-
4	Bawang	1.597,97	853,99	480,84	122,94
5	Blado	2,80	4.344,98	314,97	69,49
6	Gringsing	-	-	1.030,19	-
7	Kandeman	-	-	-	-
8	Limpung	-	-	119,58	53,77
9	Pecalungan	-	-	400,04	-
10	Reban	1.336,98	1.086,20	85,88	7,68
11	Subah	-	-	2.620,59	169,80
12	Tersono	-	-	543,28	82,33
13	Tulis	-	-	144,66	0,40
14	Warungasem	-	-	-	-
15	Wonotunggal	-	1.591,30	96,95	322,28
	Grand Total	2.937,75	8.705,53	6.634,56	1.133,56

Sumber: RTRW Kab. Batang 2019-2039

Dari tabel diketahui Kawasan hutan sesuai peruntukannya, area Kawasan hutan lindung terluas berada di Kecamatan Bawang seluas 1.597,97 Ha, hutan lindung sangat dijaga kelestariannya dilarang seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi. untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas terluas berada di Kecamatan Blado seluas 4.344,98 Ha, Pada Hutan Produksi Terbatas diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan hutan untuk kepentingan pengelolaan hutan bersama

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sedangkan area Kawasan Hutan Produksi Tetap terluas di Kecamatan Subah seluas 2.620,59 Ha, masyarakat diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya tetapi dilarang pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan. Area Kawasan Hutan Rakyat terluas di Kecamatan Wonotunggal seluas 322,28 Ha, dalam Kawasan hutan rakyat diperbolehkan bersyarat pengembangan budidaya tanaman pangan, hortikultura, tanaman hutan dan peternakan.

3. Demografi

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Batang berdasarkan Sensus Penduduk 2021 sebanyak 810.393 jiwa dengan komposisi 409.065 laki-laki dan 401.328 perempuan. Penduduk terbanyak di Kecamatan Batang sebanyak 16,67 persen dan paling sedikit di kecamatan Pecalungan 4,03 persen dari total penduduk Kabupaten Batang. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 sebesar 1,08 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Batang tahun 2021 mencapai 1.027 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Batang dengan kepadatan sebesar 3.933 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Blado sebesar 589 jiwa/km².

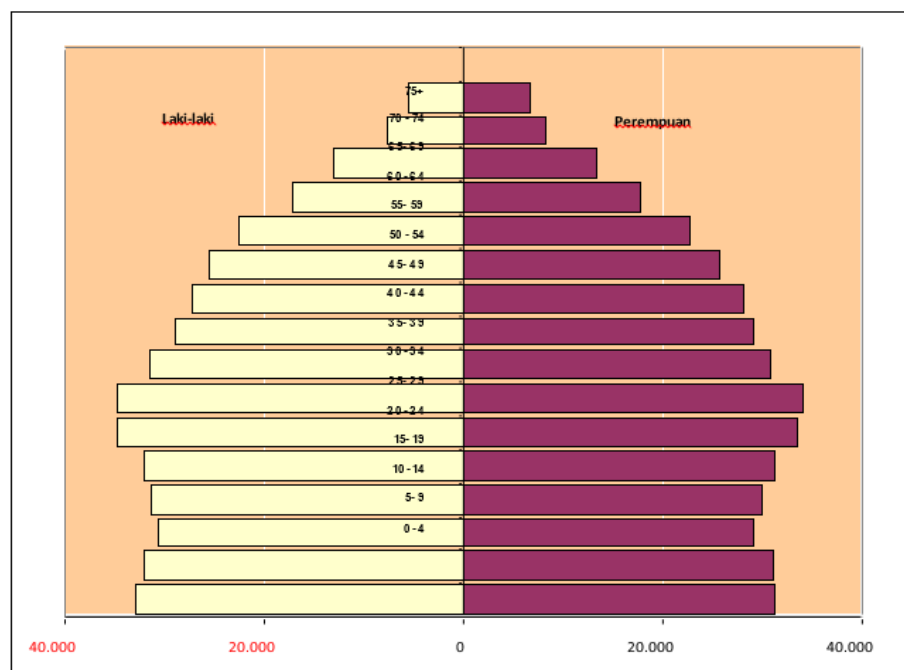
Tabel 2. 7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki Laki	Perempuan	
1	Wonotunggal	19.431	19.051	38.482
2	Bandar	36.309	36.142	72.451
3	Blado	23.014	23.128	46.142
4	Reban	20.715	20.045	40.760
5	Bawang	27.940	28.154	56.094
6	Tersono	20.675	20.254	40.929

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Total
		Laki Laki	Perempuan	
7	Gringsing	32.199	31.465	63.664
8	Limpung	22.586	21.774	44.360
9	Banyuputih	18.740	18.317	37.057
10	Subah	27.203	26.378	53.581
11	Pecalungan	16.620	16.109	32.729
12	Tulis	20.091	19.198	39.289
13	Kandeman	27.959	27.556	55.515
14	Batang	68.425	66.683	135.108
15	Warungasem	27.158	27.074	54.232
Jumlah		409.065	401.328	810.393

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Gambar 2. 10
Piramida Penduduk Kabupaten Batang Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Tabel 2. 8
Jumlah Penduduk Kabupaten Batang Berdasarkan Kelompok Usia

Tahun 2021

Usia	Total			
	Pria	Wanita	Jumlah	%
0-4	33.007	31.281	64.288	7,93
5-9	32.137	30.913	63.050	7,78
10-14	30.702	28.930	59.632	7,36
15-19	31.388	29.844	61.232	7,56
20-24	32.133	31.121	63.254	7,81
25-29	34.804	33.411	68.215	8,42
30-34	34.945	34.063	69.008	8,52
35-39	31.536	30.815	62.351	7,69
40-44	29.110	28.997	58.107	7,17
45-49	27.385	27.862	55.247	6,82
50-54	25.655	25.542	51.197	6,32
55-59	22.476	22.594	45.070	5,56
60-64	17.109	17.630	34.739	4,29
65-69	13.196	13.350	26.546	3,28
70-74	7.829	8.226	16.055	1,98
75+	5.653	6.749	12.402	1,53
Jumlah	409.065	401.328	810.393	100,00

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Dari Gambar 2.10 dan Tabel 2.8 diketahui bahwa berdasarkan kelompok usia penduduk, populasi penduduk usia muda dan produktif lebih besar bila dibandingkan dengan penduduk populasi usia non produktif. Pertumbuhan jumlah penduduk produktif (15-64 tahun) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), sedangkan penduduk kabupaten Batang terbanyak berada pada rentang usia 30 - 34 tahun sebanyak 8,52 persen. Kondisi ini disebut sebagai bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif semakin banyak dan jumlah penduduk non produktif semakin berkurang. Bonus demografi akan menjadi keuntungan bagi suatu daerah jika penduduk produktif tersebut merupakan penduduk yang berkualitas yaitu berpendidikan tinggi dan terampil atau berkeahlian.

Selain indikator diatas, terdapat indikator demografi lain yang juga penting. Indikator tersebut adalah Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio) yang menunjukkan tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang sudah tidak produktif. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Selama periode 2017-2021, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 43,82 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif, maka menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2021 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 43,27 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 43 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas). (Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang Tahun 2020-2021)

Tabel 2. 9
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Batang
Tahun 2017 - 2021

TAHUN	TIDAK / BELUM TAMAT SD	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	STRATA
2017	25,61	35,25	21,26	14,43	0,72	2,73
2018	26,00	35,53	19,04	15,43	1,10	2,80
2019	24,38	37,01	20,39	14,17	1,02	3,03
2020	24,58	33,86	20,35	16,97	0,81	3,44
2021	24,92	33,71	21,69	16,02	0,66	2,99

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Tingkat pendidikan penduduk berusia diatas 10 tahun selama 5 (lima) tahun terakhir (2017 - 2021) di Kabupaten Batang dapat dilihat pada Tabel 2.9. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa persentase penduduk pada masing-masing tingkat pendidikan relatif stabil dan belum ada peningkatan yang signifikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingginya persentase penduduk yang tidak tamat SD dan tamat SD dan rendahnya persentase pendudukan yang lulus Diploma dan Sarjana menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menjadi rendah. Hal ini berpengaruh pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum menunjukkan peningkatan secara signifikan.

Tabel 2. 10
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
<= SD	50,99	57,00	53,28
SMP	22,75	17,51	20,76
SMA / SMK	21,36	14,38	18,70
Dipl / Univ	4,89	11,12	7,26

Sumber: Profil Ketenagakerjaan Kabupaten Batang, 2020

Selain berpengaruh pada capaian Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pendidikan penduduk juga berpengaruh pada tingkat pendidikan angkatan kerja. Dari Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja penduduk Batang pada Tahun 2020 mayoritas adalah lulusan SD (53,28%). Sedangkan lulusan sekolah menengah (SMP dan SMA/SMK) hampir seimbang yaitu sebesar 20,76% untuk lulusan SMP dan 18,70% untuk lulusan SMA/SMK. Lulusan diploma/universitas menduduki porsi paling kecil yaitu sebesar 7,26%.

Tabel 2. 11
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Batang

Kelompok Usaha	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian (A)	26,64	18,59	23,58	25,75	15,93	21,81
Industri (M)	38,18	27,64	37,69	37,69	31,15	35,07
Jasa-jasa (S)	35,18	53,77	36,56	36,56	52,92	43,12

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Batang Tahun 2020-2021

Lapangan pekerjaan utama berdasarkan kelompok usaha dan jenis kelamin penduduk Kabupaten Batang yang berusia 15 tahun keatas pada Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.9. dari tabel ini dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Batang bekerja pada sektor industri yaitu sebesar 37,69% pada Tahun 2020 dan menurun menjadi 35,07% pada Tahun 2021. persentase penduduk yang bekerja pada kelompok usaha pertanian juga mengalami penurunan dari 23,58% pada Tahun 2020 menjadi 21,81% pada Tahun 2021. Penurunan persentase penduduk yang bekerja pada kelompok usaha industri dan pertanian ini berdampak pada peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada kelompok usaha jasa-jasa dari 36,56% pada Tahun 2020 menjadi 43,12% pada Tahun 2021.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

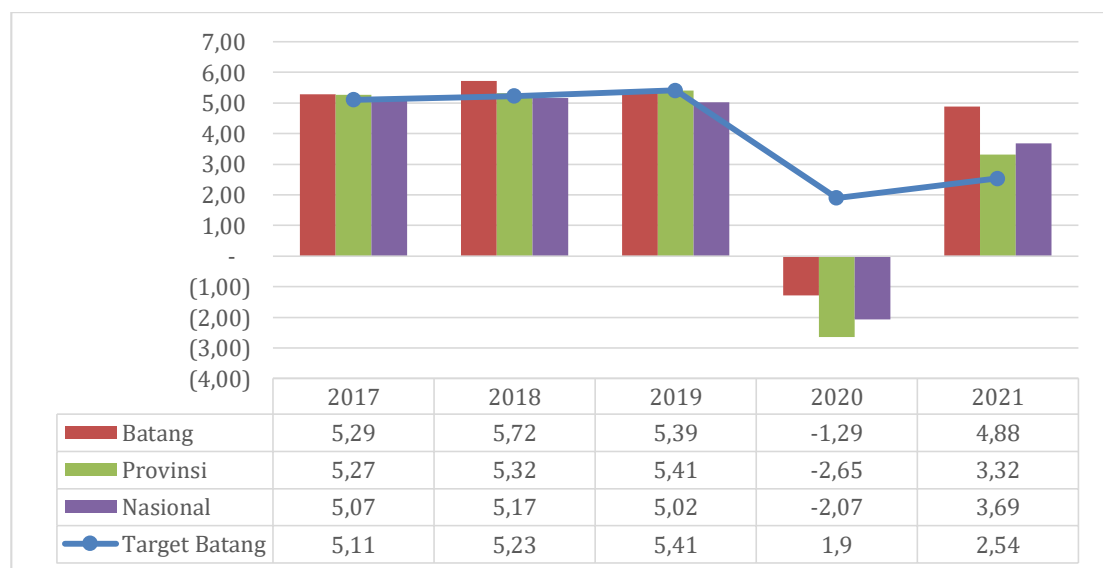
Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kesejahteraan sosial dapat dilihat dari kondisi capaian indikator berikut.

1. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada

kisaran minus 1,29 persen hingga 5,72 persen. Pada tahun 2017, perekonomian Kabupaten Batang tumbuh sebesar 5,55 persen, terus meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,72 persen dan menurun pada tahun 2019 menjadi 5,39 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen akibat dari adanya pandemi Covid-19. Capaian ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,90 persen. Bukan hanya di Kabupaten Batang, pandemi Covid-19 juga menyebabkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen dan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Batang meningkat menjadi 4,88 persen, lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yaitu sebesar 2,54 persen. Angka ini juga masih lebih tinggi dibanding dengan capaian provinsi dan nasional yakni sebesar 3,32 persen dan 3,69 persen. Kondisi ekonomi Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dari tahun 2017 – 2021 sebagaimana tersaji dalam grafik gambar berikut :

Gambar 2. 11
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang tidak terlepas dari sumbangan dari masing-masing sektor perekonomian. Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan Kabupaten Batang mengalami tren kenaikan tiap tahun. Kontribusi terbesar perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2021 berasal dari sektor industri pengolahan yang menyumbang 7.883.059,12 juta rupiah (34,09%) dari total PDRB yang disusul dari sektor Pertanian dengan menyumbang sebesar 4.746.326,78 juta rupiah (20,52%). Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.946.563,79 juta rupiah (12,74%) dan sektor konstruksi sebesar 1.668.969,88 juta rupiah (7,22%) yang kemudian di lima besar terakhir penyumbang PDRB terbesar dari sektor Jasa Pendidikan 1.371.476,63 juta rupiah (5,93%).

PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Batang Tahun 2021 mencapai 23.125.755,99 juta rupiah, jumlah ini meningkat dari tahun 2020 sebesar 21.619.292,81 juta rupiah. Selengkapnya PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 12
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.988.455,89	4.181.085,29	4.395.176,61	4.656.020,56	4.746.326,78
B	Pertambangan dan Penggalian	577.776,41	633.002,46	646.533,89	660.610,77	706.207,85
C	Industri Pengolahan	6.381.151,63	6.964.171,94	7.436.242,61	7.368.499,52	7.883.059,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12.051,78	13.002,95	13.758,78	14.383,77	15.673,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18.688,60	21.144,91	22.419,44	23.209,85	23.743,67
F	Konstruksi	992.146,44	1.149.571,74	1.196.356,29	1.189.042,66	1.668.969,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	2.428.808,85	2.617.230,73	2.848.979,37	2.746.140,70	2.946.563,79

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	428.030,62	452.060,78	497.698,55	375.835,73	396.530,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	702.749,09	750.914,53	830.855,81	784.096,84	845.052,24
J	Informasi dan Komunikasi	468.338,61	518.948,47	579.618,62	679.710,57	710.773,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	330.642,88	352.044,55	367.418,38	369.556,79	394.436,65
L	Real Estate	195.391,58	210.244,34	224.537,47	222.325,48	227.883,62
M,N	Jasa Perusahaan	71.435,12	78.879,81	88.522,90	84.314,96	87.603,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	462.794,36	482.288,48	503.877,61	504.043,88	495.122,31
P	Jasa Pendidikan	1.121.495,02	1.224.573,58	1.345.408,13	1.353.876,24	1.371.476,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	135.294,33	147.548,12	160.514,55	179.312,69	186.521,06
R,S,T,U	Jasa lainnya	346.715,77	383.863,79	427.945,48	408.311,82	419.811,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		18.661.966,98	20.180.576,47	21.585.864,48	21.619.292,81	23.125.755,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		18.661.966,98	20.180.576,47	21.585.864,48	21.619.292,81	23.125.755,99
PDRB NON PEMERINTAHAN		18.199.172,62	19.698.287,99	21.081.986,87	21.115.248,93	22.630.633,68

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Sedangkan PDRB atas harga konstan Kabupaten Batang tahun 2021 sebesar 15.427.223,85 juta rupiah menurun jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 15.031.083,84 juta rupiah. Kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor Industri Pengolahan dengan menyumbang sebesar 5.164.177,57 juta rupiah (32,76%) selanjutnya disusul oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan menyumbang sebesar 2.963.785,83 juta rupiah (18,80%). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 2.227.173,18 juta rupiah (14,13%) dari PDRB yang kemudian disusul sektor Konstruksi

sebesar 1.112.109,97 juta rupiah (7,05%) dan lima besar penyumbang terbesar terakhir dari sektor Jasa Pendidikan sebesar 849.039,14 juta rupiah (5,39%).

Tabel 2. 13
PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Atas Dasar Harga
Konstan Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.713.790,71	2.771.604,81	2.861.458,05	2.977.772,61	2.963.785,83
B	Pertambangan dan Penggalan	371.724,49	402.437,45	406.042,94	405.324,81	428.966,34
C	Industri Pengolahan	4.540.663,60	4.828.125,72	5.091.398,13	4.947.572,62	5.164.177,57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.528,90	11.042,04	11.662,00	12.376,51	13.600,45
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.239,49	17.975,42	18.616,75	19.059,92	19.292,48
F	Konstruksi	738.342,47	818.649,82	827.610,09	819.046,23	1.112.109,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.954.281,44	2.061.866,97	2.195.585,27	2.102.712,81	2.227.173,18
H	Transportasi dan Pergudangan	373.769,87	391.360,47	424.195,54	310.474,56	317.018,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	544.869,69	576.397,63	628.835,79	588.060,38	619.311,59
J	Informasi dan Komunikasi	503.290,87	556.287,38	614.640,75	719.911,65	752.583,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	238.313,89	245.049,54	251.831,84	253.493,64	259.462,43
L	Real Estate	165.752,73	174.238,65	183.684,34	181.361,19	183.778,74
M,N	Jasa Perusahaan	52.840,76	56.819,31	61.948,33	57.775,36	59.304,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	323.214,45	333.338,64	343.704,55	339.564,23	337.041,69
P	Jasa Pendidikan	738.625,25	787.758,45	849.340,21	848.468,12	849.039,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.063,28	107.831,92	115.243,59	125.776,75	129.472,68
R,S,T,U	Jasa lainnya	280.767,91	307.841,59	341.086,84	321.825,63	328.147,12

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.667.079,80	14.448.625,81	15.226.885,02	15.030.577,04	15.764.265,54
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	13.667.079,80	14.448.625,81	15.226.885,02	15.030.577,04	15.764.265,54
	PDRB NON PEMERINTAHAN	13.343.865,35	14.115.287,17	14.883.180,47	14.691.012,81	15.427.223,85

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Tabel 2. 14
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-1.61	2.13	3.24	4.06	-0.47
B. Pertambangan dan Penggalan	18.50	8.26	0.90	-0.18	5.83
C. Industri Pengolahan	7.17	6.33	5.45	-2.82	4.38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.14	4.87	5.61	6.13	9.89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.61	10.69	3.57	2.38	1.22
F. Konstruksi	14.63	10.88	1.09	-1.03	35.78
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.11	5.51	6.49	-4.26	5.95
H. Transportasi dan Pergudangan	4.64	4.71	8.39	-26.50	1.68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.77	5.79	9.10	-6.48	5.31
J. Informasi dan Komunikasi	11.42	10.53	10.49	17.13	4.54
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.22	2.83	2.77	0.66	2.35
L. Real Estate	5.80	5.12	5.42	-1.26	1.33
M,N. Jasa Perusahaan	8.48	7.53	9.03	-6.74	2.65
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.07	3.13	3.11	-1.20	-0.74

Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
P. Jasa Pendidikan	6.07	6.65	7.82	-0.10	0.07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	7.37	7.76	6.87	9.14	2.94
R,S,T,U. Jasa Lainnya	9.39	9.64	10.80	-5.65	1.96
Produk Domestik Regional Bruto	5.55	5.72	5.39	-1.29	4.88

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Pada tahun 2020, sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor yang mengalami koreksi paling dalam hingga mencapai -26,50%. Hal serupa juga terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkoreksi sebesar 6,48%, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang terkoreksi hingga 4,26%. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah guna mengurangi resiko penyebaran covid 19.

Pada tahun 2021, pertumbuhan positif terjadi pada hampir semua sektor lapangan usaha kecuali sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh negatif di angka -0.46% dan sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib yang mengalami perlambatan sebesar -0,74%. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan perekonomian di Kabupaten Batang, setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi yang tumbuh hingga 35.78% setelah pada tahun 2020 tumbuh negatif di angka -1,03%. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan signifikan akibat adanya pembangunan Kawasan Industri. Disusul sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 9,89% setelah pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 6,13% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,95%.

Tabel 2. 15
Distribusi persentase PDRB Kabupaten Batang Menurut Lapangan Usaham Tahun 2017-2021

Sektor PDRB	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,37	20,72	20,36	21,53	20,52
B. Pertambangan dan Penggalian	3,10	3,14	3,00	3,06	3,05
C. Industri Pengolahan	34,19	34,51	34,45	34,08	34,09
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10
F. Konstruksi	5,32	5,70	5,54	5,50	7,22
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,01	12,97	13,20	12,70	12,74
H. Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,24	2,31	1,75	1,71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,77	3,72	3,85	3,63	3,65
J. Informasi dan Komunikasi	2,51	2,57	2,69	3,14	3,07
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,77	1,74	1,70	1,71	1,71
L. Real Estate	1,05	1,04	1,04	1,03	0,99
M,N. Jasa Perusahaan	0,38	0,39	0,41	0,39	0,38
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,48	2,39	2,33	2,33	2,14
P. Jasa Pendidikan	6,01	6,07	6,23	6,26	5,93
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Lainnya	0,72	0,73	0,74	0,83	0,81
R,S,T,U. Jasa Lainnya	1,86	1,90	1,98	1,89	1,82
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Jika dilihat dari distribusi persentase PDRB, seperti pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Batang masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Industri Pengolahan (34,09%); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (20,52%); dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,74%). Pada tahun 2021, ketiga sektor tersebut berkontribusi sebesar 67,35% dari total PDRB Kabupaten Batang, turun sebesar 0,96% jika dibandingkan dengan tahun 2020 dengan kontribusi sebesar 68,31%. Dari ketiga sektor tersebut, penurunan kontribusi terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang turun 1,01% pada tahun 2021 menjadi 20,52% dari 21,53% pada tahun 2020.

Sektor Konstruksi mengalami kenaikan kontribusi terhadap total PDRB Kabupaten Batang. Dari 5,50% pada tahun 2020, menjadi 7,22% di tahun 2021, atau mengalami kenaikan sebesar 1,72%. Pembangunan Kawasan industri menjadi faktor penting kenaikan persentase distribusi pada sektor tersebut. Sementara sektor-sektor lain cenderung stabil tanpa mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan.

Jika dilihat dari PDRB menurut pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 meningkat menjadi 3,32 persen setelah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen (-2,65 persen) di tahun 2020, secara Nasional perekonomian tahun 2021 meningkat menjadi 3,69 persen setelah mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen (-2,07 persen) di tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang sebesar 4,88 persen setelah mengalami kontraksi tahun 2020 sebesar 1,29 persen.

Nilai ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku (ADHB) menurut pengeluaran mencapai 23.125.755,99 juta rupiah, yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 16.184.573,40 (69,99%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6.229.771,65 juta rupiah (26,94%). Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah

tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 78,34 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori. Nilai PDRB Kabupaten Batang ADHB menurut pengeluaran selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut masih dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2. 16
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)				
	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	13 409 055,12	14 405 094,23	15 465 989,48	15 568 041,10	16.184.573,40
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	285 241,89	318 417,84	366 508,69	352 637,80	364.824,14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 447 812,70	1 521 548,44	1 543 955,31	1 527 434,99	1.567.301,04
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4 164 899,73	8 578 176,99	8 625 319,98	6 116 316,15	6.229.771,65
Perubahan Inventori	1 254 167,49	2 995 114,50	-476 473,55	521 481,68	390.464,63
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 899 209,95	-7 637 775,54	-3 939 435,44	-2 466 618,91	-1.611.178,87
Produk Domestik Regional Bruto	18 661 966,98	20 180 576,47	21 585 864,48	21 619 292,81	23.125.755,99

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Selama periode 2017-2021, konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Pengeluaran tahun 2021 peranannya masih begitu dominan yaitu sebesar 71,46 persen namun angka ini menurun dibanding tahun 2020 sebesar 73,63 persen. Pengeluaran untuk pembentukan modal atau kapital (PMTB) porsinya terhadap PDRB menempati urutan kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pada tahun

2021 porsi PMTB sebesar 24,89 persen, berkurang dari tahun 2020 yang mencapai 25,54 persen. Pada pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2021, hanya mencapai 6,09 persen dimana angka ini menurun dibanding tahun 2020 sekitar 6,39 persen dari total PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam membentuk PDRB tidak mendominasi. Pada tahun 2017-2021, perdagangan Kabupaten Batang yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa net ekspor barang dan jasa bernilai negatif, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Batang selama kurun waktu 2017-2021 selalu menunjukkan posisi “defisit” dimana mencapai -6,20 persen di tahun 2021. Namun angka ini meningkat dibanding tahun 2020 sebesar -10,37 persen. Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya, yaitu hanya sekitar 1,38 persen. Peranan institusi ini dalam perekonomian masih perlu mendapat perhatian, sehingga pada masa mendatang akan semakin meningkat.

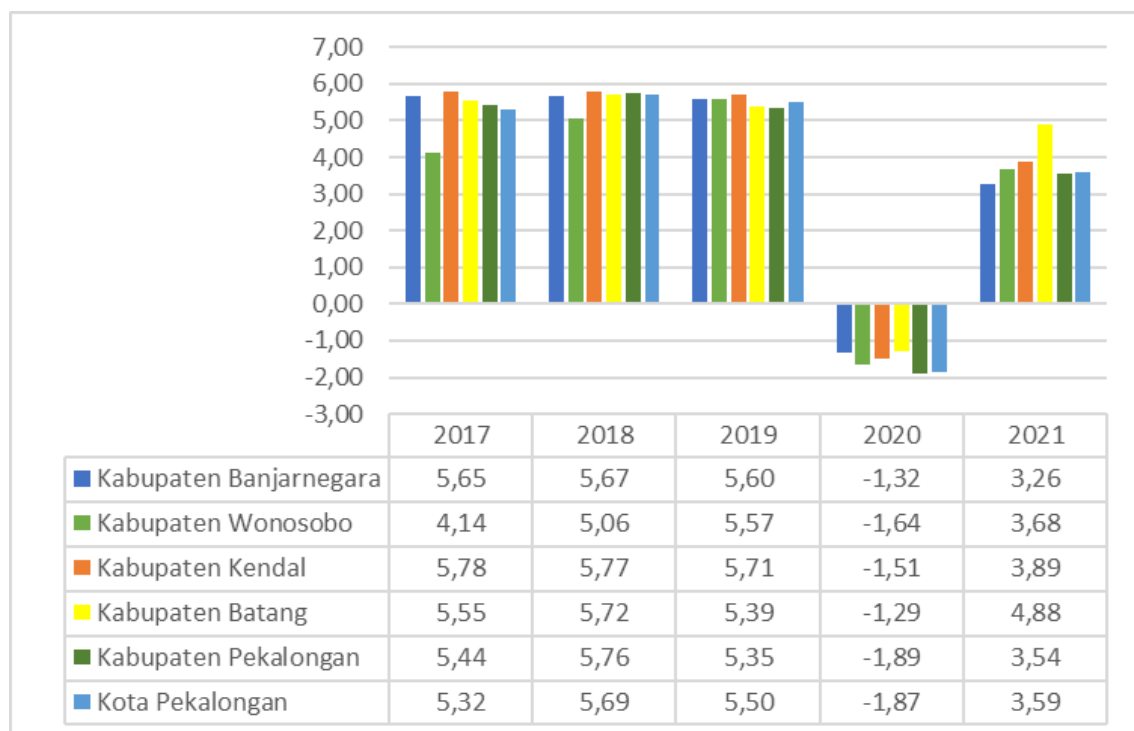
Tabel 2. 17
PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021

Jenis Pengeluaran	Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)				
	Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10,221,760,29	10 701.889,34	11 196 748,99	11 068 624,84	11.265.953,40
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	187 595,13	204 284,29	229 889,33	217 574,16	218.713,77
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	934 100,33	964 636,04	971 488,58	960 782,78	960.632,13
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2 896 811,11	5 610 136,30	5 357 248,90	3 839 547,20	3.924.731,82
Perubahan Inventori	1 042 157,69	1 358 284,85	-434 472,76	504 245,43	372.517,51
Ekspor Barang dan Jasa	-1 615 344,75	-4 390 605,01	-2 094 018,01	-1 560 197,36	-978.283,08
Produk Domestik Regional Bruto	13 667 079,80	14 448 625,81	15 226 885,02	15 030 577,04	15.764.265,54

Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Kontraksi ekonomi di tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Kabupaten/Kota di sekitar Batang hingga mencapai rentang minus 1,29 persen hingga minus 1,89 persen. Namun pada tahun 2021, kondisi ekonomi di sekitar kabupaten/kota sekitar Batang sudah berangsur membaik yang ditandai dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2021 meningkat hingga 4,88 persen. Pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan 5 Kabupaten/Kota sekitar yakni Kabupaten Kendal sebesar 3,89 persen, Kabupaten Wonosobo sebesar 3,68 persen, Kota Pekalongan sebesar 3,54 persen, Kabupaten Pekalongan sebesar 3,54 persen, dan Kabupaten Banjarnegara sebesar 3,26 persen.

Gambar 2. 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Batang dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2021

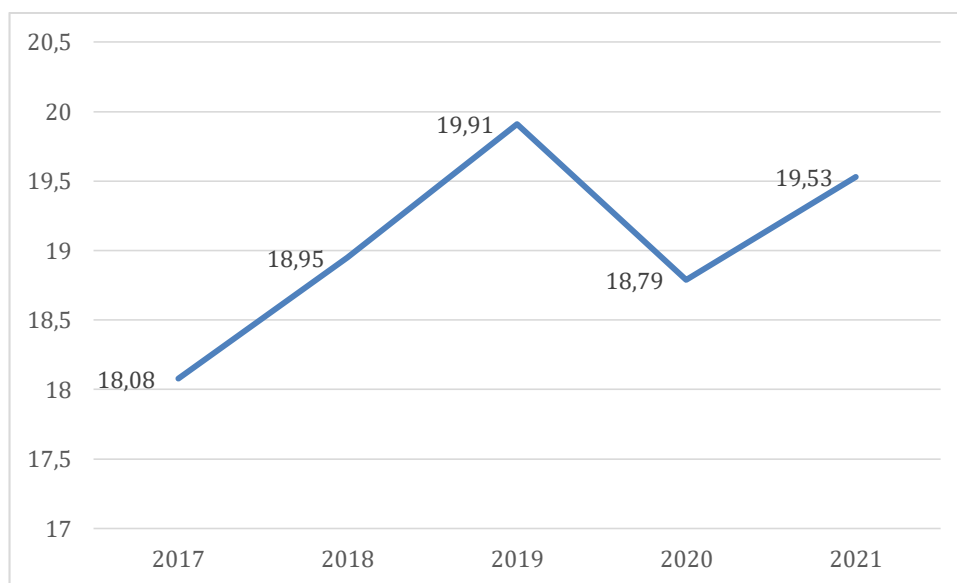


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah dengan mengetahui besarnya nilai pendapatan per kapita yaitu dengan menghitung PDRB per kapita. PDRB per kapita ADHB

menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Batang kurun waktu 2017-2019 terus mengalami peningkatan. PDRB ADHK Kabupaten Batang tahun 2017 sebesar 18,08 juta Rupiah terus meningkat menjadi sebesar 19,91 juta Rupiah di tahun 2019, namun akibat dampak pandemi Covid-19, PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Batang mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 18,79 juta rupiah. Dan Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 19,53 juta rupiah.

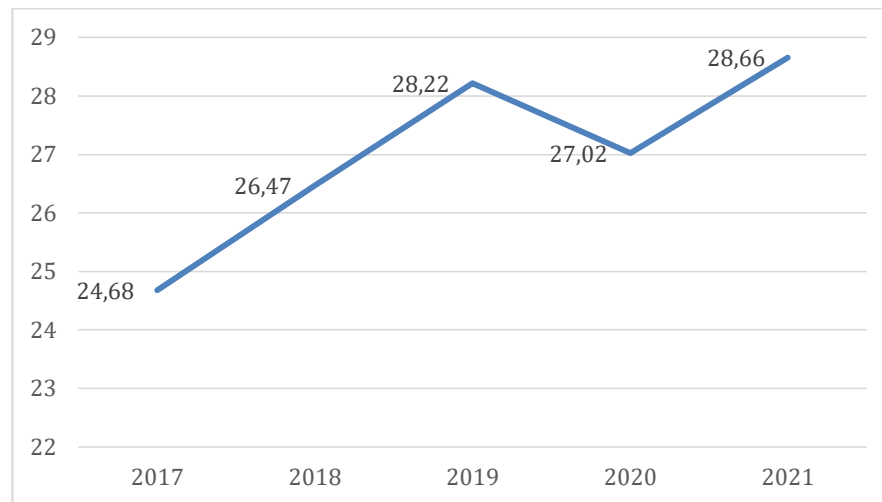
Gambar 2. 13 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Batang



Sumber: BPS Kabupaten Batang 2022

Capaian PDRB per kapita ADHB Kabupaten Batang kurun 2017-2019 mengalami peningkatan. Tahun 2017 sebesar 24,68 juta rupiah meningkat menjadi sebesar 26,47 persen pada tahun 2018 dan kembali meningkat menjadi 28,22 juta rupiah pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 27,02 juta rupiah dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 28,66. Perubahan PDRB per Kapita tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian juga karena faktor inflasi.

Gambar 2. 14 PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Batang

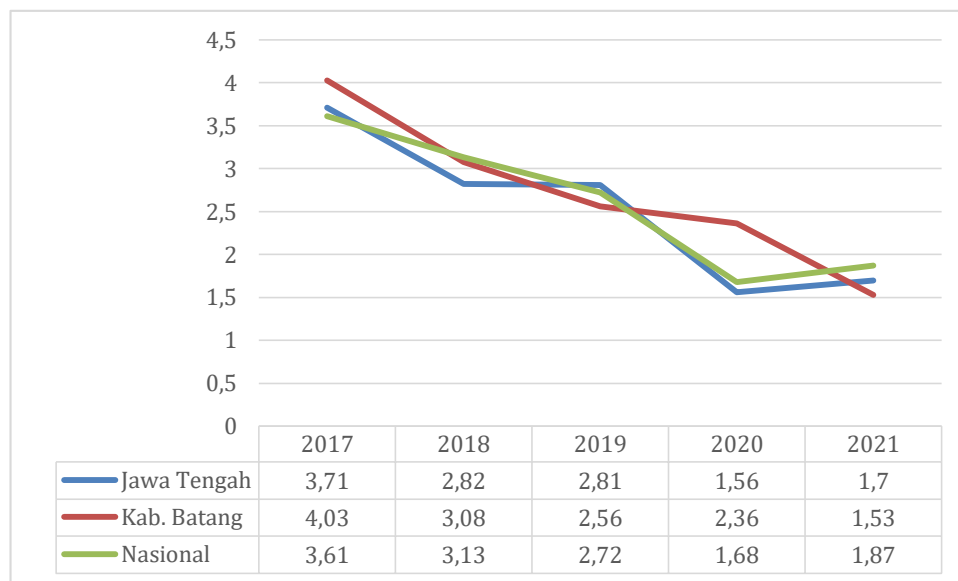
Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

2. Laju Inflasi

Laju inflasi di Kabupaten Batang dalam kurun waktu tahun 2017-2021 relatif terkendali berada pada rentang 1,53 persen hingga 4,03 persen, pada tahun 2017 laju inflasi Kabupaten Batang sebesar 4,03 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang pada tahun yang sama mengalami inflasi sebesar 3,71 persen dan inflasi nasional berada pada angka 3,61 persen. Pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Batang sebesar 1,53 persen, provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi 1,7 persen dan secara nasional angka inflasi berada pada angka 1,87 persen.

Sejak tahun 2020 angka inflasi tidak dihitung pada semua Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, angka inflasi hanya dihitung pada 6 Kota yaitu Tegal, Purwokerto, Cilacap, Kudus, Semarang dan Surakarta. Angka inflasi Kabupaten Batang mengacu pada angka inflasi Kota Tegal tahun 2017-2021 selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2. 15 Laju inflasi Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

3. Tingkat Ketimpangan

Jumlah pendapatan atau distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk atau wilayah. Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai range nilai 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati 0 menunjukkan semakin rendah ketimpangannya dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan semakin tinggi ketimpangan (jurang pemisah antara si kaya dan si miskin lebar). Secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

$0,00 < G < 0,35$	pemerataan tinggi / ketimpangan rendah
$0,35 \leq G \leq 0,50$	pemerataan / ketimpangan sedang
$G > 0,50$	pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Namun sejak tahun 2016, indeks Gini sudah tidak lagi dilakukan di tingkat Kabupaten. Alternatif yang digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan di daerah adalah menggunakan indikator ketimpangan pendapatan menurut kriteria Bank Dunia.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Distribusi pengeluaran Kabupaten Batang pada pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah berdasarkan kriteria Bank Dunia 2017-2020 pada kurun waktu empat tahun terakhir berada pada kisaran diatas 17 persen, tahun 2017 sebesar 21,57 persen, tahun 2018 sebesar 21,14 persen, tahun 2019 sebesar 21,56 dan tahun 2020 21,26 yang artinya tingkat ketimpangan di Kabupaten Batang berada pada kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2. 18 Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria Bank Dunia Kabupaten Batang Tahun 2017-2020

Kategori	40% bawah	40% tengah	20% atas
2017	21,57	38,16	38,16
2018	21,14	37,54	41,32
2019	21,56	39,65	38,79
2020	21,26	40,61	38,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

4. Kondisi Kemiskinan

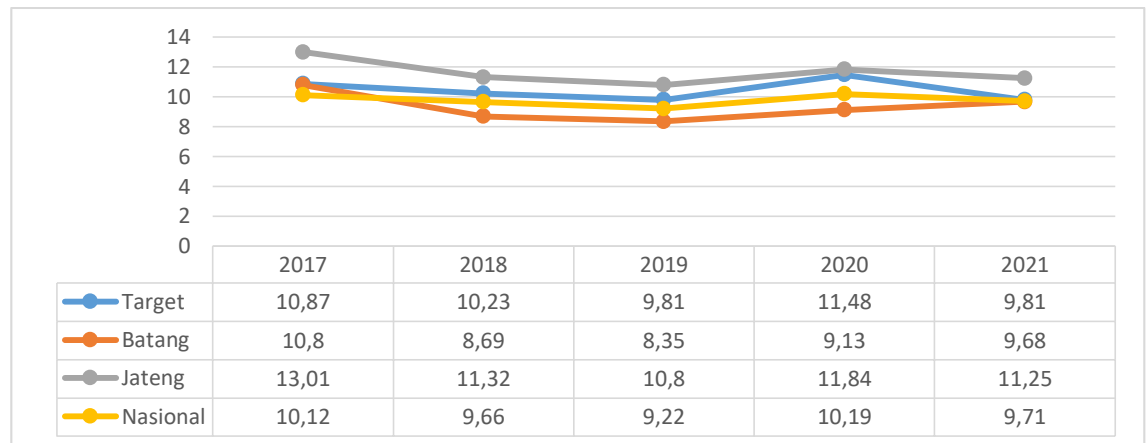
Angka kemiskinan Kabupaten Batang berfluktuasi menurun pada periode tahun 2017-2021, dari sebesar 10,8% pada tahun 2017 menjadi 9,68% pada tahun 2021. Kondisi kemiskinan Kabupaten Batang mengalami kenaikan pada tahun 2020 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 49.394 KK terdampak secara ekonomi dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal inilah menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2020 naik menjadi 9,13% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,35%. Angka kemiskinan tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2020 yaitu sebesar 9,13%. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid masih belum sepenuhnya pulih, terutama pada masyarakat yang terdampak masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun angka kemiskinan meningkat dari tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dari angka target tahun 2021 sebesar 9,81% masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,25%. Hal ini didorong oleh adanya upaya Pemerintah Kabupaten Batang melalui upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah layak, dan akses KB, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial/subsidi untuk masyarakat miskin, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dan jaminan kesehatan warga miskin.

Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun angka kemiskinan Kabupaten Batang masih lebih rendah dibandingkan Nasional sebesar 9,71%. Selengkapnya pada gambar berikut :

Gambar 2. 16

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan

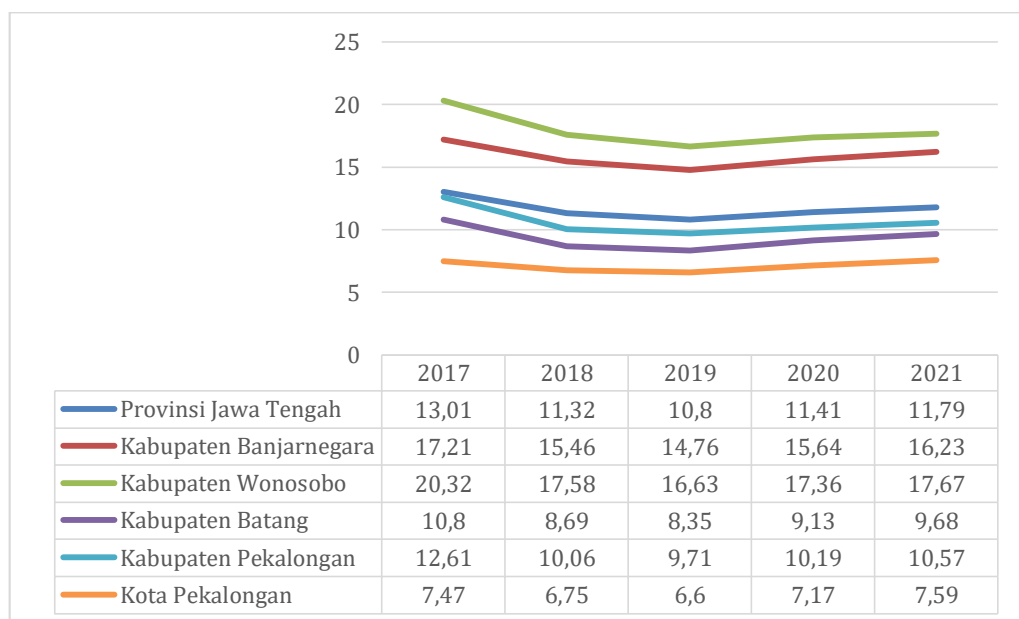
Jawa Tengah dan Nasional (2017-2021)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, persentase penduduk miskin Kabupaten Batang tahun 2021 masih lebih rendah dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 16,23%, Kabupaten Wonosobo sebesar 17,67%, Kabupaten Kendal sebesar 10,24% dan Kabupaten Pekalongan sebesar 10,57%, namun masih lebih tinggi jika dibandingkan Kota Pekalongan yaitu sebesar 7,59%.

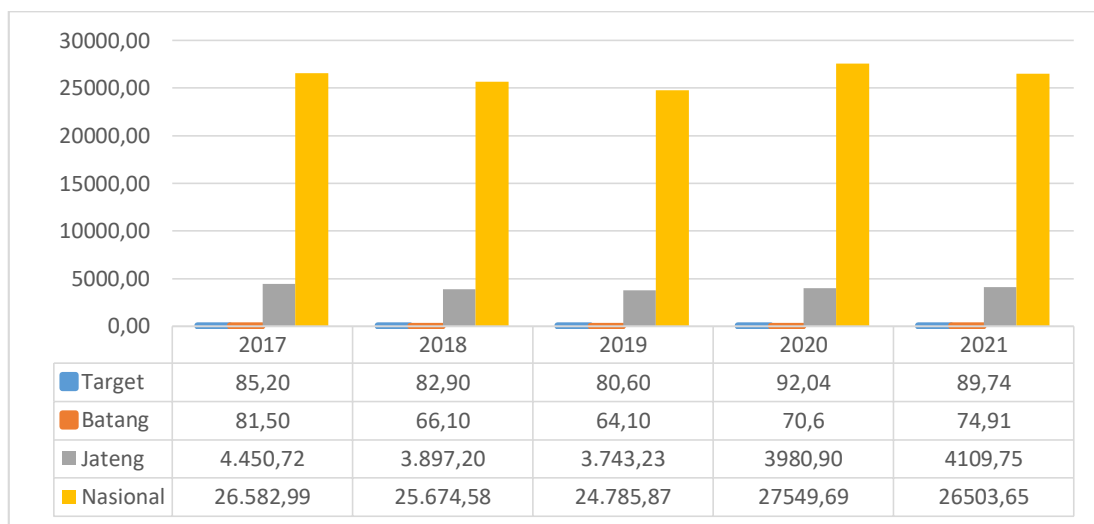
Gambar 2. 17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi Jawa Tengah



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Sejalan dengan meningkatnya persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang periode tahun 2017-2021 juga berfluktuasi menurun, dimana tahun 2017 sebanyak 81,50 ribu jiwa mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebanyak 64,10 ribu jiwa. Namun karena dampak pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi sebesar 70,6 ribu jiwa pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 74,91 ribu jiwa, selengkapnya tersaji pada gambar berikut:

Gambar 2. 18 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang Tahun 2017-2021 (ribu jiwa)



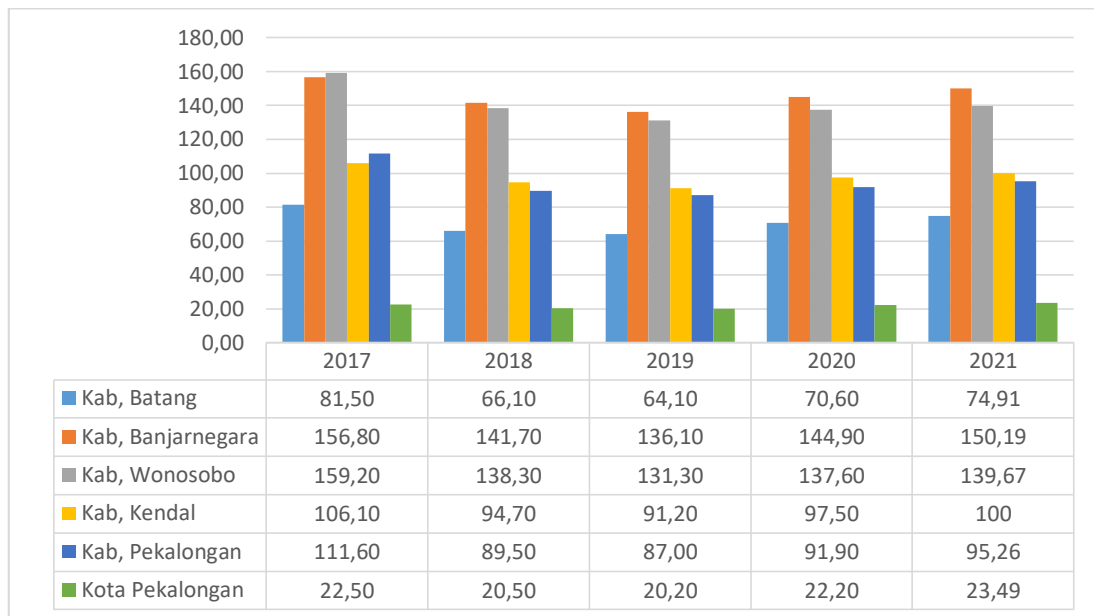
Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2022

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/kota di sekitar, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang tahun pada tahun 2021 masih lebih rendah. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang pada tahun 2021 sejumlah 74,91 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Banjarnegara sebesar 150,19 ribu jiwa, Kabupaten Wonosobo sebesar 139,67 ribu jiwa, Kabupaten Kendal sebesar 100 ribu jiwa, Kabupaten Pekalongan sebesar 95,26 ribu jiwa dan Kota Pekalongan sebesar 23,49 ribu jiwa. Namun demikian, jumlah penduduk miskin Kabupaten Batang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota Pekalongan sebesar 23,49 ribu jiwa.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2017-2021 selengkapnya tersaji dalam

grafik berikut:

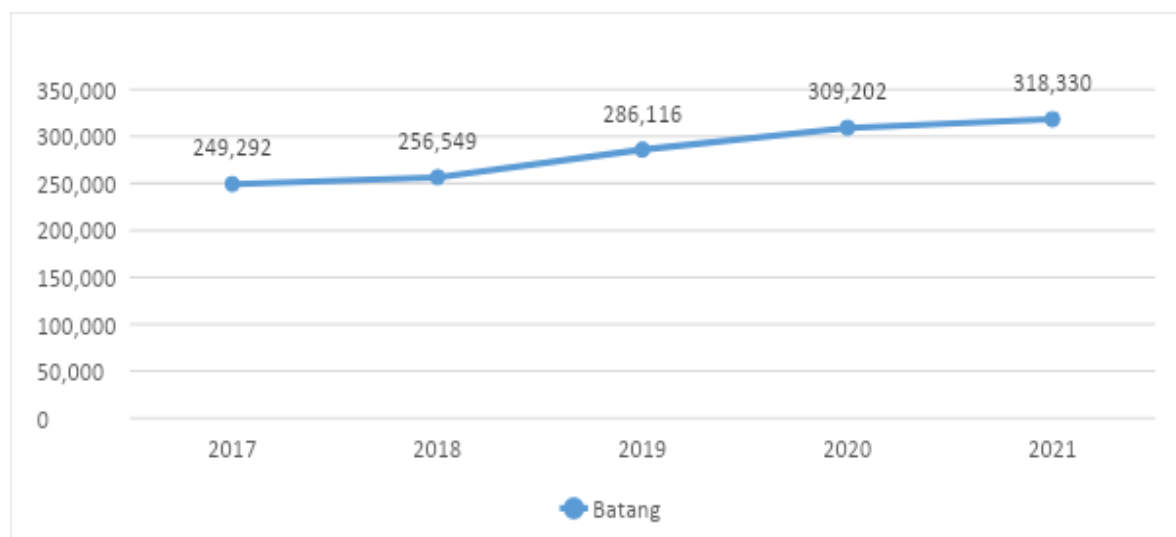
Gambar 2. 19 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/kota sekitar Tahun 2017-2021 (ribu jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Jateng, 2022

Garis kemiskinan di Kabupaten Batang terus meningkat pada periode 2017-2021. Garis kemiskinan di Kabupaten Batang tahun 2017 sebesar 249.292 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 318.330,- per kapita per bulan dan termasuk ke dalam kategori Garis Kemiskinan Rendah.

Gambar 2. 20 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang berada pada angka 1,51 dan terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,69 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 1,43 dan pada tahun 2021 menjadi 1,76. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.

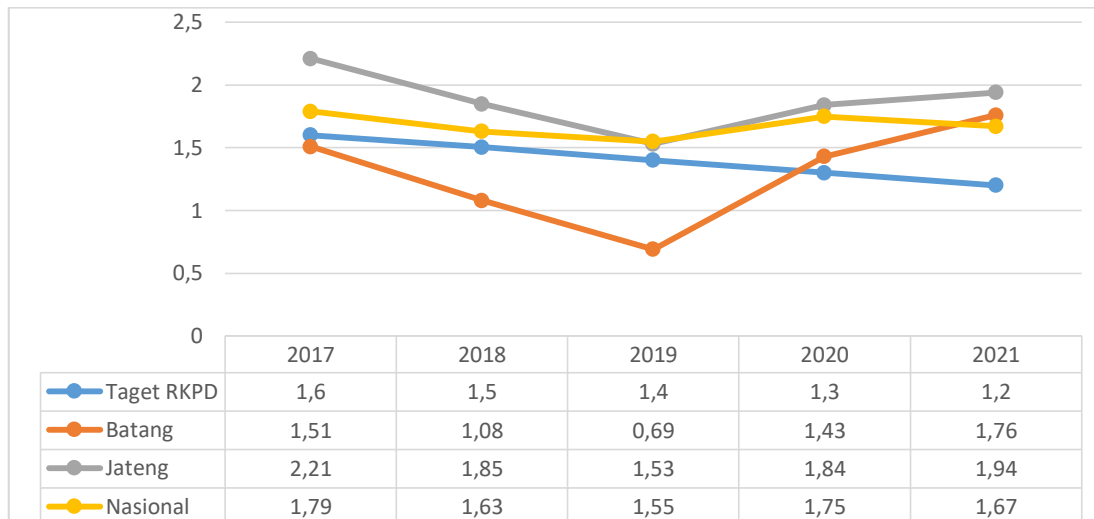
Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di atas provinsi dan nasional;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan di atas nasional;
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah, adalah Kabupaten/Kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional.

Berdasarkan posisi relative di atas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang tahun 2021 sebesar 1,76 masuk dalam kategori Indeks Kedalaman Kemiskinan sedang yang artinya bahwa Kabupaten Batang memiliki P1 dibawah provinsi sebesar 1,94 dan nasional sebesar 1,67.

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 2. 21 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Batang Dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

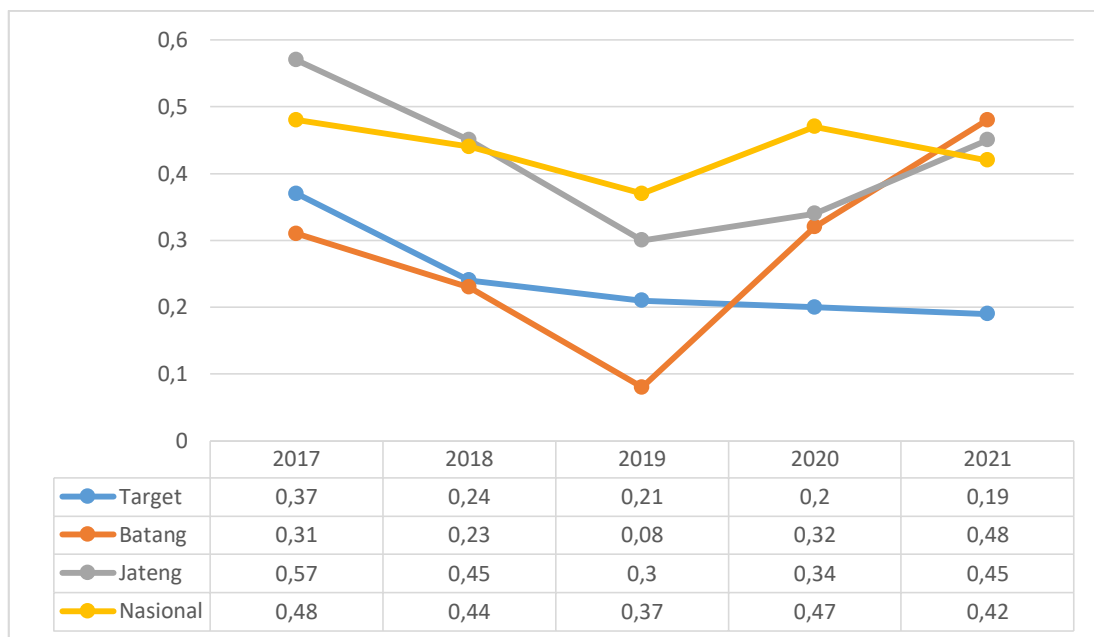


Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Jika dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), selama periode 2017-2021, keparahan kemiskinan di Kabupaten Batang terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019. Pada tahun 2017, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang berada pada angka 0,31, lebih rendah dari provinsi dengan indeks sebesar 0,57 dan nasional sebesar 0,48. Pada tahun 2018 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Batang Kembali mengalami penurunan menjadi 0,23 dan mencapai titik terendah pada tahun 2019 dengan indeks sebesar 0,08. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin kecil. Namun P2 kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021, disebabkan dampak Covid-19 yang berpengaruh signifikan pada ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin Kabupaten Batang.

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang tahun 2017-2021 selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 22 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang (P2) Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Batang jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional masuk pada kategori tinggi, yang artinya Kabupaten Batang memiliki P2 di atas provinsi (0,45) dan di atas nasional (0,42).

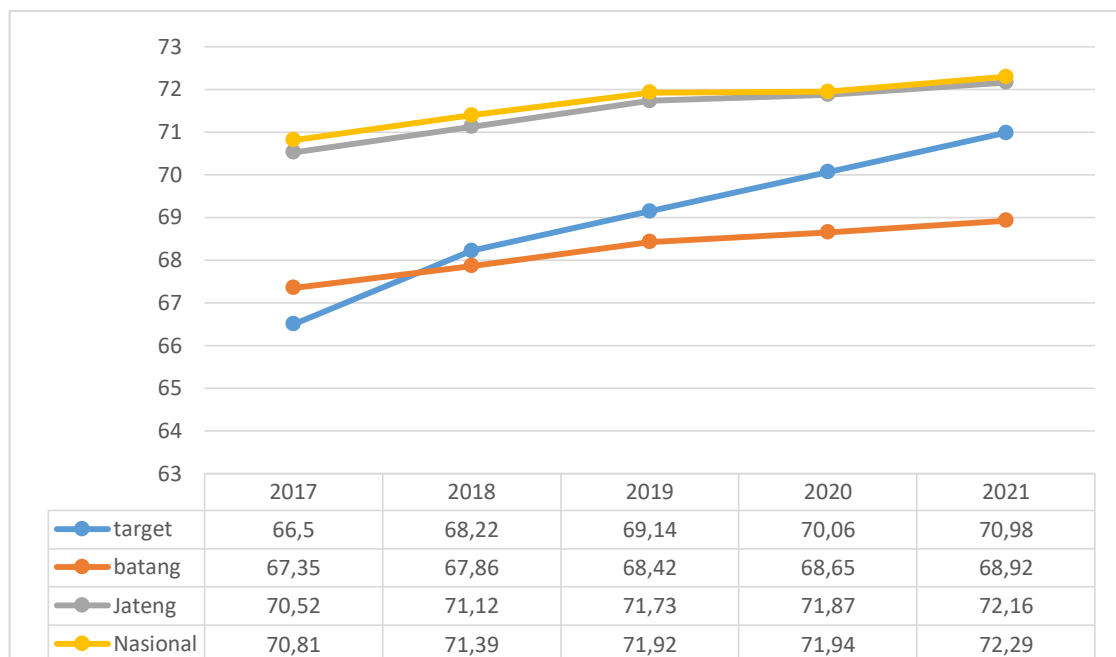
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas penduduk dalam hal kelangsungan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak. IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup, yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta tingkat kehidupan yang layak dengan ukuran pengeluaran perkapita (*purchasing power parity*). Untuk melihat capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah dapat dilihat melalui pengelompokan IPM ke dalam beberapa kategori yaitu:

- IPM rendah, jika nilai $IPM < 60$;
- IPM sedang, jika nilai $60 < IPM < 70$;
- IPM tinggi, jika nilai $70 < IPM < 80$;
- IPM sangat tinggi, jika nilai $IPM > 80$.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang menurut metode baru menunjukkan ke arah positif setiap tahunnya dimana pada kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kabupaten Batang terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 angka IPM Kabupaten Batang sebesar 67,35 terus mengalami peningkatan, bahkan di tahun 2020 dan 2021 meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 nilai IPM Kabupaten Batang masih terus meningkat menjadi 68,92. Meskipun nilai IPM Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan, namun IPM Kabupaten Batang ini masih masuk dalam kategori sedang dan lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan capaian nasional. Perkembangan IPM Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar yang tersaji dibawah ini.

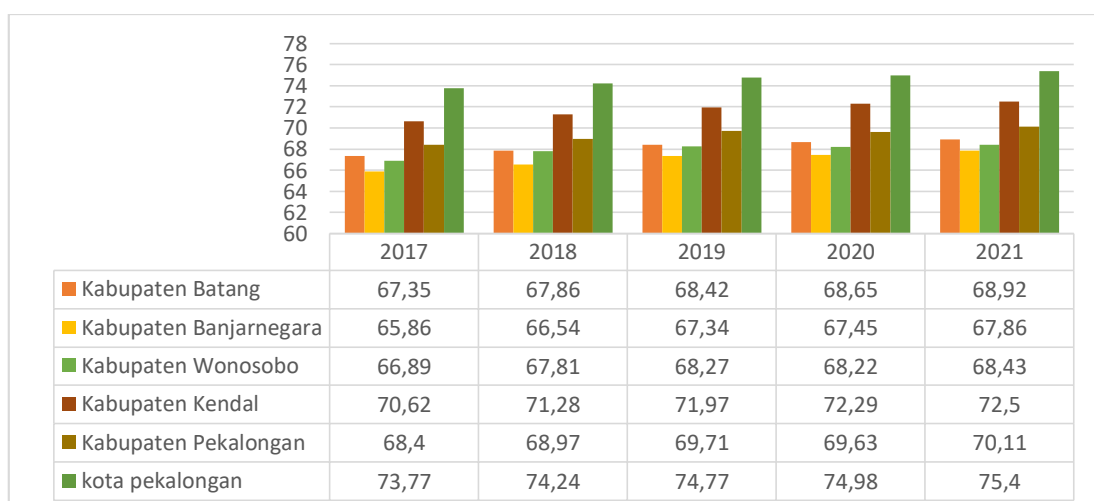
Gambar 2. 23 IPM Kabupaten Batang Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Capaian IPM Kabupaten Batang, apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, berada diatas Kabupaten Banjarnegara (67,86) dan Kabupaten Wonosobo (68,43), namun lebih rendah dibandingkan capaian Kabupaten Pekalongan (70,11), Kabupaten Kendal (72,5) dan Kota Pekalongan (75,4). Perbandingan capaian IPM Kabupaten Batang dengan kabupaten sekitar adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 24 IPM Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jawa Tengah 2022

IPM merupakan sebuah perhitungan yang didasarkan kepada 4 indikator pembentuk. Keempat indikator tersebut adalah: 1) Angka Harapan Hidup, 2) Harapan Lama Sekolah, 3) Rata-rata Lama Sekolah, dan (4) Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Dari keempat indikator pembentuk IPM tersebut, kesemuanya mengalami kenaikan.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang menunjukkan kondisi perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Batang mencapai 74,50 tahun, terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 74,74 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 HLS Kabupaten Batang mencapai 11,87 tahun meningkat menjadi 12,13 tahun pada tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Batang juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 RLS Kabupaten Batang mencapai 6,61 tahun meningkat menjadi 6,88 tahun pada tahun 2021. Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Batang menunjukkan perkembangan dalam periode tahun 2017-2021, yaitu sebesar Rp.8.805 ribu Rp/orang/tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 9,524 ribu Rp/orang /tahun pada tahun 2021.

Tabel 2. 19 Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Batang 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
AHH (TH)	74,50	74,56	74,59	74,69	74,74
HLS (TH)	11,87	11,88	12,00	12,01	12,13
RLS (TH)	6,61	6,62	6,63	6,87	6,88
Pengeluaran per kapita disesuaikan (ribu)	8,805	9,203	9,573	9,431	9,524

Rp/orang/th)					
IPM	67,35	67,86	68,42	68,65	68,92

Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

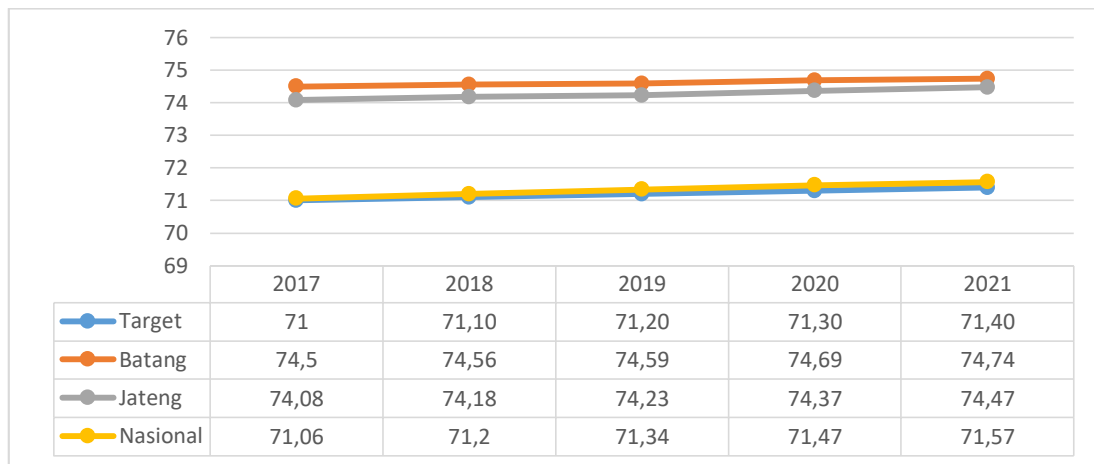
a. Angka Harapan Hidup (AHH)

Beberapa faktor yang mempengaruhi AHH bersifat kompleks, antara lain aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi AHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan upaya melalui paradigma sehat dengan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor.

Perwujudan peningkatan AHH dipengaruhi kesehatan ibu, bayi, balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan, serta pelayanan kesehatan dengan pendekatan yang komprehensif di sepanjang siklus hidup mulai dari kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang diberikan dalam tempat yang berkesinambungan mencakup keluarga, komunitas, puskesmas dan fasilitas kesehatan rujukan.

Pencapaian AHH Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2017 sebesar 74,5 tahun naik menjadi 74,74 tahun pada tahun 2021. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 74,47 tahun dan Nasional 71,57 tahun. Sedangkan jika dibandingkan dengan target, capaian AHH dalam periode tahun 2017-2021 lebih baik atau telah melampaui target yang ditetapkan. Selengkapnya pada gambar berikut :

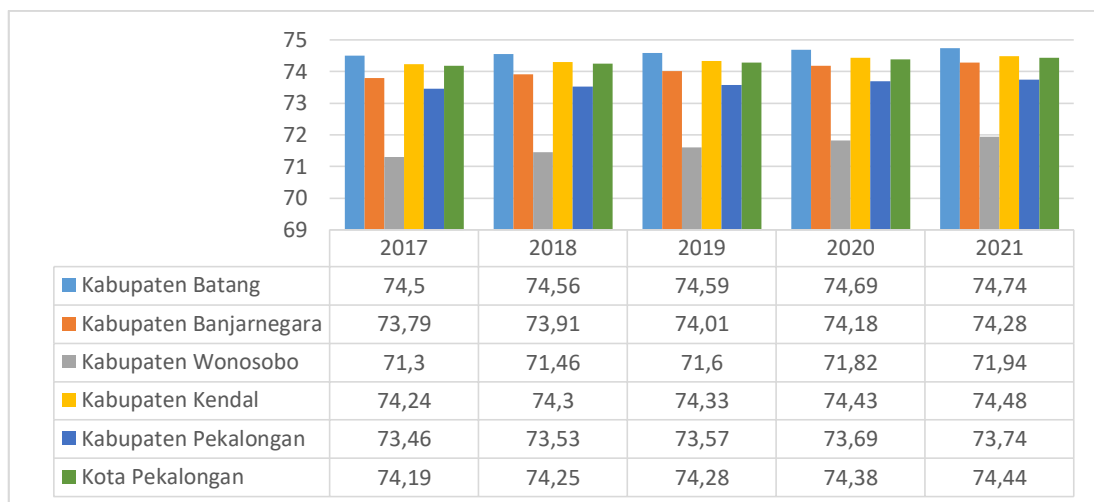
Gambar 2. 25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Capaian AHH Kabupaten Batang dalam periode tahun 2017-2021 juga lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Pekalongan.

Gambar 2. 26 Angka Harapan Hidup Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Jateng, 2022

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pencapaian HLS Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan, dari tahun 2017 sebesar 11,87 tahun naik menjadi 12,13 tahun pada tahun 2021. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan HLS diantaranya adalah konsistensi melaksanakan pendidikan dasar bebas pungutan dan berkualitas, dengan terus meningkatkan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola layanan pendidikan. Upaya mencegah terjadinya anak putus sekolah serta faktor-faktor yang menyebabkannya juga terus dilakukan, disamping pemerataan akses layanan Pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang juga terus diupayakan melalui optimalisasi koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

Menyusun program dan kegiatan terpadu lintas sektoral dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat juga merupakan salah satu bagian dari upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang, karena masyarakat dengan ekonomi yang cukup dapat mempengaruhi

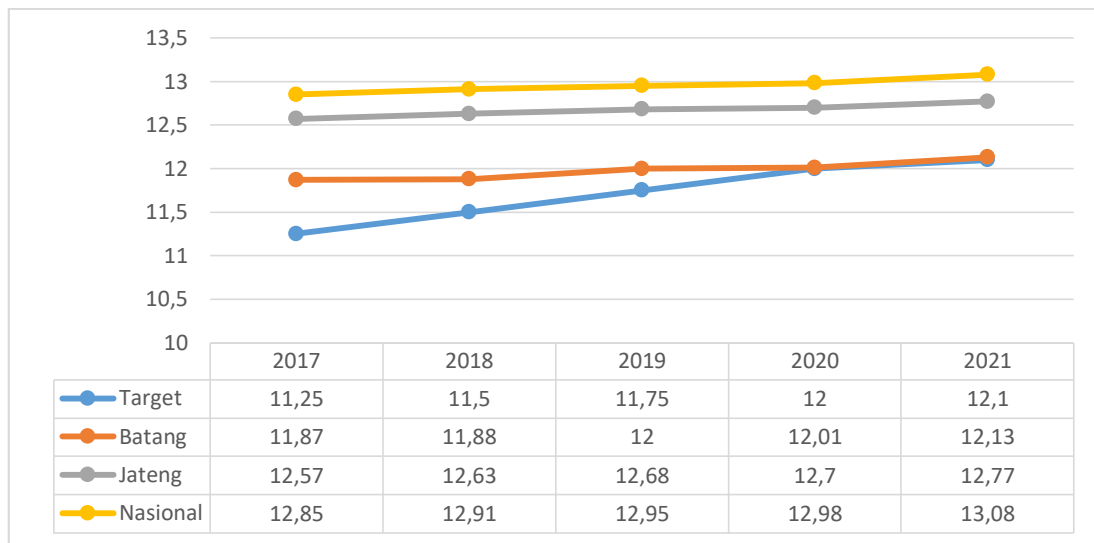
tingkat motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Hal tersebut diharapkan akan berimplikasi pada pengurangan angka kemiskinan. Upaya lainnya adalah dengan melaksanakan inovasi pelayanan pendidikan yang mengarah kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan anak di masa depan, hal ini diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan Angka Harapan Hidup dan pengeluaran per kapita masyarakat karena sejatinya pendidikan merupakan bekal bagi mereka untuk bertahan hidup di masa depan.

Permasalahan utama dari upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Batang tidak hanya terkendala pada kondisi ekonomi masyarakat kurang mampu, namun upaya perubahan paradigma dan *mindset* masyarakat tentang perlunya pendidikan juga harus dilakukan. Karena itu, upaya-upaya peningkatan HLS tersebut juga diperkuat dengan adanya sosialisasi menyeluruh melalui berbagai bentuk dan media agar masyarakat dapat termotivasi untuk melanjutkan pendidikan.

Namun demikian, meskipun HLS Kabupaten Batang terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 12,77 tahun dan Nasional 13,08 tahun, sehingga kedepan diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan angka HLS Kabupaten Batang, serta lebih mewaspadaai potensi anak-anak putus sekolah dengan melibatkan peran masyarakat dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pendidikan.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selengkapnya tersaji pada gambar berikut :

Gambar 2. 27 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

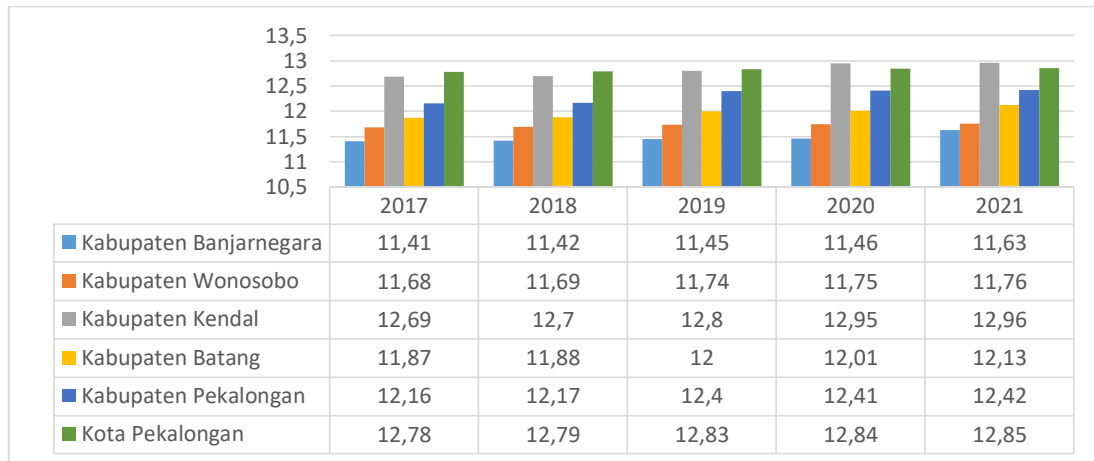


Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir masih lebih tinggi jika dibandingkan kabupaten sekitar yaitu Kabupaten Kabupaten Kendal sebesar 12,96, Kabupaten Pekalongan sebesar 12,42 dan Kota Pekalongan sebesar 12,85. Namun, masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Banjarnegara sebesar 11,63 dan Kabupaten Wonosobo sebesar 11,76 sebagaimana pada diagram berikut :

Gambar 2. 28 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Batang

dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

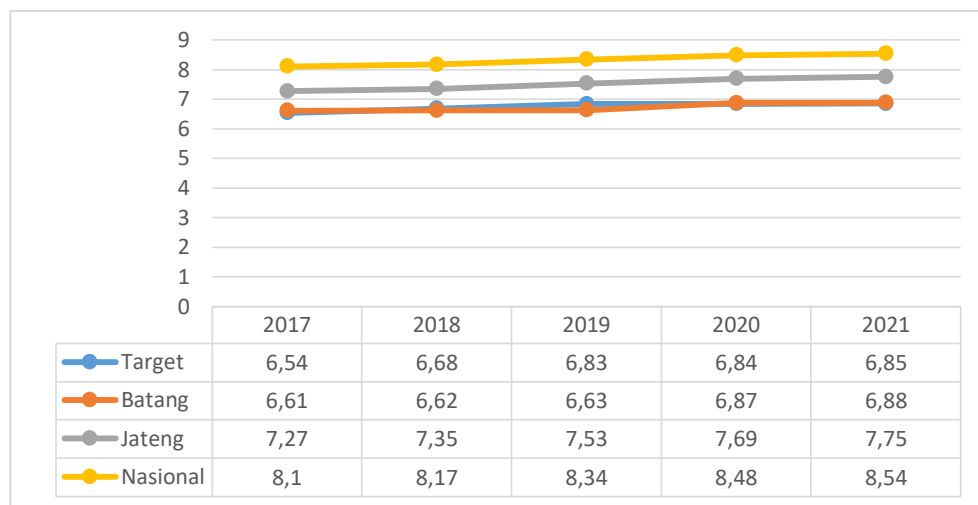
c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Pencapaian RLS Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari tahun 2017 sebesar 6,61 tahun naik menjadi 6,88 tahun pada tahun 2021. Namun demikian, capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 7,69 tahun dan Nasional 8,48 tahun.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk terus meningkatkan HLS diantaranya Penelusuran AUSTS (Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah). AUSTS meliputi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SD/MI, usia 12-15 tahun yang sedang tidak menempuh pendidikan di SMP/MTs, dan usia 15-18 yang sedang tidak bersekolah di SMA/SMK/MA dan menyalurkannya kembali ke sekolah formal atau melalui pendidikan kesetaraan serta membebaskan biaya pendidikannya. Optimalisasi peran masyarakat dan sekolah dalam mewaspadai anak-anak putus sekolah serta mengawal lulusan sekolah agar tetap melanjutkan ke jenjang berikutnya juga terus ditingkatkan di samping upaya peningkatan pembiayaan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan manajemen dan tata kelola pelayanan.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana tersaji pada gambar berikut.

Gambar 2. 29 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

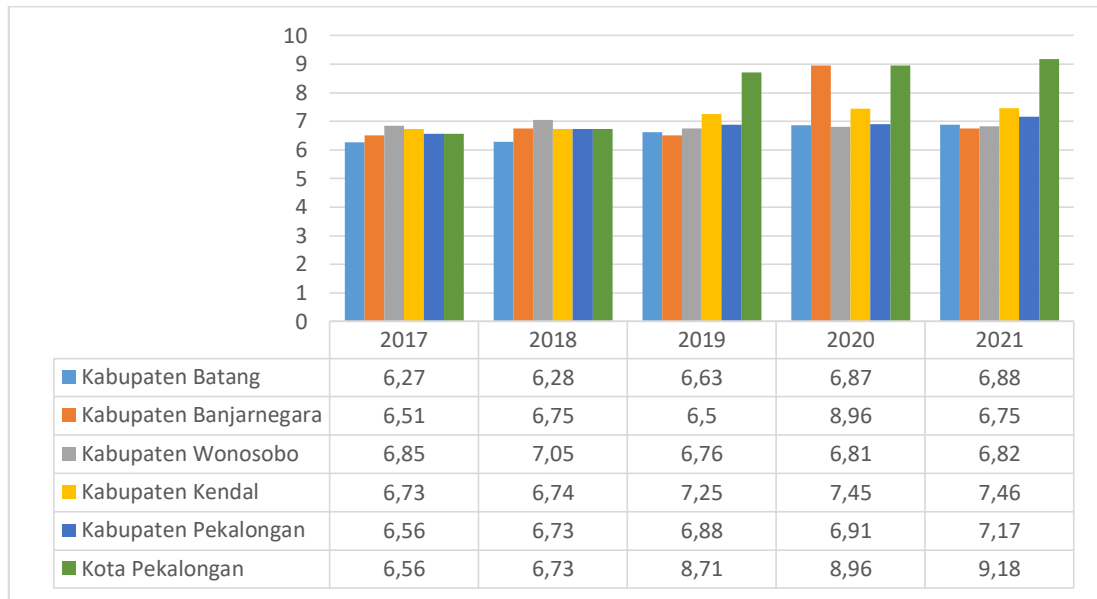


Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang tahun 2021 sebesar 6,88 tahun jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,75 tahun dan kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 6,82 tahun, namun lebih rendah dari Kabupaten Kendal sebesar 7,46 tahun, Kabupaten Pekalongan sebesar 7,17 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 9,18 tahun.

Gambar 2. 30 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Batang

dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

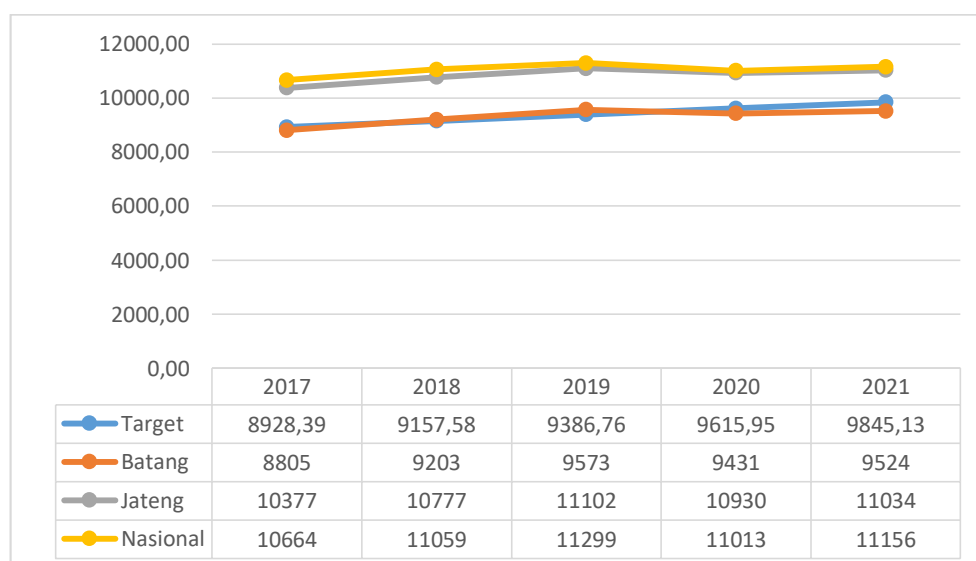


Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

d. Pengeluaran per Kapita

Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2017 sebesar Rp 8.805 ribu per orang per tahun naik menjadi menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun pada tahun 2021. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun karena adanya pandemi Covid-19 namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang memberi hasil yang positif terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun capaian pengeluaran per kapita naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini juga lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 11.034 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar 11.156 ribu per orang per tahun. Selengkapnya pada grafik berikut :

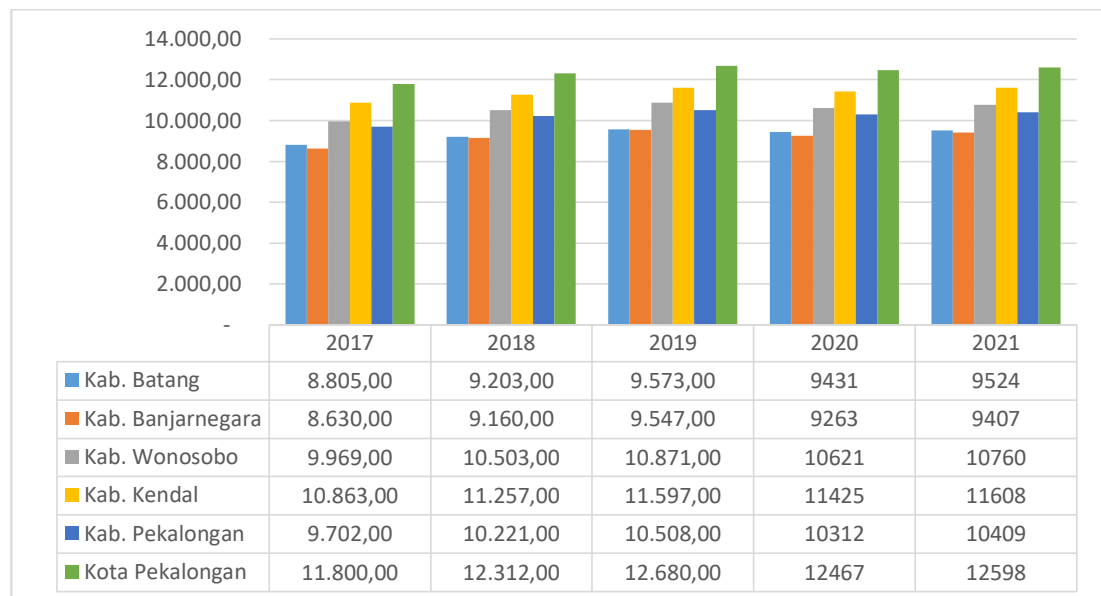
Gambar 2. 31 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

Pengeluaran per kapita Kabupaten Batang tahun 2021 jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar masih lebih tinggi dari Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp 9.407 ribu/orang/tahun namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo sebesar Rp 10.760 ribu/orang/tahun, Kabupaten Kendal sebesar Rp 11.608 ribu/orang/tahun, Kabupaten Pekalongan sebesar Rp 10.409 ribu/orang/tahun dan Kota Pekalongan sebesar Rp 12.598 ribu/orang/tahun.

Gambar 2. 32 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021 (Ribuan Rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

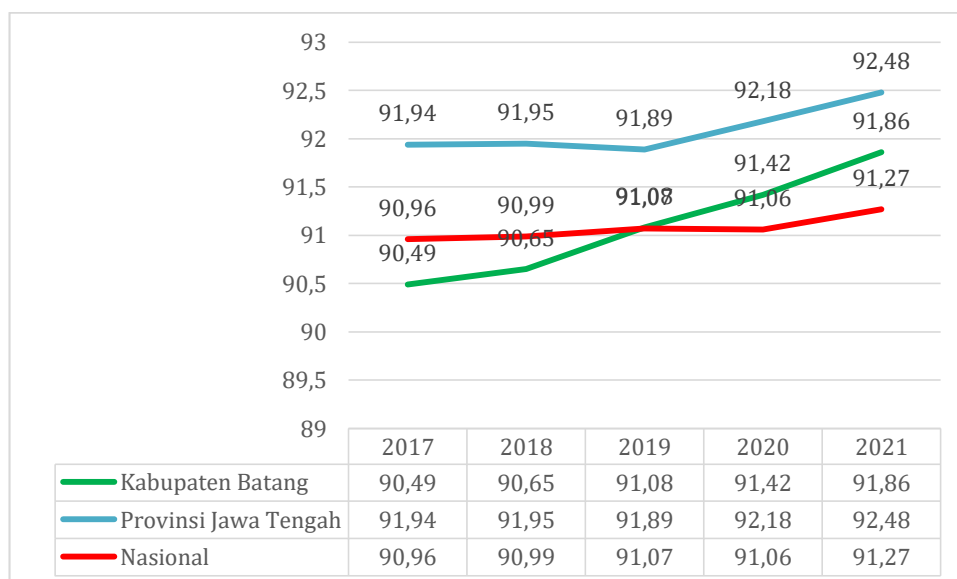
6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender (pemilahan jenis kelamin setiap komponennya). IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding laki-laki berada pada angka 100. Jika angka IPG makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Tahun 2017 sebesar 90,49, mengalami kenaikan menjadi 90,65 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 naik menjadi 91,08 dan kembali naik di tahun berikutnya hingga sebesar 91,42 pada tahun 2020 dan menjadi 91,86 di tahun 2021. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 92,48 namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional 91,27.

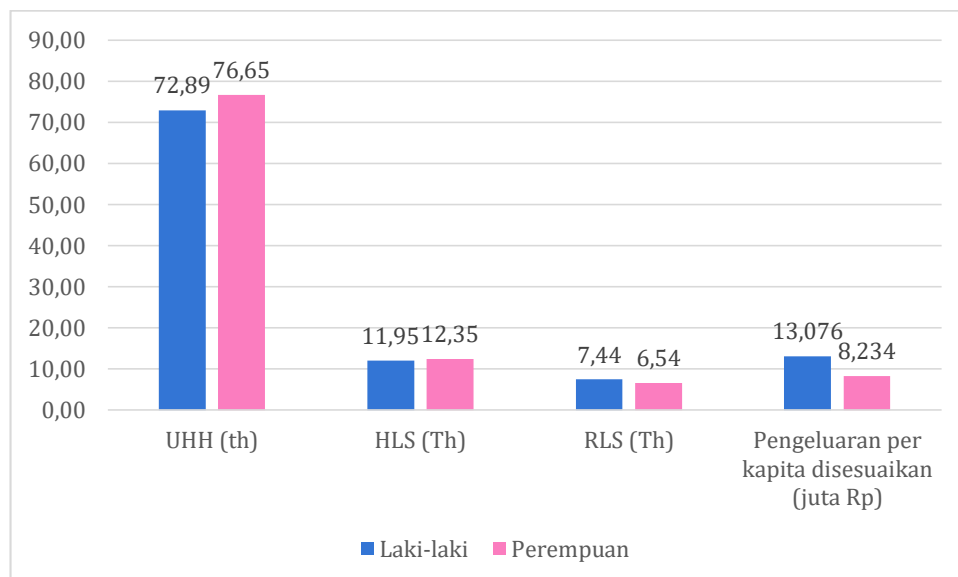
Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2022

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2021, diketahui bahwa Usia Harapan Hidup perempuan yaitu 76,65 lebih baik daripada laki-laki sebesar 72,89. Demikian juga dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan di Kabupaten Batang sebesar 12,35 tahun lebih baik dibandingkan angka HLS laki-laki sebesar 11,95 tahun. Namun demikian, jika dilihat dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan, angka RLS dan pengeluaran per kapita disesuaikan perempuan sebesar 6,54 tahun masih lebih rendah daripada laki-laki yaitu sebesar 7,44 tahun. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SD kelas VI. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 8,234 juta per kapita per tahun jauh dibawah laki-laki sebesar 13,076 per kapita per tahun menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan.

Gambar 2. 34 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Batang beserta komponen pembentuknya tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

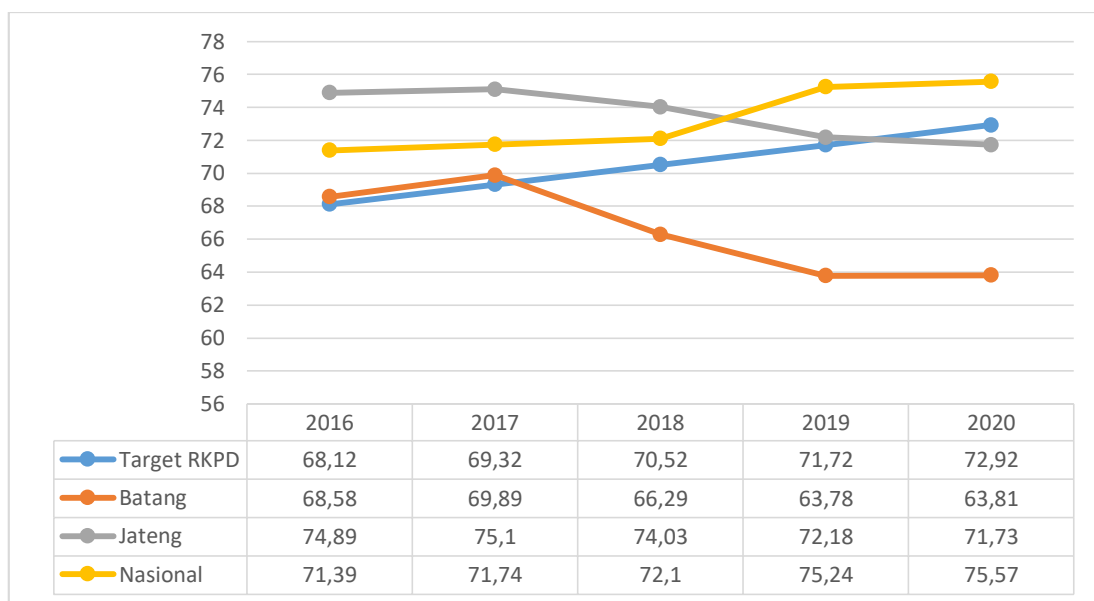
7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Capaian IDG Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir juga fluktuatif. Tahun 2016 sebesar 68,58 meningkat pada tahun 2017

menjadi sebesar 69,89. Namun tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 63,78 pada tahun 2019 yang disebabkan menurunnya pera perempuan dalam parlemen. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 63,81 namun demikian, capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah 71,73 dan Nasional 75,57. Selengkapnya pada gambar berikut:

Gambar 2. 35

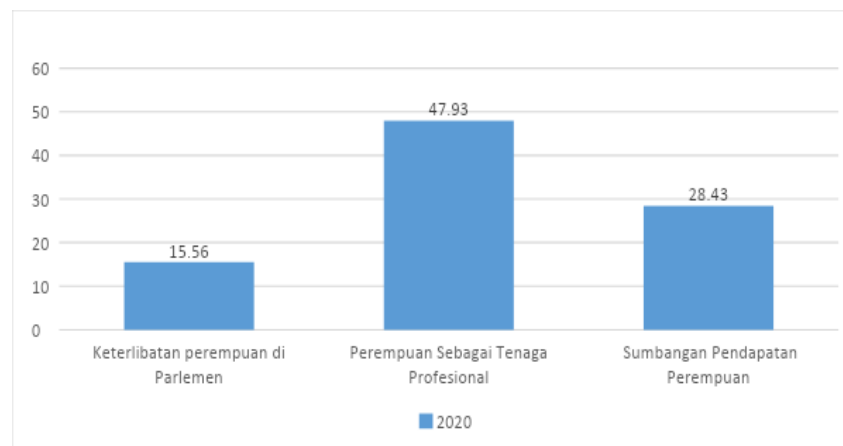
**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang
dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**



Sumber: BPS Kabupaten Batang, 2021

Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang tahun 2020 antara lain keterlibatan perempuan dalam parlemen sebesar 15,56 persen, perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 47,93 persen dan sumbangan pendapatan perempuan sebesar 28,43 persen.

Gambar 2. 36 Komponen Pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Batang Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

8. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun, dari 127,27 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 159,80. Peningkatan ini, antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK) karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu di waktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Namun persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi.

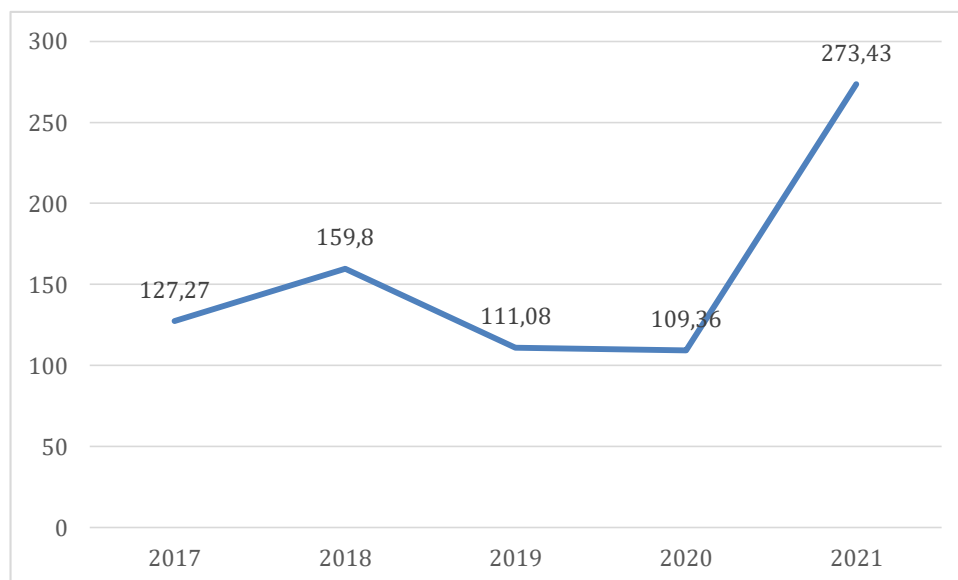
Pada tahun 2019 AKI mengalami penurunan menjadi sebesar 111,08 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 109,36 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan

kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5 ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan AKI yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Dari angka 273,43 per 100.000 KH (atau setara dengan 33 kasus), 157,42 KH (atau setara dengan 19 kasus kematian ibu) disebabkan oleh Covid-19, sedangkan 14 kasus lainnya (atau setara dengan 116,01 per 100.000 KH) disebabkan oleh penyakit penyerta tidak menular seperti jantung, hipertensi dan TB.

Gambar 2. 37

Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang (per 100.000 KH)



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

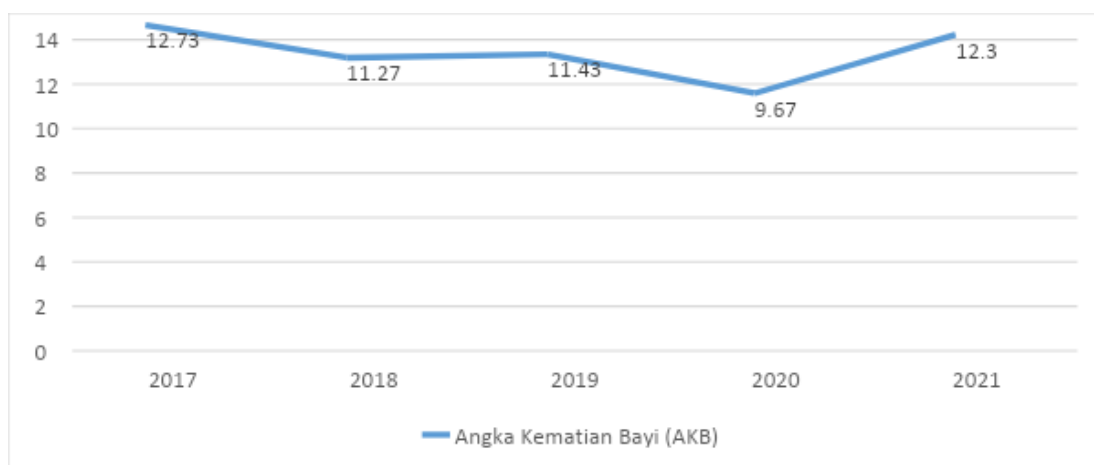
9. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam periode tahun 2017-2021

cenderung berfluktuasi menurun, dari 12,73 per 1000 KH pada tahun 2017 menjadi 11,27 per 1000 KH pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 angka AKB naik menjadi sebesar 11,43 per 1000 KH. Meningkatnya AKB ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya angka komplikasi neonatal dan meningkatnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan PMT pada ibu hamil KEK, pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan neonatus dan bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun sehingga pada tahun 2020 angka AKB dapat diturunkan menjadi sebesar 9,67 per 1000 KH.

Pada Tahun 2021 angka kematian bayi mengalami peningkatan menjadi 12,3 per 1000 KH. Peningkatan ini terjadi karena adanya penurunan jumlah kelahiran yang menjadi dasar perhitungan AKB dari 12.802 menjadi 12.069. Adapun jumlah kasus kematian bayi bertambah 1 kasus pada Tahun 2021 bila dibandingkan kasus kematian bayi pada Tahun 2020.

Gambar 2. 38
Angka Kematian Bayi per 1000 KH Kabupaten Batang



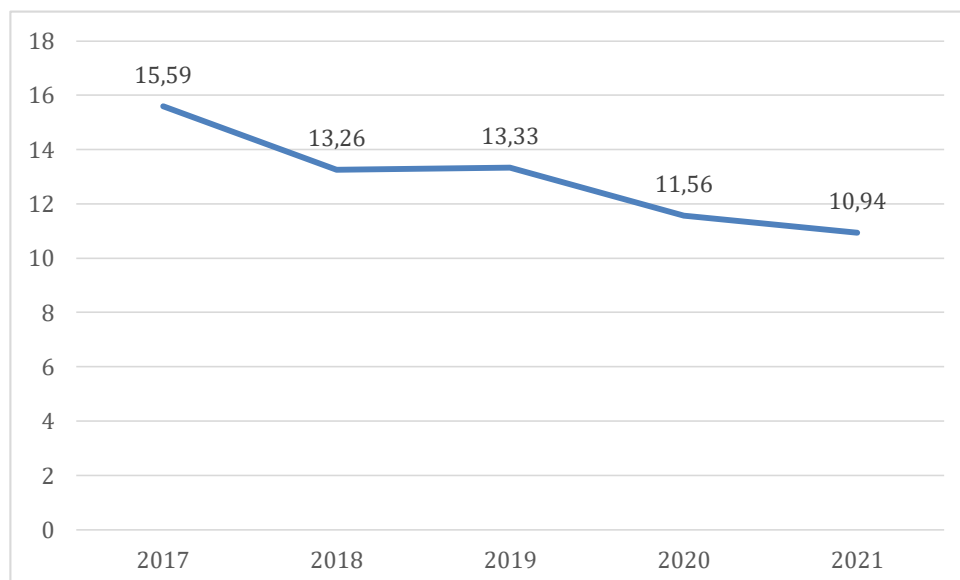
Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

10. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Batang berfluktuasi menurun dari tahun 2017-2021 yaitu dari 15,59 per 1000 KH pada tahun 2017 menurun menjadi 10,94 per 1000 KH pada tahun 2021. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penurunan AKBA diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali setahun, memberikan imunisasi lanjutan dan memberikan vitamin A.

Gambar 2. 39

Angka Kematian Balita per 1000 KH Kabupaten Batang



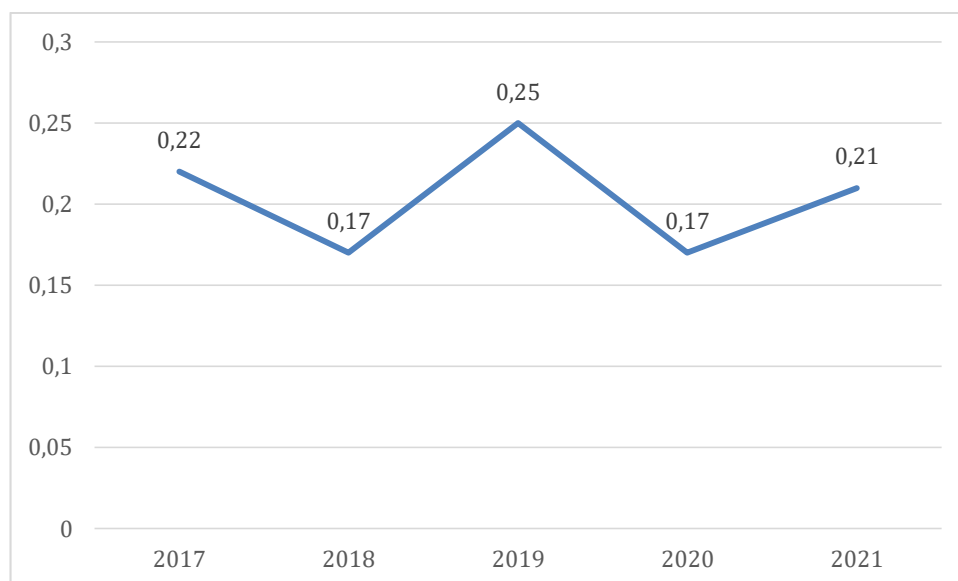
Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2021

11. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2017-2021, dari 0,22% pada tahun 2017 turun menjadi 0,17% pada tahun 2018. Pada Tahun 2019, Prevalensi gizi buruk kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,25%, kemudian turun lagi pada Tahun 2020 menjadi 0,17% dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,21%. Meningkatnya prevalensi gizi buruk diantaranya disebabkan karena meningkatnya Angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan menurunnya bayi yang

ditimbang yang menyebabkan kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara cepat/dini, sehingga pemulihannya menjadi lebih lama. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan balita diantaranya dengan memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan, memberikan perawatan pada balita gizi buruk serta meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbang balitanya ke posyandu, untuk mengetahui tumbuh kembang balita. Peningkatan balita gizi buruk ini mengindikasikan bahwa kedepan diperlukan upaya yang lebih keras untuk menurunkan angka prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Batang.

Gambar 2. 40
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Kabupaten Batang



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

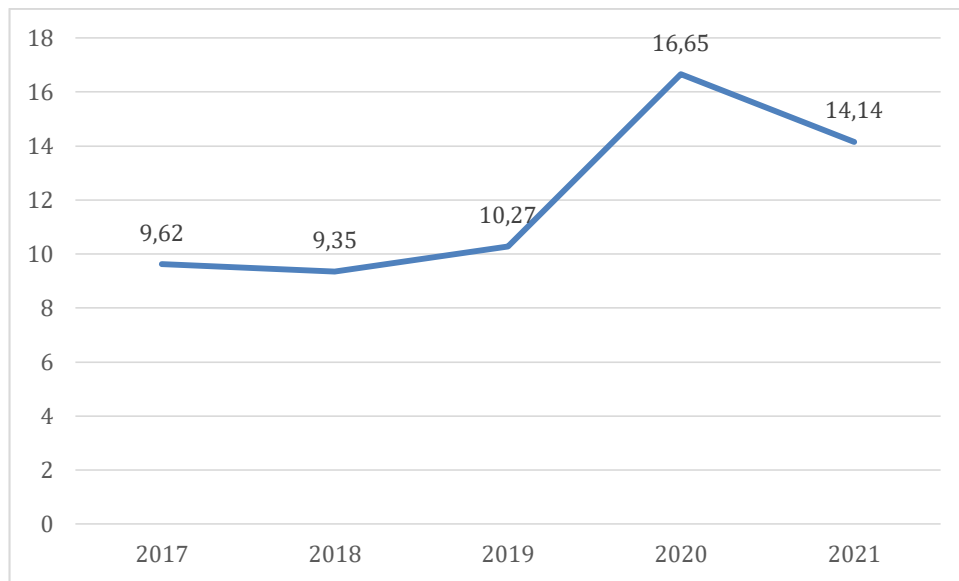
Sedangkan terkait kondisi *stunting* di Kabupaten Batang pada Tahun 2017-2019 cenderung stabil dari 9,62% pada Tahun 2017 menjadi 10,27% pada tahun 2019. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan persentase *stunting* menjadi sebesar 16,65%. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan metode analisis *stunting* dan ketersediaan sarana prasarana pengukuran. Pada Tahun 2017-2019 analisis perhitungan persentase *stunting* masih menggunakan cara analisis manual,

sedangkan pada Tahun 2020 perhitungan persentase *stunting* mulai menggunakan aplikasi e-PPGBM (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang lebih akurat dan detail. Faktor lain yang menyebabkan peningkatan persentase *stunting* adalah ketersediaan sarana prasarana yang berupa penyediaan alat pengukuran yang lebih baik dan akurat.

Peningkatan persentase *stunting* ini mengindikasikan bahwa angka *stunting* di Kabupaten Batang masih cukup tinggi sehingga perlu dilakukan intervensi program dan kegiatan untuk menurunkan persentase *stunting*. Program dan kegiatan tersebut diantaranya adalah peningkatan pengetahuan ibu hamil, calon ibu hamil dan remaja putri tentang gizi, perilaku hidup sehat dan kesehatan reproduksi, pemberian ASI eksklusif dan MP ASI, optimalisasi pemenuhan sarana prasarana air bersih dan sanitasi serta penguatan posyandu. Intervensi lain yang dilakukan untuk penurunan *stunting* ini adalah pelaksanaan orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) bagi tenaga kesehatan, pembentukan konselor ASI, Kelas Ibu Hamil, Kelas Ibu Balita, Penguatan surveilans gizi dan e-PPGBM, pengadaan antropometri kit, pemeriksaan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (Bumil KEK) dn balita kurus serta pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri.

Intervensi program dan kegiatan dalam rangka penurunan persentase *stunting* ini berhasil menurunkan angka persentase *stunting* dari 16,65% pada Tahun 2020 menjadi 14,14% pada Tahun 2021 atau berkurang sebesar 2,51%.

Gambar 2. 41 Persentase Kasus *Stunting* Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

12. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup bersih dan sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah melalui program *Open Defecation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang adalah melakukan penyuluhan pola hidup sehat kepada masyarakat, sosialisasi Perda KTR, pengaktifan Germas dan penguatan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pengadaan jamban sehat dan pemberian stimulan jamban keluarga. Tahun 2020, jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Batang yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 68 desa/kelurahan meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 65 desa/kelurahan. Sedangkan di tahun 2021 jumlah desa terverifikasi ODF meningkat menjadi 76 desa/kelurahan. Sebaran desa yang terverifikasi ODF di Kabupaten Batang tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 20

Persebaran Desa ODF Kabupaten Batang Tahun 2021

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Binangun	Bandar
2	Pesalakan	Bandar
3	Wonodadi	Bandar
4	Wonomerto	Bandar
5	Kalangsono	Banyuputih
6	Penundan	Banyuputih
7	Timbang	Banyuputih
8	Cepokokuning	Batang
9	Pangempon	Bawang
10	Pasusukan	Bawang
11	Pranten	Bawang
12	Sangubanyu	Bawang

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
13	Cokro	Blado
14	Kalipancur	Blado
15	Kalisari	Blado
16	Kalitengah	Blado
17	Surodadi	Gringsing
18	karanggeneng	Kandeman
19	Lobang	Limpung
20	Gombong	Pecalungan
21	Keninten	Pecalungan
22	Siguci	Pecalungan
23	Kalisari	Reban
24	Pacet	Reban
25	Durenombo	Subah
26	Kalimanggis	Subah
27	Harjowinangun Barat	Tersono
28	Harjowinangun Timur	Tersono
29	Kebumen	Tersono
30	Sendang	Tersono
31	Sumurbanger	Tersono
32	Tegalombo	Tersono
33	Cluwuk	Tulis
34	Kenconorejo	Tulis
35	manggis	Tulis
36	Kalipucang kulon	Batang
37	Kalisalak	Batang
38	Karanganyar	Batang
39	Kecepak	Batang
40	Pasekaran	Batang
41	Gondang	Blado
42	Sentul	Gringsing
43	Bakalan	Kandeman

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
44	Sempu	Limpung
45	Tulis	Tulis
46	Ponowareng	Tulis
47	Posong	Tulis
48	Sembojo	Tulis
49	Simbangjati	Tulis
50	Banjiran	Warungasem
51	Candiareng	Warungasem
52	Cepagan	Warungasem
53	Gapura	Warungasem
54	Lebo	Warungasem
55	Masin	Warungasem
56	Menguneng	Warungasem
57	Pejambon	Warungasem
58	Pesaren	Warungasem
59	Sariglagah	Warungasem
60	Sijono	Warungasem
61	Terban	Warungasem
62	Warungasem	Warungasem
63	Dringo	Wonotunggal
64	Gringgingsari	Wonotunggal
65	Kemligi	Wonotunggal
66	Silurah	Wonotunggal
67	Sodong	Wonotunggal
68	Kaliwareng	Warungasem
69	Clapar	Subah
70	Siguci	Pecalungan
71	Keniten	Pecalungan
72	Gombong	Pecalungan
73	Kemiri Timur	Subah
74	Margosono	Tersono

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
75	Sidalang	Tersono
76	Kedungsegog	Tulis

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

13. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Pemenuhan sarana prasarana kesehatan berdasarkan indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 21 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit per satuan penduduk Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per penduduk	1:9.412	1:9.372	1:9.372	1:9.564	1:9.539
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per penduduk	1:254.126	1:256.194	1:256.194	1:258.230	1:270.282

Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

14. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Penanganan PMKS yang tertangani bersifat fluktuatif dalam periode 2017-2021. Pada Tahun 2017 PMKS yang tertangani sebesar 90,21%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 19,8% terus mengalami kenaikan menjadi 23,8% di Tahun 2020 dan pada tahun 2021 ada kenaikan yang signifikan menjadi 99,16%. Penurunan persentase PMKS yang tertangani ini terjadi karena adanya penambahan. Namun demikian, pelayanan dasar bagi PMKS yang juga merupakan salah satu indikator SPM urusan Sosial ini capaiannya

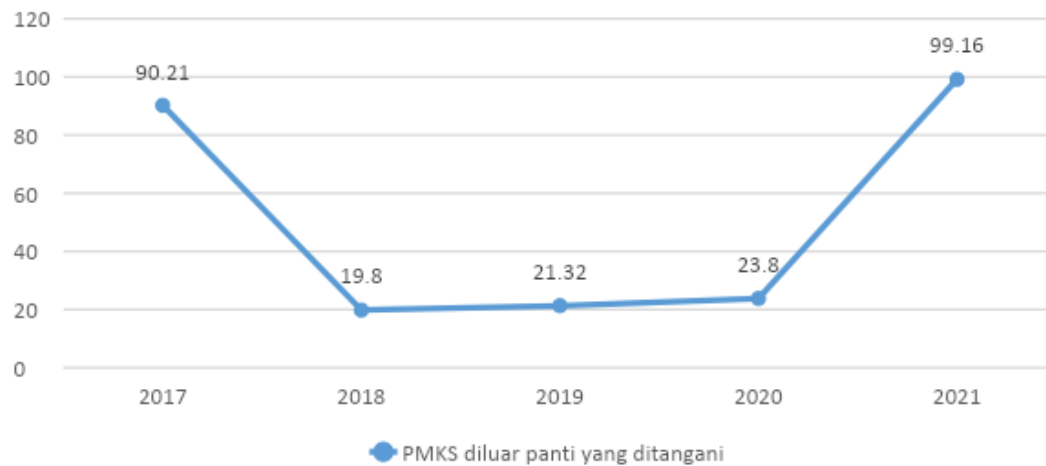
masih relatif kecil, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait penyediaan rumah singgah, karena Kabupaten Batang belum memiliki rumah singgah sehingga pelayanan dasar bagi PMKS belum paripurna.

Rendahnya capaian penanganan PMKS pada Tahun 2018 - 2020 terjadi karena proses pendataan DTKS mulai dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sehingga terjadi penambahan jumlah PMKS di Kabupaten Batang. Pada Tahun 2020 proses pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS mulai dilaksanakan tetapi belum mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial sehingga data PMKS dalam DTKS belum mengalami pengurangan secara signifikan. Selain itu, pada Tahun 2020, untuk mengatasi dampak Pandemi, pemerintah memberikan banyak bantuan untuk warga miskin baik melalui Anggaran APDB, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun Dana Desa.

Pada Tahun 2021, proses verifikasi dan validasi sudah berjalan sehingga jumlah warga miskin yang masuk ke dalam DTKS berkurang dari 426.263 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 160.595 jiwa pada Tahun 2021. Pengurangan ini terjadi karena pada saat proses verifikasi dan validasi ditemukan data warga yang tidak valid, misalnya sudah meninggal dunia atau sudah tidak miskin. Pengurangan jumlah warga miskin ini ditambah dengan meningkatnya jumlah bantuan membuat persentase penanganan PMKS melonjak tinggi menjadi 99,16%.

Gambar 2. 42

PMKS Diluar Panti yang Ditangani Kabupaten Batang



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

Salah satu upaya penanganan PMKS adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Salah satu media/alat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun demikian, besaran bantuan sosial untuk PMKS dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dari 89,72% persen di tahun 2017 menjadi 18,84% di tahun 2018, kemudian ada stagnasi hingga tahun 2020 dengan peningkatan kecil menjadi 23%, meskipun pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 98,96%. Penurunan ini disebabkan karena asistensi untuk lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan tidak diberikan, namun disisi lain diberikan alokasi bantuan untuk korban bencana dan operasional rawat inap bagi anggota keluarga PMKS yang dirawat di rumah sakit.

Gambar 2. 43

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Batang

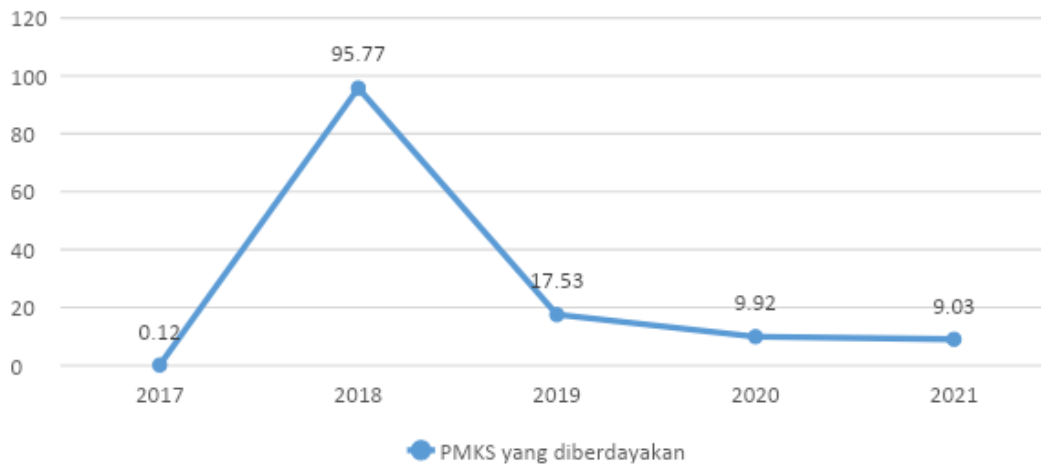


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

Penanganan PMKS juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial bagi PMKS dengan membentuk kelompok usaha bersama keluarga miskin, RTLH dan santunan kematian bagi warga miskin.

Kinerja pemberdayaan sosial dapat dilihat dari capaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan dalam periode lima tahun terakhir (2017-2021). Persentase PMKS yang diberdayakan fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 0,12 per 1000 meningkat menjadi sebesar 95,77 per 1000 pada tahun 2018, namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi 17,53 per 1000 dan hingga tahun 2021 terus turun menjadi 9,03 per 1000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras terkait peningkatan pemberdayaan PMKS di Kabupaten Batang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan asistensi sosial bagi PMKS antara lain berupa asistensi kepada para penyandang disabilitas, asistensi lanjut usia serta santunan kematian kepada untuk ahli waris warga miskin yang meninggal dunia.

Gambar 2. 44
PMKS yang Diberdayakan di Kabupaten Batang (per 1000)



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

15. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

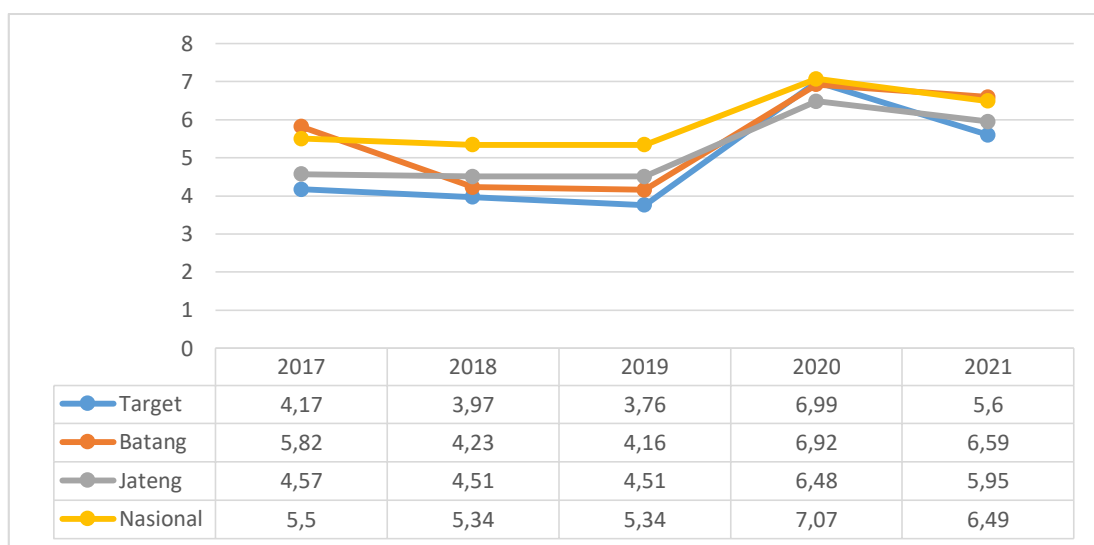
Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Batang selama periode 2017-2021 fluktuatif, yaitu sebesar 5,82 persen pada tahun 2017 terus menurun menjadi sebesar 4,16 persen pada tahun 2019. Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya angka TPT menjadi sebesar 6,92 persen pada tahun 2020. Dampak Pandemi Covid-19 dirasakan cukup signifikan utamanya pada masyarakat yang saat ini termasuk dalam kelompok 40 persen berpenghasilan rendah, dan masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap setiap bulan, yang terbanyak adalah mereka yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha UKM, pedagang pasar, pedagang kaki lima, ojek online, dan lain-lainnya. Kondisi inilah kemudian yang berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di Kabupaten Batang pada tahun 2020.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam penanganan dampak Covid-19 diantaranya melalui penciptaan dan perluasan lapangan kerja utamanya bagi masyarakat terdampak Covid-19 dengan program padat karya di sektor infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan kerja dan serta mendorong kemandirian berwirausaha melalui bantuan alat. Upaya

tersebut berdampak pada menurunnya angka TPT pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,59%. Namun demikian, meskipun angka TPT menurun, angka TPT ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,95 persen dan angka TPT Nasional sebesar 6,49 persen.

Gambar 2. 45

Perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Batang dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

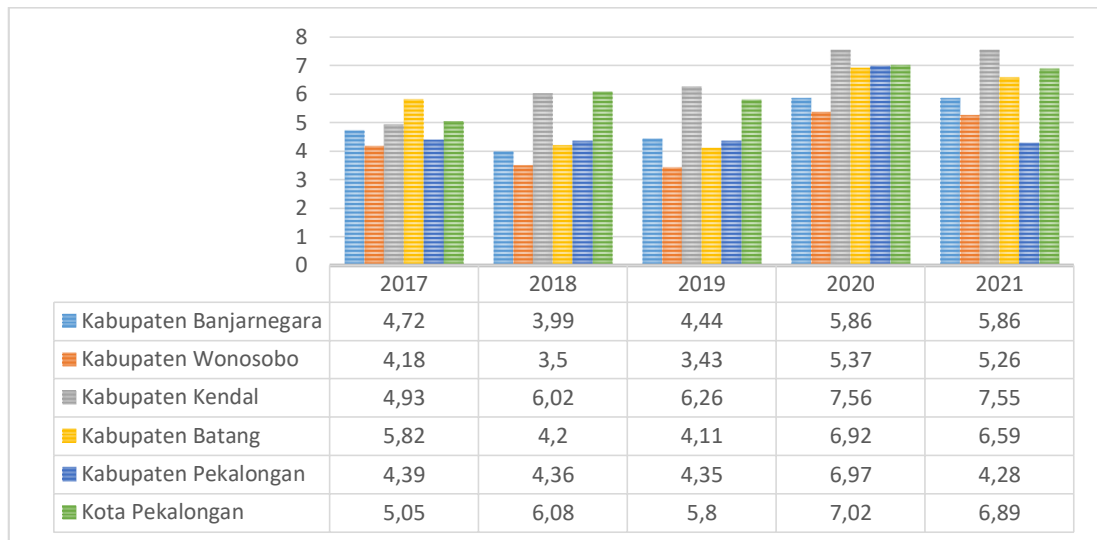


Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

TPT Kabupaten Batang sebesar 6,59 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Kota Pekalongan sebesar 6,89 persen dan Kabupaten Kendal sebesar 7,55 persen, namun demikian masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Wonosobo sebesar 5,26 persen, Kabupaten Banjarnegara sebesar 5,86 persen dan Kabupaten Pekalongan sebesar 4,28 persen.

Gambar 2. 46

Perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) Kabupaten Batang dibandingkan Kabupaten/Kota sekitar Tahun 2017- 2021

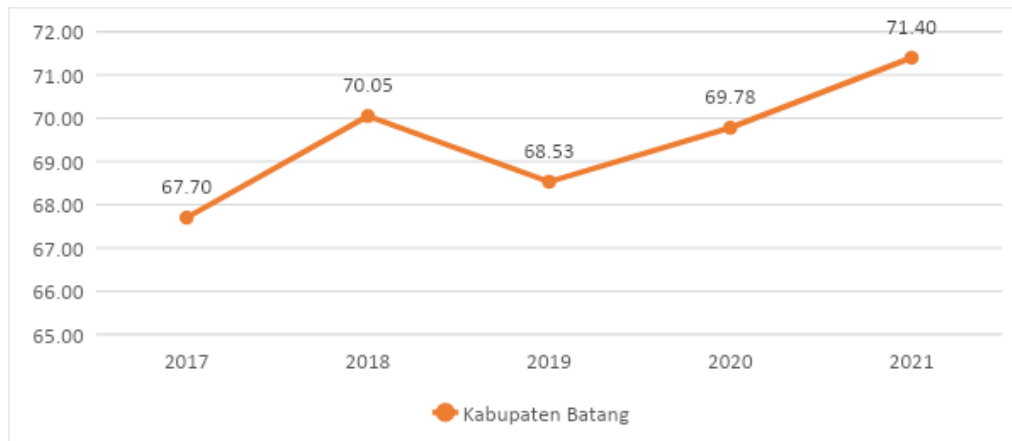


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, sebesar 67,70 persen pada tahun 2017, meningkat menjadi 70,05 pada tahun 2018 dan terus mengalami peningkatan menjadi 71,40 persen pada tahun 2021. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 68,53 persen yang disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk usia kerja sementara jumlah angkatan kerja cenderung tetap. Namun seiring bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja tingkat partisipasi angkatan kerja dapat kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021.

Gambar 2. 47

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

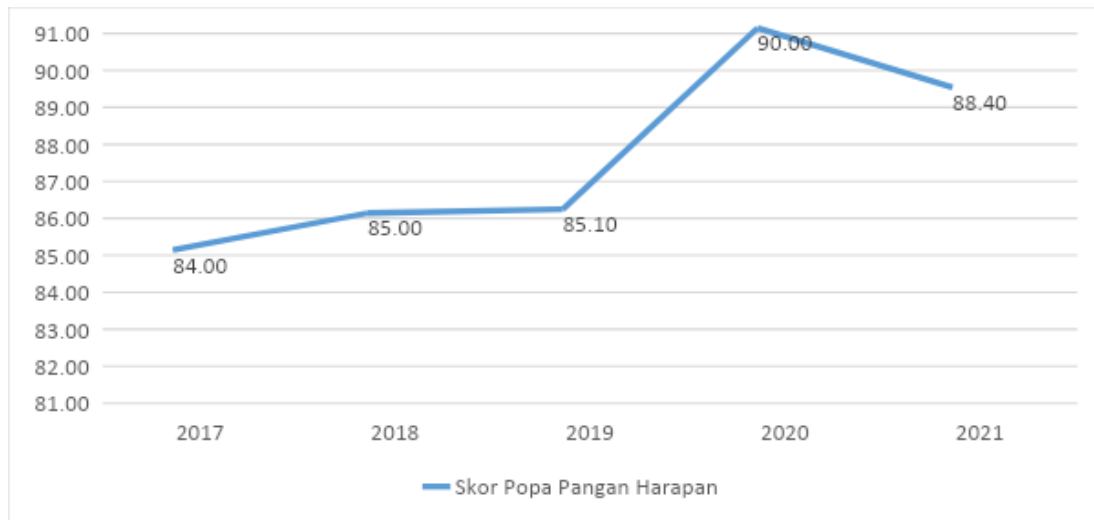
16. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Keragaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 sebesar 84 menjadi sebesar 90 pada tahun 2020, meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 84 pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan karena kualitas konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan melalui skor PPH masih belum kondisi ideal. Kondisi pola pangan daerah yang semakin meningkat di tahun 2020 mengindikasikan keberagaman pola konsumsi masyarakat mulai terlihat. Namun pada tahun 2021, skor PPH kembali mengalami penurunan menjadi 88,40. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi sehingga berdampak pada pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga berimplikasi pada pola konsumsi masyarakat.

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang periode 2017-2021 selengkapnya tersaji dalam grafik berikut:

Gambar 2. 48

Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



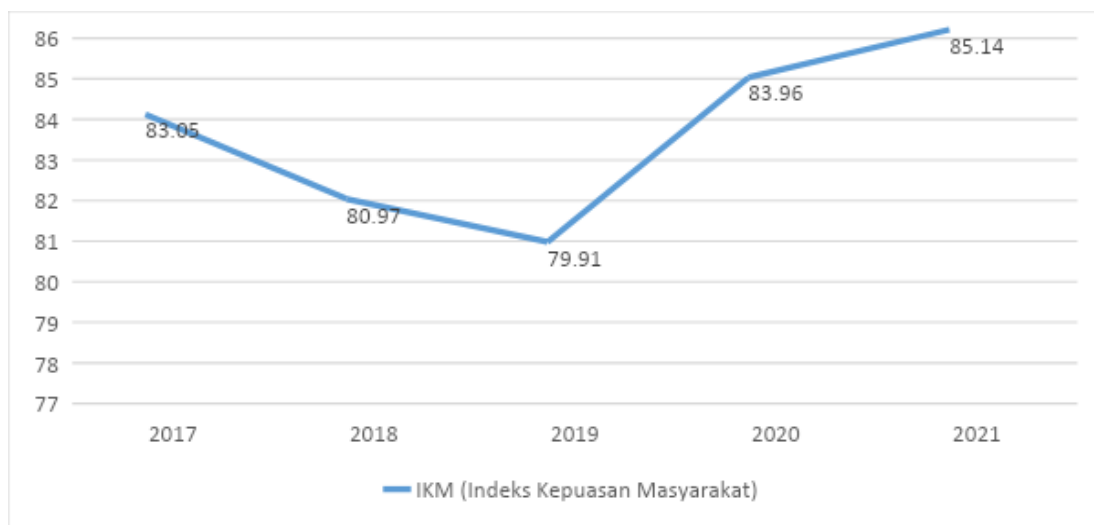
Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2022

17. Pelayanan Publik

Salah satu fungsi pemerintah dalam kehidupan bernegara adalah memberikan berbagai pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam rangka mengetahui sejauh mana kinerja pelayanan publik terhadap masyarakat dilakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP), baik yang pelaksanaannya difasilitasi maupun dilakukan secara mandiri oleh masing masing UPP (dilaksanakan sendiri maupun kerjasama pihak ketiga). Pengukuran IKM di Kabupaten Batang berfluktuasi meningkat dalam periode 2017-2021, namun mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 80,97 yang disebabkan karena skala pada skor penilaian berbeda sesuai dengan permenpan yang terbaru. Tahun 2019 turun menjadi 79,91 namun pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi sebesar 83,96. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 85,14. Hal ini mengindikasikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk kualitas pelayanan publik cukup berhasil. Upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan diantaranya melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) pada UPP. Dalam periode lima tahun terakhir penerapan SOP dan SPP pada UPP di Kabupaten Batang sudah

mencapai angka 100%. Meningkatnya pelayanan publik di Kabupaten Batang juga didukung oleh adanya layanan elektronik atau *e-service* melalui website, dengan persentase Perangkat Daerah telah memiliki website aktif mencapai angka 100%.

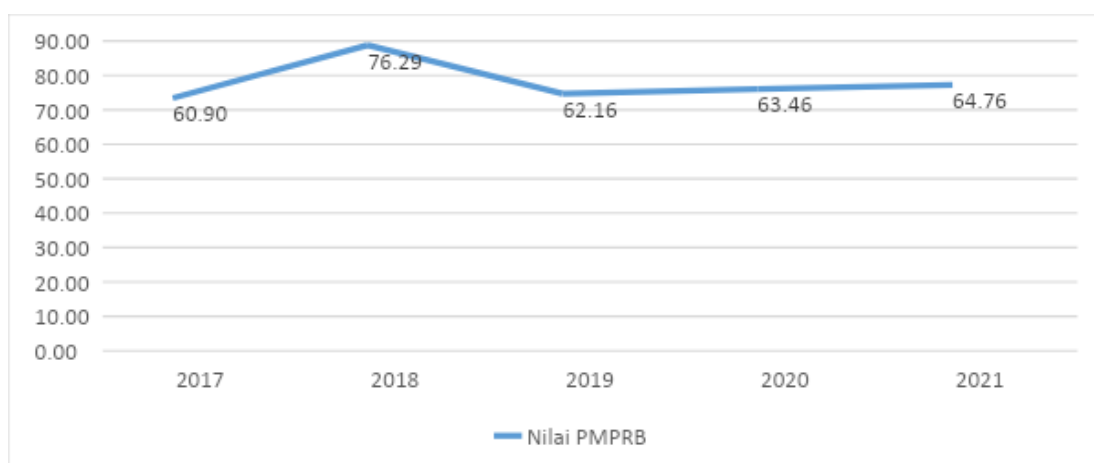
Gambar 2. 49
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Batang



Sumber: Setda Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi meningkat dari 60,90 di tahun 2017 menjadi 64,761 di tahun 2021.

Gambar 2. 50
Nilai Pemeringkatan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB)



Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang Tahun 2022

a. Transparansi

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Selain kualitas dan profesionalisme aparatur serta akuntabilitas kinerja pembangunan, keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi juga menjadi faktor penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima.

Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/107/2011 tanggal 7 Maret 2011 dan telah diperbaharui beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/187/2017 tanggal 6 Februari 2017.

Pemerintah Kabupaten Batang juga membentuk PPID Pembantu untuk mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di tingkat Perangkat Daerah dan kemudian dilaporkan ke PPID. Sejak PPID dibentuk mulai dari tahun 2017, jumlah PPID Pembantu yang melapor ke PPID mengalami peningkatan, dari sebanyak 44 PD (84,61%) di tahun 2017 menjadi sebesar 48 PD (100%) di tahun 2020.

Tabel 2. 22
Jumlah PPID Pembantu (PD) yang Melapor ke PPID

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah PPID Pembantu yang melapor ke PPID	PD	44	47	48	48	48
2	Tingkat PD yang melapor ke PPID	%	84,61	98,07	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2022

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, sebagai bentuk peningkatan transparansi Kabupaten Batang juga telah menerapkan sistem informasi berbasis web melalui aplikasi sistem pengendalian pembangunan (simpelbang) yang dapat diakses oleh masyarakat.

b. Akuntabilitas Kinerja

Salah satu syarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya adalah adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Menpan RB, nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yaitu dari 56,60 (CC) pada tahun 2016 terus meningkat menjadi 66,14 pada tahun 2020.

Tabel 2. 23

Nilai SAKIP Kabupaten Batang Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2016-2020				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai SAKIP	skor	56,60 (CC)	58,19 (CC)	62,64 (B)	65,02 (B)	66,14 (B)

Sumber: Setda Kabupaten Batang Tahun 2021

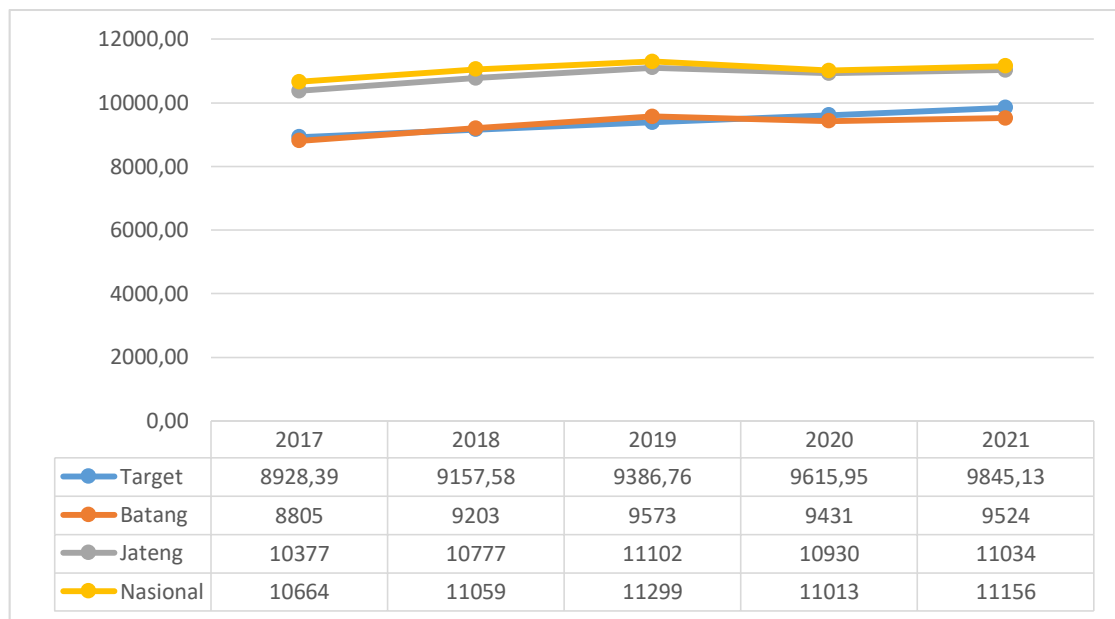
2.1.3 Aspek Daya Saing

1. Pengeluaran per Kapita

Pencapaian pengeluaran per kapita Kabupaten Batang kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, pada tahun 2017 sebesar Rp 8.805 ribu per orang per tahun naik menjadi menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun pada tahun 2021. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 9.431 ribu per orang per tahun karena adanya pandemi Covid-19 namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi Rp 9.524 ribu per orang per tahun meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang memberi hasil yang positif terhadap peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Meskipun capaian pengeluaran per kapita naik jika dibandingkan tahun sebelumnya, namun capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 11.034 ribu per orang per tahun dan Nasional sebesar 11.156 ribu per orang per tahun. Selengkapnya pada gambar berikut :

Gambar 2. 51 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Batang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

(Ribu Rupiah/orang/tahun)



Sumber : BPS Kabupaten Batang, 2022

2. Infrastruktur

a. Infrastruktur

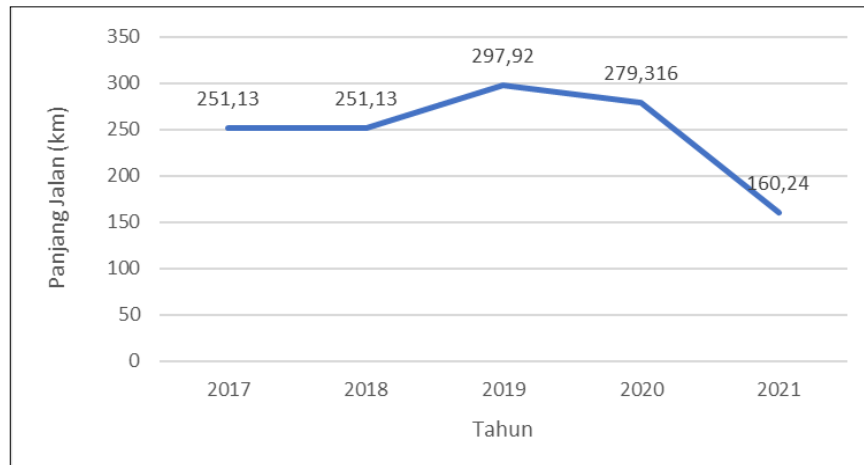
Salah satu infrastruktur pembangunan yang sangat umum adalah penyediaan prasarana transportasi berupa Jalan, agar pelaksanaan barang dan jasa berjalan dengan lancar. Sistem jaringan jalan di Kabupaten Batang terdiri dari 589,731 km jalan kewenangan nasional, 37,31 km jalan kewenangan provinsi dan 552,42 km merupakan jalan kewenangan kabupaten. Panjang jalan dalam kondisi baik dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi naik turun, pada tahun 2017 sepanjang 251,13 km naik menjadi sepanjang 297,92 km pada tahun 2019, kemudian ada penurunan menjadi 160,202 Km pada tahun 2021. Namun pada jalan kondisi sedang mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2017 dengan panjang jalan 17,67 km menjadi 249,694 km jalan dengan kondisi sedang pada tahun 2021. Demikian juga dengan panjang jalan dalam kondisi rusak berat, juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari panjang jalan 256,88 km yang rusak berat pada tahun 2017, menjadi 58,595 km panjang jalan yang mengalami rusak berat pada tahun 2021.

Tabel 2. 24
Kondisi Infrastruktur Jalan Kewenangan Kabupaten
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

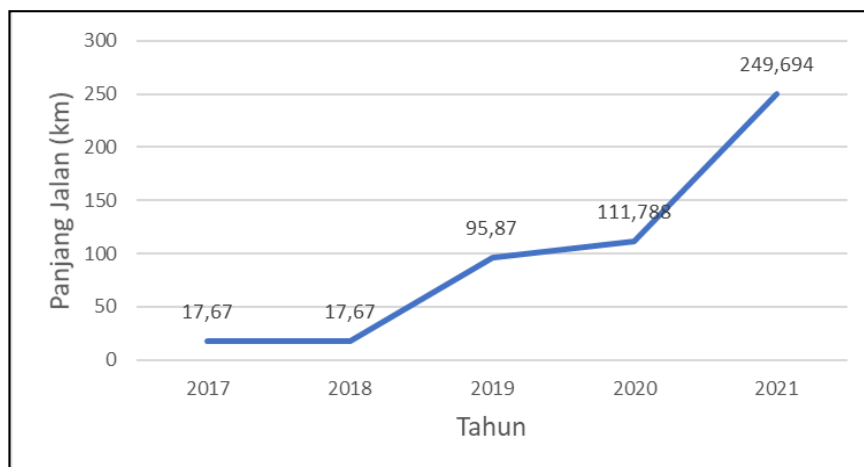
No	Kondisi jalan	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Km	251,13	251,13	297,92	279,316	160,240
2	Sedang	Km	17,67	17,67	95,87	111,788	249,694
3	Rusak Ringan	Km	26,74	26,74	90,37	64,967	83,792
4	Rusak Berat	Km	256,88	256,88	68,28	96,350	58,595

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2022

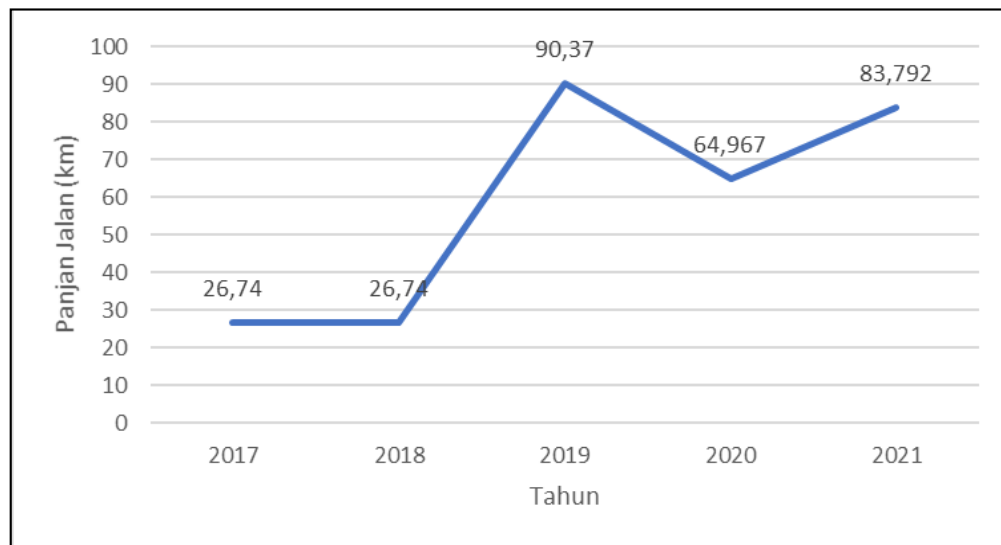
Gambar 2. 52
Panjang Jalan Kondisi Baik Kewenangan Kabupaten Batang
Tahun 2017-2022



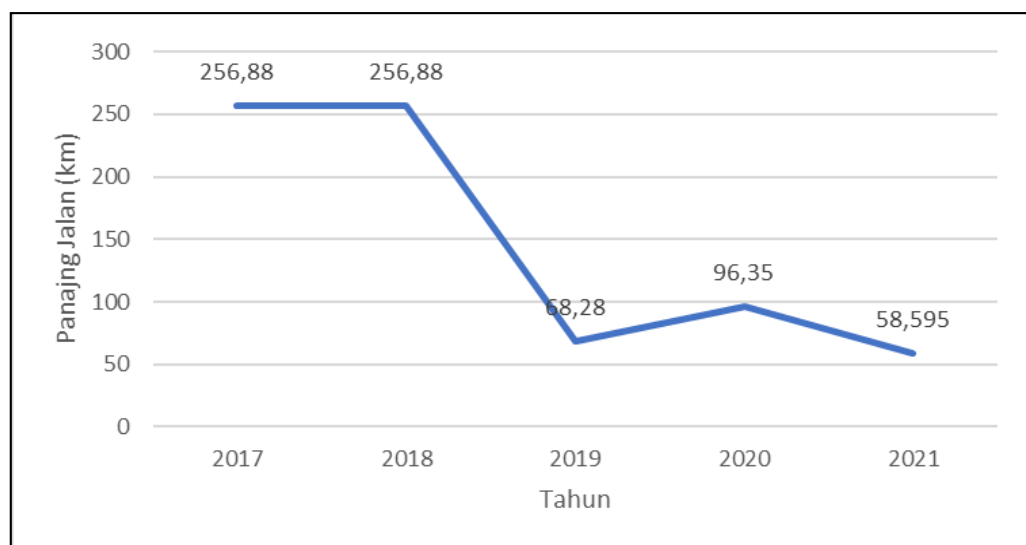
Gambar 2. 53 Panjang Jalan Kondisi Rusak Sedang
Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022



Gambar 2. 54 Panjang Jalan Kondisi Rusak Ringan Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022



Gambar 2. 55 Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Kewenangan Kabupaten Batang Tahun 2017-2022



b. Sumber Daya Air

1. Jaringan Irigasi

Pengelolaan jaringan irigasi bertujuan untuk memenuhi permintaan air irigasi bagi daerah layanan. Di Kabupaten Batang, luas areal jaringan irigasi yang merupakan kewenangan kabupaten seluas 20.329,896 Ha. Pemerintah Kabupaten Batang

terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, hal ini dapat dilihat dari luasan irigasi dalam kondisi baik yang luasannya terus meningkat dalam periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 9.351,75 ha meningkat menjadi 11.676,97 ha pada tahun 2021. Luasan irigasi dalam kondisi baik ini juga lebih besar dibandingkan dengan luasan irigasi dalam kondisi rusak yaitu sebesar 8.652,92 ha pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Batang oleh pemerintah Kabupaten Batang cukup berhasil.

Tabel 2. 25

Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2017-2021

NO	Kondisi Irigasi	Stn	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baik	Ha	9.351,75	10.008,41	10.595,94	11.561,61	11.676,97
2	Rusak	Ha	10.978,15	10.321,49	9.733,95	8.768,28	8.652,92
	Total luas	Ha	20.329,90	20.329,90	20.329,90	20.329,90	20.329,89

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2022

2. Akses Air Minum dan sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data cakupan layanan akses air minum yang terus meningkat dari tahun 2017-2021, dari 77,1% di tahun 2017 menjadi 84,12% di tahun 2021.

Gambar 2. 56

**Persentase Cakupan Layanan Akses Air Minum
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022**

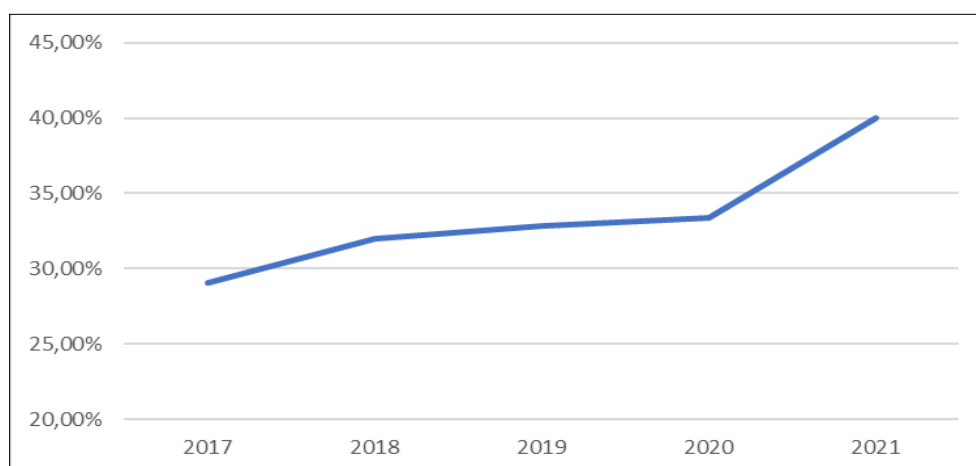


Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Persentase pelayanan air minum perpipaan di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Cakupan air minum perpipaan meningkat dari 29,06% di tahun 2017 menjadi 40% di tahun 2022. Grafik peningkatan persentase pelayanan air minum perpipaan dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 57

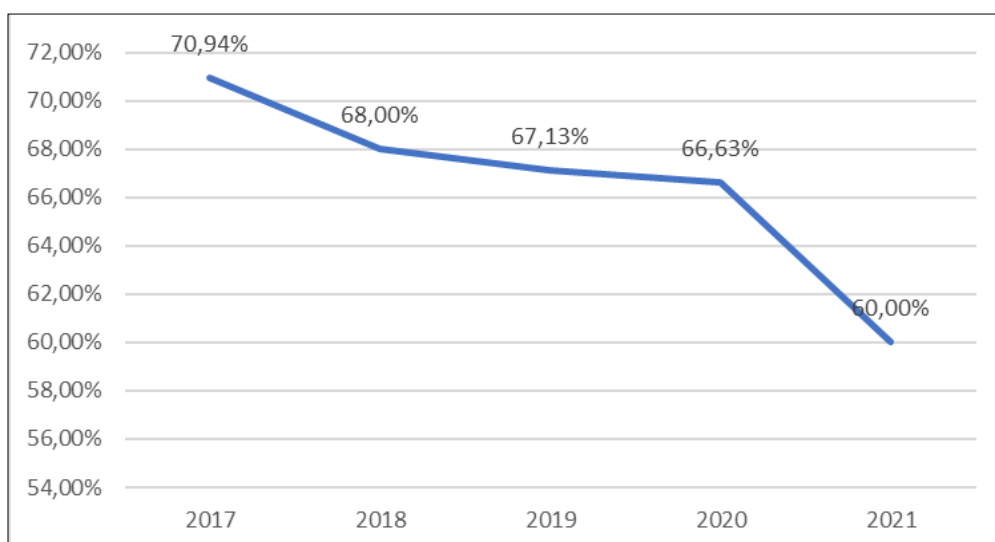
**Persentase Cakupan Layanan Air Minum Perpipaan
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**



Sumber : DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Persentase cakupan pelayanan air minum non perpipaan di Kabupaten Batang mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 70,94% menjadi sebesar 60% pada tahun 2021, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan cakupan layanan air minum pada jaringan perpipaan sehingga mengurangi persentase cakupan layanan air minum pada jaringan non perpipaan.

Gambar 2. 58 Persentase Cakupan Layanan Air Minum Non Perpipaan di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

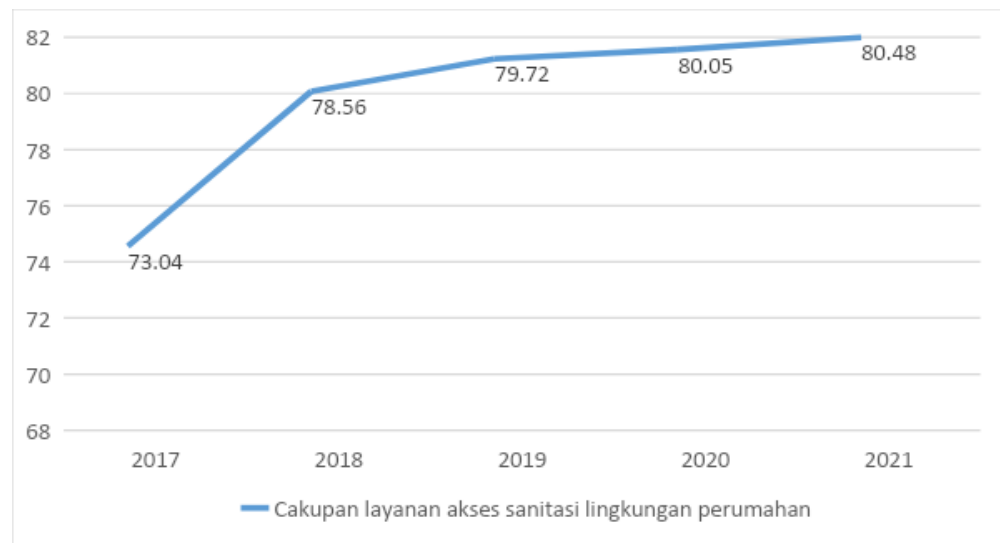


Sumber : DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi, dalam periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari 73,04% di tahun 2017 menjadi 80,48% di tahun 2021.

Gambar 2. 59

Cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

3. Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yang perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

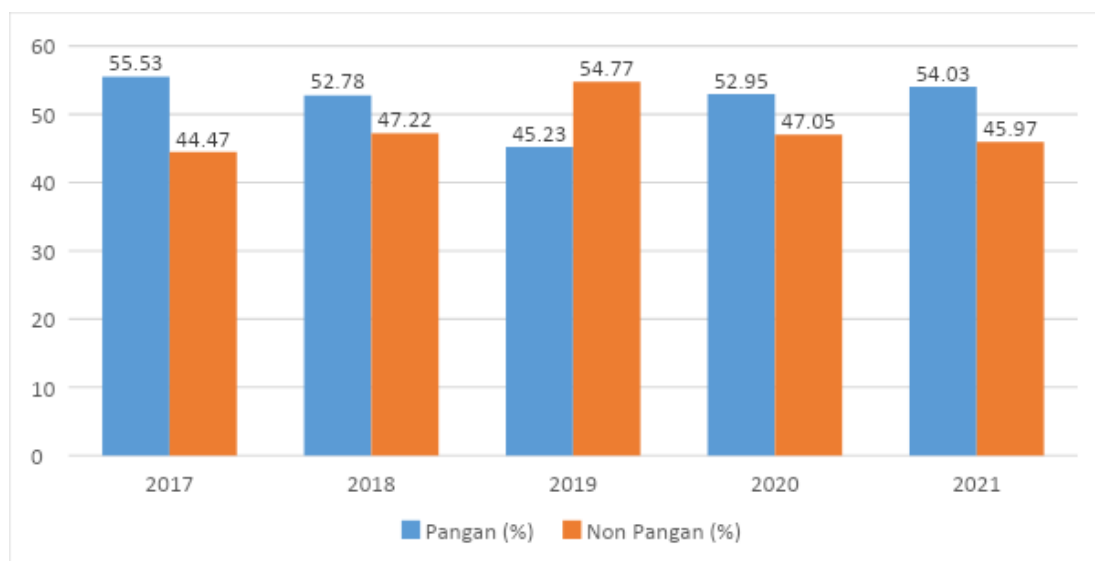
Pengeluaran konsumsi pangan dalam periode 2017-2021 berfluktuasi menurun, dari sebesar 55,53 persen pada tahun 2017 menjadi 55,40 persen pada tahun 2019. Namun, pengeluaran untuk makanan berkurang dari 55,40 persen pada tahun 2019 menjadi 52,95

persen pada tahun 2020, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 54,03 persen. Berkurangnya pengeluaran pada makanan pada tahun 2020 tidak semata-mata diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat memburuk, namun bisa pula disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas pangan pada tahun 2020, sehingga kuantitas yang dikonsumsi berkurang. Sedangkan persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Batang cenderung berfluktuasi naik dari tahun 2017-2021 yaitu sebesar 44,47 persen pada tahun 2017 menjadi 45,97 persen pada tahun 2021. Pengeluaran non-makanan yang mengalami peningkatan diantaranya adalah pengeluaran untuk perumahan, barang dan jasa dan pakaian, hal ini dapat diartikan sebagai peningkatan tingkat kesejahteraan.

Jika dibandingkan antara pengeluaran konsumsi non pangan dengan pengeluaran untuk pangan, konsumsi non pangan masih cenderung lebih rendah yang artinya masyarakat masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan dengan kebutuhan non pangan seperti perumahan, pakaian dan barang/jasa lainnya.

Gambar 2. 60

Perkembangan Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2022

4. Rasio Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB ADHK

Jumlah net ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang menunjukkan angka negatif dalam kurun waktu 2017-2021, yang artinya nilai impor masih lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor di Kabupaten Batang. Pada tahun 2017 sebesar 1,615,344.75 juta rupiah dan semakin defisit sebesar 4,390,960.67 di tahun 2018, disebabkan karena nilai impor yang tinggi seiring masuknya mesin impor untuk industri dan PLTU. Dengan selesainya proyek PLTU, defisit semakin mengecil sampai dengan tahun 2021 menjadi 978,283.08 juta rupiah. Sedangkan untuk nilai ekspor, di Kabupaten Batang masih didongkrak oleh komoditas pertanian. Demikian halnya dengan rasio net ekspor barang dan jasa jika dibandingkan dengan total PDRB ADHK juga berfluktuasi menurun yaitu dari -11,82% pada tahun 2017 menurun sampai dengan tahun 2018 menjadi sebesar -30,39%, namun sedikit mengalami kenaikan menjadi -12,71% pada tahun 2019 dan semakin mengecil menjadi -0,06% pada tahun 2020.

Tabel 2. 26

Rasio Ekspor terhadap PDRB ADHK Kabupaten Batang

Tahun	PDRB ADHK (Juta Rp)	Net Ekspor Barang dan Jasa (Juta Rp)	Rasio
2017	13,667,079.8	-1,615,344.75	-11.82
2018	14,448,625.8	-4,390,960.67	-30.39
2019	15,226,885	-1,935,340.42	-12,71
2020	15,030,577.0	-1,560,197.36	-0,10
2021	15,764,265.54	-978,283.08	-0,06

Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2022

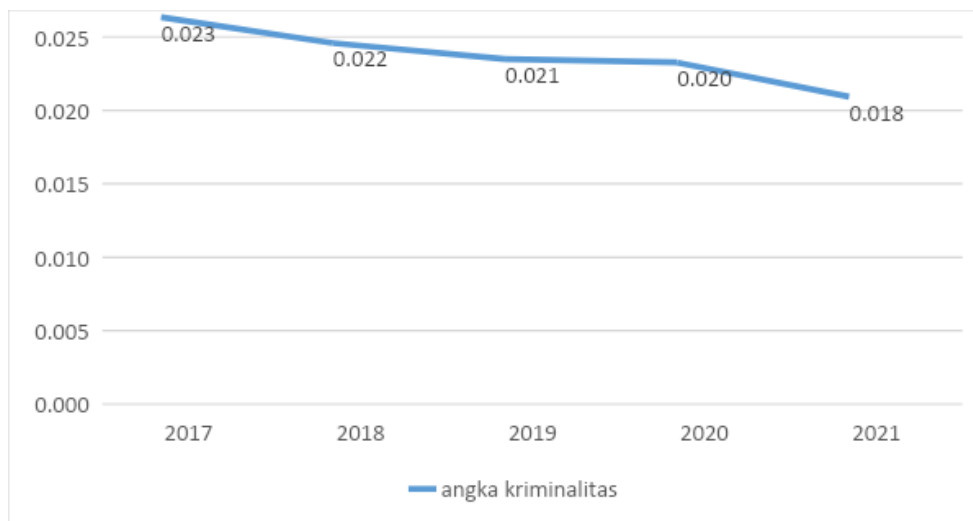
5. Kondusifitas wilayah

a. Gangguan Keamanan yang tertangani

Angka kriminalitas di Kabupaten Batang cenderung menurun dalam periode tahun 2017-2021, tahun 2017 sebesar 0,023%, menjadi 0,018% di tahun 2021 dan di Hal ini mengindikasikan bahwa kondusivitas di Kabupaten Batang cukup terjaga.

Gambar 2. 61

Angka Kriminalitas di Kabupaten Batang



Sumber: Kepolisian Resort Batang Tahun 2022, diolah

b. Jumlah Pos Kamling

Jumlah Poskamling di Kabupaten Batang selama 5 (lima) tahun terakhir, dari 1.180 unit pada tahun 2017 menjadi 1.190 unit pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 berkurang menjadi 1.184 unit dan kembali bertambah menjadi 1.223 unit pada tahun 2020. Pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 1795.

Tabel 2. 27

Jumlah Pos Kamling di Kabupaten Batang

NO	KECAMATAN	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	5	13	14	15	16
1	BATANG	237	221	178	368	219
2	WARUNGASEM	55	55	67	67	76
3	WONOTUNGGAL	125	125	92	106	110
4	BANDAR	166	169	144	296	259
5	BLADO	79	60	39	29	87
6	REBAN	170	170	87	187	115
7	TULIS	43	59	76	53	110
8	KANDEMAN	106	108	34	118	110
9	PECALUNGAN	120	155	24	34	53
10	SUBAH	140	221	192	191	171
11	LIMPUNG	149	149	73	168	138
12	GRINGSING	59	74	95	139	87
13	TERSONO	221	115	71	95	60
14	BAWANG	108	105	36	71	78
15	BANYUPUTIH	155	46	70	54	122
JUMLAH		1.933	1.832	1.278	1.976	1.795

Sumber: Satpol PP Kabupaten Batang Tahun 2022

6. Angka Beban Ketergantungan

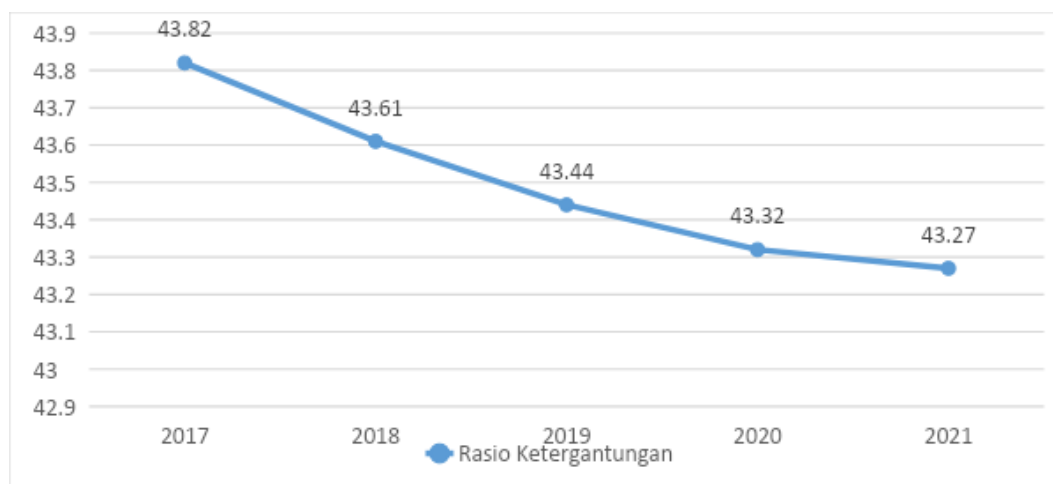
Angka Beban Ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan, maka menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif, dan penduduk yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat

dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan, maka akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2017-2021, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017 angka beban tanggungan Kabupaten Batang yaitu sebesar 43,82 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif, maka menanggung sekitar 44 penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Batang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang pada tahun 2021 angka beban ketergantungan penduduk sebesar 43,27 persen, artinya adalah bahwa setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 43 penduduk tidak produktif (penduduk dibawah umur 15 tahun dan umur 65 tahun keatas).

Rasio ketergantungan yang terus cenderung berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

Gambar 2. 62
Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Batang



Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2022

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia secara formal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan kabupaten dan dalam rangka pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimal melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu pelayanan dasar untuk jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional (BOP), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

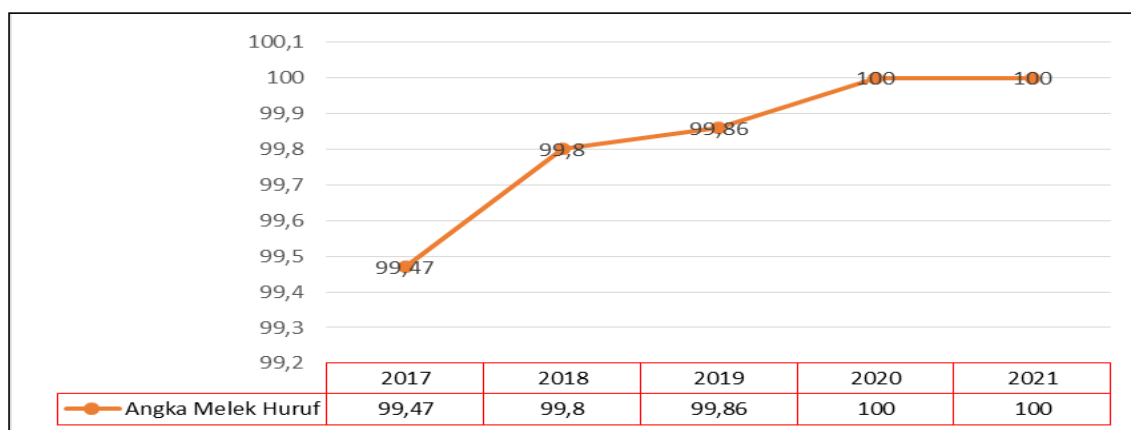
Kualitas pembangunan pendidikan di Kabupaten Batang dapat digambarkan dari beberapa indikator keberhasilan, antara lain Angka Melek Huruf, angka partisipasi sekolah, dan penyediaan prasarana sarana pendidikan sesuai standar. Angka partisipasi diukur dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Dasar dan Pendidikan Menengah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, secara keseluruhan baik APK dan APM semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Angka Melek Huruf Kabupaten Batang berfluktuasi naik dalam kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2017 Angka Melek Huruf Kabupaten Batang sebesar 99,46%, terus mengalami kenaikan menjadi sebesar 100% pada tahun 2020 dan bertahan hingga tahun 2021. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan Angka Melek Huruf diantaranya melalui penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dengan melibatkan SKB dan PKBM.

Gambar 2. 63

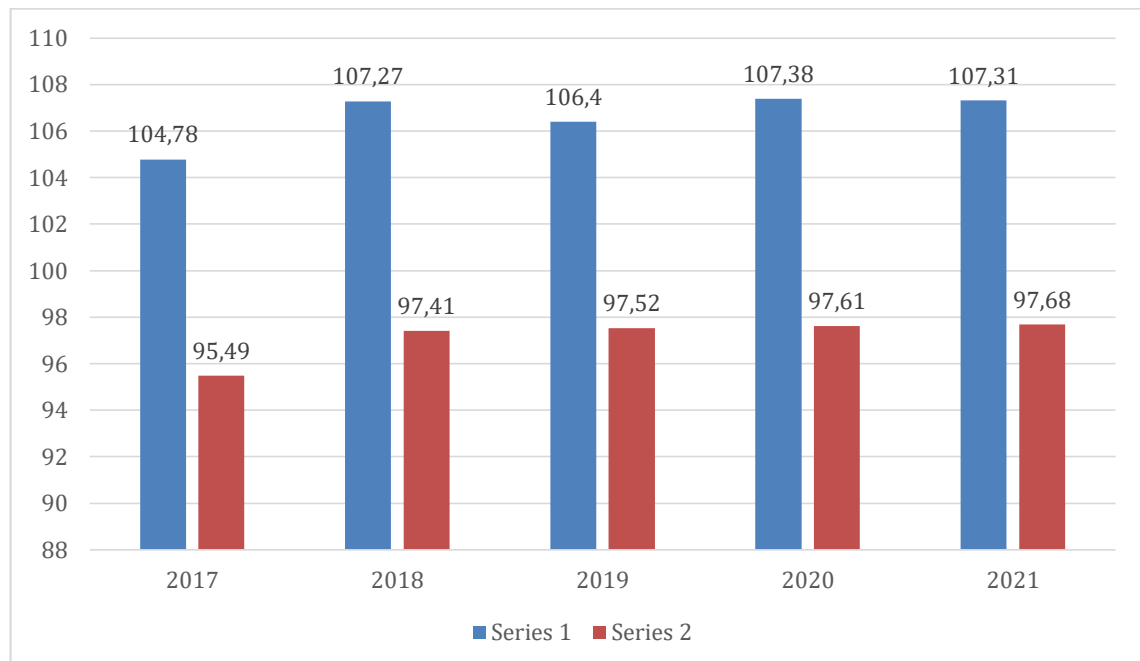
Angka Melek Huruf kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang, 2022

Jika dilihat APK per jenjang, dalam kurun waktu lima tahun terakhir APK SD/MI/ sederajat cenderung berfluktuasi naik, dari 104,78 pada tahun 2017 kemudian terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2020 menjadi sebesar 107,38. kemudian ada penurunan kecil pada tahun 2021 menjadi 107,31. Sedangkan APK SMP/MTs/ sederajat cenderung meningkat dalam 2017-2021, dari 95,49 pada tahun 2017 menjadi 97,68 pada tahun 2021.

Gambar 2. 64 Angka Partisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



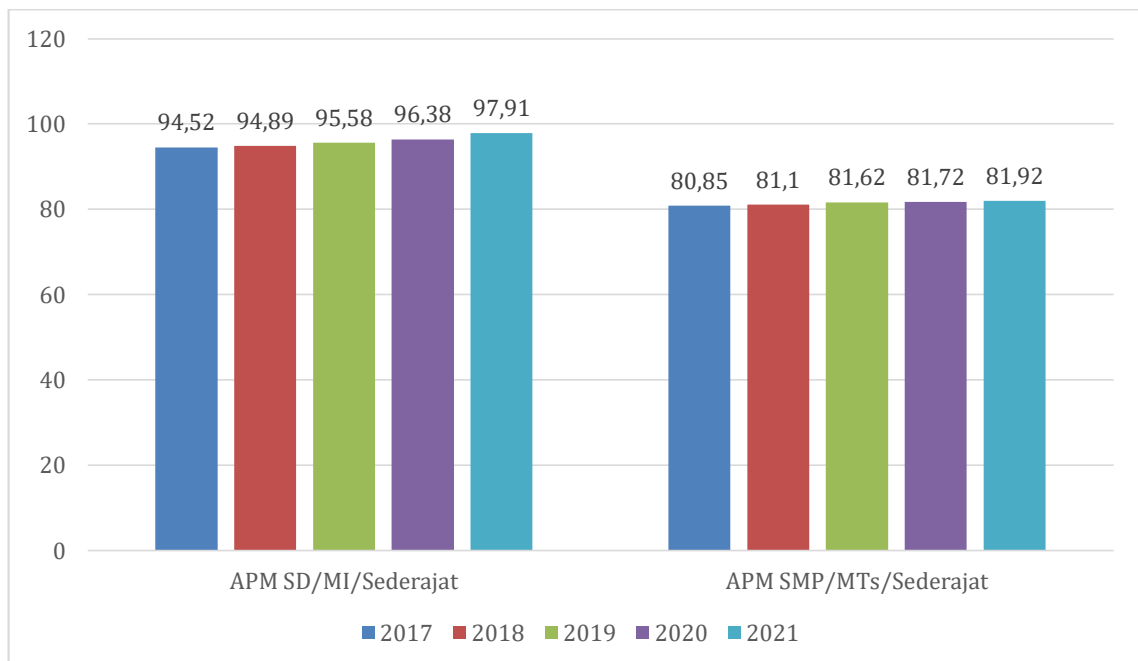
Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

APM pada jenjang SD/MI/ sederajat terus mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, sebesar 94,52 pada tahun 2017 kemudian naik menjadi 97,91 pada tahun 2021. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat dalam kurun waktu 2017-2020 terus mengalami kenaikan dari 80,85 di tahun 2017 menjadi 81,72 di tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 81,92 di tahun 2021.

Sedangkan Angka putus sekolah pada jenjang SD/ Sederajat pada tahun 2017 menunjukkan angka 0,08% tahun 2018 dan terus menurun hingga tahun 2021 menjadi 0,02% pada tahun 2021 sehingga menunjukkan bahwa 0,02% angka putus sekolah dapat ditekan melebihi dari target sebesar 0.10%. Angka Putus Sekolah yang dibawah angka 0.10% ini menunjukkan kepastian peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan pada usia 7-12 tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 2. 28**Data Angka Putus Sekolah Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**

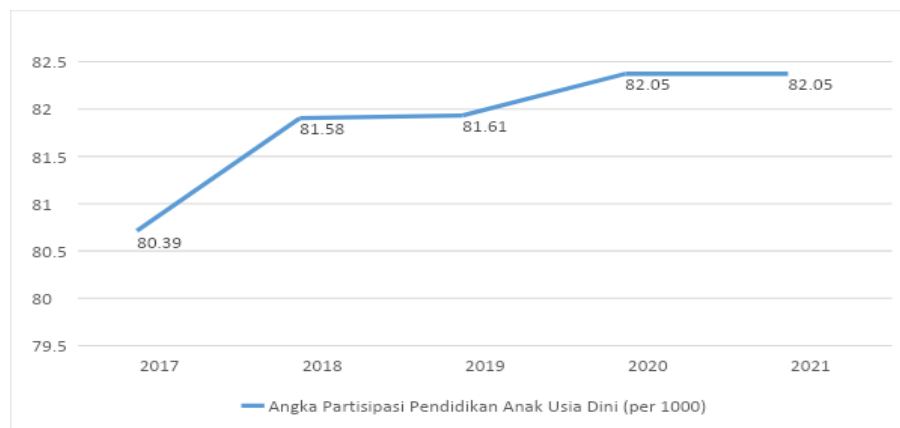
Uraian	satuan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	%	0,060	0,080	0,050	0,060	0,040	0,041	0,030	0,031	0,020	0,020
Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	%	0,100	0,130	0,090	0,095	0,080	0,094	0,070	0,071	0,060	0,059

Gambar 2. 65 Angka Partisipasi Murni per Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat dari 80,39% pada tahun 2017 menjadi 82,3% pada tahun 2021.

Gambar 2. 66 Angka Partisipasi PAUD Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

Kondisi sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ini bangunan sekolah SD/MI menurun dari 94,92% pada tahun 2017 menjadi 94,61% pada tahun 2021, sedangkan bangunan sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik meningkat dari 81,70% pada tahun 2017 menjadi 85,15% pada tahun 2021. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi turun naik, dari 64,37% di tahun 2017 menjadi sebesar 62,26% pada tahun 2018, kemudian naik kembali menjadi 65,08% pada tahun 2021, sedangkan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir yaitu dari 13,54% pada tahun 2017, naik menjadi 19,31% pada tahun 2021.

Tabel 2. 29

Kondisi sarpras pendidikan Kab.Batang Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Stn	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	94.92	94.39	94.48	94.48	94,61
2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	81.70	84.42	84.43	84.43	85,15

NO	Indikator Kinerja	Stn	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	64.37	62.26	63.93	64.21	65,08
4	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	13.54	15.37	18.28	18.28	19.31

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

Angka pendidikan yang ditamatkan untuk jenjang SD/ sederajat cenderung berfluktuasi naik pada periode tahun 2017-2020 dari 67,39% pada tahun 2017 menjadi 76,00% pada tahun 2020, namun terdapat penurunan pada tahun 2021 menjadi 51,00%. Pada jenjang SMP/ sederajat juga berfluktuasi naik pada periode lima tahun terakhir dari 26,11% pada tahun 2017 menjadi 38,00% pada tahun 2020, namun, angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 28,21%. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras untuk kembali meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan baik jenjang SD/ sederajat maupun SMP/ sederajat.

Tabel 2. 30
Angka Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angka Pendidikan yang ditamatkan						
1	a. Jenjang SD/ Sederajat	%	67.39	72.66	74.00	76,00	51,00
2	b. Jenjang SMP/ Sederajat	%	26.21	35.95	38.00	38,00	28,21

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan kualitas tenaga pendidik berdasarkan persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kabupaten Batang dalam kurun

waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan, dari 80,85% di tahun 2017 menjadi 90,11% di tahun 2021.

Tabel 2. 31
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	80.85	81.10	88,88	89,37	90,11

Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Batang terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan, baik sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Adapun sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Batang yaitu Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 2 (dua) Rumah Sakit meliputi RSUD Batang dan RSUD Limpung serta 1 (satu) Rumah Sakit swasta yaitu Rumah Sakit Umum QIM, puskesmas rawat inap sebanyak 4 buah, puskesmas rawat jalan sebanyak 17 buah, puskesmas pembantu sebanyak 42 buah, puskesmas keliling/ambulan sebanyak 23 buah, Poliklinik Kesehatan Desa sebanyak 200 unit serta posyandu sebanyak 1.224 buah yang tersebar di seluruh Kabupaten Batang.

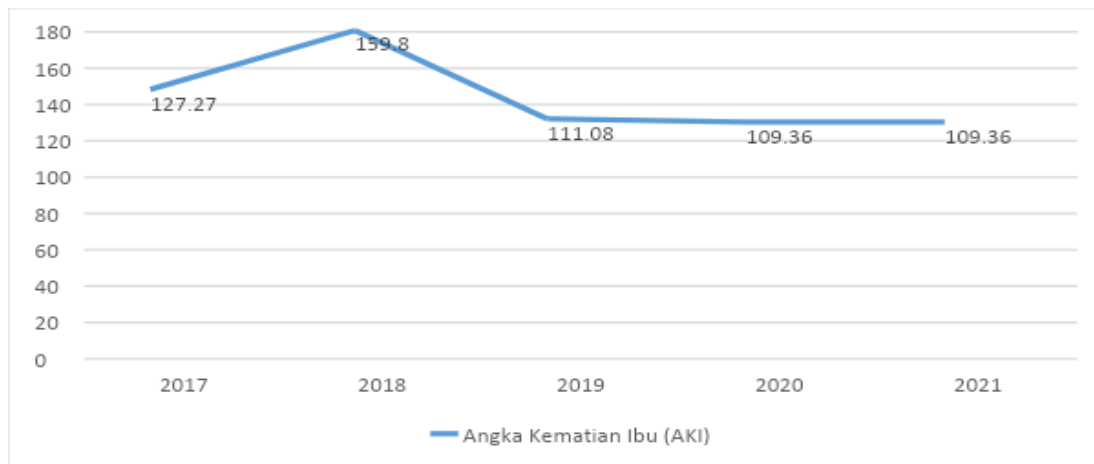
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diantaranya melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan prevalensi gizi buruk pada Balita.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi naik dan turun, dari 127,27 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 naik menjadi sebesar 159,8 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018, namun kemudian terus ada penurunan hingga tahun 2021 menjadi 94,13 per 100.000 kelahiran. Kasus AKI di Kabupaten Batang antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi

Kronik (KEK) karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi. Namun demikian, terdapat perbaikan sehingga terdapat penurunan angka kematian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5-ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Gambar 2. 67

**Angka Kematian Ibu Kabupaten Batang
(per 100.000 KH)**



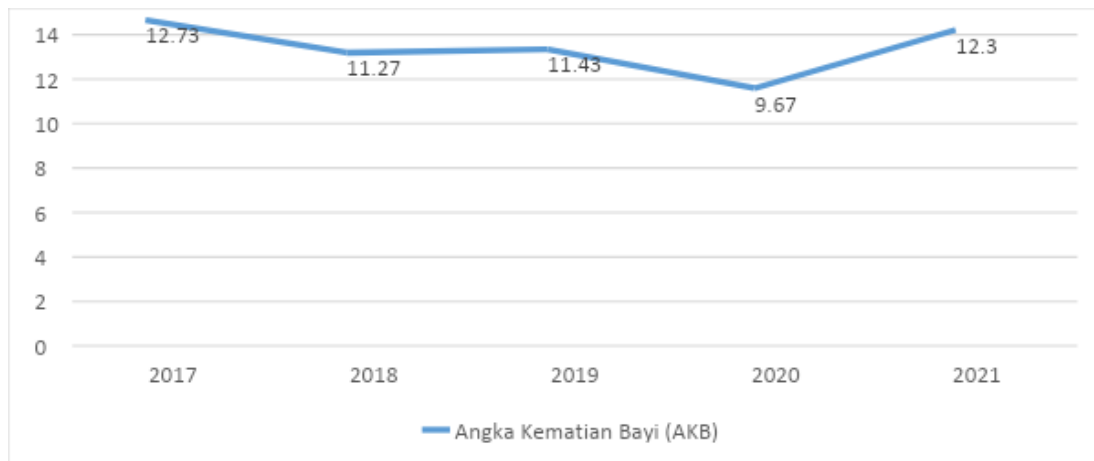
Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Dukungan terhadap pencapaian SDG's dapat dilihat dari kinerja pencapaian gizi, yang ditunjukkan pada indikator Angka Kematian Bayi (AKB) dan prevalensi gizi buruk.

Angka Kematian Bayi (AKB) dalam periode tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi menurun dan naik, dari 12,73 per 1000 KH pada tahun 2017 turun menjadi 9,45 per 1000 KH pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 angka AKB naik kembali menjadi sebesar 12,3 per 1000 KH. Meningkatnya AKB ini diantaranya disebabkan oleh meningkatnya angka komplikasi neonatal dan meningkatnya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan PMT pada ibu hamil KEK, pemberian ASI eksklusif, pemeriksaan neonatus dan bayi serta meningkatkan pelayanan kesehatan pada bayi dengan metode Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta pemberian vit A pada bayi umur 6 bulan – 1 tahun sehingga pada tahun 2020 angka AKB dapat diturunkan menjadi sebesar 9,67 per 1000 KH, namun perlu ada perbaikan kembali untuk menjadi evaluasi pada tahun 2021, karena AKB yang kembali naik.

Gambar 2. 68

Angka Kematian Bayi per 1000 KH Kabupaten Batang

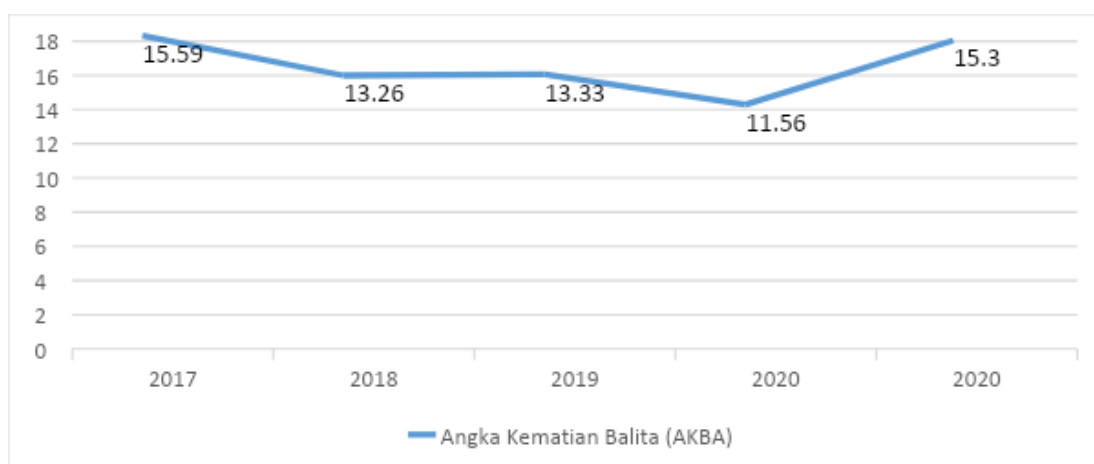


Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Batang berfluktuasi menurun dan naik dari tahun 2017-2020 yaitu dari 15,59 per 1000 KH pada tahun 2017 menurun menjadi 11,56 per 1000 KH pada tahun 2020, namun kembali naik pada tahun 2021 menjadi 15,3 per 1000 KH. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk penurunan AKBA diantaranya melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi lewat kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan balita dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) minimal 2 kali setahun, memberikan imunisasi lanjutan dan memberikan vitamin A, namun perlu ditingkatkan kembali untuk kembali menurunkan angka AKBA ini.

Gambar 2. 69

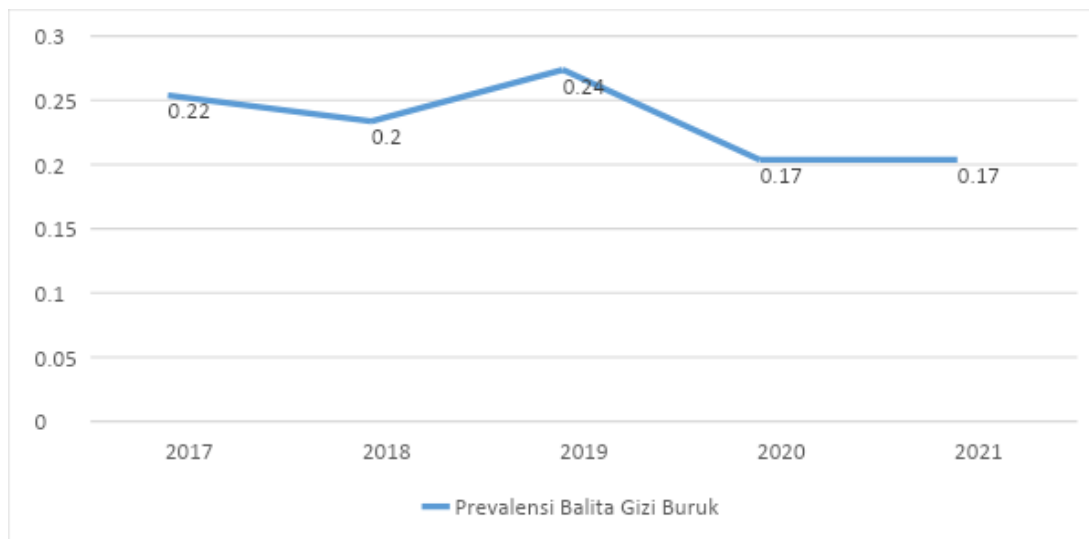
Angka Kematian Balita per 1000 KH Kabupaten Batang



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2017-2021, dari 0,22% pada tahun 2017 turun menjadi 0,17% pada tahun 2018, namun demikian angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 sebesar 0,25% dan selanjutnya menurun kembali di angka 0,17 pada tahun 2020 dan 2021. Meningkatnya prevalensi gizi buruk diantaranya disebabkan karena meningkatnya Angka Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dari 4,80% pada tahun 2018 menjadi 5,08% pada tahun 2019 dan menurunnya bayi yang ditimbang yang menyebabkan kasus gizi buruk tidak terdeteksi secara cepat/dini, sehingga pemulihannya menjadi lebih lama. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kesehatan balita diantaranya dengan memberikan intervensi pada balita kurus dengan pemberian PMT pemulihan, memberikan perawatan pada balita gizi buruk serta meningkatkan penyuluhan pada ibu-ibu untuk menimbang balitanya ke posyandu, untuk mengetahui tumbuh kembang balita.

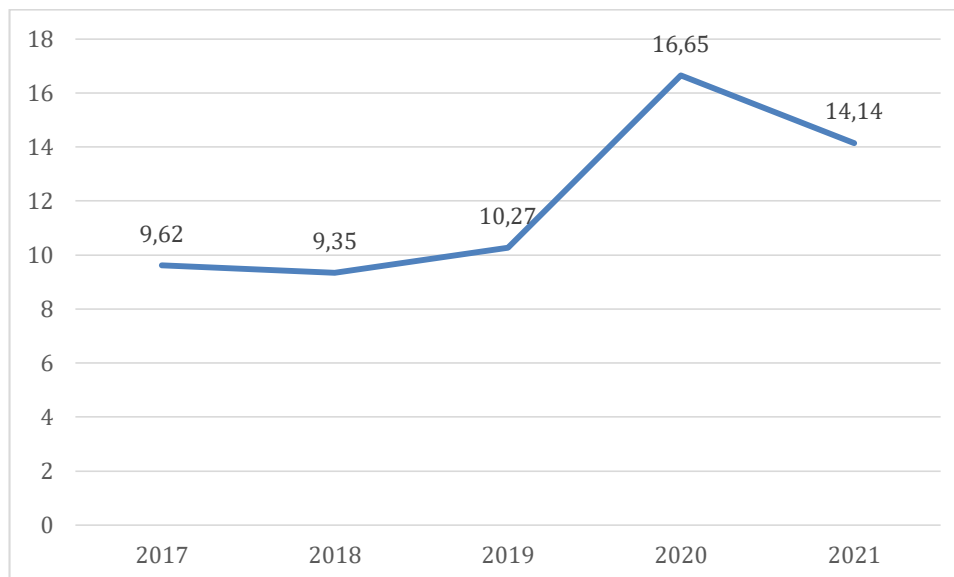
Gambar 2. 70
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)
Kabupaten Batang



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan terkait kondisi *stunting* di Kabupaten Batang angkanya cenderung berfluktuasi naik namun ada sedikit penurunan di tahun terakhir dalam periode lima tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 9,62% menjadi sebesar 16,65% pada tahun 2020, dan ada penurunan pada tahun 2021 menjadi 14,14%. Meningkatnya kasus *stunting* di Kabupaten Batang disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan ibu hamil mengenai pemenuhan gizi dan kesehatan sehingga menyebabkan kurangnya gizi ibu hamil dan ibu nifas, belum optimalnya pemenuhan air bersih dan sanitasi. Penambahan kasus *stunting* ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan *stunting* perlu dioptimalkan lagi khususnya melalui pemenuhan gizi ibu hamil, peningkatan pemberian ASI eksklusif dan MP ASI yg benar serta pengadaan kelas konseling gizi dan kesehatan. Selain hal tersebut, intervensi sensitive khususnya penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sehat serta penguatan posyandu perlu lebih dioptimalkan lagi. walaupun begitu ada upaya dari pemerintah Kabupaten Batang dalam upaya penurunan sehingga ada hasil berupa penurunan di akhir tahun periode.

Gambar 2. 71
Persentase Kasus Stunting
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

Pemenuhan sarana prasarana kesehatan berdasarkan indikator Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 32
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Rumah Sakit
per satuan penduduk Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per penduduk	1:9.412	1:9.372	1:9.372	1:9.564	1:9.539
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per penduduk	1:254.126	1:256.194	1:256.194	1:258.230	1:270.282

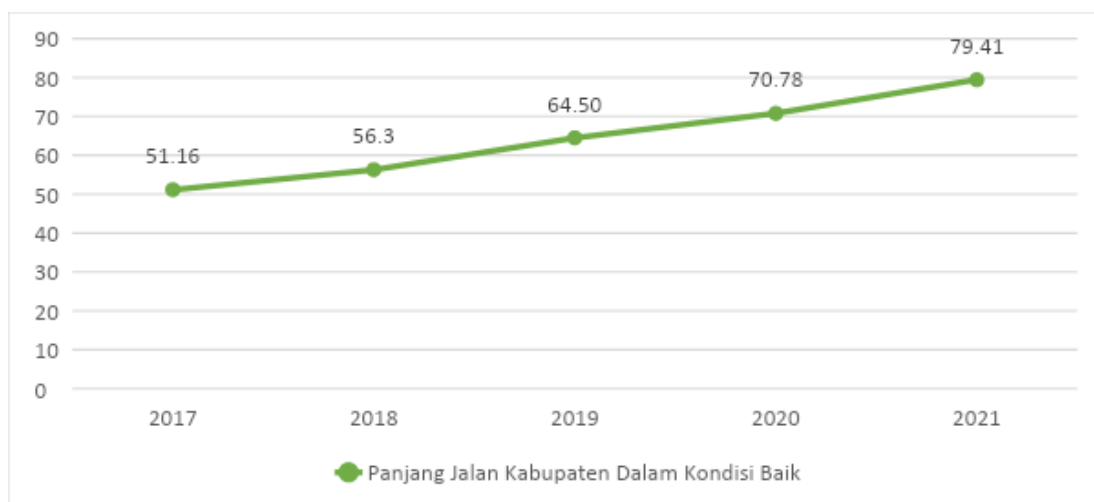
Sumber: Dinkes Kabupaten Batang Tahun 2022

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten sepanjang 552,42 km, dengan kondisi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat dari tahun 2017-2021, yaitu sebesar 51,16% pada tahun 2017 menjadi 79,41% pada tahun 2021. Meskipun panjang jalan dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan, namun kondisi panjang jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat juga masih cukup tinggi karena angka masih diatas 20%, sehingga masih diperlukan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan persentase panjang jalan dalam kondisi baik.

Gambar 2. 72

Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

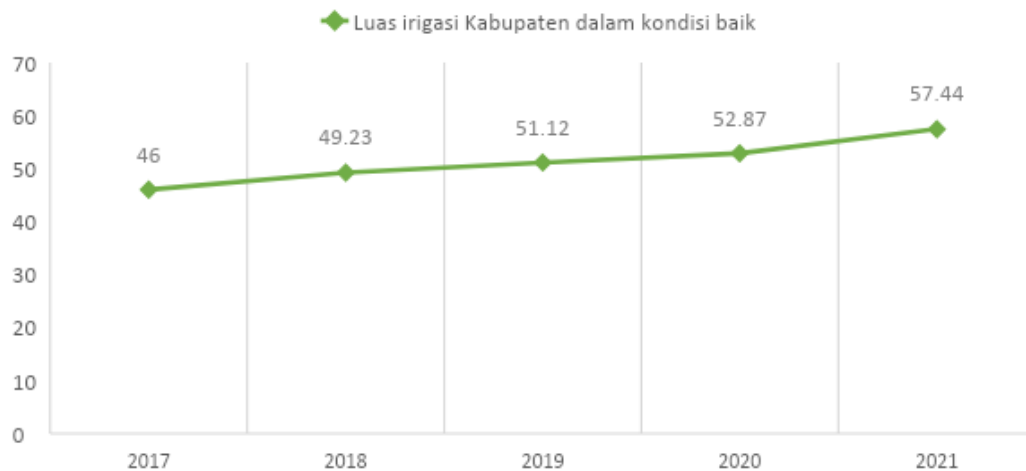


Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2022

Kondisi irigasi Kabupaten dalam kondisi baik terus meningkat pada periode lima tahun terakhir, dari tahun 2017 sebesar 46% meningkat menjadi 57,44% pada tahun 2021, meskipun demikian kedepan masih perlu lebih ditingkatkan karena masih banyaknya bangunan irigasi yang rusak disebabkan umurnya sudah lama dan tidak tertangani dengan baik serta seringnya terjadi bencana alam.

Gambar 2. 73

**Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**



Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2022

Gambar 2. 74

**Luas Drainase Kabupaten dalam Kondisi Baik (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**



Sumber : DPUPR Kab. Batang, 2022

Capaian rasio ruang terbuka hijau berfluktuasi naik dalam periode tahun 2017-2021, yaitu sebesar 15,35% pada tahun 2017 naik menjadi 28,83% pada tahun 2021. Sedangkan persentase ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang tahun 2017 - 2021 ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2017-2018, kemudian cenderung datar pada tahun 2018-2021 yang disebabkan kondisi riil pemanfaatan ruang di

lapangan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah dipetakan pada RTRW sehingga terjadi simpangan pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 33

Rasio RTH dan Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Batang (%)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	%	15,35	15,35	7,34	24,32	28,83
2	Ketaatan terhadap RTRW	%	1,98	72,73	72,73	72,73	72,73

Sumber: DPUPR Kabupaten Batang Tahun 2022

Air minum dan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia. Pelayanan terhadap akses air minum di Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari data cakupan layanan akses air minum yang terus meningkat dari tahun 2017-2021, dari 77,10% di tahun 2017 menjadi 84,12% di tahun 2021.

Gambar 2. 75

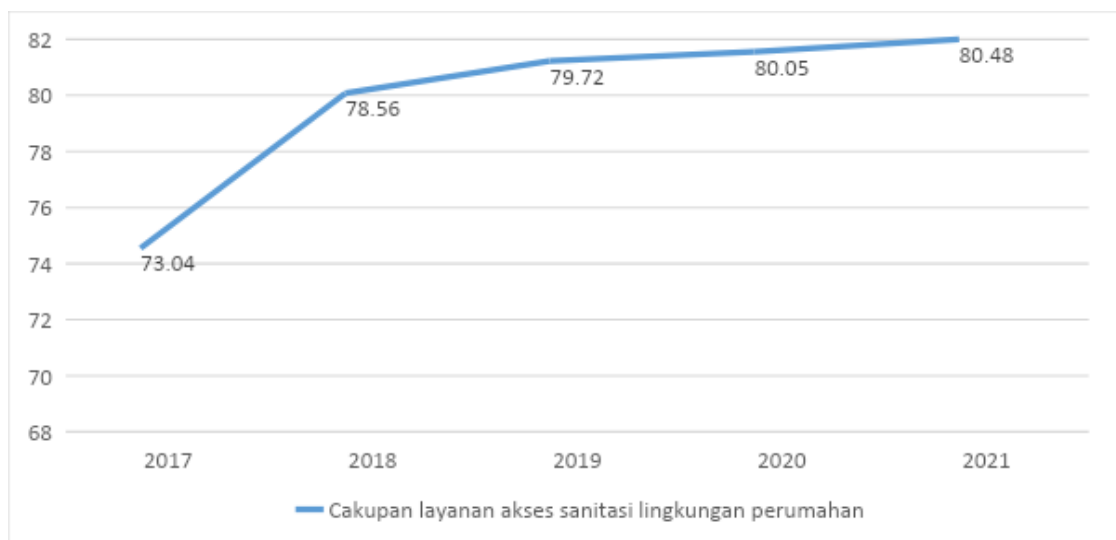
Cakupan layanan akses air minum Kabupaten Batang (%)



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Demikian juga untuk cakupan layanan akses sanitasi, dalam periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari 73,04% di tahun 2017 menjadi 80,48% di tahun 2021.

Gambar 2. 76
Cakupan layanan akses sanitasi Kabupaten Batang



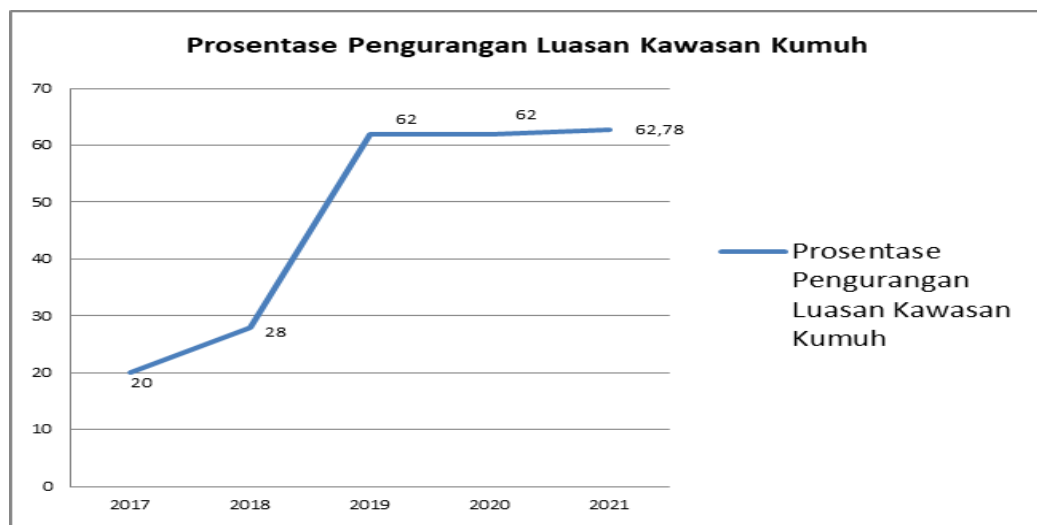
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Batang dilakukan melalui beberapa upaya antara lain penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan. Upaya pengurangan luasan kawasan kumuh dalam periode lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang semakin baik, hal tersebut dapat dilihat dari persentase pengurangan luasan kawasan kumuh yang meningkat dari tahun 2017– 2021. Dari tahun 2017 sebesar 20%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga pada tahun 2019 menjadi sebesar 62%, dan terdapat peningkatan yang tidak signifikan menjadi 62,78% pada tahun 2021.

Gambar 2. 77

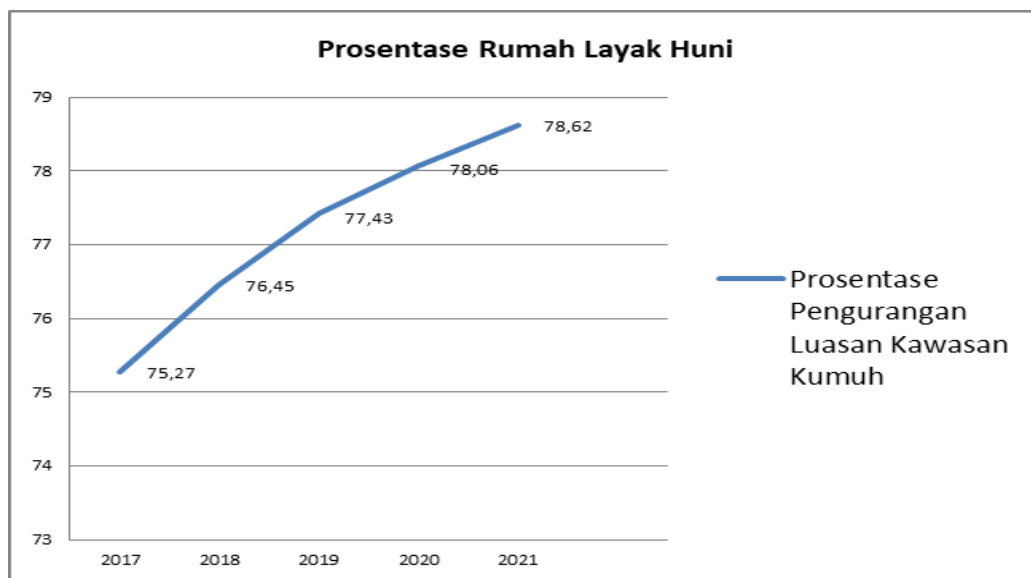
Persentase Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Persentase rumah layak huni mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 75,27% menjadi 78,62% pada tahun 2021. Peningkatan ini antara lain disebabkan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan permukiman yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang melalui pemugaran rumah tidak layak huni.

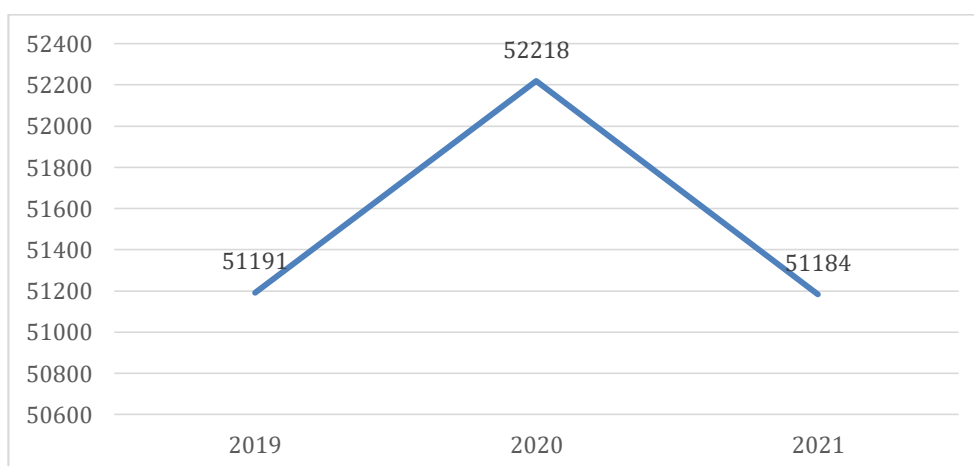
Gambar 2. 78
Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Batang (%)



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu semula sebesar 51.191 menjadi 52.218 pada tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 51.184.

Gambar 2. 79
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Batang



Sumber : PBDT 2018, DTPFMOTM 2019, dan DTKS 2022

Penambahan perumahan formal tahun 2021 sebesar 9% meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan infrastruktur

lingkungan perumahan yang layak terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 27% menjadi 75% pada tahun 2021, demikian juga dengan persentase rumah Sehat di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0% meningkat menjadi 90% pada tahun 2021.

Tabel 2. 34
Prosentase Penambahan perumahan formal dan Prosentase Rumah Sehat Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase penambahan perumahan formal	%	0	6	7	8	9
2	Prosentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak	%	0	27	55	60	75
3	Prosentase Rumah Sehat	%	0	76,45	7,43	78,06	90,00

Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

5. Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Batang antara lain meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana.

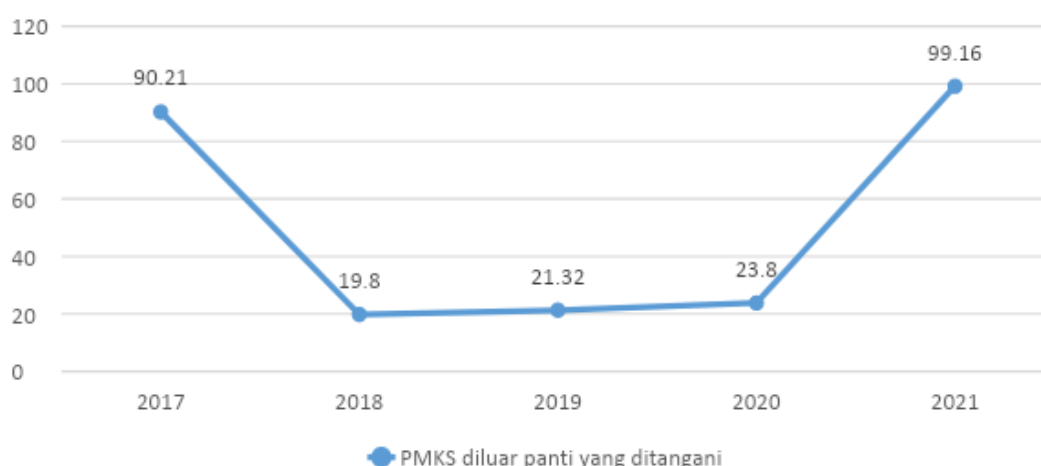
Penanganan PMKS yang tertangani bersifat fluktuatif dalam periode 2017-2021. Pada Tahun 2017 PMKS yang tertangani sebesar 90,21%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 19,8% terus mengalami kenaikan menjadi 23,8% di Tahun 2020 dan pada tahun 2021 ada kenaikan yang signifikan menjadi 99,16%. Penurunan persentase PMKS yang tertangani ini terjadi karena adanya penambahan Namun demikian, pelayanan dasar bagi PMKS yang juga merupakan salah satu indikator SPM urusan Sosial ini capaiannya masih relatif kecil, sehingga masih perlu ditingkatkan lagi terutama terkait penyediaan rumah singgah, karena Kabupaten Batang belum

memiliki rumah singgah sehingga pelayanan dasar bagi PMKS belum paripurna.

Rendahnya capaian penanganan PMKS pada Tahun 2018 - 2020 terjadi karena proses pendataan DTKS mulai dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sehingga terjadi penambahan jumlah PMKS di Kabupaten Batang. Pada Tahun 2020 proses pemutakhiran dan verifikasi validasi DTKS mulai dilaksanakan tetapi belum mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial sehingga data PMKS dalam DTKS belum mengalami pengurangan secara signifikan. Selain itu, pada Tahun 2020, untuk mengatasi dampak Pandemi, pemerintah memberikan banyak bantuan untuk warga miskin baik melalui Anggaran APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun Dana Desa.

Pada Tahun 2021, proses verifikasi dan validasi sudah berjalan sehingga jumlah warga miskin yang masuk ke dalam DTKS berkurang dari 426.263 jiwa pada Tahun 2018 menjadi 160.595 jiwa pada Tahun 2021. Pengurangan ini terjadi karena pada saat proses verifikasi dan validasi ditemukan data warga yang tidak valid, misalnya sudah meninggal dunia atau sudah tidak miskin. Pengurangan jumlah warga miskin ini ditambah dengan meningkatnya jumlah bantuan membuat persentase penanganan PMKS melonjak tinggi menjadi 99,16%.

Gambar 2. 80 PMKS yang tertangani Kabupaten Batang



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

Salah satu upaya penanganan PMKS adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal. Salah satu media/alat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial adalah pemberian stimulan/bantuan sosial kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Namun demikian, besaran bantuan sosial untuk PMKS dalam lima tahun terakhir berfluktuasi dari 89.72% di tahun 2017 menjadi 98,96% di tahun 2021, meskipun pada tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini disebabkan karena asistensi untuk lanjut usia dan asistensi orang dengan kecacatan tidak diberikan, namun disisi lain diberikan alokasi bantuan untuk korban bencana dan operasional rawat inap bagi anggota keluarga PMKS yang dirawat di rumah sakit. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan signifikan yang disebabkan oleh sudah tertatanya data base PMKS (dalam hal ini termasuk di dalamnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi beban warga akibat adanya Pandemi Covid-19.

Gambar 2. 81 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar Kabupaten Batang



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

Penanganan PMKS juga dilakukan melalui pemberdayaan sosial bagi PMKS dengan membentuk kelompok usaha bersama keluarga miskin, RTLH dan santunan kematian bagi warga miskin.

Kinerja pemberdayaan sosial dapat dilihat dari capaian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diberdayakan dalam periode lima tahun terakhir (2017-2021). Persentase PMKS yang diberdayakan fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 0,12 per 1000 meningkat menjadi sebesar 95,77 per 1000 pada tahun 2018, namun kembali menurun di tahun 2019 hingga 2021 menjadi 9,03 per 1000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlu upaya yang lebih keras terkait peningkatan pemberdayaan PMKS di Kabupaten Batang. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang diantaranya dengan memberikan asistensi sosial bagi PMKS antara lain berupa asistensi kepada para penyandang disabilitas, asistensi lanjut usia serta santunan kematian kepada untuk ahli waris warga miskin yang meninggal dunia.

Gambar 2. 82
PMKS yang Diberdayakan di Kabupaten Batang
(per 1000)

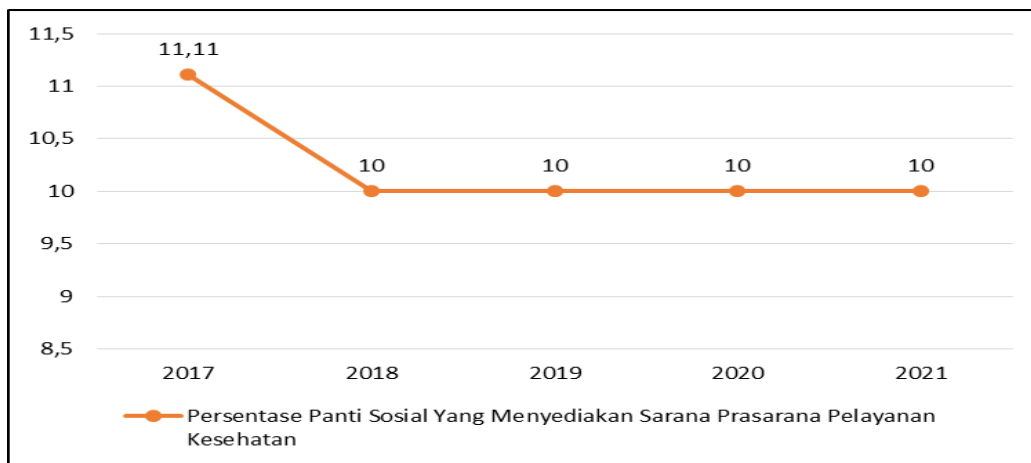


Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan capaiannya cenderung stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada Tahun 2017 terdapat 11,11% panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan, kemudian

menurun menjadi 10% pada tahun 2018 dan stabil sampai Tahun 2021.

Gambar 2. 83
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana
Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Batang Tahun 2022

6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Ketentraman dan Ketertiban masyarakat

Gangguan keamanan yang tertangani di Kabupaten Batang fluktuatif dalam periode tahun 2017-2020, tahun 2017 sebesar 88,70%, meningkat pada tahun 2018 menjadi 69,09%, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 87,97% karena terdapat kasus yang dilaporkan tidak semuanya dapat diselesaikan pada tahun berkenaan, tetapi baru dapat diselesaikan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2020 kinerja penyelesaian tindak pidana meningkat menjadi sebesar 82,82%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 71,81%.

Tabel 2. 35
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Kabupaten Batang

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Selesai	
1	2017	177	157	88,70
2	2018	165	114	69,09
3	2019	158	139	87,97

4	2020	163	135	82,82
5	2021	149	107	71,81

Sumber: Kepolisian Resort Batang Tahun 2022

b. Penanggulangan Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Batang terdiri dari kawasan rawan tanah longsor (gerakan tanah), kawasan rawan gelombang pasang/banjir dan kawasan rawan abrasi laut.

Di Kabupaten Batang tercatat setidaknya 317 kejadian bencana pada periode tahun 2017 – 2021 dimana kebakaran merupakan kejadian bencana yang paling sering terjadi sebanyak 139 kali. Kejadian bencana lainnya yang sering terjadi adalah tanah longsor, banjir dan angin Topan sebagaimana pada tabel berikut:

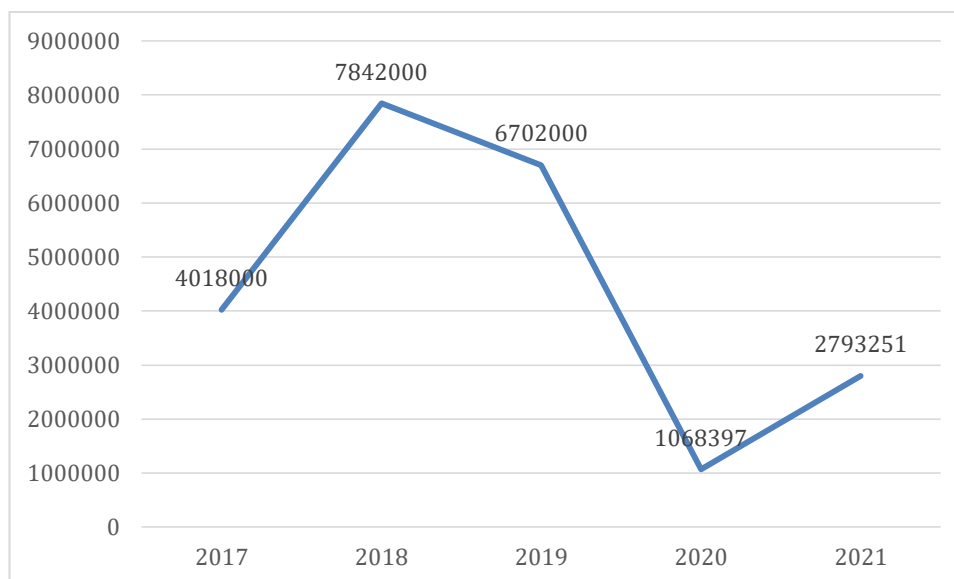
Tabel 2. 36
Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Batang

No	Tahun	Kejadian Bencana						Jumlah
		Kebakaran	Angin Topan	Tanah Longsor	Laka Laut	Jembatan Ambrol	Banjir	
	2017	11	6	11	0	0	2	30
	2018	46	5	8	0	0	2	61
	2019	39	12	14	0	0	35	100
	2020	35	5	18	0	0	8	66
	2021	8	19	22	3	1	7	60

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka 2022

Kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi menurun, pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.018.000.000,- tahun 2020 sebesar Rp 1.068.397.000,-, dan pada tahun 2021 turun menjadi Rp 2.793.251.000,- sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2. 84
Kerugian/Kerusakan Akibat Bencana
Tahun 2017-2021



Sumber: BPBD Kabupaten Batang Tahun 2022

Melihat potensi luasan wilayah bencana di Kabupaten Batang, setidaknya terdapat 24.202 ha merupakan daerah rawan banjir meskipun dengan tingkat bahaya yang berbeda, yaitu 4.555 ha bahaya rendah, 5.713 ha bahaya sedang dan 13.934 ha bahaya tinggi. Sekitar 35.821 ha merupakan daerah rawan tanah longsor, dengan tingkat bahaya rendah seluas 5.158 ha, bahaya sedang seluas 19.483 ha, dan tingkat bahaya tinggi seluas 11.179 ha . Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Batang seluas 718 ha juga berpotensi terkena abrasi.

Tabel 2. 37
Potensi Bencana di Kabupaten Batang

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	4.555	5.713	13.934	24.202	Tinggi
2	Banjir Bandang	268	756	1.498	2.523	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	-	49.138	19	49.157	Sedang
4	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	-	283	436	718	Tinggi

No.	Jenis Bencana	Luas Bahaya (ha)			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
5	Gempa Bumi	85.426	-	-	85.426	Rendah
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	24.111	16.298	-	40.409	Sedang
7	Kekeringan	-	85.426	-	85.426	Sedang
8	Letusan Gunungapi Dieng	135	454	27	616	Sedang
9	Tanah Longsor	5.158	19.483	11.179	35.821	Tinggi

Sumber: BPBD Kabupaten Batang Tahun 2022

Pada fase pra bencana tahap mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan berperan penting dalam upaya pengurangan resiko bencana. Dengan mitigasi, masyarakat memahami potensi dan resiko bencana yang berada di lingkungan mereka, Sosialisasi/penyuluhan kebencanaan dan penanggulangannya menjadi sangat dibutuhkan agar masyarakat tahu dan mengerti apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana dan mitigasi struktural berupa penguatan bangunan fisik pencegah/pengurang dampak bencana yang sesuai dengan karakteristik bencananya. Disamping hal tersebut perlu dibangun sistem peringatan dini/early warning system untuk jenis-jenis bencana agar program pengurangan resiko berjalan baik.

Pada Fase tanggap darurat dukungan relawan penanggulangan bencana lebih optimal apabila ditunjang Sarana prasarana dan peralatan kebencanaan yang memadai. Untuk mencapai kondisi pemulihan saat tanggap darurat dalam waktu singkat perlu mobilisasi relawan dan peralatan kebencanaan, beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain pemenuhan sarana seperti perahu karet dan prasarana lainnya untuk memenuhi respon time penanganan bencana.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pembentukan desa tangguh bencana

(destana) di Kabupaten Batang baru dilaksanakan di tahun 2019 sebanyak 2 desa. Sedangkan upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan melalui mitigasi non struktural antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan Early Warning System (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang rentan terhadap bencana. Pemasangan EWS untuk tahun 2015 sebanyak 2 buah, sedangkan pemasangan rambu jalur evakuasi sebanyak 13 buah di tahun 2018.

Meskipun kejadian bencana di Kabupaten Batang hanya pada tahun 2020 yang terdapat korban jiwa yang meninggal (1 jiwa), namun masyarakat yang terdampak bencana perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Selama kurun waktu 2017 – 2021, beberapa bencana yang terjadi di Kabupaten Batang baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam dan jumlah korbannya terinci pada tabel berikut.

Tabel 2. 38
Jumlah Korban Bencana (jiwa) di Kabupaten Batang

Tahun	Jumlah Korban			
	Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2017	0	0	0	0
2018	0	0	0	0
2019	0	0	0	2
2020	1	0	0	0
2021	0	0	0	0

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan data Sakernas tahun 2020, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Batang mencapai 69,78 persen dan 30,22 persen adalah Bukan Angkatan Kerja. Jumlah ini terdiri dari Angkatan Kerja sebanyak 416.576 orang terbagi menjadi penduduk Bekerja 93,08 persen dan Pengangguran 6,92 persen. Jumlah penduduk Bukan Angkatan Kerja sebanyak 180.411 orang, dengan komposisi penduduk sekolah sebanyak 22 persen, mengurus rumah tangga sebanyak 65 persen dan lainnya 13 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka di kabupaten Batang 2021 sebesar 6,59 persen. Kondisi ini lebih baik daripada tahun 2020 dimana tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,92 persen. Banyaknya pengangguran ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya PHK.

Tabel 2. 39

Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Batang (orang)

Tahun	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja Total
2017	365.710	22.597	388.307
2018	389.471	17.199	406.670
2019	385.747	16.755	402.502
2020	387.741	28.835	416.576
2021	402.320	28.370	430.690

Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 71,40 persen dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 40
Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

Tahun	Penduduk 15+ Tahun	Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
2017	573.597	94,18	67,70
2018	580.534	95,77	70,05
2019	586.190	95,84	68,67
2020	586.190	95,84	68,67
2021	603.186	92,46	71,40

Sumber: BPS Kabupaten Batang Tahun 2022

Salah satu penyebab angka pengangguran di Kabupaten Batang adalah jumlah lowongan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 7.234 orang meningkat jumlahnya dari tahun sebelumnya 3.956 orang. Sementara lowongan kerja yang tersedia tahun 2021 sebanyak 2.231 lowongan dimana jumlahnya lebih banyak dibanding tahun 2020 sebanyak 2.141 lowongan. Pada tahun 2021 lowongan untuk perempuan lebih banyak tersedia sejumlah 1.352 posisi dibanding untuk laki laki sebanyak 879 posisi. Jumlah lowongan kerja yang tersedia selama kurun waktu 2017-2021 jumlahnya selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah pencari kerja pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan masih perlunya upaya yang keras untuk memperluas atau menciptakan lapangan kerja baru.

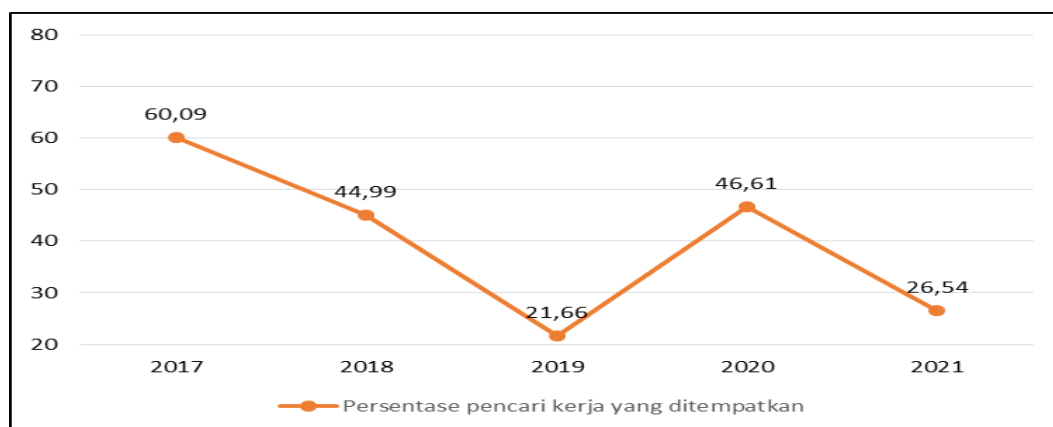
Tabel 2. 41
Jumlah Pencari Kerja dibandingkan Lowongan Kerja
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

Tahun	Pencari Kerja Terdaftar	Lowongan Kerja
2017	4.802	1.878
2018	4.979	2.714
2019	5.327	1.649
2020	3.956	2.141
2021	7.234	2.231

Sumber: Kabupaten Batang Dalam Angka, 2022

Sedangkan persentase pencari kerja yang ditempatkan dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi, yaitu sebesar 60,09% pada tahun 2017, terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 menjadi 21,66%, yang salah satunya faktor penyebabnya adalah Kabupaten Batang telah memasuki bonus demografi sehingga jumlah angkatan kerja terus mengalami kenaikan, sementara lowongan kerja yang tersedia tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 46,61%, namun kembali turun di angka 26,54% di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menciptakan maupun menambah lapangan kerja baru serta penyiapan kapasitas SDM sesuai keahlian yang dibutuhkan melalui pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja perlu adanya perbaikan.

Gambar 2. 85
Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan
di Kabupaten Batang (orang) Tahun 2017-2021



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kab. Batang, 2022

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan produktivitas masyarakat adalah melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu upaya untuk menghadapi bonus demografi karena sebesar 57,27% penduduk produktif di Kabupaten Batang adalah perempuan. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Batang jika dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dalam kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi menurun, di tahun 2017 sebesar 1,21%, pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,2%. Sedangkan persentase perempuan di lembaga legislatif dalam periode tahun 2017-2018 tetap sebesar 20%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2021 turun menjadi 15,56%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta meningkat dari tahun 2018 sebesar 35,58% menjadi 37,27% di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 5,28% disebabkan oleh metode penghitungan yang berubah, namun terdapat kenaikan pada tahun 2021 menjadi 5.8%. Mulai tahun 2020 dihitung berdasarkan jumlah perempuan yang bekerja di sektor formal saja sedangkan tahun-tahun sebelumnya penghitungan mencakup sektor formal dan non formal.

Tabel 2. 42
Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan, swasta dan
legislatif Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

Tahun	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	Partisipasi perempuan di lembaga swasta(%)	Perempuan di lembaga legislatif (%)
2017	1.21	278.818	20
2018	2.25	95.58	20
2019	2.08	97.92	15.56
2020	2.03	5.28	15.56
2021	2.2	5.8	15.56

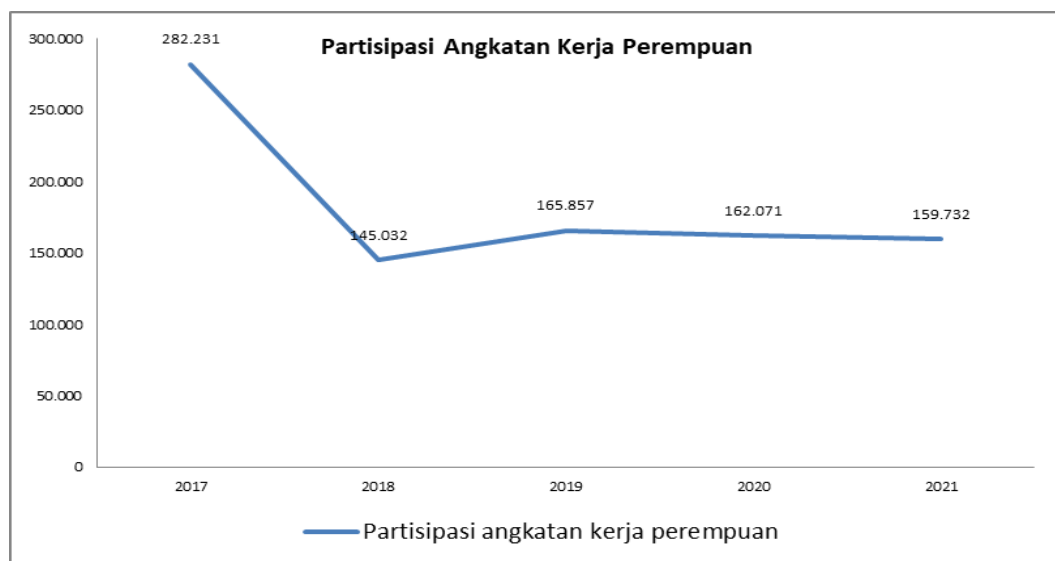
Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Batang selama

periode lima tahun terakhir (2017-2021) fluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 282.2521 orang turun menjadi sebesar 145.75032 orang pada tahun 2018, kemudian ada kenaikan kecil menjadi 165.857 di tahun 2019, namun kemudian terus mengalami penurunan menjadi 159.732 orang pada tahun 2021.

Gambar 2. 86

Partisipasi angkatan kerja perempuan (orang)



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022

Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan dengan peningkatan pemenuhan hak anak meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Ukuran keberhasilan upaya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Beberapa upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator Kabupaten Layak Anak adalah adanya aturan tentang ruang atau area tanpa asap rokok, serta kerjasama antara DP3AP2KB dengan Dinas Perhubungan melalui pemasangan rambu-rambu Zona Selamat Sekolah, serta mewujudkan Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak. Meskipun capain indikator Kabupaten Layak Anak belum semua terpenuhi tetapi Pemerintah Kabupaten Batang sudah menerbitkan aturan mengenai perlindungan anak, yaitu Perda Nomor 11

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang untuk mewujudkan KLA juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Kecamatan Ramah Anak dari 3 kecamatan ramah anak pada tahun 2018 menjadi 6 kecamatan ramah anak pada tahun 2019, dan meningkat menjadi 9 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Batang.

Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Batang pada periode 2017-2021 masih cenderung meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020, yaitu sebanyak 20 kasus naik menjadi 49 kasus pada tahun 2020. Namun, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 23 kasus.

Tabel 2. 43
Perkembangan Kasus Kekerasan terhadap anak
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

No	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Seksual	15	10	17	21	12
2	Eksplorasi	-	-	-	-	-
3	KDRT	4	10	7	6	-
4	Penelantaran	-	-	2	2	3
5	TPPO	1	-	-	-	-
6	ABH	-	3	5	20	8
	Jumlah	20	23	31	49	23

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022

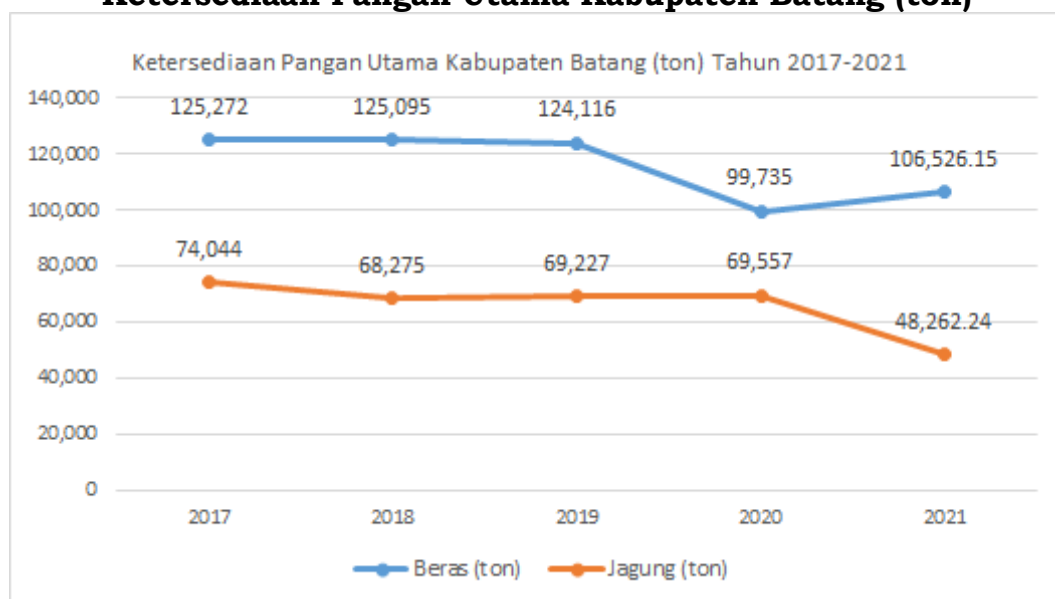
3. Pangan

Pelayanan urusan pangan Tahun 2017 – 2021 dilakukan melalui aspek: ketersediaan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan dan manajemen ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Batang masih di dominasi oleh beras dan jagung. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ketersediaan beras cenderung fluktuatif yaitu sebanyak 125.272 ton pada tahun 2017, tahun 2017-2020 mengalami penurunan namun tidak

terlalu signifikan yaitu dari 125.272 ton pada tahun 2017 menjadi 99.735 ton pada tahun 2019. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan ketersediaan beras menjadi 106.526 ton. Penurunan signifikan pada tahun 2020 ini disebabkan karena adanya krisis pangan akibat kebijakan karantina wilayah (PSBB) yang disebabkan oleh pandemic Covid 19 sehingga menyebabkan terganggunya produksi, rantai pasok dan distribusi bahan pangan namun sudah mengalami pemulihan ketersediaan pada tahun 2021 yang menandakan bahwa kondisi sudah mulai normal kembali. Sedangkan pada ketersediaan jagung menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun 2017 – 2021. Dimana penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 48.262 ton jagung yang semula sebanyak 69.557 ton pada tahun 2019.

Gambar 2. 87
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Batang (ton)

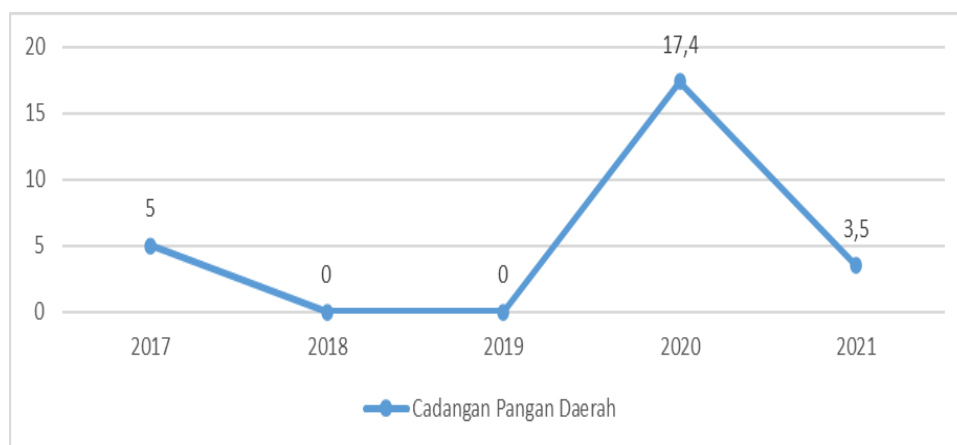


Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2022

Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan mencapai 100% dalam periode 2017-2021. Penyediaan informasi ini merupakan salah satu upaya yang bersifat antisipatif yaitu dengan melakukan pemantauan untuk meninjau ketersediaan produksi di tingkat produsen maupun bersifat responsif yang didukung sistem distribusi yang efektif dan efisien sehingga menciptakan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

Cadangan pangan daerah digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di wilayah kabupaten Batang akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya. Cadangan pangan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 2017-2021 berfluktuasi menurun dari sebesar 5 ton pada tahun 2017, menjadi 3,5 ton pada tahun 2021. Hal ini disebabkan cadangan pangan berupa gabah yang memiliki masa simpan tertentu, sehingga Pemerintah Kabupaten Batang tidak setiap tahun membeli gabah baru, tetapi menghabiskan dulu stok yang masih ada. Pada akhir tahun 2018 cadangan pangan 0 karena sisa cadangan pangan tahun 2017 sebesar 5 ton sudah disalurkan pada pertengahan tahun 2018. Namun tahun 2020 cadangan pangan daerah kembali naik menjadi 17,4 ton. Pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 3,5 ton dikarenakan Tidak ada kegiatan yang menunjang pengadaan cadangan pangan karena menghabiskan stok cadangan pangan yang masih ada dari tahun sebelumnya. Kedepan Pemerintah Daerah akan tetap memperhatikan alokasi cadangan pangan daerah untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak terduga.

Gambar 2. 88
Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Batang (ton)

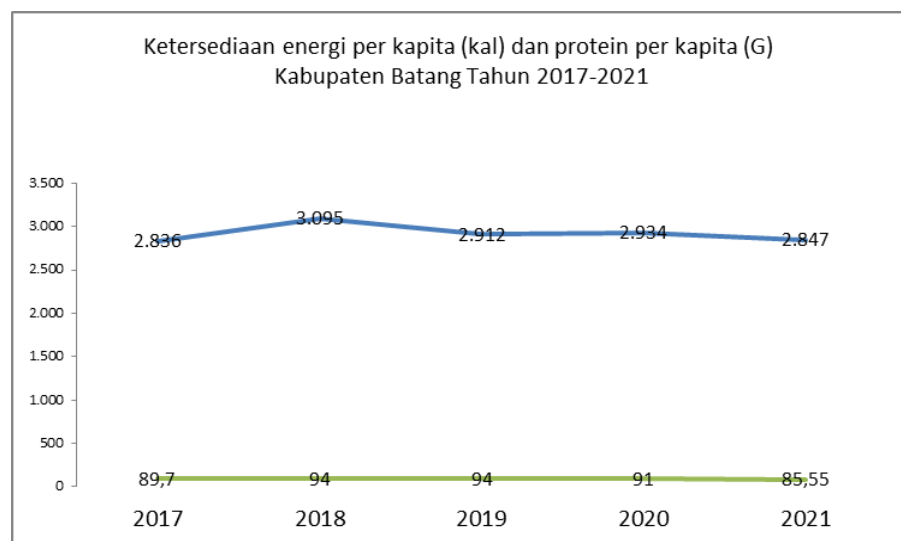


Sumber: Disaperta Kabupaten Batang Tahun 2022

Ketersediaan energi per kapita Kabupaten Batang dalam periode 2017-2021 juga fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, tahun 2017 sebesar 2836 kal naik menjadi 2934 kal pada tahun 2020. Dan

kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 2847 kal. Demikian juga dengan ketersediaan protein per kapita yang cenderung berfluktuasi menurun dari 89,7 G di tahun 2017 menjadi 85,5 G di tahun 2021. Namun meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka capaian ini masih melebihi dari angka yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam jumlah yang cukup dan aman.

Gambar 2. 89
Ketersediaan energi per kapita (kal) dan protein per kapita (G)

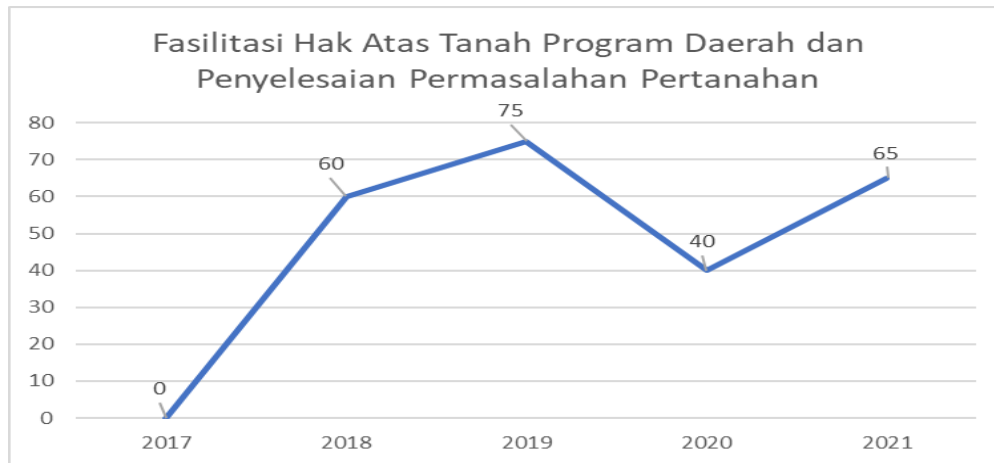


Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang Tahun 2022

4. Pertanian

Pelayanan urusan pertanahan tahun 2017 – 2021 dilakukan melalui fasilitasi hak atas tanah dan penyelesaian permasalahan pertanahan. Dalam periode tahun 2017-2021 terdapat fluktuasi capaian, pada tahun 2017-2019 terjadi kenaikan yang signifikan dari 0% menjadi 75%. Kemudian pada tahun 2020 terdapat penurunan menjadi 40% dan kenaikan menjadi 65% pada 2021. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kasus tanah desa yang prosesnya masih berjalan dan belum selesai sampai akhir tahun.

Gambar 2. 90
Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian
Permasalahan Pertanahan
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Batang meningkat dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2016 seluas 0,52 persen meningkat menjadi 4,85 persen di tahun 2020.

Gambar 2. 91
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Batang



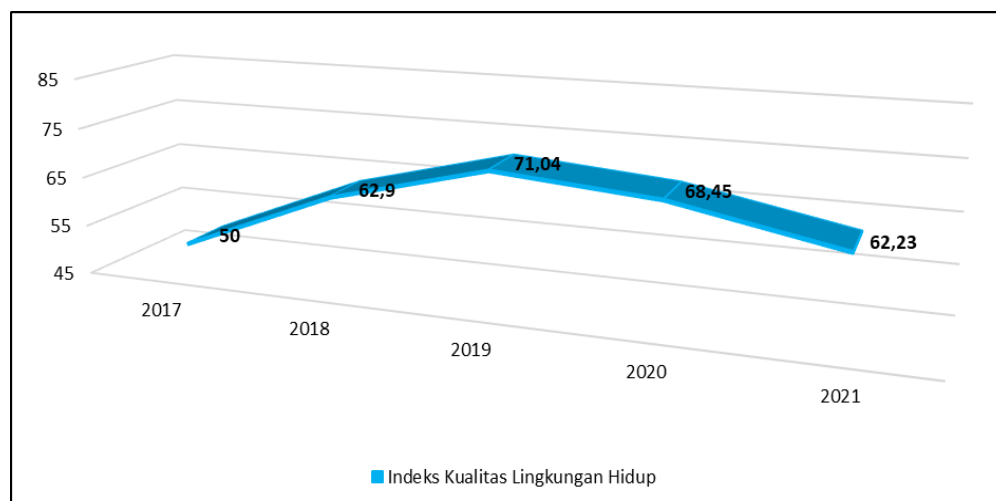
Sumber: DPRKP Kabupaten Batang Tahun 2022

5. Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, mengingat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat mempunyai dampak cukup besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi

lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Pencemaran Air, Indeks Kualitas Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang selama periode 2017-2021 meningkat yaitu dari 50 di tahun 2017 naik menjadi 71,04 pada tahun 2019. Namun tahun 2020 menurun menjadi 68,45 dan tahun 2021 kembali turun menjadi 62,23. Hal ini mengindikasikan terjadi penurunan kualitas lingkungan namun masih dalam kategori cukup baik. Pembangunan kawasan industri baru dan pembukaan lahan di daerah Batang bagian selatan mempengaruhi indeks kualitas lingkungan hidup. Walaupun dapat dikatakan cukup berhasil, namun diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan agar keberlanjutan dapat dipertahankan.

Gambar 2. 92
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang

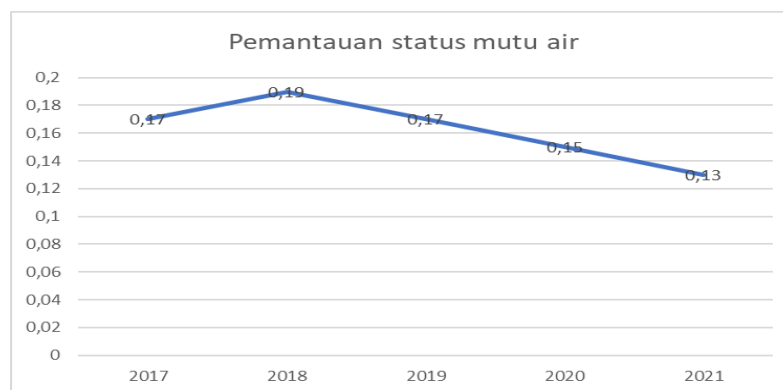


Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2022

Jika dilihat dari salah komponen pembentuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu Indeks Kualitas Air, maka dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Air di Kabupaten Batang berdasarkan hasil pemantauan status mutu air dalam periode tahun 2017-2021 berada pada rentang $0 \leq IP \leq 1$, yaitu 0,17 pada tahun 2017 kemudian naik menjadi 0,19 namun

terus menurun hingga menjadi 0,13 pada tahun 2021 yang artinya kualitas air masih memenuhi baku mutu dalam kondisi baik. Namun harus ada upaya peningkatan kinerja lingkungan hidup untuk mempertahankan kualitas air.

Gambar 2. 93
Indeks Kualitas Air Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

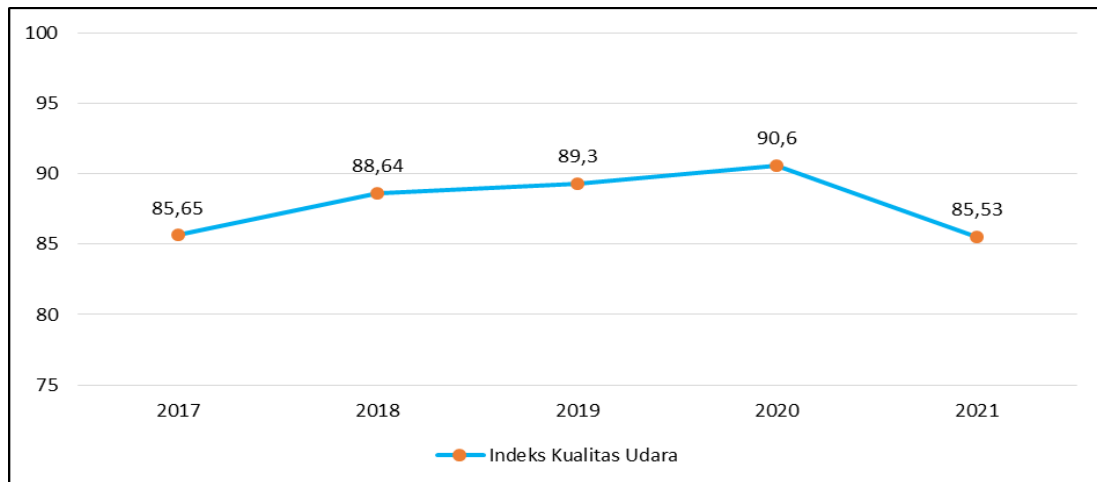


Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2022

Demikian juga untuk Indeks Kualitas Udara juga terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 85,65 meningkat menjadi 90,6 di tahun 2020 dan mengalami penurunan kualitas pada tahun 2021 menjadi 85,53, yang mengindikasikan terjadinya penambahan pencemaran udara terutama di kawasan peruntukan industri dan daerah padat penduduk. Walaupun kualitas udara di Kabupaten Batang masih tergolong baik namun diperlukan upaya-upaya peningkatan kinerja untuk mempertahankan kualitas udara.

Gambar 2. 94
Indeks Kualitas Udara Kabupaten Batang

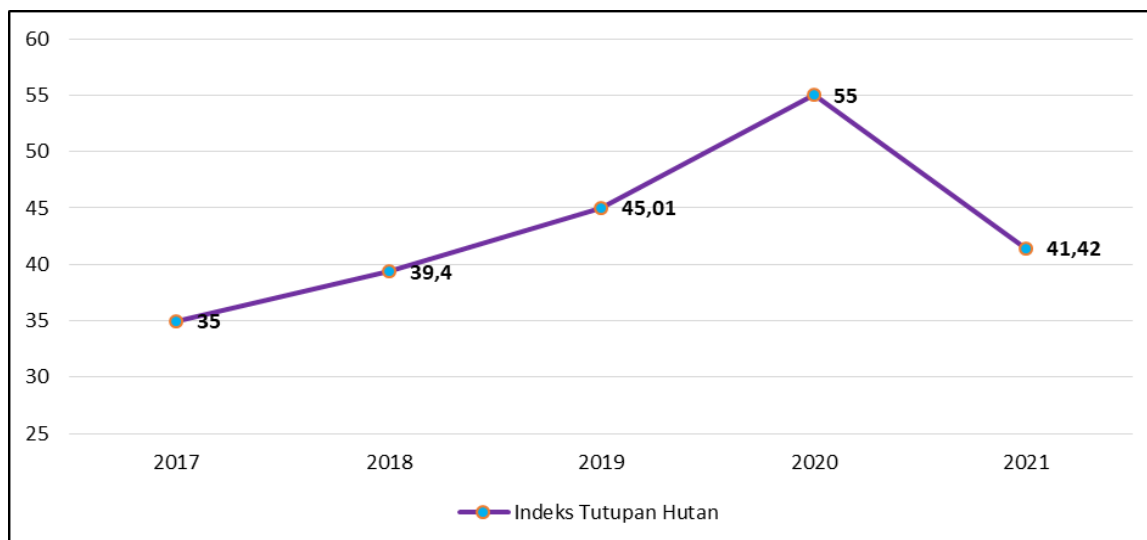
Tahun 2017-2021



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2022

Indeks Kualitas Tutupan Lahan merupakan penyempurnaan dari Indeks Tutupan Hutan. Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai kawasan lindung, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan di Kabupaten Batang terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 35 persen menjadi 55 persen di tahun 2021.

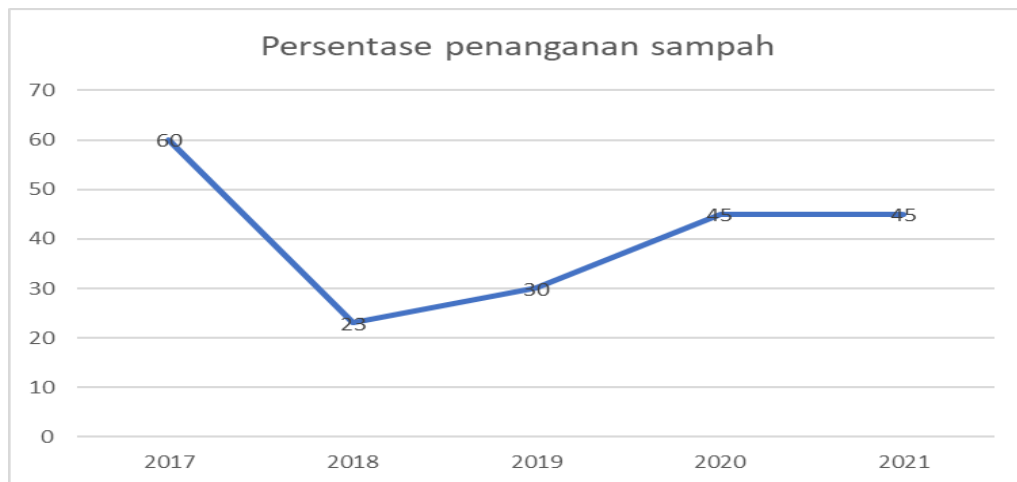
Gambar 2. 95
Indeks Tutupan Hutan Kabupaten Batang (%)



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2022

Salah satu penyebab ketidakseimbangan lingkungan hidup adalah sampah yang tidak ditangani dengan baik. Bukan hanya mengganggu keseimbangan lingkungan saja, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan juga sosial ekonomi masyarakat. Upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menangani masalah persampahan dapat dilihat dari kinerja penanganan sampah di Kabupaten Batang yang terus meningkat selama lima tahun terakhir (2017-2021), dari 20% sampah yang tertangani di tahun 2017 meningkat menjadi 45% di tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa pembentukan bank sampah, pembuatan TPS composting dan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya untuk menangani masalah persampahan cukup berhasil. Namun demikian, capaian penanganan sampah di Kabupaten Batang masih belum mencapai 50% karena itu kedepan upaya penanganan sampah terutama pembangunan TPA dan TPST baru perlu segera dilaksanakan karena daya tampung TPA Randukuning sudah overload.

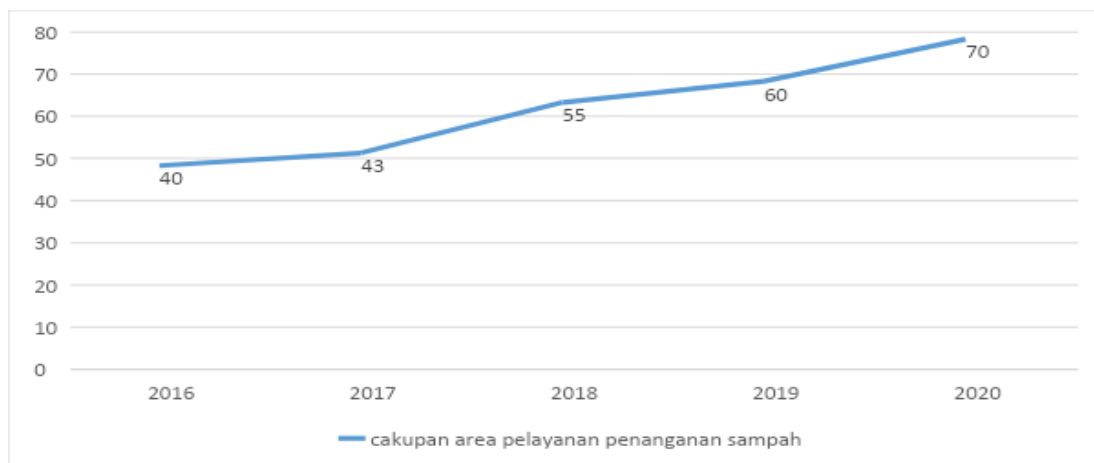
Gambar 2. 96
Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Batang



Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2022

Cakupan area pelayanan penanganan persampahan juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 seluas 43% menjadi 70% di tahun 2020.

Gambar 2. 97
Cakupan Area Pelayanan Penanganan Sampah
Kabupaten Batang Tahun 2016-2020

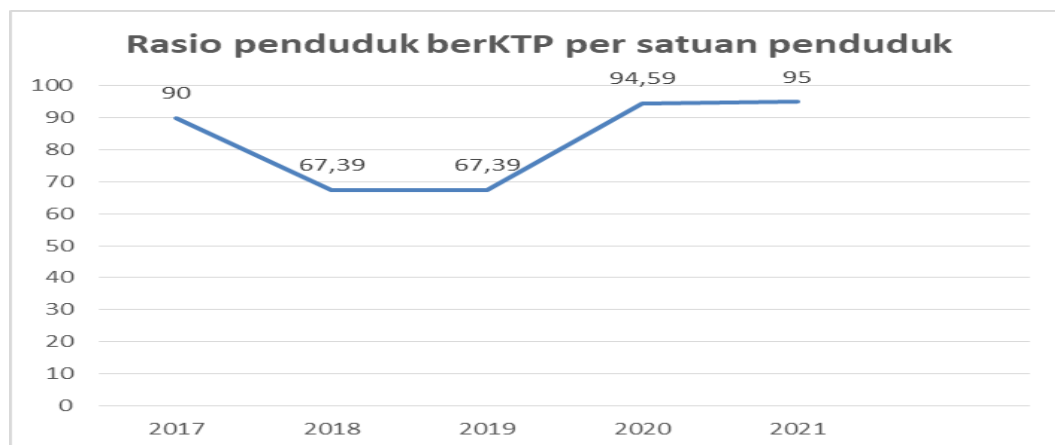


Sumber: DLH Kabupaten Batang Tahun 2022

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio kepemilikan eKTP berfluktuasi naik pada periode 2017-2021, tahun 2017 sebesar 90 persen turun menjadi 67,39 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019, meskipun kemudian terus ada kenaikan hingga tahun 2021 menjadi sebesar 95 persen. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan cukup signifikan yang disebabkan karena terdapat hambatan dalam pendistribusian blanko KTP dari pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya percepatan dalam proses perekaman dan penerbitan eKTP telah berjalan dengan baik meskipun capaiannya masih perlu ditingkatkan lagi.

Gambar 2. 98
Rasio Penduduk ber KTP elektronik Kabupaten Batang (%)



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2022

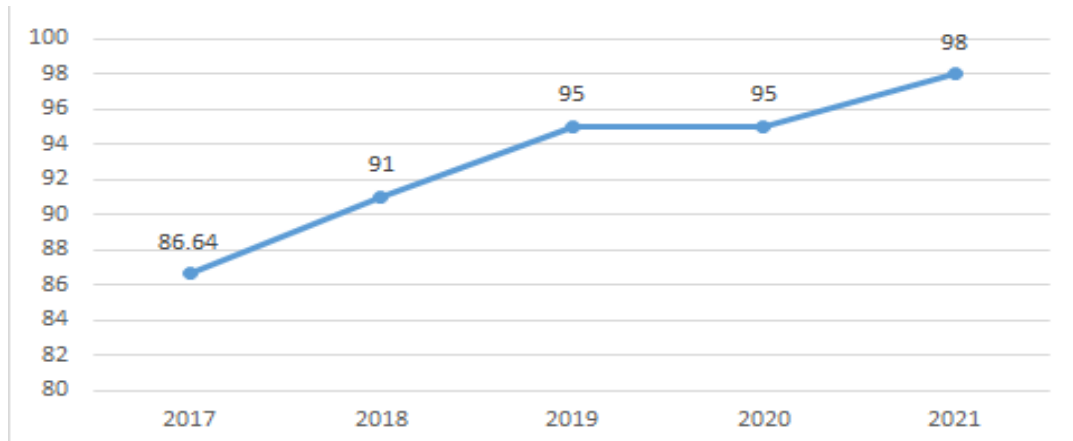
Kepemilikan akta kelahiran dalam periode lima tahun terakhir mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2017 sebesar 86,64 persen menjadi sebesar 98 persen pada tahun 2021. walaupun sebelumnya terdapat stagnasi pada tahun 2019-2020 di angka 95 persen.

Sedangkan kepemilikan akta kematian terus meningkat pada periode lima tahun terakhir. Dari sebesar 28,35 persen pada tahun 2017 naik menjadi 85 persen pada tahun 2021. Walaupun sebelumnya terdapat stagnasi pada tahun 2018-2020 di angka 78,91 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat mengenai administrasi mulai meningkat namun kedepan perlu dilakukan upaya untuk

meningkatkan diantaranya melalui sosialisasi dan meningkatkan pelayanan jemput bola ke desa/kelurahan.

Gambar 2. 99

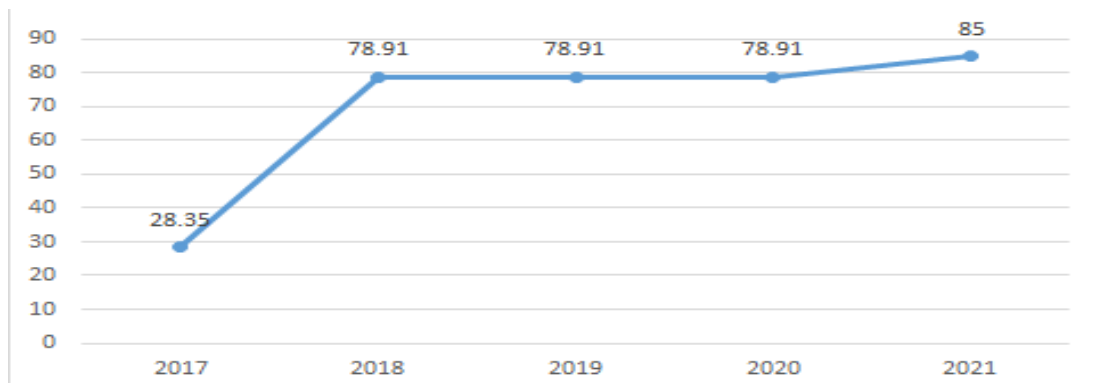
Rasio bayi berakta kelahiran Kabupaten Batang (%)



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2022

Gambar 2. 100

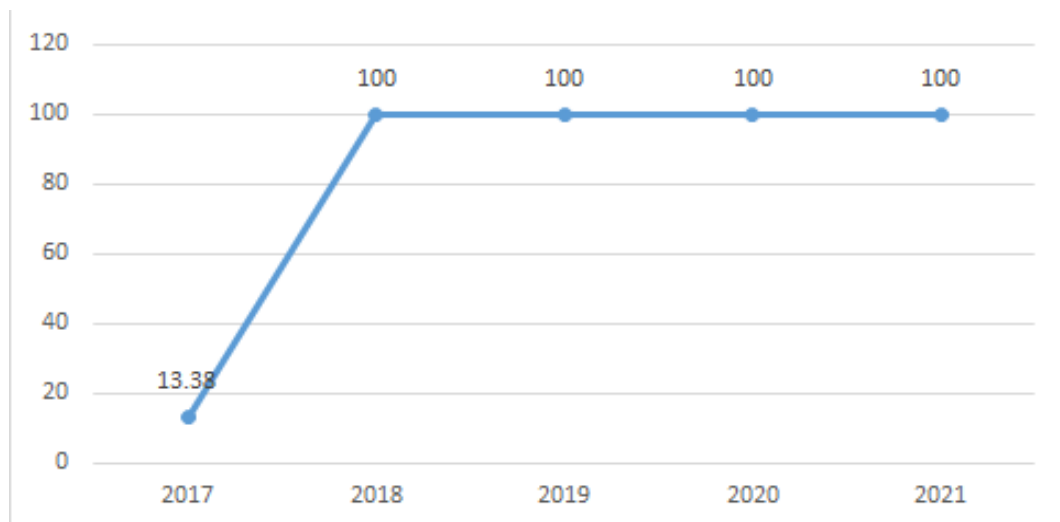
Rasio Akta Kematian Kabupaten Batang



Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan untuk kepemilikan akta nikah, dalam periode empat tahun terakhir semua pasangan di Kabupaten Batang sudah memiliki akta nikah (100%), walaupun pada tahun 2017 tercatat hanya sebesar 13,38% kepemilikan akta nikah.

Gambar 2. 101
Rasio Pasangan Berakta Nikah Kabupaten Batang (%)



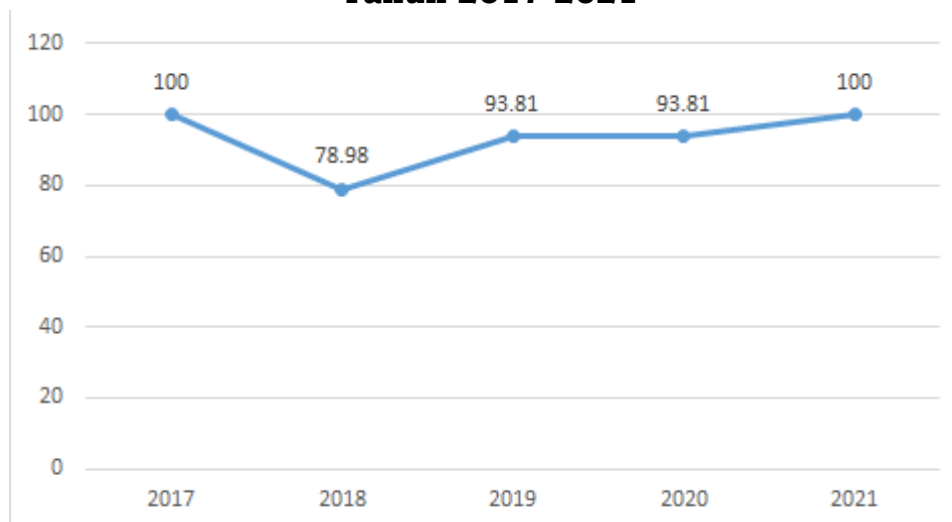
Sumber: Disdukcapil Kabupaten Batang Tahun 2022

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa lembaga kemasyarakatan dan penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan melalui pembinaan kelompok oleh LPM. Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM dari tahun 2016-2018 sebanyak 5 kelompok dan meningkat pada tahun 2018 dan 2019 menjadi 6 kelompok.

Persentase PKK Aktif dalam periode tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi turun naik. dari 100% pada tahun 2017 menurun menjadi 78,98% pada tahun 2018, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 menjadi 100% kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan melalui pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan yang selama ini kurang aktif.

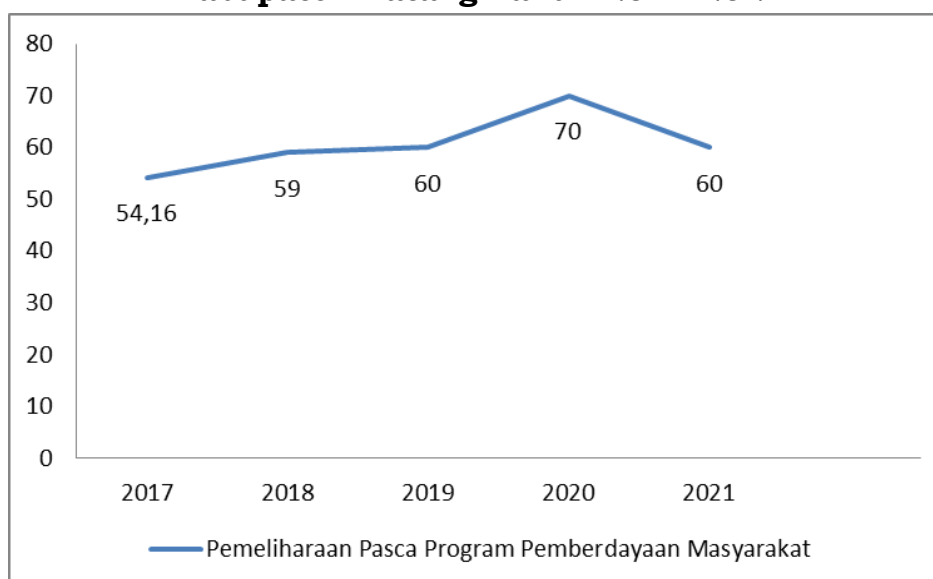
Gambar 2. 102
Persentase PKK Aktif Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021



Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2022

Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat selama periode 2017-2021 berfluktuasi naik turun, pada tahun 2017 sebesar 54,16 persen naik menjadi 70 persen pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 60%. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.

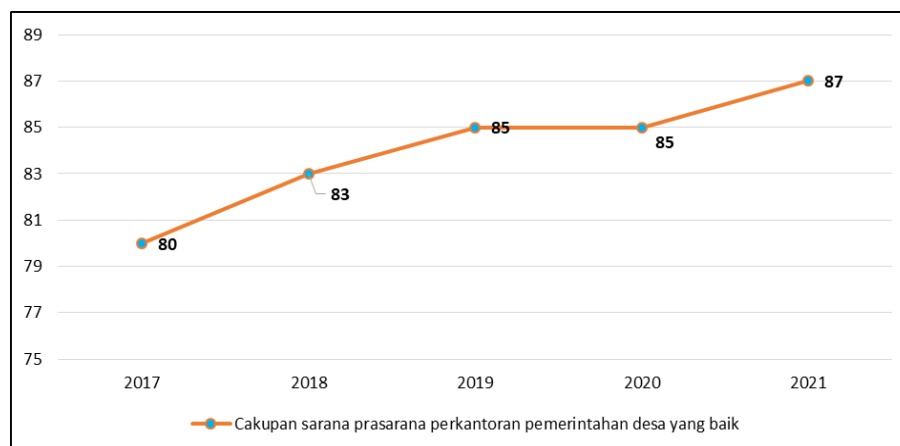
Gambar 2. 103
Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2022

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik juga mengalami peningkatan selama periode 2017-2021. Tahun 2017 sebesar 80 persen meningkat menjadi 87 persen di tahun 2021. Peningkatan ini karena upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dengan meningkatkan pengadaan sarpras desa didukung dengan bantuan keuangan khusus serta Dana Bagi Hasil Pajak.

Gambar 2. 104
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa
yang baik Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

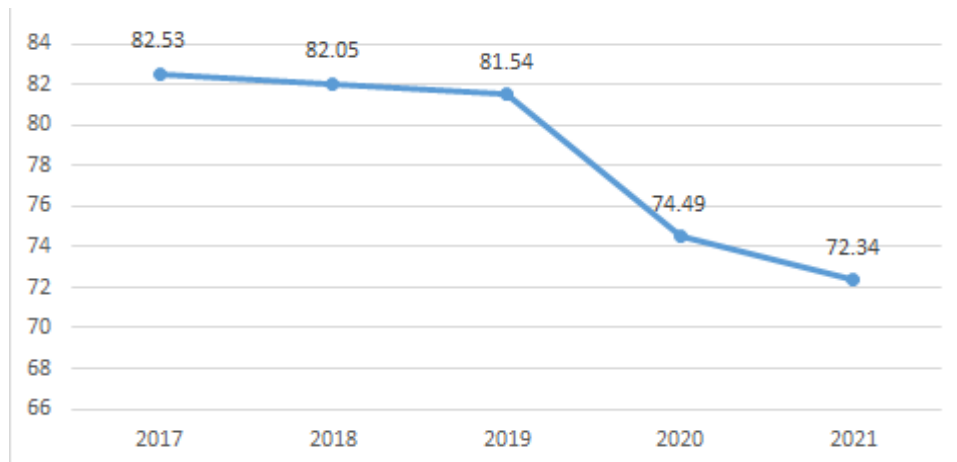


Sumber: Dispermades Kabupaten Batang Tahun 2022

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tingginya laju pertumbuhan penduduk disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan hasil-hasil pembangunan kurang bisa dirasakan masyarakat dan menjadi beban berat bagi pembangunan selanjutnya. Salah satu upaya menurunkan tingkat kelahiran dilaksanakan melalui program keluarga berencana, diantaranya yaitu dengan mengajak Pasangan Usia Subur (PUS) agar memakai alat kontrasepsi. Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Batang berfluktuasi menurun dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar 82,53% persen mengalami penurunan di tiap tahun menjadi 72,34% pada tahun 2021.

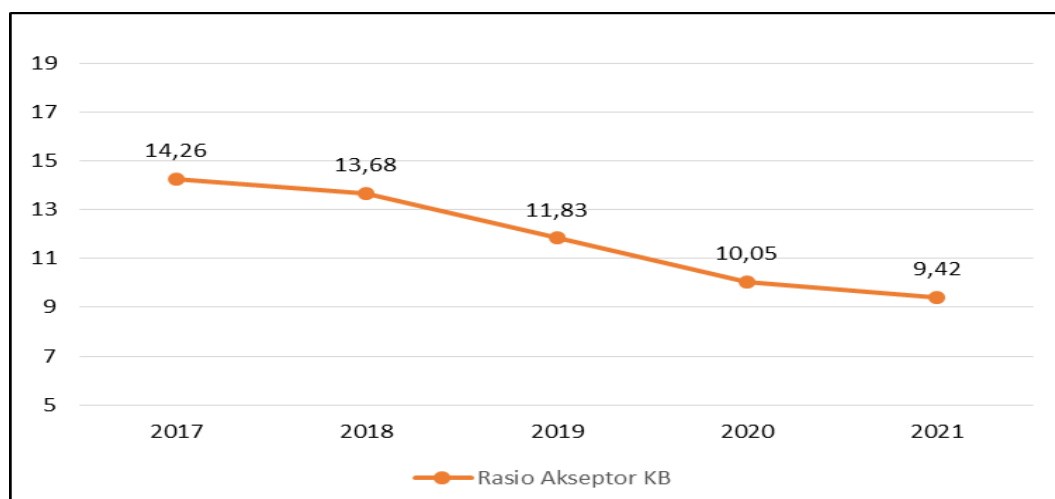
Gambar 2. 105
Cakupan PUS yang menjadi peserta KB aktif
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022

Demikian juga, akseptor KB pada kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan tiap tahunnya, tahun 2017 sebesar 14,26 persen, tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 9,42 persen di tahun 2021.

Gambar 2. 106
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

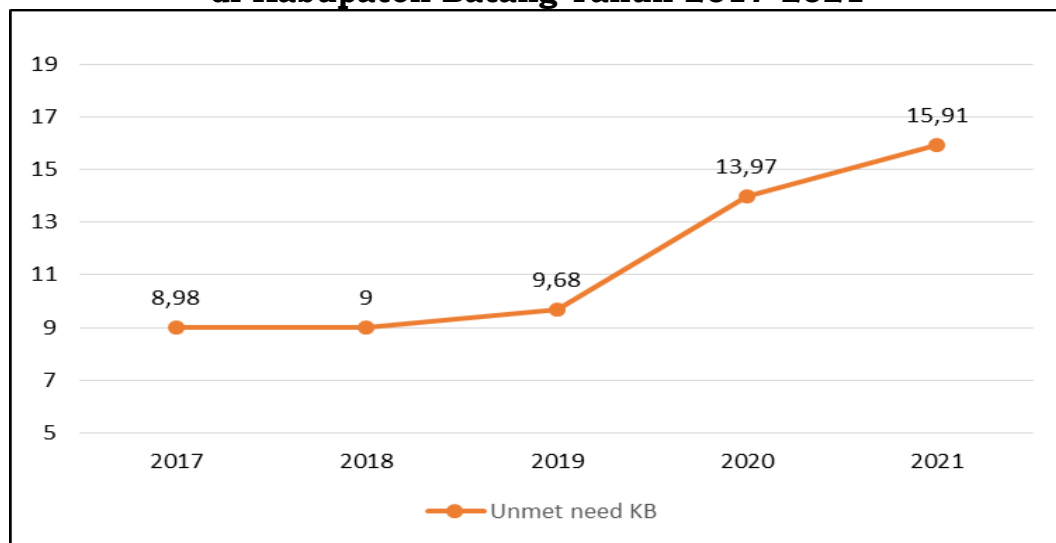


Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB (unmetneed KB) dari tahun 2017 – 2021 secara umum mengalami tren peningkatan, dari sebesar 8,98% di tahun 2017

menjadi 15,91% di tahun 2021. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi unmetneed KB antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase unmetneed KB nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.

Gambar 2. 107
Unmetneed KB (%)
di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Batang Tahun 2022

9. Perhubungan

9.1. Perkeretaapian

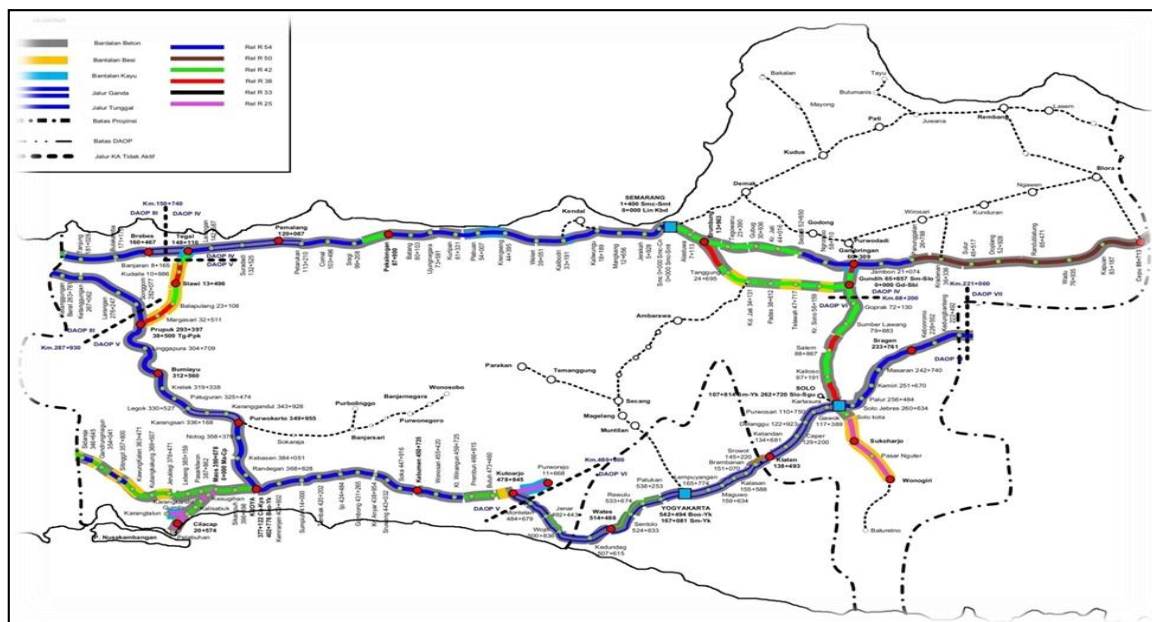
Untuk wilayah di Batang terdapat jaringan rel kereta api aktif digunakan sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang sehingga mengurangi beban lalu lintas di jalan raya berkurang. Jika distribusi barang utamanya untuk jarak sedang dan jauh dapat dilayani dengan jaringan rel kereta api dapat menurunkan biaya logistik sehingga daya saing daerah akan meningkat.

Total panjang jalur kereta api di Batang sampai dengan tahun 2021 sepanjang 41 km/sp, jalur rel aktif/operasional. 5 stasiun dengan perincian 1 stasiun (Batang Baru) berfungsi sebagai stasiun operasional dan komersial dan 4 stasiun (Ujungnegoro, Kuripan, Plabuan dan Krengseng) berfungsi sebagai stasiun operasional. Posisi Batang yang

sangat strategis karena berada jalur utara pulau jawa (Jakarta - Surabaya), sehingga jalur rel di Batang cukup padat, dan kondisi rel ganda kereta api (*double track*) pada Lintas Utara cukup baik dalam keselamatan perjalanan kereta api.

Gambar 2. 108

Jaringan Jalan Rel Kereta Api di Jawa Tengah



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2019

Di Batang terdapat 22 titik perlintasan jalur kereta api dengan jalan, sebanyak 14 perlintasan jalur kereta api sudah di bangun pos dan dilengkapi dengan palang pintu serta petugas, 8 perlintasan kereta api dengan jalan belum dibangun pos, belum dilengkapi dengan palang pintu serta petugas. 14 perlintasan yang telah dilengkapi dengan pos, palang pintu serta petugas karena LHR-nya rata-rata mencapai 2.500/jam, sehingga rawan dengan kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2. 44

**Persebaran Perlintasan Jalan Kabupaten Batang
dengan Rel Kereta Api Tahun 2021**

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Penjagaan	Kelengkapan
1.	Kebondalem – Weleri	78	41+167	Dijaga	Berpalang Pintu
2.	Krengseng	79	44+195	Dijaga	Berpalang Pintu

No	Jalan / Daerah	JPL	KM	Penjagaan	Kelengkapan
3.	Krengseng	80	44+620	Dijaga	Berpalang Pintu
4.	Krengseng	-	45+486	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
5.	Krengseng	80A	47+818	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
6.	Kuripan	-	56+461	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
7.	Kuripan	83	60+893	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
8.	Kuripan	83A	61+280	Tidak Dijaga	Berpalang Pintu
9.	Ujungnegoro	-	67+718	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
10	Ujungnegoro	84	73+241	Dijaga	Berpalang Pintu
11	Ujungnegoro	85	75+608	Dijaga	Berpalang Pintu
12	Batang	86	77+478	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
13	Batang	87	78+351	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
14	Batang	88	78+920	Dijaga	Berpalang Pintu
15	Batang	88A	79+455	Tidak Dijaga	Tidak Berpalang Pintu
16	Batang	89	79+609	Dijaga	Berpalang Pintu
17	Batang	90	79+943	Dijaga	Berpalang Pintu
18	Batang	91	80+287	Dijaga	Berpalang Pintu
19	Batang	93	80+652	Dijaga	Berpalang Pintu
20	Batang	94	81+504	Dijaga	Berpalang Pintu
21	Batang	95	81+961	Dijaga	Berpalang Pintu
22	Batang	95A	82+736	Dijaga	Berpalang Pintu

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2022

9.2. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

Terminal angkutan merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra

dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Terminal tipe A yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat merupakan terminal induk yang berfungsi melayani kendaraan umum secara nasional seperti angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Terminal tipe B atau terminal regional merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Sedangkan Terminal tipe C atau sub-terminal merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang berfungsi melayani kendaraan umum kelas kecil seperti angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Pada Tahun 2022 terdapat 2 terminal tipe B, 9 terminal tipe C, dan 2 pangkalan truk namun salah satu pangkalan truk sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center. Terminal tipe B yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Blado dan Kecamatan Banyuputih, sedangkan terminal tipe C yang berada di Kabupaten Batang tersebar di Kecamatan Batang, Kecamatan Bandar, Kecamatan Bawang, Kecamatan Blado, Kecamatan Limpung, Kecamatan Plelen, Kecamatan Reban, Kecamatan Subah, dan Kecamatan Tersono. Kemudian untuk pangkalan truk yang ada di Kabupaten Batang berada di Kecamatan Banyuputih yaitu Pangkalan Truk Penundan dan Pangkalan Truk Petamanan, namun Pangkalan Truk Petamanan ini sudah dialihfungsikan menjadi Islamic Center.

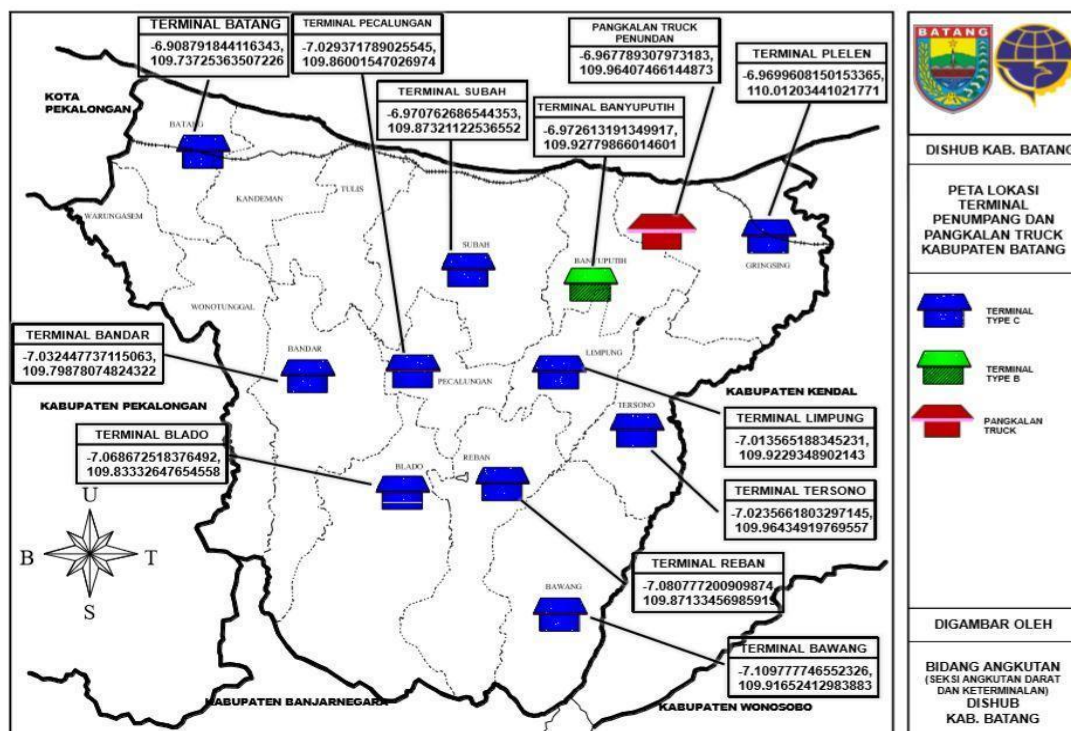
Tabel 2. 45
Persebaran Terminal Tipe B, C, dan Pangkalan Truk
di Kabupaten Batang Tahun 2022

No	Nama Terminal	Type Terminal	Jenis Terminal	Lokasi
1	Terminal Blado	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Blado
2	Terminal Banyuputih	Terminal Type B	Terminal Angkutan Umum	Banyuputih
3	Terminal Batang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Batang

No	Nama Terminal	Type Terminal	Jenis Terminal	Lokasi
4	Terminal Bandar	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bandar
5	Terminal Bawang	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Bawang
6	Terminal Blado	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	BLado
7	Terminal Limpung	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Limpung
8	Terminal Pelen	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Pelen
9	Terminal Reban	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Reban
10	Terminal Subah	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Subah
11	Terminal Tersono	Terminal Type C	Terminal Angkutan Umum	Tersono
12	Pangkalan Truk Penundan (Banyuputih)	Tempat khusus parkir	Pangkalan Angkutan Barang	Banyuputih
	Pangkalan Truk Petamanan (Banyuputih)	(Dialihfungsikan menjadi Islamic Center)		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Gambar 2. 109
Persebaran Terminal Tipe B, Terminal Tipe C dan Pangkalan Truk
di Kabupaten Batang



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2021

Mendasarkan kebutuhan dan rencana tata ruang wilayah pada revisi Perda RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019 – 2039, setidaknya terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Batang yang perlu pembangunan terminal baru tipe C yaitu di Kecamatan Tulis, Kecamatan Warungasem, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Gringsing, dan Kecamatan Pecalungan.

Data jumlah trayek dan jumlah penumpang per hari pada masing-masing Terminal Tipe C di Kabupaten Batang sebagai berikut:

Tabel 2. 46
Data Jumlah Trayek dan Jumlah Penumpang per Hari
di Terminal Tipe C di Kabupaten Batang

NO	TERMINAL TYPE C	JUMLAH TRAYEK YANG MELEWATI	JUMLAH PENUMPANG PER HARI	JUMLAH KIOS/LAHAN/ BANGUNAN
1	TERMINAL BATANG	8	433 Orang	-
2	TERMINAL BANDAR	11	298 Orang	11
3	TERMINAL LIMPUNG	13	460 Orang	1
4	TERMINAL BAWANG	6	352 Orang	54
5	TERMINAL REBAN	3	121 Orang	13
6	TERMINAL SUBAH	3	379 Orang	-
7	TERMINAL TERSONO	5	149 Orang	-
8	TERMINAL BLADO	3	243 Orang	1
9	TERMINAL PLELEN	8	189 Orang	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Kondisi terminal tipe C Kabupaten Batang berdasarkan ketersediaan fasilitas yang meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, fasilitas uji kelayakan kendaraan, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan kelayakan kendaraan, fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan, informasi jadwal dan rute trayek, kantor penyelenggaraan terminal, petugas operasional terminal, ruang/tempat tunggu penumpang, toilet, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, kios, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat awak angkutan, tempat merokok, drainase, lampu penerangan ruangan, lajur kedatangan, lajur keberangkatan, informasi pelayanan, tempat

naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan umum/pribadi dan ruang menyusui masih terdapat *gap* yang cukup besar antara fasilitas yang dibutuhkan dengan fasilitas yang telah tersedia sebagai berikut :

Tabel 2. 47
Data Persandingan Antara Ketersediaan dan Kebutuhan Fasilitas
pada Terminal Tipe C Kabupaten Batang

NO	JENIS FASILITAS	TERMINAL TYPE C								
		BATAN G	BANDA R	LIMPUN G	BAWAN G	REBA N	SUBA H	TERSON O	BLADO	PLELE N
1	DATA PERSANDI NGAN GAP KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN	0,19	0,39	0,61	0,42	0,39	0,29	0,1	0,1	0,32
2	PERSENTASE GAP	19%	39%	61%	42%	39%	29%	10%	10%	32%

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Tabel 2. 48
Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Batang

[illegible]

[illegible]

NO	JENIS FASILITAS	TERMINAL TYPE C								
		BATAN G	BANDA R	LIMPUN G	BAWAN G	REBA N	SUBA H	TERSON O	BLAD O	PLELEN
16	Ruang/Tempat Tunggu Penumpang	-	ada	ada	-	ada	ada	-	-	-
17	Toilet/WC Umum	ada	ada	ada	ada	ada	-	ada	ada	ada
18	Mushola/Sarana Ibadah	-	ada	ada	ada	-	-	-	-	ada
19	Ruang Terbuka Hijau	-	ada	ada	ada	ada	-	-	-	ada
20	Kios/Ruko	-	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-
21	Fasilitas dan Petugas Kebersihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Tempat Istirahat Awak Angkutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Tempat Merokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Drainase	-	-	ada	-	-	-	-	-	-
25	Lampu Penerangan Ruangan	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	-	ada
26	Lajur Kedatangan	-	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada
27	Lajur Keberangkatan	-	ada	ada	ada	ada	ada	-	-	ada
28	Informasi Pelayanan	-	-	ada	-	-	-	-	-	-

NO	JENIS FASILITAS	TERMINAL TYPE C								
		BATAN G	BANDA R	LIMPUN G	BAWAN G	REBA N	SUBA H	TERSON O	BLAD O	PLELEN
29	Tempat Naik Turun Penumpang	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
30	Tempat Parkir Kendaraan Umum/Pribadi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
31	Ruang Ibu Menyusui	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

b) Penyelenggaraan Parkir

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan Parkir Ditepi Jalan Umum terdapat 248 titik parkir dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel 2. 49
Rekapitulasi Data Parkir Per Wilayah
di Kabupaten Batang

No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
1	Wilayah Pasar Pelen	2
2	Wilayah Pasar Banyuputih	1
3	Wilayah Pasar Limpung	41
4	Wilayah Pasar Tersono	6
5	Wilayah Pasar Bawang	9
6	Wilayah Pasar Blado	13
7	Wilayah Pasar Bandar	34
8	Wilayah Pasar Subah	20
9	Wilayah Pasar Warungasem	1

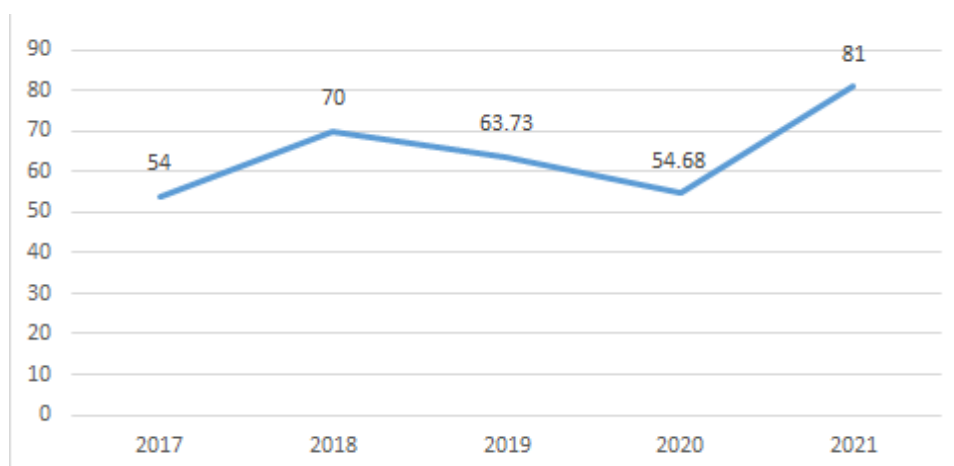
No	Lokasi	Jumlah Titik Parkir
10	Wilayah Pasar Batang bagian dalam	6
11	Wilayah Pasar Batang bagian luar	9
12	Wilayah Kota	94
13	Pujasera	12

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2022

2) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kinerja urusan perhubungan terkait lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya dapat dilihat melalui capaian rasio ijin trayek berfluktuasi meningkat dalam periode 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar 54 persen mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 70, kemudian terdapat penurunan hingga tahun 2020 menjadi 54,68% dan ada kenaikan di tahun 2021 menjadi 81 persen.

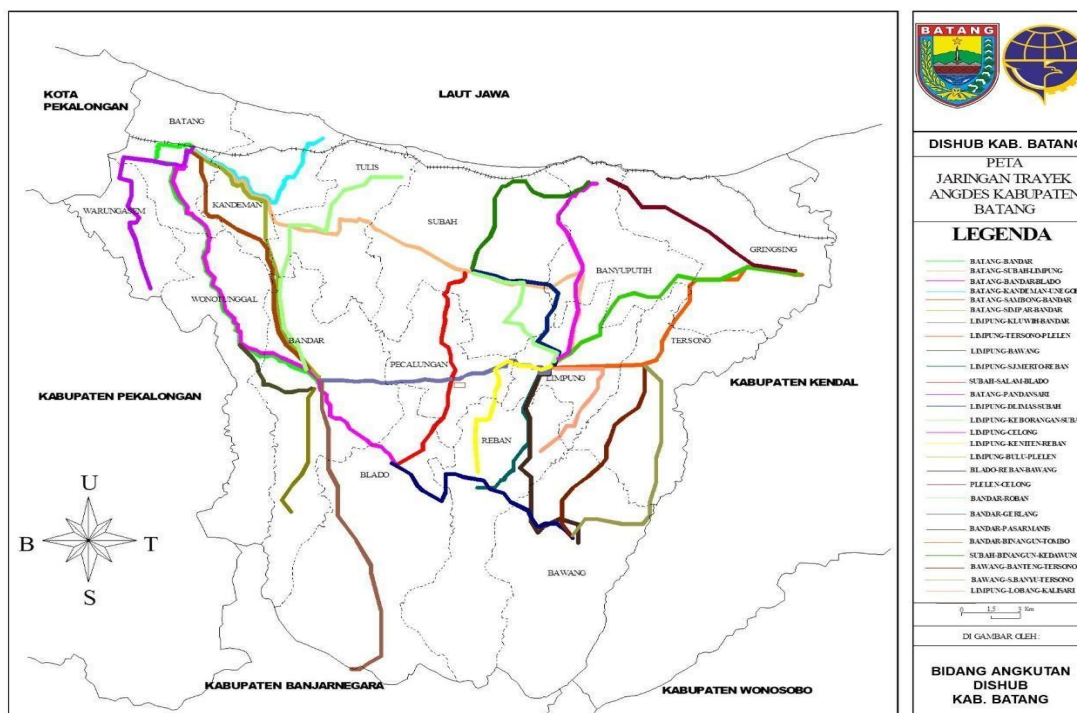
Gambar 2. 110
Rasio Ijin Trayek di Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021



Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2022

Gambar 2. 111

Peta Jaringan Trayek Kabupaten Batang



Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

Gambar 2. 112

Koridor Pelayanan Angkutan Umum Berbasis Jalan di Kabupaten Batang

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
I	Yang Berpusat di Batang			
1	Batang-Wonotunggal-Bandar-Blado PP	Bus 16 Seat	35	8
2	Batang-Tulis-Subah-Banyuputih-Limpung PP	Bus 16 Seat	93	30-35
3	Batang-Wonotunggal-Bandar PP	Bus 12 Seat	43	30-35
4	Batang-Tulis-Botolambat-Sigayam-Simpar-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	12	10
5	Batang-Kandeman-Ujungnegoro PP	Bus 12 Seat	15	25
6	Batang-Sambong-Lawangaji-Botolambat-Pucang Gading-Bandar PP	Bus 12 Seat	2	2

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
7	Batang - Kalisari - Karanganyar - Pesaren - Sidorejo - Pandansari PP	Bus 12 Seat	0	0
II	Yang Berpusat di Lempung			
1	Lempung - Sukorejo - Lobang - Kalisari PP	Bus 12 Seat	0	0
2	Lempung - Tersono - Timbang - Plalen PP	Bus 12 Seat	45	20-25
3	Lempung - Tersono - Sangubanyu - Bawang PP	Bus 12 Seat	0	0
4	Lempung - Tersono - Banteng - Getas - Bawang PP	Bus 12 Seat	0	0
6	Lempung-Tersono-Timbang-Plalen PP	Bus 12 Seat	10	20-25
7	Lempung-Sojomerto-Reban PP	Bus 12 Seat	38	20-25
8	Lempung-Sojomerto-Bawang PP	Bus 16 Seat	10	17
9	Lempung-Kalisalak-Sidomulyo-Salam-Kluwih-Bandar PP	Bus 16 Seat	9	9
10	Lempung-Kalisalak-Dlimas-Petamanan-Subah PP	Bus 12 Seat	4	3
11	Lempung - Banyuputih - Kedawung - Mangunsari (Celong) PP	Bus 12 Seat	0	0
12	Lempung - Sidomulyo - Plaosan - Keniten - Wonosobo - Reban PP	Bus 12 Seat	0	0
III	Yang Berpusat di Bawang			
1	Bawang-Sangubanyu-Tersono PP	Bus 12 Seat	1	2
2	Bawang - Getas - Banteng - Gondo - Rejosari Timur - Tersono PP	Bus 12 Seat		0

No	Jalur Trayek	Kapasitas Tempat Duduk	Jumlah	Jumlah Rata-rata Beroperasi Setiap Hari
IV	Yang Berpusat di Subah			
1	Subah-Selokarto-Bandar PP	Bus 12 Seat	0	7
	Subah - Keboangan - Menjangan - Karang Tengah - Kalisalak - Limpung PP	Bus 12 Seat	5	0
	Subah - Selokarto - Banda PP	Bus 12 Seat	12	0
V	Yang berpusat di Bandar.			
1	Bandar - Binangun - Wonodadi - Tombo PP	Bus 12 Seat	0	0
2	Bandar - Pesalakan - Pasar Manis PP	Bus 12 Seat	0	0
3	Bandar - Kembanglangit - Gerlang PP	Bus 16 Seat	0	0
4	Bandar - Beji - Kenconorejo - Roban PP	Bus 12 Seat	0	0
VI	Yang berpusat di Blado.			
1	Pagilaran - Blado - Reban - Bawang PP	Bus 12 Seat	0	0
2	Blado - Siguci - Salam - Subah PP	Bus 12 Seat	15	0
VII	Yang berpusat di Plelen			
1	Plelen - Sawangan - Ketanggan - Celong PP	Bus 12 Seat	17	10-15

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Batang, 2022

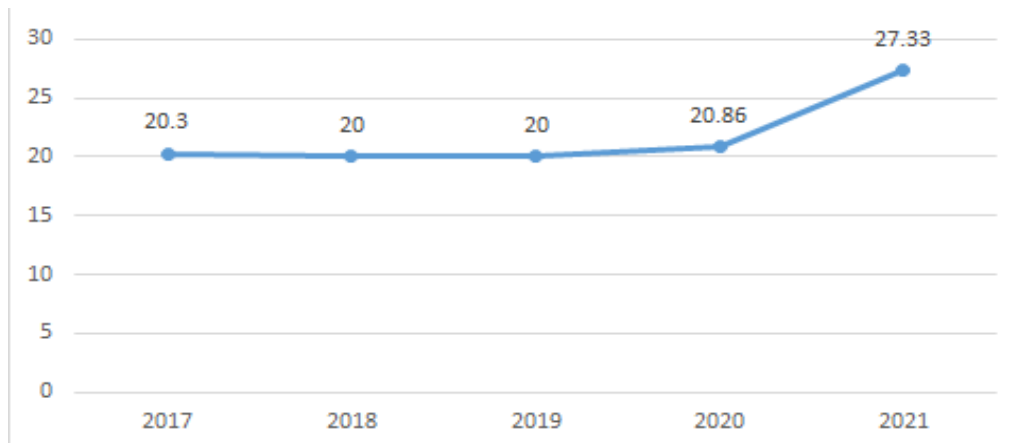
3) Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan

Sedangkan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten diantaranya melalui pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan penerangan jalan umum. Pemasangan rambu-rambu dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari 20,3 persen pada tahun 2017 hingga menjadi 27,33 persen pada tahun 2021. Namun demikian, kedepan masih perlu ditingkatkan, karena meskipun terus

meningkat namun capaian tersebut masih di bawah 50%, terlebih ini berkaitan dengan keselamatan jalan.

Tabel 2. 50

Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Batang



Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2022

Tabel 2. 51

Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang di Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang (titik)	34.132	35.832	38.732	40.093	58.341
2.	Tambahan LPJU Terpasang	1.986	1.700	2.900	1.360	8.714
3.	Prosentase fasilitas perlengkapan jalan (LPJU) terpasang	35,92%	37,72%	40,77%	42,20%	64,34%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2022

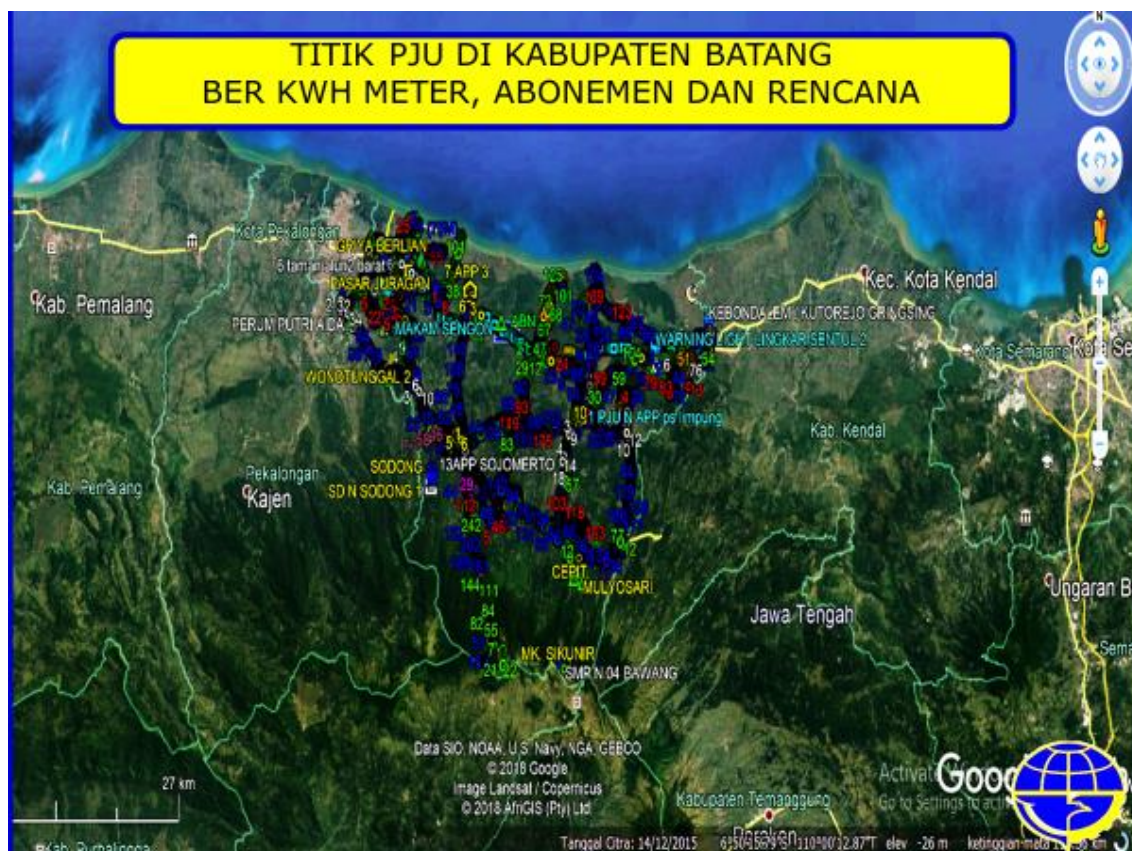
Meskipun jumlah fasilitas perlengkapan jalan terpasang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, namun jumlah tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing ruas jalan.

Tabel 2. 52
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang Berdasar Ruas Jalan
di Kabupaten Batang

No	Nama Ruas	Panjang (KM)	Kebutuhan PJU (Titik)	Ada Terpasang	Selisih Kurang	%
1.	JALAN NASIONAL	52.839	2.043	736	1.307	36,03
2.	JALAN PROVINSI	87.555	1.752	578	1.174	32,99
3.	JALAN KABUPATEN	521.181	10.424	1.994	8.430	19,13

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2022

Gambar 2. 113
Fasilitas Perlengkapan Jalan (LPJU) Terpasang
di Kabupaten Batang



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

Gambar 2. 114
Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Provinsi



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

Gambar 2. 115
Titik PJU di Kabupaten Batang pada Jalan Nasional



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2020

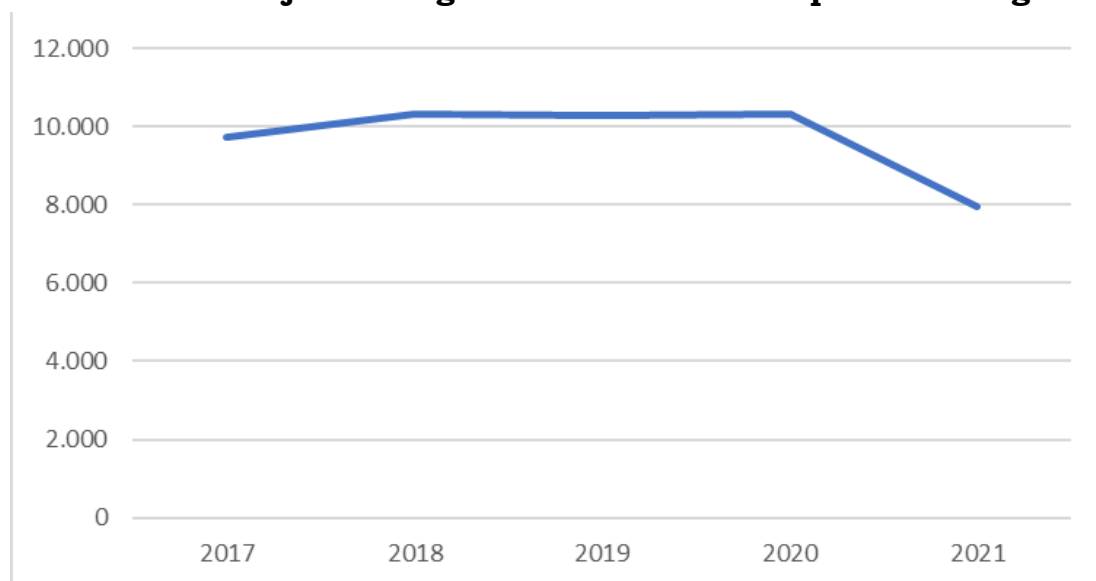
Jumlah uji kir angkutan umum berfluktuasi naik pada periode lima tahun terakhir, yaitu sebanyak 9.748 unit pada tahun 2017 menjadi 10.318 unit pada tahun 2018, kemudian mengalami penurunan menjadi 7.941 unit pada 2021.

Tabel 2. 47
Indikator kinerja urusan Perhubungan Kabupaten Batang

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	unit	9.748	10.321	10.306	10.318	7.941

Sumber: Dishub Kabupaten Batang Tahun 2022

Gambar 2. 116
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Batang

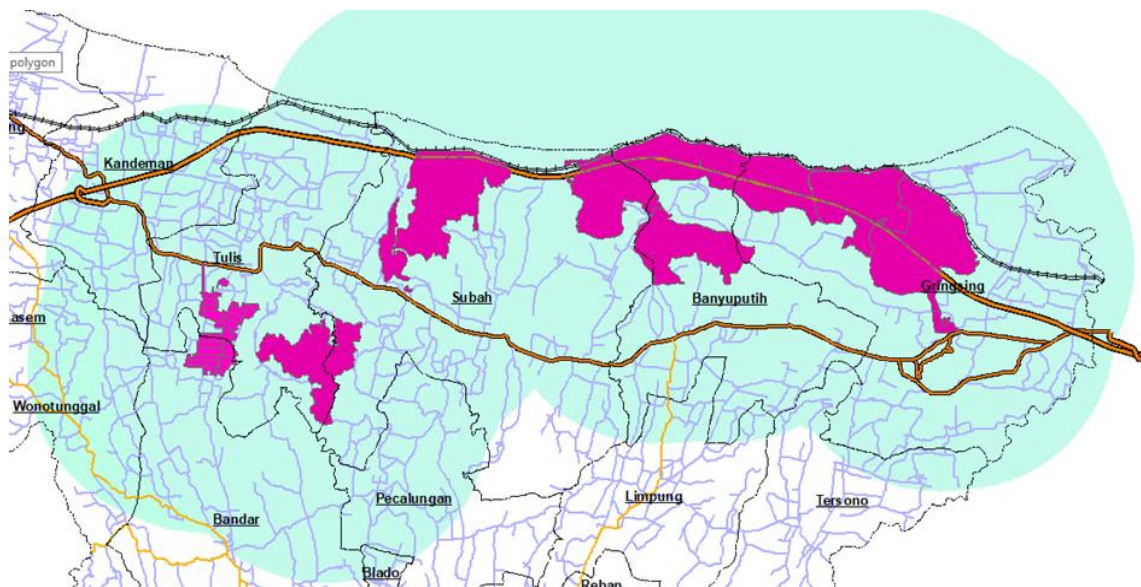


Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Batang, 2022

9.3 Aksesibilitas menuju Kawasan Industri Terpadu Batang

Kabupaten Batang memiliki dua kawasan industri yang sedang dalam proses pembangunan, yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dengan luas 4300 Ha di Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Subah dan Tulis serta Batang Industrial Park dengan luas 285 Ha di Kecamatan Tulis dan Bandar.

Gambar 2. 117
Peta Jaringan Jalan Lokasi Kawasan Industri



Sumber: Jaringan Jalan RTRW Kab Batang 2019-2039

Dari peta lokasi kawasan industri (ungu) yang kemudian dibuat radius sejauh 5 Km, didapatkan deliniasi kawasan penyangga (biru muda). Beberapa jalan desa sekitar kawasan industri yang perlu diperhatikan guna mendukung mobilitas pekerja yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan industri. Jalan ini diharapkan dapat menjadi jalan yang bisa diakses dari dan menuju kawasan industri dengan berjalan kaki atau bersepeda, jalan desa tersebut antara lain:

- Desa Plelen, Kecamatan Gringsing
- Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing
- Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing
- Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih
- Desa Kemiri Timur, Kecamatan Subah
- Desa Kemiri Barat, Kecamatan Subah
- Desa Kuripan, Kecamatan Subah
- Desa Sembojo, Kecamatan Tulis
- Desa Posong, Kecamatan Tulis
- Desa Wonosegoro, Kecamatan Tulis

Kawasan industri KITB memiliki aksesibilitas yang baik, karena mempunyai Exit Toll dan juga membangun jalan akses langsung dari pantura menuju KITB dengan jalan standar industri yang lebar di Desa Plelen Gringsing, selain itu KITB terhubung dengan jalan kabupaten, diantaranya :

- Jalan Plelen – Kedawung, dengan panjang 11,6 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Gringsing yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja.
- Jalan Banyuputih – Kedawung, dengan panjang 7,35 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Banyuputih yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja.
- Jalan Kedawung – Mangunsari, merupakan jalan kabupaten yang melewati Kawasan Industri untuk menghubungkan Dukuh Mangunsari dan Pantai Celong.
- Jalan Kalimanggis – Kedawung Pos, dengan panjang 5,5 Km dan lebar 3 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Subah yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas.
- Jalan Subah – Kedawung, dengan panjang 10,2 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Subah yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja.
- Jalan Gondang – Kemiri dengan panjang 4 Km dan lebar 3 m. Merupakan jalan masuk dari Pantura Subah yang diperkirakan cukup penting untuk mobilitas pekerja, khususnya Jalan Subah – Gondang kemudian Gondang - Kemiri.
- Jalan Sengon – Roban, dengan panjang 5,7 Km dan lebar 3 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 2 KITB.
- Jalan Clapar – Kebumen, dengan panjang 3,5 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 3 KITB.
- Jalan Pucungkerep – Cluwuk, dengan panjang 6 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 3 KITB.
- Jalan Kaliboyo – Pecalungan, dengan panjang 12,5 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan akses untuk mobilitas pada Klaster 3 KITB. Pada Kawasan industri BIP, akses utamanya dengan membuat

akses baru dengan standar jalan industri yang menghubungkan jalan pantura dan kawasan BIP dengan jarak sekitar 1,8 Km. Selain itu kawasan BIP juga terhubung oleh jalan kabupaten yaitu:

- Jalan Bandar – Tulis, dengan panjang 10 Km dan lebar 4 m. Jalan ini membelah kawasan industri BIP, sehingga diprediksi memiliki mobilitas yang padat karena menghubungkan pantura Tulis dan kecamatan bandar, karena jalan masuk dari pantura Tulis dan dari Kecamatan Bandar.
- Jalan Tulis – Batiombo, dengan panjang 4,3 Km dan lebar 4 m. Jalan ini menghubungkan pantura tulis dari arah barat (Kecamatan Batang dan Kandeman).
- Jalan Cempereng – Botolambat, dengan panjang 5 Km dan lebar 4 m. Jalan ini menghubungkan pantura Kandeman dengan Kawasan BIP yang diprediksi menjadi salah satu alternatif jalan yang bisa dilalui oleh pekerja.
- Jalan Batiombo – Wonosegoro, dengan panjang 1,05 Km dan lebar 4 m. Merupakan jalan yang menghubungkan 2 jalan alternatif masuk kedalam kawasan BIP dan merupakan jalan melewati kawasan permukiman yang diprediksi ramai karena dekat dengan kawasan industri.

Dari daftar jalan kabupaten tersebut, dapat ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang padat dimasa yang akan datang.

10. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Batang melalui pengelolaan informasi dan komunikasi publik, ditempuh melalui upaya peningkatan jumlah jaringan komunikasi, membangun sarana komunikasi dua arah melalui *website* serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan. Jumlah jaringan komunikasi terus meningkat dalam periode tahun 2017-2021, yaitu sebanyak 103 pada tahun 2017, meningkat menjadi sebanyak 130 jaringan pada tahun 2021. Persentase perangkat daerah

yang memiliki website aktif juga meningkat dari tahun 2017 sebesar 80% menjadi 100% pada tahun 2021. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan terus dilakukan terhadap 41 kelompok pada masing-masing kecamatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020, dan ada peningkatan jumlah signifikan pada tahun 2021 menjadi 81 kelompok. Kondisi pengembangan dan pemanfaatan TIK di Kabupaten Batang juga semakin baik, dapat dilihat dari skor pemeringkatan e Government yang terus meningkat dari 0 pada tahun 2017 menjadi 3,6 pada tahun 2021.

Tabel 2. 53
Indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah jaringan komunikasi	titik	103	110	115	120	130
2	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	80	85	100	100	100
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Kelompok	41	41	41	0	81
4	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	skor	0	7	3,29	3,29	3,6

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2022

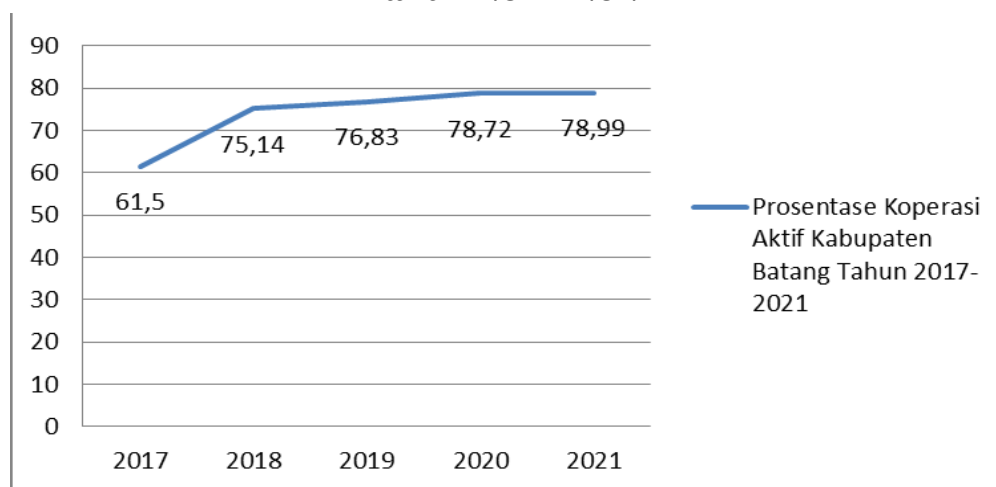
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari capaian indikator koperasi aktif, koperasi sehat serta pertumbuhan jumlah UMKM di Kabupaten Batang. Di Kabupaten Batang terdapat Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 15 unit dengan anggota 7.465 orang, Koperasi Pertanian 15 unit dengan anggota 146 orang, Koperasi Serba

Usaha (KSU) 45 unit dengan anggota 5.946 orang, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 38 unit dengan anggota 19.826 orang dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) 43 unit dengan anggota 7.826 orang.

Persentase koperasi aktif Kabupaten Batang tahun dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi naik, yaitu sebesar 61,5 persen pada tahun 2017 menjadi 78,99 persen pada tahun 2021.

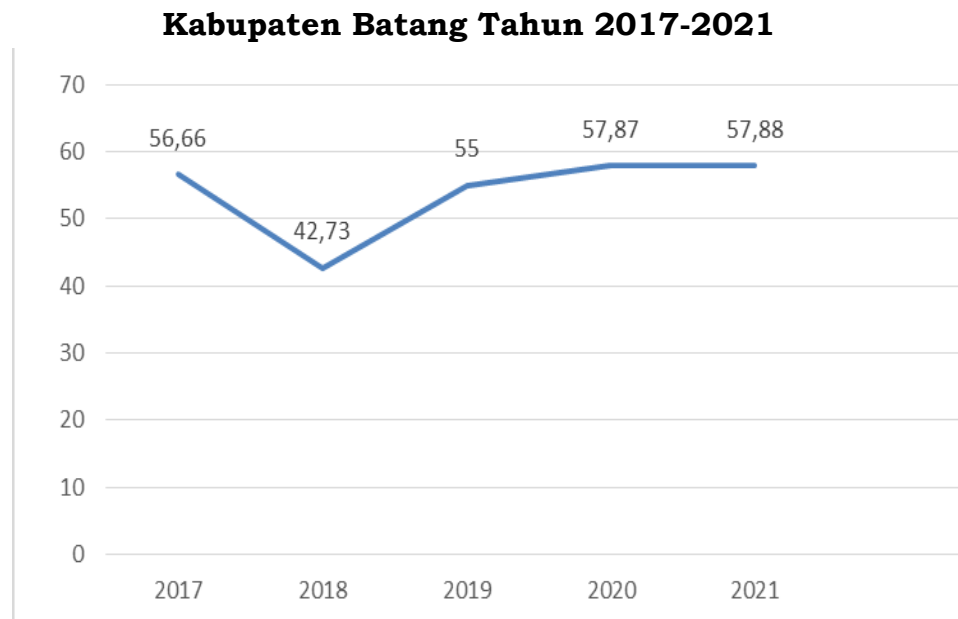
Gambar 2. 118
Prosentase Koperasi Aktif Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2022

Persentase koperasi sehat terhadap jumlah KSP di Kabupaten Batang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada periode tahun 2017-2021. Tahun 2017 sebesar 56,66 persen terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 57,88 persen, namun pada tahun 2018 sempat mengalami penurunan setelah tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang disebabkan banyaknya koperasi yang semula aktif menjadi tidak aktif dan kemudian dibubarkan. Tahun 2018 - 2020 terus meningkat dari 51 persen menjadi 57,87 persen.

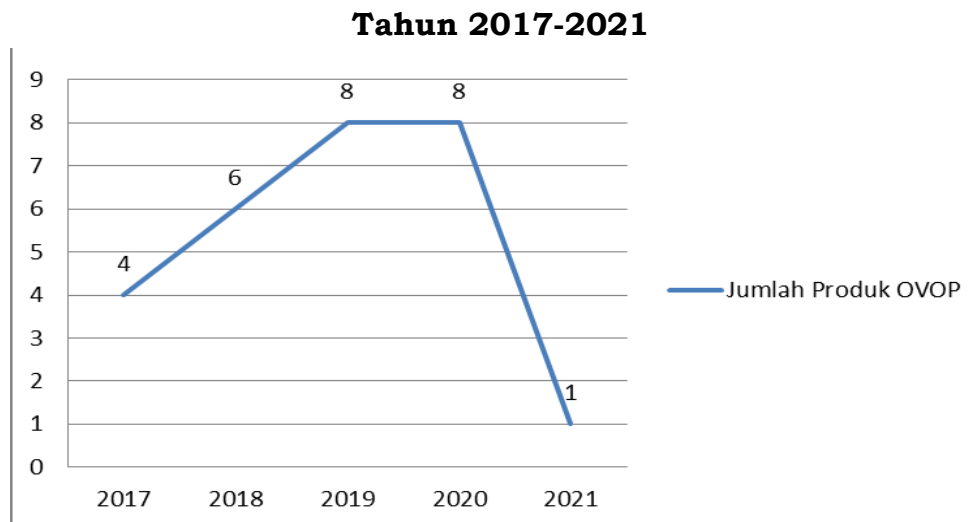
Gambar 2. 119
Prosentase Koperasi Sehat terhadap KSP



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2022

Salah satu program unggulan Bupati Batang adalah *One Village One Product* (OVOP), melalui program unggulan tersebut diharapkan pada akhir periode RPJMD masing-masing desa di Kabupaten Batang sudah memiliki minimal satu produk unggulan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Batang. Jumlah produk OVOP Kabupaten Batang pada periode tahun 2017-2019 terus mengalami peningkatan, dari 4 produk pada tahun 2017 menjadi 8 produk pada tahun 2019, di tahun 2020 capaian masih tetap sebanyak 8 produk. Hal tersebut mengindikasikan masih dibutuhkan upaya keras untuk bisa mencapai hasil sesuai yang ditargetkan karena progres peningkatan yang masih sangat lambat. Capaian mengalami penurunan menjadi 1 produk pada tahun 2021, hal ini diakibatkan karena pandemi covid 19.

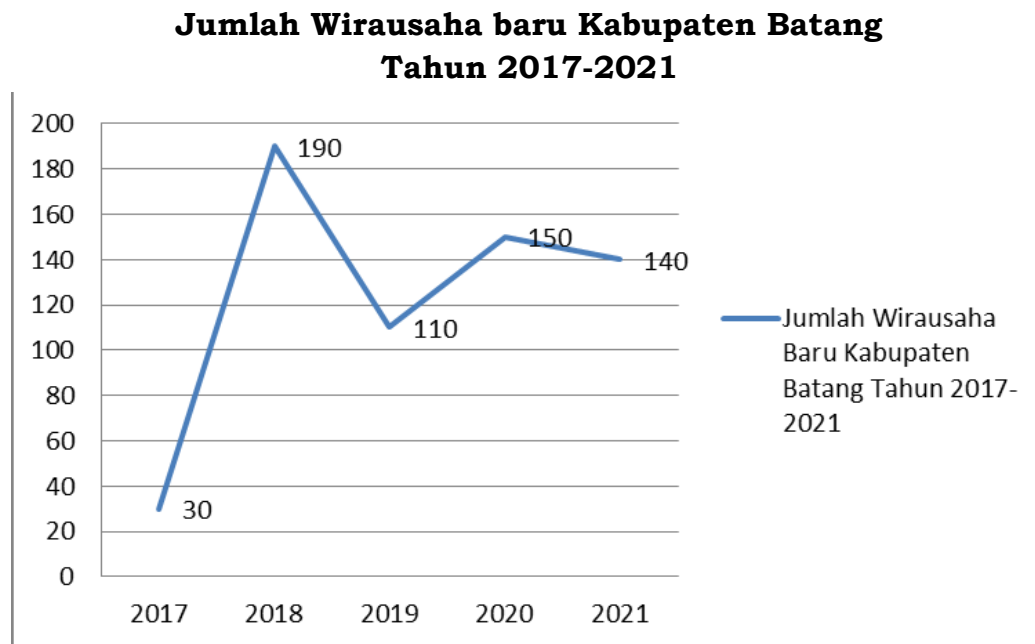
Gambar 2. 120
Jumlah Produk OVOP Kabupaten Batang



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2022

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Batang dalam menghadapi bonus demografi di Kabupaten Batang adalah melalui perluasan dan penciptaan lapangan kerja baru, diantaranya dengan menciptakan wirausaha baru yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta menumbuhkan perekonomian masyarakat. Jumlah wirausaha baru di Kabupaten Batang dalam periode tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan mengalami kenaikan, sebanyak 30 wirausaha baru pada tahun 2017, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 190 wirausaha baru pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan dalam fasilitasi permodalan, kerjasama dengan kementerian hukum dan HAM dalam rangka pemberian izin Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di desa-desa secara online melalui Dana Desa. Namun pada tahun 2019 dan 2020 jumlah wirausaha baru mengalami penurunan menjadi sebesar 150 wirausaha baru yang disebabkan karena menurunnya minat masyarakat serta daya beli masyarakat yang menurun sehingga beberapa wirausaha baru tidak dapat bertahan. Pada tahun 2021 jumlah wirausaha baru mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid 19.

Gambar 2. 121



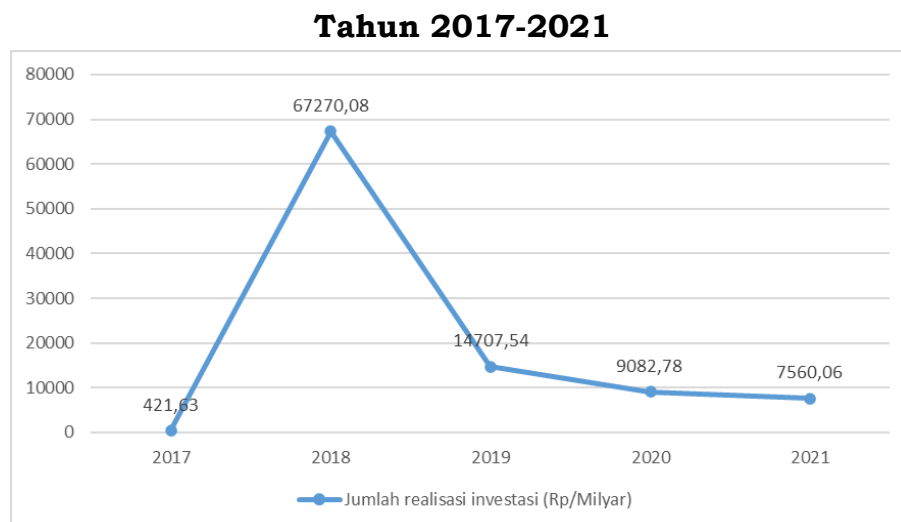
Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2022

12. Penanaman Modal

Kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat dari capaian jumlah realisasi investasi di Kabupaten Batang, jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Batang serta jumlah penyerapan tenaga kerja.

Jumlah realisasi investasi Kabupaten Batang dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada tahun 2017 sebesar 421,63 M, mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2018 menjadi 67.270,08 M. Faktor pendorong utama kenaikan tersebut adalah adanya proyek PLTU dengan kapasitas 2 x 1000 MW di Kabupaten Batang serta didukung oleh upaya pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan nilai investasi melalui kemudahan pelayanan perizinan, melalui penerapan *Online Single Submission* (OSS). Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 14.707,54 M. Pada tahun 2021 realisasi investasi mengalami penurunan menjadi 7.560,06 M sebagai dampak Pandemi Covid 19.

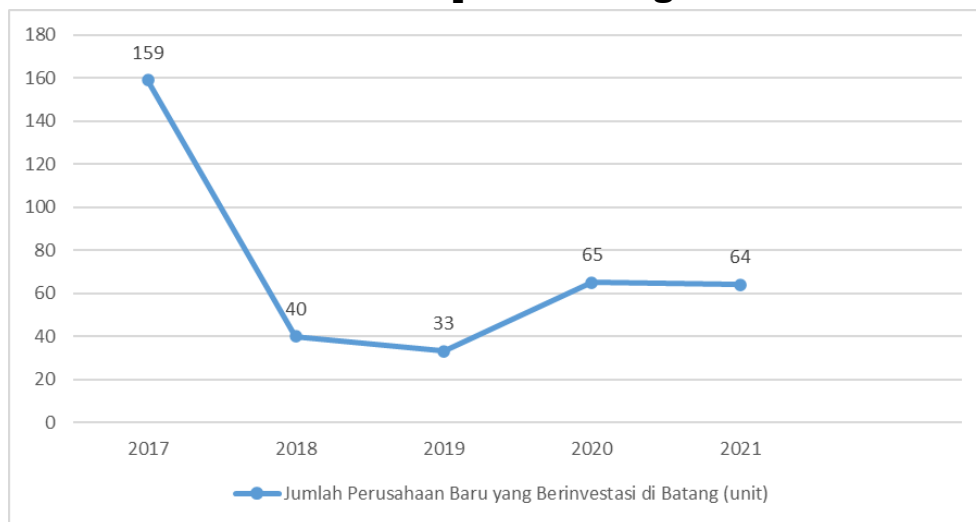
Gambar 2. 122
Jumlah Realisasi Investasi Kabupaten Batang



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2022

Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang pada tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang sebanyak 159 perusahaan. Menurun menjadi 33 perusahaan pada tahun 2019 dikarenakan menunggu penetapan regulasi RTRW Kabupaten Batang, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020. Namun tahun 2021 kembali mengalami penurunan sebanyak 64 perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Batang. Salah satu hal yang menyebabkan penurunan tersebut karena perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di Batang menunggu mekanisme perijinan OSS oleh Kementerian BPKM sehingga investor cenderung menunggu kepastian regulasi terkait Perijinannya serta adanya pandemi *Covid-19*.

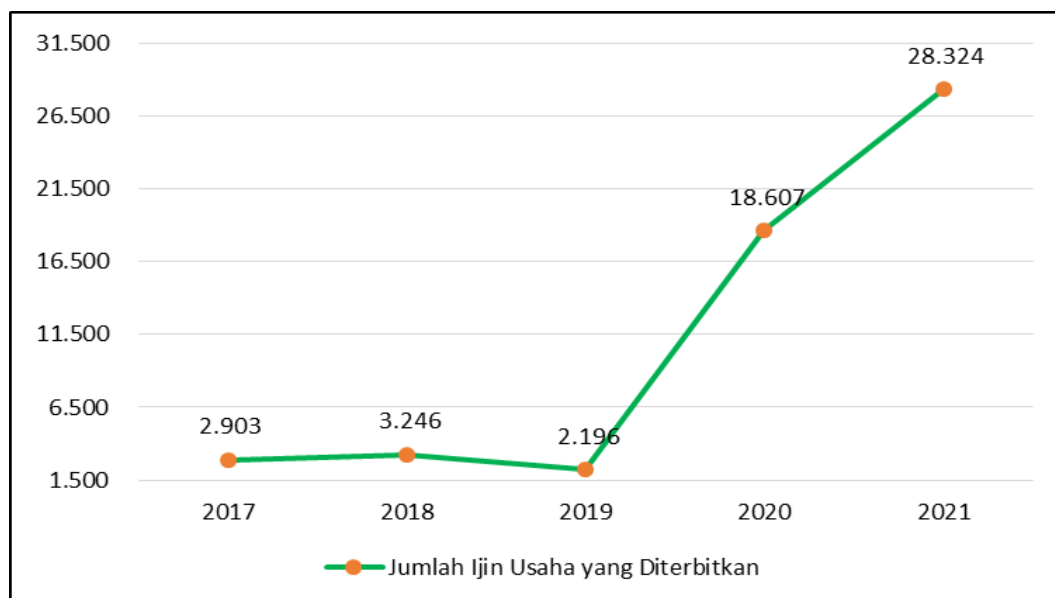
Gambar 2. 123
Jumlah Perusahaan Baru yang Berinvestasi
di Kabupaten Batang



Sumber: DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2021

Seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan baru yang berinvestasi, jumlah ijin usaha yang diterbitkan juga meningkat di tahun 2021. Jumlah ijin usaha yang diterbitkan dalam periode 2017-2021 berfluktuasi naik. Pada tahun 2017 sebesar 2.903 meningkat menjadi 28.324 pada tahun 2021.

Gambar 2. 124
Jumlah Ijin Usaha yang Diterbitkan
Tahun 2017-2021



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang Tahun 2022

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Capaian kinerja bidang kepemudaan pada 2017-2021 dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan yang dibina dan persentase pemuda berwirausaha di Kabupaten Batang. Peran aktif kepemudaan sangat menunjang keberhasilan pembangunan. Terkait hal tersebut, salah satu program unggulan Kabupaten Batang adalah 1000 pemuda berwirausaha dan 10.000 lapangan usaha baru, membutuhkan peran aktif pemuda dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi. Melalui peran serta pemuda dalam kewirausahaan diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru untuk menjawab tantangan bonus demografi di Kabupaten Batang.

Jumlah organisasi pemuda yang dibina/difasilitasi di Kabupaten Batang fluktuatif dari tahun 2017-2021, yaitu sebanyak 15 organisasi pada tahun 2017 terus meningkat menjadi 21 organisasi pada tahun 2019, namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 18 organisasi, dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 19 organisasi.

Gambar 2. 125
Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina
di Kabupaten Batang



Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2022

Peningkatan keterlibatan pemuda dalam kewirausahaan melalui program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda mulai dilaksanakan tahun 2018, sehingga indikator persentase pemuda berwirausaha baru dihitung capaiannya untuk tahun 2018. Persentase pemuda berwirausaha terus meningkat pada tiga tahun terakhir, dari 19 persen di tahun 2018 menjadi 39

persen di tahun 2021.

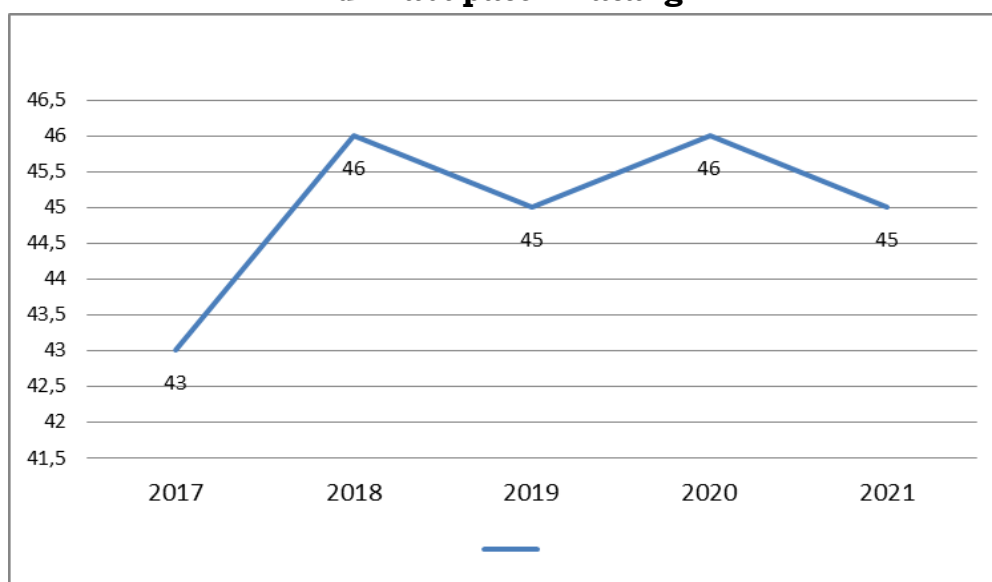
Tabel 2. 54
Persentase pemuda berwirausaha (%)
di Kabupaten Batang

NO	Indikator Kinerja	Stn	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pemuda berwirausaha	%	na	19	25	32	39

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2022

Sedangkan kinerja bidang olahraga dapat dilihat dari jumlah organisasi olahraga yang dibina serta jumlah kejuaraan dalam bidang olahraga yang diraih di tingkat provinsi. Jumlah organisasi olahraga yang dibina berfluktuasi naik dari tahun 2017-2021, yaitu sebanyak 43 organisasi pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 45 organisasi pada tahun 2021.

Gambar 2. 126
Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina
di Kabupaten Batang

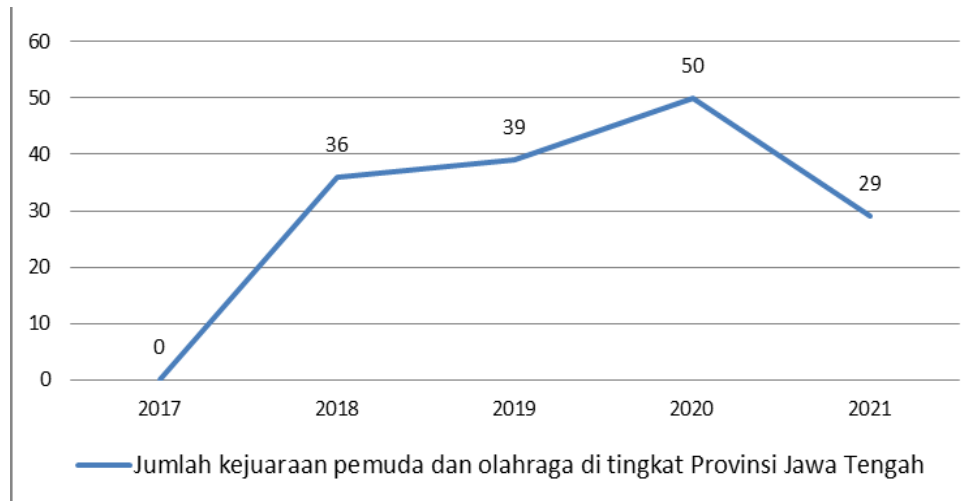


Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2022

Jumlah kejuaraan yang diikuti di tingkat provinsi juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021, dari 0 kejuaraan di tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 50 kejuaraan di tahun 2020, karena upaya melalui pembinaan atlet serta pengiriman atlet pada cabang olahraga unggulan, namun

demikian mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 29 kejuaraan dikarenakan minimnya event kegiatan sebagai dampak pandemi *covid19*.

Gambar 2. 127
Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga Kabupaten Batang di tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021



Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2022

Tabel 2. 55
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Atlet Kabupaten Batang Tahun 2021

No	Cabang Olahraga	Medali	Jumlah	Keterangan
1	Panjat tebing	Rekor Dunia kecepatan	1	Kejuaraan dunia
2	Panjat tebing	Emas	1	PON XX Papua
3	Panjat tebing	Perunggu	2	PON XX Papua
4	Atletik	Perunggu	2	PON XX Papua
5	Eksebisi kabaddi	Emas	1	PON XX Papua
6	Eksebisi kabaddi	Perunggu	1	PON XX Papua
7	Sepak Takraw Putera	Emas	1	POPDA Karesidenan
8	Sepak Takraw Puteri	Perak	1	POPDA Karesidenan
9	Panahan	Emas	4	POPDA Karesidenan

No	Cabang Olahraga	Medali	Jumlah	Keterangan
10	Panahan	Perak	1	POPDA Karesidenan
11	Panahan	Perunggu	1	POPDA Karesidenan
12	Sepak Takraw Putera	Perak	1	POPDA Provinsi
13	Renang	Perak	1	POPDA Provinsi
14	Pencak Silat	Perunggu	5	POPDA Provinsi
Jumlah Medali			23	

Sumber: Disparpora Kabupaten Batang Tahun 2022

Pada tahun 2021 atlet Kabupaten Batang memperoleh total 23 medali dari 8 cabang olahraga yang diikuti baik pada level provinsi, nasional, maupun internasional. Salah satu prestasi terbaik yang diperoleh adalah prestasi pada kejuaraan dunia panjat tebing 2021 yang diadakan di Swiss. Pada PON XX Papua, atlet Kabupaten Batang berhasil memperoleh 2 emas dan 5 perunggu dari cabang olahraga panjat tebing dan eksebisi kabaddi. Pada POPDA Karesidenan, total medali yang berhasil diperoleh berjumlah 8 medali dengan rincian 5 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Pada POPDA Provinsi, perwakilan Kabupaten Batang berhasil memperoleh 2 perak dan 5 perunggu dari cabang olahraga sepak takraw putra, renang, dan pencak silat.

14. Statistik

Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan *relevan* diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat. Hal ini sudah menjadi amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274 dimana, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Capaian kinerja urusan Statistik sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 yaitu persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan pada periode lima tahun terakhir telah mempertahankan

nilai sempurna. Capaian tahun 2017 hingga tahun 2021 tetap di angka 100%. walaupun begitu, terdapat beberapa data yang bukan menjadi wali data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, karena baru terbentuk pada tahun 2017 sehingga penghitungan mulai dilakukan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 - 2021 ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan hanya mengacu pada wali data yang disediakan pada dinas tersebut, yang artinya masih terdapat data/informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah belum semuanya terpenuhi. Hal tersebut disebabkan terdapat beberapa data khususnya data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Batang pada beberapa tahun ini tidak dilakukan penghitungan.

Tabel 2. 56
Indikator kinerja urusan Statistik Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2022

15. Persandian

Tugas persandian daerah adalah menyelenggarakan persandian dalam rangka pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Upaya yang dilakukan dalam rangka pengamanan tersebut adalah dengan mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian pada semua Perangkat Daerah di Kabupaten Batang. Selama periode 2017-2021 semua perangkat daerah telah mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian dengan menggunakan fasilitas *Virtual Private Network* (VPN) untuk akses server perencanaan dan penganggaran/penatausahaan keuangan.

Tabel 2. 57
Indikator kinerja urusan Persandian Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

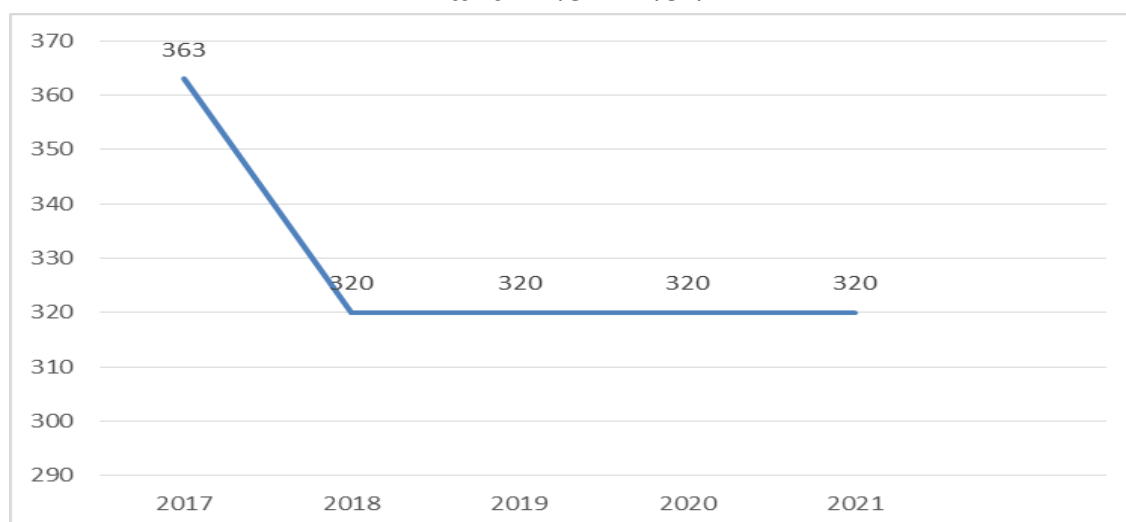
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase penyediaan alat studio dan komunikasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2022

16. Kebudayaan

Kondisi layanan urusan Kebudayaan di Kabupaten Batang antara lain dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang dalam melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Batang. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2017 angka capaiannya tetap sebesar 363 Namun pada tahun 2018 hingga 2021 turun menjadi 320 situs dan cagar budaya.

Gambar 2. 128
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Tahun 2017-2021



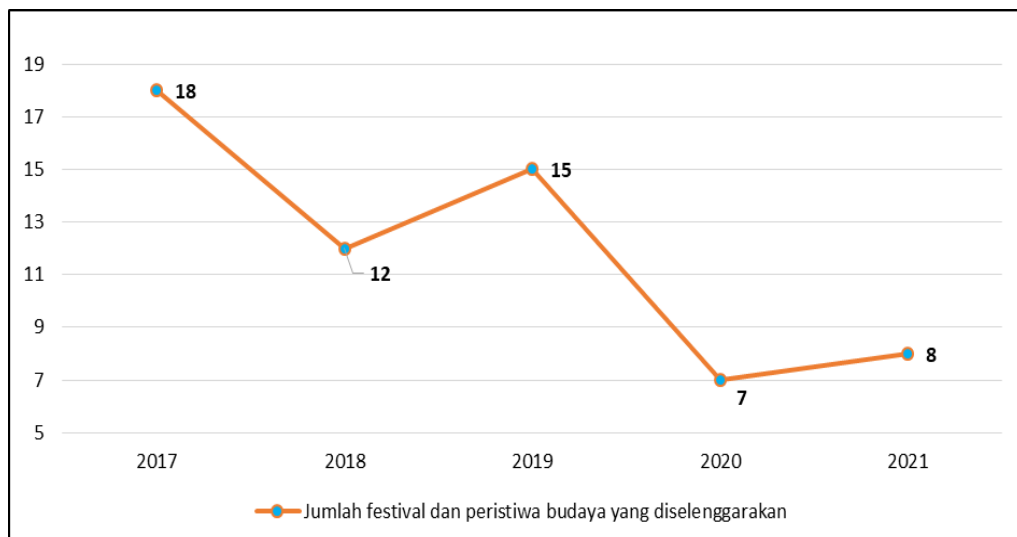
Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2021

Selain pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, pembangunan budaya juga direalisasikan melalui penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya. Jumlah festival dan peristiwa budaya yang

diselenggarakan pada periode tahun 2017-2021 berfluktuasi menurun. Pada tahun 2017 penyelenggaraan festival dan peristiwa budaya sebanyak 18 kali. Tahun 2018 menurun menjadi sebanyak 12 kali, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak 15 kali, namun pada tahun 2020 jumlah festival dan peristiwa budaya menurun, hanya diselenggarakan 7 kali saja disebabkan adanya pandemi Covid-19 serta kebijakan pembatasan aktivitas sosial. Pada Tahun 2021, Pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga festival dan peristiwa budaya hanya dapat diselenggarakan sebanyak 8 kali.

Gambar 2. 129

Jumlah festival dan peristiwa budaya yang diselenggarakan

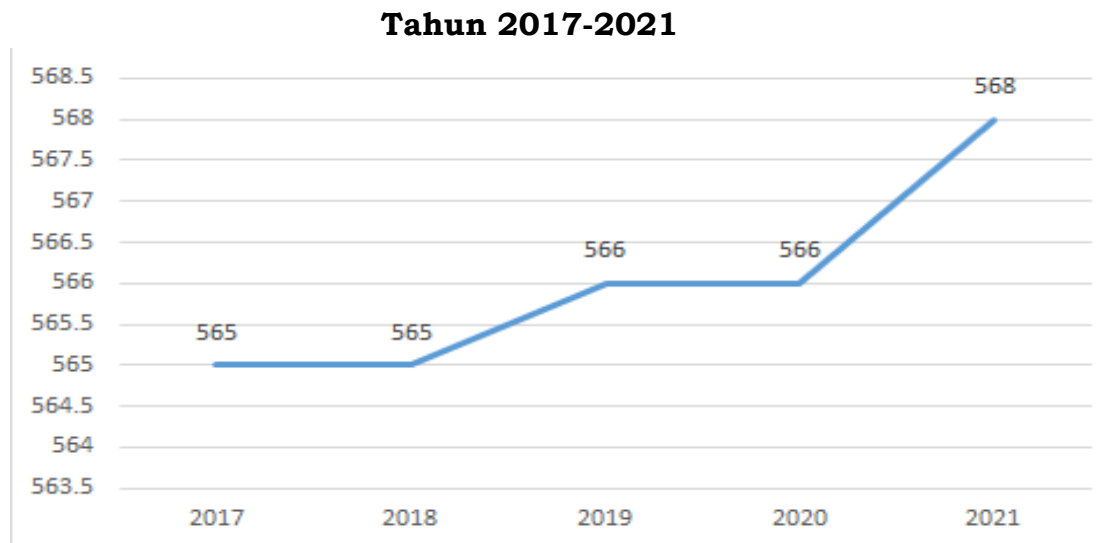


Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

Pembangunan budaya juga direalisasikan melalui pembinaan grup-grup kesenian di Kabupaten Batang. Hal tersebut sebagai upaya pelestarian budaya melalui pelestarian dan pengembangan kearifan lokal. Selama kurun waktu 2017-2021 jumlah grup kesenian di Kabupaten Batang meningkat, tahun 2017 berjumlah 564 grup, meningkat menjadi 566 grup di tahun 2019 dan 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 568 grup. Semuanya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Batang.

Gambar 2. 130

Jumlah grup kesenian yang dibina (grup)



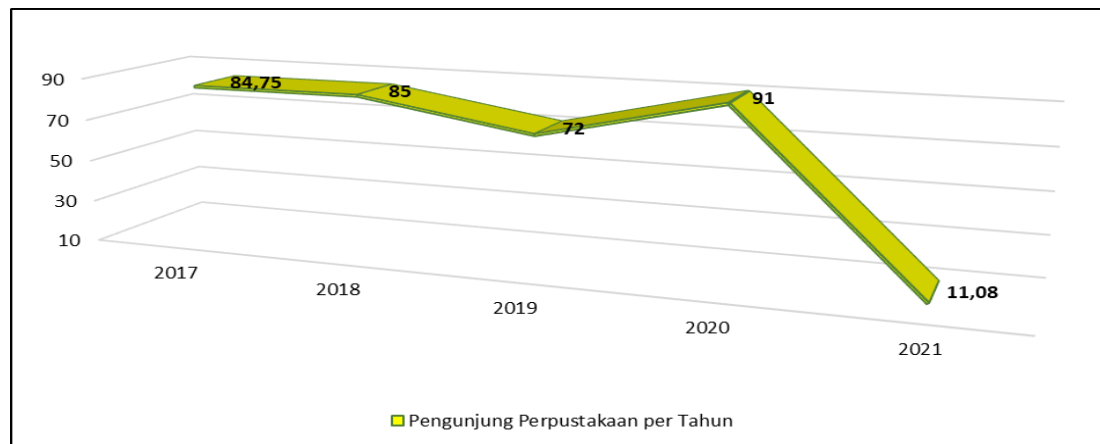
Sumber: Disdikbud Kabupaten Batang Tahun 2022

17. Perpustakaan

Kinerja urusan perpustakaan dilihat dari jumlah pengunjung pada periode lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun. Jumlah perpustakaan daerah di Kabupaten Batang 1 unit, dengan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2017 sebanyak 198.810 orang terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019 menjadi 131.483 orang. Tahun 2021 jumlah pengunjung kembali turun dengan penurunan yang cukup signifikan menjadi sebanyak 19.937 orang per tahun. Penurunan pengunjung tersebut dikarenakan adanya Covid-19 dan diberlakukannya PPKM, sehingga perpustakaan ditutup dan tidak melakukan pelayanan. Selain karena pandemi Covid-19, penurunan ini juga disebabkan koleksi buku perpustakaan kurang banyak, banyaknya buku yang tidak dikembalikan dan banyak buku yang rusak, sehingga berpengaruh terhadap penurunan minat baca masyarakat. Dengan demikian, kedepan capain tersebut masih harus ditingkatkan lagi melalui penambahan dan pemeliharaan buku.

Gambar 2. 131

Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun (%)



Sumber: Disperpuska & Arsip Kabupaten Batang Tahun 2022

Untuk meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, upaya lain yang perlu ditingkatkan adalah kualitas SDM dalam bidang perpustakaan. Kualitas SDM dilihat dari jumlah pustakawan dan tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Pada periode 2017-2021 jumlah pustakawan sebanyak 2 orang, sementara jumlah tenaga teknis berkurang dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 27 orang pada tahun 2017-2019 menjadi 23 orang pada tahun 2021. Sedangkan untuk penilai yang memiliki sertifikat sampai dengan tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Batang belum memiliki penilai yang bersertifikat.

Tabel 2. 58
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	8
1	Pustakawan	Orang	2	2	2	2	2
2	Tenaga teknis	Orang	27	27	27	23	23
3	Penilai yang memiliki sertifikat	orang	0	0	0	0	0

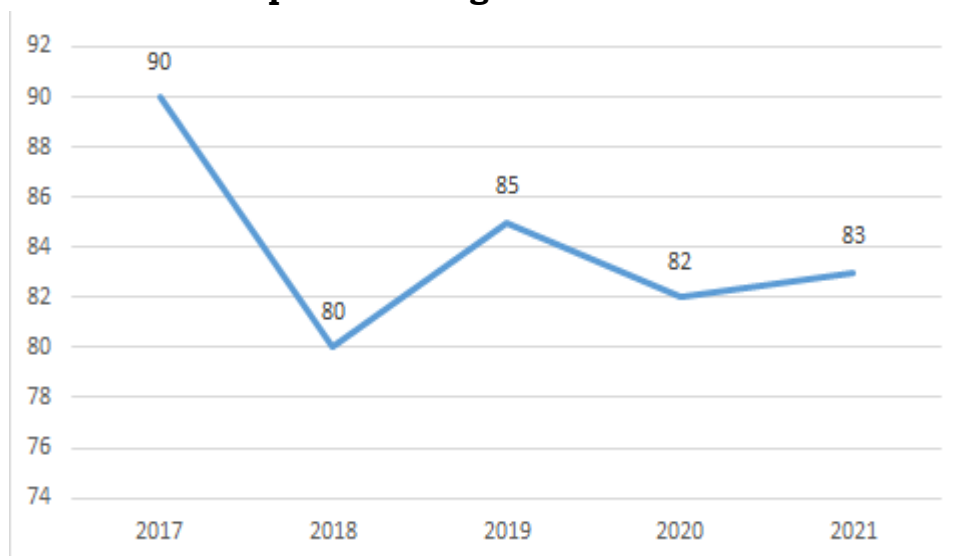
Sumber: Diskominfo Kabupaten Batang Tahun 2022

18. Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai sumber informasi yang akurat, sebagai alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, juga sebagai bukti kinerja organisasi dan aparaturinya, bukti pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sehingga evaluasi kinerja dalam suatu perangkat daerah dapat dilaksanakan lebih efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan urusan Kearsipan dilaksanakan melalui pengelolaan arsip secara baku serta penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna.

Kinerja kearsipan dilihat dari pengelolaan arsip secara baku dalam periode 2017-2021 berfluktuasi turun, dari tahun 2017 sebesar 90 persen menurun menjadi 83 persen di tahun 2021.

Gambar 2. 132
Pengelolaan arsip secara baku (%)
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

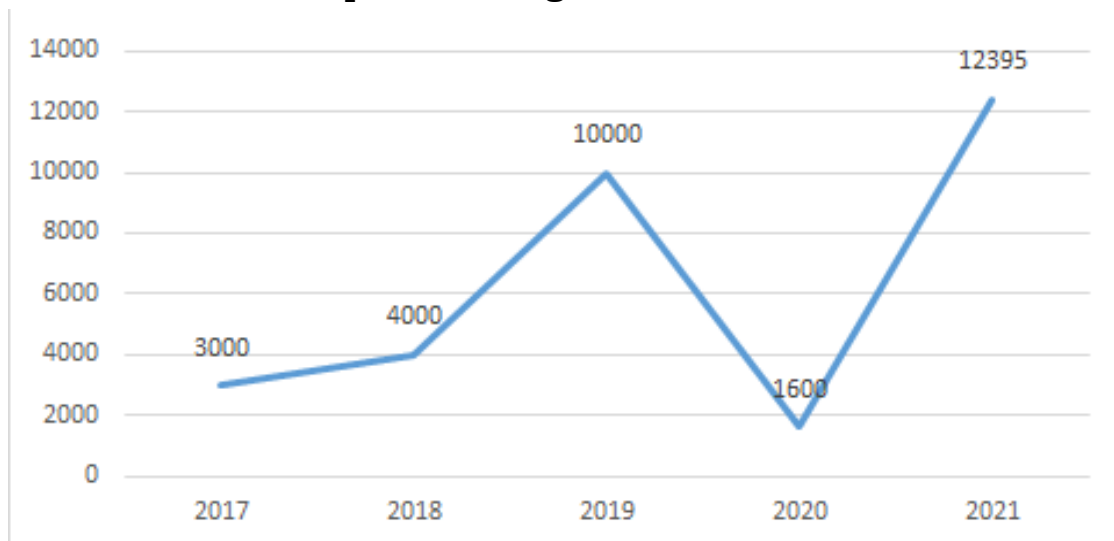


Sumber: Disperpuska & Arsip Kabupaten Batang Tahun 2021

Sedangkan penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna fluktuatif, dari tahun 2017 sebanyak 3000 arsip/dokumen meningkat menjadi 10.000 arsip/dokumen yang dilestarikan/diselamatkan pada tahun 2019. Namun tahun 2020 menurun menjadi 1.600 arsip, kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 12395 arsip/dokumen.

Gambar 2. 133

**Penyelamatan arsip/dokumen yang mempunyai nilai guna
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021**



Sumber: Disperpuska & Arsip Kabupaten Batang Tahun 2021

c. Urusan Pilihan

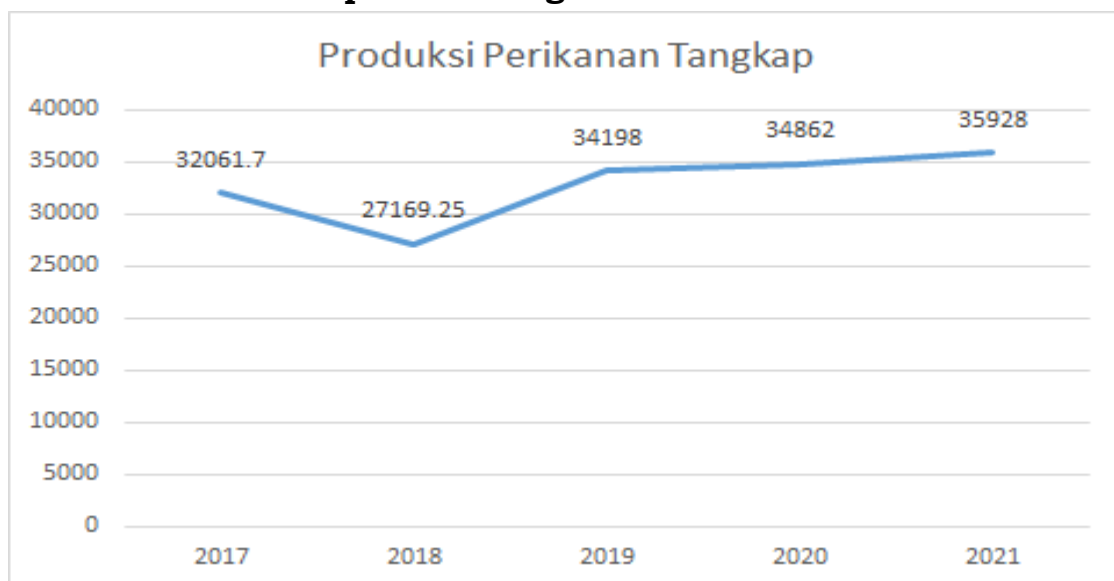
1. Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Batang terletak di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura) yang memiliki Panjang garis pantai Kabupaten Batang 38,75 km dan lebar 4 mil yang ditunjang oleh iklim tropis dengan jumlah hari hujan pada Bulan Oktober-April dan musim kemarau pada Bulan April-Oktober, dimana kedua musim ini silih berganti sepanjang tahun merupakan potensi yang sangat strategis untuk pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya berupa tambak (air payau), dengan potensi lahan seluas 1.429,2 ha, budidaya air tawar dengan potensi lahan seluas 300 ha dan perairan umum (sungai, waduk, sawah dan genangan air).

Jumlah produksi perikanan tangkap pada periode tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi naik, tahun 2017 sebesar 32.061,7 ton, pada tahun 2018 naik menjadi 27169,25 ton dan kembali turun menjadi 27.169,25 ton pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 34.198 ton dan mencapai 34.862 ton pada tahun 2020. Penerapan regulasi pelarangan alat tangkap cantrang menyebabkan penurunan secara signifikan pada produksi Tahun 2014-2016, kemudian ada toleransi perpanjangan penggunaan alat tangkap pada Tahun 2017 dapat meningkatkan produksi sampai dengan tahun

2019 meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2018. Tidak adanya lagi peraturan yang melarang alat tangkap cantrang beroperasi di perairan laut Jawa serta meningkatnya jumlah kapal nelayan yang melakukan pelelangan ikan di TPI di wilayah Batang menyebabkan semakin meningkatnya produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 34.198 ton, tahun 2020 sebesar 34.862 ton dan tahun 2021 meningkat menjadi 35.928 ton.

Gambar 2. 134
Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

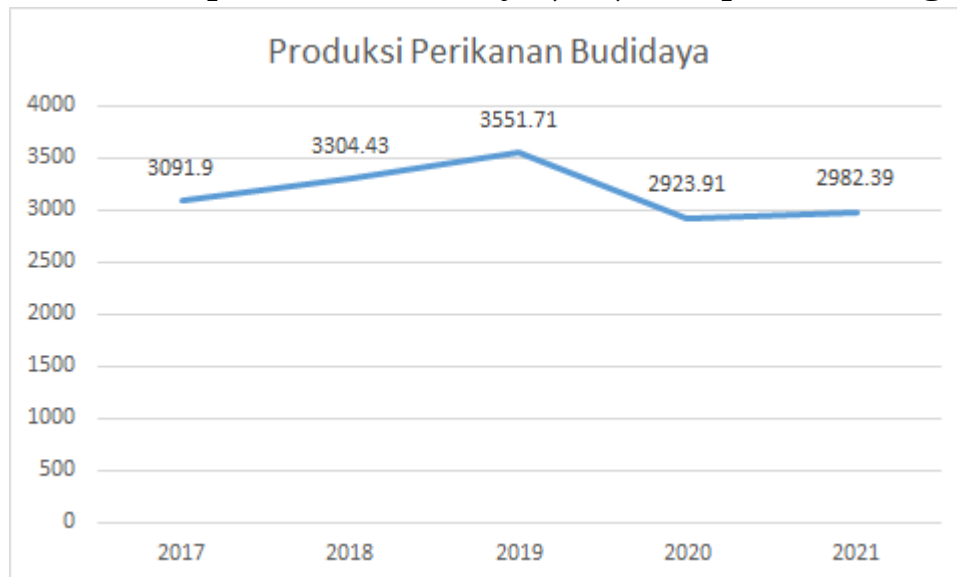


Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2021

Untuk produksi perikanan budidaya dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, dimana pada tahun 2017 sebesar 3091,9 ton meningkat menjadi 3551,71 ton pada tahun 2019. Fluktuasi kenaikan/penurunan produksi perikanan budidaya tersebut disebabkan karena pembudidaya masih bersifat tradisional, kemudian mulai tahun 2017-2019 karena pengadaan demplot-demplot budidaya sehingga meningkatkan produksi. Namun adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi aktivitas usaha budidaya sehingga mengakibatkan penurunan produksi perikanan budidaya menjadi 2.923,91 ton pada tahun 2020. Tahun 2021 dengan mulai pulihnya keadaan dampak pandemi Covid-19 sedikit mempengaruhi produksi perikanan budidaya,

ini terlihat dengan peningkatan produksi menjadi 2.982,39 ton.

Gambar 2. 135
Produksi perikanan Budidaya (ton) Kabupaten Batang



Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2021

Konsumsi ikan juga berfluktuasi naik pada periode 2017-2021, dimana pada tahun 2017 sebesar 27,61 kg/kapita/th menjadi 34,93 kg/kapita/th pada tahun 2021. Namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,75 kg/kapita/th karena produksi ikan laut yang tersedia di pasar menurun.

Gambar 2. 136
Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th) Kabupaten Batang



Sumber: Dislutkannak Kabupaten Batang 2021

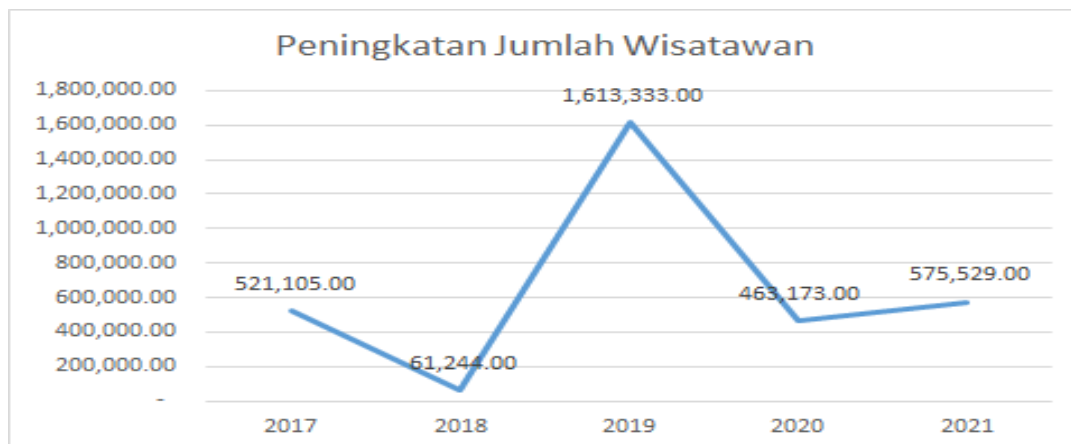
2. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Batang mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Batang yang cukup besar baik wisata pantai, wisata pegunungan, wisata religi dan wisata budaya. Sektor Pariwisata diharapkan dapat memberikan peningkatan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa (Pokdarwis).

Beberapa tempat wisata yang ada di kabupaten Batang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, antara lain kolam renang Bandar, THR Kramat, pantai Ujungnegoro, pantai Sigandu, pantai Celong, pantai Jodo, kebun teh Pagilaran, pemandian air panas Sangubanyu serta desa wisata Mentosari dan Pandansari.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk meningkatkan pariwisata Batang diantaranya promosi melalui media sosial, televisi, dan media cetak; kalender event; mengikuti pameran pariwisata dan ekonomi kreatif serta kerjasama dengan stakeholder pariwisata (PHRI, BWI, ASPI), cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang sejak tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan. Namun, tahun 2020 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang mengalami penurunan menjadi sebesar 463.173 orang. Penurunan terjadi karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga selama beberapa bulan destinasi wisata ditutup dan baru dibuka kembali pada awal Juli dengan penerapan protokol kesehatan. Tahun 2021 dengan berangsur pulihnya kondisi akibat dampak Pandemi Covid-19 kunjungan wisata berangsur merangkak naik menjadi 575.529 orang.

Gambar 2. 137
Kunjungan Wisata Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

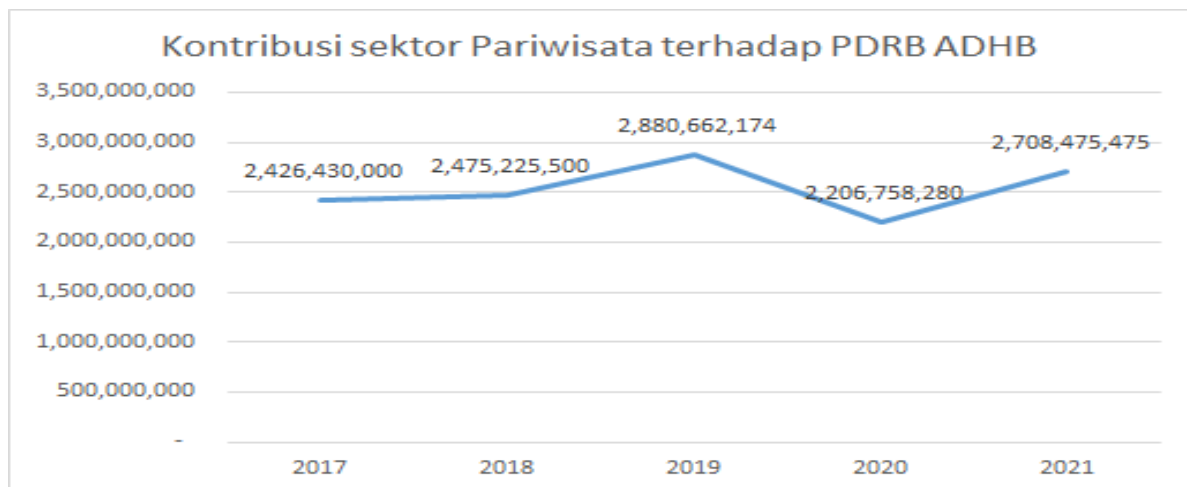


Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang, 2021

Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Batang, kontribusi sektor pariwisata juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2017 sebesar Rp 2.426.430.000 terus meningkat menjadi Rp 2.880.662.174,- pada tahun 2019. Namun tahun 2020 PAD sektor pariwisata mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 2.206.758.280,- yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2020, dengan berangsur membaiknya kondisi akibat dampak Pandemi Covid-19 di tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.708.475.475, diantara tempat wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Batang, Pantai Sigandu masih menjadi favorit bagi masyarakat dalam berwisata. Jumlah pengunjung pantai Sigandu pada tahun 2020 sebesar 268.948 pengunjung dengan menyumbang PAD sebesar 1,27 milyar. Pantai Ujung Negro sebanyak 60.562 pengunjung dengan PAD Rp. 288 juta, Kebun teh Pagilaran sebanyak 49.905 pengunjung menyumbang PAD sebesar Rp. 83 juta, THR Kramat sebanyak 27.302 dengan PAD sebanyak Rp. 266 juta dan Kolam renang Bandar sebanyak 27.116 pengunjung dan PAD sebanyak Rp. 130 juta.

Kontribusi sektor pariwisata didukung oleh upaya pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata, peningkatan akses jalan wisata serta fasilitas pendukungnya.

Gambar 2. 138
PAD sektor pariwisata Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

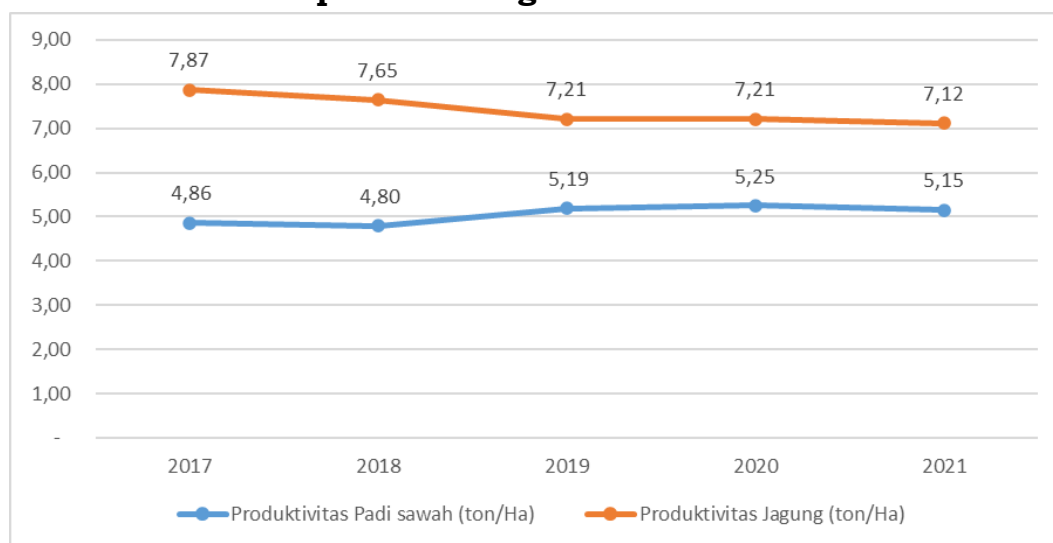


Sumber: Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang, 2021

3. Pertanian

Produktivitas padi sawah per hektar dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi meningkat, yaitu sebanyak 4,86 ton/ha pada tahun 2017 meningkat menjadi 5,25 ton/ha pada tahun 2020 sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 5,15 ton/ha. Produksi padi dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi menurun, yaitu sebesar 222.954 ton pada tahun 2017 menjadi 185.680 ton pada tahun 2021, yang disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan, jumlah curah hujan yang lebih rendah, adanya perbaikan jaringan irigasi. Untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi upaya terus dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pertanian, dilaksanakannya *Standard Operational Procedure Good Agricultural Practice* (SOP GAP), adanya bantuan alat mesin pertanian pra panen yaitu berupa Hand Sprayer, pompa air, cultivator, Hand Sprayer elektrik. Selain itu ada juga rehabilitasi jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan besar untuk tanaman pangan, irigasi perpompaan untuk tanaman menengah, dan juga embung. Bantuan Pupuk dan benih maupun biopestisida juga tidak lupa ikut andil dalam meningkatkan produksi dan produktivitas padi maupun jagung dan juga banyaknya bantuan benih jagung dan padi dari pemerintah.

Gambar 2. 139
Produktivitas Padi sawah dan Jagung (ton/ha)
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2021

Tabel 2. 59
Data Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
TANAMAN PANGAN						
Padi	222.954	210.545	216.343	208.497	185.681	Ton
Jagung	83.195	76.713	77.783	79.950	77.047	Ton
Kedelai	19	1.132	1.382	33	57	Ton
Kacang Tanah	443	570	635	473	191	Ton
Ubi Kayu	24.483	15.629	18.900	27.310	31	Ton
Ubi Jalar	14.671	5.830	9.720	9.675	22.639	Ton
Kacang Hijau	16	8	1	6	31	Ton
HORTIKULTURA						
Bawang Merah	1.283	4.989	3.214	3.682	8.580	Kg
Bawang Daun	34.457	40.643	46.622	58.145	23.874	Kg
Cabai Besar	22.196	29.496	27.851	24.571	12.862	Kg

Komoditas	2017	2018	2019	2020	2021	Satuan
	Produksi	produksi	Produksi	Produksi	Produksi	
Kentang	136.360	273.748	295.271	357.470	79.175	Kg
Kubis	33.084	32.014	51.720	18.675	9.037	Kg
durian	39.303	-	44.820	28.038	29.378	Kg
Mangga	45.144	56.168	44.405	69.593	55.477	Kg
nangka	68.702	107.542	103345	150.318	68.184	Kg
Pisang	153.289	191.795	168162	208.305	161.944	Kg
PERKEBUNAN						
Teh	1.784.106	1.489.244	1.493.803	1.498.694	1.500.235	Kg
Kakao	416.595	350.171	264.128	194.980	209.297	Kg
Kopi	748.650	764.459	789.182	811.296	812.309	Kg
Kapuk	214.427	120.743	106.834	80.565	54.388	Kg
Cengkeh	366.981	546.338	761.822	294.788	295.088	Kg
Kelapa	1.552.571	1.068.619	581.497	10.119.906	1.039.020	Kg

Sumber : Dispaperta Kabupaten Batang 2022

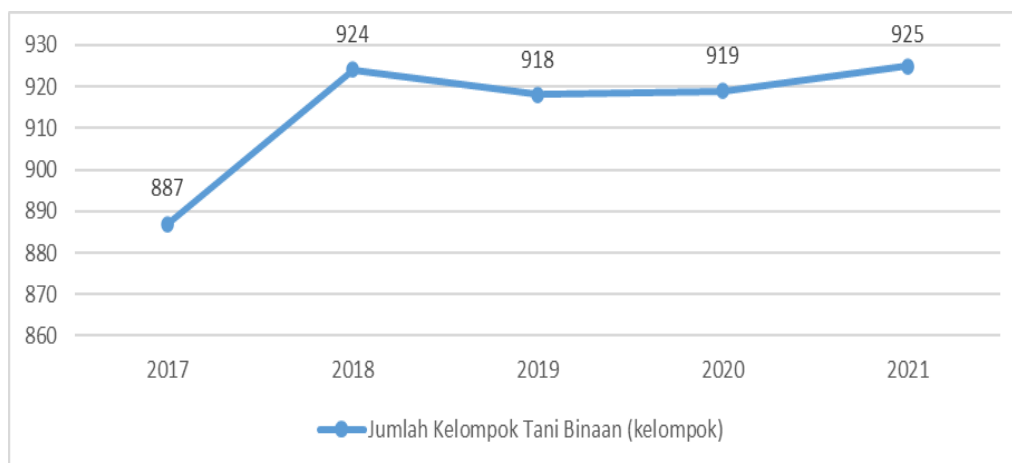
Produksi tanaman pangan terbagi menjadi 3 jenis tanaman utama yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Jenis tanaman pangan masih didominasi oleh komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi padi dalam periode tahun 2017-2021 berfluktuasi menurun, yaitu sebanyak 222.954 ton pada tahun 2017 menurun menjadi 185.681 ton pada tahun 2021. Hal serupa juga terjadi pada komoditas jagung, pada tahun 2017, produksi jagung 83.195 ton, menurun menjadi 77.047 ton pada tahun 2021.

Pada jenis tanaman hortikultura, meskipun mengalami penurunan, pisang masih menjadi komoditas dengan produksi tertinggi. Pada tahun 2021, produksi pisang mencapai 161.944 kg, diikuti kentang sebanyak 79.175 kg dan nangka 68.184 kg. Sementara pada jenis tanaman perkebunan, produksi tertinggi masih didominasi oleh 3 komoditas utama yaitu teh, kelapa, dan kopi. Pada tahun 2021, produksi teh di

Kabupaten Batang mencapai 1.500.235 kg, kelapa sebanyak 1.039.020 kg dan kopi sebanyak 812.309 kg.

Faktor yang mempengaruhi kenaikan jumlah kelompok tani binaan dipengaruhi oleh kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani binaan diharapkan mampu meningkatkan kemandirian petani, penerapan inovasi dan menganalisa usaha tani yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup petani. Jumlah kelompok tani binaan, di tahun 2017 sebanyak 887 kelompok, meningkat menjadi 924 kelompok di tahun 2018, Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 918 kelompok ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang peran penting kelompok tani, sehingga belum semua petani membentuk kelompok tani, dan mengalami kenaikan kembali sampai tahun 2021 menjadi 925 kelompok.

Gambar 2. 140
Jumlah Kelompok Tani Binaan Kabupaten Batang



Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang 2021

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 sebesar 23,09 persen terus menurun sampai dengan tahun 2021 menjadi 20,36 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi, menurunnya luas lahan pertanian, pergeseran perilaku petani dan lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha lainnya. Dalam hal ini lapangan usaha

lainnya yang berkontribusi adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sedangkan kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB cenderung tetap. Adanya pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri menyebabkan kontribusi sektor pertanian cenderung turun meskipun mungkin secara nilai naik.

Tabel 2. 60
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	23,09	21,22	20,71	20,36	20,36
2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB	%	18,09	16,8	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dispaperta Kabupaten Batang, 2022

Di sektor peternakan, produksi hasil peternakan khususnya daging dan telur cenderung meningkat dalam periode lima tahun terakhir. Produksi daging terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 1.354.320 kg menjadi sebesar 12.893.125 kg pada tahun 2021. Produksi telur juga terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 7.125.807 kg menjadi sebesar 14.585.205 kg pada tahun 2021. Sedangkan produksi susu cenderung berfluktuasi, dari sebesar 87.500 liter pada tahun 2017 menjadi sebesar 86.510 liter pada tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali meningkat sebesar 87.000 liter dan terus meningkat di angka 122.845 liter,. Peningkatan produksi daging dan telur diantaranya disebabkan karena kenaikan populasi hasil program upsus siwab, bantuan ternak dan bertambahnya jumlah peternak dan usahanya. Sedangkan untuk produksi susu juga mengalami kenaikan yang disebabkan karena penambahan produk susu kambing.

Untuk konsumsi protein berupa konsumsi gr/kapita/hari daging dan telur cenderung berfluktuasi. Konsumsi daging pada tahun 2017 sebesar 7,6 gr/kapita/hari menurun menjadi 6,57 gr/kapita/hr di tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali naik 6,91 gr/kapita/hari dan terus meningkat sampai tahun 2021 menjadi 7,83 gr/kapita/hr. Demikian juga dengan konsumsi telur, pada tahun 2017 sebesar 5 gr/kapita/hari menjadi 6,78 gr/kapita/hr pada tahun 2021. Sedangkan konsumsi susu lt/kapita/hari periode lima tahun terakhir masih stagnan berkisar di angka 0,01.

Tabel 2. 61
Produksi Peternakan Tahun 2017-2021

NO	INDIKAT OR	Satuan	Realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Produksi Hasil Ternak							
1	- Daging	kg	1.354.320	11.016.000	11.591.450	12.807.003	12.893.125
2	- Telur	kg	7.125.807	8.792.644	11.922.803	14.585.205	8.900.000
3	- Susu	Lt	87.5	86.3	87	120,412	120,000
Konsumsi Protein							
1	- Daging	gr/kapita/ hr	7.6	6.57	6.91	7.63	7.83
2	- Telur	gr/kapita/ hr	5	3.73	5.05	6.17	6.78
3	- Susu	Lt/kapita/ hr	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

Sumber: Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Batang Tahun 2022

4. Perdagangan

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017- 2021 dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya Jumlah Izin Usaha Perdagangan (SIUP), revitalisasi pasar rakyat, Jumlah penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Batang, Ekspor Bersih Perdagangan serta Kontribusi sektor

Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK.

Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki masyarakat meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun, hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas suatu usaha. Terkait syarat untuk mendapatkan bantuan usaha akibat dampak pandemi, pada tahun 2020 jumlah SIUP mencapai 31.829 usaha, meningkat dari 2019 sebanyak 12.498 usaha. SIUP selama tahun 2020 sebanyak 31.829 SIUP, yang terdiri dari 31.820 SIUP perdagangan kecil, 9 SIUP perdagangan menengah. Perusahaan yang memiliki SIUP terbanyak ada di Kecamatan Warungasem sebanyak 6.209 unit. Jumlah SIUP terbitan baru terbanyak menurut bulan ada di bulan November sebanyak 17.285 unit.

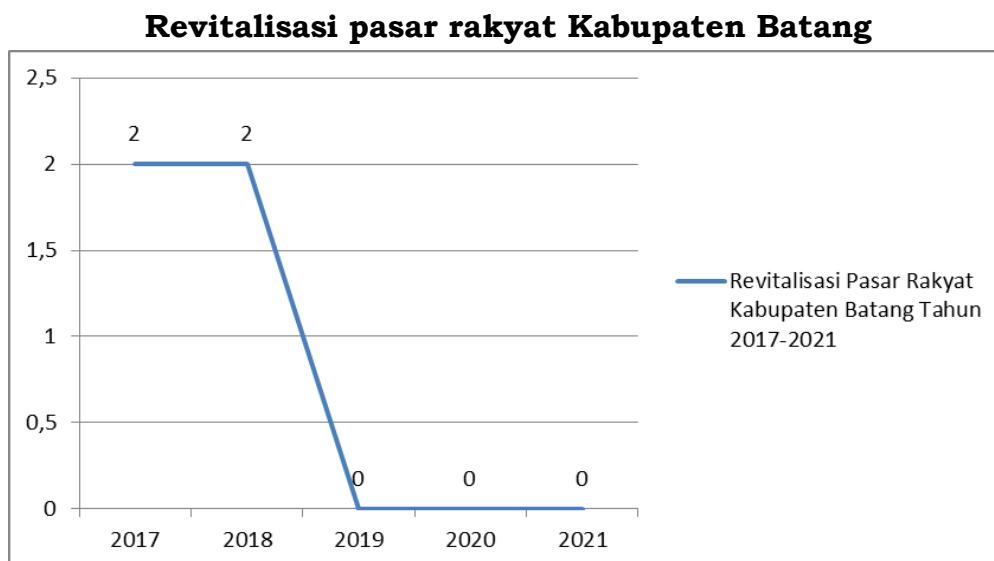
Gambar 2. 141
Jumlah Usaha Perdagangan Kecil Yang Memiliki SIUP
di Kabupaten Batang, Tahun 2016 - 2020 (unit)



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2021

Sedangkan revitalisasi pasar rakyat mengalami penurunan dalam periode 2017-2021, dari 2 pasar di tahun 2017 menjadi 0 pada tahun 2021. Jumlah pasar yang dilakukan revitalisasi pasar sejak tahun 2017-2018 cenderung tetap, hal ini dikarenakan jumlah keseluruhan pasar yang ditangani pemerintah Kabupaten Batang tidak bertambah.

Gambar 2. 142

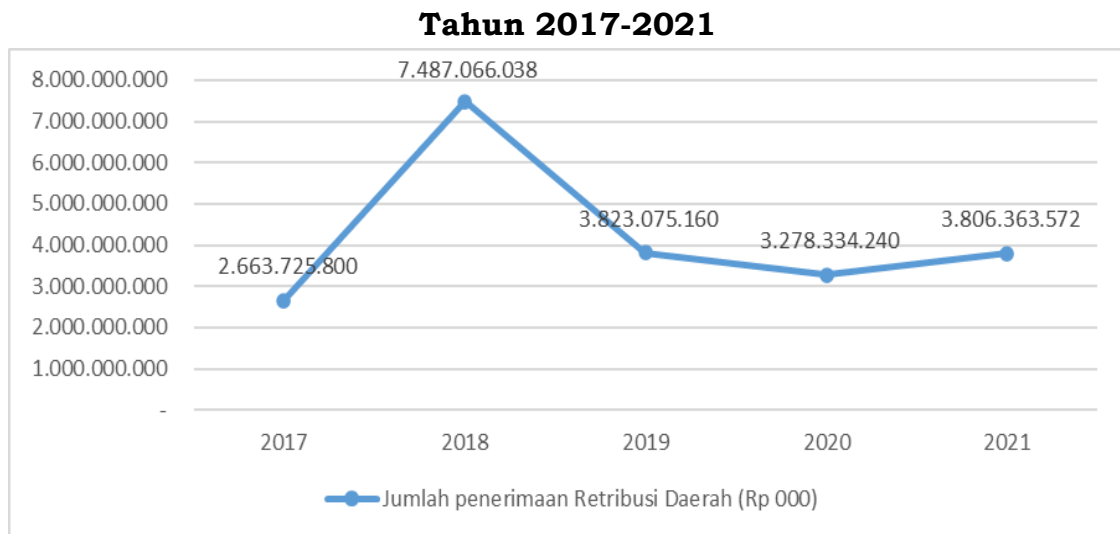


Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2022

Terkait pusat aktivitas belanja online masyarakat Batang yang ada di Facebook, terdapat sekitar 70an usaha, jumlah ini masih berkembang lagi, karena pada wilayah kecamatan mempunyai beberapa komunitas pedagang online.

Untuk jumlah penerimaan retribusi daerah dalam periode lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana tahun 2017 sebesar Rp 2.663.725.800,-. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp 7.487.066.038,00, namun pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 3.278.334.240 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi Rp. 3.806.363.572.

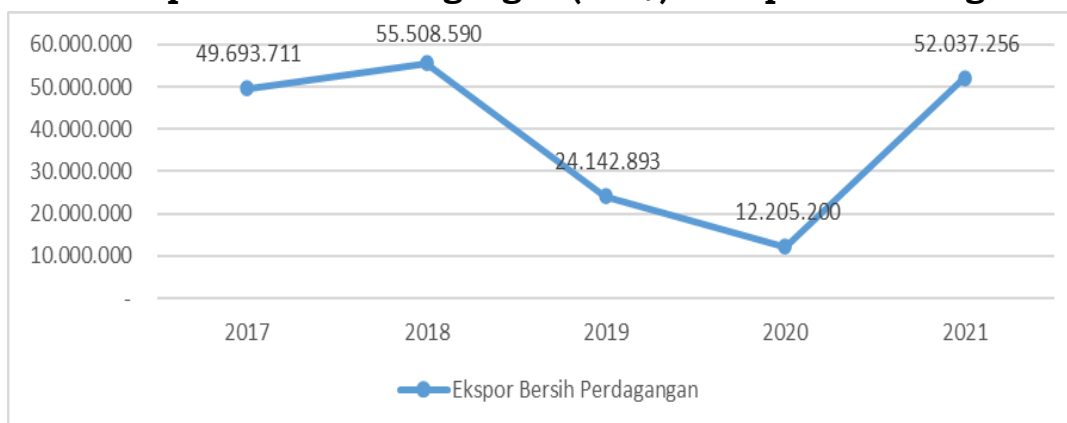
Gambar 2. 143
Jumlah penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Batang



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2022

Ekspor bersih perdagangan Kabupaten Batang dalam periode lima tahun terakhir berfluktuasi meningkat, tahun 2017 ekspor bersih Kabupaten Batang mencapai US\$ 49.693.711,49 meningkat menjadi sebesar US\$ 55.508.590,25 pada tahun 2018. Dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi US\$ 24.142.893 dan menjadi US\$ 12.205.200 di tahun 2020. Pada tahun 2021 nilai ekspor bersih Kabupaten Batang kembali mengalami kenaikan menjadi US\$ 52.037.256.

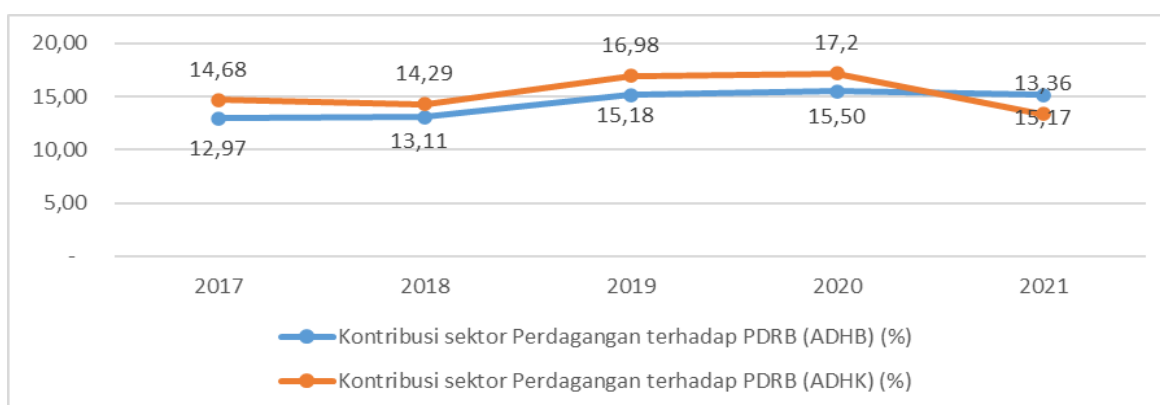
Gambar 2. 144
Ekspor Bersih Perdagangan (US \$) Kabupaten Batang



Sumber: Disperindag Kabupaten Batang 2022

Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB baik ADHB maupun ADHK fluktuatif dalam periode 2017-2021. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB pada tahun 2021 sebesar 13,36 persen lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 15,50 persen. Demikian juga dengan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK tahun 2021 sebesar 15,17 persen lebih rendah jika dibandingkan tahun 2020 sebesar 17,2 persen. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan tersebut disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada menurunnya permintaan, serta terganggunya distribusi karena pembatasan aktivitas sosial.

Gambar 2. 145
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK



Sumber: Disperindag Kabupaten Batang 2022

5. Perindustrian

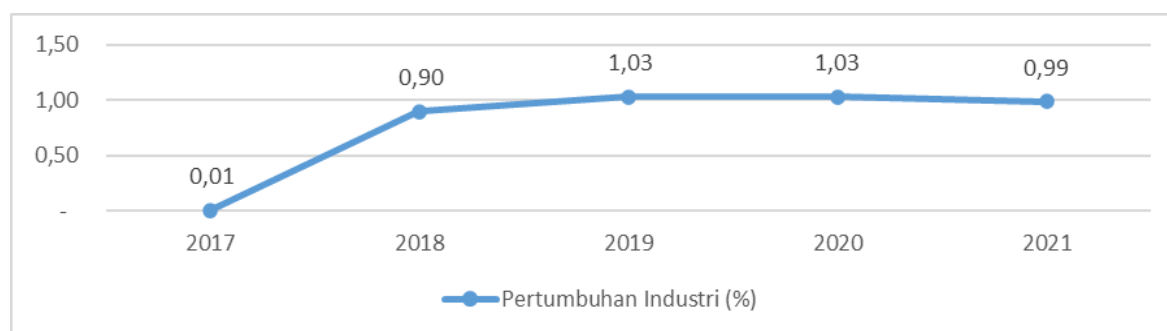
Tabel 2. 62
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Batang Tahun 2016-2020

Kelompok Industri	Unit Usaha					Tenaga Kerja				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A. Hasil Pertanian dan Kehutanan	2.111	2.168	8.033	7.685	8.163	6.930	6.856	24.231	23.735	23.112
B. Industri Aneka	223	272	281	314	320	1.459	1.637	1.694	1.854	1.823
C. Logam, Mesin dan Kimia	620	601	653	697	742	669	1.693	1.903	1.954	1.590

Sumber : Disnaker, 2021

Hasil capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Urusan Perindustrian. Pertumbuhan industri di Kabupaten Batang terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir, pada tahun 2017 sebesar 0,01 persen menjadi 0,99 persen pada tahun 2021.

Gambar 2. 146
Pertumbuhan Industri Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

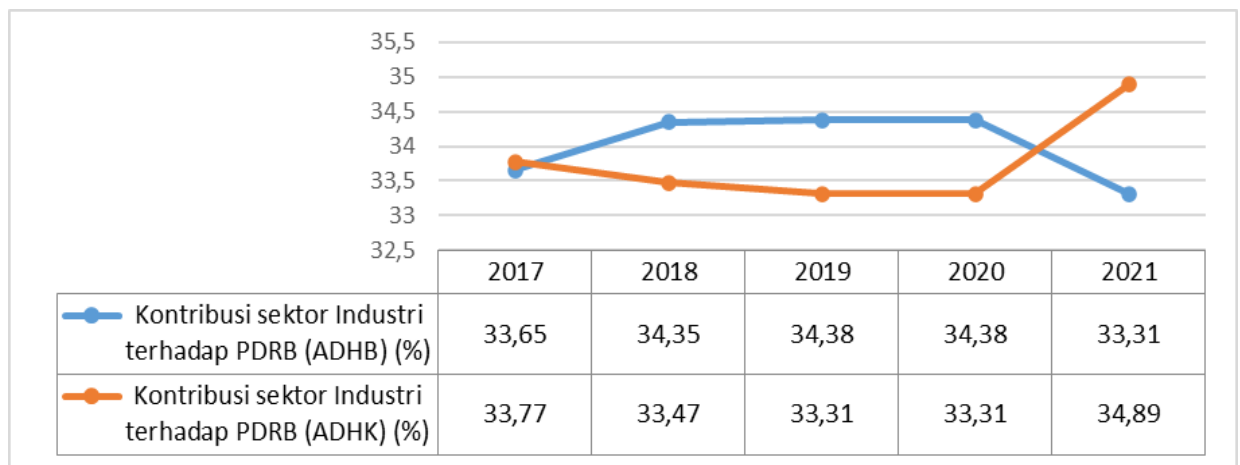


Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2022

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB berfluktuasi

menurun dalam periode lima tahun terakhir, yaitu sebesar 33,65 persen pada tahun 2017 menjadi 33,31 persen pada tahun 2021. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHK berfluktuasi meningkat dalam periode tahun 2017-2021 yaitu dari sebesar 33,77 persen pada tahun 2017 menjadi 34,89 persen pada tahun 2021, capaian tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 33,81 persen.

Gambar 2. 147
Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Disperindagkop Kabupaten Batang 2022

6. Transmigrasi

Dalam bidang ketransmigrasian, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa "Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan". Tujuan resmi program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain luar pulau Jawa. Perkembangan pemberangkatan transmigrasi dari Kabupaten Batang ke daerah transmigran selama tahun 2017-2021 fluktuatif, dari tahun 2017

sebanyak 5 KK, mengalami penurunan di tahun 2018 sebanyak 4 KK, namun kemudian mengalami kenaikan di tahun 2019 menjadi 5 KK. Tahun 2020 s/d Tahun 2021 capaian sebesar 0 karena transmigrasi ditiadakan secara nasional. Hal ini disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi.

Tabel 2. 63
Jumlah KK yang mengikuti Transmigrasi
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi	KK	5	4	5	0	0

Sumber: Disnaker Kabupaten Batang, 2022

d. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja fungsi penunjang perencanaan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017- 2021 relatif baik, dimana hal tersebut dapat dilihat dari persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD maupun ke dalam APBD terus mengalami peningkatan, dari 95 persen di tahun 2017 menjadi sebesar 100 persen di tahun 2021. Disamping itu juga peran serta masyarakat yang relatif tinggi dalam pelaksanaan musrenbang, dimana tingkat kehadirannya dalam periode lima tahun terakhir terus meningkat, dari sebesar 85 persen di tahun 2017 menjadi 90 persen di tahun 2021.

Tabel 2. 64
Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan
Tahun 2017- 2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	
1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	%	95	97	100	100	100

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	5	6	7	8	
	RKPD						
2	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	95	97	100	100	100
3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	85	87	90	90	90

Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang, 2022

2. Keuangan

Kinerja fungsi Penunjang Keuangan selama kurun waktu tahun 2017-2021 dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Fungsi Penunjang Keuangan dimana persentase peningkatan PAD selama rentang tahun 2017-2021 mengalami fluktuatif. Kondisi ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 selain itu adanya pelimpahan kewenangan pajak daerah yang dilimpahkan ke Provinsi, objek pajak yang berkurang, serta terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya.

Sedangkan indikator kinerja lainnya cenderung stabil dan sudah memenuhi amanat regulasi. Untuk persentase belanja pendidikan dalam periode lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, meskipun ada penurunan namun sudah melebihi dari batas minimal alokasi belanja pendidikan sebesar 20%. Begitupun dengan presentase belanja kesehatan dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari sebesar 86,34% pada tahun 2017 menjadi 90,7% pada tahun 2021.

Tabel 2. 65

Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Tahun 2017- 2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase peningkatan PAD	%	3,25	8,07	6,00	4,59	30,72

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	00
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	94,09	85,53	82,05	85,4	95,2
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	86,34	84,68	77,26	75,84	90,7

Sumber: BPKPAD Kabupaten Batang, 2022

3. Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki peran penting ialah sumber daya aparturnya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan komitmen dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan. dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat dari capaian persentase akurasi data kepegawaian, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, serta persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Persentase akurasi data kepegawaian relatif stabil pada tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 yaitu sebesar 100% persen, kemudian turun menjadi 92,37 persen pada tahun 2020 dan kembali naik menjadi 95% pada Tahun 2021.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

dalam periode lima tahun terakhir fluktuatif, yaitu sebesar 1,93 persen pada tahun 2017, menjadi 2,01 persen pada tahun 2021. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah ASN yang mengajukan permohonan izin belajar dan dikirim untuk melaksanakan tugas belajar. Adanya penyederhanaan jabatan yang mengalihkan sebagian jabatan struktural menjadi jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan minat ASN untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga indikator Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dapat meningkat.

Indikator jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami penurunan dalam periode tahun 2017-2020. Pada Tahun 2017, jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 36 orang, pada Tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 4 orang. Jumlah pengiriman pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural disesuaikan dengan anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini. Adanya Pandemi Covid-19 membuat Pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran dan mengalihkan anggaran tersebut untuk penanganan Covid-19. Anggaran untuk melakukan pengiriman pejabat struktural untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan struktural pun dialihkan untuk penanganan Pandemi tersebut. Sehingga pada Tahun 2020 tidak ada pengiriman pejabat struktural untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Pada Tahun 2021, pengiriman pejabat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pejabat struktural kembali dilaksanakan dengan mengirimkan 66 orang pejabat struktural.

Tabel 2. 66
Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2017- 2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	100	100	100	92,37	95

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	1,93	2,34	1.11	0,6	2,01
3	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Diklatpim	PNS	36	4	4	0	6

Sumber: BKD Kabupaten Batang, 2022

4. Penelitian dan pengembangan

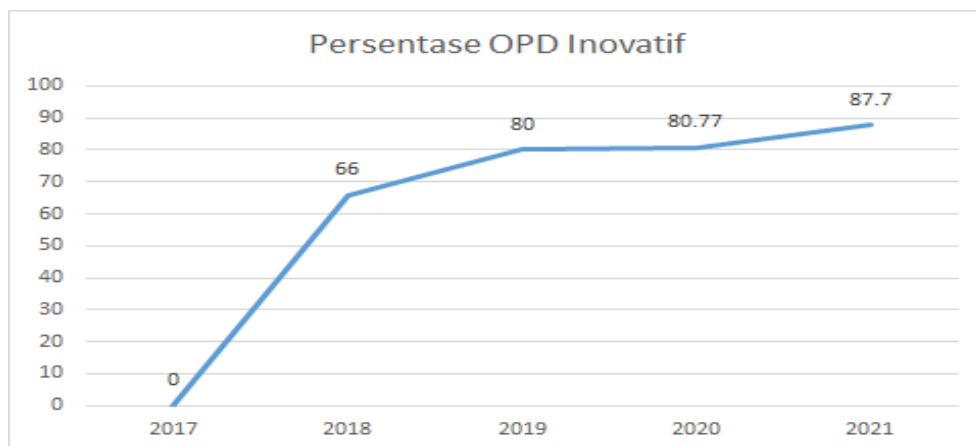
Pada pasal 209 Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan penelitian dan pengembangan. Dalam pasal 373, pasal 374 dan pasal 388 disebutkan bahwa Kelitbangan sebagai salah satu instrumen pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembinaan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan penguatan kelembagaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Badan Perencana dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Batang sebagai fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.

Kinerja fungsi penunjang penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017-2021 realisasinya cenderung naik. Hal ini dapat diketahui dari capaian indikator yang ada berupa persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, persentase OPD inovatif dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan daerah. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan capaiannya tetap dalam periode tahun 2017-2021, disebabkan sulitnya penghitungan pemanfaatan hasil kelitbangan di masyarakat sehingga penghitungan

baru pada lingkup Perangkat Daerah saja.

Persentase OPD inovatif terus meningkat selama periode 2017-2021, dari sebesar 0 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 87,7 persen pada tahun 2021. Fasilitasi ini dilakukan sebagai upaya untuk menumbuhkan kembangkan inovasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 2. 148
Persentase OPD Inovatif Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

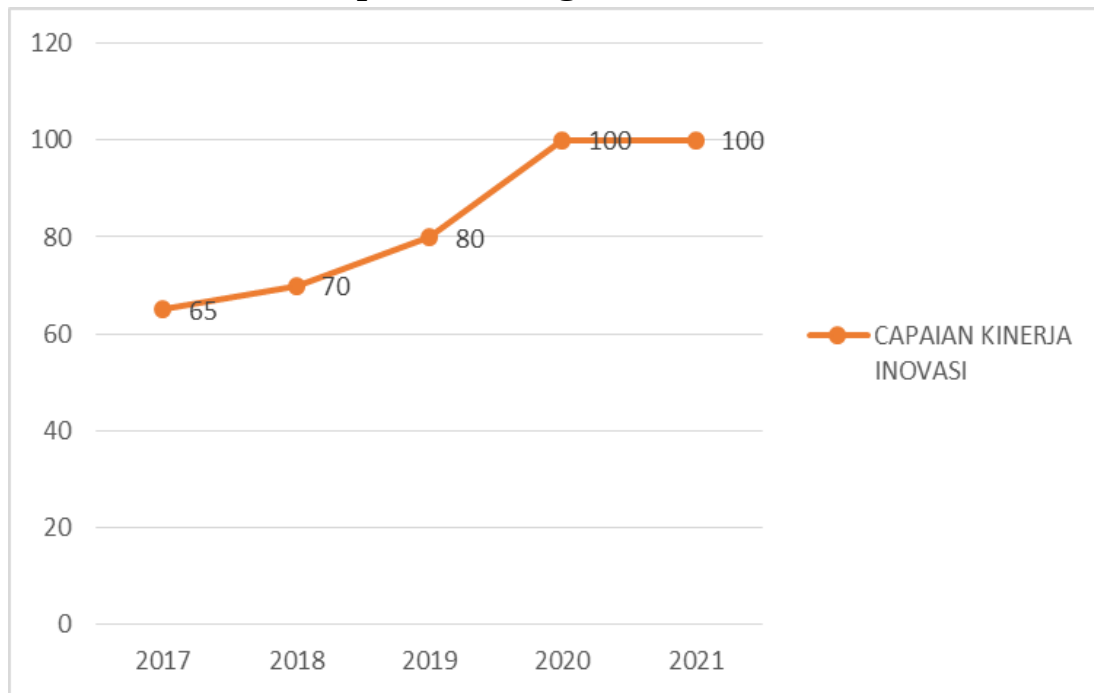


Sumber: BapelitbangKabupaten Batang Tahun 2022

Inovasi memiliki peranan penting dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan, terutama tuntutan inovasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Karena itu perlu adanya dorongan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan inovasi sebagai acuan/*roadmap* sistem inovasi daerah. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah meningkat dalam periode tahun 2017-2021, pada tahun 2017 sebesar 65% meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2021.

Gambar 2. 149
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan

di Kabupaten Batang Tahun 2017-2021



Sumber: Bapelitbang Kabupaten Batang Tahun 2022

5. Pengawasan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyelesaian LHP sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2017 sebesar 75 persen menjadi 91,69 persen pada tahun 2021. Diharapkan capaian ini kan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Meningkatnya kinerja pengawasan juga ditunjukkan oleh predikat WTP atas laporan keuangan daerah selama 4 tahun terakhir. Disamping itu juga tindak lanjut temuan BPK-RI juga dapat dilakukan dengan baik, kondisi ini terlihat dari meningkatnya persentase tindak lanjut temuan dari tahun 2017 sebesar 75 persen menjadi 91,67 persen pada tahun 2021.

Tabel 2. 67
Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah	%	75	75	80	85,74	91,69

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penyelesaian Tindak Lanjut LHP						
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	BLM AUDIT
3	Temuan BPK-RI yang sudah ditindak lanjuti	%	75	83	82	88,5	91,67

Sumber: Inspektorat Kabupaten Batang, 2022

6. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) perumusan kebijakan teknis dan administratif oleh Perangkat Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah; 3) pembinaan penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah; 5) pemantauan, evaluasi dan pengendalian kegiatan perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017-2021 secara keseluruhan dapat dilihat dari capaian kinerja indikator Sekretariat Daerah yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 68
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat Daerah
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase PD	%	33,75	68,25	100	100	100

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	yang melakukan KAD						
2	Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR	UMKM	25	25	25	35	20
3	Penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah	%	15	20	20	24,73	25
4	Kerjasama dalam penyebarluasan berita melalui media massa cetak, elektronik, dan online	%	100	100	100	100	100
5	Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	%	100	100	100	100	100
6	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	78,57	60,90	62,16	76,71	

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Batang, 2022

7. Sekretariat Dewan

Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Batang selama kurun waktu dilihat dari Prosentase SDM yang mengikuti bintek/ Sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se Indonesia tahun 2017-2021 secara umum sudah baik meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 27,3 persen karena adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19, namun terdapat perbaikan di tahun 2021

menjadi 90,91%. Demikian juga persentase anggota DPR yang mengikuti bintek peningkatan kapasitas lembaga DPRD juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya *refocusing* anggaran, dari tahun 2017 dengan angka 100% turun menjadi 60% pada 2020 namun naik kembali di tahun 2021 menjadi 97,78%. Indikator banyaknya promperda mengalami penurunan dalam periode lima tahun terakhir dari 24 perda di tahun 2016 menjadi hanya 8 perda pada tahun 2020 yang terselesaikan. Kondisi Penurunan indikator ini disebabkan oleh berapa jumlah OPD untuk mengajukan Raperda. Dalam perjalanannya, raperda tersebut melalui beberapa proses dan tahapan yang pada akhirnya raperda hanya sampai dengan draft raperda, namun harapannya adalah menjadi perda. Kinerja Penunjang Penunjang Sekretariat DPRD dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 69
Kinerja Fungsi Penunjang Sekretariat DPRD
Tahun 2017-2021

NO	INDIKATOR	Satuan	realisasi 2017-2021				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase SDM yang mengikuti bintek / Sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se Indonesia	%	100	100	100	27,3	90,91
2	Prosentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100	100	100	60	97,78
3	Banyaknya Promperda	Perda	14	3	13	11	8

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, 2022

2.1.5 Capaian Pemulihan Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian Kabupaten Batang pada tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian nasional dan Jawa Tengah. Pada tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Batang selama tahun 2020 berakibat adanya kebijakan daerah jadi berubah. Adanya Kebijakan PSBB di beberapa daerah juga sangat berdampak pada perekonomian Kabupaten Batang, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang masih lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen, atau tumbuh sebesar -2,65 persen, secara Nasional perekonomian terjadi kontraksi 2,07 persen, atau tumbuh sebesar -2,07 persen, sedangkan di Kabupaten Batang terjadi pertumbuhan ekonomi kontraksi sebesar 1,29 persen, atau dengan kata lain tumbuh sebesar -1,29 persen. Semua komponen PDRB Pengeluaran mengalami kontraksi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai penopang utama ekonomi Kabupaten Batang berkontraksi, atau tumbuh -1,14 persen, sedangkan penopang kedua setelah PKRT yaitu PMTB mengalami kontraksi, atau tumbuh sebesar -28,33 persen. Nilai ekonomi Kabupaten Batang pada tahun 2020 atas dasar harga berlaku (adhb) mencapai Rp 21,62 triliun, yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di Kabupaten Batang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) yaitu 72,01 persen. Kemudian digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB) dan perubahan inventori sebesar 28,29 persen.

Sedangkan dari sisi sektor lapangan usaha, tercatat sebanyak 11 (sebelas) sektor lapangan usaha mengalami kontraksi, berkisar antara minus 0,10 persen hingga minus 26,81 persen. tiga sektor lapangan usaha dengan kontraksi terburuk terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar minus 26,81 persen, jasa perusahaan minus 6,74 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus

6,48 persen.

Pada tahun 2021, kondisi ekonomi Kabupaten Batang telah mulai pulih, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,88 persen. Laju pertumbuhan tertinggi disumbang oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 35,78 persen pada tahun 2021. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang merupakan dua lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Batang juga tumbuh positif pada angka 4,38 persen dan 5,95 persen dibanding tahun 2020. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertanian justru mengalami pelambatan sebesar -0,47 persen. namun demikian, peningkatan angka Pertumbuhan Ekonomi ini ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan Angka Kemiskinan. pada tahun 2021, angka kemiskinan Kabupaten Batang justru naik menjadi 9,68 persen dari 9,13 di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum dirasakan oleh lapisan masyarakat secara merata. Jika dilihat dari pekerjaan penduduk miskin, peningkatan jumlah penduduk miskin terjadi pada penduduk miskin yang bekerja di sektor informal dari 39,85 persen di tahun 2020 menjadi 42,69 persen di tahun 2021, serta penduduk miskin yang tidak bekerja yang naik dari 43,24 persen di tahun 2020 menjadi 44,44 persen di tahun 2021. Demikian juga dengan angka TPT, meskipun menurun dari tahun 2020 namun masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya pulih meskipun pertumbuhan ekonomi telah membaik.

Untuk itu, kedepan perlunya upaya yang lebih keras lagi untuk terwujudnya pemulihan ekonomi Kabupaten Batang, bukan hanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, namun juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.

2.1.6 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

1. Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan

Tabel 2. 70

Capaian Kinerja SPM Bidang Pendidikan tahun 2017-2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	78	81,58	81,61	81,61	81,61
		Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B	35	37,03	45,65	45,65	45,65
		Prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan pemerintah daerah mempunyai gedung yang dilengkapi dengan ruang kelas, ruang guru, jamban dan mebelair dalam kondisi yang baik	78	81,56	93,55	93,55	93,55
		Prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	25,5	35,6	46,77	46,77	46,77
2	Pendidikan dasar	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	100	100	100	100	100
		Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	94,52	94,89	95,58	95,58	95,58
		Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	95,49	97,41	97,52	97,52	97,52
		Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	80,85	81,1	81,62	81,62	81,62

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
		Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	94,59	95,1	95,84	95,84	95,84
		Prosentase Sekolah Dasar Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, jamban, alat peraga IPA dan mebelair) dalam kondisi baik	68	72,17	78,3	78,3	78,3
		Prosentase Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mempunyai sarana dan prasarana minimal (ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan, jamban, Lab IPA, Lab Komputer dan mebelair) dalam kondisi baik	74	87,19	81,4	81,4	81,4
		Prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan	78	100	94,32	94,32	94,32
3	Pendidikan Kesetaraan	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	99,75	99,8	99,86	99,86	99,86
		Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B	30	38,09	40	40	40

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SPM bidang pendidikan belum tercapai secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya indikator SPM bidang pendidikan yang belum mencapai 100 persen, yang artinya belum semua sasaran yang membutuhkan layanan di bidang pendidikan terlayani. Dalam periode 2017-2021 terdapat 2 (dua) indikator SPM bidang pendidikan dengan capaian kinerja 100 persen yaitu indikator Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat dan prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan, namun demikian indikator prosentase Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan tercapai 100 persen hanya di tahun 2018. Sedangkan beberapa indikator dengan capaian yang masih rendah, yaitu dibawah 50 persen adalah indikator prosentase satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal B dengan capaian rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 41,79 persen. Kemudian indikator prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan dengan capaian rata-rata capaian selama lima tahun terakhir sebesar 40,28 persen, serta indikator Prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B dengan capaian rata-rata capaian selama lima tahun terakhir sebesar 37,61 persen. Hal ini berarti kedepan dibutuhkan upaya yang lebih keras serta langkah-langkah kongkrit, agar pencapaian layanan SPM bidang pendidikan dapat tercapai optimal.

2. **Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan**

Tabel 2. 71
Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan tahun 2017-2021

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	93,92	92,65	93,39	96,43	93,64
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	96,61	98,19	99,16	99,49	99,60
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	99,16	99,23	99,39	99,39	99,30
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	79,09	81,99	88,32	72,58	80,01
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	99,60	97,58	100,00	31,92	47,79
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining	52,33	55,08	67,25	58,94	62,04

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
		kesehatan sesuai standar					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	53,87	62,82	73,02	41,41	64,09
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18,80	53,10	48,08	41,04	34,76
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,85	33,48	85,09	93,26	94,70
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100,00	100,00	100,00	96,03	82,11
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	47,14	55,69	64,93	45,32	38,88

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	CAPAIAN (%)				
			2017	2018	2019	2020	2021
2	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	51,04	85,42	92,17	78,68	103,58

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja SPM bidang Kesehatan mayoritas belum mencapai 100 persen dari sasaran / penerima layanan dasar yang seharusnya mendapatkan pelayanan. Dalam kurun waktu 2017-2021, hanya terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian 100 persen, namun hanya pada tahun tertentu saja. Seperti misalnya indikator Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar telah mencapai 100 persen, tapi hanya pada tahun 2019 saja, namun tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 31,92 persen dan 47,79 persen yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada diberlakukannya sistem pembelajaran jarak jauh (daring), sehingga pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tidak dapat dilakukan secara maksimal. Indikator berikutnya adalah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat telah mencapai 100 persen pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Sedangkan 10 indikator lainnya belum mencapai 100 persen yang artinya kinerja pelayanan SPM belum optimal. Bahkan, terdapat beberapa indikator dengan capaian yang relatif masih rendah yaitu dibawah 50 persen, diantaranya Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (tahun 2020-2021), Pelayanan kesehatan penderita

hipertensi (tahun 2020-2021), Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (tahun 2017-2018), Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (tahun 2017,2018, 2020 dan 2021). Penyebab dari rendahnya capaian kinerja pelayanan SPM bidang kesehatan secara umum adalah terbatasnya sumberdaya untuk pelayanan, serta kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan masih kurang. Sedangkan penyebab dari rendahnya capaian kinerja pelayanan SPM bidang kesehatan di tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan karena pembatasan fisik serta kekhawatiran masyarakat untuk datang ke fasilitas kesehatan karena takut terkena Covid-19. Kondisi capaian kinerja tersebut mengindikasikan bahwa kedepan diperlukan upaya lebih keras agar kebutuhan penerima layanan dasar dapat terlayani semua.

3. **Capaian Kinerja SPM Bidang Ketentraman dan ketertiban umum**

Capaian kinerja SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tahun 2020 dan 2021 rata rata mencapai 100 persen. Untuk lengkapnya tersaji sebagaimana pada tabel dibawah ini

Tabel 2. 72
Capaian Spm Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	JENIS LAYANAN SPM	CAPAIAN				
		2017	2018	2019	2020	2021
		%	%	%	%	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	NA	100	100
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	NA	NA	NA	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	NA	NA	NA	3,99	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	NA	NA	NA	9,42	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	NA	NA	NA	100	100

2.2 HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Tabel 2. 73
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar															
Pendidikan															
1	Angka Melek Huruf Penduduk Usia Produktif	%	99,55	99,75	99,85	100	99,38	99,47	99,8	99,86	100	100,00	100,00	100,00	Telah Tercapai
2	Angka Rata-rata lama sekolah	Thn	7,20	6,82	6,83	6,84	6,85	7,19	6,61	6,62	6,87	6,88	6,86	100,29	Telah Tercapai
3	Angka Partisipasi Kasar														
	Angka Partisipasi Kasar SD/Sederajat	%	104,75	104,8	104,85	104,9	104,95	104,78	107,27	106,4	107,38	107,31	105,00	102,20	Telah Tercapai
	Angka Partisipasi Kasar SMP/Sederajat	%	95,45	95,55	95,65	95,75	95,85	95,49	97,41	97,52	97,61	97,68	96,00	101,75	Telah Tercapai
4	Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk														
	a. Jenjang SD/Sederajat	%	113,42	115,90	114,59	114,25	45,00	39,98	41,18	42,41	43,69	51,00	50,00	102,00	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
	b. Jenjang SMP/ Sederajat	%	75,02	86,29	82,98	66,50	17,95	15,95	16,43	16,92	17,43	28,21	25,00	112,84	Telah Tercapai
5	Angka Partisipasi Murni														
	Angka Partisipasi Murni SD/Sederajat	%	95	95,25	95,5	96	96,25	94,52	94,89	95,58	96,38	97,91	96,50	101,46	Telah Tercapai
	Angka Partisipasi Murni SMP/Sederajat	%	80,75	80,85	81	81,15	81,25	80,85	80,1	81,62	81,72	81,92	81,50	100,52	Telah Tercapai
6	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini	per 1000	77	78,15	79	79,2	80,00	80,39	81,58	81,61	82,05	82,30	82,00	100,37	Telah Tercapai
7	Prosentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	83,1	84,48	87,13	89,33	90,00	92,12	94,81	88,88	89,37	90,11	90,67	99,38	Akan Tercapai
Kesehatan															
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	125,5	117,65	109,81	101,97	94,13	127,27	159,8	111,08	109,36	273,43	86,28	316,91	Telah Tercapai
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	14	13,5	13	12,5	12,3	12,73	11,27	11,43	9,45	10,11	12	84,25	Perlu Upaya Keras
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 1.000 KH	17	16	15,8	15,5	15,3	15,59	13,26	13,33	11,56	10,94	15,1	72,45	Perlu Upaya Keras
4	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,2	0,2	0,19	0,18	0,17	0,22	0,17	0,25	0,17	0,21	0,16	131,25	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
5	Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB	Per 100.000 pend	104	105	106	107	108		129,3	157,17	110,24	87,88	109	80,62	Perlu Upaya Keras
6	Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +	%	88,5	88,6	88,9	89	89,3	87,12	85	88,3	85,88	84,2	89,5	94,08	Akan Tercapai
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1	Persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	43,1	50,97	58,84	66,47	74,58	46,00	49,23	52,12	52,87	57,44	75,25	76,33	Perlu Upaya Keras
2	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	49,25	68,45	69,53	72,01	76,65	51,16	56,3	64,5	70,78	79,41	85,16	93,25	Akan Tercapai
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan	%	13,80	64,99	70,04	75,02	80	15,35	15,35	7,34	24,32	28,83	85	33,92	Perlu Upaya Keras
4	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	1,98	72,73	72,73	72,73	72,73	100	72,73	Perlu Upaya Keras
Perumahan dan Kawasan Pemukiman															
1	Cakupan layanan akses air minum perumahan	%	-	-	78	80	82	-	80,06	82,17	83,25	84,12	84	100,14	Telah Tercapai
2	Cakupan layanan akses sanitasi lingkungan perumahan	%	66	67	70	72	74	-	78,56	79,72	80,05	80,48	77	104,52	Telah Tercapai

[illegible]

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil	%	74,99	396304,3 5	70,00	70,00	80	29,48	368.24 6,00	88	90	95	80	118,75	Telah Tercapai
	Rasio PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	60	60	0,65	65	75	53,59	70,05	100	100	90,34	75	120,45	Telah Tercapai
	Persentase Santunan Kematian yang diberikan	%	166,00	4,51	100,00	100,00	95	166	4,23	88,82	97,65	100	100	100,00	Telah Tercapai
	Jumlah PMKS yang diberdayakan	per 1000	60	40	0	0	4,05	0,12	95,77	17,53	9,92	9,03	4,05	222,96	Telah Tercapai
Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar															
Tenaga Kerja															
1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	390386	396298	402595	408859	415.232	67,17	368.24 6	402.50 2	416.576	416.576	421.900	98,74	Akan Tercapai
2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,04	68,24	68,48	68,70	68,91	43,25	70,05	76,57	70,93	71,4	69,14	103,27	Telah Tercapai
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,17	3,97	3,76	3,61	3,5	5,82	4,23	4,16	6,93	6,59	3,23	204,02	Telah Tercapai
4	Tingkat Kesempatan kerja	%	95,53	94,29	94,29	94,31	94,99	94,18	95,77	95,84	93,08	93,07	96,63	96,32	Akan Tercapai
5	Rasio daya serap tenaga kerja	%	100,00	70,00	74,00	80,00	84	61,11	84,68	59,35	1.496,80	86,06	90	95,62	Akan Tercapai

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	%	2,40	2,29	5,18	2,39	4,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	5	48,00	Perlu Upaya Keras
2	PKK Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	78,98	93,81	93,81	100	100	100,00	Telah Tercapai
3	Posyandu Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Telah Tercapai
4	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	55,33	55,33	60,1	66,1	60	54,16	59	60	70	60	60	100,00	Telah Tercapai
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,50	0,43	0,46	2,00	2,2	2	1,04	1,03	1,81	0,87	2	43,67	Perlu Upaya Keras
2	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Orang	119.814	126.603	117.94 2	116.994	116.060	130.238	122.67 8	124.41 7	91.150	90.701	115.121	78,79	Perlu Upaya Keras
3	Rata-rata jumlah JIWA per kepala keluarga	Jiwa	2,74	3,00	4,07	1,82	4,05	3	3,5	3,18	2,72	3,36	4,04	83,15	Perlu Upaya Keras
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	%	1,40	0,90	0,89	0,06	3,02	2,05	1,72	1,71	0,46	0,34	3,01	11,35	Perlu Upaya Keras

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
5	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	80,00	85,00	87,55	90,00	92,50	82,53	82,05	81,54	74,49	72,34	95	76,15	Perlu Upaya Keras
6	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	17,92	7,57	10,60	18,59	10,40	8,98	9	9,68	13,97	15,91	10,30	154,47	Telah Tercapai
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	82,50	89,00	90,00	90,50	93	84,85	83,67	83,7	81,78	78,66	95	82,80	Perlu Upaya Keras
Pehubungan															
1	Rasio ijin trayek	%	63	67	70	76	80	0,54	70	63,73	54,68	81	90	90,00	Akan Tercapai
2	Pemasangan Rambu-rambu	%	20,90	22,40	23,80	25,30	27,33	20,3	20	20	20,86	29,67	35	84,77	Akan Tercapai
3	Pemasangan penerangan jalan umum	%	24,00	39,00	55,00	70,00	45,73	23,5	37,98	52,78	58,21	45,73	50	91,46	Akan Tercapai
Komunikasi dan Informatika															
1	Jumlah jaringan komunikasi	titik	105	110	115	120	125	103	110	115	120	125	130	96,15	Akan Tercapai
2	Persentase PD telah memiliki website aktif	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100	80	85	100	100	100	100	100,00	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
3	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	Klmpk	41	41	41	41	41	41	41	41	41	78	81	96,30	Akan Tercapai
4	Persentase Smart Village	%	4,18	6,28	8,37	10,46	3,3	3,16	3,24	20	24,19	3,26	3,45	94,49	Akan Tercapai
5	Skor PeGi (Pemeringkatan E Government)	skor	#DIV/0!	6,28	3,00	3,20	3,6	0	7	3,29	3,29	3,24	3,3	98,18	Akan Tercapai
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah															
1	Prosentase Koperasi Aktif	%	74,00	76,00	78,00	80,00	80	61,5	75,14	76,83	78,72	78,99	82	96,33	Akan Tercapai
2	Prosentase Koperasi Sehat terhadap KSP	%	36,50	38,00	40,00	45,00	50	56,66	42,73	55	57,87	57,88	52	111,31	Telah Tercapai
3	Jumlah Produk OVOP	komoditi	4	6	8	8	1	4	6	8	8	1	2	50,00	Akan Tercapai
4	Jumlah usaha mikro kecil	Unit	101600,80	101402,71	101484,48	105900,83	101675	101.550,00	101.930,00	102.682,00	102.512,00	105875	101786	104,02	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
5	Jumlah Wirausaha baru	Unit	30,00	30,00	50,00	50,00	50	30	190	110	150	140	52	269,23	Telah Tercapai
Penanaman Modal															
1	Jumlah realisasi nilai investasi	Rp/ Milya r	146,49	198	218	240	264,00	421,63	67.270,08	14.707,54	9.082,78	7.560,06	290	2606,92	Telah Tercapai
2	Jumlah perusahaan baru yang berinvestasi di Kabupaten Batang	Unit	500	20	20	20	20	159	40	33	65	64	20	320,00	Telah Tercapai
3	Jumlah penyerapan tenaga kerja	Orang	1000	2000	2000	2000	2.000	1.150,00	2.903,00	2.236,00	958	6467	2000	323,35	Telah Tercapai
4	Jumlah realisasi nilai investasi	Milya r Rp	146,49	198	218	240	264,00	421,09	67.270,00	14.707,54	9.082,78	7.560,06	290	2606,92	Telah Tercapai
Pemuda dan Olahraga															
1	Jumlah kejuaraan pemuda dan olahraga di tingkat Provinsi Jawa Tengah	kali	-	23,00	25,00	27,00	29	-	36	39	50	29	30	96,67	Akan Tercapai
2	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	buah	15,00	16,00	17,00	18,00	19	15	17	21	18	19	20	95,00	Akan Tercapai
3	Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina	buah	40,00	44,00	45,00	46,00	47	43	46	45	46	45	48	93,75	Akan Tercapai
4	Persentase pemuda berwirausaha	%	15	19	25	32	39	0	19	25	32	39	45	86,67	Akan Tercapai

[illegible]

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Pengelolaan Arsip secara Baku	%	75	80	80	80	84	90	80	85	82	83	85	97,65	Akan Tercapai
2	Penyelamatan arsip atau dokumen yang mempunyai nilai guna	Dok	3000	3000	3000	3250	3250	3.000,00	4.000,00	10.000,00	1.600,00	12395	3250	381,38	Telah Tercapai
Perpustakaan															
1	Presentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	85,00	87,00	89,00	91,00	93	84,75	85	72	91	4370	95	4600,00	Telah Tercapai
2	Jumlah perpustakaan	Unit	1	4	7	10	40	1	7	5	14	48	45	106,67	Telah Tercapai
Fokus Urusan Pilihan															
Perikanan dan Kelautan															
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	40002,12	31941,28	33218,07	34547,62	35928	32.061,70	27.169,25	34.198	34.862	35978	37365	96,29	Akan Tercapai
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3888,69	3810,90	4196,75	4490,72	4804,99	3.091,90	3.304,43	3.551,71	2.923,91	2982,39	5141,34	58,01	Perlu Upaya Keras
3	Tingkat Konsumsi Ikan	kg/Kapita/Tahun	35,00	30,10	31,61	33,19	34,85	27,61	34,07	33,7	33,75	34,93	36,59	95,46	Akan Tercapai
4	Produksi Hasil Ternak														
	- Daging	Kg	10.100.000	10.200.000	10.300.000	10.400.000	10.400.000	1.354.320	11.016.000	11.591.450	12.807.003	12.893.125	10600000	121,63	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
	- Telur	Kg	8.500.000	8.700.000	8.900.000	8.900.000	8900000	7.125.807	8.792.644	11.922.803	14.585.205	14.585.205	9100000	160,28	Telah Tercapai
	- Susu	Lt	130.000	120.000	115.000	110.000	120000	87.500	86.300	87.000	120.412	122845	130000	94,50	Akan Tercapai
5	Konsumsi Protein														
	- Daging	gr/kapita/hari	7,00	7,20	7,30	7,40	7,5	7,6	6,57	6,91	7,63	7,83	7,6	103,03	Telah Tercapai
	- Telur	gr/kapita/hari	4,20	4,30	4,40	4,50	6,17	5	3,73	5,05	6,17	6,78	4,7	144,26	Telah Tercapai
	- Susu	Lt/kapita/hari	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	50,00	Perlu Upaya Keras
Pertanian															
1	Jumlah produktivitas tanaman pangan Padi	Ton/Ha	4,5	4,62	4,68	4,72	4,78	4,86	4,8	5,19	5,25	5,15	4,82	106,85	Telah Tercapai
2	Produksi Padi	Ton	182854,1	188491,50	189425,62	190373,45	191.331	222.954	210.545	216.343	208.497	185.680,00	192.287,92	96,56	Akan Tercapai
3	Jumlah produktivitas tanaman pangan Jagung	Ton/Ha	6,28	6,34	6,41	6,47	6,53	7,87	7,65	7,21	7,21	7,12	6,60	107,88	Telah Tercapai
4	Produksi Jagung	Ton	44646,88	44294,13	44516,11	44739,79	44.963	83.195	76.713	77.783	79.950	77.047,00	45.187,95	170,50	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
5	Jumlah Kelompok Tani Binaan	Kelompok	1199,95	909,99	914,98	920,01	925	887	924	918	919	925	930,00	99,46	Akan Tercapai
6	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB ADHB	%	30,83	24,24	24,36	20,48	24,61	23,09	21,22	20,71	20,36	20,36	24,73	82,33	Perlu Upaya Keras
7	Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB	%	19,46	15,80	0	0	16,0	18,09	16,8	0	0	15,30	16,12	96,15	Akan Tercapai
8	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB ADHK	%	NA	NA	NA	NA	13,4	N/A	N/A	N/A	N/A	12,30	13,42	91,65	Akan Tercapai
Pariwisata															
1	Peningkatan jumlah wisatawan	Orang	575000	585000	590000	600000	610000	521.105	612.440	1.613.333	463.173	575529	620000	92,83	Akan Tercapai
2	Obyek Wisata yang ditangani	Unit	9	9	9	9	8	9	10	10	10	10	8	125,00	Telah Tercapai
3	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	Rp (000.000)	999,98	1749,98	1849,95	1500,03	2000	2.404,86	2.475,00	2.880,00	2.210,00	2708,475475	2100	128,98	Telah Tercapai
Perdagangan															
1	Revitalisasi Pasar Rakyat	pasar	25	25	25	25	0	2	2	0	0	0	0	0,00	Perlu Upaya Keras

[illegible]

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi	KK	5	5	5	5	5	5	4	5	0	0	5	0,00	Perlu Upaya Keras
Fokus Urusan Penunjang															
Perencanaan															
1	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran	%	106,38	95,00	96,00	97,00	98	100	95	96	100	100	99	101,01	Telah Tercapai
2	Persentase kesesuaian perencanaan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	99	99	85	100	100	100,00	Telah Tercapai
3	Persentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang	%	75	80	85	88	90	100	98	98	95	95	92	103,26	Telah Tercapai
Keuangan															
1	Persentase peningkatan PAD	%	3	5	6	8	8	3,25	8,07	6	4,59	30,72	10	307,20	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
2	Peningkatan kemampuan OPD dalam penyusunan pendapatan dan anggaran belanja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Telah Tercapai
Kepegawaian															
1	Prosentase akurasi data kepegawaian	%	100	1	1	1	100	100	100	100	92,37	95	100	95,00	Akan Tercapai
2	Prosentase penyelesaian usulan pensiun pegawai tepat waktu	%	100	1	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Telah Tercapai
3	Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	80	85	85	90	95	100	85	85	90	95	100	100	Telah Tercapai
4	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73,36	79,03	82,63	85,61	87,27	77,49	79,3	60	69,4	70,9	91,54	77,45	Perlu Upaya Keras
Penelitian dan Pengembangan															
1	Persentase OPD Inovatif	%	45	55	65	75	85,2	0	66	80	80,77	87,7	90	97,44	Akan Tercapai
Sekretariat Daerah															
1	Persentase PD yang melakukan KAD	%	80,00	85,00	90,00	95,00	100	80,76	85	90	100	100	100	100,00	Telah Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
2	Fasilitasi UMKM untuk mendapatkan KUR	UMKM	25	25	25	30	25	20	25	25	35	20	130	100,00	Telah Tercapai
3	Kerjasama dalam penyebaran berita melalui media massa cetak, elektronik, dan online	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	Telah Tercapai
4	Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	%	75	78	81	84	87	85	75	90	85	100	100	100,00	Telah Tercapai
5	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks	70	75	78	81	84	83,05	80,97	79,91	83,96	85,14	86	99,00	Akan Tercapai
Sekretariat DPRD															
1	Prosentase SDM yang mengikuti bintek / Sosialisasi barang dan jasa dan asosiasi Sekwan se Indonesia	%	100	100	100	100	100	100	100	100	27,3	90,91	100	90,91	Akan Tercapai
2	Prosentase anggota DPRD yang mengikuti Bintek Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	60	97,78	100	97,78	Akan Tercapai

No	Bidang Urusan/Indikator	Stn	Target					Capaian Kinerja					Target Kinerja Akhir RPJMD	Capaian Realisasi 2021 Terhadap Target 2022	Status Capaian
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021			
3	Banyaknya Promperda	Perda	20	5	17	13	13	14	3	13	11	8	17	47,06	Perlu Upaya Keras
Pengawasan															
1	Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut LHP	%	542,98	100,00	100,00	527,00	1601	475	100	80	527	1468	175	838,86	Telah Tercapai
2	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BLM AUDIT	WTP	0,00	Menunggu hasil pemeriksaan
3	Temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	636	100	100	100	100	583	100	100	Telah Tercapai
4	Penyelesaian Laporan Reviu	LHR	6,00	6,00	8,00	#VALUE!	8	6	6	8	-	13	8	162,50	Telah Tercapai
5	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	55,03	60,05	65,00	70,00	76,71	75,31	75,03	76,29	75,33	BLM ADA PENIALA IAN	76	0,00	Menunggu hasil pemeriksaan
6	Skor LAKIP/LKJiP	Skor	56,50	58,45	60,53	63,21	79,03	58,19	62,4 (B)	65,04 (B)	70,11 (B)	BLM ADA PENIALA IAN	B	B	Telah Tercapai

- Keterangan Status Capaian
 - >= 100 Telah Tercapai
 - >=80<100 Akan Tercapai
 - ≤ 79 Perlu Upaya Keras

2.3 KINERJA RPJMD 2017 – 2022

Tabel 2. 74
Evaluasi capaian Misi 1 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
1	Misi I:																
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis <i>Smart City</i> yang didukung pengembangan kerjasama																
A	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan partisipatif	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			Indeks	83.05	80.97	79,91	83,96	87,67	85,14	97,11	Sangat Tinggi	90,32	94,26	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
			Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang	Persentase OPD yang telah memiliki SPP dan SOP	%	85,00	75,00	90,00	85,00	84,00	85,14	101,36	Sangat Tinggi	90,00	94,60	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
				Persentase PD telah memiliki website aktif	%	80,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Diskominfo
B	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Indeks Profesionalitas ASN			Indeks	77.49	79.30	60,00	69,40	87,27	70,90	0,00	Sangat Rendah	91,54	0,00	Sangat Rendah	BKD
		Skor LAKIP/ LKJIP			Skor	58.19	62,64	65,02	66,14	67,82	Blm ada nilai hasil evaluasi	81,24	Tinggi	70,11	101,13	Sangat Tinggi	Bag. Organisasi
			Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BLM AUDIT	0,00	Sangat Rendah	WTP	0,00	Sangat Rendah	Inspektorat
				Skor PeGi (Pemerintahan Government)	Skor	3.16	3.24	3,29	3,29	3,60	3,24	90,00	Tinggi	3,60	90,00	Tinggi	Diskominfo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
				Smart City/ Smart Village	%	5.00	7.00	20,00	20,00	3,30	3,26	98,79	Sangat Tinggi	14,64	22,27	Sangat Rendah	Diskominfo
				Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Skor	55.03	75.03	76,29	75,33	75,00	76,71	102,28	Sangat Tinggi	80,00	95,89	Sangat Tinggi	Inspektorat
				Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	80,00	85,00	85,00	15,62	95,00	56,20	59,16	Rendah	100,00	56,20	Rendah	BKD
C	Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan	Persentase OPD Inovatif			%	na	66,00	65,00	80,77	85,20	87,70	102,93	Sangat Tinggi	90,00	97,44	Sangat Tinggi	Bapelitbang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
	sinergitas dan kerjasama pembangunan daerah		Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Persentase kesesuaian Perencanaan dengan Penganggaran	%	100,00	95,00	96,00	100,00	98,00	100,00	102,04	Sangat Tinggi	99,00	101,01	Sangat Tinggi	Bapelitbang
				Persentase ketersediaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan	%	100,00	99,00	99,00	85,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bapelitbang
				Persentase Peningkatan PAD	%	3.25	8.07	6,00	4,59	8,00	3,72	46,50	Sangat Rendah	10,00	37,20	Sangat Rendah	BPKPAD
			Meningkatnya sinergitas dan kerjasama antar daerah (KAD)	Persentase OPD yang melakukan KAD	%	80.76	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	Bag. Pemerintahan

Tabel 2. 75
Evaluasi capaian Misi 2 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteri a	Target Akhir Tahun 2022	Capaia n 2021 terhada p 2022	Kriteri a	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tg t)x100					
2	Misi 2:																
	Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu																
A	Meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya Batang	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			Indeks	67.35	68,01	68,42	68,65	70,98	68,92	97,10	Sangat Tinggi	71,90	95,86	Sangat Tinggi	
			Meningkatny a pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik	Angka Kematian IBU (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	127.2 7	159.8	111,0 8	109,3 6	94,13	273,4 3	-90,48	Sangat Rendah	86,28	316,91	Sangat Tinggi	Dinkes
				Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	12.73	11.27	11,42	9,45	12,30	10,11	117,80	Sangat Tinggi	12,00	84,25	Tinggi	Dinkes

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteri a	Target Akhir Tahun 2022	Capaia n 2021 terhada p 2022	Kriteri a	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tg t)x100					
				Angka Kematian Balita (AKBA)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	15.59	13.26	13,33	11,56	15,30	10,94	128,50	Sangat Tinggi	15,10	72,45	Sedang	Dinkes
				Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0.22	0.2	0,25	0,17	0,17	0,21	76,47	Tinggi	0,16	131,25	Sangat Tinggi	Dinkes
			Meningkatny a pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.19	6.61	6,63	6,87	6,85	6,88	100,44	Sangat Tinggi	6,86	100,29	Sangat Tinggi	Disdikbud
				Persentase Guru Berkualifikasi Ijazah S1/D4	%	84.48	94.81	88,88	89,37	90,00	90,11	100,12	Sangat Tinggi	90,67	99,38	Sangat Tinggi	Disdikbud
B	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkeadilan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	92.59	91,08	91,08	91,47	93,94	91,86	97,79	Sangat Tinggi	94,53	0,00	Sangat Tinggi	DP3AP2KB
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Indeks	69.89	63,78	63,78	63,81	74,12	N/A	0,00	Sangat Rendah	75,32	0,00	Sangat Rendah	DP3AP2KB

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteri a	Target Akhir Tahun 2022	Capaia n 2021 terhada p 2022	Kriteri a	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tg t)x100					
	serta pengendalian penduduk		Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi	%	2,4	2,4	2,4	2,4	4,1	2,4	58,54	Rendah	100,00	2,40	Sangat Rendah	Dispermades
				Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	NA	20,00	15,56	15,56	39,68	15,56	39,21	Sangat Rendah	40,00	38,90	Sangat Rendah	DP3AP2KB
				Kecamatan ramah Anak	%	0,00	0,00	40,00	40,00	66,67	40,00	60,00	Rendah	80,00	50,00	Sangat Rendah	DP3AP2KB
			Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependuduk	Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	%	82.53	82.05	81,54	74,49	92,50	72,34	78,21	Tinggi	95,00	76,15	Tinggi	DP3AP2KB

No	Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteri a	Target Akhir Tahun 2022	Capaia n 2021 terhada p 2022	Kriteri a	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tg t)x100					
			an yang menyeluruh	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	%	85,00	67.39	67,39	94,59	95,00	97,00	102,11	Sangat Tinggi	95,00	102,11	Sangat Tinggi	Disdukcapil

- Keterangan Status Capaian
 >= 100 Telah Tercapai
 >=80<100 Akan Tercapai
 ≤ 79 Perlu Upaya Keras

Tabel 2. 76 Evaluasi Capaian Misi 3 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
3	Misi 3:																
	Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas dan ramah lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.																
A	Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur	Pertumbuhan Ekonomi			%	5.29	5,39	5,39	-1,29	2,54	4,88	192,12	Sangat Tinggi	5,93	82,3	Sangat Tinggi	BPS
		TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)			%	5.82	4.23	4,16	6,92	3,50	6,59	188,29	Sangat Tinggi	3,23	204	Sangat Tinggi	Disnaker
			Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang	Jumlah realisasi nilai investasi	Rp/ Milyar	421.637	67.270	14.707,00	9.082,78	264	7.560.060	2.863.659,01	Sangat Tinggi	1210,8	624.385,51	Sangat Tinggi	DPMPTSP
				Rasio daya serap tenaga kerja	%	61.11	84.68	59,35	1.496,00	84	86,06	102,45	Sangat Tinggi	90	95,62	Sangat Tinggi	Disnaker
				Pertumbuhan Industri	%	0.68	0.9	1,03	0,86	0,9	0,99	110	Sangat Tinggi	0,9	110	Sangat Tinggi	Disperindagkop

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
				Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB	%	33,65	34,35	34,38	34,43	33,31	34,89	104,7433203	Sangat Tinggi	30,65	113,8336052	Sangat Tinggi	Disperindagkop
B	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)			Indeks	50	62,9	71,04	68,45	68,45	68,45	100	Sangat Tinggi	69	99,20289855	Sangat Tinggi	DLH
			Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	%	51,16	56,3	64,5	70,86	76,65	79,41	103,60	Sangat Tinggi	85,16	93,25	Sangat Tinggi	DPUPR
				Rasio ijin trayek	%	54	70	63,73	54,68	80	81	101,25	Sangat Tinggi	84	96,42857143	Sangat Tinggi	Dishub
			Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau, penyediaan air baku	Rasio Ruang Terbuka Hijau	%	15,35	15,35	7,34	24,32	80	28,83	36,04	Sangat Rendah	85	33,92	Sangat Rendah	DPUPR
				Persentase penanganan	%	18,2	23	30	45	45	45	100	Sangat Tinggi	45	100	Sangat Tinggi	DLH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
			dan penanggula ngan masalah rob dan abrasi dengan tetap menerapkan n prinsip-prinsip pembangu nan berkelanjut an	sampah													
				Pemantau an status mutu air	%	0.2	0.19	0,17	0,15	0,13	0,13	100	Sangat Tinggi	0,1	130	Sangat Tinggi	DLH
				Uji Sampel Kualitas Air Sungai	%	-	-	90	85	90	90	100	Sangat Tinggi	90	100	Sangat Tinggi	DLH
			Meningkat nya kualitas dan kuantitas pembangu nan irigasi.	Luas irigasi Kabupate n dalam kondisi baik	%	46	49.23	52,12	52,87	74,58	57,44	77,02	Tinggi	75,25	76,33	Tinggi	DPUPR
C	Mengemba ngkan dan	NTP (Nilai Tukar Petani)			Skor	NA	NA	NA	101,49*	101	n/a	0	Sangat Rendah	101,2	0	Sangat Rendah	Dispaperta

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
	mengintegr asikan agro bisnis dan agro wisata serta pengemban gan kawasan perdagangan di wilayah Batang		Meningkat nya produktifit as pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan	Kontribus i sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	23.09	21.22	20,71	20,36	24,61	20,36	82,73059732	Tinggi	24,73	82,32915487	Tinggi	Dispaperta
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	%	84	85	85,1	90	89,1	88,4	99,21436588	Sangat Tinggi	89,1	99,21436588	Sangat Tinggi	Dispaperta
				Kontribus i sektor perdagang an terhadap PDRB (ADHB)	%	12.97	13.11	15,18	15,5	12,33	14,31	116,0583942	Sangat Tinggi	12,4	115,4032258	Sangat Tinggi	Disperindagko p
D	Pengemban gan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB			Rp (000.000)	2.465	2.475	2.880	2.210	2.000	2708	135,4	Sangat Tinggi	2.100	128,952381	Sangat Tinggi	Disparpora
			Berkemban gnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru	Peningkat an Jumlah wisataawa n	Orang	534.845	612.440	1.455.975	463.173	610.000	575529	94,35	Sangat Tinggi	620.000	92,82725806	Sangat Tinggi	Disparpora

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
	produktifitas perikanan dan kelautan yang lestari		kawasan pesisir														
			Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya yang lestari	Produksi perikanan tangkap	ton	32.061,70	27.169,25	34.198	34.862	35.928	35979	100,1419506	Sangat Tinggi	37.365	96,29064633	Sangat Tinggi	Dislutkanak
				Produksi perikanan Budidaya	ton	3.091,90	3.304,43	3.551,71	2.923,91	4.804,99	2982,93	62,07983784	Rendah	5.141,34	58,01853213	Rendah	Dislutkanak

- Keterangan Status Capaian
 >= 100 Telah Tercapai
 >=80<100 Akan Tercapai
 ≤ 79 Perlu Upaya Keras

Tabel 2. 77

Evaluasi Capaian Misi 4 Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
4	Misi 4:																
	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur																
A	Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengalaman nilai agama dan budaya	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk			Per 10000	61.15	56.29	68,80	74,95	60,00	127,64	212,73	Sangat Tinggi	60,00	212,73	Sangat Tinggi	Satpol PP
			Terciptanya keamanan lingkungan dan <i>early warning</i> sistem penanggulangan kriminalitas	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Per Desa	7.79	7.39	4,98	7,72	7,00	7,20	102,86	Sangat Tinggi	7,00	102,86	Sangat Tinggi	Satpol PP
				Persentase Ketersediaan Peta Risiko Bencana	%	25,00	25,00	57,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BPBD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Stn	Realisasi				Kinerja Tahun 2021			Kriteria	Target Akhir Tahun 2022	Capaian 2021 terhadap 2022	Kriteria	OPD Sumber Data
						2017	2018	2019	2020	Tgt	Rls	% (Rls/Tgt) x100					
B	Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulang an masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh	PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos			%	52.50	86,75	100,00	100,00	75,00	90,34	120,45	Sangat Tinggi	80,00	112,93	Sangat Tinggi	Dinsos
			Meningkatnya integrasi nilai – nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat	Jumlah grup kesenian yang dibina	Kelom	565,00	565,00	566,00	566,00	568,00	568,00	100,00	Sangat Tinggi	570,00	99,65	Sangat Tinggi	Disdikbud
				Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil	%	29.27	48.75	88,00	90,00	80,00	90,00	112,50	Sangat Tinggi	80,00	112,50	Sangat Tinggi	Dinsos
Capaian Misi																	

- Keterangan Status Capaian
 >= 100 Telah Tercapai
 >=80<100 Akan Tercapai
 ≤ 79 Perlu Upaya Keras

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan Layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga telah merubah pada berbagai aspek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan Daerah meliputi:

- a) Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b) Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c) Penerimaan Daerah;
- d) Pengeluaran Daerah;
- e) Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan;

- f) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. pengelolaan keuangan Daerah

Pengukuran kinerja keuangan Daerah bertujuan untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran sehubungan aktivitas pelayanan publik. Penilaian akuntabilitas tersebut, bukan hanya mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mampu menyerap serta menggunakan anggaran, namun terlebih pada bagaimana pengalokasian anggaran tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai kaidah prinsip pengalokasian anggaran yang efektif, efisien serta ekonomis.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada masa otonomi Daerah saat ini, Pemerintah Daerah dituntut dapat menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien dan mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing Daerah. Mendasari hal tersebut maka diperlukan suatu analisis terhadap kondisi dan potensi keuangan Daerah dalam membiayai pembangunan Daerah.

Analisis keuangan Daerah merupakan suatu usaha untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan serta mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu sehingga dapat

memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan Daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan Daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ini dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan meliputi pencapaian kinerja pendapatan Daerah, belanja Daerah serta pembiayaan Daerah. Terdapat perbedaan pada struktur pendapatan Daerah yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Perbedaan tersebut terdapat pada rincian pada pendapatan transfer. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, memberi rincian pada pendapatan transfer yaitu transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar Daerah. Dana Perimbangan merupakan bagian dari pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Selain itu terdapat rincian lain berupa Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Kemudian juga terdapat rincian pada transfer antar Daerah yang tidak terdapat pada Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005. Perbandingan antara struktur Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1
Persandingan Struktur Pendapatan Daerah Pada APBD

STRUKTUR PENDAPATAN DAERAH PADA APBD	
PP NOMOR 12 TAHUN 2019	PP NOMOR 58 TAHUN 2005
1. Pendapatan Asli Daerah: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.	1. Pendapatan Asli Daerah: a. pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer: a. transfer Pemerintah Pusat: 1) Dana Perimbangan: (a) Dana Transfer Umum: (1) DBH (2) DAU (b) Dana Transfer Khusus: (1) DAK Fisik; dan (2) DAK Non Fisik. 2) Dana Insentif Daerah; 3) Dana Otonomi Khusus; 4) Dana Keistimewaan; dan 5) Dana Desa. b. transfer antar Daerah: 1) pendapatan bagi hasil; dan 2) Bantuan Keuangan.	2. Pendapatan Dana Perimbangan: a. DBH b. DAU c. DAK
3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah: a. hibah; b. dana darurat; dan/atau c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3. lain-lain pendapatan Daerah yang sah: a. hibah; b. dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Disamping itu juga terdapat perbedaan pada struktur belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Perbandingan antara struktur belanja Daerah pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Persandingan Struktur Belanja Daerah Dalam APBD

STRUKTUR BELANJA DAERAH DALAM APBD	
PP NOMOR 12 TAHUN 2019	PP NOMOR 58 TAHUN 2005
Klasifikasi belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi, dirinci atas jenis: 1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; 3) belanja bunga; 4) belanja subsidi; 5) belanja hibah; dan 6) belanja bantuan sosial. b. Belanja modal c. Belanja tidak terduga d. belanja transfer, dirinci atas jenis: 1) belanja bagi hasil; dan 2) belanja Bantuan Keuangan	Klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja modal; d. bunga; e. subsidi; f. hibah; g. bantuan sosial; h. belanja bagi hasil dan Bantuan Keuangan; dan i. belanja tidak terduga.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pada dasarnya, konsep penganggaran adalah membandingkan antara anggaran dan realisasinya dan menandingkan antara penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Begitu juga, pada APBN/APBD, pada intinya adalah membandingkan dan mensandingkan antara anggaran dan realisasi penerimaan dengan anggaran dan realisasi pengeluaran. Dalam konteks APBD, penerimaan Daerah terdiri dari pendapatan Daerah ditambah penerimaan pembiayaan, sedangkan pengeluaran Daerah terdiri dari belanja Daerah ditambah pengeluaran pembiayaan. Oleh karena itu, untuk analisis keuangan Daerah akan dibagi dalam kerangka penerimaan Daerah dan pengeluaran Daerah.

Mendasari hal tersebut Kinerja keuangan Kabupaten Batang pada tahun 2017-2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 3
Realisasi APBD Kabupaten Batang Tahun 2017-2021*)

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI 2017 – 2021*)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021*)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN						
01.01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	219.807.128.306,58	237.547.973.048,00	245.836.087.092,28	257.422.866.095,46	322.789.372.917,64	10,42
01.01.01	Pendapatan Pajak Daerah	65.998.669.909,00	74.195.502.206,00	82.565.684.654,00	80.127.474.719,00	108.435.863.155,00	14,02
01.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	18.377.484.381,00	18.429.476.328,00	16.743.633.968,00	15.820.320.564,00	16.163.677.602,00	-3,05
01.01.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	8.641.820.175,00	9.541.372.337,00	14.140.555.676,00	13.232.347.500,00	12.766.436.070,00	12,17
01.01.04	Lain-lain PAD	126.789.153.841,58	135.381.622.177,00	132.386.212.794,28	148.242.723.312,46	185.423.396.090,64	10,41
1,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.344.223.712.375,00	1.389.767.667.806,00	1.444.647.049.585,00	1.395.005.131.783,00	1.419.276.630.191,00	1,41
01.02.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	993.464.937.327,00	1.048.707.118.663,00	1.090.972.263.503,00	1.008.861.912.901,00	1.068.002.486.995,00	1,98
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	26.610.033.234,00	34.648.925.368,00	23.081.030.613,00	28.767.704.135,00	62.161.899.343,00	34,39
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	7.770.853.833,00	1.550.296.911,00	8.631.021.732,00	9.255.959.201,00	3.558.815.529,00	80,59
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	779.010.049.000,00	781.383.387.000,00	817.365.659.000,00	743.088.164.000,00	737.685.667.000,00	-1,23
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	180.074.001.260,00	231.124.509.384,00	241.894.552.158,00	227.750.085.565,00	264.596.105.123,00	10,84

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI 2017 – 2021*)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021*)	
01.02.02	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	235.786.884.000,00	202.653.538.000,00	216.888.456.000,00	279.903.722.000,00	221.954.156.235,00	0,33
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-			
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	-	-	-			
1.2.2.3	Dana Insentif Daerah (DID)	44.824.660.000,00	34.250.000.000,00	24.560.987.000,00	86.872.377.000,00	26.237.653.000,00	33,01
1.2.2.4	Pendapatan Dana Desa	190.962.224.000,00	168.403.538.000,00	192.327.469.000,00	193.031.345.000,00	195.716.503.235,00	1,04
01.02.03	Pendapatan Transfer Antar Daerah	114.971.891.048,00	138.407.011.143,00	136.786.330.082,00	106.239.496.882,00	129.319.986.961,00	4,65
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.836.961.000,00	104.708.728.793,00	108.669.156.082,00	92.013.098.882,00	120.623.411.961,00	5,73
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-		-	
1.2.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi	18.134.930.048,00	33.698.282.350,00	28.117.174.000,00	14.226.398.000,00	8.696.575.000,00	-4,75
01.03	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.123.880.132,00	74.561.658.300,00	79.475.065.739,00	80.659.895.398,00	79.756.577.886,00	854,40
01.03.01	Pendapatan Hibah	958.000.000,00	800.000.000,00	2.222.000.000,00		2.937.773.000,00	
01.03.02	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-		-	
01.03.03	Pendapatan Lainnya	1.165.880.132,00	73.761.658.300,00	77.253.065.739,00	80.659.895.398,00	76.818.804.886,00	1.557,77

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI 2017 – 2021*)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021*)	
	Jumlah Pendapatan	1.566.154.720.813,58	1.701.877.299.154,00	1.769.958.202.416,28	1.733.087.893.276,46	1.821.822.580.994,64	3,93
2	BELANJA						
02.01	BELANJA OPERASI	1.083.416.673.279,96	1.233.096.235.068,00	1.219.256.192.471,00	1.175.475.076.933,19	1.241.149.542.241,00	3,67
02.01.01	Belanja Pegawai	724.298.381.490,00	735.764.418.239,00	755.022.216.774,00	736.483.205.203,00	736.685.014.763,00	0,44
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	290.385.525.547,96	387.804.199.551,00	354.384.586.944,00	333.721.676.434,19	397.495.683.501,00	9,55
02.01.03	Belanja Bunga	-	-	-			
02.01.04	Belanja Subsidi	-	-	-			
02.01.05	Belanja Hibah	49.173.624.870,00	73.062.653.643,00	68.640.296.611,00	85.362.961.032,00	89.051.880.977,00	17,50
02.01.06	Bantuan Sosial	18.662.475.000,00	35.655.030.000,00	40.416.710.000,00	19.097.525.000,00	17.020.275.000,00	10,20
02.01.07	Bantuan Keuangan (parpol)	896.666.372,00	809.933.635,00	792.382.142,00	809.709.264,00	896.688.000,00	10,27
02.02	BELANJA MODAL	163.667.905.285,00	163.400.979.708,00	211.778.239.648,00	152.870.895.295,00	196.084.228.826,00	7,67
02.02.01	Belanja Tanah	90.684.500,00	1.463.126.699,00	-	672.125.496,00		
02.02.02	Belanja Peralatan dan Mesin	32.258.369.663,00	40.262.498.121,00	39.671.835.210,00	38.792.596.086,00	48.597.335.623,00	11,60
02.02.03	Belanja Gedung dan Bangunan	57.221.539.908,00	38.000.820.942,00	47.595.696.554,00	51.889.356.879,00	73.809.595.758,00	10,73
02.02.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	58.546.727.449,00	55.767.233.882,00	93.467.834.816,00	27.607.136.200,00	49.573.496.821,00	17,99

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI 2017 – 2021*)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021*)	
02.02.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.334.820.600,00	119.039.550,00	1.884.720.010,00	1.041.580.370,00	851.384.883,00	330,96
02.02.06	Belanja Aset Lainnya	12.215.763.165,00	27.788.260.514,00	29.158.153.058,00	32.868.100.264,00	23.252.415.741,00	28,97
02.03	BELANJA TAK TERDUGA	-	-	-	21.227.513.290,00	3.103.136.850,00	-42,69
2,4	BELANJA TRANSFER	316.097.142.816,00	290.718.511.114,00	324.032.127.900,00	312.939.446.703,00	340.088.223.959,00	2,17
	Belanja Bagi Hasil	6.061.822.116,00	6.952.676.214,00	8.426.281.000,00	9.262.497.000,00	9.923.621.000,00	13,24
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	6.061.822.116,00	6.952.676.214,00	8.426.281.000,00	9.262.497.000,00	9.923.621.000,00	13,24
	Belanja Bantuan Keuangan	310.035.320.700,00	283.765.834.900,00	315.605.846.900,00	303.676.949.703,00	330.164.602.959,00	1,92
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	310.035.320.700,00	283.765.834.900,00	315.605.846.900,00	303.676.949.703,00	330.164.602.959,00	1,92
	Jumlah Belanja	1.563.181.721.380,96	1.687.215.725.890,00	1.755.066.560.019,00	1.662.512.932.221,19	1.780.425.131.876,00	3,44
	Surplus/Defisit	2.972.999.432,62	14.661.573.264,00	14.891.642.397,28	70.574.961.055,27	41.397.449.118,64	181,83
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6,1	PENERIMAAN						
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	103.695.845.353,96	97.602.830.611,58	149.307.636.296,58	132.205.398.405,86	179.664.217.216,13	17,89
6,2	PENGELUARAN						

Nomor Urut	URAIAN	REALISASI 2017 – 2021*)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021*)	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000,00	10.517.344.920,00	41.470.714.188,00	27.885.024.541,00	13.668.882.296,00	53,94
	Pembiayaan Netto	93.695.845.353,96	87.085.485.691,58	107.836.922.108,58	104.320.373.864,86	165.995.334.920,13	18,16
	Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	96.668.844.786,58	101.747.058.955,58	122.728.564.505,86	174.895.334.920,13	207.392.784.038,77	21,74

Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : *) unaudited

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

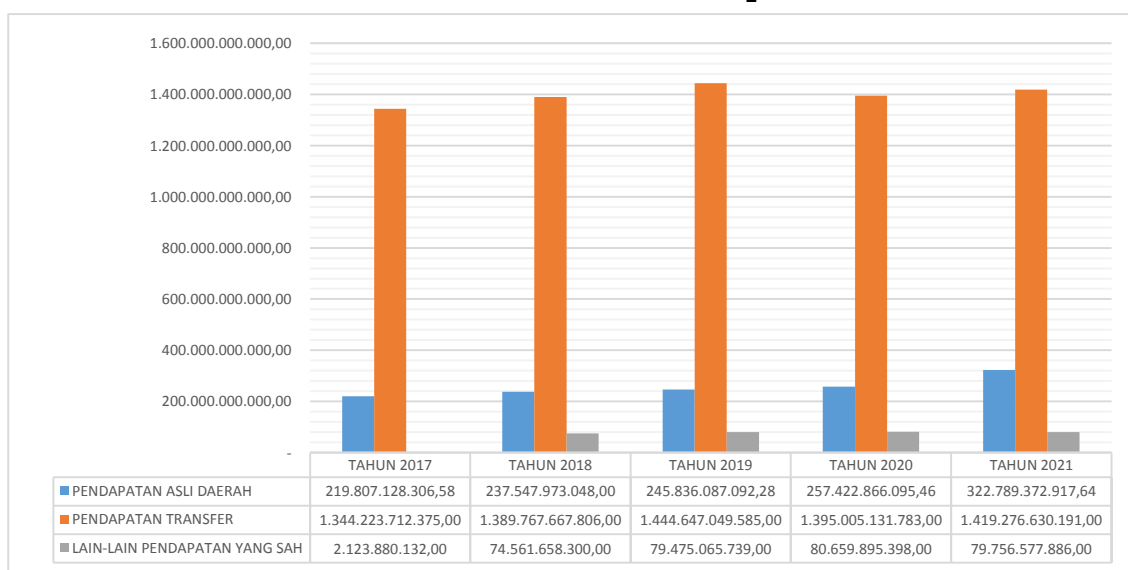
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, diuraikan pula bahwa pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Pendapatan Transfer;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Total Pendapatan Daerah Kabupaten Batang mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan 3,93 persen per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp.1.566.154.720.813,58 menjadi sebesar Rp.1.821.822.580.994,64,- pada tahun 2021.

Gambar 3. 1 Sumber Pendapatan

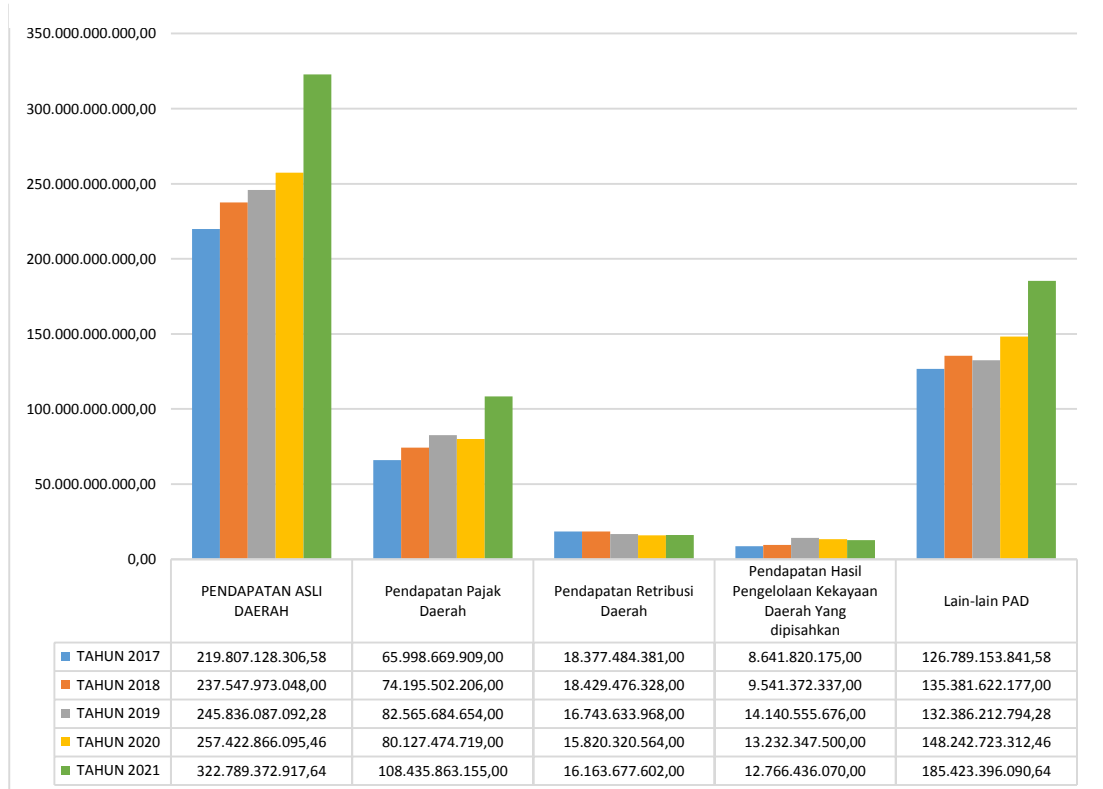


Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021
Keterangan : Tahun 2021 unaudited

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terdiri dari pendapatan pajak Daerah, pendapatan retribusi Daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 10,42%. Dalam kurun waktu 2017-2021 tersebut dapat diketahui penyumbang pendapatan asli Daerah terbesar adalah pendapatan pajak Daerah sebesar 14,02% dari total Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 seperti gambar berikut.

Gambar 3. 2
Pendapatan Asli Daerah



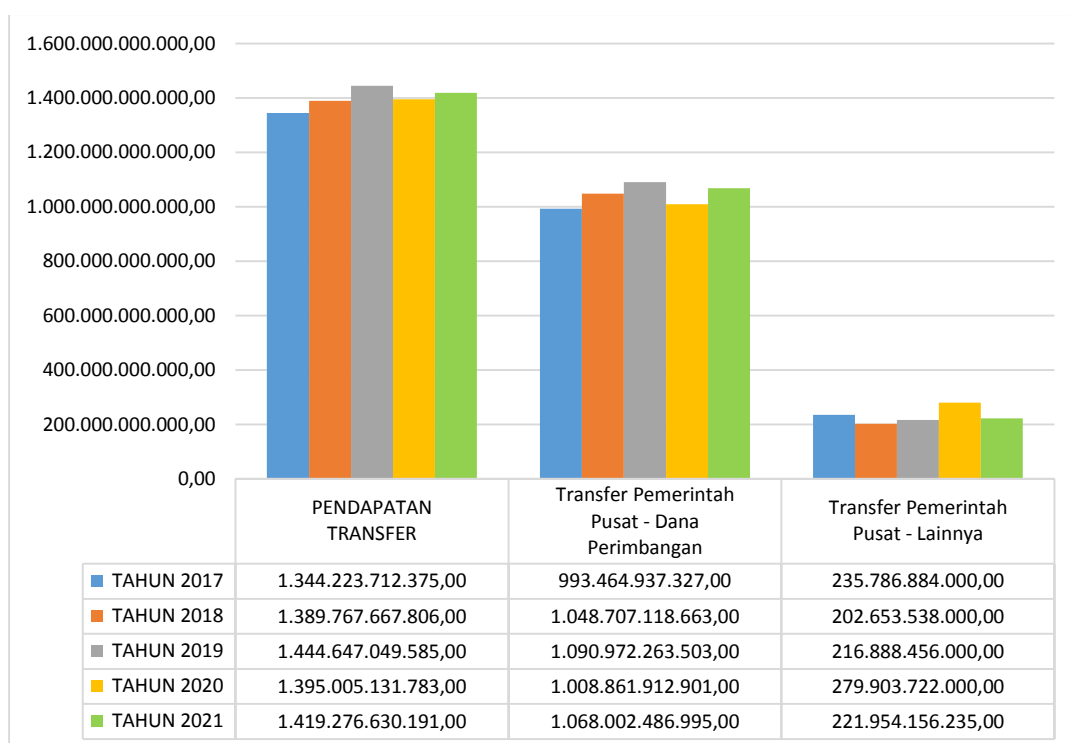
Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

1) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer Daerah terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar Daerah. Dalam kurun waktu 2017-2021 tersebut dapat diketahui penyumbang terbesar adalah pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat dari total pendapatan transfer. Perkembangan pendapatan transfer tahun 2017-2021 seperti gambar berikut.

Gambar 3. 3
Pendapatan Transfer



Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

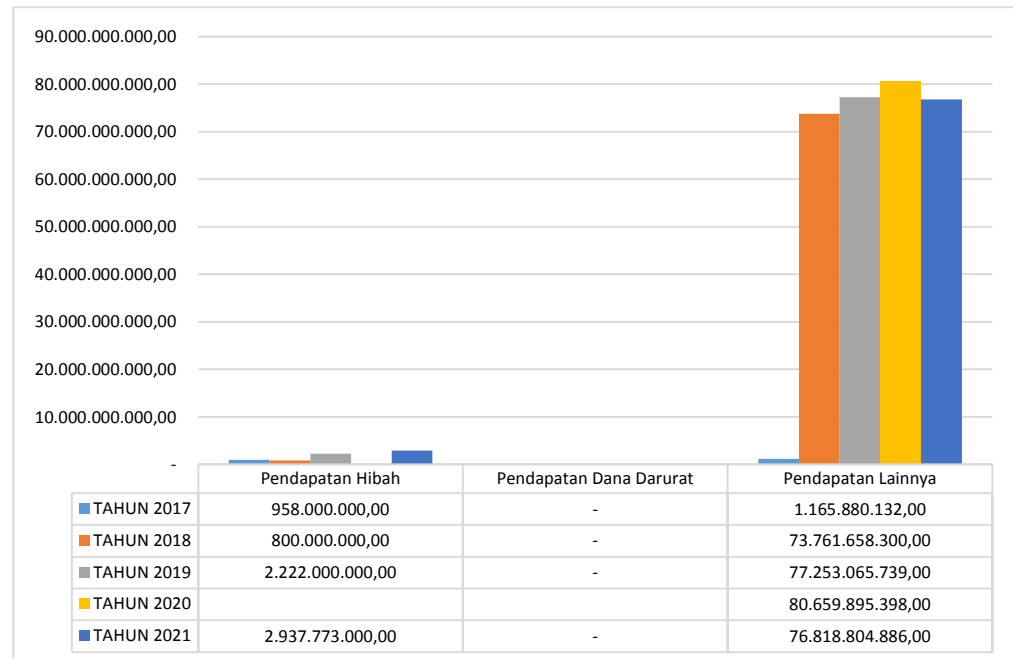
Keterangan : Tahun 2021 unaudited

2) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kurun waktu 2017-2021 tersebut dapat diketahui penyumbang terbesar adalah pendapatan lainnya dari total pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Perkembangan pendapatan lain-lain pendapatan Daerah yang sah tahun 2017-2021

seperti gambar berikut

Gambar 3. 4
Lainlain Pendapatan yang Sah



Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

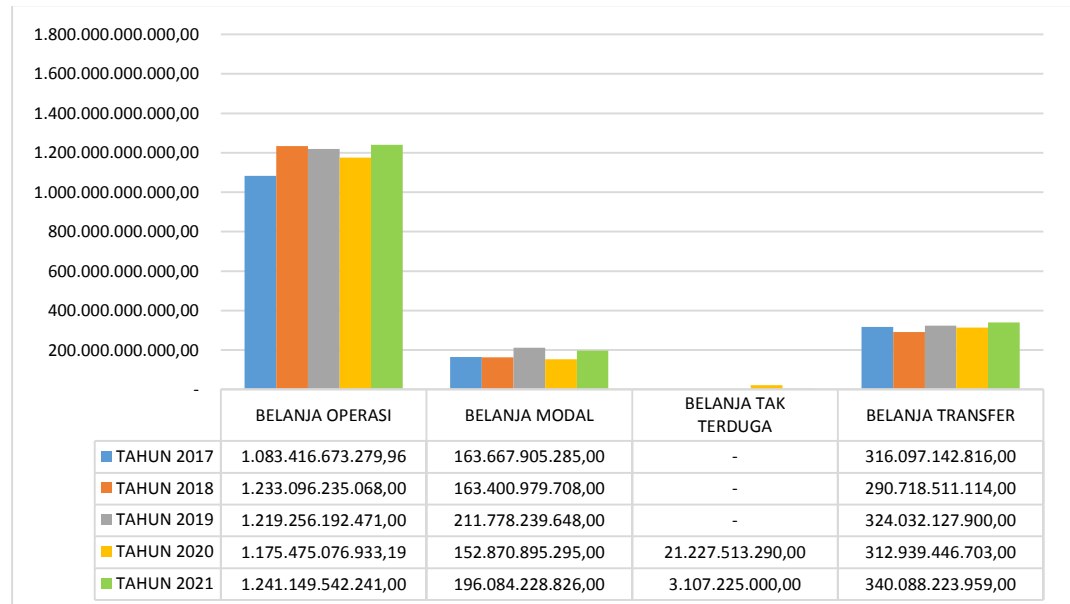
3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenanaan.

Perkembangan belanja Daerah Kabupaten Batang menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir. Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,44% per tahun. Pada tahun 2017 sebesar Rp.1.563.181.721.380,96,- meningkat menjadi sebesar Rp.1.780.425.131.876,00,- pada tahun 2021.

Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Perkembangan belanja Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu tahun 2017- 2021 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar 3. 5
Realisasi Belanja 2017-2021



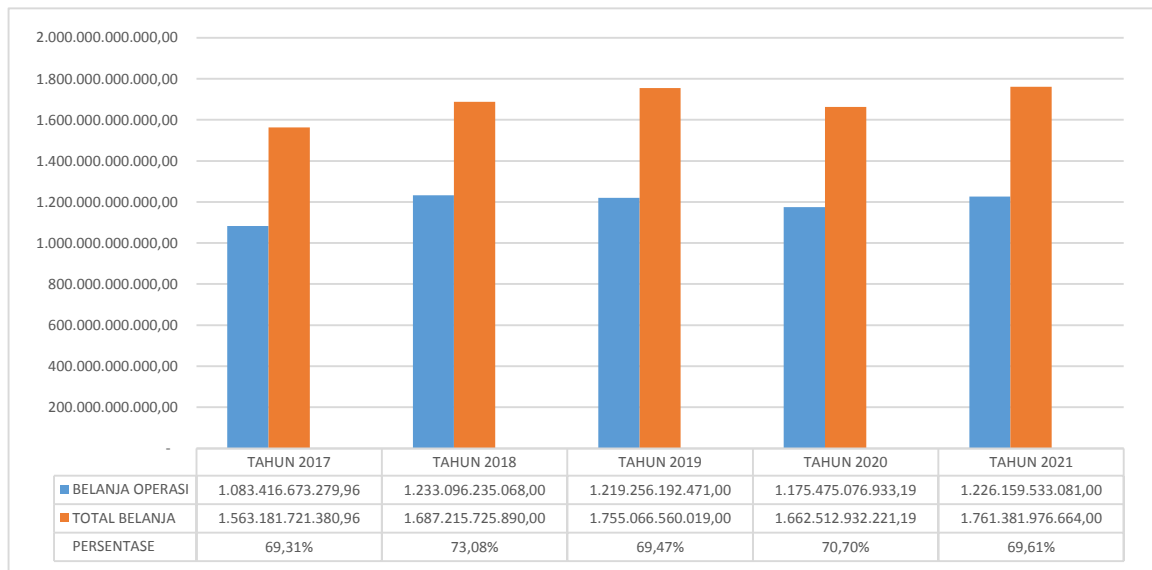
Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Secara umum untuk belanja operasi perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2017 belanja operasi sebesar Rp. 1.083.416.673.279,96,- pada tahun 2018 naik menjadi Rp. 1.233.096.235.068,00,- pada tahun 2019 turun menjadi Rp. 1.219.256.192.471,00,- pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.175.475.076.933,19,- sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi Rp. 1.241.149.542.241,00. Untuk lebih jelasnya rasio belanja operasi terhadap total belanja dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 3. 6
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja



Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

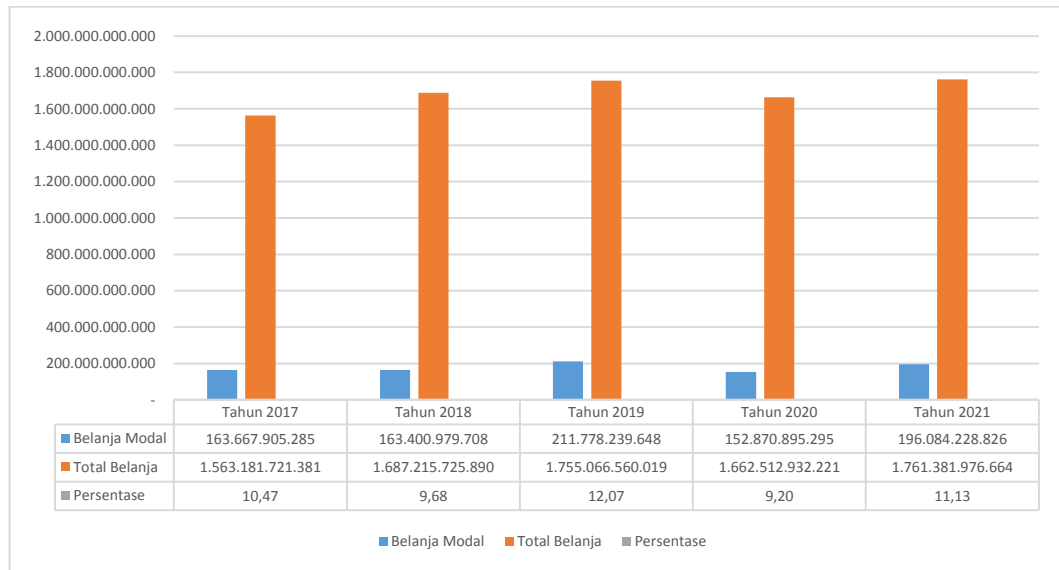
Keterangan : Tahun 2021 unaudited

b) Belanja Modal.

Realisasi belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Selama kurun waktu 2017-2021 belanja modal di Kabupaten Batang mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 belanja modal sebesar 163.667.905.285,00 turun menjadi sebesar 163.400.979.708,00 pada tahun 2018. Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 211.778.239.648,00 sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 152.870.895.295,00. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan *Covid-19*. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 196.084.228.826,00.

Untuk lebih jelasnya rasio belanja modal terhadap total belanja dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 3. 7
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja



Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

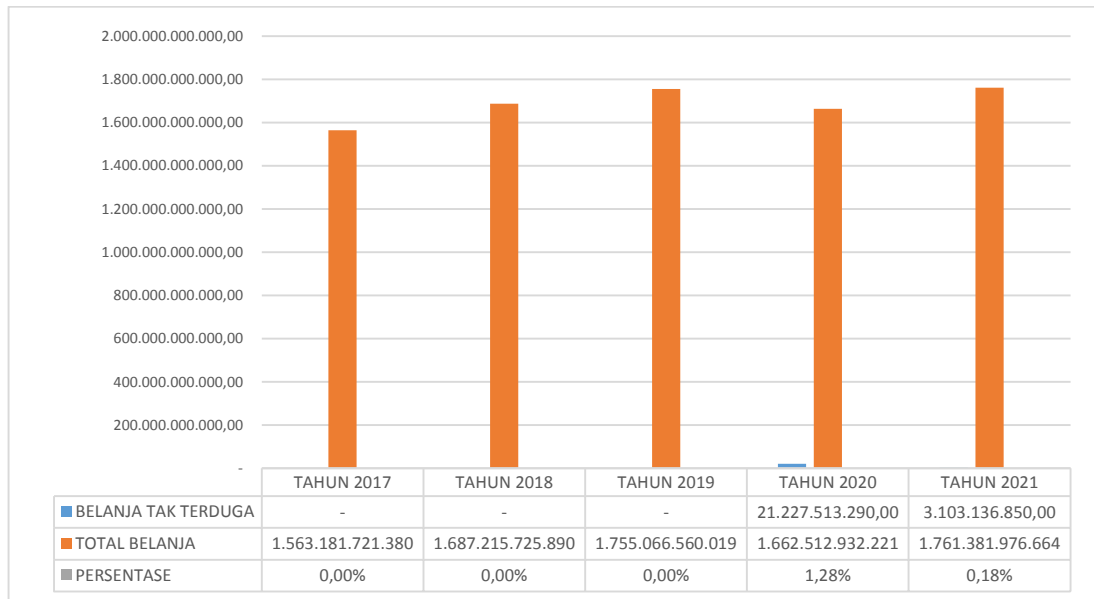
Keterangan : Tahun 2021 unaudited

c) Belanja Tidak Terduga.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pada tahun 2020 sebesar Rp. 21.227.513.290,00, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 3.103.136.850,00, hal ini dipergunakan untuk belanja bantuan sosial penanganan *Covid-19* di tahun 2020 dan tahun 2021.

Sedangkan rasio realisasi belanja tidak terduga terhadap total belanja pada tahun 2020 sebesar 1,28% dan pada tahun 2021 sebesar 0,18%. Untuk lebih jelasnya rasio realisasi belanja tidak terduga terhadap total belanja dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 3. 8
Rasio Belanja Tak terduga Terhadap Total Belanja

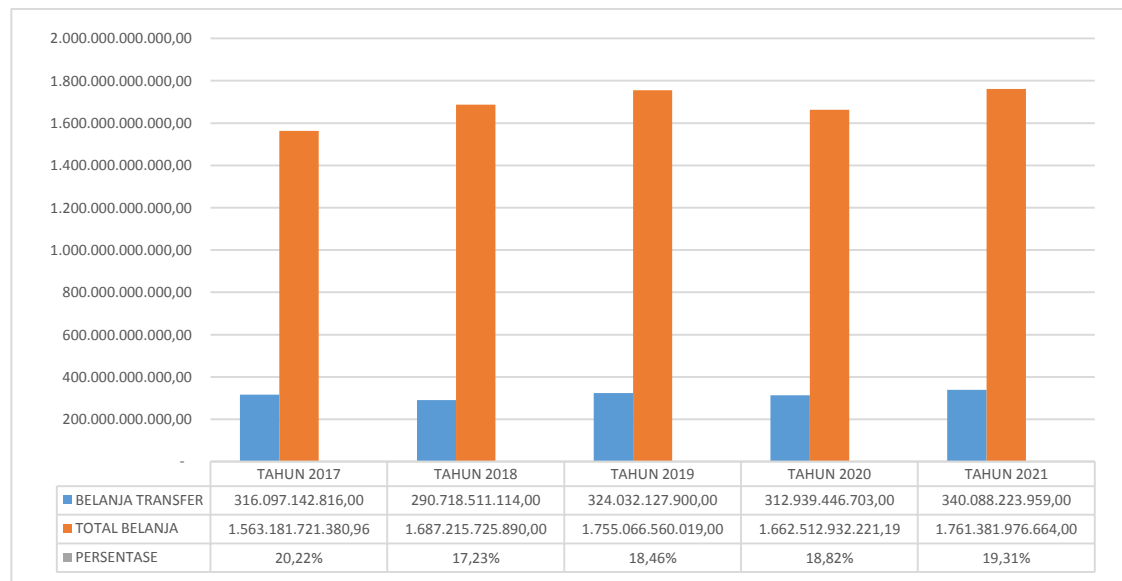


Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

d) Belanja Transfer.

Realisasi belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Pada tahun 2017 belanja transfer sebesar Rp. 316.097.142.816,00,- turun pada tahun 2018 yang hanya sebesar Rp. 290.718.511.114,00,- atau turun sekitar 8,03 persen. Kemudian pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 324.032.127.900,00,- dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 312.939.446.703,00,- sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan 8,68 persen menjadi sebesar Rp. 340.088.223.959,00. Untuk lebih jelasnya rasio realisasi belanja transfer terhadap total belanja dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3. 9 Belanja Transfer

Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja Daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah.

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

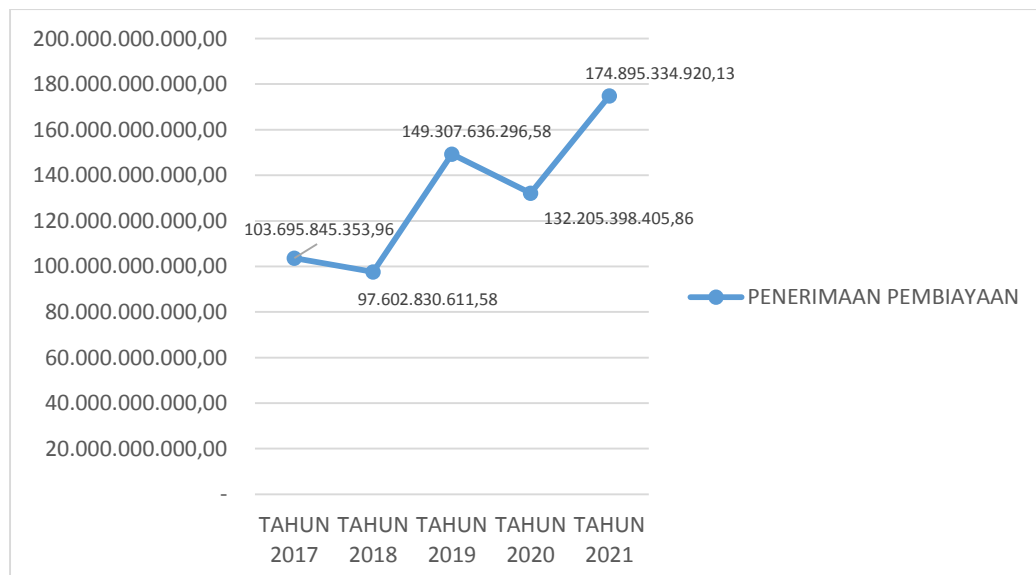
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);

- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- f. Penerimaan piutang Daerah;
- g. Penerimaan dana bergulir;
- h. Penerimaan hasil penarikan.

Penerimaan pembiayaan Daerah Kabupaten Batang yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi tahun 2021 sebesar Rp. 174.895.334.920,13, meningkat dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 122.728.564.505,86.

Perkembangan selengkapanya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3. 10
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan

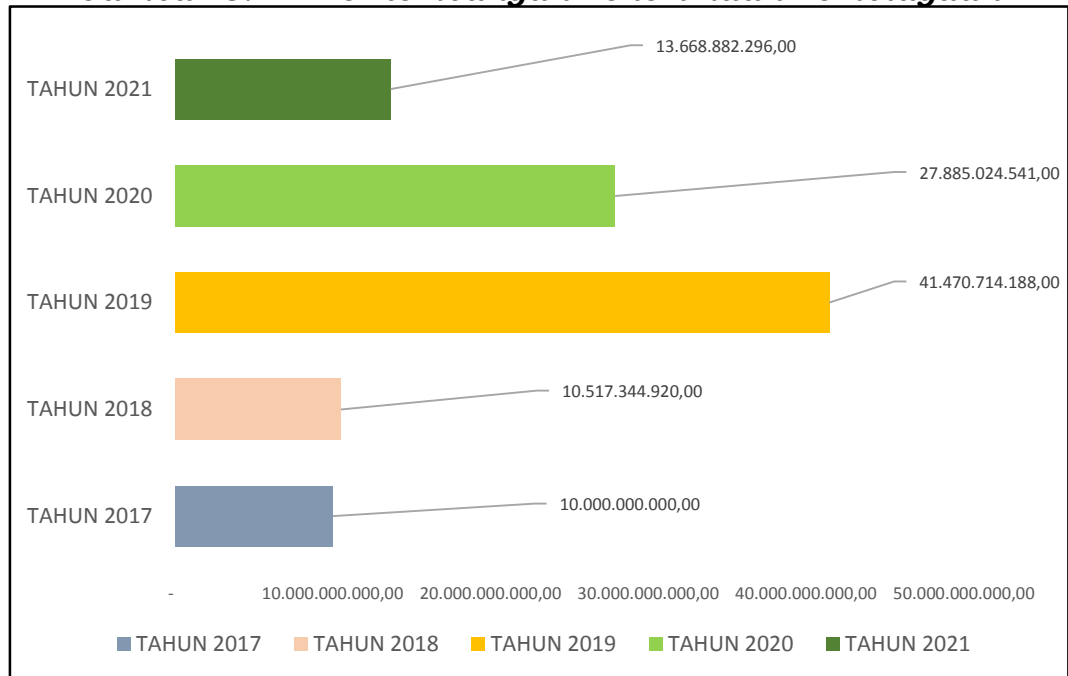


Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021
Keterangan : Tahun 2021 unaudited

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Batang berasal dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah serta pengeluaran pembiayaan yang untuk pembayaran pokok pinjaman). Pengeluaran pembiayaan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 41.470.714.188,-. Perkembangan pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3. 11 Perkembangan Penerimaan Pembiayaan



Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

Sedangkan perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah Kabupaten Batang tahun 2017-2021 secara rinci tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3. 4
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Batang Tahun
2017-2022

URAIAN	REALISASI 2017 -2021				
	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	103.695.845.353	97.602.830.611	149.307.636.296	132.205.398.405	179.664.217.216
PENGELUARAN					
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.517.344.920	41.470.714.188	27.885.024.541	13.668.882.296
Pembiayaan Netto	93.695.845.353	87.085.485.691	107.836.922.108	104.320.373.864	165.995.334.920
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	96.668.844.786	101.747.058.955	122.728.564.505	174.895.334.920	203.262.054.761

Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

3.2 Analisis Keuangan Daerah

3.2.1 Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio Keuangan adalah suatu ukuran untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Oleh karena itu Kabupaten/Kota dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuannya dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung rasio kemandirian, rasio derajat ketergantungan dan rasio derajat desentralisasi fiskal.

Rasio kemandirian yang menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli daerah (PAD) dengan bantuan Pemerintah Pusat dan pinjaman. Untuk melihat Kemampuan Keuangan Daerah yang diukur dengan variabel kemandirian dan kategori pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 5
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2007.

Rasio kemandirian Kabupaten Batang tahun 2017 -2021 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2017 kemandirian keuangan sebesar 16,35% yang berarti berada pada level rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, pun pada tahun 2021 sebesar 22,73% yang masih dalam pola hubungan instruktif juga, meskipun terdapat kenaikan presentase kemandirian.

Pola hubungan dari rasio kemandirian Kabupaten Batang Selengkapny dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 6
Rasio kemandirian Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat	Persentase Kemandirian
2017	219.807.128.306,58	1.344.223.712.375,00	16,35%
2018	237.547.973.048,00	1.389.767.667.806,00	17,09%
2019	245.836.087.092,28	1.444.647.049.585,00	17,02%
2020	257.422.866.095,46	1.395.005.131.783,00	18,45%
2021	322.569.870.428,64	1.419.276.630.191,00	22,73%

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

Rasio derajat ketergantungan yang menunjukkan perbandingan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dengan total penerimaan Daerah. Untuk melihat derajat ketergantungan digunakan kriteria sebagaimana terdapat pada Tabel berikut :

Tabel 3. 7
Rasio Ketergantungan Kabupaten Batang

Tahun 2017-2021

Ketergantungan (%)	Kategori
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup Tinggi
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bangsa 2017

Rasio ketergantungan Kabupaten Batang tahun 2017 -2021 dapat dijelaskan sebagai berikut. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Batang selama kurun waktu 2017-2021 termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut Kabupaten Batang belum optimal menggali sumber-sumber potensi penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Pada tahun 2017 derajat ketergantungan keuangan Daerah sebesar 85,83%. Kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2021 derajat ketergantungan keuangan mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 dengan persentase ketergantungan sebesar 78,91%. hal ini menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah serta peningkatan lain-lain pendapatan yang sah.

Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Batang berdasarkan derajat ketergantungan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3. 8
Derajat Ketergantungan Keuangan Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Transfer/Bantuan	Total Pendapatan Daerah	Persentase Derajat Ketergantungan
2017	1.344.223.712.375,00	1.566.154.720.813,58	85,83%
2018	1.389.767.667.806,00	1.701.877.299.154,00	81,66%
2019	1.444.647.049.585,00	1.769.958.202.416,28	81,62%
2020	1.395.005.131.783,00	1.733.087.893.276,46	80,49%
2021	1.419.276.630.191,00	1.798.648.696.505,64	78,91%

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

Rasio derajat desentralisasi fiskal, yang menunjukkan

perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Semakin tinggi derajat desentralisasi semakin baik dalam melaksanakan otonomi Daerah karena tingkat ketergantungan keuangan dengan Pemerintah Pusat semakin kecil. Untuk melihat derajat desentralisasi fiskal menggunakan skala interval sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 9
Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi fiskal	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,00 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Hanafi, dkk (2005)

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Batang tahun 2017 - 2021 dalam membiayai kegiatannya masih termasuk kategori kurang meskipun tiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Batang berada pada level kurang dengan persentase sebesar 14,03% dan menunjukkan tren yang positif pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 17,93%. Kinerja keuangan Daerah Kabupaten Batang berdasarkan derajat desentralisasi disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 10
Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Batang
Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Persentase Derajat Desentralisasi Daerah
2017	219.807.128.306,58	1.566.154.720.813,58	14,03%
2018	237.547.973.048,00	1.701.877.299.154,00	13,96%
2019	245.836.087.092,28	1.769.958.202.416,28	13,89%
2020	257.422.866.095,46	1.733.087.893.276,46	14,85%
2021	322.569.870.428,64	1.798.648.696.505,64	17,93%

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

3.2.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Daerah, kondisi kewajiban Pemerintah Daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset Daerah untuk penyediaan dana pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Laporan ini sangat penting bagi manajemen Pemerintah Daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu Tahun 2017 – 2020 yang telah diaudit dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 11
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	ASET					
1.1.	ASET LANCAR					
1.1.1.	Kas	97.739.721.613	101.904.425.559	124.466.702.830	174.931.063.507	17%
1.1.2.	Piutang	76.246.358.658	92.722.280.404	109.154.293.749	133.838.304.758	22%
1.1.3.	Persediaan	24.812.898.872	29.795.587.145	28.208.564.200	24.313.436.171	-1%
1.2.	ASET TETAP					
1.2.1.	Tanah	689.265.703.167	691.061.151.489	706.733.972.309	818.393.379.024	5%
1.2.2.	Peralatan dan mesin	420.872.289.036	485.863.015.297	540.773.255.308	601.280.050.315	12%
1.2.3.	Gedung dan bangunan	868.835.801.597	910.384.029.895	977.614.702.499	1.020.707.941.911	6%
1.2.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	1.134.253.840.410	1.204.981.271.500	1.152.996.747.683	1.199.099.022.918	4%
1.2.5.	Aset tetap lainnya	72.603.256.537	83.892.355.981	92.722.216.542	102.604.586.453	16%
1.2.6.	Konstruksi dalam	18.444.901.570	35.159.473.666	42.017.981.885	45.242.147.003	17%

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
	pengerjaan					
1.2.7.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.095.314.953.812)	(1.207.378.671.917)	(1.191.145.468.118)	(1.296.410.123.656)	6%
1.3.	ASET LAINNYA					
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran	0	0	0	0	-
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	504.606.135	431.947.342	445.931.246	498.715.497	27%
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua					
1.3.4.	Aset tak berwujud	3.049.077.524	2.594.491.277	3.447.320.624	4.459.489.688	62%
1.3.5.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	178.910.697	178.910.697	178.910.697	984.720.651	53%
1.3.6.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(711.732.822)	(761.210.199)	(933.576.230)	(2.769.326.044)	106%
1.3.7.	Aset Lain-lain	35.242.474.435	9.942.340.513	10.148.175.657	9.197.599.393	-52%
	JUMLAH ASET DAERAH	2.346.023.153.616	2.440.771.398.648	2.596.829.730.880	2.836.371.007.589	6%
2	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	127.865.469	110.822.539	46.460.968	35.148.584	169%
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	0	0	0	0	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	1.741.175.912	1.997.940.350	1.909.637.332	2.231.602.118	9%
2.1.4.	Hutang Belanja	27.654.446.604	33.780.797.573	46.740.652.290	62.716.472.209	101%
2.1.5.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	10.279.755.269	487.724.185	13.176.961.540	254.528.355	-52%
	JUMLAH KEWAJIBAN	39.803.243.254	36.377.284.647	61.873.712.130	65.237.751.266	-
3	EKUITAS DANA	2.363.611.064.558	2.475.369.066.118	2.602.499.816.142	2.844.524.738.678	5%
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR					
3.1.1.	SILPA	0	0	0	0	-
3.1.2.	Cadangan piutang	0	0	0	0	-
3.1.3.	Cadangan	0	0	0	0	-

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuh an (%)
	persediaan					
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI					
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	0	0	0	0	-
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	0	0	0	0	-
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.443.217.551.065	2.548.123.635.413	2.726.247.240.402	2.975.000.241.211	6%

Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Neraca Daerah merupakan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) dan ekuitas suatu Pemerintah Daerah. Gambaran umum perkembangan neraca Daerah Kabupaten Batang pada periode tahun 2017-2020 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset Daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, nilai total aset Daerah mencapai sebesar Rp 2,346 triliun yang meningkat menjadi sebesar Rp 2,836 triliun pada tahun 2020.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya membutuhkan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Penyusunan neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui

kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasiolikuiditas, solvabilitas dan rasio akitivitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*).

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, akan dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 12
Analisis Rasio Likuiditas dan Solvabilitas
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

NO	URAIAN	2017	2018	2019	2020
		Rp	Rp	Rp	Rp
A	Rasio Likuiditas				
	Aset Lancar	198.798.979.142	224.422.293.107	261.829.560.778	333.082.804.436
	Persediaan	24.812.898.872	29.795.587.145	28.208.564.200	24.313.436.171
	Kewajiban Jangka Pendek	39.803.243.254	36.377.284.647	59.917.613.830	65.237.751.266
1	Rasio Lancar	4,99	6,17	4,37	5,11
2	Rasio Quick	4,37	5,35	3,90	4,73
B	Rasio Solvabilitas				
	Total Aset	2.768.434.010.773	2.919.411.572.006	3.148.697.416.636	3.478.223.180.291
	Total Hutang	37.934.201.873	34.268.521.758	59.917.613.830	62.971.000.564
	Total Ekuitas	2.363.611.064.558	2.475.369.066.118	2.602.499.816.142	2.844.524.738.678
1	DAR	0,01	0,01	0,02	0,02
2	DER	0,02	0,01	0,02	0,02

Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar dihitung dengan membandingkan antaraaset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan, rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat. Pemerintah Kabupaten Batang positif dan cenderung membaik. Kedua rasio tersebut jauh masih di atas 1,

menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Meski cenderung ada penurunan, karena memang jika dilihat dari informasi kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Batang cukup hati-hati dan tetap menjaga kondisi arus kasnya.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung analisis rasio Debt to Assets Ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio (DER). DAR bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Sedangkan, DER bertujuan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan kemampuan ekuitas dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Batang, dilihat dari kinerja neraca Daerah, sangat sehat.

3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Pengelolaan keuangan Daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja Daerah secara efektif dan efisien. Kebijakan ini juga bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan. Adapun secara terinci kebijakan pengelolaan keuangan di Kabupaten Batang dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Batang bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan

datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu lima tahun (2017–2021) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga maupun belanja transfer. Secara proporsional, belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja lainnya. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja operasi di Kabupaten Batang terdapat belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan dengan persentase yang relatif besar.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis realisasi belanja Daerah dibanding anggaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tingkat realisasi belanja Kabupaten Batang secara keseluruhan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 93,48%;, tahun 2018 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 94,51%, tahun tahun 2019 turun menjadi 92,33%, tahun 2020 90,25% dan pada tahun 2021 naik menjadi 91,54%.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2017–2021 berkisar 90,25% - 94,51%. Realisasi belanja terhadap anggaran belanja seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3. 13
Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Tahun 2017-2021

TAHUN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSEN
2017	1.672.200.073.871,00	1.563.181.721.380,96	93,48
2018	1.785.274.289.417,00	1.687.215.725.890,00	94,51
2019	1.900.852.963.033,58	1.755.066.560.019,00	92,33
2020	1.842.165.280.803 ,00	1.662.512.932.221 ,00	90,25
2021	1.924.117.648.037 ,00	1.761.381.976.664 ,00	91,54

Sumber : BPKPAD dan Bapelitbang Kabupaten Batang, 2021

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja Daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Batang dapat dilihat dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 sebesar 64%, tahun 2018 sebesar 70%, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 62%, pada tahun 2020 naik menjadi 63% dan pada tahun 2021 sebesar 64%. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3. 14
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2017	1.014.683.907.037,96	1.573.181.721.380,96	64%
2	Tahun anggaran 2018	1.191.380.681.647,00	1.697.733.070.810,00	70%
3	Tahun anggaran 2019	1.109.406.803.718,00	1.796.537.274.207,00	62%
4	Tahun anggaran 2020	1.070.204.881.637,19	1.690.397.956.762,19	63%
5	Tahun Anggaran 2021	1.130.887.906.081,00	1.775.050.858.960,00	64%

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya untuk menutup defisit anggaran Daerah.

Analisis pembiayaan Daerah digunakan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan Daerah dengan melihat kebijakan pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah.

Defisit riil Kabupaten Batang selama kurun waktu 2017-2021

mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2017 defisit riil Kabupaten Batang sebesar Rp 205.227.256.050, akan tetapi pada tahun 2018 positif sebesar Rp 28.847.022.012,81. Sedangkan pada tahun 2019 kembali defisit riil sebesar minus Rp. 26.579.071.790,72. Kemudian berturut-turut tahun 2020 dan 2021 positif sebesar Rp. 17.987.142.845,46 dan Rp. 221.798.092.828,68

Komposisi penutup defisit riil anggaran yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, penerimaan piutang Daerah.

Tabel 3. 15 Surplus/Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang 2017-2021

NO	Uraian	Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.566.154.720.613,58	1.701.877.299.154,00	1.769.958.202.416,28	1.733.087.893.276,46	1.798.648.696.505,64
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.761.381.976.664,00	1.662.512.932.221,19	1.755.066.560.019,00	1.687.215.725.890,00	1.563.181.721.380,96
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	10.517.344.920,00	41.470.714.188,00	27.885.024.541,00	13.668.882.296,00
	Surplus/Defisit riil	(205.227.256.050,42)	28.847.022.012,81	(26.579.071.790,72)	17.987.142.845,46	221.798.092.828,68

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

Tabel 3. 16
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Batang 2017-2021

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		Tahun Anggaran 2017 (Rp)	Tahun Anggaran 2018 (Rp)	Tahun Anggaran 2019 (Rp)	Tahun Anggaran 2020 (Rp)	Tahun Anggaran 2021 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	96.668.844.786,58	101.747.058.955,58	122.728.564.505,86	174.895.334.920,13	203.262.054.761,77
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	47.512.468.250,00	9.476.833.900,00	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	48.109.091,00	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolahKeterangan : Tahun 2021 unaudited

Dengan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur dengan melihat gambaran mengenai komposisi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada periode sebelumnya.

Realisasi SiLPA berasal dari beberapa komponen, yaitu pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan Daerah yang sah, sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan.

Berikut disajikan perhitungan analisa sisa lebih (riil) perhitungan anggaran :

Tabel 3. 17
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Batang 2017-2021

No.	Uraian	TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	96.668.844.586,58		101.747.058.955,58		122.728.564.505,86		174.895.334.920,13		203.262.054.762	
2	Pelampauan penerimaan PAD	450.816.493,58	0,47%	2.485.463.323,00	2%	(3.356.516.751,72)	-3%	31.461.632.798,46	18%	48.653.729.312	24%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(31.203.109.678,00)	-32%	(10.640.826.337,00)	-10%	(33.438.126.497,00)	-27%	(14.101.305.099,00)	-8%	7.662.054.995	4%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.123.880.132,00	2%	5.128.258.300,00	5%	2.979.865.739,00	2%	5.207.695.398,00	3%	(5.018.765,00)	-0,002%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-		-		-		-		-	
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	127.865.469,00	0,13%	110.822.539,00	0%	46.460.968,00	0,04%	35.148.584,00	0,02%	35.148.584,00	0,017%
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Keterangan : Tahun 2021 unaudited

3.4 Kerangka Pendanaan

3.4.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2023-2026

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan Daerah tahun 2017-2021, maka pendapatan Daerah tahun 2023–2026 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan Daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan Daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan Daerah meliputi pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja Daerah Tahun 2023 – 2026 didasarkan atas penghitungan pertumbuhan PDRB dan juga dengan mempertimbangkan semakin baiknya penanganan dampak pandemi *Covid-19*, sehingga pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

- a) Proyeksi pajak Daerah tahun 2023-2026, didasarkan atas baseline tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan mempertimbangkan perolehan capaian tahun 2021, dan memasukkan adanya variabel pertumbuhan PDRB Tahun 2016 sampai dengan 2020, dimana penurunan PDRB Tahun 2020 sebesar -1,29% karena dampak *Covid-19*. Variabel PDRB penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDRB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Pengaruh *Covid-19* yang juga berdampak terhadap PDRB maupun PAD tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan *social distancing* dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan rata-rata pertumbuhan Pajak

Daerah dari tahun 2016–2020 sebesar 11,36% sedangkan pertumbuhan PDRB 3,84% sehingga diperoleh nilai elastisitas 2,75%. Nilai elastisitas ini menjadi dasar penghitungan proyeksi PAD 2023-2026 dengan tetap mempertimbangkan capaian perolehan tahun 2021.

- b) Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, proyeksi pertumbuhan pajak Daerah pada tahun 2023-2026 diharapkan dapat tumbuh secara signifikan. Proyeksi retribusi Daerah tahun 2023–2026, analog dengan tekanan pandemi *Covid-19* meskipun diharapkan penanganan pandemi ini dapat berjalan dengan baik. Pada pos pajak Daerah, penurunan potensi juga terjadi pada pos retribusi Daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi jasa usaha. Beberapa penurunan bersumber dari koreksi atas asumsi penerimaan akibat pandemi *Covid-19* yaitu retribusi pelayanan pasar tradisional, retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta retribusi parkir di tepi jalan umum, menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan *social distancing* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa pos retribusi Daerah juga mengalami penurunan karena menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain perubahan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menjadi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dan penyesuaian model atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berdasarkan pertumbuhan PDRB 2016-2020 sebesar rata-rata 3,84% dan pertumbuhan capaian retribusi rata-rata 0,99%, dan pandemi *Covid-19* masih terjadi, maka penerimaan retribusi mengalami trend yang meningkat rata-rata 1,03% per tahun. Sebagai baseline data realisasi retribusi Daerah tahun 2021 mencapai sebesar Rp.16.163.677.602,00.
- c) Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

yang bersumber dari BUMD yang ada di Kabupaten Batang, yaitu dari Perumda Aneka Usaha, Bappera dan PDAM Sendang Kamulyan. Proyeksi ini didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi cukup signifikan, maka hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh rata-rata sebesar 2% per tahun pada periode 2023 – 2026, dengan baseline pendapatan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan perubahan RAPBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp 12.762.036.070,00.

- d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2016–2020. sumber terbesar pendapatan lain-Lain PAD yang sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan RSUD Kabupaten Batang dan Puskesmas, namun demikian sesuai regulasi pendapatan ini selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD.

2) **Pendapatan Transfer**

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan transfer pada APBD. Yang semula (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005) Dana Transfer terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, berubah menjadi Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Proyeksi pendapatan transfer Pemerintah Pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2020 dan 2021 serta proyeksi tahun 2022 dengan memperhitungkan kebijakan

APBN Tahun 2023-2026 dan penanganan dampak pandemi *Covid-19* yang semakin baik, memberikan harapan bahwa pemulihan ekonomi dapat lebih cepat, yang pada akhirnya dapat menggerakkan roda perekonomian ke arah yang lebih baik.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Batang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar Daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional.

Berikut adalah tabel proyeksi pendapatan tahun 2023-2026.

Tabel 3. 18
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Batang
Tahun 2023-2026

Uraian	TAHUN					Rerata
	2022	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN DAERAH						
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.962.267.259	309.151.566.392	315.420.784.470	319.701.220.050	326.888.357.773	1,67
Pajak Daerah	122.460.000.000	126.235.000.000	129.219.250.000	130.080.753.750	132.535.324.591	2,00
Retribusi Daerah	28.602.525.600	25.707.500.000	25.920.917.250	26.134.873.730	26.375.259.492	-1,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.417.731.659	13.186.086.292	13.507.808.018	13.907.964.178	14.109.123.461	3,26
Lain-lain PAD yang Sah	142.482.010.000	144.022.980.100	146.772.809.202	149.577.628.392	153.868.650.229	1,94
PENDAPATAN TRANSFER	1.381.880.712.000	1.411.546.233.184	1.459.073.050.359	1.501.168.021.191	1.523.744.967.196	2,48
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.252.026.969.000	1.280.867.890.184	1.327.528.877.359	1.368.714.726.691	1.390.337.095.121	2,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.853.743.000	130.678.343.000	131.544.173.000	132.453.294.500	133.407.872.075	0,68
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	0,00
Jumlah Pendapatan	1.769.326.979.259	1.802.181.799.576	1.855.977.834.829	1.902.353.241.241	1.932.117.324.969	2,23

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah
Tahun 2022 penetapan

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja Daerah untuk tahun 2023-2026 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,00%. Pada tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.850.181.799,57,- dan pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp. 1.980.117.342.969

Proyeksi belanja pada RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi diproyeksikan naik tiap tahunnya dengan rerata pertumbuhan dari tahun 2023-2026 sebesar 2,08 %. dengan rincian :

1. Belanja Pegawai

Guna memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk di dalamnya adalah proyeksi kenaikan jumlah ASN di Kabupaten Batang, maka belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama dalam penambahan dan pemenuhan gaji ASN baru. Kenaikan belanja pegawai rata rata pertumbuhannya sebesar 2,88 %.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja Barang Jasa diasumsikan naik. Belanja ini dianggarkan untuk barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Rerata pertumbuhan dari tahun 2023-2026 sebesar 0,74%

3. Belanja Hibah

Pada pos belanja ini terjadi perubahan yang fluktuatif. pelaksanaan pilkada dan pilkades dimasukkan pada komponen belanja ini. Belanja hibah untuk pelaksanaan pilkada dialokasi pada tahun 2023 dan 2024, sehingga pada tahun tersebut

terdapat kenaikan belanja hibah yang signifikan dibandingkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 belanja hibah di proyeksikan sebesar Rp. 109.182.398.000, naik menjadi Rp. 114.182.398.000 pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 turun menjadi Rp. 79.974.221.980, dan pada tahun 2026 di proyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 85.863.875.219.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial diproyeksikan naik dengan rerata pertumbuhan sebesar 0,69 %. Belanja bantuan sosial pada tahun 2021 Rp. 15.310.161.203 dan naik menjadi Rp. 15.695.984.921 pada tahun 2026.

2) **Belanja Modal**

Belanja modal diproyeksikan naik tiap tahunnya, Meskipun apabila dibandingkan pada tahun 2022 terjadi penurunan belanja modal pada tahun 2023, namun secara rerata pertumbuhan belanja modal sebesar 4,88%. Tahun 2023 belanja modal sebesar Rp. 148.133.003.258 dan pada tahun 2026 naik menjadi Rp. 201.170.351.594.

3) **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga di proyeksikan menurun dibandingkan pada tahun 2022, dan tetap dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000.000 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

4) **Belanja Transfer**

Belanja transfer pada tahun 2023-2026 diproyeksikan naik, dengan rerata pertumbuhan sebesar 0,84%. Dengan komposisi rerata kenaikan DAU tahun 2023-2026 sebesar 3,06 persen serta rerata kenaikan DAK tahun 2023-2026 sebesar 2,83 persen.

Proyeksi belanja pada tahun 2023-2026 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3. 19
Proyeksi Belanja Tahun 2023-2026

Uraian	TAHUN					Rerata
	2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.303.830.614.126	1.355.215.685.843	1.400.937.229.460	1.403.321.728.002	1.418.743.373.345	2,08
Belanja Pegawai	759.310.227.463	779.531.954.209	814.588.484.490	846.459.495.582	853.607.047.633	2,88
Belanja Barang dan Jasa	450.066.007.413	451.191.172.431	456.703.084.155	461.270.114.997	463.576.465.572	0,74
Belanja Hibah	79.182.398.000	109.182.398.000	114.182.398.000	79.974.221.980	85.863.875.219	4,97
Belanja Bantuan Sosial	15.271.981.250	15.310.161.203	15.463.262.815	15.617.895.443	15.695.984.921	0,69
BELANJA MODAL	172.395.984.728	148.133.003.258	153.675.103.605	193.132.988.420	200.856.513.964	4,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.818.387.899	29.892.933.868	30.042.398.538	30.516.002.962	31.063.618.080	1,29
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.621.063.337	29.380.927.045	34.527.831.680	65.621.063.337	67.277.273.970	15,73
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.058.393.492	85.958.756.995	86.189.986.111	90.051.885.972	95.502.145.404	2,67
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	718.140.000	2.719.935.350	2.733.535.026	6.760.870.377	6.828.479.080	106,89
Belanja Modal Aset Lainnya	180.000.000	180.450.000	181.352.250	183.165.772	184.997.430	0,69
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	-9,38
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	-9,38
BELANJA TRANSFER	341.078.257.405	341.078.257.407	342.783.648.697	349.211.485.182	352.703.600.032	0,84
Belanja Bagi Hasil	9.594.487.905	9.594.487.907	9.642.460.350	9.738.884.948	9.836.273.799	0,63
Belanja Bantuan Keuangan	331.483.769.500	331.483.769.500	333.141.188.347	339.472.600.234	342.867.326.233	0,85
JUMLAH BELANJA	1.829.304.856.259	1.851.926.946.508	1.904.895.981.762	1.953.166.201.604	1.979.803.487.341	2,00

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

C. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi penerimaan pembiayaan Daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan Daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam 4 (empat) tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Batang merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD. Disamping itu juga di proyeksikan adanya penerimaan pinjaman daerah guna memenuhi likuiditas Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Batang tahun 2023-2026.

Tabel 3. 20
Pembiayaan Daerah Tahun 2023-2026

Uraian	TAHUN					Rerata
	2022	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.977.877.000	61.745.146.932	60.918.146.933	62.812.960.363	59.686.162.372	-5,04
Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	-7,59
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101.977.877.000	82.745.146.932	84.918.146.933	86.812.960.363	83.686.162.372	-5,56
PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	-7,59
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.000.000.000	33.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	-4,73
Pembiayaan Netto	59.977.877.000	49.745.146.932	48.918.146.933	50.812.960.363	47.686.162.372	-6,27

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

3.5 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Batang. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:
 1. Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjanganASN dan gaji tenaga kontrak.
 2. Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak.
 3. Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.
- 2) Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan Pengembalian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

3.5.1. Kerangka Pendanaan

Dari uraian-uraian sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program/kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan (2023-2026) dapat dijelaskan sebai berikut.

Berdasarkan data realisasi yang telah ada, maka dapat dilakukan analisa Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang tahun 2017-2021 untuk merencanakan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Batang tahun 2023-2026. Hasil Analisis pada tahun sebelumnya seperti yang tertuang dalam dalam tabel berikut :

Tabel 3. 21
Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Kabupaten Batang tahun 2017-2021

Uraian	Tahun					Rerata
	2017	2018	2019	2020	2021	
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.083.416.673.280	1.233.096.235.068	1.219.256.192.471	1.175.475.076.933	1.226.159.533.081	3
Belanja Pegawai	724.298.381.490	735.764.418.239	755.022.216.774	736.483.205.203	732.151.543.286	0
Belanja Barang	290.385.525.548	387.804.199.551	354.384.586.944	333.721.676.434	398.736.362.795	6
BELANJA TAK TERDUGA	-			21.227.513.290	3.107.225.000	(85)
PENGELUARAN	10.000.000.000	10.517.344.920	41.470.714.188	27.885.024.541	13.668.882.296	-18
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	10.517.344.920	41.470.714.188	27.885.024.541	13.668.882.296	-18
JUMLAH	1.093.416.673.280	1.243.613.579.988	1.260.726.906.659	1.224.587.614.764	1.242.935.640.377	3

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Dari data diatas, berdasarkan estimasi realisasi Tahun 2021, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Batang 2023-2026 seperti ditunjukkan dalam Tabel sebagai berikut

Tabel 3. 22
Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas
Utama Kabupaten Batang tahun 2023-2026

Uraian	Proyeksi					Rerata
	2022	2023	2024	2025	2026	
BELANJA						
BELANJA OPERASI	1.209.376.234.876	1.230.723.126.640	1.271.291.568.645	1.307.729.610.579	1.317.183.513.205	2,11
Belanja Pegawai	759.310.227.463	779.531.954.209	814.588.484.490	846.459.495.582	853.607.047.633	2,88
Belanja Barang dan Jasa	450.066.007.413	451.191.172.431	456.703.084.155	461.270.114.997	463.576.465.572	0,74
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	-15
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	-15
PEMBIAYAAN						
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.000.000.000	33.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	-4,73
Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	-7,59
TOTAL	1.263.376.234.876	1.271.223.126.640	1.314.791.568.645	1.351.229.610.579	1.360.683.513.205	1,83

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Keterangan : Tahun 2022 penetapan APBD

Mendasari data diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, kapasitas riil kemampuan keuangan untuk mendanai program/kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan (2023-2026) sebai berikut.

Tabel 3. 23
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Batang
Tahun 2023-2026

Uraian	Tahun				
	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Pendapatan	1.769.326.979.259	1.802.181.799.576	1.855.977.834.829	1.902.353.241.241	1.932.117.324.969
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.977.877.000	61.745.146.932	60.918.146.933	62.812.960.363	59.686.162.372
Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
TOTAL PENERIMAAN	1.871.304.856.259	1.884.926.946.508	1.940.895.981.762	1.989.166.201.604	2.015.803.487.341
DIKURANGI					
Belanja Wajib Mengikat	1.263.376.234.876	1.271.223.126.640	1.314.791.568.645	1.351.229.610.579	1.360.683.513.205
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	607.928.621.383	613.703.819.868	626.104.413.117	637.936.591.025	655.119.974.136

Sumber : BPKPAD, Bapelitbang, 2021 diolah

Keterangan : Tahun 2022 penetapan APBD

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Mendasarkan pada analisis gambaran umum kondisi daerah yang tergambarkan pada Bab 2, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang yang harus ditangani dalam empat tahun kedepan sebagai berikut :

a. Permasalahan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pendidikan maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Masih belum optimalnya dukungan sarpras pendidikan, khususnya bangunan sekolah SD/MI dan SMP/MTs yang belum semuanya dalam kondisi baik;
 - b) Masih rendahnya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar;
 - c) Masih rendahnya angka pendidikan yang ditamatkan terutama jenjang SMP/ sederajat;
 - d) Belum optimalnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik.
2. Urusan Kesehatan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Kesehatan maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) AKI, AKB dan AKBA yang masih cukup tinggi.
 - b) Belum optimalnya penanganan gizi buruk.
 - c) Meningkatnya kasus *stunting*.
 - d) Belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan.
 - e) Masih sedikitnya desa di Kabupaten Batang yang bebas ODF.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Masih adanya total luasan irigasi dalam kondisi rusak;
 - b) Masih adanya jalan dan jembatan kondisi rusak/rusak parah;
 - c) Belum optimalnya kondisi jalan yang merupakan akses utama perekonomian masyarakat;
 - d) Belum seluruhnya kebutuhan akses air minum dan sanitasi terpenuhi.
 - e) Belum optimalnya rencana perwujudan ruang yang terencana dalam rencana pembangunan daerah;
 - f) Masih rendahnya rasio Ruang Terbuka Hijau.
4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Belum optimalnya pemenuhan rumah layak huni dan rumah sehat;
 - b) Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur lingkungan perumahan yang layak;
 - c) Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh;
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Masih terdapat tindak pidana;
 - b) Masih terbatasnya jumlah SDM Linmas untuk mendukung upaya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) Belum optimalnya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana;
 - d) Masih terdapatnya penyakit masyarakat.
6. Urusan Sosial, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Sosial maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Belum optimalnya penanganan PMKS.
 - b) Masih sedikitnya panti yang menyediakan sarana prasarana

pelayanan kesehatan sosial;

- c) Masih rendahnya bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar PMKS.

b. Permasalahan Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Tenaga Kerja, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Meningkatnya angka pengangguran terbuka;
 - b) Kualitas tenaga kerja masih banyak yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
 - c) Masih kurangnya jumlah lowongan kerja dibandingkan jumlah pencari kerja;
 - d) Masih rendahnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Masih adanya kesenjangan gender di beberapa bidang;
 - b) Masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, swasta dan legislatif;
 - c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap anak;
 - d) Belum terpenuhinya beberapa indikator KLA dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3. Urusan Pangan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Menurunnya ketersediaan beras karena terganggunya distribusi dan rantai pasok;
 - b) Masih rendahnya cadangan pangan daerah;
 - c) Pola konsumsi masyarakat masih kurang berimbang.
4. Urusan Pertanahan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja urusan Pertanahan, maka masih terdapat permasalahan yang

perlu diperhatikan kedepan yaitu:

- a) Belum optimalnya Fasilitasi Hak Atas Tanah Program Daerah dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan;
 - b) Masih rendahnya lahan yang bersertifikat.
5. Urusan Lingkungan Hidup, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Lingkungan Hidup, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan masih belum baik;
 - b) Belum optimalnya penanganan persampahan di Kabupaten Batang;
 - c) Masih rendahnya tutupan lahan di Kabupaten Batang.
6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Belum seluruhnya masyarakat memiliki data administrasi kependudukan.
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Belum optimalnya peran PKK di masyarakat;
 - b) Masih kurang aktifnya pembinaan dan monitoring secara intensif baik ke desa binaan maupun desa non binaan;
 - c) Belum optimalnya peran tenaga pendamping desa dalam mengawal program pemberdayaan masyarakat baik infrastruktur maupun non infrastruktur.
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Menurunnya PUS yang menjadi peserta KB aktif;
 - b) Unmetneed KB yang masih relatif tinggi;

- c) Menurunnya angka partisipasi KB (akseptor KB) di Kabupaten Batang;
 - d) Belum optimalnya akses dan pelayanan KB di Kabupaten Batang.
9. Urusan Perhubungan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Perhubungan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Masih rendahnya pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, khususnya rambu-rambu dan penerangan jalan umum;
 - b) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Batang.
10. Urusan Komunikasi dan Informatika, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Komunikasi dan Informatika, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja Pemerintah;
 - b) Belum optimalnya pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan;
 - c) Belum optimalnya tata kelola dan layanan SPBE;
 - d) Belum optimalnya sarana dan prasarana TIK.
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Belum optimalnya pengelolaan produk unggulan dan UMKM;
 - b) Masih rendahnya persentase koperasi sehat;
 - c) Masih banyaknya UMKM dan wirausaha baru yang tidak dapat bertahan karena terkendala permodalan;
 - d) Menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak Covid-19 terhadap produk UMKM.
12. Urusan Penanaman Modal, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Penanaman Modal, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:.

- a) Menurunnya nilai realisasi investasi yang disebabkan dampak pandemi Covid-19;
 - b) Belum optimalnya penyediaan informasi peluang investasi yang siap ditawarkan kepada investor.
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja kepemudaan dan Olahraga yaitu:
- a) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olah raga yang sesuai standar yang ditetapkan;
 - b) Belum optimalnya pembinaan atlet dan pengiriman atlet dalam mengikuti kejuaraan;
 - c) Masih rendahnya keterlibatan pemuda dalam berwirausaha.
14. Urusan Statistik, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Statistik, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah:
- a) Belum semuanya data/informasi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan tersedia secara *up to date*;
 - b) Terdapatnya data/informasi yang tidak dilakukan penghitungan oleh BPS;
15. Urusan Persandian, berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah:
- a) Belum optimalnya kualitas SDM persandian dalam pengamanan informasi.
16. Urusan Kebudayaan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kebudayaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan adalah:
- a) Belum optimalnya pembangunan budaya di Kabupaten Batang.
17. Urusan Perpustakaan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Masih kurangnya minat baca masyarakat, yang disebabkan kurangnya koleksi buku-buku perpustakaan;

- b) Belum optimalnya sarpras dan SDM perpustakaan.
18. Urusan Kearsipan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Kearsipan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
- a) Belum optimalnya implementasi sistem administrasi pengelolaan arsip secara baku;
 - b) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola kearsipan.

c. Permasalahan Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Budidaya perikanan;
 - b) Menurunnya produksi perikanan budidaya;
 - c) Belum optimalnya dukungan sarpras untuk meningkatkan produktivitas perikanan.
2. Urusan Pariwisata, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Pariwisata, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Menurunnya kontribusi pariwisata terhadap PAD;
 - b) Belum optimalnya promosi dan sarana prasarana pendukung pariwisata Batang;
 - c) Belum optimalnya pengelolaannya obyek wisata di Kabupaten Batang.
3. Urusan Pertanian, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Pertanian maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Menurunnya Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB di kabupaten batang;
 - b) Menurunnya luas lahan pertanian dan produktifitas pertanian;
 - c) Menurunnya produksi padi;
 - d) Belum optimalnya Produksi dan produktivitas sub sektor peternakan.

4. Urusan Perdagangan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan perdagangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) dan ADHK di kabupaten Batang;
 - b) Belum optimalnya revitalisasi pasar rakyat;
 - c) Belum optimalnya pendapatan retribusi pasar.
5. Urusan Perindustrian, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Perindustrian, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Menurunnya kontribusi industri terhadap PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Batang;
 - b) Belum optimalnya manajemen usaha keahlian, keterampilan teknis dan daya saing IKM.
6. Urusan Ketransmigrasian, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Urusan Ketransmigrasian, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti transmigrasi.

d. Permasalahan Urusan Penunjang

1. Perencanaan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Perencanaan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan.
2. Keuangan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Keuangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Masih terdapat wajib pajak yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pajaknya;
 - b) Berkurangnya obyek pajak;
 - c) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi.

3. Penelitian dan Pengembangan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Penelitian dan Pengembangan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu :
 - a) Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
 - b) Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kelitbangan daerah.
4. Kepegawaian, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Kepegawaian, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu :
 - a) Masih rendahnya ASN yang mengikuti Diklat sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
 - b) Belum optimalnya pemetaan kompetensi ASN sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karir;
 - c) Belum optimalnya akurasi data kepegawaian.
5. Sekretariat Daerah, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Sekretariat daerah, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b) Belum optimalnya penguatan komunikasi informasi kepada organisasi pemerintah daerah;
 - c) Belum optimalnya implementasi manajemen kinerja.
6. Sekretariat DPRD, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Sekretariat DPRD, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu :
 - a) Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Pengawasan, Berdasarkan kondisi data dan capaian kinerja Pengawasan, maka masih terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan kedepan yaitu:
 - a) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah di Kabupaten Batang;
 - b) Belum optimalnya tindak lanjut penyelesaian LHP.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Strategis Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDG's)

SDG's menggantikan *Millenium Development Goals* (MDG's) yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Konsep SDG's diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDG'S, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Tahun 2016- 2030 antara lain:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosika pertanian berkelanjutan;
- 3) Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;

- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
- 10) Mengurangi kesenjangan di dalam dan antarnegara;
- 11) Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi, dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Perekonomian Global

Kondisi perekonomian global dalam pasca pandemi Covid-19 yang semula diproyeksikan akan mulai pulih pada tahun 2022, ternyata berpotensi akan kembali mengalami penurunan akibat varian Covid-19 baru yaitu Omicron. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tumbuh pada kisaran menjadi 5,9 persen pada 2021 dan menurun menjadi 4,9 persen pada tahun 2022. Proyeksi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya disebabkan merebaknya kasus positif varian Delta di seluruh dunia. Di sisi lain, adanya varian baru Omicron sekaligus gangguan rantai pasok kembali menekan kegiatan perekonomian yang mulai pulih pada kuartal IV 2021, sehingga berimplikasi pada ekonomi tahun depan. Krisis ini akan memiliki dampak berkepanjangan atau *scarring effect* yang bertahan lama pada ekonomi dan kelompok rentan mengingat varian Omicron menciptakan ketidakpastian *Covid-19* menjadi lebih agresif. Pemulihan ekonomi global diproyeksikan akan terus berlanjut meskipun berpotensi melemah. Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung pada beberapa hal seperti akses vaksin dan distribusinya, kapasitas fiskal, dan rantai pasokan global.

3. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia *online* dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah

peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine-to-machine*, komunikasi *human-to-machine*, *Artificial Intelligence* (AI), serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

4. Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus Corona (*Covid-19*) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi dikarenakan penyebarannya yang meluas. Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan disrupti pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses transformasinya akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

Berdasarkan data dari *worldometers.info*, tercatat per tanggal 31 Desember 2021, total infeksi Covid-19 di seluruh dunia telah mencapai 286.715.568 kasus. Para peneliti mengatakan bahwa tingkat keparahan dan penularan Omicron masih "tidak pasti" pada bulan Desember 2021, namun terdapat kemungkinan terjadinya tsunami *COVID-19* yang disebabkan varian Omicron dan Delta karena keduanya memiliki transmisi yang lebih tinggi daripada varian Corona lainnya.

4.2.2 Isu Nasional

1. Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan pemulihan ekonomi Nasional diarahkan pada diversifikasi ekonomi dan pemulihan daya beli dan usaha. Perekonomian daerah di Indonesia masih terkonsentrasi pada sektor tertentu. Ini terlihat dari sebagian daerah masih bergantung pada sektor ekstraktif. Untuk mengatasi masalah itu, perlu mentransformasi ekonomi yang hanya berfokus pada satu sektor untuk lebih terdiversifikasi. Tujuannya, agar suatu daerah tidak hanya fokus pada satu sektor, tetapi pada banyak sektor. Diversifikasi ekonomi sudah menjadi bagian dari rencana pemerintah ke depan serta menjadi bagian reformasi struktural. Diversifikasi ekonomi berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Daerah yang perekonomiannya lebih terdiversifikasi, seperti Jawa dan Sulawesi, relatif tumbuh stabil sebelum era pandemi dan pulih lebih cepat pada kuartal II-2021. Arah kebijakan diversifikasi ekonomi nasional akan difokuskan pada peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon serta pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital. Sedangkan pemulihan daya beli dan usaha akan difokuskan pada penuntasan krisis kesehatan, pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.

2. Kebijakan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi di Kabupaten Batang

Kawasan Industri Terpadu Batang merupakan Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Batang. sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kawasan Industri Terpadu Batang ini selanjutnya perlu dioptimalkan agar dapat memaksimalkan dampak Proyek Strategis Nasional bagi

percepatan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi khususnya di Kabupaten Batang. Keberadaan kawasan industri akan membutuhkan kurang lebih 300 ribu tenaga kerja dan secara demografi mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat di sektor agraris menuju sektor industri. Disisi lain, Kabupaten Batang yang saat ini sedang memasuki bonus demografi merupakan suatu peluang dalam hal penyerapan tenaga kerja dan penurunan angka TPT di Kabupaten Batang. Namun demikian, kapasitas SDM tenaga kerja Batang yang relatif masih rendah dan belum sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk itu, menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Batang kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja Batang agar potensi keberadaan Kawasan Industri ini dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja serta berimplikasi pada penurunan angka TPT dan angka kemiskinan di Batang. Selain hal tersebut, isu lain yang penting untuk mendapatkan perhatian utama adalah isu lingkungan, sehingga yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana meminimalisir dampak negatif pada lingkungan, utamanya di sekitar Kawasan Industri agar keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang dapat dipertahankan kualitasnya.

Sedangkan kebijakan nasional terkait pembangunan kawasan di wilayah Pekalongan – Batang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang diarahkan untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan *fertilitas*, dan peningkatan literasi tentang tabungan (*saving*) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud.

4.2.3 Isu Strategis RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Batang melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, kemudahan untuk dikelola dan merupakan prioritas terhadap janji politik yang perlu diwujudkan. Adapun isu strategis tersebut mencakup pemulihan ekonomi daerah; peningkatan kualitas SDM; peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan; penanggulangan kemiskinan; pemenuhan kebutuhan dasar dan tata kelola pemerintahan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemulihan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung fluktuatif pada kisaran (-1,29) – 5,72 persen. Namun akibat dari pandemi Covid-19, pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Batang mengalami kontraksi sebesar 1,29 persen setelah di

tahun sebelumnya berada pada angka 5,39 persen. Capaian ini jauh lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 1,90 persen. Bukan hanya di Kabupaten Batang, pandemi Covid-19 juga menyebabkan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah mengalami kontraksi sebesar 2,65 persen dan ekonomi nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Batang meningkat menjadi 4,88 persen, jauh lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang tahun 2021 sebesar 2,54 persen.

Sedangkan dari sisi sektor lapangan usaha, tercatat sebanyak 11 (sebelas) sektor lapangan usaha mengalami kontraksi, berkisar antara minus 0,10 persen hingga minus 26,81 persen. tiga sektor lapangan usaha dengan kontraksi terburuk terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar minus 26,81 persen, jasa perusahaan minus 6,74 persen, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar minus 6,48 persen.

Pada tahun 2021, kondisi ekonomi Kabupaten Batang telah mulai pulih, yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,88 persen. Laju pertumbuhan tertinggi disumbang oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 35,78 persen pada tahun 2021. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang merupakan dua lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Batang juga tumbuh positif pada angka 4,38 persen dan 5,95 persen dibanding tahun 2020. Penerapan *social distancing* dan *physical distancing* berdampak pada menurunnya permintaan serta kurang lancarnya proses distribusi yang tentunya berimbas terkendalanya pemasaran hasil industri sehingga dibandingkan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang merupakan lapangan usaha dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kabupaten Batang, kontribusinya justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dari 3,24 pada tahun 2019 menjadi 4,06 pada tahun 2020. Namun demikian, pada sub sektor pertanian tetap ada dampak covid yang dirasakan pada sisi permintaan dan distribusi, diantaranya adalah menurunnya permintaan terhadap hasil pertanian

khususnya sayur-sayuran dan hasil peternakan khususnya daging sapi, daging ayam dan telur karena banyaknya Hotel, Restoran dan Kafe yang tutup, menurunnya permintaan karena pasar terbatas dan terhambatnya distribusi barang karena adanya pembatasan sosial. Sedangkan berkaitan dengan produksi perikanan (tangkap/penangkapan) tidak terlalu terdampak pada pandemi covid, hanya saja menurunnya daya beli masyarakat berakibat pada menurunnya permintaan ikan. Laju pertumbuhan tertinggi disumbang oleh sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 35,78 persen pada tahun 2021. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang merupakan dua lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Batang juga tumbuh positif pada angka 4,38 persen dan 5,95 persen dibanding tahun 2020. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertanian justru mengalami pelambatan sebesar -0,47 persen.

Sedangkan dari sisi PDRB menurut pengeluaran, semua komponen PDRB Pengeluaran mengalami kontraksi. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebagai penopang utama ekonomi Kabupaten Batang berkontraksi, atau tumbuh -1,14 persen, sedangkan penopang kedua setelah PKRT yaitu PMTB mengalami kontraksi, atau tumbuh sebesar -28,33 persen. Menurunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran.

Dari sisi sektor kesehatan, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemik *Covid-19*, diantaranya memberlakukan gerakan hidup sehat dengan gerakan cuci tangan dan selalu memakai masker. Kemudian juga melakukan pelarangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, pembatasan kegiatan masyarakat, memberikan anggaran khusus untuk penanganan *Covid-19* serta pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Kerja keras pemerintah, terutama tenaga kesehatan dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penularan *Covid-19* telah membuahkan hasil dengan melandainya kasus *Covid-19* saat ini dibandingkan pada bulan Juli 2021 saat merebaknya Varian Delta. Sekarang kehidupan mulai berjalan ke arah normal dengan diperbolehkan

beroperasinya pusat perdagangan, rumah makan, pusat kebugaran, transportasi umum, tempat wisata dan fasilitas umum lainnya dengan pembatasan kapasitas pengunjung maksimal 75 persen atau ketentuan yang berlaku, sehingga roda perekonomian mulai bangkit kembali.

Seiring semakin melandainya kasus *Covid-19* di Kabupaten Batang serta beberapa upaya percepatan pemulihan ekonomi telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Batang, maka diharapkan tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi Batang akan semakin membaik. Meskipun demikian, pandemi *Covid-19* yang belum dipastikan kapan akan berakhir akan tetap menjadi salah satu ancaman paling besar perekonomian daerah, sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana terus memperkuat sistem kesehatan daerah, memperkuat sektor-sektor unggulan Kabupaten Batang agar tetap tumbuh positif karena merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Kabupaten Batang, serta meningkatkan dan menjaga daya beli rumah tangga. Selain itu isu lainnya adalah bagaimana memperkuat sektor koperasi dan UMKM yang juga menjadi penyokong perekonomian daerah saat terjadinya pandemi *Covid-19*, serta sektor-sektor lainnya yang hampir seluruhnya terdampak pandemi *Covid-19* seperti sektor pariwisata, dan investasi.

2. Peningkatan Kualitas SDM

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dalam bidang ekonomi adalah SDM. Rendahnya kualitas SDM dapat berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan tingkat partisipasi dalam dunia kerja dan dalam proses produksi. Kemajuan suatu daerah amat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Disamping faktor-faktor lain seperti sumber daya alam, infrastruktur dan sosial budaya serta modal dan kestabilan politik, namun sumber daya manusia memiliki peran untuk mengelola semua komponen. Maka jika sumber daya manusia di suatu daerah berkualitas tinggi sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan semua sumber daya alam yang ada akan maksimal dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan berlaku sebaliknya, jika sumber daya manusia nya rendah maka meski faktor penentu yang

lain ada maka akan sulit untuk mengembangkannya. Kondisi di Batang saat ini, rasio ketergantungan cenderung terus berkurang, belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020-2030. Pada periode itu akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi pada sumber daya manusia guna mendorong produksi. Hal ini disebut sebagai fenomena Bonus Demografi. Namun perlu diketahui bahwa di satu sisi, sumber daya manusia dalam jumlah yang besar dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja, tetapi di sisi lain dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik, apabila banyak yang tidak bekerja. Hal ini karena pada usia produktif tapi tenaganya tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja. Struktur umur penduduk Kabupaten Batang pada tahun 2017 masih didominasi oleh penduduk usia produktif, mencapai 69,53 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2021 menjadi 69,80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kabupaten Batang menjadi sangat potensial sebagai modal dasar yang besar untuk pembangunan.

Memasuki era revolusi industri 4.0, kemajuan sebuah daerah tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan saat ini dan kedepan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM. Terlebih lagi, dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Batang yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang, diharapkan menjadi sebuah momentum bagi pemulihan ekonomi di Kabupaten Batang yang belakangan ini mengalami pelambatan karena dampak pandemi Covid-19. Terkait upaya pemanfaatan momentum tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah kompetensi dan kapasitas SDM masyarakat Batang yang belum sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Oleh karena itu yang menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Batang adalah bagaimana pendidikan di Kabupaten Batang tidak hanya untuk mencerdaskan namun juga dapat membangun pondasi yang kokoh untuk pengembangan kualitas tenaga kerja dan juga dapat membangun kerangka dasar

kompetensi. Selain hal tersebut, permasalahan Pendidikan di Batang secara umum adalah masih rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah, yang sampai dengan tahun 2021 baru mencapai angka 6,88 tahun yang artinya, bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Batang baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan lulus SD atau putus sekolah di kelas 1 SMP. Beberapa upaya yang dilakukan untuk menaikkan angka Rata-rata Lama Sekolah diantaranya meningkatkan kases dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan serta yang tidak kalah pentingnya adalah menyekolahkan kembali anak yang putus sekolah dan mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Namun yang menjadi hambatan adalah sulitnya melakukan pendataan anak usia 7 – 15 tahun yang tidak bersekolah serta sulitnya melakukan pendataan peserta didik yang kurang mampu, sehingga bantuan pendidikan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Batang belum seluruhnya tepat sasaran.

Hal berikutnya yang berpengaruh terhadap kualitas SDM adalah derajat kesehatan. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Peningkatan derajat kesehatan dapat dicapai dengan memperhatikan kualitas kesehatannya dari masa sebelum dilahirkan. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan sampai masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. Keselamatan ibu melahirkan dan bayinya perlu mendapat perhatian. Di Kabupaten Batang masih terjadi kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan kasus balita stunting.

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi menurun, dari 127,27 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 159,80. Peningkatan ini, antara lain disebabkan oleh masih tingginya kasus ibu hamil Kekurangan Energi Kronik (KEK)

karena adanya kepercayaan pantang makan makanan tertentu diwaktu hamil, komplikasi kebidanan dan masih adanya ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya secara teratur. Namun persentase terbesar dari AKI disebabkan oleh penyakit penyerta (bukan karena hal yang berkaitan langsung dengan kehamilan), misalnya jantung, TB dan hipertensi.

Pada tahun 2019 AKI mengalami penurunan menjadi sebesar 111,08 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 109,36 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan AKI yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang membawa hasil positif. Upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan AKI diantaranya pemberian tablet tambah darah (Pil Cantik) pada remaja putri, pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (minimal 4 kali selama kehamilan, Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya dan Memberikan PMT pada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis, peningkatan perawatan dan non perawatan melalui penyediaan ruang persalinan dan alat kesehatan untuk persalinan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan serta melibatkan dan meningkatkan kerja sama lintas sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, Karang Taruna dan Tim Penggerak PKK dalam mensosialisasikan kegiatan 5 ng dalam rangka mengenal kehamilan ibu-ibu di wilayah kerjaya dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan.

Pada Tahun 2021 terjadi peningkatan AKI yang disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19. Dari angka 273,43 per 100.000 KH (atau setara dengan 33 kasus), 157,42 KH (atau setara dengan 19 kasus kematian ibu) disebabkan oleh Covid-19, sedangkan 14 kasus lainnya (atau setara dengan 116,01 per 100.000 KH) disebabkan oleh penyakit penyerta tidak menular seperti jantung, hipertensi dan TB..

Hal lain yang mempengaruhi kualitas SDM adalah tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita. Pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, yang perubahan komposisinya digunakan

sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan pola pengeluaran, jika dibandingkan antara pengeluaran konsumsi non pangan dengan pengeluaran untuk pangan, konsumsi non pangan masih cenderung lebih rendah yang artinya masyarakat masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dibandingkan dengan kebutuhan non pangan seperti perumahan, pakaian dan barang/jasa lainnya.

3. Peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka peluang tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Ruang kesempatan untuk berkembang hanya bisa dimanfaatkan jika daerah memiliki modalitas kuat dan berdaya saing. Daya saing berbasis inovasi, di mana titik tumpunya adalah efisiensi dan produktivitas dari semua stakeholders menjadi kunci memenangkan persaingan antardaerah.

Dalam mengintegrasikan konsep daya saing dengan aspek kelestarian (lingkungan) dan pembangunan inklusif, terdapat empat pilar utama sebagai komponen pembentuk: keberlanjutan lingkungan, ekonomi berdaya saing, sosial inklusif, dan tata kelola yang baik. Pilar keberlanjutan lingkungan, adalah sebuah dimensi pembangunan yang memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dilakukan secara efisien. Pembangunan diarahkan sesuai prinsip keberlanjutan yang mencakup kualitas lingkungan hidup, pengelolaan SDA lingkungan, konservasi, dan resiliensi lingkungan. Dalam periode lima tahun terakhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang yang merupakan indikator pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Batang terus meningkat. Namun, seiring dengan semakin tumbuhnya sektor Industri di Kabupaten Batang dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang untuk memprioritaskan sektor Industri

sebagai sektor unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian Kabupaten Batang, kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan lingkungan ini tetap menjadi perhatian dalam pembangunan daerah empat tahun kedepan. Sementara itu terkait resiliensi juga diperlukan upaya untuk terus meningkatkan resiliensi lingkungan, mengingat Kabupaten Batang termasuk daerah dengan risiko bencana yang tinggi.

Pilar ekonomi berdaya saing yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Tahun 2021, jumlah pengangguran di Kabupaten Batang sebanyak 28.370 orang memang lebih rendah jika dibandingkan jumlah pengangguran tahun 2020, namun jumlah tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19, dengan jumlah pengangguran sebanyak 16.755 orang. Inilah yang menjadi tantangan kedepan bagaimana meningkatkan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah yang berkembang tentu dapat menciptakan peluang dan menyerap tenaga kerja. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah Kabupaten Batang untuk menekan angka pengangguran. Isu yang berikutnya terkait ekonomi yang berdaya saing adalah kemandirian keuangan daerah Kabupaten Batang yang masih relatif rendah. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Batang selama kurun waktu 2017-2021 termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut Kabupaten Batang belum optimal menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Pada tahun 2017 derajat ketergantungan keuangan daerah sebesar 85,83%. Kurun waktu 2018 sampai dengan tahun 2021 derajat ketergantungan keuangan mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 dengan persentase ketergantungan sebesar 78,91%. hal ini menunjukkan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah serta peningkatan lain-lain pendapatan yang sah.

Tantangan kedepannya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta bagaimana upaya meningkatkan dukungan pendanaan pembangunan melalui skema kerjasama dan kemitraan maupun

optimalisasi CSR sebagai alternatif pendanaan diluar APBD. Pilar sosial inklusif yang menempatkan kemandirian individu sebagai modal utama untuk mencapai kualitas hidup yang ideal, yang terdiri dari keunggulan sumber daya manusia (SDM), ketenagakerjaan, kondusifitas keamanan, dan ketersediaan infrastruktur sosial. Beberapa permasalahan yang muncul adalah kapasitas SDM yang belum sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan serta ketersediaan lapangan kerja yang belum berimbang dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Permasalahan lainnya adalah pemenuhan infrastruktur sosial yang masih belum optimal serta kondusivitas wilayah yang harus selalu terjaga. Sedangkan pilar tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan kinerja pembangunan. Tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan implementasi reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan yang efektif dan efisien agar optimal dalam menjalankan fungsinya, serta perlunya inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hal penting lainnya terkait permasalahan daya saing adalah belum optimalnya kualitas dan kapasitas infrastruktur, berimplikasi pada beban masyarakat dalam penyediaan produksi dan mobilisasi sumber daya yang akan mempengaruhi daya saingnya. Permasalahan lain terkait infrastruktur adalah belum optimalnya konektivitas wilayah, belum memadainya akses ke kawasan industri dan pariwisata unggulan daerah.

Pembangunan infrastruktur sumberdaya air utamanya untuk mengantisipasi banjir yang merupakan fenomena tahunan yang semakin anomali, sehingga antisipasi dan langkah-langkah mitigasi harus semakin ditingkatkan dan tersinkronisasi. Sistem penyediaan air bersih serta sistem manajemen air limbah juga masih perlu ditingkatkan, selain itu, pembangunan jaringan irigasi yang menunjang peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi hal penting untuk tetap dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian pangan di Kabupaten Batang.

Selain dukungan infrastruktur publik, pengembangan infrastruktur teknologi informasi juga menjadi hal penting untuk akselerasi transformasi digital di Kabupaten Batang.

Yang menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur adalah bagaimana upaya peningkatan soft power melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan kolaborasi dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

4. Telaah RTRW Kabupaten Batang Tahun 2019 - 2039

Pengembangan wilayah Kabupaten Batang Batang berlandaskan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Batang tahun 2019 – 2039 dengan tujuan yaitu terwujudnya ruang wilayah Kabupaten Batang Batang yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang disusun kebijakan dan strategi penataan ruang, yaitu:

a. pengembangan sistem wilayah sesuai dengan karakter fisiografis dan kemampuan lahan, dengan strategi yaitu:

- mengarahkan pengembangan wilayah Kabupaten Batang bagian selatan sebagai kawasan yang mendukung fungsi konservasi;
- mengoptimalkan wilayah Kabupaten Batang bagian tengah sebagai kawasan pengembangan pertanian dan agrobisnis;
- mengoptimalkan wilayah Kabupaten Batang bagian utara sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan kemampuan lahan;
- mengembangkan sistem perwilayahan pembangunan

b. pengembangan kawasan peruntukan industri dan kawasan industri yang berkualitas, dengan strategi yaitu:

- mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
- mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
- mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku

- lokal disetiap kecamatan;
 - mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri
- c. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif, dengan strategi yaitu:
 - menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - mengatur kegiatan pemanfaatan ruang lahan pertanian sesuai
 - peraturan perundang-undangan;
 - mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi; dan
 - meningkatkan produktivitas lahan pertanian.
- d. pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan, dengan strategi yaitu:
 - mengembangkan pelabuhan perikanan;
 - mengembangkan fasilitas pengolahan hasil perikanan;
 - mengembangkan kawasan minapolitan; dan
 - mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
- e. pengembangan destinasi wisata unggulan Kabupaten Batang, dengan strategi yaitu:
 - menetapkan lokasi pengembangan baru, pengaturan manajemen serta optimalisasi destinasi wisata;
 - mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan berupa sistem informasi, promosi, akomodasi, dan infrastruktur;
 - mengembangkan wisata unggulan berupa obyek wisata Sikembang (wisata pegunungan), Silurah (wisata budaya), Sikuping (wisata petualangan), dan Sigandu (wisata pantai); dan
 - mengatur dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan kawasan wisata.
- f. peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan lindung dan kawasan yang berfungsi lindung dengan mempertimbangkan sifat

perlindungannya, dengan strategi yaitu:

- meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan peruntukan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya;
- meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan peruntukan lindung; dan
- meningkatkan pengelolaan kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% (empat puluh perseratus) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.

g. peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, dengan strategi yaitu:

- membatasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terutama untuk fungsi permukiman dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- mengembangkan sistem peringatan dini;
- mengembangkan jalur evakuasi bencana;
- mengembangkan ruang evakuasi bencana;
- mengembangkan tempat relokasi pasca bencana berupa hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap); dan
- melestarikan kawasan peruntukan lindung dan mempertahankan kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air.

h. pengembangan kualitas permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempertimbangkan standar pelayanan minimal, dengan strategi yaitu:

- mengembangkan fasilitas permukiman sesuai dengan skala pelayanannya;
- mengembangkan ruang interaksi publik;
- mengembangkan ruang terbuka hijau;
- meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh; dan
- menyediakan sarana dan prasarana permukiman.

- i. peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan, dengan strategi yaitu:
 - mengembangkan sistem perkotaan yang berhierarki sesuai dengan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Batang ;
 - mengembangkan pusat pelayanan desa dalam bentuk PPK dan PPL yang terintegrasi dengan potensi desa; dan
 - meningkatkan prasarana transportasi manusia, barang dan data.
- j. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal, dengan strategi yaitu:
 - mengembangkan prasarana transportasi dalam mendukung pergerakan manusia dan barang, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang ;
 - mengembangkan prasarana energi yang mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten Batang ;
 - mengembangkan prasarana telekomunikasi yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Batang ;
 - mengembangkan prasarana sumber daya air yang mampu memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi;
 - meningkatkan pengelolaan sampah berbasis pengurangan sampah dari sumbernya;
 - meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan air minum;
 - meningkatkan kualitas sistem drainase untuk menanggulangi genangan dan banjir; dan
 - meningkatkan kualitas pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- k. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara melalui penetapan kawasan yang mempunyai fungsi pertahanan dan keamanan negara

1. pengembangan kawasan strategis Kabupaten Batang, dengan strategi yaitu:

- mengarahkan dan memantapkan perkembangan kawasan perkotaan di koridor jalan pantai utara (Pantura);
- melakukan penataan kawasan pelabuhan dan sekitarnya;
- mengembangkan kawasan pariwisata;
- melakukan penataan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah dan sekitarnya; dan
- mengoptimalkan pelestarian dan pengembangan kawasan peruntukan lindung sebagai daya dukung lingkungan hidup.

Kabupaten Batang mempunyai struktur ruang atau susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. sistem perkotaan yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman terdiri dari 2 PKL, 13 PPK, 7 PPL dan Sistem Perwilayahan. Sistem perwilayahan dibagi menjadi 5 yaitu:

- a. SWP Batang meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, dan Kecamatan Warungasem. SWP Batang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten, perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, perikanan, industri perikanan, dan pariwisata.
- b. SWP Bandar meliputi: Kecamatan Wonotunggal, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Bandar, dan Kecamatan Blado. SWP Bandar memiliki fungsi sebagai pertanian tanaman pangan hortikultura perkebunan dan peternakan, agroindustri, perdagangan dan jasa, perikanan darat, kehutanan dan pariwisata.
- c. SWP Subah meliputi Kecamatan Subah dan Kecamatan Tulis. SWP Subah memiliki fungsi sebagai industri,

pertanian tanaman pangan, hortikultura perkebunan dan peternakan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan, kehutanan, dan pariwisata.

- d. SWP Gringsing meliputi Kecamatan Gringsing dan Kecamatan Banyuputih. SWP Gringsing memiliki fungsi sebagai industri, pertanian tanaman pangan hortikultura perkebunan dan peternakan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan, kehutanan, dan pariwisata.
- e. SWP Limpung meliputi Kecamatan Limpung, Kecamatan Tersono, Kecamatan Reban, dan Kecamatan Bawang. SWP Limpung memiliki fungsi sebagai perdagangan dan jasa, agroindustri, pertanian tanaman pangan hortikultura perkebunan dan peternakan, pertambangan, perikanan darat, kehutanan, dan pariwisata.

Kabupaten Batang memiliki 5 jenis sistem jaringan prasarana, yaitu:

- a. Sistem jaringan transportasi meliputi: sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara.
- b. Sistem jaringan energi meliputi: jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi dan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- c. Sistem jaringan sumber daya air meliputi: sumber air dan prasarana sumber daya air.
- d. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi: jaringan tetap dan jaringan bergerak.
- e. Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: sistem jaringan persampahan wilayah, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran,

dan sistem jaringan evakuasi bencana.

Upaya yang dilakukan untuk perwujudan struktur ruang diantaranya dengan beberapa program berikut:

- a) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota
- b) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
- c) Penyusunan Masterplan Pengembangan Infrastruktur
- d) Pengembangan Kawasan Perkotaan/ Ibukota Kecamatan
- e) Pengembangan Pusat Pelayanan Perdesaan/KTP2D
- f) Pengembangan Infrastruktur Perdesaan
- g) Penyusunan kajian pengembangan wilayah/SWP
- h) Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana

Dalam upaya pencapaian tujuan penataan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Batang juga dibentuk rencana pola ruang yang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya.

Kawasan peruntukan lindung atau wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove.

Upaya yang dilakukan untuk perwujudan kawasan peruntukan lindung diantaranya dengan beberapa program berikut:

- a. perlindungan kawasan peruntukan lindung dengan adanya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, penghijauan serta reboisasi kawasan.

- b. pengawasan dan pemantauan, penetapan larangan, dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat.
- c. Pengendalian dan pengaturan kegiatan atau usaha.
- d. Penetapan kawasan dan batas kawasan.
- e. Pengembangan prasarana dan sarana penanggulangan bahaya bencana.
- f. Kerjasama pengelolaan kawasan.

Sedangkan kawasan peruntukan budi daya atau wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Upaya yang dilakukan untuk perwujudan kawasan peruntukan budi daya diantaranya dengan beberapa program berikut:

- a) Penetapan dan pemantapan kawasan serta strategi penanganan kawasan.
- b) Penyediaan jaringan prasarana, sarana dan utilitas
- c) Peningkatan produktivitas kawasan serta pengembangan teknologi
- d) Identifikasi dampak lingkungan dan pemulihan kerusakan lahan
- e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja
- f) Pembangunan dan pengembangan permukiman dan rumah susun serta memfasilitasi perbaikan/rehabilitasi kawasan

permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni

- g) Pengembangan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kawasan permukiman
- h) Peningkatan perlindungan dan pengembangan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Di Kabupaten Batang terdapat kawasan strategis atau kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Batang meliputi:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: Kawasan Koridor Perkotaan Batang-Kandeman, Kawasan Pelabuhan Batang, dan Kawasan Pengembangan Wisata Pantai Sigandu-Ujungnegoro dan Pengembangan Wisata Alam Pagilaran. Upaya yang dilakukan untuk perwujudan kawasan ini diantaranya dengan beberapa program berikut:
 - Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Batang
 - Pengembangan prasarana dan sarana perdagangan, industri dan jasa, pelabuhan serta pendukung wisata.
 - Pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan
 - Pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian sawah
 - Pengaturan kegiatan di sekitar kawasan pelabuhan
 - Pengembangan destinasi, pemasaran, industri wisata, dan kelembagaan wisata dengan mengembangkan potensi lokal di kawasan Sigandu – Ujungnegoro dan Pagilaran
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan Peruntukan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan untuk perwujudan kawasan ini diantaranya dengan beberapa program berikut:

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Batang
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendukung aktivitas di lokasi PLTU Jawa Tengah
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Upaya yang dilakukan untuk perwujudan kawasan ini diantaranya dengan beberapa program berikut:
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten Batang
 - Pengaturan pemanfaatan ruang

5. Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik, Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kabupaten Batang. Dampak pandemi covid-19 berpengaruh pada melemahnya daya beli masyarakat, sehingga terjadi peningkatan kemiskinan di Kabupaten Batang sebesar 6,02 persen pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan, jumlah penduduk miskin juga bertambah sebesar 4.310 ribu jiwa. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya nilai indeks kedalaman kemiskinan dari 1,43 di tahun 2020 menjadi 1,76 pada tahun 2021 serta meningkatnya indeks keparahan kemiskinan dari 0,32 di tahun 2020 menjadi 0,48 pada tahun 2021. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin menjauh. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan yang meningkat menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin itu sendiri semakin tinggi atau semakin parah.

Beberapa hal yang melatarbelakangi melemahnya daya beli masyarakat diantaranya adalah menurunnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat karena adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pemerintah Kabupaten Batang mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai 3 Juli 2021 sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus corona yang semakin meluas. Adanya pembatasan jam operasi serta larangan menciptakan kerumunan berpengaruh pada aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional, pusat perbelanjaan, warung, kafe maupun kegiatan ekonomi masyarakat lainnya sehingga berimplikasi pada menurunnya pendapatan masyarakat.

Sedangkan dari sisi ketenagakerjaan, angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Batang mengalami penurunan sebesar 4,76 persen pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020. Namun demikian, jika dilihat dari persentase penduduk miskin tidak bekerja, angkanya meningkat sebesar 2,77 persen. Pada tahun 2020 penduduk miskin di Kabupaten Batang tidak bekerja sebanyak 43,24 persen dan meningkat di tahun 2021 menjadi 44,44 persen. Hal menunjukkan masih rendahnya kesempatan bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin di Kabupaten Batang.

Kondisi faktual lainnya yang dihadapi penduduk miskin Kabupaten Batang adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar utamanya pendidikan. Sekitar 80 persen penduduk miskin di Kabupaten Batang hanya menamatkan Pendidikan hingga di jenjang SMP. Sementara itu, penduduk miskin yang minimal menamatkan pendidikan pada jenjang SMA hanya sebesar 8,26 persen pada tahun 2021. Faktor lain seperti akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan juga merupakan kondisi yang dialami oleh penduduk miskin di Kabupaten Batang. Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum

efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Tantangan kedepan adalah bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin baik pendidikan, kesehatan, maupun perumahan yang layak huni. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan, dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

6. Pemenuhan kebutuhan dasar (Pemenuhan SPM)

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk mengkases kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Di Kabupaten Batang teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Seperti kualitas sarana dan prasarana misalnya, yang berdasarkan hasil analisa masih banyak terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian terkait pemenuhan tenaga pendidik yang masih relatif kurang, kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, serta belum optimalnya pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu. Permasalahan terkait pemenuhan SPM bidang pendidikan yang juga menjadi permasalahan penting lainnya adalah terkait pencapaian beberapa indikator SPM bidang pendidikan yang dalam periode lima tahun terakhir ini masih rendah, yaitu dibawah 50 persen. Beberapa indikator tersebut terkait pemenuhan layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu indikator prosentase satuan pendidikan

anak usia dini yang terakreditasi minimal B dengan capaian rata-rata selama lima tahun terakhir sebesar 41,79 persen, dan indikator prosentase jumlah satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan karakter secara berkelanjutan dengan capaian rata-rata capaian selama lima tahun terakhir sebesar 40,28 persen. Sedangkan terkait pelayanan Pendidikan Kesetaraan terdapat satu indikator dengan capaian dibawah 50 persen yaitu prosentase program atau satuan pendidikan non formal yang terakreditasi minimal B dengan capaian rata-rata capaian selama lima tahun terakhir sebesar 37,61 persen.

Tidak hanya dalam urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa masalah juga perlu diperhatikan seperti halnya jumlah tenaga kesehatan yang belum sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan serta belum optimalnya cakupan layanan kesehatan serta ketersediaan infrastruktur kesehatan yang belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Batang. Masalah penting lainnya adalah permasalahan terkait pemenuhan SPM bidang kesehatan, yaitu masih rendahnya kinerja pelayanan SPM dengan capaian kinerja dibawah 50 persen, khususnya terkait Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus serta Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Terlebih lagi adanya pandemi Covid-19, berdampak pada menurunnya capaian beberapa indikator SPM di tahun 2020 dan 2021 yaitu terkait Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, Pelayanan kesehatan pada usia produktif, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi serta Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis.

Permasalahan lain terkait pemenuhan kebutuhan dasar adalah capaian layanan dasar di bidang sosial yang masih relatif rendah. Salah satu upaya penanganan kesejahteraan sosial adalah mendorong dan menciptakan kemandirian sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara optimal, diantaranya adalah pemberian stimulan/bantuan sosial kepada para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan dasar air minum dan sanitasi terus mengalami peningkatan dalam periode lima tahun terakhir, namun demikian pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi masih perlu

ditingkatkan karena cakupan pelayanan belum menjangkau seluruh masyarakat Batang. Sedangkan terkait ketenteraman dan ketertiban umum, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya mitigasi utamanya mitigasi non struktural serta masih rendahnya keahlian yang dimiliki masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Kondisi-kondisi tersebut menjadi *pressure* tersendiri terhadap pengembangan sumber daya manusia di Batang, sehingga yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, sehingga diharapkan dapat berimplikasi pada pembangunan manusia di Kabupaten Batang.

7. Tata Kelola Pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang telah berjalan dengan baik, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Batang dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Batang yang belum optimal. Disisi lain, belum berakhirnya pandemi Covid-19 juga memungkinkan kembali diberlakukannya PPKM yang berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat, tak terkecuali dalam mengakses pelayanan publik. Dalam kondisi ini, Pemerintah Daerah pun dituntut untuk melakukan sebuah inovasi dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat tetap dapat mendapatkan pelayanan publik secara optimal meskipun dalam suasana pandemi. Sementara itu adanya pandemi Covid-19, sedikit banyaknya telah merubah perilaku masyarakat dari konvensional berpindah ke digital. Oleh karena itu, Pemerintah daerah pun dituntut untuk beradaptasi melalui digitalisasi dalam bidang pemerintahan untuk tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima dalam suasana pandemi ini, sehingga pengembangan teknologi

menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ruang pengaduan masyarakat pun harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Pada era digitalisasi ini, paradigma tata kelola pemerintahan juga mulai bergeser pada konsep *agile*, dimana konsep *agile* ini hadir untuk memberi tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru. *Agile Governance* diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Konsep *agile* hadir untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi sehingga diharapkan mampu untuk menjawab seluruh tantangan-tantangan dari perubahan lingkungan. *Agile* adalah *software*, dan membutuhkan *brainware* (analogi manusia) yang visioner serta inovatif secara esensial (mudah, cepat, unggul).

Salah satu bentuk penerapan *Agile Governance* di Kabupaten Batang telah terimplementasikan pada program Smart City, namun demikian masih belum optimal dan kedepan masih perlu dilakukan peningkatan. Oleh karena itu, yang menjadi tantangan kedepan adalah bagaimana mewujudkan *Agile Governance* sebagai bentuk transformasi inovasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik dengan didukung oleh pola pikir dan Sumber Daya Manusia yang profesional, inovasi berkenaan dengan langkah penerapan dan sumber daya infrastruktur yang dibutuhkan, koordinasi terstruktur serta transparansi dan komunikasi yang terbuka dalam mewujudkan sebuah pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Telaah RPJMN Tahun 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut :

Gambar 5. 1 Misi RPJMN 2020-2024



Sumber : RPJMN 2020-2024

Selanjutnya, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran

Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Gambar 5. 2 Arahan Presiden



Sumber : RPJMN 2020-2024

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 5. 3 **Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024**



Sumber : RPJMN 2020-2024

5.2 Telaah RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.**

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan

daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;

Agar visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 6 (enam) tujuan dan 12 (duabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Misi ini memiliki tujuan menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup, dengan sasaran terciptanya kohesi sosial masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penurunan kejadian konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah, dengan indikator sasarannya adalah indeks toleransi dan persentase tindak pidana yang tertangani.
2. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota Misi kedua bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.
3. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas,

menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan ini adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

4. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan Misi ini bertujuan untuk: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender; 4) meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

5.3 Telaah RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025 Visi Misi RPJPD 2005-2025

Visi Kabupaten Batang yang dicanangkan dalam rangka memotivasi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah selama tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut **“Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan”**.

Penjelasan makna visi “Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan” perlu diberikan untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Batang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Sejahtera diartikan aman, sentosa dan makmur. Masyarakat Batang yang sejahtera identik dengan masyarakat yang dapat menikmati ketenangan dalam berperikehidupan, dapat menunaikan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, dan dapat menikmati hasilnya dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Maju diartikan bergerak/berjalan kedepan, tampil kemuka, meningkat, menjadi lebih baik dari sebelumnya, bergerak menuju peradaban yang tinggi. Batang yang maju menunjukkan progress mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh tingkat intelektualitas/rasionalitas yang semakin baik, termasuk semakin banyak menerapkan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berusaha, dan pemerintahan.

Mantap diartikan teguh, tidak berubah, tidak goyah, stabil, tidak ada gangguan, teguh hati, kukuh, kuat. Batang yang mantap diharapkan mampu untuk teguh pada nilai dan prinsip berbasis pada moral, etika, dan religi; sehingga akan dapat membantu dalam menciptakan kondisi lokal yang stabil dan kondusif bagi pelaksanaan

pembangunan.

Mandiri diartikan dalam keadaan berdiri sendiri, dapat mengurus atau mengatasi kepentingannya sendiri tanpa bergantung pada pihak lain. Batang yang mandiri tidak diartikan sebagai menutup diri, melainkan ditekankan pada masyarakat yang mampu mengoptimalkan berbagai kekuatan dan potensi yang dimiliki untuk kemajuan daerah, mampu menjadi pusat pertumbuhan baru tanpa mengabaikan pentingnya aspek *networking*.

Berbasis potensi unggulan diartikan sebagai berdasarkan pada karakteristik lokal (kekuatan) yang lebih tinggi, lebih utama, lebih istimewa dibandingkan dengan yang lain sehingga lebih besar peluang keberhasilannya. Batang yang berbasis potensi unggulan menunjukkan suatu daerah beserta masyarakatnya yang membangun berdasarkan pada kekuatan lokal sebagai modal dasar, kekuatan lokal Batang antara lain terletak pada sektor kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata.

Dalam rangka mengemban pencapaian visi oleh segenap stakeholders, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025, sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu, sehat, beretos kerja tinggi, responsif dan partisipatif,
2. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata, didukung dengan sektor lain yang berdayasaing tinggi,
3. Pengembangan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik, berbasis pada profesionalisme, kapasitas, kapabilitas, dan jejaring,
4. Peningkatan prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang pengembangan kawasan berbasis pada kemampuan dan potensi lokal,

5. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang sejahtera, tenteram, tertib, aman, demokratis, dan kondusif,

Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan.

Arah, Tahapan dan Prioritas Pelaksanaan RPJMD IV (2022-2026)

Pelaksanaan RPJMD IV (2022-2026) akan diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan melalui pemantapan pembangunan di berbagai bidang yang ditekankan pada primanya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, majunya sumber daya manusia dan perekonomian daerah, berkurangnya kesenjangan, didukung dengan mantapnya situasi politik, keamanan dan ketertiban serta lingkungan hidup.

- 1) Pada misi pertama,

Diharapkan terjadi kondisi mantapnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batang dalam perikehidupan bermasyarakat dan pemerintahan yang semakin dinamis dan harmonis.

- 2) Pada misi kedua,

Diharapkan terjadi kondisi perekonomian Kabupaten Batang yang mantap dan tumbuh secara positif, mantapnya kontribusi dan daya saing sektor unggulan daerah (perikanan dan kelautan, pertanian, dan pariwisata), mantapnya kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, mantapnya kerjasama dan investasi bagi pengembangan kawasan ekonomi strategis.

- 3) Pada misi ketiga,

Diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan semakin mantap, makin mantapnya kinerja kelembagaan pemerintah, makin mantapnya profesionalisme aparatur daerah, makin mantapnya kemampuan keuangan daerah, makin majunya kerjasama bagi kemajuan daerah, dan makin mantapnya kualitas pelayanan publik.

4) Pada misi keempat,

Diharapkan terjadi kondisi mantapnya kualitas dan kuantitas serta pemerataan prasarana dan sarana pemerintah yang ditujukan bagi kepentingan peningkatan kualitas pelayanan publik, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat akibat dukungan prasarana dan sarana yang memadai, dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi yang mendukung kemajuan daerah.

5) Pada misi kelima,

Diharapkan terjadi kondisi sosial dan budaya masyarakat dengan kesejahteraan yang mantap, terciptanya iklim demokrasi yang mantap didukung dengan konsisten kebijakan reformasi, makin matang dan mantapnya kepemimpinan lokal, makin mantapnya supremasi hukum dan kesadaran hukum masyarakat, dan berkurangnya angka konflik dan kriminalitas.

6) Pada misi keenam

Diharapkan terjadi kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dikelola secara lestari sehingga menurunkan jumlah kejadian bencana alam, dan mantapnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi lingkungan hidup dan tata ruang.

5.4 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang 2023-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah. Penentuan tujuan dan sasaran didasarkan pada Visi Misi RPJPD Kabupaten Batang tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 tahap ke empat dan isu strategis aktual. Selanjutnya, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023-2026. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung

berdasarkan data tren capaian tahun 2017-2021 dengan diasumsikan kondisi perekonomian telah mulai pulih, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut :

- I. **Tujuan I** : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan.

Melalui tujuan pertama ini, Pemerintah Kabupaten Batang, segenap pemangku kepentingan dan masyarakat akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup dan kehidupan sekurangnya dari aspek: a. Pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya dari aspek kesehatan, akses infrastruktur dasar b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, misalnya dari aspek pendidikan c. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan basis sektor unggulan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan termasuk halnya dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran Batang, dan menurunkan kesenjangan antar kelompok pengeluaran. d. Peningkatan harmoni kehidupan, kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan didukung oleh penyediaan dan pemerataan infrastruktur.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator PDRB per Kapita (ADHK) dan Indeks Daya Saing Daerah, serta dijabarkan dalam sasaran :

- a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
- b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, dengan indikator sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengeluaran Perkapita.

- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, dengan indikator sasaran Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia), Persentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran terbuka.
- d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur.
- e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, dengan indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

II. **Tujuan II** : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi serta mendorong reformasi birokrasi pada semua level pemerintahan yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat secara dinamis, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan indikator sasaran Nilai SAKIP, Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui *agile governance*, dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat.

III. **Tujuan III** : Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan ketahanan (*resilience*) serta untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana, yang dilatar belakangi dalam periode 4 (empat) tahun terakhir ini Kabupaten Batang termasuk daerah dengan resiko bencana tinggi. Tujuan ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Batang yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, serta terciptanya kohesi sosial masyarakat yang baik.

Sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan ini, diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana (IRBI) dan Indeks Rasa Aman, dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, dengan indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah.
- b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dengan indikator sasaran Indeks Demokrasi.
- c. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang, dengan indikator sasaran Angka kriminalitas.

Penjabaran tujuan, sasaran, indikator dan target kinerjanya tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5. 1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan		PDRB per Kapita (ADHK)	juta Rp	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,49	23,49	PDRB th n / jumlah penduduk th n
			Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,4029	3,4375	3,4721	3,507	3,5413	3,576	3,576	Nilai IDSD
		1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	68,92	69,32	69,66	70	70,34	70,68	70,68	rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,86	91,57	91,86	91,98	92,25	92,47	92,47	Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,84	63,87	63,9	63,93	63,96	63,99	63,99	peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik dilihat dari 3 komponen, keterwakilan di parlemen; pengambilan keputusan dan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
	2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	persen	4,88	3,37	4,97-5,0	5,01-5,10	5,10-5,30	5,30-5,50	5,30-5,50	{(PDRB th n – PDRB th (n-1)) : PDRB th (n-1)} *100	
		Tingkat Pengeluaran Per Kapita	(Rp.000/tahun)	9,524	9,617	9,710	9,803	9,896	9,989	9,524	(Pengeluaran dikurangi Pengeluaran minimal) dibagi (pengeluaran maksimal dikurangi pengeluaran minimal)	
	3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	persen	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	Persentase pendapatan penduduk 40% terendah terhadap total pendapatan	
		Persentase Penduduk Miskin	persen	9,68	8,56	8,40-7,98	8,34-7,92	8,27-7,85	8,21-7,80	8,21-7,80	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang dibagi jumlah penduduk Kab. Batang	
		Tingkat Pengangguran terbuka	persen	6,59	6,26	5,93	5,6	5,27	4,94	4,94	Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
		4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	Indeks Infrastruktur	indeks	180,4	185,95	191,49	197,04	200	201	201	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int
												Indeks infrastruktur dibentuk dari indikator persentase jalan dengan kondisi mantap, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, persentase keluarga pengguna listrik, serta kualitas sinyal telepon dan internet di daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
		5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	65,17	64,84	64,94	65,04	65,14	65,24	65,24	$\text{IKLH Kabupaten} = \text{IKLH} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$ $\text{IKLH} = \text{indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IKA} = \text{indeks Kualitas air IKU} = \text{indeks Kualitas udara IKL} = \text{Indeks Kualitas Lahan}$
2	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	64,76	66,06	67,36	68,66	69,96	71,26	71,26	Capaian implementasi reformasi birokrasi yang meliputi 8 komponen : 1. Manajemen Perubahan; 2.Penataan Peraturan Perundang-Undangan; 3.Penataan dan Penguatan Organisasi; 4.Penataan Tatalaksana; 5.Penataan Sistem Manajemen SDM; 6. Penguatan Akuntabilitas; 7.Pengiatan Pengawasan;

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
												8.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP	skor	67,14	69,08	69,62	70,5	71,25	72,35	72,35	(30% perencanaan kinerja + 25% pengukuran kinerja + 15% pelaporan kinerja + 10% evaluasi internal + 20% capaian kinerja)
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	indeks	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	level 3	Penilaian secara kualitatif melalui reviu dokumen, kuesioner, wawancara, dan observasi terhadap 8 komponen, 28 aspek dan 69 kriteria yang telah ditetapkan
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	73,976	77,456	78	79	80	81	81	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4.Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
3												Opini BPK atas LKPD
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui <i>agile governance</i>	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85,028	85,15	85,3	85,45	85,6	85,75	85,75	Kualitatif, melalui survey kepada masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif		Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	161,93	164	160	155	150	144	144	Perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability, kapasitas (capacity)
			Indeks Rasa Aman	indeks	NA	NA	4	4,2	4,4	4,6	4,6	Survei/kuisiонер kepada masyarakat
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,41	0,51	0,71	0,81	0,83	0,85	0,85	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisiонер terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah
		Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	Indeks Demokrasi	indeks	na	na	70	72	74	76	76	Kualitatif, melalui kuisiонер

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET				KONDISI AKHIR RPD	Formulasi Perhitungan
					2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
		Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	Angka kriminalitas	persen	0,019	0,018	0,016	0,015	0,014	0,013	0,013	Jumlah kasus kriminalitas dibagi jumlah penduduk

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPD sehingga efisien dan efektif. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis, yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama empat tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada didalam lingkup lingkungan pembangunan di Kabupaten Batang. Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan strategi adalah analisis SWOT, sehingga rumusan strategi berikut ini merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam fungsinya sebagai fasilitator yang mengupayakan akses modal, promosi dan pasar bagi swasta dan masyarakat; regulator yang menekankan pada fungsi regulasi dan administrative perijinan, dokumen/akta, kartu identitas, serta fungsi konsultatif yang memberikan bimbingan teknis, pembinaan dan advis aktivitas yang dilakukan oleh seluruh stakeholder.

Secara konseptual, suatu strategi secara spesifik diaktikan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi juga dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor eksternal dan internal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6. 1 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal

INTERNAL	Kekuatan (Strength)		Kelemahan (Weakness)	
	1.	Kondisi geografis Kabupaten Batang yang terdiri dari pantai, dataran rendah dan pegunungan mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan industri, pariwisata maupun pertanian	1.	Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Kabupaten Batang
	2.	Wilayah Kabupaten Batang berada pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara dengan arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa dan transportasi	2.	Kualitas SDM yang masih rendah
	3.	Jumlah penduduk usia produktif yang lebih tinggi dari penduduk non produktif	3.	Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
	4.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	4.	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
	5.	Meningkatnya dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	5.	Belum optimalnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	6.	Semakin meningkatnya inovasi dan potensi daya saing daerah	6.	Kab. Batang termasuk daerah dengan risiko bencana yang tinggi
	7.	Komitmen Pemerintah Daerah yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batang	7.	Belum optimalnya pemenuhan cadangan pangan daerah
			8.	Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal
			9.	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak
EKSTERNAL	Peluang (Opportunity)		Ancaman (Threat)	
	1.	Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang merupakan Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Batang	1.	Pandemi COVID-19 menghambat pertumbuhan ekonomi, berdampak pada masalah kesehatan dan sosial
	2.	Kebijakan pengembangan Kawasan Petanglong menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah	2.	Persaingan antar Kabupaten/Kota yang ketat dalam pengembangan potensi unggulan daerah

	3.	Kemajuan Teknologi Informasi	3.	Globalisasi yang berpengaruh pada perkembangan karakter dan budaya bangsa
	4.	Partisipasi Lembaga swasta dalam pembangunan melalui CSR	4.	Fenomena Perubahan Iklim yang berpotensi akan berdampak pada sektor kesehatan, pertanian, perekonomian dan lainnya
	5.	Partisipasi dunia pendidikan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Batang		
	6.	Adanya insentif pusat kepada daerah dengan kinerja dan akuntabilitas baik		

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Kabupaten Batang. Semakin banyak dan tajam hasil identifikasi faktor internal dan eksternal yang dipisahkan berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka semakin membantu proses perumusan strategi pembangunan yang benar-benar dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Penggunaan metode SWOT dalam penetapan strategi lebih karena kesederhanaan dan mudah dipahami oleh pelaku pembangunan. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran diatas dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 6. 2 Hasil Analisis SWOT dalam Penetapan Strategi Pembangunan Daerah

Strategi S-O		Strategi W-O	
ST1.	Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi	ST4.	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor industri
ST2.	Penguatan kolaborasi multipihak untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja	ST5.	Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan daerah

Strategi S-O		Strategi W-O	
ST3.	Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah	ST6.	Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis
		ST7.	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR
		ST8.	Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan
Strategi S-T		Strategi W-T	
ST9.	Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis	ST12 .	meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan beban pengeluaran masyarakat miskin
ST10 .	Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan	ST13 .	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana
ST11 .	Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca	ST 15	Peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak
ST14	Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi		

Strategi S-O merupakan kondisi yang sangat diharapkan, daerah memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi yang diterapkan adalah bagaimana mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Strategi ini memberikan penekanan pada metode Pemerintah daerah dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Kekuatan yang dimiliki oleh Kabupaten Batang adalah komitmen pimpinan yang visioner untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Batang dan birokrasi yang solid yang menjadi kekuatan untuk melakukan inovasi dalam pembangunan serta pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah dalam segala aktivitas pemerintahan untuk mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Selain itu kondisi geografis Kabupaten Batang yang terdiri dari pantai, dataran rendah dan pegunungan mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan industri, pariwisata maupun pertanian disamping sektor tersebut merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian daerah. Wilayah Kabupaten Batang berada pada jalur ekonomi Pulau Jawa sebelah Utara dengan arus transportasi dan mobilitas yang tinggi di jalur pantura juga memberikan kemungkinan Kabupaten Batang berkembang cukup prospektif di sektor jasa dan transportasi, serta didukung oleh potensi demografi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar. Oleh sebab itu strategi yang ditetapkan adalah Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi; Penguatan kolaborasi multipihak untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja serta Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Strategi S-T adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batang untuk mengatasi ancaman. Strategi dalam kondisi ini sering disebut sebagai “*mobilization strategy*”, dimana dengan menggunakan kekuatan yang ada pemerintah daerah didorong untuk menggeser menjadi peluang jangka panjang. Berdasarkan identifikasi faktor diatas, Kabupaten Batang masih memiliki

banyak tantangan/ancaman pembangunan yaitu adanya pandemi *COVID-19* yang belum berakhir berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada masalah kesehatan dan sosial. Disisi lain pengembangan potensi unggulan daerah sebagai langkah akselerasi pemulihan ekonomi terkendala persaingan antar Kabupaten/Kota yang semakin ketat. Selain itu, adanya globalisasi yang berpengaruh pada perkembangan karakter dan budaya bangsa, serta fenomena perubahan iklim yang berpotensi berdampak pada sektor kesehatan, pertanian, perekonomian dan lainnya. Oleh sebab itu perlu disusun sebuah strategi yang mampu menghasilkan peluang jangka panjang berdasarkan potensi ancaman yang dimiliki yaitu Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis; Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan; Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca serta Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Strategi W-O diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Pemerintah daerah menghadapi peluang pasar yang besar namun disisi lain harus menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Dalam hal ini strategi yang diperlukan adalah Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor industri; Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan daerah; Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis; Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta

mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR; serta Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan.

Strategi W-T merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, dimana pemerintah harus menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal secara bersamaan. Strategi ini bersifat *defensive* atau strategi untuk *survive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Dalam analisis diatas faktor kelemahan sangat mendominasi, sehingga strategi yang dibutuhkan dalam menjawab kondisi ini adalah strategi yang bersifat *damage control* yang diartikan sebagai upaya membangun dengan penuh kesadaran atas kelemahan dan ancaman yang dimiliki. Strategi yang ditetapkan dalam kondisi ini adalah Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan beban pengeluaran masyarakat miskin; Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana dan peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Berdasarkan analisis diatas, strategi pembangunan daerah Kabupaten Batang dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- ST.1. Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi.
- ST.2. Penguatan kolaborasi multipihak untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja.

- ST.3. Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.
- ST.4. Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis.
- ST.5. Penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.
- ST.6. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca.
- ST.7. Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
- ST.8. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM serta memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor industri.
- ST.9. Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan daerah.
- ST.10. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis.
- ST.11. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR.
- ST.12. Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan.
- ST.13. Meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan beban pengeluaran masyarakat miskin.

ST.14. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana.

ST.15. Peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak.

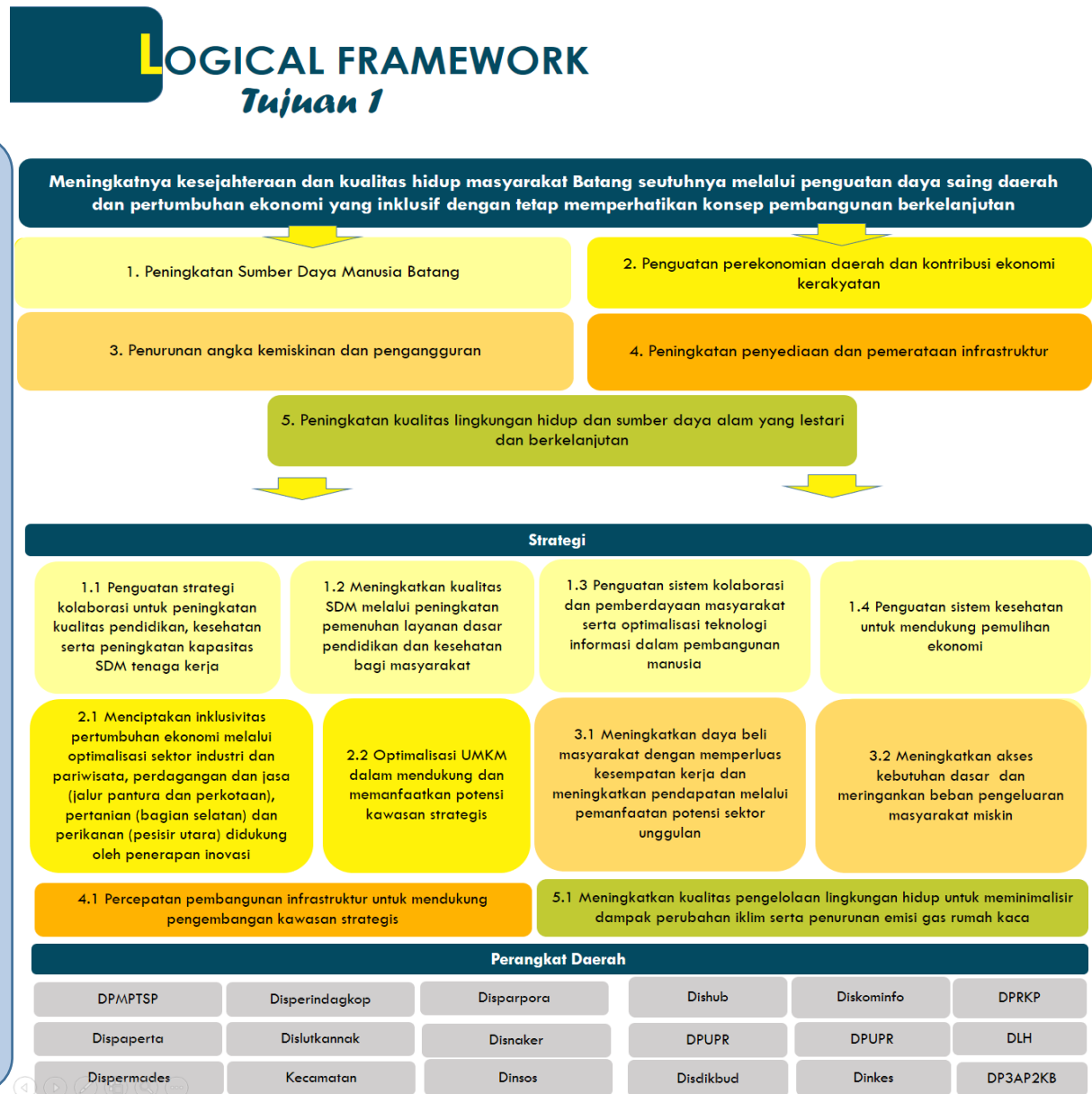
Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas, strategi yang diambil adalah:
 - 1) Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja;
 - 2) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat;
 - 3) Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan manusia;
 - 4) Peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak;
 - 5) Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
 - b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah, strateginya adalah :
 - 1) Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan),

pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi;

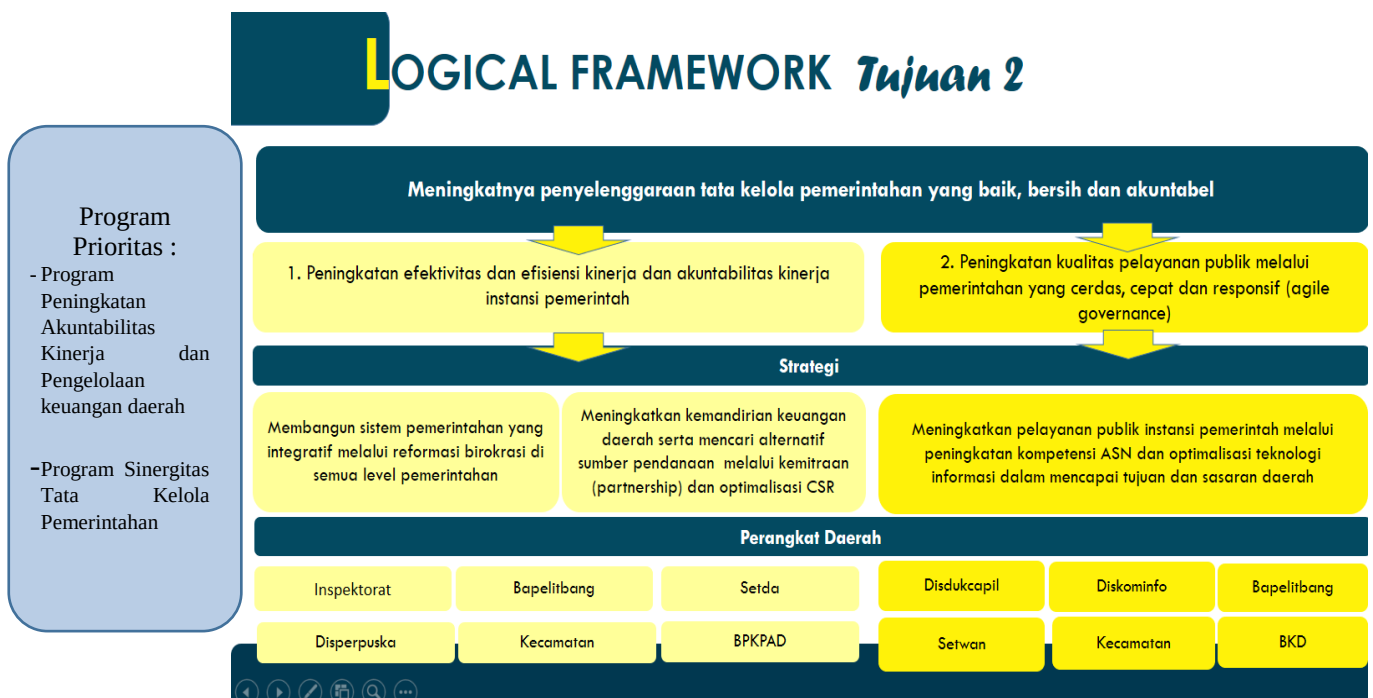
- 2) Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis.
- c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, strateginya adalah:
- 1) Meningkatkan daya beli masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan;
 - 2) Meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- d. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi, strateginya adalah:
- 1) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis.
- e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan, strateginya adalah :
- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Gambar 6. 1 Skema Strategi Pencapaian Tujuan 1



2. Tujuan 2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, strateginya adalah:
 - 1) Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan;
 - 2) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (*agile governance*), strateginya adalah :
 - 1) Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Gambar 6. 2 Skema Strategi Pencapaian Tujuan 2



3. Tujuan 3 : Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, strateginya adalah:
 - 1) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana.
 - b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang, strateginya adalah :
 - 1) Penguatan modal sosial untuk terciptanya iklim demokrasi yang baik, peningkatan kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan.

Gambar 6. 3 Skema Strategi Pencapaian Tujuan 2



Tabel 6. 3 Tujuan, Sasaran dan Strategi RPD Kabupaten Batang 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan	a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas	1) Penguatan strategi kolaborasi untuk peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta peningkatan kapasitas SDM tenaga kerja
		2) Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat
		3) Penguatan sistem kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat serta optimalisasi teknologi informasi dalam pembangunan manusia
		4) Peningkatan pembangunan perempuan dan perlindungan serta pemenuhan hak anak
		5) Penguatan sistem kesehatan untuk mendukung pemulihan ekonomi
	b. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah	1) Menciptakan inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi sektor industri dan pariwisata, perdagangan dan jasa (jalur pantura dan perkotaan), pertanian (bagian selatan) dan perikanan (pesisir utara) didukung oleh penerapan inovasi
		2) Optimalisasi UMKM dalam mendukung dan memanfaatkan potensi kawasan strategis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	1) Meningkatkan daya beli masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan potensi sektor unggulan 2) Meningkatkan akses kebutuhan dasar dan meringankan beban pengeluaran masyarakat miskin
	d. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi	1) Percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kawasan strategis
	e. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan	1) Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup untuk meminimalisir dampak perubahan iklim serta penurunan emisi gas rumah kaca
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1) Membangun sistem pemerintahan yang integratif melalui reformasi birokrasi di semua level pemerintahan 2) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mencari alternatif sumber pendanaan melalui kemitraan (partnership) dan optimalisasi CSR
	b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (<i>agile governance</i>)	1) Meningkatkan pelayanan publik instansi pemerintah melalui peningkatan kompetensi ASN dan optimalisasi teknologi informasi dalam mencapai

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		tujuan dan sasaran daerah
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif	a. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	1) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas manajemen penanggulangan bencana
	b. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	1) Penguatan modal sosial untuk terciptanya iklim demokrasi yang baik, peningkatan kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum serta memelihara nilai-nilai kearifan kebudayaan
	c. Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang	

6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan hasil analisa dan fokus kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6. 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Batang 2023-2026

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia :				
- Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar				
- Optimalisasi sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)				
- Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat				
- Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam "gerakan kembali ke sekolah"				
Peningkatan kualitas SDM, peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan, melalui:				
- Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF				
- Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik				
- Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana				
Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :				
- Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah				
- Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis				
- Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan				
- Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga				
- Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan				

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:				
- Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender				
- Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak				
- Perwujudan Kabupaten Layak Anak				
Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui :				
- Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR				
- Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes				
- Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, gernas dan PHBS				
Menciptakan nilai tambah sector unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :				
- Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif				
- pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura)				
- Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata				
- Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian				
- Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat				

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
- Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah				
- Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “on hand” dengan mengoptimalkan teknologi informasi				
- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif				
- Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya				
Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui :				
- Memperluas basis data tunggal UMKM yang diintegrasikan dengan DTKS				
- Akselerasi digitalisasi UMKM dengan membangun ekosistem digital melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia				
- Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & asarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM				
- Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk				
Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :				
- Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan				

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
- Penguatan lembaga/ BLK yang memberi peran dalam peningkatan kapasitas serta memetakan secara spesifik kebutuhan pekerja digital ke depan, sesuai statistik keahlian yang dibutuhkan dan sektor usaha yang membutuhkan				
- Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa				
- Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu				
Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:				
- Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal				
- Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah				
- Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan sosial				
- Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan				
- Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan				
- Peningkatan kualitas dan validitas DTKS				
Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :				
- Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah				
- Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu				
- Pengembangan jaringan infrastruktur internet dengan bermitra dan kolaborasi dengan penyedia jasa internet melalui CSR				

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
- Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air				
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi				
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah				
- Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman				
Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:				
- Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan				
- Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya				
- Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis, pengendalian banjir dan kerusakan wilayah pesisir				
- Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri				
Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan:				
- Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi				
- Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai Research Based Policy				
- Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko				
Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan :				
- Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), BUMN serta Corporate Social Responsibility (CSR)				
- Penggalan dan pemetaan potensi pajak dan retribusi dengan penyiapan sistem data yang valid dan up to date				
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah				

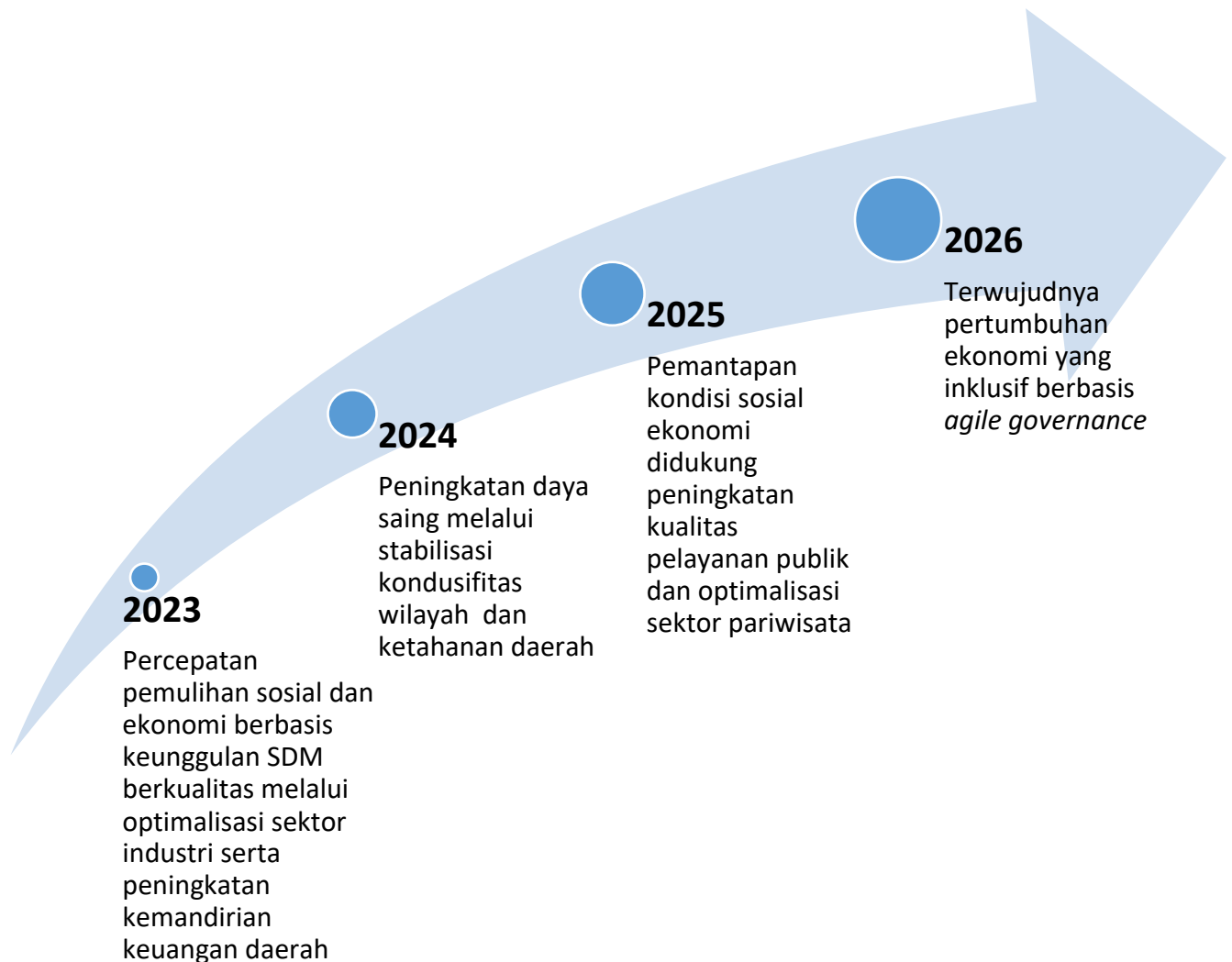
ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
- Pengkajian dan pemetaan potensi unggulan daerah serta pemanfaatan aset yang dapat dikerjasamakan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah				
Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :				
- Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova				
- Peningkatan layanan dan inovasi administrasi kependudukan				
- Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi				
- Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data				
- Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi				
- Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN				
- Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik				
Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada:				
- Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada kecamatan/ kelurahan/ desa yang rawan bencana				
- Penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:				
- Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya				
- Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik				

ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
	2023	2024	2025	2026
- Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec				

6.2.1 Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 2023-2026

Selanjutnya untuk memberikan acuan penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahun, ditetapkan arah kebijakan pembangunan tahunan sebagai berikut:

Gambar 6. 4 Tema Pembangunan Tahunan RPD 2023-2026



1. Arah Kebijakan Tahun 2023

Tahun 2023 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang empat tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk “Percepatan pemulihan sosial dan ekonomi berbasis keunggulan SDM berkualitas melalui optimalisasi sektor industri serta peningkatan kemandirian keuangan daerah ”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
 - a) Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar;
 - b) Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat;
 - c) Optimalisasi sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
 - a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
 - c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :

- a) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
 - b) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - c) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - d) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
- a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui:
- a) Deteksi dini melalui perluasan *case detection*, skrining awal, *surveilans* penyakit menular dan tidak menular, *rapid test* dan PCR;
 - b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.
- f. Menciptakan nilai tambah sector unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
- a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;

- b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
- c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
- d) Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan masyarakat;
- e) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan;
- f) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “*on hand*” dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
- g) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
- h) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui :
 - a) Memperluas basis data tunggal UMKM yang diintegrasikan dengan DTKS;
 - b) Akselerasi digitalisasi UMKM dengan membangun ekosistem digital melalui kolaborasi dengan Bank Indonesia;
 - c) Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & prasarana UMKM serta

- pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;
- d) Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.
 - h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - a) Penguatan lembaga/ BLK yang memberi peran dalam peningkatan kapasitas serta memetakan secara spesifik kebutuhan pekerja digital ke depan, sesuai statistik keahlian yang dibutuhkan dan sektor usaha yang membutuhkan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;
 - c) Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.
 - i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;

- d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
- e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan;
- f) Peningkatan kualitas dan validitas DTKS.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektivitas antar wilayah;
 - b) Pengembangan jaringan infrastruktur internet dengan bermitra dan kolaborasi dengan penyedia jasa internet melalui CSR;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya;
 - c) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :

- a) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan :
- a) Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership*), BUMN serta *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - b) Penggalan dan pemetaan potensi pajak dan retribusi dengan penyiapan sistem data yang valid dan *up to date*;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - d) Pengkajian dan pemetaan potensi unggulan daerah serta pemanfaatan aset yang dapat dikerjasamakan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
- a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan layanan dan inovasi administrasi kependudukan;
 - c) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - d) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - e) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;

- f) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
- g) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
 - a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
 - b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh2 agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
 - c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

2. Arah Kebijakan Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun perencanaan kedua untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang empat tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2024 ditujukan untuk “Peningkatan daya saing melalui stabilisasi kondusifitas wilayah dan ketahanan daerah”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
 - a) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :

- a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;
 - c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
- a) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
 - b) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - c) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - e) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
- a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.

- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
 - a) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.
- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
 - a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b) pengembangan kawasan industri yang berkualitas serta sektor perdagangan dan jasa di kawasan koridor jalan pantai utara (Pantura);
 - c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - d) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
 - e) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan;
 - f) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - g) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan

kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, difokuskan melalui peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.
- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - a) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, *job market* serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.

- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektifitas antar wilayah;
 - b) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya;
 - c) Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis, pengendalian banjir dan kerusakan wilayah pesisir;
 - d) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
 - a) Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;
 - c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.

- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
 - a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan layanan dan inovasi administrasi kependudukan;
 - c) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - d) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - e) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - f) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
 - g) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
 - a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;

- b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh² agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
- c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

3. Arah Kebijakan Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan ketiga untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang empat tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 ditujukan untuk “Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi sektor pariwisata”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
 - a) Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar;
 - b) Membangun kolaborasi dalam peningkatan budaya literasi di masyarakat;
 - c) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
 - a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;

- c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
 - a) Pelatihan berkelanjutan untuk pekerja berketerampilan rendah;
 - b) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - c) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - d) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - e) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
 - a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui;
 - a) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.

- f. Menciptakan nilai tambah sector unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
 - a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata;
 - c) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - d) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
 - e) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah;
 - f) Peningkatan dan pengembangan media promosi dan informasi pariwisata “*on hand*” dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
 - g) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - h) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui :
 - a) Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM,

dukungan sarana & asarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;

- b) Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.
- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - a) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya disektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;
 - c) Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Tidak Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;

- e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :
 - a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektivitas antar wilayah;
 - b) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
 - a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
 - a) Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai Research Based Policy;

- c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan :
 - a) Peningkatan upaya dukungan pendanaan melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership), BUMN serta Corporate Social Responsibility (CSR);
 - b) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
 - a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - c) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - d) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - e) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
 - f) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:

- a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;
- b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh² agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
- c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

4. Arah Kebijakan Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun perencanaan keempat untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batang empat tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 ditujukan untuk “Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif berbasis *agile governance*”, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Membangun kolaborasi multipihak dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, melalui :
 - a) Kolaborasi antara pihak pemerintah dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar.
 - b) Penguatan kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam gerakan kembali ke sekolah.
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan :
 - a) Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar kesehatan, menurunkan kasus stunting serta penuntasan ODF;
 - b) Peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan pemenuhan layanan dasar pendidikan serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik;

- c) Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana.
- c. Meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, kolaborasi dengan dunia usaha serta optimalisasi teknologi informasi untuk :
 - a) Pemanfaatan potensi pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran pokdarwis;
 - b) Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan;
 - c) Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam olahraga;
 - d) Pengembangan yang fokus pada sinergitas dan kolaborasi antar lembaga (pemerintah, masyarakat, dunia usaha) dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Perwujudan Kabupaten yang ramah perempuan dan layak anak, melalui:
 - a) Meningkatkan pembangunan perempuan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - b) Penguatan peran serta lembaga dan masyarakat terkait upaya perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan Seksual, TPPO, dan Penelantaran Anak;
 - c) Perwujudan Kabupaten Layak Anak.
- e. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik, melalui:
 - a) Deteksi dini melalui perluasan *case detection*, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, *rapid test* dan PCR;
 - b) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - c) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS.

- f. Menciptakan nilai tambah sektor unggulan serta diversifikasi ekonomi , melalui :
- a) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, serta intensifikasi pertanian;
 - c) Menjaga stabilitasasi harga barang kebutuhan masyarakat;
 - d) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan, peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan serta penyediaan cadangan pangan daerah;
 - e) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - f) Pengembangan fasilitas perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan melalui pengembangan fasilitas pengolahan hasil perikanan; pengembangan kawasan minapolitan; dan pengembangan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya.
- g. Akselerasi pemulihan dan penguatan UMKM, melalui :
- a) Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & asarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM;
 - b) Peningkatan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi

produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk.

- h. Mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi melalui :
 - a) Pengembangan daya saing dan kemandirian desa, dan pemerataan pendapatan;
 - b) Penciptaan dan perluasan lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, *job market* serta fasilitasi penyelesaian kasus sengketa;
 - c) Mengembangkan kesempatan kerja terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu.
- i. Meningkatkan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin, melalui:
 - a) Peningkatan jangkauan pendidikan melalui beasiswa untuk siswa miskin dan optimalisasi pendidikan non formal;
 - b) Penyediaan Rumah Layak Huni pada masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dan bagi korban bencana daerah;
 - c) Peningkatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial diluar panti serta pemberian jaminan dan perlindungan social;
 - d) Penguatan dan peningkatan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat utamanya bagi masyarakat rentan;
 - e) Sinergitas dan kerjasama lintas sektor dan tingkat pemerintahan terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- j. Pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis serta pro lingkungan berkelanjutan, melalui :

- a) Pembangunan infrastruktur untuk mendukung wilayah strategis dan konektivitas antar wilayah;
 - b) Penataan sistem transportasi, perluasan jangkauan pelayanan transportasi di perdesaan serta peningkatan keselamatan lalu lintas secara komprehensif dan terpadu;
 - c) Peningkatan ketersediaan dan cadangan sumber daya air;
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapasitas prasarana sarana serta sistem penyediaan akses aman air minum dan sanitasi;
 - e) Peningkatan dan pengembangan infrastruktur air limbah;
 - f) Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan padat dan/atau permukiman kumuh serta menyediakan sarana dan prasarana permukiman.
- k. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, melalui:
- a) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan;
 - b) Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau sebagai pusat interaksi dan pusat perekonomian dan fungsi lainnya;
 - c) Pengendalian pencemaran dan penanganan lahan kritis, pengendalian banjir dan kerusakan wilayah pesisir;
 - d) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah serta pengolahan limbah rumah tangga dan limbah industri.
- l. Reformasi Birokrasi di semua level pemerintahan :
- a) Pengembangan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi;
 - b) Peningkatan peran penelitian dan pengembangan (Litbang) sebagai *Research Based Policy*;

- c) Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen risiko.
- m. Intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber pendanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- n. Pengembangan inovasi pelayanan publik yang inklusif serta gesit, responsif, inovatif, melalui :
 - a) Pengembangan dan peningkatan budaya inovasi bagi perangkat daerah melalui Perangkat Daerah Inovatif maupun masyarakat melalui Krenova;
 - b) Peningkatan keterbukaan akses publik terhadap informasi;
 - c) Peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* serta keterbukaan informasi dan satu data sebagai langkah berbenah dalam penyediaan data;
 - d) Meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi Teknologi Informasi;
 - e) Meningkatkan kualitas sumber daya ASN melalui peningkatan kapasitas dan peningkatan pengelolaan manajemen ASN;
 - f) Optimalisasi pelaksanaan SKM sebagai dasar perbaikan pelayanan, utamanya pada perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik.
- o. Penyiapan dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, fokus pada penyediaan informasi rawan bencana, Konservasi dan rehabilitasi lahan serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- p. Penguatan modal sosial untuk peningkatan kondusivitas wilayah, melalui:
 - a) Peningkatan pendidikan karakter dan budaya sejak dini serta Meningkatkan pelestarian dan pengembangan seni dan budaya;

- b) Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh agama tentang wawasan kebangsaan serta parpol dalam pengembangan etika budaya politik;
- c) Peningkatan ketertiban dan keamanan kenyamanan lingkungan dengan fokus pada pelibatan dan pemberdayaan masyarakat/ lembaga kemasyarakatan mulai dari tingkat dukuh, desa, RT/RW hingga Kel/Kec.

Untuk memantapkan pencapaian tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang, perlu diimplementasikan kedalam program prioritas pembangunan daerah. Adapun program prioritas untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1
Program Prioritas Yang Disertai Pagu Indikatif RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS		PROGRAM		INDIKATOR PROGRAM		STN		KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD	
														2023		2024		2025		2026					
														2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Batang seutuhnya melalui penguatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan														446.531.837.462		444.337.242.605		471.284.602.263		488.366.219.843		1.850.519.902.173			
		PDRB per Kapita (ADHK)					juta Rp	20,5	21,1	21,7			22,3		22,9		23,49		23,49						
		Indeks Daya Saing Daerah					indeks	3,403	3,438	3,472			3,507		3,541		3,576		3,577						
		1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia Batang yang semakin berkualitas												260.011.575.959		259.252.872.746		261.808.151.752		263.437.570.423		1.044.510.170.880			
			Indeks Pembanguna n Manusia (IPM)				indeks	68,92	69,32	69,66			70		70,34		70,68		70,68						
			IPG				indeks	91,86	91,57	91,86			91,98		92,25		92,47		92,47						
			IDG				indeks	63,84	63,87	63,9			63,93		63,96		63,99		63,99						
				Program Peningkatan Derajat Pendidikan dan Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan					175.931.371.590			171.670.265.478		167.561.792.009		163.602.894.868		678.766.323.945	Disdikbud					
						Angka Partisipasi Sekolah	%	100	100	100			100		100		100		100						
						Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	100	100	100			100		100		100								
					Program Pemberda-yaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	10,74	11,24	11,74	629.650.000	12,24	629.650.000	12,74	629.650.000	13,24	654.650.000	13,24	2.543.600.000	Dinkes					

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Pembinaan Perpustakaan	persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,16	0,16	0,16	440.767.580	0,16	440.767.580	0,16	440.767.580	0,16	440.767.580	0,16	1.763.070.320	Disperpusk a
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	71,21	85,5	100	48.786.889.092	100	50.991.362.070	100	56.151.046.477	100	59.309.761.241	100	215.239.058.880	Dinkes
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	100	100	490.440.000	100	490.440.000	100	490.440.000	100	490.440.000	100	1.961.760.000	Dinkes
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Batang)	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Batang)	%	100	100	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	775.000.000	RSUD Batang
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (RSUD Limpung)	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung)	%	100	100	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	1.350.000.000	RSUD Limpung

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	70,57	71	80	620.726.000	82	620.726.000	84	620.726.000	85	620.726.000	85	2.482.904.000	Dinkes
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Limpung)	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	100	100	100	19.902.766.547	100	21.007.982.460	100	21.924.571.725	100	23.595.897.213	100	86.431.217.945	RSUD Limpung
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	80	85	88	200.000.000	90	250.000.000	95	300.000.000	100	300.000.000	100	1.050.000.000	Disdikbud
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	100	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	5.400.000.000	Disdikbud
					Program Pengendalian Penduduk	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	100	100	100	242.994.000	100	187.994.000	100	186.994.000	100	185.994.000	100	803.976.000	DP3Ap2KB
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	72,34	72,84	73,34	7.165.495.150	73,84	7.663.209.158	74,34	7.950.823.115	74,84	8.220.963.521	74,84	31.000.490.944	DP3Ap2KB

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	15,91	15,06	14,21		13,36		12,51		11,66		11,66		
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio penduduk yang bekerja	%	68,86	NA	70	1.066.676.000	72	916.676.000	74	916.676.000	76	966.676.000	76	3.866.704.000	Disnaker
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	19	19	25	490.000.000	32	500.000.000	39	501.864.846	45	560.000.000	45	2.051.864.846	Disparpora
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	capaian medali kejuaraan	medal i	23	30	35	2.100.000.000	40	1.800.000.000	45	1.900.000.000	50	2.080.000.000	50	7.880.000.000	Disparpora
				Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	4,79	2,86	3	25.000.000	3,2	20.000.000	3,4	15.000.000	3,5	15.000.000	3,5	75.000.000	DP3AP2KB
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	cakupan data pilah gender dan anak	%	NA	NA	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	10.000.000	DP3AP2KB

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	NA	NA	14,29	75.000.000	21,43	75.000.000	21,43	75.000.000	28,57	75.000.000	28,57	300.000.000	DP3AP2KB
					Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	138.800.000	100	138.800.000	100	142.800.000	100	140.800.000	100	561.200.000	DP3AP2KB
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	cakupan kecamatan layak anak	%	40	66,67	73,33	45.000.000	80	40.000.000	86,67	40.000.000	93,33	40.000.000	93,33	165.000.000	DP3AP2KB
					Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	7.500.000	100	10.500.000	100	33.000.000	DP3AP2KB
	2. Menguatnya perekonomian daerah dan kontribusi ekonomi kerakyatan bagi kemajuan daerah										29.424.028.150		29.637.482.423		30.471.684.071		31.349.301.302		120.882.495.946	
			Pertumbuhan Ekonomi				%	2,54	3,37	4,97-5,0		5,01-5,10		5,10-5,30		5,30-5,50		5,30-5,50		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
			Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan				(Rp.0 00/tah un)	9.524	9.617	9.710		9.803		9.896		9.989		9.989		
				Program Pengembangan sektor Unggulan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Verifikasi Teknis	%	6	20	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	20.000.000	Disperinda gkop
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	10	15	20	50.000.000	40	40.000.000	60	30.000.000	80	30.000.000	80	150.000.000	DPMPTSP
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kabupaten Batang	%	100	100	100	30.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	105.000.000	DPMPTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	100	100	100	750.000.000	100	700.000.000	100	630.000.000	100	570.000.000	100	2.650.000.000	DPMPTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	6	7	7,5	413.063.700	7,5	433.716.885	8	455.402.729	8	478.172.866	8	1.780.356.180	DPMPTSP
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	0,01	0,01	0,78	4.180.500.000	0,78	4.115.500.000	0,79	4.110.500.000	0,80	4.115.500.000	3,15	16.522.000.000	Disperinda gkop
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	78,12 5	80	82	50.000.000	84	5.000.000	86	5.000.000	88	5.000.000	88	65.000.000	Disperinda gkop

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	27,27	72,73	36,36	3.333.459.000	36,36	2.943.459.000	36,36	2.983.459.000	36,36	3.383.459.000	36,36	12.643.836.000	Disperindagkop
					Program Pengembangan Ekspor	nilai ekspor perdagangan	USD	52.037.256	56.742.353	57.877.183	5.000.000	59.034.726	5.000.000	60.215.421	10.000.000	61.419.729	5.000.000	61.419.729	25.000.000	Disperindagkop
					Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	66,8	74,74	75	70.000.000	75	70.000.000	75	70.000.000	75	70.000.000	75	280.000.000	Disperindagkop
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	22,74	13	15	2.000.000.000	17	2.000.000.000	19	2.300.000.000	20	2.100.000.000	71	8.400.000.000	Disparpora
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	NA	25	30	300.000.000	35	370.000.000	40	300.000.000	45	400.000.000	45	1.370.000.000	Disparpora
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	0,012	0,0104	0,0104	1.420.519.100	0,0103	1.426.687.188	0,0108	1.519.287.342	0,0106	1.648.805.696	0,0106	6.015.299.326	Dispaperta

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	100	100	100	2.218.805.000	100	2.242.805.000	100	2.267.805.000	100	2.298.805.000	100	9.028.220.000	Dispaperta
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	NA	NA	75	20.000.000	75	20.000.000	75	15.000.000	75	15.000.000	75	70.000.000	disperindag kop
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	100	100	100	34.100.000	100	37.510.000	100	41.261.000	100	45.387.100	100	158.258.100	Dispaperta
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	88,4	89,1	89,3	216.100.000	89,5	232.710.000	89,7	250.981.000	89,8	271.079.100	89,8	970.870.100	Dispaperta
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	12,5	12,5	12,5	3.630.000.000	12,5	3.993.000.000	12,5	4.292.300.000	12,5	4.572.776.808	12,5	16.488.076.808	Dispaperta
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan penanggulan an Bencana Pertanian	%	100	100	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	210.000.000	Dislutkanna k

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Peneri ma (Orang/Perus ahaan) Pendampinga n Perizinan Usaha Peternakan	%	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	40.000.000	Dislutkanna k
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	85	100	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	560.000.000	Dislutkanna k
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan wisatawan	%	24,26	15	17	500.000.000	20	640.000.000	22	670.000.000	25	600.000.000	84	2.410.000.000	Disparpora
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	78	100	94,5	3.813.000.000	96	3.813.000.000	97	3.813.000.000	98	3.813.000.000	98	15.252.000.000	Dislutkanna k
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	45	90	92	1.582.850.000	93	1.582.850.000	94	1.582.850.000	95	1.582.850.000	95	6.331.400.000	Dislutkanna k
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	94	95	95	25.000.000	96	183.392.500	98	349.704.625	100	524.332.357	100	1.082.429.482	Dislutkanna k

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	100	100	2.052.631.350	100	2.112.631.350	100	2.112.631.350	100	2.112.631.350	100	8.390.525.400	Dinsos
				Program penguatan ekonomi kerakyatan	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	8,06	10,45	10	50.000.000	10	45.000.000	12	5.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000	Disperinda gkop
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	100	90	90	5.000.000	90	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	20.000.000	Disperinda gkop
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	100	90	90	324.000.000	90	345.220.500	100	367.502.025	100	367.502.025	100	1.404.224.550	Disperinda gkop
					Program Pengembangan UMKM	Persentase produk UMKM yang terstandarisas i	%	4	15,38	15	150.000.000	15	45.000.000	20	50.000.000	20	45.000.000	20	290.000.000	Disperinda gkop
		3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata serta menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran									35.279.946.993		34.933.186.473		47.430.562.098		35.249.588.379		152.893.283.943	
			Angka ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)				%	21,3	21,4	21,5		21,6		21,7		21,8		21,8		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
				Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	N/A	43,93	46,03	24.230.169.820	46,03	23.866.156.800	56,49	36.240.206.800	56,49	23.934.791.175	56,49	108.271.324.595	Disperma des
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa dan Kelurahan yang Aktif Kecamatan Batang	%	100	100	85	2.361.044.100	90	2.361.044.100	90	2.361.044.100	90	2.361.044.100	90	9.444.176.400	Kecamatan Batang
						Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Wonotunggal	%	100	100	85	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	20.000.000	Kecamatan Wonotunggal
						Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Bandar	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Bandar
						Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Blado	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Blado
						Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Bawang	%	100	100	85	21.505.000	90	21.505.000	90	21.505.000	90	21.505.000	90	86.020.000	Kecamatan Bawang

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Kandeman	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Kandeman
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Tulis	%	100	100	85	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	5.000.000	90	20.000.000	Kecamatan Tulis
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Subah	%	100	100	85	33.000.000	90	34.000.000	90	35.000.000	90	36.000.000	90	138.000.000	Kecamatan Subah
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Pecalungan	%	100	100	85	21.337.200	90	21.337.200	90	21.337.200	90	21.337.200	90	85.348.800	Kecamatan Pecalungan
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Tersono	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Tersono
						Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif Kecamatan Limpung	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Limpung

TUJUAN/ SASARAN				INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
												2023		2024		2025		2026				
										2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
								Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Banyuputih	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Banyuputih
								Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Gringsing	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Gringsing
								Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Warungasem	%	100	100	85	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000	90	15.000.000	90	60.000.000	Kecamatan Warungase m
								Persentase Lembaga Kemasyarakat an di Desa yang Aktif Kecamatan Reban	%	100	100	85	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	10.000.000	90	40.000.000	Kecamatan Reban
			Tingkat Penganggura n terbuka						%	6,59	6,26	5,93		5,6		5,27		4,94		4,94		
						Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	26	0	31	144.800.500	36	144.800.500	41	144.800.500	46	144.800.500	46	579.202.000	Disnaker
						Program Hubungan Industrial		Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	5,13	0	14,8	191.361.750	14,6	191.361.750	14,4	191.361.750	14,2	191.361.750	14,2	765.447.000	Disnaker
			Persentase Penduduk Miskin						%	9,68	8,56	8,4-7,98		8,34-7,92		8,27- 7,85		8,21- 7,80		8,21- 7,80		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	62	62	62,5	5.333.418.073	63	5.333.418.073	63,5	5.483.418.073	64	5.583.418.073	64	21.733.672.292	DPRKP
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	100	100	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	350.000.000	DPRKP
					Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	100	100	590.560.000	100	590.550.000	100	590.550.000	100	590.550.000	100	2.362.210.000	Dinsos
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	237.500.550	100	237.500.550	100	237.500.550	100	237.500.550	100	950.002.200	Dinsos
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.960.250.000		1.926.512.500		1.898.838.125		1.922.280.031		7.707.880.656	Bapelitbang	
						persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	NA	NA	90		90,5		91		92		92	-	

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	NA	NA	90		90,5		91		92		92	-	
						persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	NA	NA	90		90,5		91		92		92	-	
		4. Meningkatnya penyediaan dan pemerataan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan kawasan ekonomi dan non ekonomi									120.352.799.910		118.998.071.550		130.150.606.772		155.167.901.946		524.669.380.178	
			Indeks Infrastruktur				indeks	180,4	185,95	191,49		197,04		200		201		201		
				Program penyediaan dan pemerataan infrastruktur pro pembangunan berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	46,59	50,5	55,5	77.780.694.700	60,5	70.696.780.500		78.514.469.500		85.047.452.700		312.039.397.400	DPUPR
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	100	100	100	4.580.053.000	100	4.480.053.000		5.680.053.000		21.380.053.000		36.120.212.000	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		%	0,44	51,21	57,67	0	64,41	5.000.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		14.000.000.000	DPUPR

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	NA	NA	45,9	2.000.000.000	52,4	2.000.000.000	75,47	2.000.000.000	95,7	2.000.000.000	95,7	8.000.000.000	DPUPR
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase terselenggara nya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	78,8	85	85	5.835.490.760	87	5.835.490.760		5.835.490.760		5.585.123.951		23.091.596.231	Dishub
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kot a yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0	3,94	4,23	14.339.227.250	4,25	14.814.753.812		17.518.257.793		19.042.527.223		65.714.766.078	DPUPR
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						7.318.185.550		7.546.000.000		7.775.000.000		8.070.000.000		30.709.185.550	DPRKP
						Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100	100	100		100		100		100		100		
						Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100	100	100		100		100		100		100		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	4.840.000.000	100	5.165.844.828	100	5.368.187.069	100	5.583.596.422	100	20.957.628.319	DPUPR
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	72	75	78	2.837.000.000	81	2.637.000.000		2.637.000.000		2.637.000.000		10.748.000.000	DPRKP
					Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	47,04	50,04	53,04	1.675.500.000	56,04	1.675.500.000		1.675.500.000		1.675.500.000		6.702.000.000	DPUPR
	5. Terwujudnya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan										1.463.486.450		1.515.629.413		1.423.597.570		3.161.857.793		7.564.571.226	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				indeks	65,17	64,84	64,94		65,04		65,14		65,24		65,24		
				Program tata kelola Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	47	49	50	285.799.200	60	285.799.200	70	285.799.200	70	285.799.200	70	1.143.196.800	DLH
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup						140.600.000		140.600.000		140.600.000		190.600.000		612.400.000	DLH

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						Indeks Kualitas Air	indeks	50	50	50		50		50		50		50	-	
						Indeks Kualitas Udara	indeks	80	80	80		80		80		80		80	-	
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	45	50	60	921.324.850	70	973.467.813	80	881.435.970	85	2.569.696.193	85	5.345.924.826	DLH
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggungja wab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	50	50	55	65.762.400	60	65.762.400	65	65.762.400	70	65.762.400	70	263.049.600	DLH
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan Hidup	%	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	DLH
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	100	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	DLH

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
2. Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel										382.397.373.652		387.916.337.126		390.849.128.399		393.455.197.319		1.554.618.036.496		
		Indeks Reformasi Birokrasi					indeks	64,76	66,06	67,36		68,66		69,96		71,26		71,26		
6. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah										379.357.363.182		382.886.147.106		385.921.811.067		388.839.879.987		1.537.005.201.342		
			Nilai SAKIP				skor	67,14	69,08	69,62		70,5		71,25		72,35		80,84		
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)				indeks	level 2	level 3	level 3		level 3		level 3		level 3		level 3		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				indeks	73,98	77,46	78		79		80		81		81		
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengelolaan keuangan daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	100	100	100	2.693.433.150	100	2.962.776.465	100	2.962.776.465	100	2.962.776.465	100	11.581.762.545	Inspektorat
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah						828.737.000		1.153.737.000		1.103.737.000		753.737.000		3.839.948.000	Bapelitbang
						Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	3.682.965.660	100	3.682.965.660	100	3.682.965.660	100	3.682.965.660	100	14.731.862.640	Bagian Perekonomian
						Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	81	90	95	460.080.000	96	460.080.000	97	460.080.000	98	460.080.000	98	1.840.320.000	Bagian Adpem
						Persentase lelang melalui e-procurement	%	49,49	100	100	512.551.800	100	512.551.800	100	512.551.800	100	512.551.800	100	2.050.207.200	Bagian PBJ
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					31.690.710.467		31.910.710.467		0		32.010.710.467		95.612.131.401	Bag. Kesra	
						Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	100	100	100	42.248.000	100	42.248.000	100	42.248.000	100	42.248.000	100	168.992.000	Bagian Pemerintahan
						Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	100	100	100	558.312.000	100	558.312.000	100	760.312.000	100	558.312.000	100	2.435.248.000	Bagian Pemerintahan
						Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	13,79	100	100	30.430.283.900	100	30.650.283.900	100	30.430.283.900	100	30.750.283.900	100	122.261.135.600	Bagian Kesra

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi	%	99,41	95	95	659.866.567	95	659.866.567	95	659.866.567	95	659.866.567	95	2.639.466.268	Bagian Hukum
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	50	40	50	600.000.000	55	605.000.000	60	605.000.000	65	605.000.000	65	2.415.000.000	Bapelitbang
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi					214.958.200		236.454.020		236.454.020		236.454.020		924.320.260	Inspektorat	
						Level SPIP	level	3	3	3		3		3		3		3	-	
						Persentase kapabilitas APIP	%	63	65	68		70		70		70		70	-	
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	57,13	10	0	3.062.564.350	2,03	2.702.564.350	1,36	2.712.564.350	2,25	2.722.564.350	5,64	11.200.257.400	BPKPAD
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah					334.064.636.225		337.112.581.014		340.206.244.975		343.346.313.895		1.354.729.776.109	BPKPAD	
						Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	-	

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
						Penyampaian Raperda Pertanggung awaban tepat waktu	status	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		-		
						Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	NA	NA	90		90		90		90		90	BPKPAD	
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	100	100	100	1.493.581.500	100	1.493.581.500	100	1.493.581.500	100	1.493.581.500	100	5.974.326.000	BPKPAD
	7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)									3.040.010.470		5.030.190.020		4.927.317.332		4.615.317.332		17.612.835.154		
			Indeks Kepuasan Masyarakat				indeks	85,028	85,15	85,3		85,45		85,6		85,75		85,75		
				Program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	60	70	75	695.997.632	85	472.797.632	94,5	472.797.632	100	472.797.632	100	2.114.390.528	Disdukcapil
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	97	97	97,2	343.151.088	97,4	343.151.088	97,6	324.000.000	97,8	324.000.000	97,8	1.334.302.176	Disdukcapil
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	189.480.000	100	189.480.000	100	182.137.950	100	182.137.950	100	743.235.900	Diskominfo

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Aplikasi Informatika	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	62	65	68	882.000.000	70	875.379.550	73	895.000.000	75	895.000.000	75	3.547.379.550	Diskominfo
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kot a	%	60	63	66	1.146.648.650	69	1.146.648.650	72	1.146.648.650	75	1.146.648.650	75	4.586.594.600	Diskominfo
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	100	100	100	929.381.750	100	3.149.381.750	100	3.053.381.750	100	2.741.381.750	100	9.873.527.000	BKD
3. Meningkatnya ketahanan daerah serta terwujudnya kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kondusif											37.013.726.000		37.013.726.000		37.013.726.000		37.013.726.000		148.054.904.000	
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)					indeks	166	164	160		155		150		144		144		
		Indeks Rasa Aman					indeks	na	na	4		4,2		4,4		4,6		4,6		
8. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana											2.436.226.000		2.396.226.000		2.396.226.000		3.996.226.000		11.224.904.000	
			Indeks Ketahanan Daerah				indeks	0,41	0,51	0,71		0,81		0,83		0,85		0,85		

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
				Program Peningkatan Ketahanan Daerah dan Perlindungan Bencana	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	631.186.000	100	631.186.000	100	631.186.000	100	631.186.000	100	2.524.744.000	Dinsos
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	100	100	1.805.040.000	100	1.765.040.000	100	1.765.040.000	100	3.365.040.000	100	8.700.160.000	satpol PP
		9. Terciptanya iklim demokrasi yang baik didukung dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat									32.038.500.000		37.095.000.000		6.585.000.000		2.095.000.000		77.813.500.000	
			Indeks Demokrasi				indeks	na	na	70		72		74		76		76		
				Program Penguatan Budaya dan Peningkatan Iklim Demokrasi	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	80	80	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	Disdikbud
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	65	70	75	100.000.000	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	90	400.000.000	Disdikbud
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	75	90	95	225.000.000	95	225.000.000	95	225.000.000	95	225.000.000	95	900.000.000	Kesbangpol

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	100	100	100	31.150.000.000	100	36.150.000.000	100	1.150.000.000	100	1.150.000.000	100	69.600.000.000	Kesbangpol
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	100	100	100	120.000.000	100	220.000.000	100	120.000.000	100	220.000.000	100	680.000.000	Kesbangpol
				Program Peningkatan kondusifitas wilayah	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	100	100	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	225.000.000	100	900.000.000	Kesbang
					Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan konflik sosial	%	100	100	100	1.320.000.000	100	1.320.000.000	100	1.320.000.000	100	1.320.000.000	100	5.280.000.000	Kesbang
	10.Berkurangnya angka kriminalitas di Kabupaten Batang										2.539.000.000		2.539.000.000		2.539.000.000		2.539.000.000		10.156.000.000	

TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	STN	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD
										2023		2024		2025		2026				
								2021	2022	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp0	
			Angka kriminalitas				%	0,019	0,018	0,016		0,015		0,014		0,013		0,013		
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	1.037.000.000	100	994.000.000	100	5.584.000.000	100	994.000.000	100	8.609.000.000	satpol PP

6.2.2 Arah Kebijakan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu indikator kondisi pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah yang menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut maka diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan SPM. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM meliputi enam bidang yaitu 1. Bidang Pendidikan; 2. Bidang Kesehatan; 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 5. Bidang Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6. Bidang Sosial. Pemenuhan SPM mengacu pada indikator dalam peraturan kementerian teknis masing- masing bidang yang mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima layanan dasar. Pemenuhan SPM pada enam bidang diwujudkan dalam program-program pelayanan dasar selama periode RPD 2023- 2026 Kabupaten Batang sebagai berikut:

Tabel 6.2
Program Pelayanan Dasar RPD dalam Pemenuhan SPM Tahun 2023-2026

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
			2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
URUSAN PEMERINTAH WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN															
Program Pengelolaan Pendidikan						175.931.371.590		171.670.265.478		167.561.792.009		163.602.894.868		678.766.323.945	Disdikbud
	Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase capaian SPM Pendidikan	%	100	100	100		100		100		100		100		
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	100	100	100	1.200.000.000	100	1.300.000.000	100	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	5.400.000.000	Disdikbud
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN															
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	100	100	100	48.786.889.092	100	50.991.302.070	100	56.151.046.477	100	59.309.761.241	100	215.238.998.880	Dinkes

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
			2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD)	Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	71,2	85,5	100	19.902.766.547	100	21.007.982.460	100	21.924.571.725	100	23.595.897.213	100	86.431.217.945	RSUD Limpung
SKEMA DIHAPUS Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	100	100	490.440.000	100	490.440.000	100	490.440.000	100	490.440.000	100	1.961.760.000	Dinkes
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	100	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	725.000.000	RSUD Batang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	100	100	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	100	375.000.000	100	1.357.832.227	RSUD Limpung
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						7.318.185.550		7.546.000.000		7.775.000.000		8.070.000.000		30.709.185.550	DPUPR

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
			2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	100	100	100		100		100		100		100		
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	%	100	100	100	4.840.000.000	100	5.165.844.828	100	5.368.187.069	100	5.583.596.422	100	20.957.628.319	DPUPR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
Program Pengembangan Perumahan	Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	100	100	100	50.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	350.000.000	DPRKP
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	100	100	100	994.000.000	100	994.000.000	100	994.000.000	100	994.000.000	100	3.976.000.000	satpol PP

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
			2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Penyelamatan Kebakaran	Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	100	100	100	1.805.040.000	100	1.765.040.000	100	1.765.040.000	100	3.365.040.000	100	8.700.160.000	satpol PP
Program Penanggulangan Bencana						915.125.460		1.330.125.460		897.218.000		897.218.000		3.606.779.460	BPBD
	Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani	%	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	%	100	100	100	590.560.000	100	590.550.000	100	590.550.000	100	590.550.000	100	2.362.210.000	Dinsos
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	237.500.550	100	237.500.550	100	237.500.550	100	237.500.550	100	950.002.200	Dinsos

JENIS PELAYANAN DASAR SPM	INDIKATOR PROGRAM	SAT	KONDISI AWAL KINERJA		TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI PADA AKHIR PERIODE RPD		PD PENANGGUNG JAWAB
					2023		2024		2025		2026				
			2021	2022	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial	%	100	100	100	2.052.631.350	100	2.112.631.350	100	2.112.631.350	100	2.112.631.350	100	8.390.525.400	Dinsos
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	631.186.000	100	631.186.000	100	631.186.000	100	631.186.000	100	2.524.744.000	Dinsos

6.2.3 Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19

Terdapat 3 (tiga) prioritas dalam kebijakan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 Kabupaten Batang, yaitu:

1) Pemulihan Sektor Perekonomian;

Pemulihan Sektor Perekonomian yang Kokoh Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Batang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penyelamatan dan Penguatan Kewirausahaan sektor UMKM, yang dilakukan melalui cara:
 - a) Memperluas basis data tunggal UMKM yang diintegrasikan dengan DTKS, agar bantuan atau insentif UMKM lebih cepat dan tepat sasaran;
 - b) Tetap menerapkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan dalam proses pemulihan UMKM agar jangan sampai meningkatkan kasus infeksi yang akan berbalik menekan ekonomi;
 - c) Berkolaborasi dengan swasta dapat memberikan fasilitas ke UMKM berupa kemudahan dan pendampingan dalam sertifikasi halal, uji BPOM, dan pemasaran;
 - d) Berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan khusus untuk meningkatkan inklusi digital, melalui kredit bunga rendah atau insentif pajak untuk masuk ke ekosistem digital;
 - e) Meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan akses permodalan bagi Wirausaha dan UMKM, fasilitasi bantuan pemasaran produk UKM, dukungan sarana & prasarana UMKM serta pendampingan dan pelatihan usaha/manajemen UKM.
- b. Perluasan Kesempatan dan Keterampilan Kerja, yang dilakukan melalui cara:
 - a) Menciptakan dan memperluas lapangan kerja dengan padat karya di sektor infrastruktur, pelatihan kerja dan bantuan alat, job market;

- b) Mendorong iklim investasi melalui peningkatan pelayanan perijinan terpadu satu pintu, promosi investasi, pengurangan / penundaaan pembayaran pajak serta penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - c) Mengembangkan ketenagakerjaan terkait dengan pembangunan Kawasan Industri Terpadu;
 - d) Mengoptimalkan peran pemerintah dan dunia usaha dalam pemberdayaan pekerja berketerampilan rendah melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan;
 - e) Meningkatkan penciptaan peluang usaha melalui fasilitasi wirausaha melalui pendampingan, penyiapan SDM, fasilitasi standarisasi mutu dan sertifikasi produk UMKM, kemudahan perijinan usaha serta peningkatan promosi dan pemasaran produk;
 - f) Memetakan secara spesifik kebutuhan pekerja digital ke depan. Pemerataan tidak sebatas proyeksi jumlah, tetapi statistik keahlian yang dibutuhkan dan sektor usaha yang membutuhkan.
- c. Pemulihan dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah, yang dilakukan melalui cara:
- a) Meningkatkan pariwisata daerah melalui promosi wisata, pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran pokdarwis, fasilitasi pengembangan atraksi dan amenitas wisata;
 - b) Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian antara lain melalui bantuan alat, pemberian bantuan benih/bibit/ternak/pakan ternak, fasilitasi dan bantuan pemasaran produk, pemanfaatan pekarangan, stimulant cadangan pangan serta intensifikasi pertanian;
 - c) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi & produktivitas pertanian, perkebunan,

peningkatan produksi hasil peternakan & perikanan, penyediaan cadangan pangan daerah.

2) Pemulihan Sektor Kesehatan;

Pemulihan Sektor Kesehatan yang Holistik dan Integratif di Kabupaten Batang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Penguatan Sistem Kesehatan Integratif dan Holistik

Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penguatan sistem kesehatan antara lain melalui deteksi dini serta penanganan dan pengobatan penyakit, Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS; perlindungan tenaga medis dan perlindungan kelompok rentan. Strategi ini dijabarkan dalam program/kegiatan/aktivitas sebagai berikut:

- a) Penguatan sumber daya kesehatan melalui pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan serta penguatan SDM kesehatan;
 - b) Deteksi dini melalui perluasan case detection, skrining awal, surveilans penyakit menular dan tidak menular, rapid test dan PCR;
 - c) Penanganan dan pengobatan penyakit melalui karantina kesehatan, pemenuhan farmasi dan alkes;
 - d) Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Promkes, germas dan PHBS;
 - e) Perlindungan tenaga medis (penyediaan APD bagi tenaga medis di fasyankes dan pemberian insentif dan vitamin bagi tenaga medis), penguatan satgas Covid-19 di tingkat desa/kelurahan, penyediaan ruang karantina di desa, peningkatan pelayanan dan sarpras di RS/Balkesmas.
- b. Penguatan Deteksi Dini, Kolaborasi dan Edukasi Masyarakat, dilakukan melalui cara:
- a) Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya upaya tracing dan testing;
 - b) Mengaktifkan program Jogo Tonggo di Masyarakat;
- c. Peningkatan cakupan vaksinasi

Angka kematian yang tinggi dapat pula diatasi dengan meningkatkan cakupan vaksinasi. Data kematian yang berkaitan dengan cakupan vaksinasi menunjukkan bahwa dari keseluruhan kasus yang meninggal diketahui bahwa 94,13% diantaranya belum mendapatkan vaksinasi sedangkan 5,87% telah mendapatkan vaksinasi. Dari data tersebut diketahui bahwa vaksin berperan efektif dalam menurunkan fatalitas Covid-19.

3) Penguatan kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan daya saing pembangunan manusia, dilakukan melalui cara:
 - a) Optimalisasi layanan Pendidikan dasar, dengan peningkatan akses dan sarana prasarana Pendidikan;
 - b) Penguatan sektor pendidikan dengan pengembangan teknologi dalam rangka pembelajaran virtual, dan pengembangan sistem pembelajaran.
- b. Perluasan Cakupan Penyelenggaraan Bantuan Sosial, dilakukan melalui cara:
 - a) Mendorong peran swasta dan kelompok masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melindungi penduduk miskin dan rentan di tengah keterbatasan fiskal;
 - b) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan kemudahan akses berupa bantuan atau stimulan pendidikan, kesehatan, pangan, rumah layak, dan akses KB,
 - c) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial/subsidi untuk masyarakat miskin, penanganan masalah kesejahteraan sosial dan jaminan sosial dan jaminan kesehatan warga miskin, serta bantuan sosial bagi anak yatim piatu akibat Covid 19.

6.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Kabupaten Batang ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Batang yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri, pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Memperhatikan kondisi fisiografis dan kemampuan lahan, maka rencana kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Batang dibagi menjadi :

- a. Wilayah Kabupaten Batang bagian selatan yang meliputi Kecamatan Bawang, Kecamatan Tersono, Kecamatan Reban dan Kecamatan Blado diarahkan untuk pengembangan kawasan yang mendukung fungsi konservasi dan pengembangan destinasi wisata alam; dengan strategi meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan peruntukan lindung, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan peruntukan lindung dan pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung destinasi wisata alam.
- b. Wilayah Kabupaten Batang bagian tengah yang meliputi Kecamatan Limpung, Kecamatan Pecalungan, Kecamatan Bandar, Kecamatan Wonotunggal dan Warungasem diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian dan agrobisnis sehingga dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian sekaligus ketahanan pangan daerah; dengan strategi menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengembangkan dan merevitalisasi jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mengembangkan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian.
- c. Wilayah Kabupaten bagian utara yang meliputi Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan Subah, Kecamatan Banyuputih dan Kecamatan Gringsing diarahkan untuk pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan kemampuan lahan sehingga dapat mendorong

perwujudan kawasan industri dan industri kreatif dalam rangka peningkatan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja; dengan strategi mengembangkan kawasan peruntukan industri di kawasan koridor jalan pantai utara, mengembangkan industri kreatif yang berbahan baku lokal disetiap kecamatan dan meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengembangan industri.

Gambar 6. 5 Kabupaten Batang Berdasarkan Kondisi Fisiografis dan Kemampuan Lahan



Sumber : Bapelitbang Kabupaten Batang, 2019

1) Strategi Pengembangan struktur ruang

Dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah, diperlukan pengembangan sistem perkotaan dan pengembangan jaringan infrastruktur wilayah dan prasarana pendukung yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan hierarki pengembangan sarana wilayah antar Pusat Kegiatan baik Pusat Kegiatan Wilayah yang melayani kegiatan skala wilayah, Pusat Kegiatan Lokal yang melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani kegiatan skala

kecamatan atau beberapa desa dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang melayani kegiatan antar desa (PKW, PKL, PPK, PPL).

Adapun pengembangan jaringan prasarana dimaksud berupa jaringan prasarana transportasi meliputi pengembangan : sistem jaringan transportasi, jaringan jalan; angkutan umum aglomerasi perkotaan; integrasi antar moda transportasi; jaringan rel kereta api; pelabuhan; terminal; jaringan prasarana energi; dan jaringan prasarana sumber daya air.

- 2) Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah dilaksanakan melalui :

2.1 Pengembangan sistem perkotaan

Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Batang direncanakan mengikuti konsep dan skenario perkembangan wilayah Kabupaten Batang, yaitu perkembangan Batang bagian utara yang didukung oleh jalur pantura yang melewati Kecamatan Batang, Kandeman, Tulis, Banyuputih dan Gringsing dengan arah perkembangan ke luar wilayah Kabupaten Batang yaitu Kabupaten Kendal dan Kota Pekalongan (Petanglong). Arah perkembangan Batang bagian tengah yang dilalui oleh jalur menuju ke Kabupaten Purbalingga, serta perkembangan Kabupaten Batang bagian selatan yang dilewati oleh jalur yang menuju ke Purbalingga, Banjarnegara dan Kabupaten Pekalongan.

Skenario perkembangan perkotaan didukung dengan penetapan Pusat Pelayanan Kawasan yang melayani kegiatan skala kecamatan ditetapkan di Kecamatan Batang sebagai pusat kabupaten dan Kecamatan Limpung sebagai pusat perdagangan jasa wilayah timur selatan.

Untuk mendukung rencana pengembangan sistem perkotaan dan pengembangan sarana wilayah ditetapkan pembagian Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang meliputi :

- a. SWP Batang dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Batang mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa; pertanian tanaman pangan,

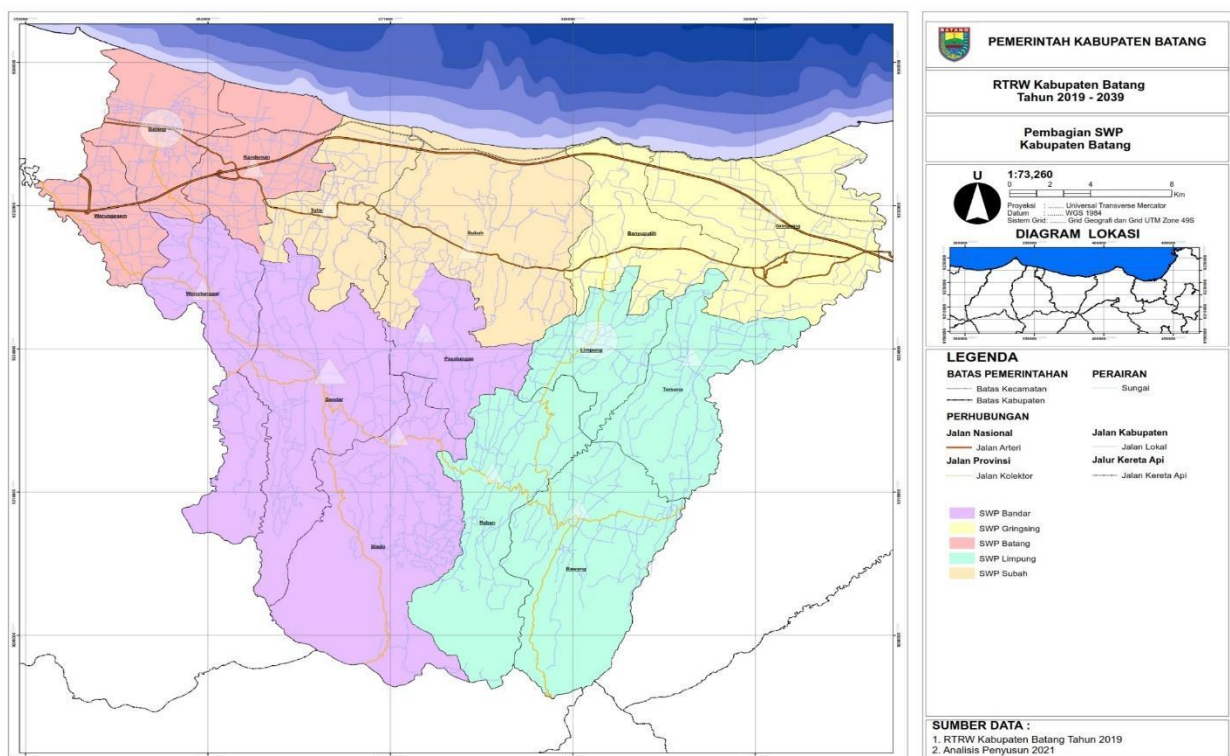
hortikultura dan peternakan; perikanan; industri perikanan; dan pariwisata yang meliputi:

1. Kecamatan Batang;
 2. Kecamatan Kandeman;
 3. Kecamatan Warungasem.
- b. SWP Bandar dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Bandar mempunyai fungsi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, agroindustri; perdagangan dan jasa, perikanan darat, kehutanan; dan pariwisata yang meliputi:
1. Kecamatan Wonotunggal;
 2. Kecamatan Pecalungan;
 3. Kecamatan Bandar;
 4. Kecamatan Blado.
- c. SWP Subah dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Subah mempunyai fungsi pengembangan industri; pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan; kehutanan, dan pariwisata yang meliputi:
1. Kecamatan Subah;
 2. Kecamatan Tulis.
- d. SWP Gringsing dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Gringsing mempunyai fungsi pengembangan industri, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan jasa, transit perjalanan, kehutanan, dan pariwisata yang meliputi:
1. Kecamatan Gringsing;
 2. Kecamatan Banyuputih.
- e. SWP Limpung dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Limpung mempunyai fungsi pengembangan perdagangan dan jasa, agroindustri, pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pertambangan,

perikanan darat; kehutanan, dan pariwisata yang meliputi meliputi:

1. Kecamatan Limpung;
2. Kecamatan Tersono;
3. Kecamatan Reban;
4. Kecamatan Bawang.

Gambar 6. 6 Peta Pembagian Satuan Wilayah Pengembangan Kabupaten Batang



Sumber : RTRW Kabupaten Batang tahun 2019

2.2 Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan laut secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, meliputi :

- a. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat meliputi pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Sistem jaringan jalan yang akan dikembangkan meliputi jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, desa dan jalan khusus (termasuk pengembangan jalan akses baru menuju Kawasan Industri Terpadu Batang dan Batang

Industrial Park), terminal barang dan penumpang, jembatan timbang dan angkutan umum massal. Sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api dan stasiun penumpang dan barang,

- b. Pengembangan sistem jaringan transportasi laut meliputi pembangunan/pengembangan pelabuhan umum, terminal khusus, terminal untuk kepentingan sendiri dan alur pelayaran.

2.3 Pengembangan sistem jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, irigasi dan air baku industri, meliputi :

- a. Pembangunan, pengembangan dan pelestarian sumber air permukaan dan cekungan air tanah (CAT) untuk pemenuhan kepentingan masyarakat, kebutuhan irigasi dan air baku industri, terdiri dari pelestarian sungai, mata air dan cekungan air tanah, pembangunan dan pengembangan waduk dan embung.
- b. Pembangunan dan pengembangan prasarana sumber daya air yang terdiri dari sistem irigasi, sistem pengendalian banjir, sistem pengamanan pantai, jaringan air baku dan jaringan air bersih.

2.4 Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk meningkatkan kapasitas trafik data dan keterjangkauan layanan telekomunikasi, meliputi :

- a. Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap terdiri dari pembangunan saluran serat optik dan pengembangan jaringan serat optik.
- b. Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak terdiri peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan jaringan seluler nirkabel dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

- 2.5 Pengembangan sistem jaringan persampahan wilayah untuk meningkatkan cakupan layanan persampahan, meliputi pengembangan dan pembangunan TPA sampah Batang wilayah timur, pengembangan dan pengelolaan TPS 3R, TPST, dan pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- 2.6 Pengembangan sistem penyediaan air minum untuk meningkatkan cakupan layanan kebutuhan air minum masyarakat dan komersil, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan mulai dari unit air baku, unit produksi, uni distribusi dan layanan serta pengembangan sistem jaringan baik skala kabupaten (Perumdam) maupun skala wilayah Petanglong (PDAB dan Perumdam).
- 2.7 Pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk meningkatkan cakupan layanan air limbah industri dan domestik, meliputi pengembangan dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah industri, instalasi pengolahan air limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- 2.8 Pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk meningkatkan cakupan layanan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan yang dilakukan di seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan di kawasan peruntukan industri.
- 2.9 Pengembangan sistem jaringan drainase meliputi pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan dan daerah rawan banjir, drainase jalan, normalisasi sungai dan pembangunan fasilitas resapan/kolam tampung air.
- 2.10 Pengembangan sistem proteksi kebakaran meliputi pengembangan pos kebakaran dan penyediaan hidran air di masing-masing perkotaan kecamatan dan tempat strategis.
- 2.11 Pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi ruang evakuasi bencana yang terdiri dari lokasi evakuasi dan tempat

relokasi, pengembangan jalur evakuasi bencana berdasarkan dokumen KRB.

3) Strategi Perwujudan Kawasan Lindung dan Budidaya

a. Kawasan Lindung

Rencana perwujudan kawasan lindung dilakukan melalui strategi :

- a) Strategi untuk mewujudkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi pelestarian kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air.
- b) Strategi untuk mewujudkan kawasan perlindungan setempat meliputi pengelolaan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar embung atau waduk dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (RTH publik dan privat).
- c) Strategi untuk mewujudkan kawasan konservasi meliputi pelestarian kawasan suaka alam Peson I, Peson II dan Ulolanang.
- d) Strategi untuk mewujudkan kawasan cagar budaya meliputi pelestarian dan pengelolaan kawasan kota pusaka dan peninggalan bersejarah.
- e) Strategi untuk mewujudkan kawasan rawan bencana meliputi penanganan kawasan rawan bencana banjir, banjir bandang, puting beliung, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi dan letusan gunung api, kebakaran, kekeringan dan gerakan tanah.
- f) Strategi untuk mewujudkan kawasan lindung geologi meliputi pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan air tanah pada kawasan imbuhan mata air dan sempadan mata air.
- g) Strategi untuk mewujudkan kawasan ekosistem mangrove meliputi pengelolaan kawasan pantai berhutan mangrove.

b. Kawasan Budidaya

Rencana perwujudan kawasan budidaya dilakukan melalui strategi:

- a. Strategi untuk mewujudkan kawasan hutan produksi meliputi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas.
- b. Strategi untuk mewujudkan kawasan hutan rakyat meliputi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan rakyat.
- c. Strategi untuk mewujudkan kawasan peretanian meliputi perlindungan dan pemanfaatan kawasan tanaman pangan (KP2B), pengembangan dan pemanfaatan kawasan hortikultura, pengembangan dan pengelolaan kawasan perkebunan dan kawasan peternakan.
- d. Strategi untuk mewujudkan kawasan perikanan meliputi peningkatan produksi kawasan perikanan tangkap di wilayah pesisir dan laut, kawasan perikanan budidaya tambak dan air tawar, peningkatan dan pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan.
- e. Strategi untuk mewujudkan kawasan pertambangan dan energi meliputi pengendalian kawasan pertambangan mineral logam dan batuan, pemanfaatan kawasan panas bumi dan optimalisasi kawasan pembangkitan tenaga listrik (PLTU, PLTP, PLTS, PLTMH).
- f. Strategi untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan industri (KITB, BIP dan kawasan industri Kenconorejo) serta pengembangan kawasan peruntukan industri dan IKM.
- g. Strategi untuk mewujudkan kawasan pariwisata meliputi pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata alam, kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata buatan serta pariwisata unggulan yang terdiri dari pengembangan wisata pantai Sigandu, wisata alam Bukit Sikuping, wisata budaya Silurah.
- h. Strategi untuk mewujudkan kawasan permukiman meliputi peningkatan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

- i. Strategi untuk mewujudkan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pemantapan kawasan Kodim, Polres dan Pos TNI AL.
- 4) Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten

Penetapan kawasan strategis kabupaten didasarkan pada fungsi kawasan yang berpengaruh terhadap ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan bagi kepentingan kabupaten, meliputi :

 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari :
 - a) Koridor perkotaan Batang-Kandeman
 - b) Kawasan Pelabuhan Batang
 - c) Kawasan wisata pantai Sigandu-Ujungnegoro
 - d) Kawasan wisata alam Pagilaran
 - e) Kawasan Industri KITB, BIP, Kenconorejo
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi yaitu PLTU Jawa Tengah.
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu pendukung kawasan dataran tinggi yang berbatasan dengan kawasan Dieng.

6.2.5 Arah Kebijakan dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Batang diarahkan kepada pengembangan kawasan yang memiliki daya tarik bagi investasi pada sektor industri dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan kawasan industri. Diharapkan dengan pembangunan dan pengembangan kawasan industri dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah, mendorong kemandirian daerah dalam kemampuan keuangan dan kesejahteraan masyarakat serta tetap mempertahankan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Kawasan industri di Kabupaten Batang yang telah berdiri dan sedang dikembangkan yaitu Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang berada di Kecamatan Banyuputih dan Gringsing, dan Batang Industrial Park (BIP) yang berada di Kecamatan Tulis. Di samping itu masih ada rencana pengembangan kawasan industri baru yang juga berlokasi di Kecamatan Tulis.

Berdasarkan tinjauan lokasi kawasan industri di Kabupaten Batang memiliki akses yang baik dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Pekalongan, dan Semarang serta dengan adanya jalan tol Trans Jawa. Akses melalui jalan non-tol juga tersedia khususnya menuju lokasi tapak yaitu jalan raya Pantura. Hal ini juga mendorong bertumbuhnya kawasan penyangga di sekitar kawasan industri, terutama sektor perumahan dan penyediaan barang jasa yang membutuhkan infrastruktur pendukung kawasan. Kebutuhan *supply chain* (semisal penyediaan kardus untuk bungkus produk tertentu) dalam kawasan juga berpotensi untuk dikerjakan oleh investor lokal sehingga dapat meningkatkan usaha UMKM. Keberadaan kawasan industri akan membutuhkan kurang lebih 300 ribu tenaga kerja dan secara demografi mendorong perubahan mata pencaharian masyarakat di sektor agraris menuju sektor industri. Untuk itu diperlukan pelatihan agar siap untuk dipekerjakan. Isu lingkungan juga tetap menjadi perhatian utama agar keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang dapat dipertahankan kualitasnya.

a. Strategi pengembangan kawasan industri

Upaya dan strategi dalam mencapai tujuan sasaran pengembangan kawasan industri :

1. Mengarahkan pengembangan kawasan penyangga di sekitar Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP) dalam bentuk pengembangan infrastruktur pendukung :
 - Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui pertigaan Banyuputih tembus ke arah jalan kabupaten Kedawung-KITB, penyediaan kawasan permukiman dan penyediaan barang jasa dengan panjang 25 km dan lebar 12 m.

- Pembangunan dan pengembangan jalan akses baru (termasuk jembatan dan drainase) melalui jalan pantura Tulis menuju BIP dengan panjang sekitar 4 km dan lebar 12 m.
 - Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Gringsing, Banyuputih, Limpung untuk mendukung KITB.
 - Penyediaan transportasi massal.
 - Penyediaan lahan permukiman dan perumahan di sekitar Kecamatan Tulis, Bandar, Kandeman untuk mendukung BIP.
 - Pembangunan dan penyediaan sistem jaringan air minum di Kecamatan Banyuputih.
 - Mendorong peran serta BUMD dalam kerjasama investasi di dalam kawasan industri.
2. Pemberdayaan UMKM untuk mendukung *supply chain* di kawasan industri dan kebutuhan barang jasa di kawasan penyangga.
- Pembangunan dan pengembangan Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) di dalam KITB yang terdiri dari pembangunan rest area, pusat UMKM, ruko, hotel, pergudangan dan perkantoran.
 - Inisiasi penyediaan kebutuhan dasar seperti katering, laundry, kos, kontrakan dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha desa dengan profesional.
 - Kemudahan permodalan dan pelatihan UMKM.
3. Percepatan kesiapan penyediaan tenaga kerja
- Pengadaan data base tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan industri.
 - Pembangunan gedung BLK beserta sarana prasarana pendukung di Kecamatan Batang.
4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Mengembangkan sarana prasarana pendukung pengukuran kualitas air dan udara di seluruh sungai dan kawasan industri di Kabupaten Batang.
 - Mendorong komitmen perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.

- Memperbanyak tutupan lahan terutama lahan kritis di kawasan lindung di Batang bagian selatan.
 - Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kecamatan Gringsing.
- b. Kebijakan pengembangan kawasan industri
- Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kawasan industri maka disusun kebijakan sebagai berikut :
1. Penyusunan regulasi terkait retribusi dan pajak daerah di kawasan industri.
 2. Penyusunan master plan kawasan penyangga.
 3. Penyusunan RDTR kecamatan Gringsing, Banyuputih, Kandeman dan Batang.
 4. Kerjasama BUMD dengan pelaku industri.
 5. Pengembangan UMKM.
 6. Penguatan kapasitas SDM tenaga kerja.
 7. Pemantapan tata kelola lingkungan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS

7.1 Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran yang telah diproyeksikan. Sebagaimana telah tertuang dalam BAB III, pendapatan daerah Kabupaten Batang di proyeksikan meningkat selama empat tahun kedepan periode 2023-2026.

Beberapa asumsi proyeksi peningkatan pendapatan Kabupaten Batang antara lain meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah sesuai dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru, meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis serta peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima.

Kebutuhan belanja pembangun daerah Kabupaten Batang selama kurun waktu empat tahun ke depan juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan guna mendorong perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan.

Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Tabel 7. 1 Proyeksi APBD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

Kode	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.962.267.259	309.151.566.392	315.420.784.470	319.701.220.050	326.888.357.773
4.1.01	Pajak Daerah	122.460.000.000	126.235.000.000	129.219.250.000	130.080.753.750	132.535.324.591
4.1.02	Retribusi Daerah	28.602.525.600	25.707.500.000	25.920.917.250	26.134.873.730	26.375.259.492
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.417.731.659	13.186.086.292	13.507.808.018	13.907.964.178	14.109.123.461
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	142.482.010.000	144.022.980.100	146.772.809.202	149.577.628.392	153.868.650.229
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.381.880.712.000	1.411.546.233.184	1.459.073.050.359	1.501.168.021.191	1.523.744.967.196
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.252.026.969.000	1.280.867.890.184	1.327.528.877.359	1.368.714.726.691	1.390.337.095.121
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.853.743.000	130.678.343.000	131.544.173.000	132.453.294.500	133.407.872.075
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000	81.484.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.769.326.979.259	1.802.181.799.576	1.855.977.834.829	1.902.353.241.241	1.932.117.324.969
5	BELANJA					
5.1	BELANJA OPERASI	1.303.830.614.126	1.355.215.685.843	1.400.937.229.460	1.403.321.728.002	1.418.743.373.345
5.1.01	Belanja Pegawai	759.310.227.463	779.531.954.209	814.588.484.490	846.459.495.582	853.607.047.633
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.066.007.413	451.191.172.431	456.703.084.155	461.270.114.997	463.576.465.572

Kode	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
5.1.05	Belanja Hibah	79.182.398.000	109.182.398.000	114.182.398.000	79.974.221.980	85.863.875.219
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.271.981.250	15.310.161.203	15.463.262.815	15.617.895.443	15.695.984.921
5.2	BELANJA MODAL	172.395.984.728	148.133.003.258	153.675.103.605	193.132.988.420	200.856.513.964
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.818.387.899	29.892.933.868	30.042.398.538	30.516.002.962	31.063.618.080
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.621.063.337	29.380.927.045	34.527.831.680	65.621.063.337	67.277.273.970
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	86.058.393.492	85.958.756.995	86.189.986.111	90.051.885.972	95.502.145.404
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	718.140.000	2.719.935.350	2.733.535.026	6.760.870.377	6.828.479.080
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	180.000.000	180.450.000	181.352.250	183.165.772	184.997.430
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	341.078.257.405	341.078.257.407	342.783.648.697	349.211.485.182	352.703.600.032
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.594.487.905	9.594.487.907	9.642.460.350	9.738.884.948	9.836.273.799
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	331.483.769.500	331.483.769.500	333.141.188.347	339.472.600.234	342.867.326.233
	Jumlah Belanja	1.829.304.856.259	1.851.926.946.508	1.904.895.981.762	1.953.166.201.604	1.979.803.487.341
	Total Surplus/(Defisit)	(59.977.877.000)	(49.745.146.932,00)	(48.918.146.933,0000)	(50.812.960.363)	(47.686.162.372,000)

Kode	Uraian	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	71.977.877.000	61.745.146.932	60.918.146.933	62.812.960.363	59.686.162.372
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	30.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	101.977.877.000	82.745.146.932	84.918.146.933	86.812.960.363	83.686.162.372
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	30.000.000.000	21.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	42.000.000.000	33.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000	36.000.000.000
	Pembiayaan Netto	59.977.877.000	49.745.146.932	48.918.146.933	50.812.960.363	47.686.162.372
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber : BPKPAD Kab. Batang, 2022

Mendasarkan kerangka pendanaan, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 8.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) urusan pengawasan, serta 15 (limabelas)) unsur kewilayahan

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan pendidikan PAUD, dan Pengelolaan pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang didukung dengan pembangunan atau Rehabilitasi sedang/berat unit sekolah baru, ruang kelas, ruang guru, serta fasilitas sekolah lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator angka partisipasi sekolah dan persentase capaian SPM Pendidikan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal melalui penyusunan kompetensi dasar dan silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Prosentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan melalui Perhitungan, Pemetaan, serta penataan pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase guru berkualifikasi S1/D4.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan, terselenggaranya sistem informasi kesehatan terintegrasi, serta kegiatan penerbitan izin rumah sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan dan RSUD Limpung) dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar /Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun (RSUD Batang).

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten melalui Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, kegiatan pembinaan teknis, pengawasan praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten melalui pembinaan dan pengawasan sumberdaya manusia kesehatan dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten melalui Perencanaan, distribusi, pemerataan, pemenuhan sumber daya manusia

kesehatan sesuai standar Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Kompetensi Teknis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten Kota melalui Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Sumber daya manusia kesehatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase tenaga kesehatan yang berizin (Dinas Kesehatan dan RSUD).

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) melalui pengendalian, pengawasan, penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat

Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) melalui Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dan Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga melalui Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga. Program ini dilaksanakan untuk mencapai Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berizin.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat, dan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang didukung melalui Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator

Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase luas sawah yang beririgasi dan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Batang yang dilayani oleh jaringan irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Kabupaten Batang. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak dan Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman.

c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah untuk mencapai Persentase TPA dalam kondisi baik.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan/ penyediaan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Terpusat (SPAL-T) Skala Permukiman. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam wilayah Kabupaten Batang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air dalam kondisi baik.

f. Program Pengembangan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan Strategis Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase infrastruktur lingkungan perumahan yang layak.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Batang, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemanfaatan gedung yang sesuai dengan peruntukan.

h. Program Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan dilaksanakan melalui : penyusunan rencana, kebijakan, dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan; pengelolaan leger jalan; survei kondisi jalan/ jembatan; pembangunan jalan; pelebaran jalan menuju standar; pelebaran jalan

menambah lajur; rekonstruksi jalan; pemeliharaan berkala jalan; pemeliharaan rutin jalan; pembangunan jembatan; penggantian jembatan; pelebaran jembatan; rehabilitasi jembatan; pemeliharaan rutin jembatan; dan pemeliharaan berkala jembatan. Program penyelenggaraan jalan dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam).

i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Program ini dilakukan untuk rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

j. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan tata ruang di Kabupaten/Kota yang diarahkan untuk mencapai indikator Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase RLH bagi korban bencana/ terdampak program pemerintah.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada : kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui koordinasi dan sinkronisasi pengendalian

penataan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; dan kegiatan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase luasan kawasan kumuh yang tertangani.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dilaksanakan melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk menunjang fungsi hunian serta koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan penanganan gangguan Trantibum Linmas; Penegakan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota; Pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota; Pengembangan kinerja dan kapasitas Satlinmas Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase

gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; Penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani.

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran; Inspeksi peralatan proteksi kebakaran; Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase waktu tanggap "*response time*".

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada pengembangan potensi kesejahteraan sosial dengan meningkatkan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan

Kabupaten/Kota, kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3). Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran tindak kekerasan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal. pelaksanaan program ini guna mencapai indikator persentase Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang berhasil dipulangkan.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar melalui penyediaan permakanan, Sandang, Alat Bantu, Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak, Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pemberian Layanan Data dan Pengaduan dan Pemberian Layanan Rujukan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pengelolaan anak terlantar dan data miskin kabupaten melalui penjangkauan anak-

anak terlantar dan data fakir miskin serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan memenuhi kebutuhan dasar bencana alam dan sosial dengan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang didukung dengan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial dan dengan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan memelihara Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang didukung dengan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, pemeliharaan, serta pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pelaksanaan program ini guna mencapai indikator Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro melalui kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase Kegiatan yang mengacu RTK

b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi melalui kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta melalui kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta serta pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu rasio penduduk yang bekerja

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, serta pemberi Kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya melalui kegiatan pelayanan antar kerja. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase pencari pekerja yang mendapat pekerjaan.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.

Selain itu, melalui kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, program hubungan industrial diarahkan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu penurunan jumlah perselisihan HI.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG; Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG; Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi; Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase ARG pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan; Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan. penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak melalui pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak; Advokasi kebijakan dan

pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga; Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak melalui pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator partisipasi angkatan kerja perempuan

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data melalui penyediaan data gender dan anak serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan data pilah gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelebagaan pha pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha; Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak; Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Program ini ditujukan untuk mencapai indikator cakupan kecamatan layak anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak melalui advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak; Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi melalui penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus; Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan; Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Indikator yang hendak dicapai dengan adanya program ini adalah cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diarahkan pada penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan, termasuk penyediaan infrastruktur lumbung pangan, penyediaan infrastruktur lantai jemur, serta penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya. program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah melalui penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan, penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan, dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia. Selain itu, program ini diarahkan pada pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Skor Pola Pangan Harapan.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan serta penanganan kerawanan pangan. melalui penyusunan,

pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten; pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah. Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam, penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat serta keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok. Adapun indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah rasio desa mandiri pangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program pengawasan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga persentase pengawasan keamanan pangan yang merupakan indikator yang ingin dicapai dari adanya program ini melalui kegiatan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase fasilitasi hak atas tanah program daerah dan penyelesaian permasalahan pertanahan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) melalui penyusunan dan penetapan RPPLH serta pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Batang. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) melalui pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang serta pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator tingkat ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks kualitas air dan indeks kualitas udara.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini dilaksanakan melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam kondisi baik.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan.

- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH serta pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Program ini dilakukan untuk memenuhi indikator persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

Program ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan dengan pelaksanaan sosialisasi terhadap komunitas peduli LH. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup.

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penilaian sekolah peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten.

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah melalui penyusunan masterplan persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan melalui kegiatan pasukan got, koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase penanganan sampah di Kabupaten Batang.

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa kependudukan. Program ini

dilaksanakan untuk mencapai target indikator persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan pencatatan sipil serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen, atas pelaporan peristiwa penting. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan serta pemanfaatan dan penyajian database kependudukan. Program ini dilakukan dengan cara pengolahan dan penyajian data kependudukan untuk mencapai indikator persentase penyajian data kependudukan yang valid.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan desa yang didukung fasilitasi penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenangan kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase budaya desa yang dilestarikan.

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Administrasi Pemerintahan Desa yang didukung dengan adanya fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemdes, fasilitasi pengelolaan keuangan desa serta penyelenggaraan kepala desa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase desa yang tertib administrasi sesuai peraturan yang berlaku.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Desa melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten yang didukung dengan fasilitasi kelembagaan desa, penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan desa, fasilitasi tim penggerak PKK, serta fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam peningkatan PAD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk melalui penyerasian kebijakan pembangunan daerah

Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK); Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK); Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal; Penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal; Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur nonformal dan informal; Implementasi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal; Pelaksanaan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga; Pelaksanaan rapat pengendalian program KKBPK. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk melalui perumusan parameter kependudukan; Penyediaan dan pengolahan data kependudukan; penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga; Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain; Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga; Penyediaan data dan informasi keluarga; Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB; Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian

penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah; dan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator peningkatan cakupan kesertaan Ber-KB

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/ Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL).

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ, penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten, pengelolaan terminal penumpang tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan Jalan

Kabupaten, pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten, peningkatan kapasitas penilai Andalalin, koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin, pengawasan pelaksanaan rekomendasi Andalalin, serta audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota melalui pengelolaan media komunikasi publik; Layanan hubungan media; Pelayanan informasi publik; Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; Monitoring opini dan aspirasi publik; Manajemen komunikasi krisis; dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

b. Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten melalui penyelenggaraan sistem jaringan intra

pemerintah dan terselenggaranya pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kabupaten melalui Pengelolaan pusat data pemerintah daerah; Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan kota cerdas; dan Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase jumlah layanan yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi.

11. Koperasi dan UKM

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten. Melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi dan penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi, program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase koperasi aktif.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator persentase peserta pelatihan dengan predikat baik.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada monitoring, evaluasi dan pendampingan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten serta pembinaan dan pengawasan koperasi. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu

persentase peserta diklat dengan predikat baik.

d. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM

Program ini diarahkan untuk memfasilitasi kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase pertambahan wirausaha baru.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; promosi produk Usaha Kecil dan Menengah; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase produk UMKM yang terstandarisasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan melalui penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana umum penanaman modal daerah Kabupaten/Kota; penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota. Program ini memiliki indikator

kinerja yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan jumlah investor.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Persentase promosi di kabupaten Batang.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota melalui Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; serta Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Persentase ijin yang diterbitkan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal diarahkan pada pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai dengan

adanya program ini adalah persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda melalui koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota; pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda, advokasi, akses pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskriminatif, partisipasi pemuda dalam proses

perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan; pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten/Kota; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan Kabupaten/Kota; pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi; peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda; dan penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera. Selain itu, program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan juga diarahkan pada pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda atau organisasi kepemudaan melalui kemitraan dengan dunia usaha serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase organisasi kepemudaan yang dibina.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga; serta pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini

adalah capaian medali kejuaraan.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan melalui koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik; peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah; pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah; penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah Kabupaten/Kota; penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah; penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; serta partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah penghargaan yang diterima.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah program penyelenggaraan statistik sektoral. Program ini diarahkan pada koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral, membangun metadata statistik sektoral, pengembangan infrastruktur melalui pemeliharaan dan pengembangan sistem statistik sektoral, serta peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase ketersediaan data statistik sektoral.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan dalam urusan persandian adalah program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Program ini diarahkan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten berbasis elektronik dan non elektronik. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan dan kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase festival seni yang dilaksanakan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional.

c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perlindungan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase benda cagar budaya yang dilestarikan.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pembinaan perpustakaan. Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah, pengelolaan arsip statis daerah, serta pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota, penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan, kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota, dan kegiatan pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator indeks tingkat keberadaan dan

keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota; pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota; pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI); serta penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah prosentase capaian produksi perikanan tangkap.

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil dan pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pengelolaan pembudidayaan ikan melalui penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota dan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian produksi perikanan budidaya.

c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian bina kelompok masyarakat pengawas.

d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil melalui penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah Kabupaten/Kota serta penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam satu daerah Kabupaten/ Kota melalui peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai dengan adanya program ini adalah persentase capaian tingkat konsumsi makan

ikan.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata diarahkan pada pengelolaan daya tarik wisata; pengelolaan kawasan strategis pariwisata;; pengelolaan destinasi pariwisata; dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah tingkat Kabupaten/Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program pemasaran pariwisata diarahkan pada pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata Kabupaten/Kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, baik dalam dan luar negeri; peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan wisatawan.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang

berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah melalui pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif melalui pengembangan riset; pengembangan pendidikan; fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; penyediaan infrastruktur; pengembangan sistem pemasaran; pemberian insentif; fasilitasi kekayaan intelektual; perlindungan hasil kreativitas; penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif; dan monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; pelatihan dasar sdm kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa); sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif; fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif, dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif; dukungan fasilitasi menghadapi perkembangan teknologi di dunia Usaha; Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengawasan penggunaan sarana pertanian melalui pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, dan pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota melalui peningkatan kualitas SDG hewan / tanaman. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun.

b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengembangan prasarana pertanian melalui koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya dan pembangunan prasarana pertanian melalui pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan dam parit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya; dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator capaian jumlah hewan yang terobati.

d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan calon/penerima (orang/perusahaan) pendampingan perizinan usaha peternakan

f. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa; dan pembentukan badan usaha milik petani. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian, Persentase validitas data Pertanian, dan Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan tanda daftar gudang; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; dan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai indikator persentase verifikasi teknis.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan melalui penyediaan sarana distribusi perdagangan dan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya melalui pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan dan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui

koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat; Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota melalui pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan; dan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan; Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi; dan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/Kota; Pameran dagang nasional; Pameran dagang lokal; Misi dagang bagi produk ekspor unggulan; Peningkatan citra produk ekspor; dan pembinaan pelaku

usaha ekspor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator nilai ekspor perdagangan.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri

Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang; Pengawasan/penyuluhan metrologi legal. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator Persentase pelaksanaan pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota melalui penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri; koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat; evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini ditujukan untuk mencapai target

indikator persentase peningkatan jumlah pelaku IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/ Kota. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peningkatan jumlah perizinan berusaha sektor industri.

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri Kabupaten/Kota melalui SIINas; dan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah industri dalam SIINas.

6. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan transmigrasi. Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase transmigran yang berhasil ditempatkan.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan melalui penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah, kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat melalui fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat, kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum melalui fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum, serta kegiatan fasilitasi kerjasama daerah melalui fasilitasi kerja sama dalam negeri. Program ini dilaksanakan guna mendukung pencapaian indikator Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu, Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi, Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan

yang difasilitasi, dan Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah yang berhasil difasilitasi

b. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian yang didukung pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, dan Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD; kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang didukung melalui Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, dan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan; kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang didukung melalui Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; serta kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang didukung Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan Energi dan Air. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator Persentase Bagi Hasil BUMD terhadap APBD (Penyertaan Modal), Persentase kebijakan perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti, Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target, dan Persentase lelang melalui e-procurement

c. Program Administrasi Umum

Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD), Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP),

Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah, dan Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD yang diarahkan pada pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, melalui penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah, pembahasan rancangan Perda, penyelenggaraan kajian perundang-undangan, dan fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik. Kemudian, program juga diarahkan pada Pembahasan Kebijakan Anggaran, melalui pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, pembahasan APBD, pembahasan APBD Perubahan, pembahasan Laporan Semester, dan pembahasan Pertanggungjawaban APBD. kemudian juga diarahkan pada pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum, pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur, pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat, pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan, pengawasan penggunaan anggaran, dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Setelah itu program juga diarahkan pada peningkatan kapasitas dprd melalui pendalaman tugas DPRD, publikasi dan dokumentasi dewan, penyediaan tenaga ahli fraksi, penyelenggaraan hubungan masyarakat,

dan penyusunan program kerja DPRD. Arahan lain dari program ini adalah pada penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, melalui kunjungan kerja dalam daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan pelaksanaan reses. Arahan lain yaitu pada pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD, melalui pengawasan kode etik DPRD. yang terakhir program ini diarahkan pada fasilitasi tugas DPRD melalui koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah, dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase peraturan daerah non APBD yang ditetapkan, persentase perda APBD yang ditetapkan, serta persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, melalui Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai Jumlah dokumen

perencanaan dan pendanaan yang disusun.

Kemudian program ini juga diarahkan pada kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui: Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penyusunan Profil pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah data dan informasi yang tersedia.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaporkan evaluasi tepat waktu

Program ini dilakukan untuk mencapai target Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu, persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah, serta Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia. Kegiatan ini untuk memenuhi Jumlah laporan hasil perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Kemudian terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil koordinasi bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Selain itu, terdapat kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melalui: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, dan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencapai target Jumlah laporan hasil perencanaan bidang IPW.

Program ini dilakukan untuk mencapai target persentase indikator program prioritas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target, persentase indikator program pembangunan bidang PSDA yang mencapai target, dan persentase indikator program pembangunan bidang IPW yang mencapai target.

2. Keuangan

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dipenuhi yaitu penyampaian Raperda APBD tepat waktu.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dilaksanakan melalui penyusunan standar harga penatausahaan barang milik daerah; pengamanan barang milik daerah; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah; serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase tersusunnya data aset Pemerintah Daerah menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan, dan kondisinya.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;

penetapan wajib pajak daerah; pelayanan dan konsultasi pajak daerah; penagihan pajak daerah; serta pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Program ini memiliki indikator yang harus dicapai yaitu persentase peningkatan penerimaan PAD, penyampaian raperda pertanggungjawaban tepat waktu, dan persentase realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program kepegawaian daerah. Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, kegiatan mutasi dan promosi ASN, kegiatan pengembangan kompetensi ASN, dan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah program pengembangan sumber daya manusia. Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis serta kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi indikator persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, melalui Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, dan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan. kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi target Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian Program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, melalui Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kajian bidang sosial dan kependudukan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Selain itu, program ini juga diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan, melalui Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan dan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah rekomendasi kegiatan kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang mendukung perencanaan pembangunan.

Serta program ini juga diarahkan pada kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, melalui Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan

Inovasi, Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif, Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi target Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.

Program ini ini dilakukan untuk memenuhi target Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti.

F. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan internal melalui penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu melalui penyediaan bahan logistik kantor. Program ini ditujukan untuk mencapai target indikator persentase jumlah pemeriksaan yang dilakukan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada pendampingan dan asistensi melalui penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan melalui penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; Pengawasan kinerja pemerintah daerah; Reviu laporan

kinerja; Reviu laporan keuangan; Pengawasan desa; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Kerjasama pengawasan internal; Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah; Pengawasan dengan tujuan tertentu; Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah; Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi; Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi; Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; dan Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan. program ini ditujukan untuk mencapai indikator Level SPIP.

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan Batang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

2. Kecamatan Wonotunggal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan

tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

3. Kecamatan Bandar

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

4. Kecamatan Blado

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui

kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

5. Kecamatan Bawang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

6. Kecamatan Kandeman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui

kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

7. Kecamatan Tulis

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

8. Kecamatan Subah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui

kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

9. Kecamatan Pecalungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

10. Kecamatan Tersono

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui

kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

11. Kecamatan Limpung

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

12. Kecamatan Banyuputih

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui

kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

13. Kecamatan Gringsing

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

14. Kecamatan Warungasem

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui

kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

15. Kecamatan Reban

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang didukung dengan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi pemberdayaan desa yang didukung Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang didukung melalui Peningkatan

Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan dalam kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang didukung dengan mensinergikan dengan Kepolisian, Tentara dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan.

d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan melalui kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target dari indikator Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan dalam kegiatan Fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang didukung dengan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa serta fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset desa. program ini dilaksanakan guna mencapai indikator Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik.

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi pancasila dan karakter kebangsaan melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target persentase masyarakat yang mengikuti Wasbang.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang berperan aktif mendukung pemerintah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.

d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase masyarakat yang paham ketahanan Ekososbud.

e. Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target Persentase penurunan konflik sosial.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase Persentase ketercapaian layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah; Persentase unit kerja internal yang terlayani; Persentase capaian kinerja Perangkat daerah yang mencapai target.

Berikut ini pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagunya :

Tabel 7. 2 Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Batang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Non Urusan															
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							448.809.163.387		494.602.021.543		540.148.271.301		542.059.517.057		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Survei Kepuasan Masyarakat	85,02	85,15	85,3		85,45		85,6		85,75		86	
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,49	95,51	96		96,25		96,5		97		97	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	86,81	88	90		92		93		95		95	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	60	60	65		70		75		80		80	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							107.494.609.383		107.958.911.842		108.649.768.927		109.063.370.475		Dinas Kesehatan
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	NA	95	96		97		98		99		99	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	85,33	87	90		92		94		96		96	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	NA	86	88		90		92		94		94	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	NA	10	12		14		16		18		18	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	NA	92	93		94		95		96		96	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							6.805.386.808		6.915.067.564		6.624.661.061		6.691.763.052		RSUD Limpung
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	97	98	98		98		98		98		98	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	90	91	92		93		94		95		95	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor												
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100												
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	97	98	98		99		99		99		99	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							27.671.813.786		27.671.813.786		27.671.813.786		27.671.813.786		RSUD Batang
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	98,4	99	99,5		99,6		99,7		99,8		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0,28	10	20		30		45		60		60	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							19.177.339.668		19.062.647.445		18.716.922.512		18.515.048.132		DPUPR
		Persentase capaian kinerja program DPUPR	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	62,5	62,5	85,71		90,1		93,44		98,69		98,69	
		persentase capaian kinerja anggaran program/kegiatan DPUPR	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,77	93,83	93,94		93,98		94,1		94,24		94,24	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ASN DPUPR yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	cakupan layanan operasional kantor	14,89	14,9	15,1		15,2		15,3		15,4		15,4	
		cakupan layanan operasional kantor	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	84	84	84		83,9		83,98		84,1		84,1	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.200.072.947		4.200.072.947		4.200.072.947		4.200.072.947		DPRKP
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	65	65	66		67		68		69		69	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95,08	97	98		99		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,13	97	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	NA	NA	15		20		25		30		80	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	98,68	100	100		100		100		100		100	
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.651.485.213		4.433.317.635		4.433.317.635		4.380.526.855		Satpol PP
		Persentase capaian kinerja program SATPOL PP	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93,33	95	96		97		97		98		98	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,33	95	96		97		97		98		98	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97	97,5	98		98,5		98,5		99		99	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	80	81	82		83		84		85		85	

[illegible]

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.593.478.379		2.375.107.624		2.190.830.142		2.020.235.502		Dinas Sosial
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	95	95	96		97		98		99		99	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95	95,25	95,5		96		96,25		96,5		96,5	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	80	81	82		83		84		85		85	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	60	65	70		75		80		85		85	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	85	85,25	85,5		86		86,25		86,5		86,5	
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							6.801.681.170		5.801.681.170		3.801.681.170		6.801.681.170		Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	98,62	98,7	98,7		98,75		98,8		98,8		98,8	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100	100	95		95		95		95		95	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,27	98,4	98,4		98,45		98,5		98,55		98,55	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	50	60	60		60		65		70		70	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	98,28	98,35	98,4		98,45		98,5		98,55		98,55	
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.481.024.612,00		4.189.252.044,00		4.350.902.474		3.808.634.726		DP3AP2KB
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93,56	94	94,25		94,45		95		95		95	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran	97,82	97,85	97,89		97,9		97,9		97,9		97,9	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				program perangkat daerah) x 100												
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,04	96,15	96,5		96,7		96,8		97,05		97,05	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	74,44	74,44	77,78		80		83,33		88,89		88,89	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							14.459.891.515		14.410.645.471		14.344.727.829		14.268.291.958		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	86	86,3	85,12		86,13		86,24		86,34		86,34	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	87,82	87,85	87,89		87,91		88,23		88,24		88,24	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,04	96,15	96,5		96,7		97,9		97,9		97,9	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	74,44	74,44	77,78		80		83,33		88,89		88,89	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	93	93,4	93,5		94,5		94,6		95,6		95,6	
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							11.834.599.762		11.834.599.762		11.634.599.762		12.134.599.762		Dinas Lingkunga n Hidup
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	87	87	90		91		93		95		95	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	80	85	88		90		92,5		92,5		92,5	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	85,5	88,5	90		92,5		93		93,5		93,5	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	80	83	85		88		89		90		90	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	85	85	87,5		90		93		95		95	
12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							5.055.680.144		4.891.753.372		4.891.753.372		4.891.753.372		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah		(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	-	-	-		-		-		-		-	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94,01	94,02	94,03		94,04		94,05		94,05		94,05	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	95	95,01	95,02		95,03		95,04		95,05		95,05	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	10	10	11		12		13		14		14	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	94,01	94,02	94,03		94,04		94,05		94,06		94,06	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							3.391.428.139		3.248.353.611		3.248.353.611		3.263.922.631		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	85	86	90		95		95		95		95	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95	96	96		96		96		96		96	
		cakupan layanan operasional kantor	Bulan	cakupan layanan operasional kantor	12	12	12		12		12		12		12	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0	0	25		25		25		25		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	92,46	93	95		95		95		95		95	
14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							21.500.330.914		21.279.726.334		21.080.441.139		21.080.441.139		Dinas Perhubungan
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	98,49	99	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	98,49	99	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,24	99	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	20	30	50		60		70		80		80	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	96,85	99	100		100		100		100		100	
15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.486.944.332		4.784.650.144		5.101.565.643		5.453.778.931		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase capaian kinerja program Diskominfo	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	75	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran	75	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				program perangkat daerah) x 100												
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	75	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	-	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	-	-	-		-		-	-	-	-	-	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	75	100	100		100		100		100		100	
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							9.936.018.155		9.810.444.982		9.715.869.708		9.796.423.742		Disperindagkop dan UKM
		Persentase capaian kinerja program Disperindagkop dan UKM	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	90	92	92		92		92		92		92	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	90	92	92		92		92		92		92	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,18	96,35	96,51		96,65		96,81		96,95		96,95	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	-	-	5,3		5,5		5,7		5,8		5,8	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	96,18	96,35	96,51		96,65		96,81		96,95		96,95	
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.570.762.837		4.517.384.362		4.304.103.778		4.379.820.728		DPMPTSP
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98,61	99	100		98		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	98,61	99	100		98		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,61	99	100		98		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	-	-	5		5		7		10		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	98,61	99	100		98		100		100		100	
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							5.370.353.691		5.376.056.940		5.370.353.691		5.489.361.402		Disparpora
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	95	95	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95	98	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	95	98	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	10	12	15		20		23		30		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	99	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.159.761.941		4.049.994.815		3.792.053.427		3.745.218.639		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	NA	80	83		85		87		89		89	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,71	93,73	93,75		93,77		93,79		93,82		93,82	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97,62	97,65	97,67		97,7		97,72		97,75		97,65	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	50	0	50		55		60		65		65	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	94,61	100	100		100		100		100		100	
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							7.188.762.134		7.120.880.771		7.173.176.238		7.143.297.247		Dislutkann ak
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	95,43	96	96,7		97		98		98,5		98,5	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	71	93	93,5		94		94,5		95		95,5	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	85	90	96		96,7		97,3		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	5	10	10		15		20		30		30	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							5.008.233.095		4.615.763.843		4.611.262.347		4.695.351.654		Bapelitbang
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	89	89	82		83		85		86		86	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	94	97	97		97		97		97		97	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0	0	25		50		75		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
22	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							4.803.374.440		4.803.374.440		4.803.374.440		4.803.374.440		Badan Kepegawai an Daerah
		Persentase capaian kinerja program BKD	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti BinteK, Sosialisasi dan workshop purna tugas	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	75	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
23	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							16.847.029.739		17.248.993.831		19.331.727.287		18.091.466.050		BPKPAD
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	88	92	94		95		97		98		98	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	85	89	92		94		96		98		98	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	92	92	94		94		96		96		96	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							20.451.948.228		20.384.810.051		20.437.657.035		20.278.074.424		Sekretariat Daerah
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	90	90	90		90		90		90		90	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	90	90	90		90		90		90		90	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	85	85	85		85		85		85		85	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	90	90	90		90		90		90		90	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	90	90	90		90		90		90		90	
25	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							5.795.000.000		5.995.000.000		6.195.000.000		6.395.000.000		Sekretariat DPRD
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	12	12	12		12		12		12		48	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	83,33	100	100		100		100		100		100	
		Persentase administrasi keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
26	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.437.396.491		2.469.552.431		2.517.536.268		2.517.536.268		Badan Kesbangpo 1
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	90	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0	10	10		10		10		10		50	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							11.162.415.258		9.236.574.353		9.619.822.495		10.072.233.045		Inspektora t
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	96,75	96,25	95		95		95		95		95	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97	95	95		95		95		95		95	
		cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor	95	95	95		95		95		95		95	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100	100	95		95		95		95		95	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	95	95	95		95		95		95		95	
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							10.248.107.352		10.177.981.952		10.191.726.093		10.120.713.443		Kecamatan Batang
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93	0	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	100	0	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	bulan	cakupan layanan operasional kantor	12	12	12		12		12		12		12	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0	0	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	0	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.384.323.634		2.384.323.634		2.384.323.634		2.384.323.634		Kecamatan Tulis
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98	99	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	98	99	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	99	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	60	70	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
30	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.618.231.983		1.618.231.983		1.618.231.983		1.618.231.983		Kecamatan Warungasem
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	96,7	98	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	90,45	91,56	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	25	30	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	97	100	100		100		100		100		100	
31	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.150.909.310		1.034.182.621		1.034.182.621		1.009.082.355		Kecamatan Pecalongan
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	171,75	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	261	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	132	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0	100	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	96	100	100		100		100		100		100	
32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.991.182.974		1.991.182.974		1.991.182.974		1.991.182.974		Kecamatan Bawang
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98	99	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	96	98	99		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97	98	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	98	98	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	99	99	100		100		100		100		100	
33	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.825.584.525		1.825.584.525		1.825.584.525		1.825.584.525		Kecamatan Wonotunggal
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93	100	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	93	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	0	100	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	60	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.166.379.304		2.166.379.304		2.166.379.304		2.166.379.304		Kecamatan Bandar
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	98	98	98		98		98		98			
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	98	98	100		100		100		100			
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98	100	100		100		100		100			
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100			
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100			
35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.709.608.588		1.709.608.588		1.709.608.588		1.709.608.588		Kecamatan Blado
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,71	91,67	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,14	98,86	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	25	30	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.886.232.351		1.886.232.351		1.886.232.351		1.886.232.351		Kecamatan Reban
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	93,05	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	93,06	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	96,83	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.728.375.059		1.778.573.392		1.831.281.643		1.886.625.325		Kecamatan Kandeman
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	99,92	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	96,63	98,05	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,96	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	50	60	80		90		90		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.640.459.656		1.596.224.058		1.651.551.380		1.558.945.978		Kecamatan Tersono
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95,51	97,5	98		98,5		99		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	97,56	98,59	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	60	65	30		60		80		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.754.548.600		1.754.548.600		1.754.548.600		1.754.548.600		Kecamatan Gringsing
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97	98,5	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98	100	100									
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	70	80	100		100		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
40	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.691.347.473		1.688.347.473		1.680.914.210		1.673.136.793		Kecamatan Subah
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				kinerja program perangkat daerah) x 100												
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	97,9	98	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	92,45	97	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	50	60	70		80		100		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
41	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.745.092.381		1.745.092.381		1.745.092.381		1.745.092.381		Kecamatan Limpung
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	99,92	100	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	96,63	98,05	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	98,96	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	50	60	80		90		90		100		100	
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
42	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							1.792.132.742		1.939.830.880		2.102.298.831		2.281.013.579		Kecamatan Banyuputih
		Persentase rata-rata capaian kinerja program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja program perangkat daerah : target kinerja program perangkat daerah) x 100	95,5	97	100		100		100		100		100	
		persentase capaian kinerja anggaran program Perangkat Daerah	%	(capaian kinerja anggaran program perangkat daerah : target kinerja anggaran program perangkat daerah) x 100	95,5	97	100		100		100		100		100	
		cakupan layanan operasional kantor	%	cakupan layanan operasional kantor	90,6	90,6	100		100		100		100		100	
		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan	%	(Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai kompetensi yang dibutuhkan : jumlah ASN di perangkat daerah) x 100	60	65	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	%	(Jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang selesai tepat waktu : jumlah laporan administrasi kepegawaian dan keuangan yang diselesaikan) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1	Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
1.01	Pendidikan															
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan							175.931.371.590		171.670.265.478		167.561.792.009		163.602.894.868		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Sekolah (SPM)	%	Jumlah peserta didik usia 5-15 tahun : jumlah penduduk usia 5-15 tahun x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase capaian SPM Pendidikan (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Pendidikan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Pendidikanx 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum							200.000.000		250.000.000		300.000.000		300.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	80	85	88		90		95		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan							1.200.000.000		1.300.000.000		1.400.000.000		1.500.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru berkualifikasi S1/D4	%	Jumlah guru berkualifikasi S1/D4 : jumlah guru seluruhnya x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.02	Kesehatan															
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							48.786.889.092		50.991.362.070		56.151.046.477		59.309.761.241		Dinas Kesehatan
		Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	71,21	85,5	100		100		100		100		100	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							490.440.000		490.440.000		490.440.000		490.440.000		Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman							620.726.000		620.726.000		620.726.000		620.726.000		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	70,57	71	80		82		84		85		85	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							629.650.000		629.650.000		629.650.000		654.650.000		Dinas Kesehatan
		Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	10,74	11,24	11,74		12,24		12,74		13,24		13,24	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							19.902.766.547		21.007.982.460		21.924.571.725		23.595.897.213		RSUD Limpung
		Persentase penyediaan jenis layanan SPM Bidang Kesehatan	%	Jumlah jenis layanan SPM Bidang Kesehatan yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Bidang Kesehatan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							300.000.000		325.000.000		350.000.000		375.000.000		RSUD Limpung
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan							150.000.000		175.000.000		200.000.000		250.000.000		RSUD Batang
		Persentase tenaga kesehatan yang berijin	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	100	100		100		100		100		100	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan							85.878.777.861		87.006.268.249		88.441.383.156		90.759.503.809		RSUD Batang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Upaya Kesehatan Masyarakat															
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar / Jumlah gedung, sarana dan prasarana yang diadakan / jumlah gedung yang dibangun	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	77,55	80	83		86		88		90		90	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang															
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							14.339.227.250		14.814.753.812		17.518.257.793		19.042.527.223		DPUPR
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota x 100	0	3,94	4,23		4,25		4,28		4,3		4,3	
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							7.318.185.550		7.546.000.000		7.775.000.000		8.070.000.000		DPUPR

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum layak : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman	%	Jumlah Rumah Tangga yang mendapat akses air minum aman : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional							2.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		2.000.000.000		DPUPR
		Persentase TPA dalam kondisi baik	%	Jumlah TPA dalam kondisi baik : Jumlah TPA seluruhnya x100	NA	NA	100		100		100		100		100	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah							4.840.000.000		5.165.844.828		5.368.187.069		5.583.596.422		DPUPR
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (indikator SPM)	%	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi : Jumlah Rumah Tangga Seluruhnya x100	100	100	100		100		100		100		100	
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase							1.000.000.000		5.000.000.000		4.000.000.000		5.000.000.000		DPUPR
		Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	0,44	51,21	57,67		64,41		71,43		77,4		77,4	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman							1.675.500.000		1.675.500.000		1.675.500.000		1.675.500.000		DPUPR
		Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	47,04	50,04	53,04		56,04		59,04		62,04		62,04	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung							4.580.053.000		4.480.053.000		5.680.053.000		21.380.053.000		DPUPR
		Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan							77.780.694.700		70.696.780.500		78.514.469.500		85.047.452.700		DPUPR
		Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	46,59	50,5	55,5		60,5		65,5		70,5		70,5	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		DPUPR
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	12,5	12,5		12,5		12,5		12,5		12,5	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		DPUPR
		Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	NA	NA	45,9		52,4		75,47		95,7		95,7	
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman															
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan							50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		DPRKP
		Persentase RLH bagi korban bencana / terdampak program pemerintah	%	Jumlah rumah korban bencana yg ditangani : Jumlah Rumah Korban Bencana seluruhnya x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman							5.333.418.073		5.333.418.073		5.483.418.073		5.583.418.073		DPRKP
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh yang tertangani	%	Jumlah Luas kawasan kumuh yang tertangani : Jumlah luas kawasan kumuh seluruhnya x 100	62	62	62,5		63		63,5		64		64	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)							2.837.000.000		2.637.000.000		2.637.000.000		2.637.000.000		DPRKP
		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah Perumahan yang sdh dilengkapi PSU : Jumlah Perumahan se Kab. Batang x 100	72	75	78		81		84		86		86	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat															
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum							1.037.500.000		994.000.000		5.584.000.000		994.000.000		Satpol PP
		Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani	%	Jumlah laporan gangguan trantib yang tertangani : jumlah seluruh laporan gangguan trantib*100	100	100	100		100		100		100		100	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana							915.125.460		1.330.125.460		897.218.000		897.218.000		BPBD
		Persentase Korban Bencana Alam Yang ditangani (indikator SPM)	%	Jumlah korban bencana yang ditangani : Jumlah Korban Bencana X 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase Jumlah Desa/Kel yang mendapat Pelayanan Penanggulangan Bencana (Indikator SPM)	%	(Jml desa Terkena bencana mendapat penanggulangan bencana : Jml. desa terkena bencana) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran							1.805.040.000		1.765.040.000		1.765.040.000		3.365.040.000		Satpol PP
		Persentase waktu tanggap "respon time" (indikator SPM)	%	Jumlah penanganan kebakaran sesuai respon time : jumlah kejadian kebakaran*100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06	Sosial															
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial							590.560.000		590.550.000		590.550.000		590.550.000		Dinas Sosial
		Cakupan pengembangan Potensi sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten (indikator SPM)	%	Jumlah Potensi sumber Kesejahteraan Sosial ditingkatkan kemampuannya : Jumlah PSKS di Daerah Kabupaten X 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Dinas Sosial
		Persentase Warga Negara Migran korban tidak kekerasan yang berhasil dipulangkan	%	jumlah warga negara migran yang berhasil dipulangkan : Jumlah warga migran korban kekerasan x 100	25	30	35		40		45		50		50	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial							237.500.550		237.500.550		237.500.550		237.500.550		Dinas Sosial
		Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah PMKS di Kabupaten Batang x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial							2.052.631.350		2.112.631.350		2.112.631.350		2.112.631.350		Dinas Sosial
		Persentase capaian layanan pemenuhan SPM sosial (SPM)	%	Jumlah jenis layanan SPM Urusan sosial yang tersedia : jumlah total jenis layanan SPM Urusan sosial x 100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.06.06	Program Penanganan Bencana							631.186.000		631.186.000		631.186.000		631.186.000		Dinas Sosial
		Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (SPM)	%	jumlah korban bencana alam dan sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya : Jumlah korban bencana alam dan sosial x 100	100	100	100		100		100		100		100	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							80.719.000		80.719.000		80.719.000		80.719.000		Dinas Sosial
		Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik : Jumlah Taman Makam Pahlawan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
2.07	Tenaga Kerja															
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja							30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD : Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	NA	NA	100		100		100		100		100	
2.07	Program Pelatihan Kerja Dan							1.066.676.000		916.676.000		916.676.000		966.676.000		Dinas Ketenagakerjaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.03	Produktivitas Tenaga Kerja															
		Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	68,86	NA	70		72		74		76		76	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja							144.800.500		144.800.500		144.800.500		144.800.500		Dinas Ketenagakerjaan
		Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah pencari kerja terdaftar x 100	26	0	31		36		41		46		46	
2.07.05	Program Hubungan Industrial							191.361.750		191.361.750		191.361.750		191.361.750		Dinas Ketenagakerjaan
		Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 100	5,13	0	14,8		14,6		14,4		14,2		14,2	
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan							25.000.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000		DP3AP2KB
		Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada Program Kegiatan x 100	4,79	2,86	3		3,2		3,4		3,5		3,5	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan							138.800.000		138.800.000		142.800.000		140.800.000		DP3AP2KB

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Index	Jml Perempuan Yg Mengalami Kekerasan : Jml Penduduk Perempuan	100	100	100		100		100		100		100	
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga							75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		DP3AP2KB
		Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	jml lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan/jml lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga x 100	NA	NA	14,29		21,43		21,43		28,57		28,57	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak							2.500.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000		DP3AP2KB
		cakupan data pilah gender dan anak	%	jumlah jenis data yang tersedia : jumlah jenis data yang dibutuhkan x100	NA	NA	100		100		100		100		100	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)							45.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		DP3AP2KB
		cakupan kecamatan layak anak	%	Jml Kec yg sudah layak anak : jml kecamatan x 100	40	66,67	73,33		80		86,67		93,33		93,33	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak							7.500.000		7.500.000		7.500.000		10.500.000		DP3AP2KB

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	%	Jml aduan kekerasan thd perempuan yg trtangani : Jml kekerrasan thd perempuan yg dilaporkan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.09	Pangan															
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan							3.630.000.000		3.993.000.000		4.292.300.000		4.572.776.808		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan keamndirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5	12,5	12,5		12,5		12,5		12,5		12,5	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							216.100.000		232.710.000		250.981.000		271.079.100		Dinas Pangan dan Pertanian
		Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	88,4	89,1	89,3		89,5		89,7		89,8		89,8	
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan							19.800.000		21.780.000		23.958.000		26.353.800		Dinas Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x 100	14	14	15		16		17		18		18	
2.09.05	Prorgram Pengawasan Keamanan Pangan							34.100.000		37.510.000		41.261.000		45.387.100		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x100	100	100	100		100		100		100		100	
2.10	Pertanahan															
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		DPRKP
		Persentase permohonan fasilitasi pernyelesaian permasalahan pertanahan yang tertangani	%	jumlah permohonan yang terfasilitasi : jumlah permohonan tanah seluruhnya x 100	65	70	75		80		85		90		90	
2.11	Lingkungan Hidup															
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup							180.000.000		180.000.000		180.000.000		180.000.000		Dinas Lingkungana Hidup
		Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	0	0	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup							140.600.000		140.600.000		140.600.000		190.600.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas air (Permendagri 86/2017)	50	50	50		50		50		50		50	
		Indeks Kualitas Udara	indeks	Hasil perhitungan indeks kualitas udara (Permendagri 86/2017)	80	80	80		80		80		80		80	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)							285.799.200		285.799.200		285.799.200		285.799.200		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase RTH dalam kondisi baik	%	Jumlah RTH yang dikelola dalam kondisi baik : jumlah RTH eksisting x 100	47	49	50		60		70		70		70	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan							65.762.400		65.762.400		65.762.400		65.762.400		Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Lingkungan Hidup (PPLH)															
		Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani : Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	50	50	55		60		65		70		70	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat							96.849.900		96.849.900		96.849.900		96.849.900		Dinas Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Pendidikan Dunia yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	70	80	90		90		100		100		100	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan							921.324.850		973.467.813		881.435.970		2.569.696.193		Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbulan sampah x 100	45	50	60		70		80		85		85	
2.12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil															
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk							695.997.632		472.797.632		472.797.632		472.797.632		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	[(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas) + (Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th) : 2] x 100	60	70	75		85		94,5		100		100	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil							343.151.088		343.151.088		324.000.000		324.000.000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	[(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon) + (jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th) : 2] x 100	97	97	97,2		97,4		97,6		97,8		97,8	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							1.114.978.584		1.114.978.584		643.928.747		643.928.747		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	(Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan) x 100	95	95	95,2		95,4		95,6		95,8		95,8	
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
2.13.02	Program Penataan Desa							45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	N/A	N/A	25		40		60		80		80	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa							24.230.169.820		23.866.156.800		36.240.206.800		23.934.791.175		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibangun dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	N/A	43,93	46,03		46,03		56,49		56,49		56,49	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat							3.432.206.000		3.545.786.520		3.490.857.395		3.622.852.794		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	N/A	60	65		70		75		80		80	
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk							242.994.000		187.994.000		186.994.000		185.994.000		DP3AP2KB
		Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)							7.165.495.150		7.663.209.158		7.950.823.115		8.220.963.521		DP3AP2KB
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	Jml peserta KB Aktif Modern / Jml Pasangan Usia Subur x 100%	72,34	72,84	73,34		73,84		74,34		74,84		74,84	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	Jml PUS yg ingin ber - KB tetapi tidak terlayani/Jml Pasangan Usia Subur x 100%	15,91	15,06	14,21		13,36		12,51		11,66		11,66	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							4.260.980.000		4.260.980.000		4.209.980.000		4.569.120.000		DP3AP2KB

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Cakupan pembangunan ketahananandan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina : Jumlah Keluarga x 100	77,35	77,85	77,71		78,21		78,71		79,21		79,21	
2.15	Perhubungan															
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)							5.835.490.760		5.835.490.760		5.835.490.760		5.585.123.951		Dinas Perhubungan
		Persentase terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, aman, dan selamat	%	Jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dilaksanakan : jumlah kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang ditetapkan x 100	78,8	85	85		87		87		87		87	
2.16	Komunikasi dan Informatika															
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik							1.146.648.650		1.146.648.650		1.146.648.650		1.146.648.650		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	60	63	66		69		72		75		75	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika							882.000.000		875.379.550		895.000.000		895.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	62	65	68		70		73		75		75	
2.17	Koperasi dan UKM															
2.17.04	Program Penilaian dan Kesehatan KSP/USP Koperasi							50.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	63,83	64,52	65		68		68		70		70	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian							324.000.000		345.220.500		367.502.025		367.502.025		Disperindagkop dan UKM
		persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	90	90		90		100		100		100	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Disperindagkop dan UKM
		persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	90	90		90		100		100		100	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil menengah UMKM							50.000.000		45.000.000		5.000.000		5.000.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 x 00	8,06	10,45	10		10		12		12		12	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.17.08	Program Pengembangan UMKM							150.000.000		45.000.000		50.000.000		45.000.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	4	15,38	15		15		20		20		20	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi							100.410.000		100.410.000		100.410.000		123.805.601		Disperindagkop dan UKM
		Presentase Koperasi yang diawasi dan diperiksa	%	Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa pada tahun N : Jumlah Koperasi pada tahun n x 100	45,74	47,87	45,21		45,21		50,53		50,53		50,53	
2.18	Penanaman Modal															
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal							50.000.000		40.000.000		30.000.000		30.000.000		DPMPTSP
		Persentase peningkatan jumlah investor	%	Jumlah investor tahun n dikurangi Jumlah investor tahun (n-1) : jumlah investor tahun n x 100	10	15	20		40		60		80		80	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal							30.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		DPMPTSP
		Persentase promosi di kabupaten Batang	%	Jumlah promosi yang direncanakan : jumlah promosi yang dilaksanakan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.18	Program Pelayanan							750.000.000		700.000.000		630.000.000		570.000.000		DPMPTSP

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.04	Penanaman Modal															
		Persentase ijin yang diterbitkan	%	Jumlah pemohon ijin usaha : jumlah ijin yang diterbitkan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal							413.063.700		433.716.885		455.402.729		478.172.866		DPMPTSP
		Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal	%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM : jumlah perusahaan x100	6	7	7,5		7,5		8		8		8	
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal							100.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		DPMPTSP
		Persentase data dan informasi penanaman modal yang tersedia	%	Jumlah pemberian pelayanan data : jumlah pemohon data x 100	42	45	45		45		45		45		45	
2.19	Kepemudaan dan Olahraga															
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan							490.000.000		500.000.000		501.864.846		560.000.000		Disparpora
		Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	19	19	25		32		39		45	-	45	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya							2.100.000.000		1.800.000.000		1.900.000.000		2.080.000.000		Disparpora

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Saing Keolahragaan															
		capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang didapat selama 1 Tahun	23	30	35		40		45		50		50	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan							200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		Disparpora
		Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima : jumlah kegiatan yang diikuti X 100	0	10	10		10		10		10		10	
2.20	Statistik															
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							189.480.000		189.480.000		182.137.950		182.137.950		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	100	100		100		100		100		100	
2.21	Persandian															
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi							109.000.000		109.000.000		100.000.000		100.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.22	Kebudayaan															
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan							400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase festival seni yang dilaksanakan	%	jumlah festival seni yang diselenggarakan pada tahun berjalan (n) :jumlah festival seni yang ditargetkan x 100	80	80	100		100		100		100		100	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional							896.500.000		996.500.000		896.500.000		996.500.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	%	jumlah komunitas / sanggar kesenian yang difasilitasi : jumlah komunitas / sanggar seni yang terdaftar x 100	65	65	70		70		75		80		80	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya							100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	%	Jumlah benda cagar budaya yang dilestarikan : dengan jumlah seluruh benda cagar budaya x 100	65	70	75		80		85		90		90	
2.23	Perpustakaan															
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan							440.767.580		440.767.580		440.767.580		440.767.580		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	(Jumlah peningkatan pengunjung : Jumlah pengunjung sebelumnya) x 100	4370	0,16	0,16		0,16		0,16		0,16		0,16	
2.24	Kearsipan															
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip							111.213.950		111.213.950		111.213.950		111.213.950		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (IKK outcome)	indeks	T = (a + i + s + j)/4 T = tingkat ketersediaan arsip, a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, i = tase arsip inaktiv yang telah dibuatkan daftar arsip, s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik, j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	18,37	75,2	75,3		75,4		75,5		75,6		75,6	
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip							53.144.830		53.144.830		53.144.830		53.144.830		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK outcome)	indeks	T = (m + b + g + a + c + i)/6 m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPKg = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK, a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK, i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	NA	22	22,2		22,4		22,6		22,8		22,8	
3	Urusan Pilihan															
3.25	Kelautan dan Perikanan															
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap							3.813.000.000		3.813.000.000		3.813.000.000		3.813.000.000		Dislutkannak

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Capaian Produksi Perikanan Tangkap	%	(Realisasi Capaian Produksi Perikanan Tangkap : Target Produksi Perikanan Tangkap) x 100	78	100	94,5		96		97		98		98	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya							1.582.850.000		1.582.850.000		1.582.850.000		1.582.850.000		Dislutkannak
		Persentase Capaian Produksi Perikanan Budidaya	%	(Realisasi Capaian Produksi Perikanan Budidaya : Target Produksi Perikanan Budidaya) x 100	45	90	92		93		94		95		95	
3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Dislutkannak
		Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	25	80	100		100		100		100		100	
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan							25.000.000		183.392.500		349.704.625		524.332.357		Dislutkannak
		Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	94	95	95		96		98		100		100	
3.26	Pariwisata															
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							2.000.000.000		2.000.000.000		2.300.000.000		2.100.000.000		Disparpora

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 x 100	22,74	13	15		17		19		20		71	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata							500.000.000		640.000.000		670.000.000		600.000.000		Disparpora
		Persentase peningkatan wisatawan	%	Jumlah wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100	24,26	15	17		20		22		25		84	
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							200.000.000		270.000.000		370.000.000		200.000.000		Disparpora
		Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI :jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	NA	10	15		20		25		30		30	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif							300.000.000		370.000.000		300.000.000		400.000.000		Disparpora
		Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	NA	25	30		35		40		45		45	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27	Pertanian															
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							1.420.519.100		1.426.687.188		1.519.287.342		1.648.805.696		Dinas Pangan dan Pertanian
		Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,012	0,0104	0,0104		0,0103		0,0108		0,0106		0,0106	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian							2.218.805.000		2.242.805.000		2.267.805.000		2.298.805.000		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100	100	100		100		100		100		100	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							140.000.000		140.000.000		140.000.000		140.000.000		Dislutkannak
		Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	85	100	100		100		100		100		100	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		Dinas Pangan dan Pertanian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)x100	100	100	100		100		100		100		100	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Dislutkannak
		Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian							310.000.000		341.000.000		379.000.000		418.000.000		Dinas Pangan dan Pertanian
		Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							120.000.000		120.000.000		20.000.000		20.000.000		Dislutkannak
		Prosentae Capaian Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan	%	(Realisasi Populasi Ternak dan Produksi Hasil Peternakan : Target) x 100	60	80	85		85		85		85		85	
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian							1.065.000.000		1.065.000.000		1.065.000.000		1.065.000.000		Dislutkannak
		Capaian Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	%	(Realisasi Peningkatan Prasarana Pertanian yang Dilakukan Pembangunan, Perawatan dan Rehabilitasi : Target) x 100	0	100	100		100		100		100		100	
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Dislutkannak
		Persentase Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan Ternak yang Terobati : Target Hewan Ternak yang Terobati) x 100	85	100	100		100		100		100		100	
3.30	Perdagangan															
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	6	20	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan							3.333.459.000		2.943.459.000		2.983.459.000		3.383.459.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/renovasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x100	27,27	72,73	36,36		36,36		36,36		36,36		36,36	
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							20.000.000		20.000.000		15.000.000		15.000.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x 100	NA	NA	75		75		75		75		75	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor							5.000.000		5.000.000		10.000.000		10.000.000		Disperindagkop dan UKM
		nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan - nilai impor pada tahun n kabupaten kota	52.037.256	56.742.353	57.877.183		59.034.726		60.215.421		61.419.729		61.419.729	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen							70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		Disperindagkop dan UKM
		Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera /tera ulang : Potensi UTTP x 100	66,8	74,74	75		75		75		75		75	

[illegible]

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan transmigrasi							42.000.000		42.000.000		42.000.000		42.000.000		Dinas Ketenagaker-jaan
		persentase transmigran yang berhasil ditempatkan	%	Jumlah Transmigran yang ditempatkan : Jumlah Transmigran yang mendaftar x 100	NA	NA	100		100		100		100		100	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan															
4.01	Sekretariat Daerah															
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat															Bagian Hukum
		Persentase perangkat daerah yang menyusun LPPD tepat waktu	%	Jumlah tersusunnya LPPD tepat waktu : jumlah keseluruhan LPPD perangkat daerah x 100	100	100	100	42.248.000	100	42.248.000	100	42.248.000	100	42.248.000	100	Bagian Pemerintahan
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan yang difasilitasi	%	Jumlah penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan yang terfasilitasi : jumlah keseluruhan administrasi tata pemerintahan x 100	100	100	100	558.312.000	100	558.312.000	100	760.312.000	100	558.312.000	100	Bagian Pemerintahan
		Presentase kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi	%	jml kegiatan yang terlaksana : jml kegiatan yg direncanakan x 100	13,79	100	100	30.430.283.900	100	30.650.283.900	100	30.430.283.900	100	30.750.283.900	100	Bagian Kesra

[illegible]

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	22,18 (rendah)	28,1 (sedang)	29,01 (sedang)		32 (sedang)		36 (sedang)		48 (tinggi)		48 (tinggi)	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100	100	100	516.335.000	100	516.335.000	100	516.335.000	100	516.335.000	100	Bagian Organisasi
		Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	100	100	651.174.600	100	651.174.600	100	651.174.600	100	651.174.600	100	Bagian Prokompim
		Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi Kerumahtanggaan Setda : target x 100	85	80	90	2.731.433.000	90	2.731.433.000	90	3.787.948.163	90	3.722.948.163	90	Bagian Umum
4.02	Sekretariat DPRD															
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD							45.284.692.105		48.005.532.105		49.673.790.593		50.973.790.593		Sekretariat DPRD
		Persentase Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah non APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah non APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda non APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 5 Perda)	61,54	NA	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase kUA/PPA dan Perda APBD yang ditetapkan	%	Capaian Peraturan Daerah APBD yang terbentuk : target Peraturan Daerah APBD yang ditetapkan per tahun x 100 (ket: target Perda APBD yang ditetapkan per tahun sebanyak 3 Perda, dan 2 Perbup KUA/PPA)	100	100	100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
		Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dan Kode Etik DPRD	%	Capaian kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana : target kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan x 100 (target sesuai jumlah kegiatan pengawasan yang dijadwalkan per tahun)	100	100	100		100		100		100		100	Sekretariat DPRD
		Persentase peningkatan kapasitas Anggota DPRD	%	Rata-rata capaian kinerja fasilitasi kegiatan failitasi peningkatan kapasitas DPRD	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase penyerapan aspirasi masyarakat	%	Jumlah anggota DPRD yg melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat : jumlah anggota DPRD x 100	45	45	100		100		100		100		100	
		Persentase fasilitasi tugas Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD	%	Jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan Alat Kelengkapan Dewan yang dijadwalkan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase fasilitasi layanan administrasi DPRD	%	Jumlah kegiatan admnistrasi Dewan yang difasilitasi : jumlah kegiatan administasi Dewan yang dijadwalkan x 100	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase fasilitasi layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	Jumlah anggota DPRD yang mendapat layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD : jumlah Anggota DPRD x 100	100	100	100		100		100		100		100	
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan															
5.01	Perencanaan															
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah							828.737.000		1.153.737.000		1.103.737.000		753.737.000		Bapelitbang
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	%	jumlah dokumen perencanaan yang tersedia tepat waktu : jumlah dokumen yang dihasilkan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan	%	jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dievaluasi : jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang dihasilkan x 100	100	100	100		100		100		100		100	
		Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	100	100		100		100		100		100	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah							1.960.250.000		1.926.512.500		1.898.838.125		1.922.280.031		Bapelitbang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	NA	NA	90		90,5		91		92		92	
		Persentase indikator program priroitas pembangunan dan pemerintahan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	NA	NA	90		90,5		91		92		92	
		Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	NA	NA	90		90,5		91		92		92	
5.02	Keuangan															
5.02.03	Program Pengelolaan Keuangan Daerah							334.064.636.225		337.112.581.014		340.206.244.975		343.346.313.895		BPKPAD
		Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
		Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu	
		Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	NA	NA	90		90		90		90		90	
5.02	Program Pengelolaan							1.493.581.500		1.493.581.500		1.493.581.500		1.493.581.500		BPKPAD

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.03	Barang Milik Daerah															
		Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemnfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	100	100		100		100		100		100	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah							3.062.564.350		2.702.564.350		2.712.564.350		2.722.564.350		BPKPAD
		Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	%	[(Realisasi tahun n) - (Realisasi tahun n-1)] : Realisasi tahun n-1 x 100	57,13	10	0		2,03		1,36		2,25		5,64	
5.03	Kepegawaian															
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah							2.283.195.060		2.283.195.060		2.283.195.060		2.283.195.060		Badan Kepegawai an Daerah
		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu	%	(Jumlah jenis layanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu : Jumlah semua layanan administrasi kepegawaian yang ada) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
5.04	Pendidikan dan Pelatihan															
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia							929.381.750		3.149.381.750		3.053.381.750		2.741.381.750		Badan Kepegawai an Daerah
		Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				PD lingkup sub koordinator diklat)x100												
5.05	Penelitian dan Pengembangan															
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah							600.000.000		605.000.000		605.000.000		605.000.000		Bapelitbang
		Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan) x100	30	40	50		55		60		65		65	
6	Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan															
6.01	Pengawasan															
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan							2.693.433.150		2.962.776.465		2.962.776.465		2.962.776.465		Inspektora t
		Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	100	100		100		100		100		100	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi							214.958.200		236.454.020		236.454.020		236.454.020		Inspektora t

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	3	3		3		3		3		3	
		Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan : kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran x 100	63	65	68		70		70		70		70	
7	Unsur Kewilayahan															
7.01	Kecamatan															
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							20.934.700		20.934.700		20.934.700		20.934.700		Kecamatan Batang
		Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perangkingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	80	100	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							2.361.044.100		2.361.044.100		2.361.044.100		2.361.044.100		Kecamatan Batang
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Batang
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	NA	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Batang
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Kecamatan Batang
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							23.649.000		23.649.000		23.649.000		23.649.000		Kecamatan Wonotunggal
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Wonotunggal
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Wonotunggal
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							56.127.000		56.127.000		56.127.000		56.127.000		Kecamatan Wonotunggal
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							11.520.000		11.520.000		11.520.000		11.520.000		Kecamatan Wonotunggal
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							14.106.000		14.106.000		14.106.000		14.106.000		Kecamatan Bandar
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01	Program Pemberdayaan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Bandar

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.03	Masyarakat Desa dan Kelurahan															
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							52.200.000		52.200.000		52.200.000		52.200.000		Kecamatan Bandar
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Kecamatan Bandar
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							7.400.000		7.400.000		7.400.000		7.400.000		Kecamatan Bandar
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							58.140.700		58.140.700		58.140.700		58.140.700		Kecamatan Blado
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Blado
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							21.738.300		21.738.300		21.738.300		21.738.300		Kecamatan Blado
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		Kecamatan Blado
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							12.299.000		12.299.000		12.299.000		12.299.000		Kecamatan Blado

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							10.480.000		10.480.000		10.480.000		10.480.000		Kecamatan Bawang
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							21.505.000		21.505.000		21.505.000		21.505.000		Kecamatan Bawang
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							21.505.000		21.505.000		21.505.000		21.505.000		Kecamatan Bawang
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							12.145.000		12.145.000		12.145.000		12.145.000		Kecamatan Bawang
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100												
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							27.340.000		27.340.000		27.340.000		27.340.000		Kecamatan Bawang
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							16.175.000		16.175.000		16.175.000		16.175.000		Kecamatan Kandeman
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Kandeman
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Kandeman
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Kecamatan Kandeman
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		Kecamatan Kandeman
		Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	100	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							19.000.500		19.000.500		19.000.500		19.000.500		Kecamatan Tulis
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Tulis
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Tulis
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Tulis
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		Kecamatan Tulis
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Subah
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01	Program Pemberdayaan							33.000.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		Kecamatan Subah

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.03	Masyarakat Desa dan Kelurahan															
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Subah
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Subah
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14.000.000		16.000.000		17.000.000		19.000.000		Kecamatan Subah
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Pecalungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							21.337.200		21.337.200		21.337.200		21.337.200		Kecamatan Pecalungan
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		Kecamatan Pecalungan
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							9.800.000		9.800.000		9.800.000		9.800.000		Kecamatan Pecalungan
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Pecalungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	80	80	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							30.000.000		30.000.000		35.000.000		35.000.000		Kecamatan Tersono
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Tersono
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Tersono
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		Kecamatan Tersono
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor	100	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100												
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Kecamatan Tersono
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	80	80	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							15.236.900		15.236.900		15.236.900		15.236.900		Kecamatan Limpung
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Limpung
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Limpung
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Kecamatan Limpung
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							33.719.500		33.719.500		33.719.500		33.719.500		Kecamatan Limpung
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							12.000.000		12.000.000		12.000.000		12.000.000		Kecamatan Banyuputih
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Banyuputih
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Banyuputih
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							-		-		-		-		Kecamatan Banyuputih
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							14.000.000		14.000.000		14.000.000		14.000.000		Kecamatan Banyuputih
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							18.470.300		18.470.300		18.470.300		18.470.300		Kecamatan Gringsing
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01	Program Pemberdayaan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Gringsing

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
.03	Masyarakat Desa dan Kelurahan															
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							27.000.000		27.000.000		27.000.000		27.000.000		Kecamatan Gringsing
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Kecamatan Gringsing
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							19.000.000		19.000.000		19.000.000		19.000.000		Kecamatan Gringsing
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	100	100	85		85		90		90		90	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		Kecamatan Warungasem
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Kecamatan Warungasem
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Kecamatan Warungasem
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		Kecamatan Warungasem
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							10.365.000		10.365.000		10.365.000		10.365.000		Kecamatan Warungasem

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	100	100	85		85		90		90		90	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik							87.809.200		87.809.200		87.809.200		87.809.200		Kecamatan Reban
		persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75		75		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		Kecamatan Reban
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD dan kelurahan Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85		90		90		90		90	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							10.681.700		10.681.700		10.681.700		10.681.700		Kecamatan Reban
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							47.460.100		47.460.100		47.460.100		47.460.100		Kecamatan Reban
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor	90	100	100		100		100		100		100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100												
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							27.805.900		27.805.900		27.805.900		27.805.900		Kecamatan Reban
		Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	100	100	85		85		90		90		90	
8	Unsur Pemerintahan Umum															
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik															
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan							225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		Badan Kesbangpo 1
		Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	100	90	95		95		95		95		95	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Melalui Pendidikan Politik							31.150.000.000		36.150.000.000		1.150.000.000		1.150.000.000		Badan Kesbangpo 1

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2021	2022	2023		2024		2025		2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik															
		Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							120.000.000		220.000.000		120.000.000		220.000.000		Badan Kesbangpo 1
		Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	100	100		100		100		100		100	
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya							225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		Badan Kesbangpo 1
		Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100	100	100		100		100		100		100	
8.01.06	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan							1.320.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000		1.320.000.000		Badan Kesbangpo 1

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Proritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							2021		2022		2023		2024				2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial																			
		Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	100	100		100		100		100		100					

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

8.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 8. 1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian				Perangkat Daerah Koordinator
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	PDRB Per Kapita (ADHK)	juta rupiah	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,49	Sekretariat Daerah
2	Indeks Daya Saing Daerah	indeks	3,4029	3,4375	3,4721	3,5067	3,5413	3,5759	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	68,92	69,32	69,66	70	70,34	70,68	Sekretariat Daerah
4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	91,47	91,57	91,86	91,98	92,25	92,47	Sekretariat Daerah
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	63,84	63,87	63,9	63,93	63,96	63,99	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,88	3,37	4,97-5,0	5,01-5,10	5,10-5,30	5,30-5,50	Sekretariat Daerah
7	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	9.524	9.617	9.710	9.803	9.896	9.989	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian				Perangkat Daerah Koordinator
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
8	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Miskin	%	9,68	8,56	8,4	8,34	8,27	8,21	Sekretariat Daerah
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	6,59	6,26	5,93	5,6	5,27	4,94	Sekretariat Daerah
11	Indeks Infrastruktur	Indeks	180,4	185,95	191,49	197,04	200	201	Sekretariat Daerah
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,17	64,84	64,94	65,04	65,14	65,24	Sekretariat Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,76	66,06	67,36	68,66	69,96	71,26	Sekretariat Daerah
14	Nilai SAKIP	Skor	67,14	69,08	69,62	70,5	71,25	72,35	Sekretariat Daerah
15	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Indeks	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Sekretariat Daerah
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	73,976	77,456	78	79	80	81	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,028	85,15	85,3	85,45	85,6	85,75	Sekretariat Daerah
18	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	161,93	NA	160	155	150	144	Sekretariat Daerah
19	Indeks Rasa Aman	Indeks	NA	NA	4	4,2	4,4	4,6	Sekretariat Daerah
20	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,41	0,51	0,71	0,81	0,83	0,85	Sekretariat Daerah
21	Indeks Demokrasi	Indeks	NA	NA	70	72	74	76	Sekretariat Daerah
22	Angka Kriminalitas	%	0,019	0,018	0,016	0,015	0,014	0,013	Sekretariat Daerah

8.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 8. 2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Angka Rata-Rata Lama sekolah	tahun	jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	6,88	6,89	7	7,1	7,2	7,3	7,3
		Angka Harapan Sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,13	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6
		Angka Pendidikan yang ditamatkan penduduk	%	persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan	79,21	79,5	79,8	80	80,5	81	81
		Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	65	65	70	70	75	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,12	75	76,5	77,5	79	80	80
2	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	273,43	184	160	136	112	88	88

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	10,11	8,88	8,48	8,08	7,6	7,2	7,2
		Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	14,14	14,01	13,87	13,72	13,61	13,47	13,47
		Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,74	74,79	74,84	74,89	74,94	74,99	74,99

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	82,5	86	87	89	90	91	91
		Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah puskesmas kali 100	47,61	57,14	71,42	80,95	90,47	100	100
		Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	48,68	60	65	70	75	80	80
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK/X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	8,06	9,27	10,48	11,69	13,31	14,92	14,92
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
3	RSUD Batang	Persentase Capaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100 persen	77.55	80	83	86	88	90	90
		Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	80	82	84	86	88	90	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99.14	99.15	99.20	99.25	99.30	99.35	99.35
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
4	RSUD Limpung	Persentase Capaian Standar pelayanan Minimal Rumah Sakit	%	jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standar yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standar yang seharusnya dimiliki x 100	69	75	81	87	93	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	70	75	80	85	90	95	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,5	97,66	98,33	99	99,25	99,5	99,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	61,39	64,49	67,84	71,2	74,58	77,98	77,98
		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	57,44	61,38	65,61	69,87	74,15	78,45	78,45
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan kabupaten: kota x 100	79,41	82,4	85,5	88,5	91,5	94,5	94,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01
		Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	NA (Indikat or Baru)	9,7	9,7	11,07	15,94	21,12	21,12
		Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Rasio	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL : HGB x 100	28,83	28,84	28,86	28,87	28,88	28,9	28,9
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	64	65,27	66,56	66,94	67,21	67,21
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	62	62	62,5	63	63,5	64	64

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	72	75	78	81	84	86	86
		Persentase pemenuhan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman yang layak	%	Jumlah infrastruktur yg dipenuhi : jumlah infrastruktur yg ada lalu x 100	57	59	61	63	65	67	67
		Persentase pengurangan pemukiman kumuh	%	(Luas lingkungan kumuh yg tertangani : Luas lingkungan kumuh lalu) x 100	62	62	62,5	63	63,5	64	64
		Tingkat penurunan kasus sengketa pertanahan	%	{ (jumlah sengketa tanah tahun berkenaan - jumlah sengketa tanah tahun lalu) : jumlah sengketa tanah tahun lalu } x 100	70	75	80	85	90	90	90
		Persentase penyelesaian kasus pertanahan	%	(Jumlah kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terdaftar) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	55	60	65	70	75	75

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68
7	Satuan Polisi Pamong Praja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	70	73	75	78	80	80
		Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	NA	70	73	75	78	80	80
		Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x 100	NA	5	4,5	4	3,5	2	2
		Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	68	70	71	72	73	74	74
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,83	70	71	72	73	74	74

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indeks Kerukunan	%	Survei melalui 3 komponen yaitu :	NA	NA	70	75	80	90	90
				(Toleransi + kesetaraan + kerjasama) : 3×100							
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,6	69,9	70,5	70,8	71	71,3	71,3
		Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk dikawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana: Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana: Jumlah Desa Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan: JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x100 +Jumlah Kejadian Bencana yng direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi: Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 : 4	49,65	53,96	60,67	67,44	74,17	78,16	78,16

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Penanggulangan Bencana secara cepat dan akurat	Indeks	Jumlah bencana yang tertangani : jumlah bencana x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
10	Dinas Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri, dan berfungsi sosial	%	Jumlah PMKS yg terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlindungi hak-haknya dan mampu berfungsi sosial serta mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga : Jumlah PMKS di kab Batang X 100	68	70	72	74	76	78	78
		Presentase PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos	%	Jumlah PSKS yang aktif dalam pembangunan Kesos : Jumlah PSKS di kab batang X 100	70	75	80	85	90	95	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	84,01	84,36	84,71	85,06	85,41	85,41
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	84	85	86	87	88	88

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				t = selisih tahun Pt dengan P ₀							
		TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Indeks	5 Σ ASFR	1,85	3,1	3	3	2,9	2,9	2,9
		Ratio KDRT	Rasio	Jumlah KDRT: Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0079	0,0075	0,0071	0,0071	0,0067	0,0067	0,0067
		Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0	0	0	0	0	0	0
		Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,3068	4,2907	4,2907	4,2747	4,2747	4,2587	4,2587
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
13	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Luas RTH	%	Luas RTH: Luas lahan x 100	40	40	50	60	70	70	70
		Indeks Kualitas Air	Indeks	ci baru = cim-ci (hasil pengukuran): cim-LiJ	50	50	50	50	50	50	50
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100-(50: 0.0 x ieu-0.1)	80	80	80	80	80	80	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan: Luas wilayah administrasi	67,6	67,8	68	68,5	68,8	70	70
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50,15	50,5	60	62	63	65	65
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	90	95	100	100
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang x 100	20	21	22	23	24	25	25
		Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,51	0,53	54	0,56	0,57	0,58	0,58
		Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,68	0,71	0,76	0,78	0,81	0,84	0,84
		Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,43	0,45	0,46	0,48	0,51	0,55	0,55
		Persentase pkk aktif	%	Jumlah pkk aktif : jumlah pkk x 100	12,55	25,1	37,66	50,21	62,76	75,31	75,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,57	87	88	89	90	90	90
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	65	66	67	68	69	69
15	Dinas Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91,23	91,27	91,33	91,45	91,72	92	92

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	dan Pencatatan Sipil										
		Persentase kepemilikan identitas penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Peduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Peduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	75,04	78,67	81,67	85	88,33	91,67	91,67
		Menurunnya Presentasi Data Ganda dan Anomali	%	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	7,68	3	2,6	2,3	2	1,7	1,7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55	60	61	62	63	64	64
16	Dinas Perhubungan	Rasio ijin trayek	rasio	jumlah ijin trayek yang dikeluarkan: jumlah penduduk	1,12	1,48	1,48	1,5	1,5	1,5	1,5
		Tingkat kelancaran dan	rasio	v / c ratio Jalan Kabupaten	0,35	0,48	0,48	0,5	0,5	0,53	0,53

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		keamanan lalu lintas		v : volume kendaraan c : kapasitas jalan							
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks SPBE	Indeks	Domain SPBE	3,24	3,3	3,4	3,5	3,55	3,6	3,6
		Indeks Smart City	Indeks	Dimensi Smart City	3,26	3,45	3,46	3,47	3,48	3,49	3,49
		Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	95	100	100	100	100	100	100
		Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	100	100	100	100	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase informasi dan komunikasi publik yang bisa diakses lewat media komunikasi	%	Jumlah informasi yang diakses publik : dengan jumlah penyebaran informasi x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,73	70	71	74	74,5	75	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	12,12	12,22	12,36	12,75	13,24	13,36	13,36
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	65	66	67	68	68	68
		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%	rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Perangkat daerah Jumlah capaian sasaran strategis Perangkat daerah x 100	75	76	77	78	79	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83	83

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pntu	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	100	100	66	75	80	83	83
		Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%	Jml investor tahun n dikurangi jml investor tahun (n-1) dibagi jml investor tahun n x 100	10	15	20	40	60	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,01	87,5	88	88,5	88,75	89	89
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65	70	70	70	70	70	70
20	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	15	17	19	21	23	25	25
		Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pemdapatan sektor pariwisata tahun n-1 kali 100	5	8	8	10	15	20	20

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif: kajian yang dilaksanakan) x 100	5	7	8	10	12	15	15
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	68	70	71	72	72	72
		Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	23	25	30	35	40	45	45
		Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4	4	4	4	4	4	4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai tingkat kegembiraan	Indeks	TGM= $(0,3 \times (FM+DM+JB)) + 0,05 \times (FAI+DAI)$	66,21	66,25	66,29	66,33	66,37	66,41	66,41

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		membaca masyarakat									
		index pembangunan literasi masyarakat	Indeks	IPLM= ∑UPLM: AM	2,51	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	48,72	60,1	60,4	60,8	61,2	61,6	61,6
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,423	87,6	87,63	87,66	87,69	87,72	87,72
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T = \frac{a+i+s}{j} : 4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	75,09	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,6

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				j = persentase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN							
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	$T = (m + b + g + a + c + i) : 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten: kota dengan NSPK	21,85	22	22,2	22,4	22,6	22,8	22,8

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
				a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK							
22	Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata- rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	84	84	84	84,5	85	85,5	85,5
		Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,54	21,6	21,78	21,9	21,95	22	22

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	81	85	95,5	93,3	97	97,7	97,7
		Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat konsumsi makan ikan x 100	90	95	95	96	98	100	100%
		Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	60	80	85	87	90	94	94
		Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	85	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
23	Dinas Pangan dan Pertanian	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,026

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)									
		a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	106.526,15	118.300,00	124.116,00	119.615,00	121.734,00	125.272,00	125.272,00
		b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jaguang 89	48.262,24	68.275,00	69.227,00	71.156,00	72.573,00	74.029,00	74.029,00
		Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	3,5	10,2	10,4	10,6	10,7	10,8	10,8
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	20,36	24,73	24,75	24,76	24,77	24,78	24,78
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen *100	0,012	0,0104	0,0104	0,0103	0,0108	0,0109	0,0109

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,7	73	74,5	75,3	76,3	76,5	77
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,36	66,4	66,8	67	67,1	67,3	67,3
24	Sekretariat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	70	80	85	90	95	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,58	85	85	85	85	88,5	88,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
		Nilai EKPPD	Skor	Nilai hasil evaluasi LPPD nasional menurut Kemendagri	2,94	2,96	2,96	2,98	2,99	3	3
25	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	76	77	78	79	80	80
		Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Hasil Survey: Kuesioner Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	76	77	78	79	80	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50	50	60	62,5	65	67,5	70

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
26	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan	Indeks	60 Capaian sasaran pemda+20 sasaran perangkat daerah+20capaian program daerah	72,88	75	76	78	79	80	80
		Rata-rata capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah	%	(Rata-rata capaian indikator kinerja program + rata-rata capaian IKU + rata-rata Capaian IKD) / 3 x 100	89	89.60	90	90,5	91	92	92
		Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah program dalam RKPD th berkenaan : jumlah program APBD th berkenaan x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	Jumlah Program dalam Renja Perangkat Daerah : Jumlah Program dalam Renstra Perangkat Daerah X 100	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	46,84	50,00	55,00	60,10	63,00	65,00	65,00
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	NA	NA	100	100	100	100	100

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	70	80	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60.20	61.51	62.00	62.50	63.00	63.50	63.50
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,2	87,5	87,7	87,8	88	88
27	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	STATUS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP : jumlah total OPD) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	$\frac{[(\text{Realisasi Pendapatan Daerah tahun } n) - (\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n-1)]}{(\text{Realisasi Pendapatan Daerah Tahun } n-1)} \times 100$	3.78	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Peningkatan PAD	%	$[(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1)] : (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100$	4,59	10	1,02	2,03	1,36	2,25	2,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	63	64	64	64,5	65	65
28	Badan Kepegawaian Daerah	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	NA	165	175	200	225	250	250
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,21	67	68	69	70	71	71
		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Skor	$(\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter} : \text{Total Parameter Yang Terisi}) \times (1 : \text{jumlah parameter}) \times \text{Nilai Dasar } 25$	84	84,5	85	86	87	89	89
		Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"	%	$(\text{Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik"} : \text{Jumlah ASN Kab. Batang}) \times 100$	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas	%	$(\text{Jumlah realisasi ASN yg dilatih} : \text{Jumlah Pendaftar Pelatihan}) \times 100$	56,2	60	65	70	80	90	90

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
29	Inspektorat	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	80	80	80	85	85	85	85
		Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	80	80	80	85	85	85	85
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	80	80	80	85	85	85	85
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82
30	Kecamatan Bandar	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	29	29	29	41	41	41	41
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,08	82,1	82,1	82,1	82,15	82,15	82,15
		Presentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	29	29	29	41	41	41	41
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	62	63	65	65
31	Kecamatan Banyuputih	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	45	50	55	60	65	70	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	86	87	88	89	90	95

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	60	60	60	60
32	Kecamatan Batang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	NA (indikat or baru)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	30	40	45	50	60	70	70
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	90	95	100	100
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	30	40	45	50	60	70	70

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	60	60	60	60
33	Kecamatan Bawang	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C-)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	40	50	60	70	80	90	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85	87	87	90	90	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	50	60	65	70	75	80	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	66	66	66	70	80	80

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
34	Kecamatan Blado	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
					(C -)						
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	5,5	16,6	22,2	33,6	38,8	38,8	38,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	85	90	100	100
		Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	5,5	16,6	22,2	33,6	38,8	38,8	38,8
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	85	85
35	Kecamatan Gringsing	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C-)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	33,3	46,7	60	73,3	80	86,7	86,7
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.96	86.5	87	88	89	90	90

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	26,6	33,3	46,6	60	66,6	80	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	64	65	66	67	68	68
36	Kecamatan Kandeman	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,23 (B)	3,25 (B)	3,30 (B)	3,30 (B)	3,50 (B)	3,50 (B)	3,50 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	40	50	60	65	70	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	90	90	95	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	80	80	85	85	90	90	90

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	80	85	85	85
37	Kecamatan Limpung	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	23,53	35,29	47,06	58,82	70,59	82,35	82,35
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84	87	90	93	95	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	23,53	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	52,94
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	62	64	66	68	70	70

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
38	Kecamatan Pecalungan	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	40	50	60	70	80	90	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	79	80	81	82	82
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	45	50	60	65	70	80	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	65	70	75	80	80
39	Kecamatan Reban	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Persentase Status Desa Maju dan Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri: Jumlah Desa) x 100	21,05	26,31	26,31	36,84	47,36	52,63	52,63

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	85	100	100	100	100	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	21,05	26,31	31,57	31,57	36,84	42,1	42,1
		Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	64	70	75	75	80	80
40	Kecamatan Subah	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	29,41	29,41	29,41	35,29	35,29	41,18	41,18
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85	87	87	90	90	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x 100	29,41	29,41	29,41	35,29	35,29	41,18	41,18

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	66	66	66	70	70	70
41	Kecamatan Tersono	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C-)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	40	50	60	70	80	90	90
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5	87	87,5	88	88,5	90	90
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	50	60	65	70	75	80	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	60	60	60	60

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
42	Kecamatan Tulis	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,55 (SB)	3,55 (SB)	3,57 (SB)	3,57 (SB)	3,80 (SB)	3,80 (SB)	3,80 (SB)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	50	50	70	70	70	80	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,7	88,7	89	89	95	95	95
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	40	50	55	60	70	80	80
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	70	75	75	80	80	80
43	Kecamatan Warungasem	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	40	50	60	70	80	90	90

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	85	90	100	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri : Jumlah Desa) x100	80	80	85	85	85	90	90
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	85	85
44	Kecamatan Wonotunggal	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)
		Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jml desa maju dan desa mandiri : jumlah desa se Kecamatan) x 100	13,3	20	20	33,3	33,3	40	40
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	85	90	100	100
		Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri: Jumlah Desa) x 100	13,3	26,6	33,3	40	46,6	53,3	53,3

No.	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Rumus Perhitungan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
		Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(jumlah gangguan Trantibum yang terselesaikan : jumlah gangguan Trantibum seluruhnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	85	85

8.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran, IKU perangkat daerah, serta indikator program perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 8. 3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	$\{(PDRB \text{ th } n - PDRB \text{ th } (n-1)) : PDRB \text{ th } (n-1)\} \times 100$	4,88	3,37	4,97-5,0	5,01-5,10	5,10-5,30	5,30-5,50	5,30-5,50	Sekretariat Daerah
2	Laju Inflasi (%)	%	Angka Inflasi	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	2,3-3,3	Sekretariat Daerah
3	PDRB Per Kapita (Rp.juta)	juta rupiah	PDRB th n : jumlah penduduk th n	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,49	23,49	Sekretariat Daerah
4	Angka Ketimpangan (berdasarkan kriteria Bank Dunia)	%	Persentase pendapatan penduduk 40 terendah terhadap total pendapatan	21,3	21,4	21,5	21,6	21,7	21,8	21,8	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	Persentase Angka Kemiskinan (%)	%	Jumlah penduduk miskin di Kab. Batang : jumlah penduduk Kab. Batang	9,68	8,56	8,4	8,34	8,27	8,21	8,21	Sekretariat Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	indeks	Rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran	68,92	69,32	69,66	70	70,34	70,68	70,68	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	Rasio IPM Perempuan dibanding IPM Laki-Laki	91,47	91,57	91,86	91,98	92,25	92,47	92,47	Sekretariat Daerah
8	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Peran serta wanita dalam kehidupan ekonomi dan politik	63,84	63,87	63,9	63,93	63,96	63,99	63,99	Sekretariat Daerah
9	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,74	74,79	74,84	74,89	74,94	74,99	74,99	Sekretariat Daerah
10	Harapan Lama Sekolah (th)	tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	12,13	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,6	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
11	Rata-Rata Lama Sekolah (th)	tahun	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal	6,88	6,89	7	7,1	7,2	7,3	7,3	Sekretariat Daerah
12	Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	ribu rupiah	Rata-rata pengeluaran penduduk per tahun	9.524	9.617	9.710	9.803	9.896	9.989	10.082	Sekretariat Daerah
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	(Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja : Jumlah penduduk angkatan kerja) x100	6,59	6,26	5,93	5,6	5,27	4,94	4,94	Sekretariat Daerah
14	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa/kelurahan x 100	8,06	10,08	12,1	12,9	14,11	14,92	14,92	Sekretariat Daerah
15	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja : jumlah angkatan kerja x 100	93,07	96,63	97	97	97	97	97	Sekretariat Daerah
16	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas : Angkatan Kerja x 100	68,86	NA	70	72	74	76	76	Sekretariat Daerah
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	Hasil survei kepuasan masyarakat	85,028	85,15	85,3	85,45	85,6	85,75	85,75	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
18	Persentase Peningkatan PAD	%	[(Realisasi PAD tahun n)-(Realisasi PAD Tahun n-1)] : (Realisasi PAD Tahun n-1)*100	4,59	10	0	2,03	1,36	2,25	2,25	Sekretariat Daerah
19	Opini BPK	opini	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
20	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,026	Sekretariat Daerah
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	Hasil kali konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	88,4	89,1	89,3	89,5	89,7	89,8	89,8	Sekretariat Daerah
22	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan : Jumlah PDRB x 100	20,36	24,73	24,75	24,76	24,77	24,78	24,78	Sekretariat Daerah
23	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1) x 100	12	13	15	17	19	20	20	Sekretariat Daerah

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	IKLH Kabupaten = (IPA x 30) + (IPU x 30) + (ITH x 40)	65,17	64,84	64,94	65,04	65,14	65,24	65,24	Sekretariat Daerah
6	Indeks Infrastruktur	indeks	Indeks Infrastruktur tingkat Kabupaten/Kota = 0,4122 *jalan + 0,4149*air + 0,4620*sanitasi + 0,4368 * pkpl + 0,5037*telp_int	180,4	185,95	191,49	197,04	200	201	201	Sekretariat Daerah
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	indeks	Penilaian terhadap 6 dimensi yaitu: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran; 2. Pengalokasian belanja APBD; 3.Transparansi pengelolaan keuangan daerah; 4.Penyerapan Anggaran; 5. Kondisi Keuangan Daerah; 6. Opini BPK atas LKPD	73,976	77,456	78	79	80	81	81	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	indeks	perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota	161,93	NA	160	155	150	144	144	Sekretariat Daerah
9	Indeks Rasa Aman	indeks	survei / kuisioner kepada masyarakat	na	na	4	4,2	4,4	4,6	4,6	Sekretariat Daerah
10	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	Kuantitatif & Kualitatif, melalui kuisooner terhadap 7 Parameter Indeks Ketahanan Daerah	0,41	0,51	0,71	0,81	0,83	0,85	0,85	Sekretariat Daerah
11	Indeks Demokrasi	indeks	Kualitatif, melalui kuisooner	na	na	70	72	74	76	76	Sekretariat Daerah
12	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	Total Pengeluaran RT Non Pangan : Total Pengeluaran x 100	45,97	46,71	46,99	47,27	47,56	47,84	47,84	Sekretariat Daerah
13	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	rasio	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB	-0,07	-0,03	0,01	0,05	0,09	0,13	0,13	Sekretariat Daerah
14	Angka kriminalitas	rasio	Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun : Jumlah penduduk	0,019	0,018	0,016	0,015	0,014	0,013	0,013	Sekretariat Daerah
15	Angka Beban ketergantungan	%	(Penduduk usia64 : Penduduk usia 15-64) x100	43,27	43,08	42,94	42,8	42,66	42,52	42,52	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Bidang Pendidikan x 100								
	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	%	Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal : jumlah seluruh satuan pendidikan x 100	80	85	88	90	95	100	100	Disdikbud
2	Kesehatan										
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	Jumlah kematian ibu maternal tetapi bukan disebabkan karena kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	273,43	184	160	136	112	88	88	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu/jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dan pada kurun waktu yang sama x 1.000	10,11	8,88	8,48	8,08	7,6	7,2	7,2	Dinas Kesehatan
	Angka prevalensi balita stunting	%	Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan status pendek di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah Balita usia 0-59 bulan yang diukur panjang atau tinggi badan pada wilayah dan kurun waktu yang sama x 100	14,14	14,01	13,87	13,72	13,61	13,47	13,47	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan (UU No. 40 Th 2004 dan UU No.36 Th 2009)	%	Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan : jumlah penduduk x 100	82,5	86	87	89	90	91	91	Dinas Kesehatan
	Persentase puskesmas dengan tenaga sesuai standar (PMK 43. Th 2019)	%	Jumlah puskesmas dengan ketenagaan sesuai standar : jumlah	47,61	57,14	71,42	80,95	90,47	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			puskesmas kali 100								
	Persentase Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar (PMK No.73 Th. 2016, PMK No. 74 Th 2016, PMK No. 34 Th 2021)	%	Jumlah Fasilitas kefarmasian yang sesuai standar : jumlah fasilitas pelayanan kefarmasian x 100	48,68	60	65	70	75	80	80	Dinas Kesehatan
	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri. Kepmenkes RI Nomor 1529/MENKES/SK /X/2010	%	Jumlah Desa Siaga Aktif strata mandiri : jumlah desa: kelurahan x 100	8,06	9,27	10,48	11,69	13,31	14,92	14,92	Dinas Kesehatan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	Dinas Kesehatan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82	Dinas Kesehatan
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata- rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	74,74	74,79	74,84	74,89	74,94	74,99	74,99	Dinas Kesehatan
	Rata-Rata capaian SPM bidang Kesehatan	%	Jumlah capaian masing masing indikator SPM : Jumlah indikator SPM x 100	71,21	85,5	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang berijin	%	Jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang berijin : jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang ada x 100	70,57	71	80	82	84	85	85	Dinas Kesehatan
	Rasio Posyandu Mandiri terhadap balita	rasio	Jumlah posyandu mandiri : jumlah balita x 100	10,74	11,24	11,74	12,24	12,74	13,24	13,24	Dinas Kesehatan
	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (RSUD Batang)	%	Jumlah sarana, prasarana dan alat sesuai standart yang dimiliki : dengan jumlah sarana prasarana dan alat sesuai standart yang seharusnya di miliki x 100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Batang
	Persentase Capaian Standart Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata - rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	80	82	84	86	88	90	90	RSUD Batang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,14	99,15	99,2	99,25	99,3	99,35	99,35	RSUD Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82	RSUD Batang

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Capaian Standar Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	%	Nilai rata-rata unsur capaian Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	70	75	80	85	90	95	95	RSUD Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,5	97,66	98,33	99	99,25	99,5	99,5	RSUD Limpung
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82	RSUD Limpung
	Persentase tenaga kesehatan yang berijin (RSUD Limpung) (SPM)	%	Jumlah tenaga kesehatan yang mempunyai SIP : jumlah tenaga kesehatan yang aktif x 100	100	100	100	100	100	100	100	RSUD Limpung
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
	Persentase Infrastruktur Wilayah kondisi Baik	%	Jumlah infrastruktur kondisi baik : jumlah total infrastruktur x 100	61,39	64,49	67,84	71,2	74,58	77,98	77,98	DPUPR
	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik : luas irigasi kabupaten x 100	57,44	61,38	65,61	69,87	74,15	78,45	78,45	DPUPR
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	%	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap : Jumlah total panjang jalan	79,41	82,4	85,5	88,5	91,5	94,5	94,5	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			kabupaten/kota x 100								
	Persentase bangunan gedung yang layak fungsi	%	Jumlah Gedung negara yang layak fungsi : Jumlah bangunan gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab x 100	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	77,01	DPUPR
	Presentase Pengaturan Rencana Detail Tata Ruang Daerah	%	Luas wilayah RDTR yang ditetapkan : Luas wilayah Kabupaten Batang x 100	0	0	9,7	11,07	15,94	21,12	21,12	DPUPR
	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	Luas ruang terbuka hijau : Luas wilayah ber HPL / HGB x 100	28,83	28,84	28,86	28,87	28,88	28,9	28,9	DPUPR
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting : luas daerah irigasi	0	3,94	4,23	4,26	4,28	4,3	4,3	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air	%	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km) : Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km) x 100	0,44	51,21	57,67	64,41	71,43	77,4	77,4	DPUPR
	Persentase Infrastruktur Lingkungan Perumahan yang layak	%	Panjang jalan dan drainase lingkungan : Panjang jalan dan drainase lingkungan seluruhnya x100	47,04	50,04	53,04	56,04	59,04	62,04	62,04	DPUPR
	Persentase Pemanfaatan Gedung yang sesuai dengan peruntukan	%	Jumlah Gedung negara yang sesuai dengan peruntukkan : Jumlah Bangunan Gedung negara yang menjadi kewenangan Pemkab xkan 100	100	100	100	100	100	100	100	DPUPR
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik : Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut x 100	40,78	85,16	86,33	88,65	90,42	91,44	91,44	DPUPR

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	Jumlah tenaga kerja konstruksi operator dan teknis/analisis : Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota x 100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	DPUPR
	Persentase Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang	%	Luas wilayah RRTR yang ditetapkan : luas wilayah RRTR yang ditargetkan x 100	72,73	80	80,5	81	81,5	82	82	DPUPR
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	DPUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										
	Persentase Rumah Layak Huni	%	(Jumlah Rumah Layak Huni : Jumlah Rumah se Kab. Batang) x 100	62	62	62,5	63	63,5	64	64	DPRKP
	Presentase perumahan dan lingkungan permukiman yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	%	(Luasan Perumahan dan Permukiman dalam kondisi baik : Luas Total Perumahan dan Permukiman) x 100	72	75	78	81	84	86	86	DPRKP

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	IKM terhadap penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	70	73	75	78	80	80	Satpol PP
	Persentase penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	(Jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum : jumlah keseluruhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x 100	NA	70	73	75	78	80	80	Satpol PP
	Persentase luasan wilayah bencana kebakaran	%	(Luas wilayah bencana kebakaran : luas wilayah kabupaten) x100	0	5	4,5	4	3,5	2	2	Satpol PP
	Persentase penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran	%	(Jumlah penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran dalam tingkat waktu tanggap : jumlah seluruh kejadian kebakaran dan non kebakaran) x 100	68	70	71	72	73	74	74	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Satpol PP)	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,83	70	71	72	73	74	74	Satpol PP
	Cakupan ketangguhan daerah menghadapi bencana	%	Jumlah Peduduk di kawasan Rawan Bencana yang mendapat informasi Rawan Bencana/ Jumlah Penduduk dikawasan RB x 100 + Jumlah Desa Tangguh Bencana/ Jumlah Deas Rawan Bencana x 100 + Jumlah Penanganan Tanggap Darurat yang dilakukan/ JUmlah Sasaran Dampak Bencana yang dilakukan tanggap Bencana x 100 + Jumlah Kejadian Bencana yg direkomendasikan Rehabilitasi dan Rekontruksi/ Jumlah Kejadian Bencana yang harus di lakukan Rehabilitasi dan Rekontruksi x 100 /4	49,65	53,96	60,67	67,44	74,17	78,16	78,16	BPBD

[illegible]

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,66	84,01	84,36	84,71	85,06	85,41	85,41	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
1	Ketenagakerjaan										
	Tingkat Kesempatan kerja	%	Jumlah penduduk bekerja / jumlah angkatan kerja x 100	93,07	96,63	97	97	97	97	97	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak : jumlah perusahaan x 100	31,02	29,4	30,37	31,17	32,01	32,8	32,8	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Kegiatan yang mengacu RTK	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten / Kota x 100	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Ketenagakerjaan
	Rasio penduduk yang bekerja	%	Jumlah Penduduk 15 th ke atas / Angkatan Kerja x 100	68,86	NA	70	72	74	76	76	Dinas Ketenagakerjaan
	Persentase Pencari pekerja yang mendapat pekerjaan	%	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan : dengan jumlah	26	0	31	36	41	46	46	Dinas Ketenagakerjaan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			pencari kerja terdaftar x 100								
	Penurunan Jumlah Perselisihan HI	rasio	Jumlah sengketa pengusaha pekerja : jumlah perusahaan x 1000	5,13	0	14,8	14,6	14,4	14,2	14,2	Dinas Ketenagake rjaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	84	85	85	90	90	90	Dinas Ketenagake rjaan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	56,63	60	65	70	70	75	75	Dinas Ketenagake rjaan
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
	Ratio KDRT	rasio	Jumlah KDRT : Jumlah Rumah Tangga X 100	0,0079	0,0075	0,0071	0,0071	0,0067	0,0067	0,0067	DP3AP2KB
	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	Pekerja anak usia 5-14 tahun : Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas x 100	0	0	0	0	0	0	0	DP3AP2KB
	Persentase cakupan pernikahan anak	%	Jumlah Pernikahan Anak : Jumlah Pernikahan X 100	4,3068	4,2907	4,2907	4,2747	4,2747	4,2587	4,2587	DP3AP2KB
	Persentase ARG pada belanja pelaksanaan program dan kegiatan di APBD	%	Jml ARG pada Anggaran Program Kegiatan APBD : jml seluruh anggaran pada	4,79	2,86	3	3,2	3,4	3,5	3,5	DP3AP2KB

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	DP3AP2KB
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82	DP3AP2KB
3	Pangan										
	Persentase penguatan cadangan pangan daerah	%	jumlah cadangan pangan tahun n dikurangi tahun n-1 : tahun n-1 x 100	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,026	0,026	Dinas Pangan dan Pertanian
	Ketersediaan Bahan Pangan Utama (Ton)										
	a. Beras	Ton	Produksi Gabah Kering Panen dikurangi Angka susut (benih, pakan, tercecer, susut) dikonversi dengan rendemen beras 62,74	#####	118.300	124.116	119.615	121.734	125.272	125.272	Dinas Pangan dan Pertanian
	b. Jagung	Ton	Produksi Jagung dikurangi Angka susut atau xkan dengan angka konversi jagung 89	48.262,24	68.275,00	69.227,00	71.156,00	72.573,00	74.029,00	74.029,00	Dinas Pangan dan Pertanian
	Cadangan Pangan Daerah (Ton)	Ton	Jumlah cadangan pangan kabupaten : standar cadangan pangan kabupaten x 100	3,5	10,2	10,4	10,6	10,7	10,8	10,8	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	%	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan : jumlah seluruh kegiatan ketahanan pangan x 100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	Dinas Pangan dan Pertanian
	Skor Pola Pangan Harapan	%	Hasil konsumsi energi dengan bobot dibandingkan dengan Skor Maksimal Kelompok Pangan	88,4	89,1	89,3	89,5	89,7	89,8	89,8	Dinas Pangan dan Pertanian
	Rasio Desa mandiri Pangan	%	Desa yang mendapatkan fasilitas Desa Mandiri Pangan : jumlah desa di Kab. Batang x100	14	14	15	16	17	18	18	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	Jumlah daerah pengawasan keamanan pangan : jumlah daerah aman pangan x 100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,7	73	74,5	75,3	76,3	76,5	77	Dinas Pangan dan Pertanian
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66,36	66,4	66,8	67	67,1	67,3	67,3	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	Luas tutupan hutan : Luas wilayah administrasi	67,6	67,8	68	68,5	68,8	70	70	Dinas Lingkungan Hidup
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	50,15	50,5	60	62	63	65	65	Dinas Lingkungan Hidup
	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah	%	jumlah dokumen yang disusun : jumlah dokumen yang dibutuhkan x 100	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	%	Jumlah persetujuan yang dikeluarkan : jumlah permohonan x 100	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH : izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten yang ditangani /Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten x 100	50	50	55	60	65	70	70	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	%	Jumlah komunitas pduli LH yang di edukasi : Jumlah komunitas LH yang direncanakan edukasix 100	0	0	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Persentase Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	Jumlah Dunia Pendidikan yang memenuhi nilai standar : jumlah sekolah yang mendaftar x 100	70	80	90	90	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase penanganan sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani : jumlah timbunan sampah x 100	45	50	60	70	80	85	85	Dinas Lingkungan Hidup
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	91,27	91,33	91,45	91,72	92	92	Disdukcapil
	Persentase kepemilikan identitas Penduduk dan Akte Kelahiran	%	[(Jumlah Kepemilikan KIA : Jumlah Penduduk usia 0-17 th) + (Jumlah Penduduk Ber-KTP el : Jumlah Penduduk usia di atas 17 th) + (jumlah penduduk ber-akta kelahiran usia 0-18 th : jumlah penduduk usia 0-18 th) : 3] x 100	NA	78,67	81,67	85	88,33	91,67	91,67	Disdukcapil
	Persentase menurunnya data ganda dan anomali	%tase	[(Jumlah Data ganda dan anomali tahun lalu - data ganda dan anomali tahun ini) : jumlah data ganda dan anomali tahun lalu] x 100	7,68	3	2,6	2,3	2	1,7	1,7	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase identitas kependudukan (KTP dan KIA) yang telah diterbitkan	%	$\left[\frac{\text{(Jumlah penduduk memiliki KTP el : Jumlah penduduk usia 17 th ke atas)} + \text{(Jumlah penduduk memiliki KIA : jumlah penduduk di bawah usia 17 th)}}{2} \right] \times 100$	60	70	75	85	94,5	100	100	Disdukcapil
	Persentase penduduk yang memiliki akta nikah dan akta lahir	%	$\left[\frac{\text{(Jumlah kepemilikan akta nikah : jumlah pemohon)} + \text{(jumlah akta usia bayi 0-5 th : penduduk usia 0-5 th)}}{2} \right] \times 100$	97	97	97,2	97,4	97,6	97,8	97,8	Disdukcapil
	Persentase penyajian data kependudukan yang valid	%	$\left(\frac{\text{Jumlah data kependudukan yang valid : jumlah seluruh data kependudukan}}{100} \right) \times 100$	95	95	95,2	95,4	95,6	95,8	95,8	Disdukcapil
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	55	60	61	62	63	64	64	Disdukcapil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	Persentase Desa Maju dan Mandiri	%	$\frac{\text{jumlah desa maju : total jumlah se kab. batang}}{x 100}$	20	21	22	23	24	25	25	Dispermades

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Ketahanan Sosial	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57	0,58	0,58	Dispermade s
	Indeks Ketahanan Ekonomi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,68	0,71	0,76	0,78	0,81	0,84	0,84	Dispermade s
	Indeks Ketahanan Ekologi	Indeks	Penilaian Indeks Desa Mandiri Terendah	0,43	0,45	0,46	0,48	0,51	0,55	0,55	Dispermade s
	Persentase sumbangan pendapatan perempuan	%	Jumlah pkk desa binaan : pkk desa sekab. Batang x 100	12,55	25,1	37,66	50,21	62,76	75,31	75,31	Dispermade s
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,57	87	88	89	90	90	90	Dispermade s
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	65	66	67	68	69	69	Dispermade s
	Persentase budaya desa yang dilestarikan	%	jumlah adat dan budaya desa yang dilestarikan : jumlah adat budaya desa x 100	N/A	N/A	25	40	60	80	80	Dispermade s
	Persentase desa yang tertib administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	desa	jumlah desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan administrasinya : total desa di Kabupaten Batang x 100	NA	43,93	46,03	46,03	56,49	56,49	56,49	Dispermade s
	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif dalam pemberdayaan desa	%	jumlah LKD yang aktif : jumlah LKD keseluruhan x 100	N/A	60	65	70	75	80	80	Dispermade s

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
8	Pengendalian Penduduk dan KB										
	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	$r = \{Pt/P_0\} \times (1/t) - 1\} \times 100$	Na	1,15	1,14	1,13	1,12	1,11	1,11	DP3AP2KB
			r = laju pertumbuhan penduduk								
			Pt = Jumlah Penduduk tahun t								
			P ₀ = Jumlah penduduk tahun dasar								
			t = selisih tahun Pt dengan P ₀								
	TFR (Total Fertility Rate / Angka Kelahiran Total)	Index	5 Σ ASFR	1,85	3,1	3	3	2,9	2,9	2,9	DP3AP2KB
	Persentase jenis data kependudukan bidang keluarga berencana	%	Jml jenis data kependudukan bid KB : Target jml jenis data kependudukan bid. KB x 100	100	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB
	Peningkatan Cakupan Kesertaan Ber-KB	%	PUS yang ber-KB : Jum. PUS x 100	73,9	73,95	73,93	73,96	74	74,03	74,03	DP3AP2KB
	Cakupan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL)	%	Jumlah keluarga yang didampingi kelompok Tribina	0	0	77,71	78,21	78,71	79,21	79,21	DP3AP2KB

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	lewat media komunikasi		penyebaran informasi x 100								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,73	70	71	74	74,5	75	75	Diskominfo
	Persentase penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	Jumlah informasi yang diakses publik : jumlah penyebaran informasi x 100	60	63	66	69	72	75	75	Diskominfo
	Persentase Jumlah Layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	Jumlah layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi : jumlah layanan x 100	62	65	68	70	73	75	75	Diskominfo
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	Diskominfo
11	Koperasi dan UKM										
	Persentase koperasi aktif	%	(jumlah koperasi aktif : jumlah koperasi keseluruhan) x 100	63,83	64,52	65	68	68	70	70	Disperindag -kop dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase peserta pelatihan dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	90	90	90	100	100	100	Disperindag -kop dan UKM
	Persentase peserta diklat dengan predikat baik	%	(jumlah peserta pelatihan/diklat yang lulus : jumlah peserta pelatihan/diklat) x 100	100	90	90	90	100	100	100	Disperindag -kop dan UKM
	Persentase Pertambahan Wira Usaha Baru	%	(jumlah UMKM Baru tahun n - jumlah UMKM tahun n-1) : jumlah UMKM tahun n-1 } x 100	8,06	10,45	10	10	12	12	12	Disperindag -kop dan UKM
	Persentase produk UMKM yang terstandarisasi	%	Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N - Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) :Jumlah UMKM yang terstandarisasi Tahun N-1) X 100	4	15,38	15	15	20	20	20	Disperindag -kop dan UKM
12	Penanaman Modal										
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	(Investasi tahun lalu : investasi tahun ini) x 100	100	100	66	75	80	83	83	DPMPSTP

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Jumlah medali yang diperoleh	Medali	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	23	25	30	35	40	45	45	Disparpora
	Persentase peningkatan pemuda berprestasi	%	{(Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n – Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1) : Jumlah pemuda berprestasi atau yang memperoleh penghargaan tahun n-1} x 100	4	4	4	4	4	4	4	Disparpora
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	jumlah organisasi kepemudaan yang dibina : jumlah organisasi kepemudaan yang terdaftar x 100	19	19	25	32	39	45	45	Disparpora
	capaian medali kejuaraan	medali	Jumlah total medali yang	23	30	35	40	45	50	50	Disparpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			didapat selama 1 Tahun								
	Penghargaan yang diterima	%	Jumlah penghargaan yang diterima: jumlah kegiatan yang diikuti X 100	0	10	10	10	10	10	10	Disparpora
14	Statistik										
	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi : dengan jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	Jumlah data statistik sektoral yang terintegrasi dalam sistem informasi / Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul x 100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
15	Persandian										
	Indeks Keamanan Informasi	%	Jumlah sistem elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang	95	100	100	100	100	100	100	Diskominfo

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			tersedia setiap tahun x 100								
	Persentase capaian sistem elektronik yang dilakukan pengamanan setiap tahunnya	%	Jumlah Sistem Elektronik yang berhasil dilakukan pengamanan : dengan jumlah seluruh sistem elektronik yang tersedia setiap tahun x 100	100	100	100	100	100	100	100	Diskominfo
16	Kebudayaan										
	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	%	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan : jumlah keseluruhan cagar budaya x 100	100	100	100	100	100	100	100	Disdikbud
	Persentase pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah	%	Jumlah pengunjung festival kesenian tradisional yang diselenggarakan Pemerintah Daerah : Jumlah target pengunjung kesenian tradisional yang diselenggarakan x 100	65	65	70	70	75	80	80	Disdikbud

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Indeks	$T = \frac{(a+i+s+j)}{4}$ T = tingkat ketersediaan arsip a = tase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = tase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = tase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = tase arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	75,09	75,2	75,3	75,4	75,5	75,6	75,6	Disperpusk a
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Indeks	$T = \frac{(m+b+g+a+c+i)}{6}$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK	21,85	22	22,2	22,4	22,6	22,8	22,8	Disperpusk a

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat								

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			tertutup dengan NSPK								
	Urusan Pilihan										
1	Kelautan dan Perikanan										
	Indeks tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan yang dilaksanakan	Indeks	nilai rata-rata Indeks semua pelayanan yang dilaksanakan	84	84	84	84,5	85	85,5	85,5	Dislutkann ak
	Kontribusi sektor Perikanan dan Peternakan terhadap PDRB ADHK	%	data dari bps (dirilis setiap bulan februari)	21,54	21,6	21,78	21,9	21,95	22	22	Dislutkann ak
	Persentase Capaian Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	%	Capaian produksi perikanan tangkap ditambah perikanan budidaya pada tahun n : target produksi perikanan tangkap ditambah target produksi perikanan budidaya x 100	81	85	95,5	93,3	97	97,7	97,7	Dislutkann ak
	Persentase Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan	%	Capaian tingkat konsumsi makan ikan pada tahun n : target tingkat	90	95	95	96	98	100	100	Dislutkann ak

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			konsumsi makan ikan x 100								
	Capaian Bina Kelompok Masyarakat Pengawas	%	(Realisasi Jumlah Pokmaswas yang Diberdayakan : Target) x 100	25	80	100	100	100	100	100	Dislutkann ak
	Persentase Capaian Tingkat konsumsi makan ikan	%	(Realisasi Capaian Tingkat Konsumsi Makan Ikan : Target Tingkat Konsumsi Makan Ikan) x 100	0	95	95	96	98	100	100	Dislutkann ak
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82	Dislutkann ak
2	Pariwisata										
	Persentase Peningkatan kunjungan Wisatawan	%	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1 : Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100	15	17	19	21	23	25	25	Disparpora
	Persentase peningkatan pendapatan sektor pariwisata	%	(Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n dikurangi Jumlah pendapatan sektor pariwisata tahun n-1 : Jumlah pendapatan	5	8	8	10	15	20	20	Disparpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			sektor pariwisata tahun n-1 x 100								
	Persentase inovasi ekonomi kreatif	%	(jumlah inovasi produk ekonomi kreatif : jumlah produk ekonomi kreatif/kajian yang dilaksanakan) x 100	5	7	8	10	12	15	15	Disparpora
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67	68	70	71	72	72	73	Disparpora
	Persentase jumlah ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	%	jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI : jumlah produk ekonomi kreatif yang terdaftar X 100	0	10	15	20	25	30	30	Disparpora
	Persentase SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat	%	Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat : Jumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif X 100	0	25	30	35	40	45	45	Disparpora

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	Disparpora
3	Pertanian										
	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	%	jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian : Jumlah PDRB x 100	20,36	24,73	24,75	24,76	24,77	24,78	24,78	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	%	Jumlah produksi pertanian (Pangan, Horti da Perkebunan) per hektar per tahun : luas panen x 100	0,012	0,0104	0,0104	0,0103	0,0108	0,0109	0,0109	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Produksi Hasil Ternak (Daging, Telur dan Susu)	%	Capaian produksi tahun n : target produksi tahun n x 100	60	80	85	87	90	94	94	Dislutkann ak
	Persentase Hewan / Ternak yang Terobati	%	Capaian hewan ternak terobati pada tahun berjalan : target capaian hewan ternak terobati x 100	85	100	100	100	100	100	100	Dislutkann ak
	Capaian Jumlah Hewan yang Terobati	%	(Realisasi Jumlah Hewan yang Terobati di Puskesmas : Target Hewan yang Terobati di Puskesmas) x 100	85	100	100	100	100	100	100	Dislutkann ak

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkann ak
	Persentase Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan	%	(Realisasi Jumlah Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau dan Calon/Penerima (Orang/Perusahaan) Pendampingan Perizinan Usaha Peternakan : Target) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Dislutkann ak
	Persentase kenaikan kualitas dan kapasitas SDM Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian	%	jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha Bidang Pertanian yang mengikuti pelatihan : jumlah Penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di Kabupaten x 100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase validitas data Pertanian	%	jumlah kesesuaian data yang tervalidasi : jumlah kesesuaian data yang ada x 100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase kenaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Penyuluhan	%	jumlah data laporan yang tersedia : jumlah BPP x 100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun	%	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun : luas panen X 100	0,012	0,0104	0,0104	0,0103	0,0108	0,0106	0,0106	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	%	realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian : rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian X 100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	%	(jumlah daerah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian : jumlah seluruh daerah yang terkena bencana pertanian)*100	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
4	Perdagangan										
	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Perdagangan	%	Data BPS	12,12	12,22	12,36	12,75	13,24	13,36	13,36	Disperindag kop dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	64	65	66	67	68	68	68	Disperindag kop dan UKM
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	79	80	81	82	83	83	Disperindag kop dan UKM
	Persentase Verifikasi Teknis	%	Jumlah verifikasi teknis : Jumlah yang pengajuan x100	6	100	100	100	100	100	100	Disperindag kop dan UKM
	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL yang direvitalisasi/reno vasi : jumlah pasar rakyat dan Shelter PKL keseluruhan x 100	27,27	72,73	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36	Disperindag kop dan UKM
	Persentase barang kebutuhan pokok yang stabilitas harganya terjaga	%	barang pokok yang stabil harganya : seluruh barang kebutuhan pokok x100	NA	NA	75	75	75	75	75	Disperindag kop dan UKM
	nilai ekspor perdagangan	USD	nilai ekspor perdagangan -nilai impor pada tahun n kabupaten kota	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	Disperindag kop dan UKM
	Persentase alat2 ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertera / tera ulang : Potensi UTTP x 100	66,8	74,74	75	75	75	75	75	Disperindag kop dan UKM

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Presentase Pelaksanaan Pameran dagang dalam negeri di Kabupaten Batang	%	Jumlah Pelaksanaan pameran : jumlah pameran yang direncanakan x 100	0	100	100	100	100	100	100	Disperindag kop dan UKM
5	Perindustrian										
	Persentase peningkatan jumlah pelaku IKM	%	jumlah pelaku IKM tahun n- jumlah pelaku IKM tahun n-1) : jumlah pelaku IKM tahun n-1 x 100	0,01	0,01	0,78	0,78	0,79	0,8	3,15	Disperindag kop dan UKM
	Persentase peningkatan jumlah perijinan berusaha sektor industri	%	jumlah izin usaha tahun n- jumlah izin usaha tahun n-1) : jumlah izin usaha tahun n-1 x 100	63	80	82	84	86	88	88	Disperindag kop dan UKM
	Persentase jumlah Industri dalam SIINas	%	jumlah Industri dalam SIINas tahun n- jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1) : jumlah Industri dalam SIINas tahun n-1 x 100	78,125	80	82	84	86	88	88	Disperindag kop dan UKM
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan										
1	Sekretariat Daerah										
	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP B	%	Jumlah PD yang mendapat nilai B : jumlah PD yang ada x 100	70	80	85	90	95	100	100	Sekretariat Daerah

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Pelaksanaan APBD pada SKPD yang sesuai target	%	Jumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan : Jumlah seluruh paket pekerjaan yang direncanakan x 100	81	90	95	96	97	98	98	Sekretariat Daerah
	Persentase lelang melalui e-procurement	%	Jumlah Paket yang dilelang : Jumlah Total Rencana Paket Lelang x 100	49,49	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
	Tingkat kematangan organisasi perangkat Daerah (KOPD)	skor	Total nilai kematangan PD : jumlah PD	22,18 (rendah)	28,1 (sedang)	29,01 (sedang)	32 (sedang)	36 (sedang)	48 (tinggi)	48 (tinggi)	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	%	Jumlah PD yang mendapat telah menerapkan SOP : jumlah PD x 100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kegiatan keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi Kepala Daerah	%	Jumlah kegiatan pimpinan yang terfasilitasi : jumlah permohonan fasilitasi kegiatan pimpinan x 100	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
	Persentase kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpenuhi	%	Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan dan operasional KDH dan WKDH, Fasilitasi	85	80	90	90	90	90	90	Sekretariat Daerah

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			yang dihasilkan x 100								
	Persentase ketersediaan data dan informasi sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan daerah	%	jumlah elemen data/informasi yang tersedia : jumlah elemen data/informasi yang dibutuhkan sebagai bahan analisis x100	100	100	100	100	100	100	100	Bapelitbang
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang PSDA yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PSDA) x 100	0	0	90	90,5	91	92	92	Bapelitbang
	Persentase indikator program priroitas pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. PPM) x 100	75	85	90	90,5	91	92	92	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase indikator program prioritas pembangunan bidang IPW yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup koord bid. IPW) x 100	0	0	90	90,5	91	92	92	Bapelitbang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60.20.00	61.51.00	62.00.00	62.50.00	63.00.00	63.50.00	63.50.00	Bapelitbang
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87	87,2	87,5	87,7	87,8	88	88	Bapelitbang
2	Keuangan										
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	status	OPINI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
	Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan	%	(Jumlah OPD yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP / jumlah total OPD) x 100	100	100	100	100	100	100	100	BPKPAD
	Presentase peningkatan pendapatan daerah	%	[(Realisasi Pendapatan Daerah tahun n)-(Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1)] : (Realisasi Pendapatan Daerah Tahun n-1) x 100	0,179167	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	BPKPAD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Peningkatan PAD	%	$[(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1)] / (\text{Realisasi PAD Tahun } n-1) \times 100$	4,59	10	1,02	2,03	1,36	2,25	2,25	BPKPAD
	Penyampaian Raperda APBD tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase tersusunnya data aset Pemda menurut lokasi, legalitas kepemilikan, pemanfaatan dan kondisinya	%	Dokumen KIB per SKPD se Kabupaten Batang	100	100	100	100	100	100	100	BPKPAD
	Penyampaian Raperda Pertanggungjawab an tepat waktu	status	Tepat waktu/tidak tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	BPKPAD
	Persentase Realisasi serapan belanja terhadap anggaran belanja	%	realisasi belanja : anggaran belanja x 100	92,5	92,5	90	90	90	90	90	BPKPAD
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62	63	64	64	64,5	65	65	BPKPAD
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	BPKPAD
3	Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan										
	Nilai Sistem Merit	Skor	(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)	NA	165	175	200	225	250	250	BKD

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	%	(jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat yang mencapai target : jumlah indikator program prioritas PD lingkup sub koordinator diklat)x100	100	100	100	100	100	100	100	BKD
4	Penelitian dan Pengembangan										
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	ISP+rata-rata ISI	46.84	50.00.00	55.00.00	60.10.00	63.00.00	65.00.00	65.00.00	Bapelitbang
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	(Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan : Jumlah total hasil kelitbangan) x 100	NA	NA	100	100	100	100	100	Bapelitbang
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	(Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah : jumlah total perangkat daerah) x 100	70	80	100	100	100	100	100	Bapelitbang
	Persentase rekomendasi hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	(Jumlah rekomendasi utama kegiatan kelitbangan yg mjd bahan masukan penyusunan renja : Kegiatan kelitbangan yang	30	40	50	55	60	65	65	Bapelitbang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			dilaksanakan) x100								
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
1	Pengawasan										
	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	%	Jumlah laporan hasil pengawasan yang sudah ditindaklanjuti : jumlah laporan hasil pengawasan x 100	80	80	80	85	85	85	85	Inspektorat Daerah
	Persentase pencapaian peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	%	pencapaian nilai kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya x 100	80	80	80	85	85	85	85	Inspektorat Daerah
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	jumlah laporan pengaduan masyarakat yg terselesaikan : jumlah laporan pengaduan masyarakat tahun berjalan x 100	80	80	80	85	85	85	85	Inspektorat Daerah

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Jumlah Pemeriksaan Yang Dilakukan	%	Jumlah LHP yang diterbitkan dibandingkan jumlah obrik x 100	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
	Level SPIP	level	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	3	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah
	Persentase kapabilitas APIP	%	kondisi tahun berjalan dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya dalam satu tahun anggaran	63	65	68	70	70	70	70	Inspektorat Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	88,25	88,5	88,75	89,15	89,5	89,5	Inspektorat Daerah
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	78	79	80	81	82	82	Inspektorat Daerah
	Unsur Kewilayahan										
1	Kecamatan Batang										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	NA	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Batang
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	30	40	45	50	60	70	70	Kecamatan Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	80	90	95	100	100	Kecamatan Batang
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	30	40	45	50	60	70	70	Kecamatan Batang
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Batang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	62	63	65	65	Kecamatan Batang
	Persentase usulan perencanaan pembangunan yang masuk dalam prioritas atau perankingan	%	(Usulan yang masuk perankingan : Jumlah Usulan Perencanaan) x 100	80	100	75	75	100	100	100	Kecamatan Batang
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Batang
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	NA	100	100	100	100	100	Kecamatan Batang

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Gangguan Trantibum) x 100								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	62	63	65	65	Kecamatan Banyuputih
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	NA	NA	75	75	100	100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Banyuputih
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Banyuputih
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Banyuputih
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Banyuputih

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	keuangan desa yang tertib dan baik										
3	Kecamatan Bandar										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Bandar
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	29,41	35,29	35,29	41,18	41,18	41,18	41,18	Kecamatan Bandar
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,08	82,1	82,1	82,1	82,15	82,15	82,15	Kecamatan Bandar
	Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	desa	Jumlah desa dengan status maju dan mandiri	5	6	6	7	7	7	7	Kecamatan Bandar
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bandar
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	62	63	65	65	Kecamatan Bandar
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	NA	NA	75	75	100	100	100	Kecamatan Bandar

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Bandar
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bandar
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bandar
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Bandar
4	Kecamatan Bawang										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C-)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Bawang
	Presentase Status Desa Maju dan Desa	%	(jumlah Desa yang mencapai target :	40	50	60	70	80	90	90	Kecamatan Bawang

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Bawang
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Bawang
5	Kecamatan Blado										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Blado
				(C -)							
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	5,5	16,6	22,2	33,6	38,8	38,8	38,8	Kecamatan Blado
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	85	90	100	100	Kecamatan Blado
	Persentase Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	5,5	16,6	22,2	33,6	38,8	38,8	38,8	Kecamatan Blado

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Blado
6	Kecamatan Gringsing										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C-)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Gringsing
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	33,3	46,7	60	73,3	80	86,7	86,7	Kecamatan Gringsing
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.96	86.05.00	87	88	89	90	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	26,6	33,3	46,6	60	66,6	80	80	Kecamatan Gringsing
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gringsing
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63	64	65	66	67	68	68	Kecamatan Gringsing
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	NA	NA	75	75	100	100	100	Kecamatan Gringsing

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gringsing
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Gringsing
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Gringsing
7	Kecamatan Kandeman										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,23 (B)	3,25 (B)	3,30 (B)	3,30 (B)	3,50 (B)	3,50 (B)	3,50 (B)	Kecamatan Kandeman
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	40	50	60	65	70	80	80	Kecamatan Kandeman

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Kandeman
	Persentase Desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	100	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Kandeman
8	Kecamatan Limpung										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Limpung
	Persentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	23,53	35,29	47,06	58,82	70,59	82,35	82,35	Kecamatan Limpung
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	84	87	90	93	95	95	Kecamatan Limpung
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	23,53	29,41	35,29	41,18	47,06	52,94	52,94	Kecamatan Limpung

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Limpung
9	Kecamatan Pecalungan										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Pecalungan
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	40	50	60	70	80	90	90	Kecamatan Pecalungan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79	80	79	80	81	82	82	Kecamatan Pecalungan
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	45	50	60	65	70	80	80	Kecamatan Pecalungan
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pecalungan
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	65	70	75	80	80	Kecamatan Pecalungan
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75	75	100	100	100	Kecamatan Pecalungan

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Pecalungan
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pecalungan
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Pecalungan
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	80	80	85	85	90	90	90	Kecamatan Pecalungan
10	Kecamatan Reban										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Reban
	Persentase Status Desa Maju dan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa	21,05	26,31	26,31	36,84	47,36	52,63	52,63	Kecamatan Reban

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34(C-)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Tersono
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	40	50	60	70	80	90	90	Kecamatan Tersono
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,5	87	87,5	88	88,5	90	90	Kecamatan Tersono
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50	60	65	70	75	80	80	Kecamatan Tersono
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tersono
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	60	60	62	63	65	65	Kecamatan Tersono
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75	75	100	100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Tersono

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tersono
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik : jumlah acara) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Tersono
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	80	80	85	85	90	90	90	Kecamatan Tersono
13	Kecamatan Tulis										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	3,55 (SB)	3,55 (SB)	3,57 (SB)	3,57 (SB)	3,80 (SB)	3,80 (SB)	3,80 (SB)	Kecamatan Tulis
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	50	50	70	70	70	80	80	Kecamatan Tulis
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,7	88,7	89	89	95	95	95	Kecamatan Tulis

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			jumlah acara) x 100								
	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	%	(Jumlah desa dengan pengelolaan keuangan baik : Jumlah desa) x100	90	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Tulis
14	Kecamatan Warungasem										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Warungase m
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	40	50	60	70	80	90	90	Kecamatan Warungase m
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	85	85	90	100	100	Kecamatan Warungase m
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	80	80	85	85	85	90	90	Kecamatan Warungase m
	Presentase gangguan trantibum	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan :	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Warungase m

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	yang dapat diselesaikan		Gangguan Trantibum) x 100								
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	85	85	Kecamatan Warungase m
	Persentase pelayanan PATEN yang sesuai SOP	%	(Pelayanan PATEN yang sesuai SOP : Jumlah Pelayanan PATEN) x 100	Na	Na	75	75	100	100	100	Kecamatan Warungase m
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang Aktif	%	(Jumlah LKD Aktif : Jumlah LKD) x 100 LKD terdiri atas LPM, PKK, Karang Taruna, Posyandu, RT, RW	100	100	85	90	90	90	90	Kecamatan Warungase m
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Warungase m
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	90	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Warungase m
	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan baik	%	(Jumlah acara yang dilaksanakan dalam rangka hari besar nasional, bintek wasbang, dan rakor forkompimcam dengan baik :	100	100	85	85	90	90	90	Kecamatan Warungase m

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			jumlah acara) x 100								
15	Kecamatan Wonotunggal										
	Skor Evaluasi Unit Pelayanan Publik	Indeks	Nilai kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik	2,34 (C -)	2,34 (C -)	2,60 (C)	2,80 (C)	3,01 (B)	3,20 (B)	3,20 (B)	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase Status Desa Maju dan Desa Mandiri di Kecamatan	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	13,3	20	20	33,3	33,3	40	40	Kecamatan Wonotunggal
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	Kecamatan Wonotunggal
	Persentase Jumlah Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Mandiri tiap tahun	%	(Jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri : Jumlah Desa) x 100	13,3	26,6	33,3	40	46,6	53,3	53,3	Kecamatan Wonotunggal
	Presentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	(Gangguan Trantibum yang terselesaikan : Gangguan Trantibum) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Wonotunggal
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	skor	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	60	65	70	75	80	85	85	Kecamatan Wonotunggal

[illegible]

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Indeks Kerukunan	%	Dilakukan Survey (Toleransi+Kesetaraan+Kerjasama) : 3×100	NA	NA	70	75	80	90	90	Bakesbang pol
	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Skor	Nilai hasil evaluasi mplementasi SAKIP oleh Kemenpan RB	63,6	70	71	71,5	72	72,5	72,5	Bakesbang pol
	Persentase demo tertangani	%	(jumlah demo tertangani : jumlah demo yang ada) * 100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbang pol
	Persentase potensi gangguan/konflik sosial keagamaan yang teratasi	%	(jumlah konflik sosial tahun berkenaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) * 100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbang pol
	Persentase masyarakat yang mengamalkan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang bagus	%	(Jumlah masyarakat yang telah mendapat Sosialisasi wasbang yang mengamalkan ideologi dan karakter bangsa yang bagus : jumlah masyarakat yang telah mengikuti sosialisasi wasbang) x 100	100	90	95	95	95	95	95	Bakesbang pol

No.	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Stn	Formulasi Perhitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD		Target Capaian Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	Perangkat Daerah
				2021	2022*	2023	2024	2025	2026		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan yang berperan aktif mendukung Pemerintah	%	(Jumlah Parpol dan Lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam mendukung pemerintah : jumlah parpol dan lembaga pendidikan dibatang) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbang pol
	Persentase Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	%	(Jumlah Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan : Jumlah Ormas yang terdaftar resmi) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbang pol
	Persentase masyarakat yang paham tentang ketahanan Ekososbud	%	(Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan paham terhadap ketahanan Ekosbud : jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi) x 100 (Melalui Pretest dan postest)	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbang pol
	Persentase penurunan konflik sosial	%	(Jumlah konflik sosial tahun berkenaaan : jumlah konflik sosial tahun sebelumnya) x 100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbang pol

Sumber : Bapelitbang Kab. Batang, 2022

BAB IX PENUTUP

RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran tahapan keempat RPJPD Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025 untuk terwujudnya Batang yang sejahtera, maju, mantap, dan mandiri berbasis potensi unggulan serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPD ini dapat diwujudkan dengan baik dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPD diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan dengan periodisasi yang bersamaan dengan RPD 2023-2026. Adapun pelaksanaan tahunan dilakukan 4 (empat) tahapan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPD Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 berakhir. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan daerah maka pedoman transisi ditetapkan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2027 dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN, arah kebijakan dan sasaran pokok dari RPJPD Kabupaten Batang periode selanjutnya.

Dokumen RKPD Tahun 2027 tersebut menjadi satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas

dari RPJMD Kabupaten Batang periode selanjutnya. RKPD dimaksud dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD Kabupaten Batang tahun Anggaran 2027.

Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPD Kabupaten Batang Tahun 2023 – 2026 menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten Batang dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Batang.

BUPATI BATANG

Dr. WIHAJI, S.Ag.,M.Pd.